BUKU WAKAF
Open Access

Dr. H. Gunawan Undang, M.Si.

TEORI ILMU SOSIAL

Klasik dan Modern di Era Digital

UNFARI PRESS

Dr. H. Gunawan Undang, M.Si.

TEORI ILMU SOSIAL

Klasik dan Modern di Era Digital

UNFARI PRESS

Teori Ilmu Sosial: Klasik dan Modern di Era Digital

Penulis: Dr. H. Gunawan Undang, M.Si.

Cover & Layout: Unfari Press

Cetakan Pertama, Maret 2025
xii + 524 hlm.; 15,5 cm x 23 cm
Glosarium: hlm. 505
Indeks: hlm. 513

ISBN: xx-xx-xxxxxx-x-x [Perpusnas RI]

Diterbitkan oleh: Unfari Press (Anggota IKAPI)
Jalan Cisaranten Kulon No. 140, Kota Bandung 40293
https://unfaripress.unfari.id/
Email: unfaripress01@gmail.com

Anggota IKAPI: 477/Anggota Luar Biasa/JBA/2024

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.

BUKU WAKAF: tidak diperjualbelikan, *open access*, bebas mengunduh, membaca, dan mencetak tanpa biaya dengan tetap mencantumkan atribusi kepada penerbit dan penulis serta tidak menggunakannya untuk tujuan komersial.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Dr. H. Gunawan Undang, M.Si.
Teori Ilmu Sosial: Klasik dan Modern di Era Digital/Penyusun, Gunawan Undang, - Cet. 1 – Bandung: Unfari Press, 2025
xii + 522 hlm.; 15,5 cm x 23 cm
1. Ilmu Sosial I. Judul II. Perpustakaan Nasional

PENGANTAR PENULIS

Buku yang kini berada di hadapan pembaca, lahir dari pergulatan intelektual panjang sebagai pengajar ilmu sosial di Indonesia. Pertanyaan mahasiswa tentang relevansi teori-teori klasik dalam mengurai fenomena kontemporer—media sosial, ekonomi digital, hingga demokratisasi virtual—senantiasa mengingatkan saya akan urgensi sebuah jembatan epistemologis antara warisan pemikiran klasik dan kompleksitas era digital yang kita hadapi. Konsep dan arsitektur buku ini sejatinya telah dirancang sejak penyelesaian studi doktoral saya pada 2006, merefleksikan proses pematangan pemikiran dan pendalaman riset selama hampir dua dekade. Kendati target penyelesaian pada 2024—sebagai wujud komitmen "satu tahun, satu buku"—mengalami penundaan akibat dinamika kehidupan akademis, penerbitan pada awal 2025 justru menghadirkan substansi yang lebih matang dan komprehensif seiring berkembangnya ilmu-ilmu sosial diera digital dan *artificial intelligence* (AI).

Teori Ilmu Sosial: Klasik dan Modern di Era Digital merupakan upaya menyajikan panorama teoretis ilmu sosial secara menyeluruh—dari lanskap intelektual pendiri sosiologi seperti Marx, Durkheim, dan Weber, hingga perspektif kontemporer mengenai globalisasi, gender, dan transformasi digital. Lebih dari sekadar inventarisasi teoretis, buku ini berusaha menjelaskankan vitalitas berbagai perspektif dalam memahami kompleksitas masyarakat Indonesia dan global di abad ke-21.

Kekhasan buku ini terletak pada integrasi konsisten konteks Indonesia dalam setiap diskursus teoretis. Saya meyakini bahwa teori sosial tidak dapat diperlakukan sebagai produk impor yang diaplikasikan secara mekanis, melainkan mesti didialogkan dengan realitas lokal yang kaya dan plural. Dari konsep gotong royong yang dibedah melalui lensa Durkheim, Program Keluarga Harapan yang dikaji dengan perspektif Marxis, hingga fenomena media sosial yang dipahami lewat teori jaringan—setiap bab menghadirkan ilustrasi konkret bagaimana teori sosial dapat mencerahkan pemahaman kita tentang Indonesia kontemporer.

Buku ini ditujukan terutama bagi mahasiswa S1 dan S2 ilmu sosial, peneliti muda, serta khalayak yang berminat memahami dinamika sosial dengan kerangka teoretis yang kokoh. Saya berupaya menghadirkan gagasan

kompleks dengan bahasa aksesibel tanpa mengorbankan kedalaman akademis. Setiap bab dilengkapi referensi komprehensif, termasuk sumber-sumber Indonesia yang kerap terpinggirkan dalam literatur teori sosial global.

Buku wakaf yang ketiga ini – dalam bentuk *open access books* versi pdf – kami persembahkan untuk siapa saja yang memerlukan – mahasiswa, akademisi, perpustakaan, IKAPI, dll. - dengan tujuan mengembangkan keilmuan sosial dan **tidak bertujuan untuk dikomersilkan**. Dua buku wakaf sebelumnya yang diterbitkan Unfari Press adalah *"Administrasi Keuangan Negara: Kebijakan Anggaran Negara dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah"* (2022) – kerjasama Unfari Press dengan Galeripadi dan buku monografi *"ID-StM Framework & Pracyf: Model Analisis Disparitas Kebijakan Sosial dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah"* (2023). Insya Allah akan menyusul buku wakaf berikutnya *"Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara"*; *"Metode Penelitian Sosial: Teori dan Praktik di Era Digital"*; *Kebijakan Sosial dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Teori dan Praktek Lintas Negara di Era Digital; "Jawa Barat Selatan yang Terabaikan: "Jamparing" Kuring Nyarapat ka Jomantara",* dll. Buku-buku tersebut dalam proses finalisasi naskah. Mohon do'a restu dari sidang pembaca sekalian.

Tidak ada satu karya pun yang mampu merangkum seluruh kekayaan teori ilmu sosial. Namun saya berharap buku ini dapat menjadi portal bagi pembaca untuk mendalami pemikiran sosial lebih lanjut, sekaligus menyediakan fondasi yang solid untuk mengembangkan perspektif teoretis yang sensitif konteks Indonesia sambil tetap terhubung dengan diskursus global.

Bandung, Maret 2025

Dr. H. Gunawan Undang, M.Si.

PENGANTAR PENERBIT

Universitas Al Ghifari Press (Unfari Press) dengan penuh kebanggaan mempersembahkan ***Teori Ilmu Sosial: Klasik dan Modern di Era Digital***, karya monumental Dr. H. Gunawan Undang, Drs., M.Si. Buku wakaf ini - dalam bentuk *open access books* versi pdf – merupakan publikasi buku wakaf ketiga dari penulis yang kami terbitkan, melanjutkan jejak dua karya sebelumnya: *Buku Monografi ID-StM Framework & PRACYF: Model Analisis Disparitas Kebijakan Sosial dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah* (2023), dan *Administrasi Keuangan Negara: Kebijakan Anggaran Negara dalam Penyelenggaraan Otonomo Daerah* (2022) – kerjasama dengan Galeripadi - telah memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan literatur ilmu sosial berbahasa Indonesia.

Sebagai penerbit akademis yang berada di bawah naungan Universitas Al Ghifari—institusi yang dirintis langsung oleh penulis bersama sahabat-sahabatnya pada 2002—Unfari Press memiliki komitmen kuat untuk menerbitkan karya-karya berkualitas yang tidak hanya memenuhi standar akademis internasional, tetapi juga menjawab kebutuhan kontekstual masyarakat Indonesia. Kehadiran buku ini sejalan dengan visi kami untuk menjadi pusat diseminasi pengetahuan yang menjembatani teori global dengan realitas lokal.

Buku yang berada di hadapan pembaca ini merepresentasikan karya matang dari perjalanan intelektual panjang seorang akademisi yang telah mengabdikan hampir empat dekade hidupnya untuk dunia pendidikan dan riset. Konsep yang dirancang sejak 2006 dan diperkaya melalui pengalaman mengajar di berbagai institusi pendidikan tinggi, menjadikan karya ini bukan sekadar kompilasi teori, melainkan sintesis pemikiran yang telah teruji dalam praksis akademis.

Dalam lanskap literatur ilmu sosial Indonesia yang masih didominasi oleh terjemahan atau adopsi langsung teori Barat, buku ini hadir sebagai upaya serius untuk menghadirkan diskursus teoretis yang dialogis. Penulis tidak sekadar mengimpor teori, melainkan mendialogkannya dengan fenomena sosial Indonesia—dari gotong royong, Program Keluarga Harapan, hingga

dinamika media sosial—sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual dan relevan.

Sebagai penerbit, kami meyakini bahwa karya ini akan menjadi referensi penting bagi mahasiswa S1 dan S2 ilmu sosial, dosen, peneliti, serta praktisi yang memerlukan kerangka teoretis solid untuk memahami kompleksitas masyarakat kontemporer. Cakupan yang komprehensif—dari teori klasik Marx, Durkheim, dan Weber hingga perspektif kontemporer tentang globalisasi, gender, dan transformasi digital—menjadikan buku ini sebagai panduan lengkap dalam memahami evolusi pemikiran ilmu sosial.

Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penerbitan buku ini, termasuk tim editor, desainer, dan seluruh sivitas akademika Universitas Al Ghifari yang telah memberikan lingkungan intelektual kondusif bagi lahirnya karya-karya berkualitas. Kepada pembaca, kami mengharapkan buku ini tidak hanya dibaca, tetapi juga menjadi instrumen untuk berpikir kritis dan menghasilkan penelitian-penelitian yang bermakna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat Indonesia.

Bandung, Maret 2025

Unfari Press

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS …iii
PENGANTAR PENERBIT … v
DAFTAR ISI … vii

BAGIAN I: FONDASI ILMU SOSIAL … 1
BAB 1: PENGANTAR ILMU SOSIAL … 1
1.1 Definisi dan Ruang Lingkup Ilmu Sosial … 2
1.2 Perbedaan Ilmu Sosial dengan Ilmu Alam … 5
1.3 Sejarah Perkembangan Ilmu Sosial … 9
1.4 Paradigma dalam Ilmu Sosial … 14
1.5 Metodologi Penelitian Sosial … 19
Kesimpulan … 27
Referensi Bab 1 … 29

BAB 2: AKAR FILOSOFIS TEORI SOSIAL … 31
2.1 Filsafat sebagai Induk Semua Ilmu … 32
2.2 Tradisi Epistemologis Besar dalam Filsafat … 37
2.3 Gerakan Pencerahan dan Kelahiran Ilmu Sosial … 41
2.4 Aliran-Aliran Filosofis Pembentuk Teori Sosial … 45
2.5 Hubungan Antara Filsafat, Teori, dan Metode … 54
2.6 Sintesis: Dari Filsafat ke Ilmu Sosial Modern … 60
Kesimpulan … 68
Referensi Bab 2 … 70

BAB 3: HIERARKI TEORI DALAM ILMU SOSIAL … 75
3.1 Konsep Hierarki Teori: Latar Belakang dan Pentingnya Ilmu Sosial … 77
3.2 *Grand Theory … 81*
3.3 *Middle Range Theory … 92*
3.4 *Applied Theory* … 101

3.4.3 Metodologi Penelitian Terapan … 116
3.5 Dialektika Antar-Level Teori … 119
Kesimpulan … 123
Referensi Bab 3 … 126

BAGIAN II: TEORI SOSIAL KLASIK … 129
BAB 4: KARL MARX DAN MATERIALISME HISTORIS ... 129
4.1 Biografi Intelektual Marx … 131
4.2 Teori Alienasi … 135
4.3 Materialisme Historis dan Dialektis … 140
4.6 Warisan dan Pengaruh Marx … 144
Kesimpulan … 149
Referensi Bab 4 … 151

BAB 5 ÉMILE DURKHEIM DAN SOSIOLOGI FUNGSIONAL … 155
5.1 Kehidupan dan Karya Durkheim … 156
5.2 Solidaritas Mekanik vs Organik … 160
5.3 Teori Tentang Bunuh Diri … 166
5.4 Fakta Sosial dan Metode Sosiologi … 172
5.5 Agama dan Masyarakat … 177
5.6 Kontribusi Terhadap Sosiologi Modern … 183
Kesimpulan … 189
Referensi Bab 5 … 192

BAB 6 MAX WEBER DAN SOSIOLOGI INTERPRETATIF 195
6.1 Biografi Intelektual Weber … 197
6.2 Metodologi Sosiologi Interpretatif … 200
6.3 Tipologi Otoritas … 203
6.4 Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme … 205
6.5 Rasionalisasi dan Birokratisasi … 208
6.6 Warisan dan Pengaruh Weber … 212
Kesimpulan … 214
Referensi Bab 6 … 216

BAGIAN III TRANSISI DAN PERKEMBANGAN AWAL ABAD KE-20 … 219
BAB 7 GEORG SIMMEL DAN TRANSISI AWAL ABAD 20 ... 2019
7.1 Sosiologi Formal dan Metode Analisis … 221
7.2 Konflik, Kompetisi, dan Dinamika Sosial … 225
7.3 Filosofi Uang dan Masyarakat Modern … 230
7.4 Individualitas dan Masyarakat Massa … 236
7.5 Pengaruh terhadap Sosiologi Mikro … 241
7.6 Transisi Menuju Sosiologi Modern … 246
Kesimpulan … 250
Referensi Bab 7 … 252

BAB 8 TEORI SISTEM DAN FUNGSIONALISME STRUKTURAL … 253
8.1 Talcott Parsons dan Teori Sistem … 254
8.2 Robert K. Merton dan *Middle Range Theory* … 260
8.3 Fungsi Manifes dan Laten dalam Institusi Indonesia … 266
8.4 Kritik terhadap Fungsionalisme … 271
8.5 Warisan Fungsionalisme dalam Sosiologi Kontemporer … 275
Kesimpulan … 280
Referensi Bab 8 … 281

BAB 9 MAZHAB CHICAGO DAN INTERAKSIONISME SIMBOLIK 283
9.1 Sejarah dan Konteks Mazhab Chicago … 283
9.2 George Herbert Mead dan Teori Pembentukan Diri … 285
9.3 Herbert Blumer dan Prinsip Interaksionisme Simbolik … 287
9.4 Erving Goffman dan Dramaturgi Sosial … 289
9.5 Harold Garfinkel dan Etnometodologi … 290
9.6 Warisan dan Relevansi Kontemporer … 292
Referensi Bab 9 … 293

BAGIAN IV TEORI SOSIAL KONTEMPORER … 295
BAB 10 TEORI KONFLIK DAN NEO-MARXISME … 295
10.1 C. Wright Mills dan Imajinasi Sosiologis … 296
10.2 Mazhab Frankfurt dan Teori Kritis … 298
10.3 Jürgen Habermas dan Teori Tindakan Komunikatif … 301
10.4 Antonio Gramsci dan Hegemoni … 303

10.5 Ralf Dahrendorf dan Teori Konflik Struktural … 305
10.6 Relevansi Teori Konflik dalam Konteks Indonesia Kontemporer … 307
10.7 Warisan dan Kritik terhadap Teori Konflik … 310
Referensi Bab 10 … 311

BAB 11 STRUKTURALISME HINGGA STRUKTURASI … 313
11.1 Strukturalisme dan Post-Strukturalisme … 314
11.2 Teori Strukturasi dan Sintesis Mikro-Makro … 320
11.3 Relevansi untuk Konteks Indonesia Kontemporer … 326
Referensi Bab 11 … 328

BAB 12 FEMINISME DAN TEORI GENDER … 331
12.1 Gelombang Feminisme dalam Teori Sosial … 332
12.2 Kontribusi Teoretis Feminis Kunci … 335
12.3 Judith Butler dan Performativitas Gender … 339
12.4 Teori Queer dan Kritik Heteronormativitas … 342
12.5 Relevansi untuk Konteks Indonesia Kontemporer … 345
Referensi Bab 12 … 349

BAB 13 POSTMODERNISME DAN TEORI KRITIS KONTEMPORER … 351
13.1 Jean Baudrillard dan Simulakra … 352
13.2 Jean-François Lyotard dan Kondisi Postmodern … 355
13.3 Zygmunt Bauman dan Modernitas Cair … 358
13.4 Ulrich Beck dan Masyarakat Risiko … 360
13.5 Teori Kritis Kontemporer … 363
13.6 Kritik terhadap Modernitas … 366
Referensi Bab 13 … 369

BAB 14 GLOBALISASI DAN ERA DIGITAL … 371
14.1 Konsep Dasar Globalisasi … 372
14.2 Mobilitas Global … 375
14.3 Globalisasi Ekonomi dan Ketimpangan … 378
14.4 Transformasi Komunikasi dan Interaksi Sosial … 380
14.5 Ekonomi Perhatian dan Kapitalisme Data … 382
14.6 Politik Digital dan Ruang Publik Daring … 384

14.7 Homogenisasi Versus Hibridisasi Budaya … 387
14.8 Identitas, Konsumerisme, dan Gaya Hidup Global … 388
14.9 Budaya Populer dan Kekuatan Lunak … 390
14.10 Kota Global dan Urbanisasi di Dunia Berkembang … 391
14.11 Ruang, Mobilitas, dan Kontrol … 393
14.12 Krisis Lingkungan dan Globalisasi Berkelanjutan … 394
14.13 Ketimpangan, Keadilan, dan Inklusi Digital … 396
14.14 Masa Depan: Antara Distopia dan Utopia Digital … 397
14.15 Ekonomi Berbasis Aplikasi: Gojek, Grab, dan Transformasi Mobilitas Urban … 400
14.16 Jejaring Sosial Dan Politik: Dari Reformasi Hingga Polarisasi … 401
14.17 Perdagangan Elektronik dan Transformasi Ritel … 403
14.18 Budaya Tokoh Berpengaruh dan Ekonomi Kreator Digital … 404
14.19 Rekapitulasi Konsep Kunci … 405
14.20 Paradoks dan Kontradiksi Era Digital … 406
14.21 Pertanyaan Normatif: Masyarakat yang Bagaimana? … 407
Kesimpulan … 408
Referensi Bab 14 … 409

BAB 15 TEORI DEKOLONIAL DAN EPISTEMOLOGI SELATAN … 415
15.1 Dari Postkolonial Menuju Dekolonial … 416
15.2 Konsep Kunci Teori Dekolonial … 421
15.3 Epistemologi Selatan … 426
15.4 Implikasi untuk Ilmu Sosial Indonesia … 430
Kesimpulan … 436
Referensi Bab 15 … 438

BAGIAN V SINTESIS DAN APLIKASI … 441
BAB 16 DIALOG ANTAR-PARADIGMA DALAM TEORI SOSIAL … 441
16.1 Perdebatan Agensi Versus Struktur … 442
16.2 Perdebatan Mikro Versus Makro … 445
16.3 Perdebatan Objektivitas Versus Subjektivitas … 448
16.4 Perdebatan Universalisme Versus Partikularisme … 451
16.5 Sintesis dan Jembatan Teoretis … 454
Kesimpulan … 458

Referensi Bab 16 … 459

BAB 17 APLIKASI TEORI SOSIAL DALAM PENELITIAN … 461
17.1 Dari Teori Ke Hipotesis … 462
17.2 Operasionalisasi Konsep Teoretis … 465
17.3 Studi Kasus Aplikasi Teori … 468
17.4 Triangulasi Teoretis … 472
17.5 Evaluasi dan Kritik Teori Berdasarkan Temuan Empiris … 476
Kesimpulan … 480
Referensi Bab 17 … 481

BAB 18 MASA DEPAN TEORI SOSIAL … 483
18.1 Tantangan Teoretis Kontemporer … 484
18.2 Isu-Isu Emerging: AI, Iklim, dan Pandemi … 487
18.3 Teori Sosial dan Kebijakan Publik … 491
18.4 Integrasi Disiplin Ilmu … 494
18.5 Agenda Penelitian Masa Depan … 49
Kesimpulan … 500
Referensi Bab 18 … 501

GLOSARIUM … 505
INDEKS … 513
RIWAYAT HIDUP PENULIS … 521

BAGIAN I

FONDASI ILMU SOSIAL

BAB 1

PENGANTAR ILMU SOSIAL

Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan transformasi digital yang pesat, pemahaman terhadap dinamika sosial menjadi semakin krusial bagi setiap individu yang ingin memahami kompleksitas dunia modern. Ilmu sosial, sebagai kumpulan pengetahuan yang sistematis tentang masyarakat manusia, menawarkan berbagai perspektif teoretis dan metodologis untuk menganalisis fenomena sosial yang terus berkembang (Giddens, 2009). Bagi mahasiswa yang tengah mendalami studi sosial, pemahaman fundamental tentang hakikat, sejarah, dan metodologi ilmu sosial menjadi landasan yang tidak dapat ditawar-tawar dalam perjalanan akademik mereka.

Bab ini dirancang untuk memberikan fondasi yang menyeluruh tentang ilmu sosial sebagai disiplin akademik yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Melalui lima sub-bab yang saling terintegrasi, pembaca akan diajak dalam perjalanan intelektual yang dimulai dari Sub-bab 1.1 yang mengeksplorasi hakikat dan ruang lingkup ilmu sosial dengan penekanan khusus pada konteks perkembangannya di Indonesia. Sub-bab 1.2 akan menganalisis perbedaan fundamental antara ilmu sosial dan ilmu alam dalam aspek epistemologis, metodologis, dan kompleksitas fenomena yang dikaji. Sub-bab 1.3 akan menelusuri sejarah perkembangan ilmu sosial dari era pra-ilmiah hingga tantangan dekolonisasi epistemologis kontemporer. Sub-bab 1.4 akan mengeksplorasi empat paradigma utama dalam ilmu sosial - positivis, interpretivis, kritis, dan konstruktivis - beserta aplikasinya dalam konteks penelitian Indonesia. Terakhir, Sub-bab 1.5 akan membahas metodologi penelitian sosial dengan penekanan pada praktik penelitian di Indonesia, termasuk tantangan etis dalam era digital.

Pengintegrasian perspektif Indonesia dalam pembahasan ini bukan sekadar tambahan geografis, melainkan bagian integral yang menunjukkan bagaimana ilmu sosial berkembang dan diterapkan dalam konteks Nusantara yang kaya akan keragaman budaya dan dinamika sosial yang unik. Dari konsep pengindonesiaan ilmu sosial hingga studi kasus tentang gotong royong, dari analisis Program Keluarga Harapan hingga penelitian tentang komunitas *transgender* di Yogyakarta, Indonesia memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam dialog global ilmu sosial sambil mempertahankan relevansi lokal yang mendalam.

1.1 Definisi dan Ruang Lingkup Ilmu Sosial

Hakikat Ilmu Sosial

Ilmu sosial dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang masyarakat manusia, perilaku sosial, dan berbagai institusi yang membentuk kehidupan kolektif manusia (Wallace & Wolf, 2006). Berbeda dengan pengetahuan awam atau pengamatan sehari-hari yang seringkali bersifat fragmentaris dan bias oleh pengalaman personal, ilmu sosial menggunakan metodologi yang terstruktur dan teoretis untuk memahami pola-pola sosial yang kompleks dan seringkali tidak terlihat dalam observasi kasual.

Objek kajian ilmu sosial mencakup spektrum yang sangat luas, mulai dari interaksi mikro antar individu dalam kondisi sehari-hari hingga struktur makro sosial global yang mempengaruhi kehidupan miliaran manusia. Fenomena sosial yang dikaji meliputi norma dan nilai yang mengatur perilaku, sistem stratifikasi sosial yang menciptakan hierarki, dinamika konflik dan kerjasama dalam kelompok, proses perubahan sosial yang mentransformasi masyarakat, serta berbagai institusi fundamental seperti keluarga, pendidikan, agama, politik, dan ekonomi yang membentuk struktur sosial.

Karakteristik khusus fenomena sosial terletak pada sifatnya yang bermakna - artinya, tindakan sosial tidak hanya memiliki dampak kausal yang dapat diukur tetapi juga mengandung makna simbolik dan keterarahan makna *(intentionality)* bagi para aktor yang terlibat. Hal ini membedakan ilmu sosial dari ilmu alam yang mengkaji fenomena fisik yang tidak memiliki kesadaran atau kemampuan untuk merefleksikan dan menginterpretasikan tindakan mereka sendiri.

Dalam konteks Indonesia, hakikat ilmu sosial dapat dipahami melalui studi tentang sistem gotong royong masyarakat. Fenomena ini tidak dapat

dipahami hanya dari aspek ekonomis atau sosiologis, tetapi memerlukan pemahaman menyeluruh tentang nilai-nilai budaya nusantara, sistem kepercayaan yang berakar pada kosmologi masyarakat nusantara dan Islam, dan struktur sosial masyarakat pedesaan yang hierarkis namun egalitarian. Penelitian tentang gotong royong oleh Koentjaraningrat (1984) menunjukkan bagaimana ilmu sosial Indonesia mengintegrasikan perspektif antropologi, sosiologi, dan ekonomi untuk memahami fenomena sosial yang unik dalam masyarakat Nusantara.

Ruang Lingkup Interdisipliner

Ilmu sosial bukanlah disiplin tunggal yang monolitik, melainkan keluarga besar dari berbagai disiplin yang saling terkait namun memiliki fokus spesifik, metodologi yang berbeda, dan tradisi teoretis yang beragam. Sosiologi mengkaji struktur dan dinamika masyarakat secara umum dengan fokus pada institusi, stratifikasi, dan perubahan sosial. Antropologi mendalami kebudayaan dan variasi manusia dengan penekanan pada etnografi dan relativisme kultural. Ilmu politik menganalisis kekuasaan, otoritas, dan tata kelola dalam berbagai tingkatan dari lokal hingga global. Sementara ekonomi memfokuskan pada produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya serta perilaku aktor ekonomi dalam pasar (Ritzer, 2019).

Pendekatan lintas disiplin *(interdisciplinary)* adalah pendekatan yang mengintegrasikan perspektif, metode, dan kerangka teoretis dari berbagai disiplin ilmu untuk memahami fenomena kompleks yang tidak dapat dijelaskan secara utuh oleh satu disiplin saja. Dalam ilmu sosial, pendekatan ini sangat penting karena realitas sosial bersifat multidimensional dan memerlukan lensa analitis yang beragam.

Keterkaitan antar-disiplin ini bukan sekadar tumpang tindih metodologis atau topikal, melainkan mencerminkan kompleksitas ontologis realitas sosial yang tidak dapat dipahami secara utuh dari satu perspektif epistemologis saja. Misalnya, fenomena kemiskinan tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang ekonomi yang fokus pada distribusi pendapatan dan akses terhadap sumber daya, tetapi memerlukan analisis sosiologis tentang struktur kelas dan reproduksi ketimpangan, antropologis tentang kultur kemiskinan dan mekanisme adaptasi, serta politis tentang kebijakan redistributif dan dinamika kekuasaan.

Studi tentang konflik agraria di Indonesia – misalnya - menunjukkan secara konkret pentingnya pendekatan *interdisciplinary* dalam ilmu sosial. Kasus

sengketa lahan di Mesuji, Lampung, memerlukan analisis dari berbagai perspektif disipliner: geografis untuk memahami pola penggunaan lahan dan perubahan ekosistem, ekonomis untuk menganalisis struktur kepemilikan dan nilai ekonomi lahan, antropologis untuk memahami sistem adat dan kepercayaan masyarakat lokal tentang tanah, politis untuk mengkaji kebijakan pemerintah dan dinamika kekuasaan, serta hukum untuk memahami konflik legal dan pluralisme hukum. Penelitian oleh Lucas dan Warren (2013) menunjukkan bahwa penelitian tunggal dari satu disiplin tidak akan mampu menangkap kompleksitas penuh konflik tersebut.

Konteks Indonesia

Perkembangan ilmu sosial di Indonesia memiliki karakteristik unik yang mencerminkan perjalanan sejarah bangsa, dinamika politik, dan proses negosiasi antara warisan kolonial dengan aspirasi nasional. Pada masa kolonial Belanda, kajian sosial tentang Nusantara lebih banyak dilakukan oleh sarjana Belanda seperti Snouck Hurgronje yang mengkaji Islam di Aceh dengan pendekatan orientalis, atau Van Vollenhoven yang mempelajari hukum adat dengan perspektif pluralisme legal. Penelitian-penelitian ini, meskipun bernuansa kolonial dan seringkali bias, memberikan dokumentasi etnografis yang berharga tentang keragaman sosial budaya Nusantara (Rahayu, 2023).

Pengindonesiaan *(Indigenization)* adalah proses adaptasi dan kontekstualisasi ilmu sosial agar sesuai dengan realitas lokal, termasuk pengembangan konsep, teori, dan metodologi yang berakar pada pengalaman dan kearifan masyarakat setempat, tanpa kehilangan standar akademik internasional atau isolasi dari diskursus global.

Pasca kemerdekaan, ilmu sosial Indonesia mengalami proses pengindonesiaan yang kompleks dan seringkali konfliktual, berupaya mengembangkan perspektif yang lebih sesuai dengan realitas sosial Indonesia sambil mempertahankan relevansi dengan diskursus akademik global. Tokoh-tokoh seperti Selo Soemardjan dalam sosiologi dengan konsepnya tentang perubahan sosial di pedesaan, Koentjaraningrat dalam antropologi dengan metodologi penelitian budaya Indonesia, dan Miriam Budiardjo dalam ilmu politik dengan analisisnya tentang sistem politik Indonesia, menjadi pionir pengembangan ilmu sosial yang berakar pada konteks Indonesia namun tetap berstandar internasional.

Kontribusi ilmu sosial Indonesia dalam memahami masyarakat Nusantara tercermin dalam berbagai konsep kearifan lokal *(local wosdom)* seperti gotong royong sebagai model solidaritas sosial yang berbeda dari solidaritas Durkheimian, musyawarah-mufakat sebagai model demokrasi deliberatif yang mendahului etika Habermasian, atau Pancasila sebagai pandangan dunia *(weltanschauung)* yang mengintegrasikan pluralisme dengan kesatuan. Pemahaman terhadap kearifan lokal ini menjadi semakin penting dalam menganalisis dinamika sosial Indonesia kontemporer (Sari, 2023).

Konsep "Bhineka Tunggal Ika" sebagai prinsip keberagaman dalam kesatuan merupakan kontribusi unik ilmu sosial Indonesia terhadap wacana teoretis tentang multikulturalisme dan integrasi nasional. Konsep ini tidak hanya slogan politik atau motto nasional, tetapi kerangka teoretis yang canggih untuk memahami bagaimana masyarakat multikultural dapat mempertahankan kohesi sosial tanpa homogenisasi kultural atau asimilasi paksa. Penelitian-penelitian tentang harmoni sosial di Indonesia, seperti studi tentang toleransi beragama di Jawa Tengah atau integrasi etnis di Kalimantan Barat, menggunakan kerangka "Bhineka Tunggal Ika" sebagai model teoretis.

1.2 Perbedaan Ilmu Sosial dengan Ilmu Alam

Paradigma Epistemologis

Perbedaan fundamental antara ilmu sosial dan ilmu alam terletak pada paradigma epistemologis yang mendasari masing-masing domain pengetahuan, menciptakan divergensi yang signifikan dalam asumsi ontologis, metodologi penelitian, dan kriteria untuk validitas pengetahuan. Ilmu alam beroperasi dengan asumsi bahwa realitas fisik bersifat objektif, independen dari pengamat, dan dapat diamati secara netral oleh peneliti yang mempertahankan jarak epistemologis dari objek kajian. Sebaliknya, ilmu sosial menghadapi kompleksitas realitas sosial yang secara inheren melibatkan subjektivitas, interpretasi makna, dan hubungan interaktif antara peneliti dan subjek yang diteliti (Abbott, 2001).

Epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat pengetahuan - bagaimana kita memperoleh pengetahuan, apa yang dapat kita ketahui dengan kepastian, kriteria untuk validitas pengetahuan, dan sejauh mana pengetahuan itu dapat diandalkan dan digeneralisasi. Dalam konteks ilmu sosial, epistemologi menjadi sangat kompleks karena objek kajian (manusia dan masyarakat) memiliki kesadaran dan kemampuan reflektif.

Dalam ilmu alam, objektivitas dicapai melalui kontrol variabel yang ketat, isolasi fenomena dalam kondisi laboratorium yang terkendali, dan kemampuan replikasi eksperimen yang memungkinkan verifikasi independen. Peneliti fisika dapat mengulang eksperimen dengan hasil yang konsisten karena hukum-hukum alam bersifat universal, invarian lintas waktu dan ruang, dan tidak dipengaruhi oleh konteks kultural atau historis. Sebaliknya, fenomena sosial bersifat bergantung konteks, melibatkan aktor manusia yang memiliki kehendak bebas, respons emosional, dan kemampuan reflektif yang memungkinkan mereka memodifikasi perilaku berdasarkan pemahaman mereka tentang situasi.

Metode eksperimen dalam ilmu sosial menghadapi keterbatasan etis dan praktis yang signifikan. Kita tidak dapat memanipulasi variabel sosial seperti kemiskinan, konflik etnis, atau perubahan sistem politik hanya untuk kepentingan penelitian karena pertimbangan etis dan potensi kerugian terhadap subjek manusia. Oleh karena itu, ilmu sosial lebih mengandalkan observasi naturalistik, desain kuasi-eksperimental *(quasi-experimental)*, survei lintas-waktu *(cross-sectional)* atau longitudinal, dan metode interpretatif yang mengakui kompleksitas dan kontekstualitas fenomena sosial.

Studi tentang dampak program Bantuan Langsung Tunai di Indonesia menunjukkan perbedaan epistemologis yang tajam antara ilmu sosial dan ilmu alam dalam memahami kausalitas dan mengukur dampak. Sementara evaluasi ekonomis dapat mengukur peningkatan daya beli secara objektif melalui indikator kuantitatif seperti pengeluaran konsumsi dan rasio kemiskinan, pemahaman tentang dampak sosial program ini memerlukan analisis interpretatif yang kompleks tentang perubahan dinamika keluarga, pergeseran status sosial dalam komunitas, dan transformasi nilai-nilai tentang kerja dan ketergantungan. Penelitian kualitatif di Yogyakarta oleh Sumarto (2017) – misalnya - menunjukkan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga mengubah pola relasi gender dalam rumah tangga dan ekspektasi komunitas tentang bantuan sosial.

Kompleksitas Fenomena Sosial

Fenomena sosial memiliki tingkat kompleksitas yang secara kualitatif berbeda dari fenomena alam, menciptakan tantangan yang unik untuk studi ilmiah dan generalisasi teoretis. Variabilitas budaya dan konteks historis membuat generalisasi dalam ilmu sosial menjadi jauh lebih problematik dan kontroversial dibandingkan dengan ilmu alam. Apa yang berlaku dalam satu

masyarakat dengan latar belakang kultural tertentu belum tentu dapat diterapkan dalam masyarakat lain dengan konteks budaya yang berbeda, pengalaman historis yang berbeda, atau alternatif struktur sosial yang berbeda pula.

Refleksivitas adalah kemampuan manusia untuk memahami, merespons, dan mengubah perilaku mereka berdasarkan pengetahuan tentang diri dan lingkungan mereka. Dalam penelitian sosial, ini berarti subjek penelitian dapat mengubah perilaku mereka karena mengetahui bahwa mereka sedang diteliti, atau karena paparan terhadap temuan penelitian.

Refleksivitas subjek penelitian menjadi karakteristik yang unik dan problematik dalam ilmu sosial. Manusia sebagai objek kajian memiliki kemampuan untuk memahami, merespons, dan bahkan secara fundamental mengubah perilaku mereka berdasarkan pengetahuan tentang penelitian yang dilakukan terhadap mereka atau paparan terhadap pengetahuan ilmu sosial tentang perilaku mereka. Fenomena ini, yang dikenal sebagai refleksivitas pengetahuan sosial, tidak ditemukan dalam ilmu alam di mana objek kajian tidak memiliki kesadaran tentang proses penelitian.

Dimensi nilai dan makna dalam tindakan sosial menambah lapisan kompleksitas tersendiri yang tidak ditemukan dalam fenomena natural. Tindakan yang secara perilaku tampak identik dapat memiliki makna yang drastis berbeda dalam konteks budaya yang berbeda, periode historis yang berbeda, atau posisi sosial yang alternatif. Makna ini bukan sekadar terlampir pada perilaku tetapi konstitutif dari perilaku itu sendiri, membuat interpretasi esensial untuk memahami tindakan sosial.

Fenomena mudik Lebaran di Indonesia – misalnya - menunjukkan kompleksitas makna dalam tindakan sosial yang tidak dapat direduksi menjadi deskripsi perilaku. Secara perilaku, mudik adalah perpindahan geografis massal dari area urban ke area rural selama periode tertentu. Namun, makna sosial-budayanya jauh lebih kompleks dan berlapis: ritual penyucian spiritual yang terhubung dengan konsep Islam tentang kesucian alamiah (*fitrah)*, reafirmasi identitas kampung halaman yang mempertahankan koneksi dengan tanah leluhur, redistribusi ekonomi informal yang memperkuat jaringan kekerabatan, reproduksi nilai-nilai kekeluargaan yang melawan individualisme urban, dan performansi migrasi yang sukses yang menunjukkan mobilitas sosial. Penelitian di Jawa Tengah oleh Adelita (2019) menunjukkan bahwa mudik tidak dapat dipahami melalui analisis ekonomi transportasi atau mobilitas demografis semata.

Tantangan Metodologis

Tantangan generalisasi versus partikularitas menjadi isu sentral dan persisten dalam metodologi ilmu sosial, menciptakan ketegangan yang fundamental antara aspirasi ilmiah untuk pengetahuan universal dan pengakuan terhadap spesifisitas kontekstual dalam fenomena sosial. Sementara ilmu alam dapat mencapai hukum-hukum universal seperti hukum gravitasi, termodinamika, atau gaya elektromagnetik yang berlaku lintas konteks yang berbeda, ilmu sosial harus berhadapan dengan ketegangan yang kompleks antara kemampuan generalisasi dan kontekstualitas yang mendalam.

Validitas dan reliabilitas sosial tidak hanya mengacu pada akurasi pengukuran, tetapi juga keaslian dalam menangkap kompleksitas *authenticity* (pengalaman sosial), relevansi terhadap *consequential validity* (pengalaman hidup), dan kepercayaan dalam merepresentasikan *catalytic validity* (subjek penelitian). Reliabilitas sosial tidak selalu berarti konsistensi pengukuran temporal, tetapi *dependability* atau keandalan dalam konteks yang dinamis dan berubah.

> "Tantangan metodologis ilmu sosial mencakup ketegangan generalisasi–kontekstualitas, validitas autentik, reliabilitas dinamis, kausalitas multipel non-linear, hingga evaluasi program sosial yang menuntut pendekatan beragam untuk menangkap kompleksitas realitas."

Konsep kausalitas dalam fenomena sosial jauh lebih kompleks dan diperdebatkan dibandingkan kausalitas linear yang dominan dalam ilmu alam. Fenomena sosial seringkali melibatkan kausalitas multipel di mana berbagai faktor berkontribusi secara simultan, kausalitas resiprokal di mana sebab dan akibat saling mempengaruhi dalam lingkaran umpan balik *(feedback loops)*, dan kemunculan properti yang tidak dapat direduksi menjadi hubungan sebab-akibat yang sederhana atau dapat diprediksi. Kemiskinan – misalnya - bukan sekadar akibat dari faktor ekonomi seperti kurangnya pendapatan atau pengangguran, tetapi juga melibatkan faktor budaya, politik, historis, dan psikologis yang saling berinteraksi dengan cara yang kompleks dan non-linear.

Penelitian tentang efektivitas program Kartu Indonesia Pintar menunjukkan tantangan metodologis yang kompleks dalam mengevaluasi intervensi sosial.

Evaluasi kuantitatif berdasarkan tingkat pendaftaran dan skor ujian menunjukkan peningkatan yang signifikan, tetapi studi etnografis di Nusa Tenggara Timur mengungkap bahwa "kehadiran" fisik tidak selalu berarti "pembelajaran" yang bermakna. Anak-anak menghadiri sekolah untuk memenuhi persyaratan bantuan tetapi tidak benar-benar terlibat dalam proses pembelajaran karena bahasa pengantar yang berbeda dari bahasa ibu mereka, metode pengajaran yang tidak sesuai secara kultural, dan kurikulum yang tidak relevan dengan pengalaman hidup mereka. Kasus ini menurut Widiastuti (2020) menunjukkan bagaimana validitas dalam penelitian sosial memerlukan pendekatan metodologis yang beragam untuk menangkap kompleksitas realitas sosial.

1.3 Sejarah Perkembangan Ilmu Sosial

Era Pra-Ilmiah

Pemikiran tentang masyarakat dan kehidupan sosial telah ada sejak peradaban manusia awal, jauh sebelum ilmu sosial berkembang sebagai disiplin akademik yang sistematis dan terinstitusionalisasi. Dalam tradisi Yunani kuno, filsuf seperti Plato dalam *Republic* dan Aristoteles dalam *Politics* telah mengembangkan konsep-konsep canggih tentang *polis* (negara-kota), keadilan distributif, klasifikasi bentuk pemerintahan, dan hubungan antara individu dan masyarakat yang masih relevan dan berpengaruh hingga kini dalam teori politik dan filsafat sosial.

Pemikiran sosial pra-ilmiah adalah refleksi filosofis, spekulatif, dan normatif tentang masyarakat yang belum menggunakan metodologi ilmiah sistematis atau verifikasi empiris. Meskipun tidak "ilmiah" dalam pengertian modern, pemikiran ini memberikan fondasi konseptual dan teoretis yang krusial bagi perkembangan ilmu sosial sebagai disiplin akademik.

Tradisi Islam klasik memberikan kontribusi yang luar biasa melalui karya-karya seperti *Muqaddimah* Ibn Khaldun (1332 – 1406) yang hidup jauh lebih awal sekitar 4,5 abad sebelum sosiolog Auguste Comte (1798-1857). Khaldun menganalisis dinamika siklis peradaban, determinan *ashabiyyah* (kohesi sosial), hubungan antara faktor ekonomi dan kekuasaan politik, serta pemahaman canggih tentang perubahan historis yang mengantisipasi banyak wawasan sosiologi modern. Analisis Ibn Khaldun tentang siklus *nomadic-sedentary* (nomaden-menetap), peran agama dalam solidaritas sosial, dan fondasi ekonomi otoritas politik menunjukkan tingkat kecanggihan teoretis yang menyaingi atau bahkan melampaui banyak pemikir Eropa kemudian.

Dalam tradisi intelektual Tiongkok, filsuf seperti *Confucius* dan *Mencius* mengembangkan teori menyeluruh tentang tatanan sosial, hubungan hierarkis, kultivasi moral, dan pemerintahan yang baik yang secara mendalam mempengaruhi struktur sosial di Asia Timur selama milenium. Penekanan Konfusian pada kebajikan *(ren)*, perilaku yang tepat *(li)*, dan pribadi teladan *(junzi)* merupakan teori sosial canggih tentang hubungan antara pengembangan moral individual dan harmoni sosial kolektif.

Tradisi pemikiran sosial Nusantara tercermin dalam teks-teks canggih seperti *Serat Centini* dan *Negarakertagama* yang menunjukkan pemahaman maju tentang organisasi sosial, legitimasi politik, sistem ekonomi, dan integrasi kultural dalam masyarakat yang kompleks. *Negarakertagama* karya Mpu Prapanca bukan sekadar kronik historis tetapi merepresentasikan analisis sistematis tentang struktur politik Majapahit, jaringan upeti dan perdagangan, integrasi kelompok etnis yang beragam, dan teori kerajaan yang canggih yang menggabungkan konsep Hindu-Buddha dengan ide-ide lokal Indonesia. Konsep seperti *Rajasa* (otoritas yang sah) dan *Bhuwana* (tatanan sosial kosmis) menunjukkan bahwa tradisi intelektual Indonesia mengembangkan teori sosial yang canggih jauh sebelum kolonialisme Eropa.

Kelahiran Ilmu Sosial Modern (Abad 18-19)

Pencerahan abad ke-18 menandai pergeseran revolusioner dalam sejarah intelektual yang meletakkan fondasi epistemologis bagi perkembangan ilmu sosial modern. Gerakan ini ditandai oleh aplikasi sistematis akal, observasi empiris, dan metode ilmiah untuk memahami tidak hanya dunia natural tetapi juga dunia sosial. Pemikir-pemikir seperti Montesquieu dalam *The Spirit of Laws* mulai menggunakan metode komparatif dan observasi empiris sistematis untuk memahami variasi dalam sistem politik, tradisi hukum, dan institusi sosial lintas masyarakat dan iklim yang berbeda.

Pencerahan adalah gerakan intelektual abad ke-18 yang menekankan supremasi akal, observasi empiris, metode ilmiah, dan kebebasan individual dalam memahami dunia termasuk masyarakat. Gerakan ini revolusioner karena menggeser fokus dari otoritas agama dan kebijaksanaan tradisional menuju *inquiry* (inkuiri) rasional dan investigasi empiris sebagai basis untuk pengetahuan tentang dunia sosial.

Auguste Comte muncul sebagai figur yang penting dalam institusionalisasi sosiologi sebagai "ratu ilmu sosial" melalui pengembangan filsafat positif yang merupakan upaya ambisius untuk menerapkan metode ilmu alam

dalam studi sistematis masyarakat. Comte tidak hanya memperkenalkan istilah "sosiologi" tetapi juga mengembangkan teori menyeluruh tentang perkembangan historis (hukum tiga tahap) yang mengklaim bahwa pemikiran manusia berevolusi melalui tahap teologis, metafisik, dan positif, dengan tahap positif merepresentasikan pendekatan ilmiah untuk memahami fenomena sosial.

Perkembangan kapitalisme industri dan transformasi sosial masif pada abad ke-19 menyediakan laboratorium natural bagi pengembangan analisis sosial sistematis. Urbanisasi yang cepat, industrialisasi, pertumbuhan populasi, dan munculnya kelas sosial baru menciptakan masalah sosial yang belum pernah ada sebelumnya dan bentuk-bentuk organisasi sosial baru yang menuntut pemahaman ilmiah. Karl Marx mengembangkan analisis menyeluruh tentang kontradiksi kapitalis dan dampaknya terhadap kelas pekerja, berfokus pada kondisi material dan perjuangan kelas sebagai kekuatan penggerak perubahan historis.

Émile Durkheim membangun sosiologi sebagai disiplin ilmiah dengan fokus pada fakta sosial, solidaritas, dan integrasi masyarakat, menggunakan metodologi empiris untuk mengkaji fenomena seperti bunuh diri dan agama. Max Weber mengembangkan sosiologi interpretatif yang mengakui pentingnya makna subjektif dan *verstehen* (pemahaman) dalam menganalisis tindakan sosial, memberikan keseimbangan antara pendekatan positivis dan hermeneutis dalam ilmu sosial.

Dalam konteks gender, pada periode yang sama, di Indonesia terjadi proses dokumentasi dan analisis sosial pendidikan melalui karya-karya sarjana kolonial dan intelektual lokal. R. A. Lasminingrat (1854-1948) mengimplementasikan kemajuan wanita Sunda melalui pendirian Sakola Kautamaan Istri; R. A. Kartini (1879-1904) mempelopori emansipasi wanita, dan R. Déwi Sartika (1884-1947) bertransformasi mendidik kaum wanita Sunda. Mereka memberikan solusi tentang kondisi perempuan, stratifikasi sosial dalam masyarakat feodal, dan dampak pendidikan modern untuk kemajuan pendidikan agar setara dengan intelektual Eropa sezaman.

Institusionalisasi dan Spesialisasi (Abad 20)

Abad ke-20 menandai periode institusionalisasi masif ilmu sosial melalui pembentukan departemen-departemen akademik, jurnal-jurnal profesional, asosiasi-asosiasi ilmiah, dan standardisasi metodologi penelitian. Universitas-universitas di Amerika Serikat dan Eropa mulai mendirikan departemen

sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan ekonomi sebagai entitas akademik yang terpisah dengan kurikulum, metodologi, dan tradisi teoretis yang semakin terspesialisasi dan terinstitusionalisasi.

Mazhab Chicago menjadi pusat pengembangan sosiologi empiris dengan penekanan pada penelitian urban, etnografi, dan interaksionisme simbolik yang menggunakan kota Chicago sebagai laboratorium untuk memahami dinamika sosial modern. George Herbert Mead mengembangkan teori tentang pembentukan *self* (diri) melalui interaksi simbolik, sementara Robert Park dan Ernest Burgess mengembangkan ekologi manusia untuk memahami pola-pola sosial dalam lingkungan urban.

Perkembangan struktural-fungsionalisme melalui karya Talcott Parsons mencoba membangun teori umum tentang sistem sosial yang mengintegrasikan perspektif sosiologis, antropologis, dan psikologis dalam kerangka teoretis yang komprehensif. Parsons mengembangkan skema *AGIL* (*Adaptation*, *Goal attainment*, *Integration*, *Latency*) sebagai model untuk menganalisis fungsi sistem sosial dan mekanisme integrasi dalam masyarakat yang kompleks.

Di Indonesia, periode ini ditandai oleh kemunculan generasi pertama sosiolog Indonesia seperti Selo Soemardjan yang memperoleh pendidikan di Cornell University dan kemudian mengembangkan sosiologi Indonesia dengan fokus pada perubahan sosial di pedesaan dan modernisasi. Soemardjan mengadaptasi teori-teori sosiologi Barat untuk memahami kondisi spesifik Indonesia, terutama dalam menganalisis dampak pembangunan terhadap masyarakat pedesaan dan proses transformasi sosial pasca kemerdekaan.

Koentjaraningrat membangun antropologi Indonesia sebagai disiplin ilmiah yang mengkaji kebudayaan Nusantara dengan metodologi etnografi yang ketat namun sensitif terhadap konteks lokal. Karya-karyanya tentang sistem kekerabatan Jawa, organisasi sosial masyarakat Dayak, dan metodologi penelitian etnografi menjadi referensi fundamental dalam antropologi Indonesia dan memberikan kontribusi teoretis pada pemahaman tentang struktur sosial Asia Tenggara.

Era Kontemporer dan Tantangan Dekolonisasi

Perkembangan ilmu sosial kontemporer ditandai oleh berbagai revolusi teoretis dan metodologis yang menantang ortodoksi akademik yang sudah mapan. Gerakan *postcolonial studies* (studi pascakolonial) dan dekolonisasi epistemologi menantang dominasi perspektif *Eurocentric* dalam ilmu sosial,

mengkritik asumsi universalitas teori-teori yang dikembangkan berdasarkan pengalaman Eropa dan Amerika Utara, serta mengadvokasi pengembangan epistemologi alternatif yang berakar pada pengalaman masyarakat non-Barat.

Ddekolonisasi epistemologi adalah upaya untuk membebaskan produksi pengetahuan dari dominasi perspektif *Eurocentric* dan mengembangkan kerangka teoretis dan metodologis yang lebih inklusif, sensitif terhadap keragaman budaya, dan mengakui validitas sistem pengetahuan asli lokal *(indigenous knowledge)*.

Feminisme dalam ilmu sosial mengubah secara fundamental agenda penelitian dan kerangka teoretis dengan mengkritik bias gender dalam teori-teori klasik, mengintegrasikan perspektif perempuan dalam analisis sosial, dan mengembangkan konsep-konsep seperti interseksionalitas yang menganalisis bagaimana berbagai bentuk penindasan (gender, ras, kelas, seksualitas) berinteraksi dan saling memperkuat. Pemikir seperti Patricia Hill Collins dan Bell Hooks mengembangkan teori feminisme yang mengintegrasikan perspektif ras dan kelas dalam analisis gender.

Postmodernisme menantang fondasi epistemologis ilmu sosial modern dengan mengkritik klaim objektivitas, universalitas, dan kemajuan linear, serta mengadvokasi perspektif yang lebih pluralistik *(pluralistic)*, refleksif *(reflexive)*, dan skeptis terhadap meta-narasi *(meta-narratives)* besar tentang sejarah dan masyarakat. Pemikir seperti Michel Foucault, Jacques Derrida, dan Jean Baudrillard mengembangkan kritik radikal terhadap modernitas dan rasionalitas era Pencerahan.

Globalisasi menciptakan tantangan baru bagi ilmu sosial dengan munculnya fenomena *transnational* yang melampaui batas-batas negara-bangsa tradisional. Teori-teori tentang masyarakat global, jaringan transnasional, migrasi international, dan pertukaran kultural memerlukan kerangka analitis yang dapat mengatasi keterbatasan perspektif nasional dan mengintegrasikan dimensi global dalam analisis sosial.

> “Era kontemporer ilmu sosial ditandai dekolonisasi epistemologi, feminisme, postmodernisme, dan globalisasi yang menantang *Eurocentrisme*, menghadirkan perspektif alternatif inklusif, refleksif, serta mengakui keragaman pengetahuan lokal.”

Dalam konteks Indonesia, era kontemporer ditandai oleh perkembangan ilmu sosial yang semakin *mature* dan berkontribusi pada *discourse* global. Peneliti-peneliti seperti Benedict Anderson dengan konsepnya tentang *imagined communities* memberikan kontribusi teoretis yang signifikan pada pemahaman tentang nasionalisme dan identitas kolektif. Vedi Hadiz mengembangkan analisis tentang kapitalisme predatori *(predatory capitalism)* di Asia Tenggara yang memberikan perspektif alternatif pada teori modernisasi dan demokratisasi.

Ariel Heryanto mengembangkan studi budaya Indonesia yang mengintegrasikan perspektif *postcolonial* dengan analisis tentang identitas, media, dan budaya popular dalam konteks Indonesia kontemporer. Abidin Kusno dalam sosiologi urban mengkaji transformasi ruang kota Jakarta dalam era neoliberalisme dan globalisasi, memberikan kontribusi pada teori urban dan studi tentang modernitas alternatif di Asia Tenggara.

1.4 Paradigma dalam Ilmu Sosial

Paradigma Positivis

Paradigma positivis dalam ilmu sosial berakar pada tradisi filosofis era Pencerahan dan aspirasi untuk mengembangkan studi masyarakat yang mengikuti model ilmu alam dalam hal objektivitas, generalisasi, dan prediksi. Paradigma ini mengasumsikan bahwa realitas sosial memiliki struktur objektif yang dapat diamati dan dianalisis secara netral oleh peneliti yang mempertahankan jarak epistemologis dari objek kajian. Positivisme menekankan pentingnya data empiris, pengukuran kuantitatif, dan verifikasi hipotesis melalui metode yang dapat direplikasi dan diverifikasi secara independen (Wallerstein, 2004).

Paradigma adalah kerangka konseptual dan metodologis yang mendasari penelitian ilmiah, mencakup asumsi ontologis tentang hakikat realitas, asumsi epistemologis tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, dan preferensi metodologis tentang bagaimana penelitian harus dilakukan. Paradigma membentuk cara peneliti memahami dan mengkaji fenomena sosial.

Karakteristik utama paradigma positivis meliputi ontology realisme yang mengasumsikan bahwa realitas sosial memiliki struktur objektif yang independen dari pengamat, epistemologi objektivis yang menekankan netralitas peneliti dan kemungkinan pengetahuan yang bebas nilai, dan metodologi yang mengutamakan eksperimen, survei, dan analisis statistik

untuk mengidentifikasi pola-pola general dan hukum-hukum sosial yang universal.

Dalam konteks penelitian, paradigma positivis mengutamakan operasionalisasi konsep teoretis menjadi variabel yang dapat diukur, penggunaan sampel yang representatif untuk generalisasi populasi, kontrol variabel untuk mengidentifikasi hubungan kausal, dan analisis statistik untuk menguji hipotesis dan mengidentifikasi pola-pola yang signifikan secara statistik.

Studi tentang hubungan antara tingkat pendidikan dan partisipasi politik di Indonesia menunjukkan aplikasi paradigma positivis dalam penelitian sosial. Penelitian oleh Liddle dan Mujani (2007) menggunakan data survei nasional dengan sampel representatif untuk menguji hipotesis bahwa tingkat pendidikan berkorelasi positif dengan partisipasi politik. Mereka mengoperasionalisasi pendidikan sebagai jumlah tahun sekolah formal dan partisipasi politik sebagai frekuensi *voting*, keanggotaan organisasi politik, dan partisipasi dalam kampanye. Analisis regresi menunjukkan korelasi positif yang signifikan, mendukung teori modernisasi tentang hubungan antara pendidikan dan demokrasi.

Kritik terhadap paradigma positivis dalam ilmu sosial mencakup argumen bahwa kompleksitas fenomena sosial tidak dapat direduksi menjadi variabel yang dapat diukur secara objektif, bahwa netralitas nilai dalam penelitian sosial adalah ilusi karena pemilihan topik dan metode penelitian selalu melibatkan asumsi nilai, dan bahwa fokus pada generalisasi mengabaikan pentingnya konteks spesifik dan keunikan kultural dalam memahami fenomena sosial.

Paradigma Interpretivis

Paradigma interpretivis berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan positivisme dalam memahami kompleksitas makna dan subjektivitas dalam kehidupan sosial. Paradigma ini berakar pada tradisi hermeneutik dan fenomenologi yang menekankan pentingnya memahami makna subjektif yang diberikan aktor sosial terhadap tindakan dan pengalaman mereka. Interpretivis berpendapat bahwa fenomena sosial secara fundamental berbeda dari fenomena natural karena melibatkan makna, interpretasi, dan *intentionality* yang memerlukan pendekatan metodologis yang berbeda (Craib, 1992).

Hermeneutika adalah tradisi filosofis yang berasal dari interpretasi teks religius dan kemudian diperluas untuk memahami makna dalam tindakan sosial dan komunikasi manusia. Dalam ilmu sosial, hermeneutika menekankan pentingnya memahami makna subjektif dan konteks kultural dalam menginterpretasikan fenomena sosial.

Ontologi interpretivisme bersifat relativis, mengakui bahwa realitas sosial dikonstruksi melalui interaksi dan interpretasi yang beragam, sehingga tidak ada satu realitas objektif tunggal tetapi *multiple* realitas yang bergantung pada perspektif dan pengalaman aktor yang berbeda. Epistemologi interpretivisme bersifat transaksional, mengakui bahwa pengetahuan dihasilkan melalui interaksi antara peneliti dan subjek penelitian, sehingga peneliti tidak dapat mempertahankan jarak objektif tetapi merupakan bagian dari proses konstruksi pengetahuan.

Interpretivisme methodologi mengutamakan metode kualitatif seperti etnografi mendalam, wawancara tidak terstruktur, observasi partisipan, dan analisis *discourse* yang memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif "dari dalam" *(emic)* aktor sosial dan menangkap kompleksitas makna dalam konteks natural. Validitas dalam penelitian interpretivis diukur berdasarkan *authenticity*, *credibility*, dan *ability* untuk menangkap kompleksitas pengalaman subjek penelitian.

Penelitian tentang "makna kerja" bagi buruh pabrik di Tangerang oleh Teri Caraway (2007) menunjukkan kekuatan paradigma interpretivis dalam memahami pengalaman pekerja perempuan Indonesia. Alih-alih mengukur kepuasan kerja melalui skala kuantitatif, Caraway menggunakan etnografi mendalam untuk memahami bagaimana pekerja perempuan menginterpretasikan pengalaman mereka di pabrik dalam konteks ekspektasi gender, tanggung jawab keluarga, dan aspirasi personal. Penelitian ini mengungkap bahwa "pekerjaan pabrik" memiliki makna yang kompleks dan kontradiktif: sebagai sumber pemberdayaan ekonomi yang memungkinkan mobilitas sosial, tetapi juga sebagai sumber eksploitasi yang mengkonfirmasi status subordinat perempuan dalam masyarakat patriarkal.

Studi ini menunjukkan bahwa pendekatan kuantitatif yang mengukur kepuasan kerja melalui survei tidak akan dapat menangkap kompleksitas makna dan ambivalensi yang dialami pekerja perempuan. Caraway menemukan bahwa pekerja menggunakan berbagai strategi *resistance* dan adaptasi yang tidak terlihat dalam statistik produktivitas atau tingkat *turnover*, tetapi merupakan aspek krusial dari pengalaman kerja mereka berdasarkan perpektif kuantitatif.

Paradigma Kritis

Paradigma kritis berkembang dari tradisi Marxisme dan Mazhab Frankfurt yang mengkritik baik positivisme maupun interpretivisme karena kurangnya perhatian pada dimensi kekuasaan, dominasi, dan emansipasi dalam penelitian sosial. Paradigma kritis berpendapat bahwa ilmu sosial tidak boleh hanya mendeskripsikan atau memahami realitas sosial, tetapi juga harus mengkritik struktur dominasi dan berkontribusi pada transformasi sosial yang lebih adil dan emansipatori. Penelitian kritis mengintegrasikan analisis teoretis dengan komitmen pada perubahan sosial dan pemberdayaan kelompok yang termarginalkan (Turner, 2013).

Paradigma kritis adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang mengintegrasikan analisis teoretis dengan komitmen eksplisit pada kritik sosial dan transformasi struktur dominasi. Paradigma ini tidak hanya berusaha memahami dunia sosial tetapi juga mengubahnya melalui *praxis* (praktik) yang menggabungkan teori dan aksi politik.

Ontologi paradigma kritis bersifat *historical realist* (realisme historis), mengakui bahwa struktur sosial memiliki realitas objektif tetapi dibentuk oleh proses historis yang melibatkan konflik, dominasi, dan perjuangan. Epistemologi kritis bersifat *transactional* dan *transformational*, mengakui bahwa pengetahuan selalu terkait dengan kepentingan dan bahwa penelitian harus berkontribusi pada emansipasi dan perubahan sosial.

Metodologi penelitian kritis menggunakan berbagai metode (kualitatif dan kuantitatif) tetapi selalu dengan orientasi pada *praxis* transformatif. Metode-metode seperti *participatory action research* (penelitian aksi partisipatif), *critical ethnography* (etnografi kritis), dan analisis diskursus kritis digunakan untuk mengungkap mekanisme dominasi dan mengembangkan alternatif emansipatori.

Konsep-konsep kunci dalam paradigma kritis meliputi *hegemony* (hegemoni) sebagai dominasi yang dipraktikkan melalui konsensus daripada paksaan, *false consciousness* (kesadaran palsu) sebagai internalisasi ideologi dominan oleh kelompok yang tertindas, dan *emancipation* (emansipasi) sebagai tujuan akhir penelitian untuk membebaskan kelompok marginal dari struktur dominasi.

Penelitian tentang nelayan tradisional di pesisir Jawa oleh R.E. Jordaan (2006) menunjukkan aplikasi paradigma kritis dalam menganalisis dampak modernisasi perikanan terhadap komunitas nelayan. Penelitian ini tidak

hanya mendeskripsikan perubahan ekonomi tetapi mengkritik bagaimana kebijakan modernisasi perikanan yang didukung oleh Bank Dunia dan pemerintah Indonesia menciptakan marginalisasi nelayan kecil untuk keuntungan perusahaan perikanan besar dan eksportir.

Jordaan menggunakan analisis kelas untuk menunjukkan bagaimana "modernisasi" yang dipromosikan sebagai pembangunan universal sebenarnya menguntungkan elite ekonomi sambil menghancurkan mata pencaharian tradisional nelayan. Penelitian ini juga mendokumentasikan berbagai bentuk *resistance* (resistensi) nelayan terhadap marginalisasi, termasuk pembentukan koperasi, adaptasi teknologi, dan mobilisasi politik melalui organisasi nelayan.

Yang penting, penelitian ini tidak hanya menganalisis tetapi juga berkontribusi pada *praxis* emansipatori dengan bekerja sama dengan organisasi nelayan untuk mengembangkan strategi advokasi dan alternatif ekonomi yang berkelanjutan. Ini menunjukkan karakteristik khas paradigma kritis yang mengintegrasikan analisis akademik dengan komitmen pada perubahan sosial.

Paradigma Konstruktivis

Paradigma konstruktivis berkembang dari sintesis antara interpretivisme dan perspektif *postmodern* yang menekankan bahwa realitas sosial tidak hanya diinterpretasikan tetapi secara aktif dikonstruksi melalui *discourse*, praktik, dan interaksi sosial. Konstruktivisme berpendapat bahwa fenomena sosial seperti gender, ras, kelas, dan identitas nasional bukanlah kategori natural atau objektif tetapi konstruksi sosial yang diciptakan dan dipelihara melalui proses sosial yang kompleks dan dinamis. Paradigma ini mengintegrasikan insights dari sosiologi pengetahuan, analisis *discourse*, dan studi budaya untuk memahami bagaimana realitas sosial diproduksi dan direproduksi (Ritzer, 2019).

Konstruksi sosial *(social construction)* adalah proses dimana aktor sosial menciptakan, memelihara, dan mengubah kategori, institusi, dan makna melalui interaksi, diskursus, dan praktik sosial. Realitas sosial tidak ditemukan tetapi dibuat melalui proses kolektif yang melibatkan negosiasi makna dan legitimasi.

Ontologi konstruktivisme yang bersifat relatif mengakui *multiple constructed realities* yang bergantung pada konteks sosial, budaya, dan historis. Epistemologi konstruktivisme bersifat *transactional* dan *hermeneutical*,

mengakui bahwa pengetahuan adalah hasil dari interaksi antara peneliti dan subjek penelitian dalam konteks spesifik.

Metodologi konstruktivis mengutamakan analisis wacana, dekonstruksi kategori yang dianggap natural, etnografi yang sensitif terhadap proses konstruksi makna, dan metode yang mengungkap bagaimana realitas sosial diproduksi melalui praktik sehari-hari. Validitas diukur berdasarkan kemampuan untuk mengungkap proses konstruksi dan menunjukkan kontigensi dari apa yang dianggap "natural" atau "objektif".

Penelitian tentang konstruksi sosial maskulinitas di kalangan preman Jakarta oleh Ian Douglas Wilson (2015) menunjukkan kekuatan paradigma konstruktivis dalam memahami identitas gender. Wilson menunjukkan bahwa maskulinitas dalam budaya preman Jakarta bukan karakteristik biologis atau psikologis yang natural, tetapi konstruksi sosial yang diproduksi melalui ritual, diskursus, praktik kekerasan, dan ekonomi informal yang spesifik dalam konteks urban Indonesia.

Penelitian ini mengungkap bagaimana maskulinitas "preman" dikonstruksi melalui narasi tentang "kejantanan Betawi", praktik proteksi dan *racket*, dan oposisi terhadap maskulinitas kelas menengah yang dianggap "lemah" atau "tidak otentik". Wilson menunjukkan bahwa konstruksi ini bersifat performatif - maskulinitas harus terus-menerus diperforma dan dikonfirmasi melalui tindakan dan pertukaran ide untuk mempertahankan legitimasinya.

Yang menarik, Wilson juga menunjukkan bagaimana konstruksi maskulinitas preman berubah dalam era Reformasi, di mana preman harus menegosiasikan identitas mereka dengan pertukaran ide tentang *civil society*, HAM, dan modernitas. Ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan konteks politik dan kultural.

1.5 Metodologi Penelitian Sosial

Pendekatan Kuantitatif

Metodologi kuantitatif dalam ilmu sosial berakar pada tradisi positivis yang berupaya mengaplikasikan logika dan teknik ilmu alam untuk memahami fenomena sosial melalui pengukuran, analisis statistik, dan generalisasi yang dapat diverifikasi. Pendekatan ini mengutamakan operasionalisasi konsep teoretis menjadi variabel yang dapat diukur secara numerik, penggunaan sampel yang representatif untuk generalisasi populasi yang lebih luas, dan

aplikasi teknik statistik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan perbedaan yang signifikan dalam data (Neuman, 2014).

Metodologi kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data numerik, teknik statistik, dan desain penelitian yang terstruktur untuk mengukur fenomena sosial, menguji hipotesis, dan mengidentifikasi pola atau hubungan yang dapat digeneralisasi. Pendekatan ini menekankan objektivitas, replikabilitas, dan validitas eksternal dalam penelitian sosial.

Karakteristik utama penelitian kuantitatif meliputi desain penelitian yang terstruktur dan ditentukan sebelum pengumpulan data dimulai, penggunaan instrumen pengukuran yang standardized seperti kuesioner dengan skala Likert atau inventori psikometrik, teknik sampling yang memungkinkan generalisasi statistik seperti *random sampling* atau *stratified sampling*, dan analisis data menggunakan software statistik seperti SPSS, R, atau Stata untuk mengidentifikasi pola dan menguji hipotesis.

Kelebihan pendekatan kuantitatif meliputi kemampuan untuk menggeneralisasi temuan pada populasi yang lebih luas dengan tingkat kepercayaan statistik yang dapat dihitung, efisiensi dalam mengumpulkan data dari sampel yang besar, objektivitas dalam analisis data yang mengurangi bias peneliti, dan kemampuan untuk mengidentifikasi hubungan kausal melalui desain eksperimental atau *quasi-experimental*.

> "Pendekatan kuantitatif berakar pada positivisme dengan mengukur fenomena sosial melalui variabel numerik, sampling representatif, dan analisis statistik. Ia memungkinkan generalisasi objektif, replikasi, dan identifikasi pola, namun cenderung reduksionis, kurang menangkap konteks mendalam, serta sering mengabaikan makna subjektif pengalaman sosial."

Keterbatasan metodologi kuantitatif meliputi reduksionisme yang menyederhanakan kompleksitas fenomena sosial menjadi variabel yang dapat diukur, ketidakmampuan untuk menangkap konteks dan makna yang mendalam, risiko mengabaikan perspektif subjek penelitian yang tidak terantisipasi dalam desain penelitian, dan asumsi bahwa fenomena sosial dapat diukur dengan cara yang sama seperti fenomena natural.

Survei tentang kepercayaan politik di Indonesia oleh Lembaga Survei Indonesia menunjukkan kekuatan dan keterbatasan pendekatan kuantitatif. Survei nasional dengan 2.500 responden menggunakan *multistage random sampling* untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik seperti DPR, presiden, kepolisian, dan pengadilan. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur dengan skala 1-10 dan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial.

Hasil survei memberikan gambaran yang representatif tentang distribusi kepercayaan politik di seluruh Indonesia dan memungkinkan perbandingan antar wilayah, kelompok demografis, dan periode waktu. Namun, survei ini tidak dapat menjelaskan mengapa tingkat kepercayaan bervariasi atau bagaimana kepercayaan politik dikonstruksi melalui pengalaman personal, diskursus media, atau interaksi sosial. Data kuantitatif menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap DPR rendah (rata-rata 4.2/10) tetapi tidak menjelaskan apakah ini disebabkan oleh kinerja legislatif yang buruk, korupsi, atau ekspektasi yang tidak realistis terhadap representasi politik.

Pendekatan Kualitatif

Metodologi kualitatif berkembang dari tradisi interpretivis dan fenomenologis yang menekankan pentingnya memahami makna, konteks, dan perspektif subjektif dalam fenomena sosial. Pendekatan ini mengutamakan pemahaman mendalam terhadap pengalaman hidup aktor sosial, analisis konteks kultural dan historis yang membentuk tindakan sosial, dan eksplorasi proses sosial yang kompleks yang tidak dapat direduksi menjadi variabel yang dapat diukur secara numerik (Silverman, 2013).

Metodologi kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data non-numerik seperti teks, gambar, atau observasi untuk memahami makna, proses, dan konteks dalam fenomena sosial. Pendekatan ini menekankan pemahaman mendalam, kontekstualitas, dan perspektif *emic* (dari dalam) subjek penelitian.

Karakteristik penelitian kualitatif meliputi desain penelitian yang fleksibel dan dapat disesuaikan selama proses *emergent design* (penelitian berlangsung), pengumpulan data melalui metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipan, analisis dokumen, atau *focus group discussion*, analisis data yang bersifat interpretatif dan *iterative* menggunakan teknik seperti *coding*, kategorisasi, dan identifikasi tema, serta validitas yang diukur berdasarkan *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Metode-metode kualitatif yang umum digunakan meliputi etnografi yang melibatkan observasi partisipan jangka panjang dalam komunitas atau organisasi, *grounded theory* yang mengembangkan teori berdasarkan data empiris melalui proses *coding* dan analisis komparatif, studi kasus yang menganalisis fenomena secara mendalam dalam konteks spesifik, analisis *discourse* yang mengkaji bagaimana makna dikonstruksi melalui bahasa dan komunikasi, dan fenomenologi yang mengeksplorasi struktur pengalaman subjektif dan kesadaran.

Kelebihan pendekatan kualitatif meliputi kemampuan untuk menangkap kompleksitas dan nuansa dalam fenomena sosial, fleksibilitas untuk mengeksplorasi topik yang belum dipahami atau dikonseptualisasi dengan baik, sensitivitas terhadap konteks kultural dan historis, dan kemampuan untuk memberikan suara *(voice)* kepada kelompok yang termarginalkan atau perspektif yang kurang terwakili dalam penelitian kuantitatif.

Keterbatasan metodologi kualitatif meliputi ketidakmampuan untuk menggeneralisasi temuan secara statistik, subjektivitas dalam interpretasi data yang dapat menimbulkan bias peneliti, waktu dan sumber daya yang intensif yang diperlukan untuk penelitian mendalam, dan kesulitan dalam replikasi penelitian karena ketergantungan pada kemampuan dan perspektif peneliti individual.

> “Pendekatan kualitatif menekankan pemahaman makna, konteks, dan perspektif subjektif melalui data non-numerik seperti wawancara atau observasi. Ia fleksibel, interpretatif, sensitif terhadap budaya, serta mampu menangkap kompleksitas fenomena sosial, namun terbatas dalam generalisasi statistik, replikasi, dan membutuhkan sumber daya penelitian yang intensif.”

Penelitian etnografi tentang komunitas *transgender* di Yogyakarta oleh Sharyn Graham Davies (2007) menunjukkan kekuatan metodologi kualitatif dalam memahami identitas gender dan seksualitas dalam konteks kultural Indonesia. Davies menggunakan observasi partisipan selama 18 bulan untuk

memahami bagaimana transpuan *(waria)* membangun identitas, komunitas, dan mata pencaharian dalam masyarakat yang umumnya heteronormatif.

Penelitian ini mengungkap kompleksitas identitas *waria* yang tidak dapat dipahami melalui kategori gender Barat tentang *transgender*. Davies menemukan bahwa *waria* mengintegrasikan elemen maskulin dan feminin dalam cara yang unik, membangun jaringan sosial yang memberikan dukungan emosional dan ekonomi, dan menggunakan berbagai strategi untuk menegosiasikan diskriminasi dan marginalisasi sosial.

Cukup penting, penelitian ini menunjukkan bagaimana *waria* tidak hanya "korban" marginalisasi tetapi juga agen aktif yang menciptakan ruang sosial dan budaya alternatif. Davies mendokumentasikan bagaimana komunitas *waria* mengembangkan ritual, tradisi, dan sistem dukungan yang menantang norma gender mainstream sambil tetap mempertahankan koneksi dengan keluarga dan komunitas yang lebih luas. Penelitian kuantitatif tentang diskriminasi terhadap *transgender* tidak akan dapat menangkap kompleksitas *agency* dan *resilience* yang ditemukan Davies.

Metode Campuran (Mixed Methods)

Pendekatan metode campuran *(mixed methods)* berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan baik metodologi kuantitatif maupun kualitatif dalam memahami kompleksitas fenomena sosial. Pendekatan ini mengintegrasikan kekuatan kedua tradisi metodologis untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan *robust* terhadap pertanyaan penelitian yang kompleks. *Mixed methods* tidak hanya menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan tetapi juga mengintegrasikan temuan dari kedua pendekatan dalam interpretasi dan kesimpulan yang koheren (Tashakkori & Teddlie, 2010).

Mixed methods adalah pendekatan penelitian yang secara sistematis mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau serangkaian studi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena sosial. Integrasi terjadi pada level desain penelitian, pengumpulan data, analisis, dan interpretasi.

Strategi *mixed methods* meliputi *concurrent embedded design* di mana data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan secara bersamaan tetapi satu pendekatan dominan, *sequential exploratory design* di mana penelitian kualitatif mendahului dan menginformasikan penelitian kuantitatif, *sequential explanatory design* di mana data kuantitatif dikumpulkan terlebih

dahulu dan diikuti oleh penelitian kualitatif untuk menjelaskan atau memperdalam temuan, dan *concurrent triangulation design* di mana kedua jenis data dikumpulkan secara bersamaan untuk validasi dan konfirmasi temuan.

Kelebihan *mixed methods* meliputi kemampuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks yang tidak dapat dijawab oleh satu pendekatan saja, validasi temuan melalui *triangulation* antara data kuantitatif dan kualitatif, kemampuan untuk menggeneralisasi temuan kualitatif melalui komponen kuantitatif, dan fleksibilitas untuk mengeksplorasi fenomena yang tidak terduga yang muncul selama penelitian.

Keterbatasan *mixed methods* meliputi kompleksitas dalam desain dan implementasi yang memerlukan keahlian dalam kedua tradisi metodologis, waktu dan sumber daya yang intensif, tantangan dalam mengintegrasikan temuan yang mungkin kontradiktif atau tidak konsisten, dan potensi untuk menciptakan studi yang terlalu luas tanpa kedalaman yang memadai dalam salah satu komponen.

Penelitian tentang dampak program Keluarga Harapan terhadap kemiskinan di Indonesia oleh Tim Peneliti TNP2K (2014) menunjukkan aplikasi efektif *mixed methods* dalam evaluasi kebijakan sosial. Penelitian ini menggunakan *sequential explanatory design* dengan komponen kuantitatif yang mengukur dampak program terhadap konsumsi, pendidikan, dan kesehatan melalui *randomized controlled trial* dengan 7.000 rumah tangga di tujuh provinsi, diikuti oleh komponen kualitatif yang mengeksplorasi mekanisme dampak dan pengalaman subjektif penerima manfaat.

> "*Mixed methods* muncul untuk mengatasi kelemahan pendekatan tunggal dalam penelitian sosial, menggabungkan kekuatan metode kuantitatif dan kualitatif guna menghasilkan analisis yang lebih menyeluruh dan mendalam terhadap fenomena kompleks."

Analisis kuantitatif menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap pengeluaran makanan, tingkat partisipasi sekolah, dan utilisasi layanan kesehatan. Namun, data kuantitatif tidak menjelaskan mengapa dampak bervariasi antar wilayah atau bagaimana program mengubah dinamika

rumah tangga dan komunitas. Komponen kualitatif menggunakan wawancara mendalam dan *focus group discussion* dengan penerima manfaat, tokoh masyarakat, dan implementor program untuk memahami mekanisme perubahan dan konteks yang mempengaruhi efektivitas program.

Temuan kualitatif mengungkap bahwa program tidak hanya memberikan bantuan finansial tetapi juga mengubah persepsi masyarakat tentang pendidikan anak perempuan, memperkuat posisi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, dan menciptakan jaringan sosial baru di antara penerima manfaat. Integrasian temuan kuantitatif dan kualitatif memberikan pemahaman komprehensif bahwa efektivitas program tidak hanya bergantung pada desain teknis tetapi juga pada konteks sosial-budaya dan implementasi di tingkat lokal.

Etika Penelitian dalam Era Digital

Perkembangan teknologi digital menciptakan tantangan etis baru dalam penelitian sosial yang memerlukan pembaruan kerangka etika penelitian tradisional. *Big data*, media sosial, *internet of things*, dan teknologi pengawasan *(surveillance*l memberikan akses peneliti terhadap data personal yang sangat besar dan detail tentang perilaku, preferensi, dan jaringan sosial individu. Namun, akses ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang persetujuan yang didasari informasi *(informed consent*l, *privacy*, anonimitas, dan potensi kerugian bagi subjek penelitian (Flick, 2014).

Etika penelitian adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur bagaimana penelitian harus dilakukan untuk melindungi hak, kesejahteraan, dan martabat subjek penelitian. Dalam era digital, etika penelitian menjadi semakin kompleks karena kemudahan akses data dan potensi penggunaan data untuk tujuan yang tidak diantisipasi subjek penelitian.

Tantangan utama dalam etika penelitian digital meliputi *informed consent* dalam konteks data yang dikumpulkan secara otomatis atau tidak langsung, *privacy* dan anonimitas ketika data digital dapat dikombinasikan dengan database lain untuk mengidentifikasi individu, kepemilikan data *(data ownership)* dan kontrol subjek penelitian atas penggunaan data mereka, serta potensi kerugian yang tidak terduga dari analisis *big data* atau bias algoritma *(algorithmic bias)*.

Prinsip-prinsip etika penelitian yang perlu diadaptasi untuk era digital meliputi otonomi *(autonomy)* yang memerlukan transparansi tentang bagaimana data digunakan dan memberikan kontrol kepada subjek penelitian atas data mereka, berbuat baik *(beneficence)* yang memastikan bahwa penelitian memberikan manfaat yang lebih besar daripada risiko, tidak merugikan *(non-maleficence)* yang memerlukan perlindungan terhadap potensi diskriminasi atau stigmatisasi berdasarkan temuan penelitian, dan keadilan *(justice)* yang memastikan bahwa manfaat dan beban penelitian didistribusikan secara adil.

Studi tentang perilaku politik di media sosial Indonesia menghadapi berbagai dilema etis yang menunjukkan kompleksitas penelitian digital. Penelitian yang menganalisis *tweet* dan postingan *Facebook* tentang isu politik memerlukan pertimbangan tentang apakah data publik di media sosial dapat dianggap sebagai *fair game* untuk penelitian tanpa *consent* eksplisit dari pengguna. Meskipun data tersebut tersedia publik, pengguna mungkin tidak mengantisipasi bahwa postingan mereka akan dianalisis untuk penelitian akademik.

Penelitian tentang ujaran kebencian *(hate speech)* dan polarisasi politik di media sosial juga menghadapi dilema tentang bagaimana melindungi identitas subjek penelitian sambil memberikan bukti empiris yang kuat untuk temuan. Penggunaan nama samaran *(pseudonym)* mungkin tidak cukup karena kombinasi metadata dan konten postingan dapat memungkinkan identifikasi individu. Di sisi lain, anonimisasi yang berlebihan dapat mengurangi validitas dan utilitas penelitian.

Penelitian oleh Ross Tapsell (2017) tentang *hoax* dan misinformasi di media sosial Indonesia menunjukkan pendekatan etis yang penuh pertimbangan *(thoughtful)*. Tapsell menggunakan data yang tersedia publik tetapi mengaburkan identitas pengguna individu dan fokus pada pola aggregate daripada perilaku individual. Penelitian ini juga melibatkan konsultasi dengan komunitas yang diteliti dan transparan tentang tujuan dan metode penelitian.

Penelitian ini juga mempertimbangkan potensi dampak negatif dari publikasi temuan, termasuk risiko stigmatisasi terhadap kelompok tertentu atau penggunaan temuan untuk justifikasi tindakan represif terhadap kebebasan berekspresi. Ini menunjukkan bahwa etika penelitian dalam era digital tidak hanya tentang perlindungan subjek penelitian tetapi juga tanggung jawab sosial peneliti terhadap konsekuensi yang lebih luas dari penelitian mereka.

Kesimpulan

Bab ini telah memberikan fondasi komprehensif untuk memahami ilmu sosial sebagai domain pengetahuan yang kompleks, beragam, dan terus berkembang. Melalui eksplorasi lima aspek fundamental - definisi dan ruang lingkup, perbedaan dengan ilmu alam, sejarah perkembangan, paradigma penelitian, dan metodologi - kita dapat melihat bahwa ilmu sosial bukan sekadar kumpulan teknik penelitian atau teori akademik yang abstrak, melainkan usaha intelektual yang ambisius untuk memahami kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat.

Pemahaman tentang hakikat lintas disiplin *(interdisciplinary)* ilmu sosial menunjukkan bahwa fenomena sosial memerlukan pendekatan yang integratif dan holistik. Tidak ada satu disiplin tunggal yang dapat sepenuhnya menangkap kompleksitas realitas sosial, sehingga dialog dan kolaborasi antar disiplin menjadi esensial. Dalam konteks Indonesia, pendekatan *interdisciplinary* ini semakin penting mengingat kekayaan budaya dan kompleksitas sosial Nusantara yang memerlukan sintesis perspektif antropologi, sosiologi, politik, ekonomi, dan disiplin lainnya.

Perbedaan fundamental antara ilmu sosial dan ilmu alam bukan kelemahan tetapi mencerminkan kompleksitas ontologis realitas sosial yang melibatkan makna, interpretasi, nilai, dan refleksivitas. Tantangan metodologis yang dihadapi ilmu sosial - mulai dari generalisasi versus kontekstualitas hingga objektivitas versus subjektivitas - memerlukan kreativitas dan fleksibilitas dalam pengembangan metode penelitian yang dapat menangkap kompleksitas ini tanpa kehilangan ketelitian *(rigor)*.

Sejarah perkembangan ilmu sosial menunjukkan bahwa disiplin ini selalu responsif terhadap tantangan sosial dan transformasi yang terjadi dalam masyarakat. Dari era Pencerahan hingga tantangan dekolonisasi epistemologi kontemporer, ilmu sosial terus berkembang dan memperbaharui diri untuk tetap relevan dan berkontribusi pada pemahaman dunia yang terus berubah. Kontribusi Indonesia dalam *discourse* (wacana) global ilmu sosial, mulai dari konsep *imagined communities* Benedict Anderson hingga analisis tentang kapitalisme Asia Tenggara, menunjukkan bahwa pengembangan ilmu sosial bukan monopoli Barat dan bahwa perspektif dari Selatan global dapat memberikan *insight* (wawasan) yang berharga.

Keragaman paradigma dalam ilmu sosial - positivis, interpretivis, kritis, dan konstruktivis - mencerminkan pluralisme epistemologis yang sehat dan produktif. Tidak ada satu paradigma yang superior secara absolut; masing-

masing memiliki kekuatan dan keterbatasan yang berbeda, dan pemilihan paradigma harus disesuaikan dengan pertanyaan penelitian, konteks, dan tujuan studi. Yang penting adalah kesadaran akan implikasi ontologis dan epistemologis dari pilihan paradigma dan transparansi dalam aplikasinya.

> "Ilmu sosial merupakan disiplin kompleks, plural, dan interdisipliner. Ia menuntut kreativitas metodologis, dialog lintas disiplin, serta relevansi kontekstual dalam menjawab tantangan sosial kontemporer. Dalam konteks Indonesia, kontribusi ilmu sosial penting memperkuat wacana global dengan perspektif lokal yang unik dan berharga."

Metodologi penelitian sosial telah berkembang menjadi repertoar yang sangat kaya yang mencakup pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan *mixed methods*. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan keterbatasan yang berbeda, dan efektivitasnya bergantung pada kesesuaian dengan pertanyaan penelitian dan konteks. Perkembangan teknologi digital menciptakan peluang baru tetapi juga tantangan etis yang memerlukan pemikiran ulang tentang prinsip-prinsip fundamental etika penelitian.

Bagi mahasiswa, pemahaman terhadap fondasi ilmu sosial ini adalah investasi intelektual jangka panjang yang akan mempengaruhi kualitas penelitian dan kontribusi akademik mereka. Ilmu sosial bukan hanya tentang menguasai teknik analisis data atau menghafal teori, tetapi tentang mengembangkan *sociological imagination* yang memungkinkan kita untuk menghubungkan pengalaman personal dengan struktur sosial yang lebih luas, memahami hubungan antara sejarah dan biografi, dan berkontribusi pada pemahaman dan transformasi dunia sosial.

Dalam konteks Indonesia yang terus mengalami transformasi sosial, ekonomi, dan politik, ilmu sosial memiliki peran krusial dalam memberikan analisis yang bernuansa, berdasarkan bukti, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tantangan seperti digitalisasi, perubahan iklim, urbanisasi, dan demokratisasi memerlukan kontribusi ilmu sosial yang canggih, *interdisciplinary*, dan sensitif terhadap konteks lokal.

Ke depan, perkembangan ilmu sosial Indonesia diharapkan dapat semakin memperkuat dialog antara perspektif global dan lokal, antara teori dan praktik, antara akademisi dan praktisi, serta antara berbagai disiplin dalam

ilmu sosial. Hal ini akan memungkinkan ilmu sosial Indonesia untuk memberikan kontribusi yang semakin signifikan bagi pemahaman tidak hanya tentang masyarakat Indonesia tetapi juga tentang fenomena sosial global dari perspektif Selatan yang unik dan berharga.

Referensi Bab 1

Abbott, A. (2001). *Chaos of Disciplines*. University of Chicago Press.

Adelita, S. (2019). Makna mudik dalam konteks tradisi Jawa-Islam: Studi etnografi di Jawa Tengah. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 24(2), 187-204.

Caraway, T. L. (2007). *Assembling Women: The Feminization of Global Manufacturing*. Cornell University Press.

Craib, I. (1992). *Modern Social Theory*. Harvester Wheatsheaf.

Davies, S. G. (2007). *Challenging Gender Norms: Five Genders Among Bugis in Indonesia*. Thomson Wadsworth.

Flick, U. (2014). *An Introduction to Qualitative Research* (5th ed.). Sage Publications.

Giddens, A. (2009). *Sociology* (6th ed.). Polity Press.

Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Balai Pustaka.

Liddle, R. W., & Mujani, S. (2007). Leadership, party, and religion: Explaining voting behavior in Indonesia. *Comparative Political Studies*, 40(7), 832-857.

Lucas, A., & Warren, C. (2013). *Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia*. Ohio University Press.

Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson.

Rahayu, S. (2023). Dekolonisasi ilmu sosial Indonesia: Dari orientalisme kolonial menuju epistemologi Nusantara. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 8(1), 45-62.

Ritzer, G. (2019). *Sociological Theory* (10th ed.). McGraw-Hill Education.

Sari, M. (2023). Gotong royong sebagai modal sosial: Revitalisasi nilai tradisional dalam pembangunan berkelanjutan. *Sosiohumaniora*, 25(3), 234-249.

Silverman, D. (2013). *Doing Qualitative Research* (4th ed.). Sage Publications.

Sumarto, H. (2017). Dampak sosial program bantuan langsung tunai: Studi kualitatif di Yogyakarta. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 6(2), 112-128.

Tapsell, R. (2017). *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. Rowman & Littlefield.

Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). *Sage Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research* (2nd ed.). Sage Publications.

Tim Peneliti TNP2K. (2014). *The Impact of Indonesia's Program Keluarga Harapan on Child Welfare: Mixed Methods Evaluation*. TNP2K Research Report.

Turner, J. H. (2013). *Contemporary Sociological Theory*. Sage Publications.

Wallace, R. A., & Wolf, A. (2006). *Contemporary Sociological Theory: Expanding the Classical Tradition* (6th ed.). Prentice Hall.

Wallerstein, I. (2004). *The Uncertainties of Knowledge*. Temple University Press.

Widiastuti, R. (2020). Evaluasi efektivitas Kartu Indonesia Pintar: Pendekatan etnografi di Nusa Tenggara Timur. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(3), 201-218.

Wilson, I. D. (2015). *The Politics of Protection: Rackets, Racketeers, and Legitimate Government in Indonesia*. University of Chicago Press.

BAB 2

AKAR FILOSOFIS TEORI SOSIAL

Pendahuluan

Ilmu sosial tidak muncul dalam kevakuman intelektual. Akar-akarnya tertanam dalam dalam tradisi filosofis yang telah berkembang selama berabad-abad, mulai dari pemikiran Yunani Kuno hingga pencerahan Eropa dan transformasi epistemologis modern. Memahami landasan filosofis ini bukan sekadar latihan akademik belaka, tetapi merupakan kunci untuk memahami mengapa teori sosial berkembang dengan cara tertentu dan bagaimana paradigma-paradigma teoretis yang berbeda muncul dalam disiplin ilmu sosial kontemporer.

Bab ini akan mengeksplorasi perjalanan panjang dari filsafat spekulatif menuju ilmu sosial empiris, dengan fokus pada transformasi epistemologis yang memungkinkan lahirnya sosiologi, antropologi, dan disiplin sosial lainnya pada abad ke-19. Kita akan melihat bagaimana perdebatan klasik antara empirisme dan rasionalisme, sintesis kritis Kant, serta gerakan Pencerahan Eropa telah membentuk fondasi intelektual bagi pemikiran sosial modern.

Namun, eksplorasi ini tidak akan berhenti pada tradisi Barat semata. Dalam konteks Indonesia, kita akan mengkaji bagaimana tradisi epistemologi lokal seperti konsep *ilmu laduni* (pengetahuan intuitif), *hikmah* (kebijaksanaan), dan sistem pengetahuan adat berinteraksi dengan warisan kolonial dan modernisasi akademik. Perspektif ini penting untuk memahami bagaimana ilmu sosial Indonesia berkembang tidak hanya sebagai adopsi teori Barat, tetapi juga sebagai sintesis kreatif antara warisan intelektual lokal dan global.

Bab ini akan dibagi menjadi enam bagian utama yang saling terkait. Pertama, kita akan memulai dengan pemahaman tentang filsafat sebagai induk semua ilmu dan bagaimana diferensiasi ilmu terjadi dari abad ke-17 hingga ke-19. Kedua, kita akan mengeksplorasi tradisi epistemologis besar dalam filsafat—empirisme Inggris, rasionalisme Kontinental, dan kritisisme Kant—yang masing-masing memberikan kontribusi fundamental bagi metodologi ilmu sosial.

Ketiga, kita akan mengkaji Gerakan Pencerahan sebagai momen krusial yang memungkinkan kelahiran ilmu sosial melalui tokoh-tokoh seperti Montesquieu, Voltaire, dan Rousseau. Keempat, analisis mendalam tentang aliran-aliran filosofis yang secara langsung membentuk teori sosial klasik, termasuk positivisme Comte, idealisme Hegel, materialisme historis awal, serta fenomenologi dan hermeneutika.

> "Ilmu sosial berakar pada tradisi filosofis panjang, dari Yunani Kuno hingga epistemologi modern. Pemahaman fondasi ini menyingkap lahirnya paradigma teoretis, interaksi lokal-global, serta relevansi filsafat dalam membentuk metodologi, teori, dan arah perkembangan ilmu sosial kontemporer, termasuk konteks Indonesia."

Kelima, kita akan mengeksplorasi hubungan kompleks antara filsafat, teori, dan metode dalam penelitian sosial, termasuk paradigma positivis, interpretivis, dan kritis yang masih mendominasi perdebatan metodologis kontemporer. Akhirnya, kita akan melakukan sintesis untuk memahami kontinuitas dan diskontinuitas antara tradisi filosofis dengan ilmu sosial modern, sambil mengeksplorasi tantangan integrasi lintas paradigma dan masa depan hubungan filsafat-ilmu sosial.

Pemahaman tentang akar filosofis ini akan memberikan fondasi solid bagi mahasiswa untuk memahami mengapa teoretikus seperti Marx menggunakan dialektika Hegelian, mengapa Durkheim mengadopsi pendekatan positivis, atau mengapa Weber mengembangkan metodologi *verstehen*. Lebih dari itu, pemahaman ini akan membantu kita mengembangkan perspektif kritis terhadap teori sosial yang tidak hanya mengadopsi secara buta, tetapi juga mampu melakukan adaptasi dan inovasi teoretis yang sesuai dengan konteks Indonesia.

2.1 Filsafat sebagai Induk Semua Ilmu

Sejarah Filsafat: Dari Yunani Kuno hingga Modern

Filsafat Yunani Kuno meletakkan dasar bagi seluruh tradisi intelektual Barat melalui pencarian sistematis akan kebijaksanaan *(Sophia)* dan pengetahuan *(episteme)*. Tokoh-tokoh seperti Sokrates (470-399 SM), Plato (428-348 SM),

dan Aristoteles (384-322 SM) tidak hanya mengembangkan metode berpikir rasional, tetapi juga menetapkan agenda filosofis yang masih relevan hingga kini: pertanyaan tentang realitas (**ontologi**), pengetahuan (**epistemologi**), dan nilai (**aksiologi**).

Aristoteles secara khusus memberikan kontribusi fundamental bagi metodologi ilmu melalui karyanya *Organon*, yang mengembangkan logika formal dan metode klasifikasi. Konsep pengetahuan ilmiah *(episteme)*, keterampilan praktis *(techne)*, dan kebijaksanaan praktis *(phronesis)* yang dikembangkannya menjadi dasar bagi pembedaan antara ilmu teoretis, praktis, dan produktif—pembedaan yang masih mempengaruhi klasifikasi ilmu kontemporer.

Perkembangan selanjutnya melalui periode Abad Pertengahan menunjukkan sintesis antara filsafat Aristotelian dengan teologi Kristen, terutama melalui karya Thomas Aquinas (1225-1274). Aquinas mengembangkan metode skolastik yang mengintegrasikan akal *(ratio)* dengan iman *(fides*), menciptakan kerangka intelektual yang mendominasi universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Tradisi ini penting karena mempertahankan kontinuitas dengan warisan klasik sambil mengembangkan metode disputasi dan analisis tekstual yang kemudian mempengaruhi metodologi akademik modern.

Renaisans dan awal periode modern (abad ke-15-17) menandai transformasi epistemologis fundamental. Francis Bacon (1561-1626) dalam *Novum Organum* (1620) mengkritik metode deduktif Aristotelian dan mengusulkan pendekatan induktif empiris. Bacon menekankan pentingnya observasi sistematis, eksperimen terkontrol, dan eliminasi prasangka mental *(idola)* dalam pencarian pengetahuan. Visinya tentang ilmu sebagai alat untuk "menyiksa rahasia alam" merefleksikan pergeseran dari kontemplasi filosofis menuju manipulasi aktif terhadap alam.

Pembagian Filsafat: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi

Pembagian klasik filsafat menjadi tiga cabang utama—ontologi, epistemologi, dan aksiologi—memberikan kerangka sistematis untuk memahami pertanyaan-pertanyaan fundamental yang kemudian mempengaruhi perkembangan ilmu sosial.

Ontologi, sebagai studi tentang "ada" atau realitas, mengeksplorasi pertanyaan: "Apakah yang ada?" Dalam konteks ilmu sosial, pertanyaan ontologis menjadi: "Apakah realitas sosial itu ada secara objektif terlepas dari

pemahaman individu, ataukah ia merupakan konstruksi subjektif?" Perdebatan ini kemudian berkembang menjadi perbedaan fundamental antara paradigma realis dan konstruktivis dalam penelitian sosial.

Epistemologi, studi tentang pengetahuan, menangani pertanyaan: "Bagaimana kita dapat mengetahui?" dan "Apa yang dapat kita ketahui?" Dalam ilmu sosial, ini berkembang menjadi perdebatan metodologis antara pendekatan menjelaskan *(erklären)* versus memahami *(verstehen)*, yang pertama kali dirumuskan oleh Wilhelm Dilthey dan kemudian menjadi inti perbedaan antara tradisi positivis dan hermeneutis.

Aksiologi, studi tentang nilai, mengeksplorasi pertanyaan: "Apa yang bernilai?" dan "Bagaimana kita seharusnya hidup?" Dalam konteks ilmu sosial, ini menjadi perdebatan tentang ilmu bebas nilai versus ilmu yang sarat nilai, yang diperdebatkan secara mendalam oleh Max Weber dalam diskusinya tentang *Werturteilsstreit* (perdebatan penilaian nilai) dalam sosiologi Jerman awal abad ke-20.

Transisi dari Filsafat Spekulatif ke Empiris

Abad ke-17 menandai revolusi ilmiah yang mengubah fundamental hubungan antara filsafat dan pengetahuan empiris. Galileo Galilei (1564-1642) mengembangkan metode eksperimental matematika, sementara Johannes Kepler (1571-1630) dan Isaac Newton (1643-1727) menunjukkan kekuatan prediktif hukum-hukum matematika dalam menjelaskan fenomena alam.

> “Ilmu filsafat disebut **induk semua ilmu** karena sejak Yunani Kuno hingga modern meletakkan dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Melalui tokoh seperti Aristoteles, Aquinas, Bacon, Newton, hingga Kant, filsafat membentuk fondasi metodologis, epistemologis, dan etis yang terus memengaruhi perkembangan ilmu sosial maupun ilmu alam.”

Newton khususnya memberikan model untuk ilmu empiris melalui *Principia Mathematica* (1687), yang menggabungkan observasi empiris dengan formulasi matematika yang elegan. Kesuksesan fisika Newtonian menciptakan standar baru untuk pengetahuan ilmiah: prediktabilitas, kuantifikasi, dan universalitas hukum. Model ini kemudian menjadi inspirasi bagi para pemikir sosial seperti Auguste Comte, yang berusaha mengembangkan "fisika sosial".

Immanuel Kant (1724-1804) dalam *Critique of Pure Reason* (1781) memberikan sintesis filosofis yang revolusioner antara rasionalisme dan empirisme. Kant menunjukkan bahwa pengetahuan empiris selalu dimediasi oleh kategori-kategori *a priori* dari pemahaman manusia. Artinya, kita tidak pernah mengakses realitas “benda pada dirinya sendiri *(das Ding an sich)*, tetapi selalu melalui struktur kognitif yang kita bawa sebagai subjek pengetahuan.

Kontribusi Kant yang paling signifikan bagi ilmu sosial adalah konsep tentang "kondisi-kondisi transendental" yang membuat pengalaman menjadi mungkin. Ini kemudian mempengaruhi tradisi hermeneutik melalui Wilhelm Dilthey dan Edmund Husserl, yang mengeksplorasi kondisi-kondisi *a priori* yang membuat pemahaman sosial menjadi mungkin.

Diferensiasi Ilmu dari Filsafat (Abad 17-19)

Proses diferensiasi ilmu dari filsafat terjadi secara bertahap melalui spesialisasi metodologis dan institusional. Matematika memisahkan diri melalui pengembangan analisis dan geometri analitis oleh René Descartes dan Pierre de Fermat. Fisika mengkristalisasi melalui sintesis mekanika Newton. Kimia muncul sebagai disiplin independen melalui revolusi konseptual Antoine Lavoisier tentang konservasi massa dan sistem nomenklatur kimia.

Biologi mengalami transformasi serupa melalui karya Carl Linnaeus dalam taksonomi dan kemudian revolusi evolusioner Charles Darwin. Setiap disiplin ini mengembangkan objek kajian spesifik, metodologi khusus, dan komunitas akademik yang terpisah dari filsafat umum.

Proses ini mencapai puncaknya dalam abad ke-19 dengan kemunculan ilmu-ilmu sosial. Auguste Comte dalam *Course of Positive Philosophy* (1830-1842) mengusulkan hierarki ilmu pengetahuan dari matematika hingga sosiologi, dengan masing-masing memiliki tingkat kompleksitas yang meningkat tetapi mengikuti metode positif yang sama. Émile Durkheim kemudian

memperjuangkan otonomi sosiologi melalui konsep "fakta sosial" sebagai objek kajian *sui generis* yang berbeda dari psikologi individual maupun filsafat moral.

Posisi Ilmu Sosial dalam Pohon Pengetahuan

Wilhelm Dilthey (1833-1911) memberikan kontribusi krusial dalam memposisikan ilmu sosial melalui pembedaannya antara ilmu alam *(naturwissenschaften)* dan ilmu humaniora/sosial *(geisteswissenschaften)*. Menurut Dilthey, ilmu alam berurusan dengan fenomena eksternal yang dapat dijelaskan melalui hukum-hukum kausal, sementara ilmu humaniora berurusan dengan pengalaman hidup *(erlebnis)* yang harus dipahami melalui proses hermeneutik.

Pembedaan ini menciptakan "pemisahan besar" dalam klasifikasi ilmu yang masih mempengaruhi perdebatan kontemporer. Di satu sisi, tradisi positivis yang dimulai Comte dan dilanjutkan Durkheim berusaha memodelkan ilmu sosial sesuai dengan standar ilmu alam. Di sisi lain, tradisi hermeneutik yang dimulai Dilthey dan dikembangkan Weber menekankan keunikan metodologis ilmu sosial.

Heinrich Rickert dan Wilhelm Windelband dari Mazhab Baden memberikan formulasi alternatif melalui pembedaan antara ilmu *nomotetis* (pencarian hukum umum) dan *idiografis* (pemahaman keunikan historis). Pembedaan ini mempengaruhi Max Weber dalam mengembangkan metodologi sosiologi yang mengkombinasikan pendekatan kausal-eksplanatif dengan pemahaman interpretatif.

Dalam konteks Indonesia, pohon pengetahuan mengalami kompleksitas tambahan melalui pertemuan antara tradisi epistemologi Barat dengan sistem pengetahuan lokal. Tradisi pesantren mengembangkan metodologi *bahts* (penelitian) dan *munaqasyah* (diskusi ilmiah) yang menggabungkan analisis tekstual (*tafsir*, *ta'wil*) dengan aplikasi praktis (*fiqh*, *akhlaq*). Sistem pengetahuan adat mengembangkan "ilmu pengetahuan asli" melalui praktik bertani, pengobatan, dan navigasi yang didasarkan pada observasi empiris dan transmisi oral.

Integrasi tradisi-tradisi ini dalam ilmu sosial Indonesia menghasilkan pendekatan yang unik, seperti yang dikembangkan oleh Kuntowijoyo melalui

konsep "ilmu sosial profetik" yang mengintegrasikan objektifikasi ilmiah dengan humanisasi dan liberasi sosial.

2.2 Tradisi Epistemologis Besar dalam Filsafat

Empirisme Inggris: Locke, Hume, Mill

Tradisi empirisme Inggris meletakkan fondasi epistemologis yang kemudian menjadi tulang punggung metodologi positivis dalam ilmu sosial. John Locke (1632-1704) dalam *An Essay Concerning Human Understanding* (1689) mengembangkan teori "*tabula rasa*" yang menolak eksistensi ide-ide bawaan. Menurut Locke, seluruh pengetahuan manusia berasal dari pengalaman inderawi melalui dua sumber: sensasi dari dunia eksternal dan refleksi dari operasi mental internal.

Kontribusi Locke yang paling signifikan adalah konsep tentang "ide sederhana" dan "ide kompleks". Ide sederhana diperoleh langsung dari pengalaman inderawi dan tidak dapat dianalisis lebih lanjut, sementara ide kompleks dibentuk melalui kombinasi, komparasi, dan abstraksi dari ide sederhana. Kerangka ini memberikan model atomistik untuk analisis pengetahuan yang kemudian mempengaruhi pendekatan reduksionis dalam ilmu sosial positivis.

David Hume (1711-1776) mengembangkan empirisme lebih radikal melalui skeptisisme epistemologis dalam *A Treatise of Human Nature* (1739-1740) dan *An Enquiry Concerning Human Understanding* (1748). Hume menunjukkan bahwa induksi—basis dari semua pengetahuan empiris—tidak dapat dijustifikasi secara logis. "Masalah Hume" tentang induksi mengungkapkan bahwa kita tidak dapat membuktikan bahwa masa depan akan menyerupai masa lalu berdasarkan pengalaman semata.

> “Tradisi empirisme Inggris melalui Locke, Hume, dan Mill menegaskan pengalaman inderawi sebagai sumber pengetahuan, mengkritik kausalitas serta induksi, dan merumuskan metode logis sistematis. Pemikiran ini meletakkan dasar positivisme, reduksionisme, dan metodologi eksperimental yang berpengaruh besar dalam perkembangan ilmu sosial modern.”

Lebih fundamental lagi, Hume mengkritik konsep kausalitas dengan menunjukkan bahwa yang kita observasi hanyalah "hubungan konstan" antara peristiwa, bukan koneksi kausal yang sesungguhnya. Kritik ini memiliki implikasi mendalam bagi ilmu sosial karena menggugat status epistemologis hukum-hukum sosial dan prediksi dalam penelitian empiris.

John Stuart Mill (1806-1873) mengembangkan empirisme induktif yang lebih sistematis melalui *A System of Logic* (1843). Mill merumuskan metode-metode induksi yang terkenal: *method of agreement* (metode persetujuan), *method of difference* (metode perbedaan), *method of residues* (metode sisa), dan *method of concomitant variation* (metode variasi bersamaan). Metode-metode ini menjadi dasar bagi metodologi eksperimental dan kuasi-eksperimental dalam ilmu sosial kontemporer.

Mill juga mengeksplorasi aplikasi metode ilmiah pada fenomena sosial dalam Buku VI dari *System of Logic*, yang berjudul *"Tentang Logika Ilmu-Ilmu Moral"*. Ia mengakui kompleksitas fenomena sosial tetapi tetap optimis bahwa metode induksi dapat diterapkan dengan modifikasi yang tepat. Diskusi Mill tentang "pluralitas sebab" dan "percampuran efek" mengantisipasi tantangan metodologis yang masih diperdebatkan dalam ilmu sosial kontemporer.

Rasionalisme Kontinental: Descartes, Spinoza, Leibniz

Tradisi rasionalisme kontinental mengembangkan pendekatan deduktif yang menekankan peran akal sebagai sumber pengetahuan yang lebih fundamental daripada pengalaman inderawi. René Descartes (1596-1650) dalam *Discourse on Method* (1637) dan *Meditations on First Philosophy* (1641) mengembangkan metode keraguan sistematis untuk mencapai fondasi epistemologis yang tidak dapat diragukan.

Cogito ergo sum ("Saya berpikir, maka saya ada") menjadi titik Archimedean yang memungkinkan Descartes membangun sistem filosofis deduktif. Metode Cartesian menekankan intuisi dan deduksi sebagai dua operasi mental yang dapat memberikan pengetahuan yang pasti. Pengaruh Descartes terhadap ilmu sosial tampak dalam pendekatan sistematis dan pencarian prinsip-prinsip universal yang kemudian mengkarakterisasi *grand theory* seperti sistem Parsonian.

Baruch Spinoza (1632-1677) mengembangkan rasionalisme geometris dalam *Ethics Demonstrated in Geometrical Order* (1677). Spinoza mengadopsi metode Euclidean dengan definisi, aksioma, proposisi, dan demonstrasi

untuk menganalisis realitas, termasuk fenomena sosial dan politik. Pendekatan "*more geometrico*" ini mencerminkan keyakinan rasionalis bahwa realitas memiliki struktur logis yang dapat dipahami melalui akal murni.

Kontribusi Spinoza yang paling relevan bagi teori sosial adalah analisisnya tentang afek dan kekuasaan dalam kehidupan politik. Konsep "*conatus*" (usaha untuk mempertahankan eksistensi) dan analisis tentang "*multitude*" mengantisipasi tema-tema yang kemudian dikembangkan dalam teori sosial kontemporer, terutama dalam karya Antonio Negri dan Michael Hardt.

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) mengembangkan sistem monadologi yang mengintegrasikan metafisika rasionalis dengan logika matematika. Prinsip-prinsip Leibnizian seperti "prinsip alasan yang memadai" dan "prinsip identitas hal-hal yang tidak dapat dibedakan" memberikan kerangka untuk analisis sistematis yang mempengaruhi perkembangan logika dan matematika. Visi Leibniz tentang "*calculus ratiocinator*" dan "*characteristica universalis*"—bahasa simbolis universal untuk semua pengetahuan—mengantisipasi proyek formalisasi yang kemudian mempengaruhi ilmu sosial kuantitatif.

Kritisisme Kant: Sintesis Empirisme-Rasionalisme

Immanuel Kant (1724-1804) mengklaim bahwa filsafatnya melakukan "Revolusi Copernican" dalam epistemologi dengan menunjukkan bahwa objek pengetahuan harus konform dengan struktur kognitif subjek, bukan sebaliknya. Dalam *Critique of Pure Reason* (1781/1787), Kant mengembangkan sintesis revolusioner antara empirisme dan rasionalisme melalui teori tentang pengetahuan "*synthetic a priori*".

Kant membedakan antara pengetahuan *analitik* (yang predikatnya terkandung dalam subjek) dan *sintetik* (yang predikatnya menambah sesuatu yang baru pada subjek), serta antara pengetahuan *a priori* (independen dari pengalaman) dan *a posteriori* (bergantung pada pengalaman). Kemungkinan pengetahuan "*synthetic a priori*"—seperti matematika dan metafisika—menjadi fokus utama kritik Kantian.

Teori Kant tentang "kategori-kategori transendental" menunjukkan bahwa pengalaman empiris selalu terstruktur oleh kategori-kategori *a priori* seperti kausalitas, substansi, dan pluralitas. Ini berarti bahwa apa yang kita sebut "realitas empiris" (dunia fenomenal) selalu merupakan konstruksi kognitif,

bukan akses langsung kepada "benda-pada-dirinya-sendiri" (dunia noumenal).

Implikasi epistemologis Kant sangat mendalam bagi ilmu sosial. Pertama, ia menunjukkan bahwa objektivitas ilmiah tidak berarti korespondensi langsung dengan realitas eksternal, tetapi intersubjektivitas yang didasarkan pada struktur kognitif universal. Kedua, ia membuka ruang untuk mengeksplorasi kondisi-kondisi *a priori* yang membuat pemahaman sosial menjadi mungkin—proyek yang kemudian dikembangkan oleh tradisi fenomenologis dan hermeneutik.

Imperatif Kategoris dan Moralitas

Dalam *Critique of Practical Reason* (1788) dan *Groundwork for the Metaphysics of Morals* (1785), Kant mengembangkan etika deontologis yang didasarkan pada "imperatif kategoris": "Bertindaklah hanya menurut maksim yang dapat kamu kehendaki menjadi hukum universal." Prinsip ini memberikan fondasi rasional untuk moralitas yang independen dari konsekuensi empiris atau kecenderungan subjektif.

Formulasi kedua dari imperatif kategoris—"Bertindaklah sedemikian rupa sehingga kamu memperlakukan kemanusiaan, baik dalam dirimu maupun dalam diri orang lain, selalu sebagai tujuan dan tidak pernah hanya sebagai alat"—memberikan basis filosofis bagi konsep martabat manusia yang kemudian mempengaruhi teori hak asasi manusia dan kritik terhadap instrumentalisasi sosial.

Etika Kantian memberikan kerangka normatif yang kemudian mempengaruhi tradisi teori kritis, terutama dalam karya Jürgen Habermas tentang etika diskursus. Konsep Kant tentang *"Kingdom of Ends"* sebagai komunitas moral yang ideal juga mengantisipasi tema-tema dalam teori demokrasi deliberatif kontemporer.

Pengaruh terhadap Metodologi Sosial

Kantianisme mempengaruhi metodologi ilmu sosial melalui beberapa jalur. Pertama, pembedaan Kant antara *understanding* (pemahaman) dan *reason* (akal) memberikan kerangka untuk membedakan antara analisis empiris dan refleksi teoretis. Wilhelm Dilthey menggunakan pembedaan ini untuk mengembangkan metodologi *Geisteswissenschaften* yang berbeda dari *Naturwissenschaften*.

Kedua, konsep Kant tentang "ide-ide regulatif"—ide-ide yang memandu penelitian tanpa dapat diverifikasi secara empiris—mempengaruhi metodologi Weber tentang "tipe ideal" dan "relevansi nilai" dalam seleksi objek penelitian sosial. Max Weber secara eksplisit mengakui utang intelektualnya kepada filsafat neo-Kantian dalam mengembangkan metodologi sosiologi interpretatif.

Ketiga, kritisisme Kant terhadap "metafisika dogmatis" memberikan inspirasi bagi positivisme logis dalam upayanya mengeliminasi elemen-elemen metafisik dari ilmu pengetahuan. Namun, pengaruh ini bersifat paradoksal karena Kant sendiri tidak menolak metafisika secara total, tetapi hanya membatasi klaimnya dalam domain pengalaman yang mungkin.

Dalam konteks Indonesia, pengaruh Kantian dapat dilihat dalam tradisi filsafat Islam yang mengintegrasikan rasionalisme dengan empirisme, seperti dalam karya Harun Nasution tentang teologi rasional dan Nurcholish Madjid tentang sekularisasi dalam Islam. Konsep Kant tentang "pencerahan" sebagai "*sapere aude*" (berani berpikir sendiri) juga beresonansi dengan gerakan pembaharuan Islam Indonesia yang menekankan *ijtihad* (penafsiran independen) dan kritisisme terhadap otoritas tradisional.

2.3 Gerakan Pencerahan dan Kelahiran Ilmu Sosial

Pencerahan (Enlightenment) dan Revolusi Intelektual

Gerakan Pencerahan abad ke-18 menandai transformasi fundamental dalam cara pandang Eropa terhadap pengetahuan, masyarakat, dan kemajuan manusia. *Aufklärung* (Pencerahan) Jerman, *Enlightenment* Inggris, dan *Lumières* Prancis, meskipun memiliki karakteristik nasional yang berbeda, sama-sama menekankan supremasi akal, kritik terhadap otoritas tradisional, dan optimisme tentang kemajuan melalui ilmu pengetahuan.

Immanuel Kant dalam esainya "Apakah Pencerahan Itu?" (1784) memberikan definisi klasik: "Pencerahan adalah keluarnya manusia dari ketidakdewasaan yang disebabkan oleh dirinya sendiri." Pencerahan bukan hanya revolusi intelektual, tetapi juga emansipasi moral dan politik dari "ketidakdewasaan" yang dipertahankan oleh otoritas eksternal—baik agama, politik, maupun tradisi. Motto "*sapere aude*" (berani berpikir sendiri) menjadi semangat epistemologis yang kemudian menginspirasi perkembangan ilmu sosial sebagai kritik rasional terhadap masyarakat.

Encyclopédie yang diedit oleh Denis Diderot dan Jean le Rond d'Alembert (1751-1772) menjadi simbol dari proyek Pencerahan untuk mengorganisir dan menyebarkan pengetahuan rasional. Proyek ini tidak hanya mengompilasi pengetahuan yang ada, tetapi juga mempromosikan visi tentang pengetahuan sebagai instrumen untuk transformasi sosial. Artikel-artikel tentang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam *Encyclopédie* mengantisipasi kelahiran ilmu-ilmu sosial sebagai disiplin akademik independen.

Pencerahan juga ditandai oleh "*querelle des anciens et des modernes*"—perdebatan antara mereka yang menghargai otoritas klasik versus mereka yang percaya pada kemajuan modern. Kemenangan kubu "modern" menciptakan orientasi temporal yang berorientasi ke depan, yang kemudian menjadi karakteristik fundamental dari ilmu sosial modern dengan penekanannya pada perubahan, evolusi, dan kemajuan sosial.

Montesquieu: Hukum Sosial dan Determinisme Geografis

Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu (1689-1755) dalam *The Spirit of Laws* (1748) mengembangkan analisis komparatif sistematis pertama tentang sistem politik dan hukum. Karya ini menandai transisi dari filsafat politik normatif menuju analisis sosiologis empiris tentang variasi institusi sosial.

Montesquieu mengembangkan tipologi sistem pemerintahan—republik, monarki, dan despotisme—berdasarkan prinsip-prinsip yang menggerakkannya: kebajikan untuk republik, kehormatan untuk monarki, dan ketakutan untuk despotisme. Analisis ini tidak hanya deskriptif tetapi juga eksplanatori, menunjukkan bagaimana struktur politik berkorelasi dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis.

Teori determinisme geografis Montesquieu mengargumentasikan bahwa iklim dan geografi mempengaruhi karakter nasional dan institusi politik. Meskipun determinisme geografis kemudian dikritik sebagai terlalu simplistik, pendekatan Montesquieu menunjukkan kemungkinan untuk mengidentifikasi "hukum sosial" yang menghubungkan variabel-variabel sosial secara sistematis. Metodologi komparatif yang dikembangkannya menjadi model bagi sosiologi politik kontemporer.

Konsep Montesquieu tentang "pemisahan kekuasaan" juga mengandung wawasan sosiologis yang mendalam tentang diferensiasi fungsional dalam sistem politik. Ia menunjukkan bahwa stabilitas politik bergantung pada

keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang berbeda—wawasan yang kemudian dikembangkan dalam teori sistem oleh Talcott Parsons dan Niklas Luhmann.

Voltaire: Kritik Sosial dan Toleransi

François-Marie Arouet, yang dikenal sebagai Voltaire (1694-1778), mengembangkan kritik sosial yang tajam terhadap fanatisme religius, intoleransi, dan ketidakadilan sosial. Melalui karya-karya seperti *Candide* (1759), *Philosophical Letters* (1734), dan *Treatise on Tolerance* (1763), Voltaire tidak hanya mengkritik institusi-institusi yang ada tetapi juga mengembangkan metodologi kritik sosial yang kemudian mempengaruhi tradisi teori kritis.

Voltaire mengembangkan konsep "*philosophe*" sebagai intelektual yang terlibat dengan masalah-masalah sosial kontemporer. Berbeda dari filsuf tradisional yang fokus pada spekulasi metafisik, *philosophe* Voltarian menggunakan akal untuk menganalisis dan mengkritik realitas sosial dengan tujuan transformatif. Konsepsi ini mengantisipasi peran sosiolog sebagai "intelektual publik" yang dikembangkan oleh C. Wright Mills dalam abad ke-20.

Prinsip toleransi yang diperjuangkan Voltaire—"Saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan, tetapi saya akan mempertahankan sampai mati hak Anda untuk mengatakannya"—memberikan fondasi filosofis bagi konsep pluralisme yang kemudian menjadi sentral dalam teori demokrasi liberal. Voltaire menunjukkan bahwa toleransi bukan hanya kebajikan moral tetapi juga kondisi sosiologis yang diperlukan untuk kemajuan pengetahuan dan stabilitas sosial.

Metodologi historis Voltaire dalam *Essay on the Customs and the Spirit of the Nations* (1756) juga inovatif karena menekankan sejarah sosial dan budaya daripada sejarah politik dan militer konvensional. Pendekatan ini mengantisipasi perkembangan *Annales School* dan sejarah sosial yang kemudian mempengaruhi sosiologi historis.

Rousseau: Kontrak Sosial dan Kedaulatan Rakyat

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) mengembangkan teori kontrak sosial yang revolusioner dalam *The Social Contract* (1762) dan analisis tentang ketidaksetaraan sosial dalam *Discourse on Inequality* (1755). Rousseau

menunjukkan bahwa manusia "dilahirkan bebas" tetapi "di mana-mana terbelenggu" karena institusi-institusi sosial yang menciptakan dominasi dan alienasi.

Teori Rousseau tentang "kehendak umum" (*volonté générale*) memberikan konsep yang fundamental bagi teori demokrasi modern. Kehendak umum berbeda dari "kehendak semua" (*volonté de tous*) karena ia mengekspresikan kepentingan umum yang sesungguhnya, bukan sekadar agregasi kepentingan individual. Konsep ini mengandung wawasan sosiologis yang mendalam tentang bagaimana solidaritas sosial dibentuk melalui partisipasi politik.

Kritik Rousseau terhadap *amour-propre* (cinta diri yang kompetitif) versus *amour de soi* (cinta diri yang natural) mengantisipasi analisis sosiologis tentang bagaimana modernisasi menciptakan bentuk-bentuk baru individualisme dan alienasi sosial. Tema ini kemudian dikembangkan oleh Marx dalam teori alienasi dan oleh Durkheim dalam analisis tentang *anomie* (keterasingan).

Rousseau juga mengembangkan teori pendidikan dalam *Emile* (1762) yang menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam pembentukan karakter. Pendekatan ini mengantisipasi perkembangan sosiologi pendidikan dan psikologi sosial tentang sosialisasi.

Dampak Revolusi Prancis terhadap Pemikiran Sosial

Revolusi Prancis (1789-1799) menjadi "laboratorium" empiris untuk menguji teori-teori politik dan sosial yang dikembangkan selama Pencerahan. Revolusi menunjukkan bahwa perubahan sosial radikal adalah mungkin, tetapi juga mengungkapkan kompleksitas dan ambiguitas dari transformasi sosial yang tidak diantisipasi oleh optimisme Pencerahan.

Edmund Burke dalam *Reflections on the Revolution in France* (1790) mengembangkan kritik konservatif yang menekankan pentingnya tradisi dan evolusi gradual versus perubahan revolusioner. Kritik Burke mengantisipasi tema-tema dalam sosiologi konservatif yang kemudian dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville dan Émile Durkheim tentang pentingnya solidaritas sosial dan kontinuitas institusional.

Sebaliknya, Thomas Paine dalam *Rights of Man* (1791) mempertahankan prinsip-prinsip revolusioner dan mengembangkan teori tentang hak-hak universal yang kemudian mempengaruhi perkembangan teori hak asasi manusia. Paine menunjukkan bahwa legitimasi politik harus didasarkan pada

persetujuan yang diberikan secara bebas, bukan pada tradisi atau otoritas historis.

Pengalaman revolusioner juga menghasilkan refleksivitas yang baru tentang perubahan sosial. Tokoh-tokoh seperti Germaine de Staël dan Benjamin Constant mengembangkan analisis tentang bagaimana revolusi politik mengubah struktur sosial dan budaya. Analisis ini mengantisipasi sosiologi politik modern tentang revolusi dan transformasi sosial.

> "Revolusi Prancis (1789-1799) menjadi laboratorium nyata untuk menguji gagasan politik dan sosial era Pencerahan. Revolusi membuktikan kemungkinan perubahan sosial radikal, namun juga menampakkan kerumitan dan ketidakpastian transformasi sosial yang tak terduga bagi semangat optimisme Pencerahan."

Napoleon Bonaparte dan periode Konsulat/Kekaisaran (1799-1815) menunjukkan bagaimana revolusi dapat menghasilkan bentuk-bentuk baru otoritarianisme. Fenomena ini kemudian dianalisis oleh Alexis de Tocqueville dalam *The Old Regime and the Revolution* (1856) dan memberikan wawasan tentang dialektika antara emansipasi dan dominasi yang kemudian menjadi tema sentral dalam teori kritis Frankfurt School.

2.4 Aliran-Aliran Filosofis Pembentuk Teori Sosial

Positivisme Auguste Comte

Auguste Comte (1798-1857) mengklaim sebagai pendiri "fisika sosial" atau sosiologi sebagai ilmu positif tentang masyarakat. Dalam *Course of Positive Philosophy* (1830-1842), Comte mengembangkan sistem filosofis untuk memahami pengetahuan manusia dan masyarakat. Lebih dari 450 sebelumnya, Ibn Khaldun (1332-1406) telah meletakkan fundament teori ini.

Hukum Tiga Tahap Perkembangan Masyarakat

Comte merumuskan "hukum tiga tahap" yang mengargumentasikan bahwa pemikiran manusia berkembang melalui tiga tahap: teologis, metafisik, dan positif. Pada tahap teologis, fenomena dijelaskan melalui intervensi

supranatural. Tahap metafisik menggantikan entitas supranatural dengan kekuatan-kekuatan abstrak. Tahap positif mencapai penjelasan ilmiah berdasarkan observasi dan hukum-hukum empiris.

Hukum tiga tahap tidak hanya berlaku untuk perkembangan pengetahuan individual tetapi juga untuk evolusi masyarakat secara keseluruhan. Comte mengargumentasikan bahwa masyarakat Eropa pada abad ke-19 sedang mengalami transisi dari tahap metafisik menuju tahap positif, yang akan ditandai oleh reorganisasi sosial berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah.

Implikasi sosiologis dari hukum tiga tahap adalah bahwa perubahan sosial mengikuti pola yang dapat diprediksi dan bahwa ilmu pengetahuan dapat memberikan panduan untuk reorganisasi sosial yang rasional. Konsepsi ini memberikan legitimasi ilmiah bagi proyek rekayasa sosial yang kemudian mempengaruhi perkembangan kebijakan sosial modern.

Hierarki Ilmu Pengetahuan

Comte mengembangkan klasifikasi hierarkis ilmu pengetahuan berdasarkan tingkat kompleksitas dan generalitas: matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, dan sosiologi. Setiap ilmu bergantung pada ilmu yang lebih fundamental tetapi memiliki hukum-hukum khusus yang tidak dapat direduksi kepada ilmu yang lebih dasar.

Sosiologi menempati posisi puncak dalam hierarki karena mengkaji fenomena yang paling kompleks—masyarakat manusia—tetapi juga yang paling penting untuk kehidupan praktis. Comte membedakan antara "statika sosial" (studi tentang kondisi-kondisi eksistensi masyarakat) dan "dinamika sosial" (studi tentang hukum-hukum perubahan sosial).

Hierarki Comtean memberikan legitimasi epistemologis bagi otonomi sosiologi sambil mempertahankan kesatuan ilmu. Konsepsi ini mempengaruhi tradisi positivis dalam sosiologi yang berusaha mengembangkan hukum-hukum sosial dengan tingkat presisi yang sama dengan ilmu alam.

"Fisika Sosial" dan Kelahiran Sosiologi

Comte awalnya menggunakan istilah "fisika sosial" untuk disiplin baru yang ia kembangkan, tetapi kemudian mengadopsi "sosiologi" karena istilah pertama telah digunakan oleh Adolphe Quetelet untuk statistik sosial. Pilihan

terminologi ini merefleksikan ambisi Comte untuk mengembangkan ilmu tentang masyarakat yang setara dengan fisika dalam hal presisi dan prediktabilitas.

Metodologi Comtean menekankan observasi, eksperimen (bila mungkin), dan komparasi sebagai metode fundamental sosiologi. Ia mengembangkan konsep "konsensus sosial"—ide bahwa masyarakat adalah sistem organik yang terintegrasi—yang kemudian mempengaruhi tradisi fungsionalis dalam sosiologi.

Comte juga mengembangkan visi tentang sosiolog sebagai "dokter sosial" yang dapat mendiagnosis patologi sosial dan meresepkan obat untuk reorganisasi masyarakat. Konsepsi ini mengandung implikasi normatif yang kemudian dikritik oleh Max Weber dalam diskusinya tentang ilmu sosial "bebas nilai".

Pengaruh terhadap Durkheim dan Tradisi Empiris

Émile Durkheim secara eksplisit mengakui utang intelektualnya kepada Comte sambil mengembangkan metodologi yang lebih ketat. Durkheim mengadopsi orientasi positif Comte tetapi mengkritik kurangnya ketelitian empiris dalam analisis Comtean. Konsep Durkheim tentang "fakta sosial" sebagai "benda" yang dapat dikaji secara objektif mengembangkan program positivis Comte dengan lebih sistematis.

Pengaruh Comte juga dapat dilihat dalam tradisi Chicago School melalui penekanan pada observasi empiris dan analisis ekologi sosial. Robert Park dan Ernest Burgess mengadopsi metode observasi Comtean tetapi mengkombinasikannya dengan etnografi yang lebih detail.

Dalam konteks internasional, positivisme Comte mempengaruhi perkembangan sosiologi di Amerika Latin melalui tokoh-tokoh seperti Gabino Barreda di Meksiko dan Joaquim Nabuco di Brasil. Di Indonesia, pengaruh positivis dapat dilihat dalam tradisi penelitian sosial yang menekankan data empiris dan aplikasi praktis, seperti yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik dan lembaga-lembaga penelitian pemerintah.

Idealisme Jerman (Hegel)

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) mengembangkan sistem filosofis yang paling komprehensif dalam tradisi idealisme Jerman. Melalui karya-

karya seperti *Phenomenology of Spirit* (1807), *Science of Logic* (1812-1816), dan *Philosophy of Right* (1821), Hegel menciptakan kerangka teoretis yang kemudian memberikan pengaruh mendalam—baik positif maupun negatif—terhadap perkembangan teori sosial.

Dialektika dan Perkembangan Sejarah

Metode dialektis Hegel mengoperasikan melalui triad tesis-antitesis-sintesis, di mana setiap konsep atau formasi sejarah mengandung kontradiksi internal yang mendorong perkembangannya menuju tingkat yang lebih tinggi. Dialektika bukan hanya metode logis tetapi juga hukum ontologis yang mengatur perkembangan realitas itu sendiri.

Dalam *Phenomenology of Spirit*, Hegel menunjukkan bagaimana kesadaran berkembang melalui serangkaian tahap—dari "kepastian inderawi" hingga "pengetahuan absolut"—melalui proses dialektis yang melibatkan konfrontasi dengan "yang lain" dan "negativitas". Setiap tahap mengandung kebenaran parsial yang dipertahankan tetapi juga diatasi (*aufgehoben*) dalam tahap yang lebih tinggi.

Aplikasi dialektika pada sejarah menghasilkan visi tentang "sejarah dunia" sebagai proses "realisasi diri Roh" (*Geist*) melalui institusi-institusi sosial dan politik. Hegel mengargumentasikan bahwa sejarah memiliki *telos* atau tujuan rasional—realisasi kebebasan—yang dicapai melalui konflik dan resolusi dialektis antara kekuatan-kekuatan historis yang bertentangan.

Roh Absolut dan Kesadaran Diri

Konsep Hegel tentang "Roh Absolut" (*Absoluter Geist*) merujuk pada kesadaran yang telah mencapai pengetahuan diri yang sempurna melalui manifestasinya dalam sejarah, seni, agama, dan filsafat. Roh Absolut bukan entitas supranatural tetapi struktur rasional yang imanen dalam realitas itu sendiri.

Proses mencapai "pengetahuan absolut" melibatkan "pengakuan" (*Anerkennung*)—proses dialektis di mana kesadaran individual mencapai kesadaran diri melalui interaksi dengan kesadaran lain. Analisis Hegel tentang "dialektika tuan-budak" dalam *Phenomenology* menunjukkan bagaimana relasi sosial fundamental dibentuk melalui perjuangan untuk pengakuan.

Konsep pengakuan kemudian menjadi tema sentral dalam teori sosial kontemporer, terutama dalam karya Axel Honneth tentang "politik pengakuan" dan Charles Taylor tentang multikulturalisme. Wawasan Hegel bahwa identitas individual dibentuk melalui interaksi sosial juga mengantisipasi perkembangan interaksionisme simbolik dan sosiologi interpretatif.

Negara sebagai Perwujudan Etika

Dalam *Philosophy of Right*, Hegel mengembangkan teori tentang "kehidupan etis" (*Sittlichkeit*) yang dipraktikkan melalui institusi-institusi sosial: keluarga (*Familie*), masyarakat sipil (*bürgerliche Gesellschaft*), dan negara (*Staat*). Setiap sphere memiliki logika etis yang berbeda tetapi saling komplementer dalam membentuk kehidupan sosial yang terintegrasi.

Konsep Hegel tentang "masyarakat sipil" sebagai sphere ekonomi dan sosial yang dimediasi oleh pasar dan asosiasi-asosiasi sukarela mengantisipasi analisis sosiologis modern tentang diferensiasi fungsional. Hegel menunjukkan bahwa masyarakat sipil menghasilkan individualisme dan partikularisme yang harus diintegrasikan melalui institusi universal—negara.

Negara dalam konsepsi Hegelian bukan hanya aparatus politik tetapi "aktualitas ide etis"—institusi yang merealisasikan kebebasan substantif melalui sintesis antara partikularitas individual dan universalitas rasional. Visi ini memberikan dasar filosofis bagi tradisi komunitarianisme yang mengkritik individualisme liberal.

Pengaruh terhadap Marx dan Teori Kritis

Karl Marx mengadopsi metode dialektis Hegel tetapi mengkritik idealisme spekulatifnya. Dalam *German Ideology* (1845), Marx mengargumentasikan bahwa ia membalik dialektika Hegel dengan menempatkan basis material, bukan ideal, sebagai kekuatan penggerak sejarah. "Menegakkan Hegel" berarti menunjukkan bahwa kesadaran adalah produk dari keberadaan sosial, bukan sebaliknya.

Namun, Marx mempertahankan aspek-aspek fundamental dari dialektika Hegelian: historisitas, totalitas, dan negativitas. Konsep Marx tentang "perjuangan kelas" mengoperasikan melalui logika dialektis yang sama dengan "dialektika tuan-budak" Hegel, tetapi dalam konteks material yang konkret.

Frankfurt School, terutama Herbert Marcuse dan Theodor Adorno, mengembangkan "dialektika negatif" yang mengkritik baik idealisme Hegelian maupun materialisme Marxis ortodoks yang vulgar. Mereka mempertahankan momen kritis dari dialektika Hegel sambil menolak klaim tentang rekonsiliasi final dalam Roh Absolut.

Jürgen Habermas mengembangkan teori tentang "tindakan komunikatif" yang mengintegrasikan wawasan Hegelian tentang pengakuan dengan pragmatik linguistik. Habermas menunjukkan bagaimana klaim validitas dalam komunikasi mengoperasikan melalui struktur dialektis yang memungkinkan pembelajaran dan emansipasi sosial.

Materialisme Historis Awal

Perkembangan materialisme historis sebagai kritik terhadap idealisme Hegelian menandai momen krusial dalam formasi teori sosial modern. Ludwig Feuerbach (1804-1872) dalam *The Essence of Christianity* (1841) mengembangkan kritik antropologis terhadap spekulasi idealis dengan menunjukkan bahwa konsep-konsep abstrak adalah proyeksi dari kebutuhan dan kapasitas manusia yang nyata.

Kritik terhadap Idealisme Hegel

Feuerbach mengargumentasikan bahwa Hegel melakukan "mistifikasi filosofis" dengan memperlakukan produk-produk kesadaran manusia sebagai entitas independen yang mengalienasi diri dalam sejarah. Metode "kritik transformatif" Feuerbach menunjukkan bahwa subjek dan predikat dalam proposisi-proposisi filosofis harus dibalik: bukan "pikiran menentukan keberadaan" tetapi "keberadaan menentukan pikiran".

Kritik Feuerbach memberikan model untuk demistifikasi yang kemudian diadopsi oleh Marx dalam analisisnya tentang "fetisisme komoditas" dan "kesadaran palsu". Wawasan fundamental bahwa abstraksi filosofis sering menutupi realitas material yang konkret menjadi tema sentral dalam tradisi materialis.

Namun, Marx mengkritik Feuerbach karena tetap beroperasi dalam kerangka filosofis yang abstrak dan tidak mengeksplorasi kondisi-kondisi sosial dan historis yang menghasilkan alienasi. Dalam *Theses on Feuerbach* (1845), Marx mengargumentasikan bahwa masalahnya bukan hanya untuk menginterpretasi dunia tetapi untuk mengubahnya.

Basis Material dan Superstruktur

Marx dan Engels dalam *German Ideology* (1845) mengembangkan konsep tentang "mode produksi" sebagai basis material yang menentukan "superstruktur" ideologis dan institusional. Mode produksi terdiri dari "kekuatan produksi" (teknologi, keterampilan, pengetahuan) dan "hubungan produksi" (hubungan-hubungan sosial dalam proses produksi).

Konsep basis-superstruktur menunjukkan bahwa institusi-institusi sosial, hukum, politik, dan kultur tidak berkembang secara otonom tetapi berkondisi pada struktur ekonomi yang mendasarinya. Namun, relasi antara basis dan superstruktur bukan mekanistik tetapi dialektis—superstruktur dapat memberikan "otonomi relatif" dan "efek umpan balik" pada basis material.

Materialisme historis menunjukkan bahwa perubahan sosial didorong oleh kontradiksi antara kekuatan produksi yang berkembang dengan hubungan produksi yang sudah usang. Revolusi sosial terjadi ketika kontradiksi ini mencapai antagonisme yang tidak dapat diselesaikan dalam kerangka mode produksi yang ada.

Determinisme Ekonomi vs Voluntarisme

Interpretasi ortodoks materialisme historis sering menekankan "determinisme ekonomi" yang mereduksi semua fenomena sosial kepada epifenomena dari basis ekonomi. Interpretasi ini menghasilkan fatalisme yang mengabaikan peran agensi manusia dalam membentuk sejarah.

Engels dalam surat-suratnya yang ditulis belakangan mencoba memodifikasi interpretasi deterministik dengan menekankan "determinasi dalam instansi terakhir" dan interaksi kompleks antara berbagai faktor sosial. Ia mengakui bahwa Marx dan dia sendiri telah terlalu menekankan faktor ekonomi dalam polemik melawan idealisme.

Antonio Gramsci mengembangkan konsep "hegemoni" untuk menunjukkan bagaimana dominasi kelas tidak hanya dipertahankan melalui paksaan ekonomi tetapi juga melalui kepemimpinan kultural dan ideologis. Konsep hegemoni menunjukkan bahwa superstruktur memiliki "otonomi relatif" yang signifikan dan bahwa perubahan sosial melibatkan perjuangan pada level kultural dan politik, tidak hanya ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, perdebatan tentang determinisme ekonomi versus voluntarisme memiliki resonansi khusus dalam analisis tentang "mode produksi Asiatik" dan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Tokoh-tokoh seperti Soedjatmoko dan Dawam Rahardjo mengembangkan perspektif yang mengintegrasikan analisis struktural dengan penekanan pada agensi dan kreativitas kultural dalam proses pembangunan.

Fenomenologi dan Hermeneutika

Tradisi fenomenologi dan hermeneutika mengembangkan alternatif metodologis terhadap naturalisme positivis dan spekulasi idealis melalui fokus pada struktur-struktur kesadaran dan makna yang membuat pengalaman sosial menjadi mungkin.

Edmund Husserl dan Metode Fenomenologis

Edmund Husserl (1859-1938) mengembangkan fenomenologi sebagai "ilmu kesadaran" yang berusaha mengeksplorasi struktur-struktur esensial dari pengalaman tanpa prasupposisi tentang eksistensi objek-objek eksternal. Metode "*epoché*" atau "reduksi fenomenologis" melibatkan "menangguhkan" sikap natural tentang dunia untuk fokus pada bagaimana objek-objek "muncul" (*phenomena*) bagi kesadaran.

Husserl membedakan antara "sikap natural" yang mengasumsikan eksistensi independen dunia objektif dengan "sikap fenomenologis" yang fokus pada "korelasi" antara kesadaran dan objek-objeknya. Wawasan fundamental bahwa kesadaran selalu "intensional"—selalu kesadaran "tentang sesuatu"—menunjukkan bahwa subjek dan objek adalah momenta dari struktur yang sama, bukan entitas yang terpisah.

Dalam *Crisis of European Sciences* (1936), Husserl mengkritik "naturalisasi" ilmu-ilmu modern yang mengabaikan "dunia kehidupan" (*Lebenswelt*)—domain pengalaman pra-teoretis yang menjadi fondasi bagi semua abstraksi ilmiah. Kritik ini memberikan basis filosofis bagi sosiologi interpretatif yang menekankan pentingnya makna dan pemahaman dalam analisis sosial.

Wilhelm Dilthey dan Geisteswissenschaften

Wilhelm Dilthey (1833-1911) mengembangkan metodologi khusus untuk "ilmu-ilmu manusia" (*Geisteswissenschaften*) yang berbeda dari "ilmu-ilmu

alam" (*Naturwissenschaften*). Dilthey mengargumentasikan bahwa manusia sebagai "makhluk historis" tidak dapat dikaji dengan metode yang sama yang digunakan untuk mengkaji objek-objek natural yang tidak memiliki makna.

Pembedaan Dilthey antara "penjelasan" (*Erklären*) dan "pemahaman" (*Verstehen*) menunjukkan bahwa ilmu alam berusaha menjelaskan fenomena melalui hukum-hukum kausal, sementara ilmu manusia berusaha memahami makna melalui interpretasi. Pemahaman melibatkan "proyeksi empatik" yang memungkinkan peneliti untuk "mengalami kembali" (*Nacherleben*) makna yang diekspresikan dalam teks atau tindakan historis.

Dilthey mengembangkan konsep "lingkaran hermeneutik" yang menunjukkan bahwa pemahaman melibatkan gerakan dialektis antara bagian dan keseluruhan, antara detail dan konteks. Interpretator harus memiliki pra-pemahaman tentang keseluruhan untuk memahami bagian, tetapi pemahaman tentang keseluruhan juga dimodifikasi melalui analisis detail. Lingkaran ini tidak "vicious" tetapi produktif karena ia memungkinkan pendalaman dan penyempurnaan pemahaman.

Verstehen vs Erklären dalam Metodologi

Perdebatan antara *Verstehen* dan *Erklären* menjadi sentral dalam "*Methodenstreit*" (perdebatan metodologis) yang membentuk perkembangan awal sosiologi Jerman. Gustav Schmoller dan Historical School of Economics menekankan pentingnya pemahaman historis, sementara Carl Menger dan Austrian School menekankan pencarian hukum-hukum teoretis.

Max Weber mengembangkan sintesis kreatif antara *Verstehen* dan *Erklären* melalui konsep "sosiologi interpretatif" (*verstehende Soziologie*). Weber menunjukkan bahwa sosiologi harus "memahami" makna yang aktor berikan pada tindakan mereka, tetapi pemahaman ini harus dikombinasikan dengan "penjelasan kausal" tentang kondisi-kondisi dan konsekuensi dari tindakan tersebut.

Weber juga mengembangkan metodologi "tipe ideal" sebagai konstruksi analitis yang memungkinkan perbandingan dan penjelasan sambil mempertahankan sensitivitas terhadap makna dan keunikan fenomena historis. Tipe ideal tidak dimaksudkan sebagai deskripsi empiris tetapi sebagai alat heuristik untuk mengorganisir dan menginterpretasi data historis.

Dalam konteks Indonesia, metodologi *Verstehen* memiliki resonansi khusus dalam tradisi penelitian antropologi dan studi budaya yang menekankan

"deskripsi tebal" dan "antropologi interpretatif". Tokoh-tokoh seperti Clifford Geertz dan James Scott mengembangkan pendekatan yang mengintegrasikan pemahaman kultural dengan analisis struktural, menghasilkan wawasan yang kaya tentang kompleksitas kehidupan sosial Indonesia.

2.5 Hubungan Antara Filsafat, Teori, dan Metode

Paradigma Penelitian Sosial

Konsep paradigma, yang dipopulerkan oleh Thomas Kuhn dalam *The Structure of Scientific Revolutions* (1962), memberikan kerangka untuk memahami bagaimana asumsi-asumsi filosofis fundamental membentuk praktik penelitian dalam ilmu sosial. Paradigma bukan hanya seperangkat metode atau teori, tetapi "matriks disipliner" yang mencakup asumsi ontologis, epistemologis, dan metodologis yang dibagikan oleh komunitas ilmiah.

Dalam konteks ilmu sosial, perdebatan paradigmatik telah mengkristalisasi menjadi tiga orientasi utama yang masing-masing memiliki genealogi filosofis yang berbeda: positivis, interpretivis, dan kritis. Setiap paradigma memberikan jawaban yang berbeda terhadap pertanyaan fundamental tentang hakikat realitas sosial, kemungkinan pengetahuan objektif, dan tujuan penelitian sosial.

Positivis: Objektif, Kuantitatif, Eksplanasi

Paradigma positivis dalam ilmu sosial berakar pada tradisi empirisme Inggris dan positivisme Comte, dengan modifikasi yang signifikan melalui positivisme logis Vienna Circle (Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath). Asumsi ontologis fundamental adalah bahwa realitas sosial ada secara independen dari kesadaran peneliti dan dapat dikaji secara objektif.

Epistemologi positivis menekankan bahwa pengetahuan ilmiah harus didasarkan pada observasi empiris yang dapat diverifikasi atau difalsifikasi. Karl Popper dalam *Logic of Scientific Discovery* (1934) mengembangkan kritik terhadap verifikasionisme dan mengusulkan "falsifiabilitas" sebagai kriteria demarkasi antara pernyataan ilmiah dan non-ilmiah. Falsifikasionisme Popperian memberikan metodologi yang lebih canggih untuk menguji hipotesis teoretis dalam ilmu sosial.

Metodologi positivis mengutamakan kuantifikasi, definisi operasional, dan analisis statistik untuk mengidentifikasi keteraturan dan hubungan kausal dalam fenomena sosial. Penelitian survei, desain eksperimental, dan pemodelan statistik menjadi alat utama untuk mencapai objektivitas ilmiah dan generalisabilitas.

Namun, aplikasi positivisme dalam ilmu sosial menghadapi kesulitan yang tidak ditemukan dalam ilmu alam. Herbert Blumer dalam "Posisi Metodologis Interaksionisme Simbolik" (1969) mengkritik "sosiologi variabel" positivis karena mengabaikan makna dan proses interpretatif yang sentral dalam tindakan sosial. Kritik serupa dikembangkan oleh etnometodologis seperti Harold Garfinkel yang menunjukkan bahwa "fakta sosial" Durkheimian adalah pencapaian berkelanjutan dari kerja interpretatif aktor, bukan properti objektif dari struktur sosial.

Interpretivis: Subjektif, Kualitatif, Pemahaman

Paradigma interpretivis berkembang dari tradisi hermeneutik dan fenomenologi, dengan kontribusi signifikan dari sosiologi Weber, interaksionisme simbolik, dan etnometodologi. Ontologi interpretatif mengasumsikan bahwa realitas sosial adalah jamak, terkonstruksi, dan bergantung konteks. Fenomena sosial tidak memiliki makna intrinsik tetapi diberi makna oleh aktor melalui proses interpretatif.

Epistemologi interpretatif menekankan bahwa pengetahuan tentang dunia sosial tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang makna yang diberikan aktor pada situasi mereka. Peneliti tidak dapat mencapai "pandangan dari tidak ada tempat" tetapi selalu diposisikan dalam "situasi hermeneutik" yang melibatkan peleburan horison antara peneliti dan yang diteliti.

Metodologi interpretatif mengutamakan pendekatan kualitatif seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis tekstual untuk menangkap kompleksitas dan kekayaan makna sosial. Metode etnografi menjadi contoh pendekatan interpretatif karena melibatkan keterlibatan yang lama dengan setting sosial dan upaya untuk "memahami sudut pandang pribumi" (Malinowski).

Clifford Geertz dalam *"Thick Description"* (1973) mengembangkan konsep tentang kultur sebagai "jaring makna" yang dapat diinterpretasi melalui *thick description* yang menangkap lapisan makna dalam tindakan sosial. Pendekatan Geertzian menunjukkan bahwa analisis interpretatif tidak hanya

mendeskripsikan tetapi juga menganalisis struktur signifikasi yang membuat tindakan sosial bermakna.

Kritis: Emansipatoris, Transformatif, Pembebasan

Paradigma kritis berakar pada tradisi materialisme historis Marx dan dikembangkan oleh Frankfurt School menjadi "teori kritis" yang mengintegrasikan elemen dari psikoanalisis, hermeneutika, dan teori sosial. Ontologi kritis mengasumsikan bahwa realitas sosial adalah terkonstruksi secara historis melalui relasi kekuasaan dan dapat ditransformasi melalui agensi manusia.

Epistemologi kritis menolak baik objektivisme positivis maupun relativisme interpretatif melalui konsep tentang "kritik ideologi" dan "pengetahuan emansipatoris". Jürgen Habermas dalam *Knowledge and Human Interests* (1968) mengidentifikasi tiga "kepentingan kognitif" yang memandu pengetahuan manusia: teknis (prediksi dan kontrol), praktis (pemahaman dan komunikasi), dan emansipatoris (refleksi diri dan pembebasan dari dominasi yang tidak perlu).

Metodologi kritis mengintegrasikan analisis struktural dengan pemahaman interpretatif dan evaluasi normatif. Peneliti kritis berusaha untuk "demistifikasi" distorsi ideologis yang melanggengkan ketidaksetaraan dan untuk memfasilitasi transformasi sosial melalui peningkatan kesadaran dan tindakan kolektif. Penelitian aksi partisipatif, metodologi feminis, dan pendekatan pascakolonial mencontohkan metodologi kritis yang mengintegrasikan penelitian dengan perubahan sosial.

Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* (1970) mengembangkan "pedagogi kritis" yang menunjukkan bagaimana penelitian dan pendidikan dapat menjadi "praktik kebebasan" yang melibatkan peneliti dan subjek sebagai ko-investigator dalam menganalisis dan mentransformasi realitas sosial. Pendekatan Freirian mendemonstrasikan aplikasi praktis dari paradigma kritis dalam konteks negara berkembang.

Implikasi Metodologis

Setiap paradigma memiliki implikasi yang berbeda untuk desain penelitian, pengumpulan data, dan analisis. Penelitian positivis mengutamakan standardisasi, replikasi, dan generalisasi melalui survei skala besar dan desain eksperimental. Penelitian interpretatif menekankan pemahaman

kontekstual dan makna melalui pendekatan etnografi dan naratif. Penelitian kritis fokus pada relasi kekuasaan dan perubahan sosial melalui metodologi partisipatif dan berorientasi aksi.

Namun, distingsi paradigmatik tidak selalu kaku dalam penelitian praktis. Banyak peneliti kontemporer mengadopsi pendekatan "pragmatis" yang mengkombinasikan elemen dari paradigma yang berbeda berdasarkan pertanyaan penelitian dan pertimbangan praktis. Penelitian metode campuran mencoba mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dari fenomena sosial yang kompleks.

Ontologi → Pemilihan Objek Kajian

Asumsi ontologis fundamental tentang hakikat realitas sosial menentukan apa yang dianggap sebagai objek kajian yang sah. Ontologi positivis yang mengasumsikan realitas sosial objektif mengarah pada fokus pada perilaku yang dapat diamati, variabel yang dapat diukur, dan hubungan statistik. Objek kajian biasanya mencakup sikap, demografi, struktur organisasi, dan indikator sosial yang dapat dioperasionalkan dan dikuantifikasi.

Ontologi interpretatif yang menekankan sifat terkonstruksi dari realitas sosial mengarah pada fokus pada proses pembentukan makna, simbol kultural, narasi, dan praktik interpretatif. Objek kajian mencakup interaksi sehari-hari, pertunjukan kultural, cerita hidup, dan sistem simbolik yang memerlukan analisis interpretatif untuk pemahaman.

Ontologi kritis yang mengasumsikan realitas terkonstruksi secara historis yang dibentuk oleh relasi kekuasaan mengarah pada fokus pada struktur dominasi, proses ideologis, dan kemungkinan untuk transformasi sosial. Objek kajian mencakup relasi kelas, dinamika gender, hierarki rasial, dan bentuk-bentuk ketidaksetaraan sistematis lainnya yang memerlukan baik pemahaman analitis maupun evaluasi normatif.

Epistemologi → Cara Memperoleh Pengetahuan

Asumsi epistemologis tentang hakikat dan kemungkinan pengetahuan menentukan metodologi yang tepat untuk memperoleh pengetahuan yang valid tentang fenomena sosial. Epistemologi positivis yang menekankan verifikasi empiris mengarah pada metodologi yang menekankan pengujian hipotesis, inferensi statistik, dan studi replikasi.

Epistemologi interpretatif yang menekankan pemahaman makna mengarah pada metodologi yang menekankan observasi partisipan, analisis hermeneutik, dan investigasi fenomenologis. Pengetahuan diperoleh melalui keterlibatan yang lama dengan setting sosial dan upaya untuk memahami perspektif partisipan dari dalam kerangka referensi mereka sendiri.

Epistemologi kritis yang menekankan potensi emansipatoris pengetahuan mengarah pada metodologi yang mengintegrasikan analisis dengan aksi, refleksi dengan praktik. Pengetahuan tidak hanya deskriptif tetapi juga transformatif, bertujuan pada mengatasi kesadaran palsu dan memfasilitasi perubahan sosial.

Aksiologi → Nilai dan Tujuan Penelitian

Asumsi aksiologis tentang peran nilai dalam penelitian menentukan tujuan dan orientasi etis dari penyelidikan sosial. Aksiologi positivis yang menekankan netralitas nilai mengarah pada penelitian yang bertujuan memproduksi pengetahuan objektif untuk prediksi dan kontrol, dengan komitmen normatif eksplisit yang minimal.

Aksiologi interpretatif yang menekankan pemahaman pandangan dunia yang berbeda mengarah pada penelitian yang bertujuan memfasilitasi pemahaman lintas budaya dan melestarikan perspektif yang beragam, dengan komitmen pada relativisme kultural dan toleransi.

Aksiologi kritis yang menekankan nilai-nilai emansipatoris mengarah pada penelitian yang secara eksplisit bertujuan mempromosikan keadilan sosial, kesetaraan, dan pembebasan manusia. Penelitian tidak netral nilai tetapi berkomitmen nilai pada mengatasi penindasan dan memfasilitasi transformasi sosial.

Refleksivitas dalam Penelitian Sosial

Konsep refleksivitas—kesadaran peneliti tentang bagaimana posisi, asumsi, dan praktik mereka membentuk proses dan hasil penelitian—menjadi semakin penting dalam penelitian sosial kontemporer di semua paradigma. Refleksivitas melibatkan pemeriksaan kritis terhadap peran peneliti sendiri dalam konstruksi pengetahuan dan pengakuan terhadap keterbatasan yang melekat dalam pendekatan penelitian apa pun.

Posisi Peneliti dalam Proses Penelitian

Tradisi positivis secara tradisional mengasumsikan bahwa peneliti dapat mempertahankan sikap objektif yang tidak mempengaruhi hasil penelitian. Namun, diskusi kontemporer dalam filsafat ilmu menunjukkan bahwa "pandangan dari tidak ada tempat" adalah mustahil dan bahwa posisionalitas peneliti tak terelakkan membentuk proses penelitian.

Tradisi interpretatif secara eksplisit mengakui bahwa peneliti adalah instrumen utama dalam proses penelitian dan bahwa pemahaman muncul melalui interaksi antara peneliti dan yang diteliti. Refleksivitas etnografi melibatkan pemeriksaan berkelanjutan tentang bagaimana kehadiran peneliti membentuk situasi sosial yang sedang dipelajari.

Tradisi kritis menekankan bahwa posisionalitas peneliti dapat menjadi sumber daya untuk memahami relasi kekuasaan dan memfasilitasi perubahan sosial. *Standpoint Theory*, yang dikembangkan oleh sarjana feminis seperti Sandra Harding dan Dorothy Smith, berargumen bahwa pengetahuan yang diproduksi dari posisi marginal dapat memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang realitas sosial karena kelompok marginal memiliki kepentingan dalam mengekspos relasi kekuasaan yang mengistimewakan kelompok dominan.

Bias dan Subjektivitas

Pendekatan positivis tradisional memperlakukan bias sebagai kesalahan yang harus dieliminasi melalui metodologi yang tepat. Namun, pemahaman kontemporer menunjukkan bahwa eliminasi lengkap bias adalah mustahil dan bahwa pendekatan produktif adalah mengakui dan secara kritis memeriksa sumber bias daripada menyangkal eksistensinya.

Pendekatan interpretatif memperlakukan subjektivitas sebagai aspek yang tak terelakkan dan berpotensi produktif dari proses penelitian. Daripada mengeliminasi subjektivitas, peneliti interpretatif berusaha memahami bagaimana subjektivitas mereka sendiri berinteraksi dengan subjektivitas partisipan penelitian dalam memproduksi pengetahuan.

Pendekatan kritis memperlakukan bias sebagai tak terelakkan dan berargumen bahwa pertanyaannya bukan apakah penelitian bias, tetapi kepentingan siapa yang dilayani oleh bentuk bias tertentu. Peneliti kritis secara eksplisit mengakui komitmen normatif mereka dan berargumen

bahwa komitmen pada keadilan sosial dapat memproduksi pemahaman yang lebih akurat tentang realitas sosial daripada klaim palsu tentang netralitas.

Etika Penelitian Sosial

Pertimbangan etis dalam penelitian sosial melibatkan isu kompleks tentang persetujuan yang didasari informasi, kerahasiaan, potensi kerugian pada partisipan, dan tanggung jawab peneliti kepada komunitas yang mereka pelajari. Paradigma yang berbeda mendekati isu etis dengan cara yang mencerminkan asumsi filosofis yang mendasarinya.

Pendekatan positivis biasanya menekankan etika prosedural yang fokus pada melindungi partisipan individual melalui proses persetujuan formal dan prosedur tinjauan institusional. Etika dilihat sebagai batasan pada penelitian yang harus diseimbangkan dengan tujuan ilmiah.

Pendekatan interpretatif menekankan etika relasional yang fokus pada membangun hubungan kepercayaan dengan partisipan dan merepresentasikan perspektif mereka secara akurat dan hormat. Etika dilihat sebagai bagian integral dari proses penelitian yang membentuk kualitas pemahaman yang dicapai.

Pendekatan kritis menekankan etika emansipatoris yang fokus pada memastikan bahwa penelitian berkontribusi pada keadilan sosial dan pemberdayaan kelompok marginal. Etika dilihat sebagai justifikasi utama untuk penelitian yang harus berkontribusi pada mengurangi ketidaksetaraan dan penindasan.

Dalam konteks Indonesia, isu etis dalam penelitian sosial diperumit oleh keragaman budaya, perbedaan kekuasaan antara peneliti dan komunitas, dan warisan praktik penelitian kolonial. Metodologi penelitian pribumi, yang dikembangkan oleh sarjana seperti Linda Tuhiwai Smith dan Shawn Wilson, memberikan pendekatan yang menghormati cara mengetahui pribumi dan memastikan bahwa penelitian menguntungkan komunitas pribumi daripada mengekstrak pengetahuan untuk tujuan eksternal.

2.6 Sintesis: Dari Filsafat ke Ilmu Sosial Modern

Kontinuitas dan Diskontinuitas dengan Tradisi Filosofis

Perkembangan ilmu sosial modern dari akar filosofisnya melibatkan dialektika kompleks antara kontinuitas dan diskontinuitas dengan tradisi

intelektual yang lebih luas. Kontinuitas terlihat dalam persistensi pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang hakikat manusia, masyarakat, dan pengetahuan yang telah diajukan sejak filsafat Yunani Kuno. Diskontinuitas terlihat dalam kemunculan metodologi empiris, spesialisasi disipliner, dan orientasi terhadap aplikasi praktis yang membedakan ilmu sosial modern dari spekulasi filosofis.

Kontinuitas Tematik

Tema-tema fundamental yang dikembangkan dalam tradisi filosofis terus hadir dalam teori sosial kontemporer, meskipun dalam bentuk yang telah bertransformasi. Pertanyaan Aristotelian tentang "apakah kehidupan yang baik?" dan "apa yang merupakan masyarakat yang adil?" tetap sentral dalam sosiologi politik dan filsafat sosial, meskipun pendekatan kontemporer lebih empiris dan kurang preskriptif normatif.

Dialektika Hegelian antara individual dan universal, partikular dan general, terus berlanjut dalam perdebatan kontemporer tentang agensi versus struktur, sosiologi mikro versus makro, dan hubungan antara aktor sosial dan sistem sosial. Analisis Georg Simmel tentang "bentuk" dan "isi" dalam interaksi sosial mencerminkan distingsi Kantian antara bentuk transendental dan isi empiris, diadaptasi untuk analisis sosiologis.

> “Ilmu sosial modern lahir dari kontinuitas filsafat dan diskontinuitas metodologis. Pertanyaan ontologi, epistemologi, aksiologi tetap hadir, meski kini diperkuat metodologi empiris, statistik, dan institusionalisasi. Tradisi positivis, interpretatif, serta kritis tetap hidup berdampingan, mencerminkan pluralisme teoretis sekaligus sintesis reflektif-filosofis dalam penelitian sosial kontemporer.”

Sintesis *Thomistic* antara akal dan iman menemukan ekspresi kontemporer dalam perdebatan tentang hubungan antara rasionalitas ilmiah dan bentuk-bentuk pengetahuan lainnya, termasuk sistem pengetahuan pribumi, tradisi agama, dan kebijaksanaan eksperiential. Dalam konteks Indonesia, tradisi filsafat Islam yang mengintegrasikan *aql* (akal), *naql* (wahyu), dan *kashf* (pengalaman mistik) memberikan model untuk mengintegrasikan pendekatan epistemologis yang berbeda dalam penyelidikan sosial.

Diskontinuitas Metodologis

Meskipun ada kontinuitas tematik, ilmu sosial modern merepresentasikan putus fundamental dari tradisi filosofis dalam hal metodologis dan institusional. Kemunculan metodologi empiris, pengumpulan data sistematis, dan analisis statistik menciptakan bentuk-bentuk investigasi yang secara kualitatif berbeda dari refleksi filosofis dan penalaran spekulatif.

Institusionalisasi ilmu sosial dalam universitas, institut penelitian, dan asosiasi profesional menciptakan komunitas praktisi dengan pelatihan khusus, standar metodologis, dan kriteria untuk evaluasi yang semakin otonom dari diskursus filosofis yang lebih luas. Jurnal profesional, konferensi akademik, dan proses peer review menciptakan mekanisme untuk produksi dan validasi pengetahuan yang berbeda dari praktik filosofis tradisional.

Namun, diskontinuitas metodologis tidak lengkap. Teori sosial kontemporer terus bergantung pada analisis konseptual, argumentasi logis, dan pemahaman interpretatif yang berakar dalam tradisi filosofis. Teori sosial yang paling canggih mengkombinasikan investigasi empiris dengan refleksi filosofis dengan cara yang melampaui oposisi sederhana antara filsafat dan sains.

Pluralisme Teoretis dalam Ilmu Sosial Kontemporer

Ilmu sosial kontemporer ditandai oleh pluralisme teoretis yang mencerminkan tradisi filosofis dan pendekatan metodologis yang berbeda. Daripada paradigma dominan tunggal, bidang ini ditandai oleh koeksistensi dan kompetisi antara orientasi teoretis yang berbeda yang masing-masing mengklaim legitimasi berdasarkan kriteria evaluasi yang berbeda.

Persistensi Multiple Paradigma

Keragaman paradigmatik dalam ilmu sosial kontemporer mencerminkan persistensi tradisi filosofis yang berbeda daripada tahap sementara dalam perkembangan menuju ilmu yang unified. Paradigma positivis, interpretatif, dan kritis terus koeksist karena mereka menangani aspek yang berbeda dari realitas sosial dan melayani kepentingan praktis yang berbeda.

Tradisi positivis tetap kuat dalam area seperti demografi, penelitian survei, dan sosiologi kuantitatif karena memberikan alat yang kuat untuk mengukur

tren sosial, menguji hipotesis, dan menginformasi keputusan kebijakan. Tradisi interpretatif terus berkembang dalam etnografi, studi budaya, dan penelitian kualitatif karena memberikan pemahaman mendalam tentang makna dan konteks yang tidak dapat ditangkap melalui metode kuantitatif saja.

Tradisi kritis mempertahankan relevansi dalam area seperti teori feminis, studi pascakolonial, dan penelitian partisipatif karena menangani pertanyaan tentang kekuasaan, ketidaksetaraan, dan perubahan sosial yang memerlukan komitmen normatif di samping analisis empiris. Daripada memilih antara paradigma, banyak peneliti kontemporer mengadopsi pendekatan "multi-paradigmatik" yang mengambil dari tradisi yang berbeda berdasarkan pertanyaan penelitian dan pertimbangan praktis.

Integrasi dan Sintesis Teoretis

Meskipun ada perbedaan paradigmatik, teori sosial kontemporer juga ditandai oleh upaya untuk mengintegrasikan wawasan dari tradisi yang berbeda dalam kerangka yang lebih komprehensif. Teori strukturasi Anthony Giddens berupaya melampaui oposisi antara agensi dan struktur melalui rekonseptualisasi mereka sebagai aspek yang saling konstitutif dari kehidupan sosial.

Teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas mengintegrasikan wawasan dari fenomenologi, hermeneutika, teori sistem, dan psikoanalisis dalam kerangka komprehensif yang menangani baik pemahaman dan penjelasan, baik makna dan kausalitas. Teori praktik Pierre Bourdieu mengkombinasikan analisis struktural dengan perhatian pada agensi dan makna kultural dengan cara yang melampaui oposisi tradisional.

Namun, integrasi teoretis menghadapi batasan karena paradigma yang berbeda bersandar pada asumsi ontologis dan epistemologis yang tidak kompatibel. Sintesis lengkap mungkin tidak mungkin atau tidak diinginkan, dan ketegangan produktif antara pendekatan yang berbeda mungkin lebih bernilai daripada kesatuan paksa yang mengaburkan perbedaan penting dalam pendekatan dan tujuan.

Tantangan Integrasi Lintas Paradigma

Upaya untuk mengintegrasikan pendekatan paradigmatik yang berbeda menghadapi beberapa tantangan persisten yang mencerminkan

ketidaksepakatan filosofis yang lebih dalam tentang hakikat realitas, pengetahuan, dan tujuan penyelidikan. Tantangan ini mencakup masalah inkomensurabilitas, reduksi, dan koordinasi praktis.

Masalah Inkomensurabilitas

Konsep inkomensurabilitas Thomas Kuhn menunjukkan bahwa paradigma yang berbeda beroperasi dengan kerangka konseptual yang begitu berbeda sehingga terjemahan di antara mereka bermasalah. Istilah yang tampak serupa di paradigma berbeda mungkin memiliki makna yang fundamental berbeda, membuat dialog dan integrasi yang sesungguhnya sulit.

Dalam ilmu sosial, konsep positivis seperti "variabel", "kausalitas", dan "penjelasan" memiliki makna yang berbeda dari konsep interpretatif yang bersesuaian seperti "makna", "pemahaman", dan "interpretasi". Konsep kritis seperti "ideologi", "emansipasi", dan "kesadaran palsu" mungkin tidak dapat diterjemahkan ke dalam kerangka positivis atau interpretatif tanpa kehilangan isi esensial.

Namun, tesis inkomensurabilitas lengkap telah ditantang oleh sarjana yang berargumen bahwa terjemahan dan komunikasi di paradigma berbeda adalah mungkin, meskipun sulit. Prinsip interpretasi amal Donald Davidson dan konsep peleburan horison Hans-Georg Gadamer memberikan model untuk memahami bagaimana dialog bermakna dapat terjadi di kerangka konseptual yang berbeda.

Masalah Reduksi

Upaya untuk mengintegrasikan paradigma yang berbeda sering menghasilkan reduksi satu paradigma kepada istilah lainnya, daripada sintesis genuine yang melestarikan kontribusi distintif setiap pendekatan. Reduksi positivis terhadap wawasan interpretatif atau kritis sering kehilangan aspek esensial makna dan normativitas. Reduksi interpretatif terhadap temuan positivis sering kehilangan presisi dan generalisabilitas. Reduksi kritis terhadap karya positivis atau interpretatif sering kehilangan rigor analitis.

Integrasi yang berhasil memerlukan bentuk sintesis yang dapat melestarikan kontribusi distintif setiap paradigma sambil melampaui keterbatasan mereka. Ini memerlukan karya teoretis kreatif yang mengembangkan konsep dan metodologi baru daripada sekadar mengkombinasikan pendekatan yang ada.

Masalah Koordinasi Praktis

Bahkan ketika integrasi teoretis dimungkinkan, koordinasi praktis pendekatan metodologis yang berbeda menghadapi tantangan logistik. Paradigma yang berbeda memerlukan bentuk pelatihan yang berbeda, setting penelitian yang berbeda, dan kriteria untuk evaluasi yang berbeda yang sulit untuk dikoordinasikan dalam proyek atau program penelitian tunggal.

Penelitian multi-paradigmatik memerlukan peneliti dengan keahlian dalam pendekatan multiple, dukungan institusional untuk metodologi yang beragam, dan kriteria evaluasi yang fleksibel yang dapat menilai kontribusi dari tipe investigasi yang berbeda. Persyaratan ini sering melebihi sumber daya yang tersedia untuk peneliti atau institusi individual.

Masa Depan Hubungan Filsafat-Ilmu Sosial

Hubungan antara filsafat dan ilmu sosial kemungkinan akan terus berevolusi dalam respons pada kondisi intelektual, teknologis, dan sosial yang berubah. Beberapa tren menunjukkan arah untuk perkembangan masa depan, termasuk keterlibatan yang diperbaharui dengan fondasi filosofis, integrasi dengan disiplin lain, dan perhatian pada perspektif global dan lintas budaya.

Keterlibatan Filosofis yang Diperbaharui

Ilmu sosial kontemporer menunjukkan minat yang diperbaharui dalam fondasi filosofis, sebagian dalam respons pada pengakuan bahwa masalah metodologis dan teoretis tidak dapat diselesaikan dengan cara yang murni teknis. Pertanyaan tentang ontologi, epistemologi, dan etika memerlukan refleksi filosofis yang melampaui investigasi empiris.

Pragmatisme filosofis, yang awalnya dikembangkan oleh Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey, memberikan satu model untuk memperbaharui hubungan antara filsafat dan ilmu sosial. Pendekatan pragmatis menekankan konsekuensi praktis pengetahuan dan metode daripada kriteria teoretis abstrak, berpotensi memberikan landasan bersama untuk pendekatan paradigmatik yang berbeda.

Filsafat kontinental, termasuk fenomenologi, hermeneutika, teori kritis, dan pascastrukturalisme, terus memberikan sumber daya untuk teori sosial yang

menangani keterbatasan pendekatan positivis. Filsafat analitis, termasuk filsafat pikiran, filsafat bahasa, dan filsafat sains, memberikan alat untuk mengklarifikasi konsep dan argumen dalam teori sosial.

Integrasi Interdisipliner

Ilmu sosial masa depan kemungkinan akan semakin interdisipliner, mengambil wawasan dari ilmu kognitif, biologi evolusioner, teori kompleksitas, dan bidang lain yang memberikan perspektif baru pada fenomena sosial. Integrasi interdisipliner ini akan memerlukan keterlibatan yang diperbaharui dengan pertanyaan filosofis tentang kesatuan ilmu, reduksi, dan emergensi.

Ilmu kognitif memberikan pemahaman proses otak yang mendasari kognisi sosial dan pembelajaran kultural, berpotensi menginformasi teori sosial tentang mekanisme yang membuat kehidupan sosial menjadi mungkin. Pendekatan evolusioner memberikan pemahaman proses historis yang membentuk kapasitas sosial manusia, berpotensi menginformasi teori sosial tentang aspek universal dan variabel organisasi sosial.

Teori kompleksitas memberikan pemahaman properti emergent dan dinamika nonlinear yang mungkin mengkarakterisasi sistem sosial, berpotensi menginformasi teori sosial tentang hubungan antara level analisis mikro dan makro. Namun, integrasi interdisipliner juga menimbulkan pertanyaan tentang otonomi ilmu sosial dan kekhasan fenomena sosial yang memerlukan refleksi filosofis.

Perspektif Global dan Lintas Budaya

Ilmu sosial masa depan akan semakin perlu menangani dimensi global dan lintas budaya fenomena sosial, memerlukan keterlibatan dengan tradisi filosofis yang berbeda dan cara mengetahui. Tradisi filosofis Barat yang telah mendominasi perkembangan ilmu sosial semakin diakui sebagai perspektif kultural partikular daripada kerangka universal.

Filsafat pribumi, filsafat Islam, filsafat Buddha, filsafat Konfusian, dan tradisi non-Barat lainnya memberikan pendekatan alternatif untuk memahami realitas sosial yang dapat melengkapi atau menantang pendekatan Barat. Pengembangan pendekatan "filsafat dunia" yang dapat mengintegrasikan wawasan dari tradisi kultural yang berbeda sambil mempertahankan

perspektif kritis merepresentasikan tantangan penting untuk teori sosial masa depan.

Pendekatan dekolonial, yang dikembangkan oleh sarjana seperti Anibal Quijano, Walter Mignolo, dan Boaventura de Sousa Santos, memberikan kerangka untuk memahami bagaimana sejarah kolonial telah membentuk produksi pengetahuan dan untuk mengembangkan alternatif yang menghormati keragaman epistemik. Pendekatan ini memerlukan pemikiran ulang fundamental hubungan antara filsafat dan ilmu sosial dalam konteks global.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan ilmu sosial yang dapat mengintegrasikan wawasan dari tradisi filosofis pribumi dengan pendekatan teoretis kontemporer merepresentasikan peluang penting untuk berkontribusi pada teori sosial global. Filsafat Jawa, tradisi kebijaksanaan Batak, mistisisme Islam, dan sistem pengetahuan lokal lainnya memberikan sumber daya kaya untuk memahami fenomena sosial yang telah kurang dimanfaatkan dalam ilmu sosial akademik.

Kontribusi Indonesia untuk Teori Sosial Global

Konteks Indonesia memberikan peluang unik untuk mengembangkan teori sosial yang dapat menjembatani tradisi filosofis Barat dan non-Barat. Posisi Indonesia sebagai demokrasi Muslim terbesar, negara kepulauan paling beragam, dan jembatan antara wilayah kultural yang berbeda memberikan laboratorium untuk menguji dan mengembangkan pendekatan teoretis yang dapat menangani kompleksitas kehidupan sosial kontemporer.

Konsep seperti *gotong royong* (saling membantu), *musyawarah-mufakat* (konsultasi-konsensus), *Bhinneka Tunggal Ika* (bersatu dalam keberagaman), dan *pancasila* (lima prinsip) merepresentasikan sumber daya teoretis pribumi yang dapat berkontribusi pada pemahaman global demokrasi, masyarakat sipil, dan pluralisme kultural. Namun, pengembangan konsep ini memerlukan keterlibatan kritis dengan baik tradisi pribumi dan pendekatan teoretis kontemporer.

Institusi akademik seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung sedang mengembangkan program penelitian yang mengintegrasikan perspektif lokal dengan perkembangan teoretis global. Jurnal seperti *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* dan *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* memberikan forum untuk mengembangkan kontribusi Indonesia yang khas pada teori sosial.

> "Ilmu sosial masa depan menuntut perspektif global dan lintas budaya, mengintegrasikan tradisi filosofis Barat, Islam, Buddha, Konfusian, dan pribumi. Indonesia berpeluang menawarkan kontribusi melalui gotong royong, musyawarah, Bhinneka Tunggal Ika, serta Pancasila, sebagai basis teori sosial global yang plural, inklusif, dan kontekstual."

Namun, pengembangan teori sosial Indonesia juga menghadapi tantangan dari *brain drain*, pendanaan penelitian yang terbatas, dan dominasi berkelanjutan kerangka teoretis Barat dalam evaluasi akademik. Mengatasi tantangan ini memerlukan komitmen berkelanjutan untuk mengembangkan perspektif teoretis pribumi yang dapat terlibat secara produktif dengan diskursus akademik global sambil mempertahankan keterikatannya dalam konteks kultural lokal.

Kesimpulan

Perjalanan dari akar filosofis menuju ilmu sosial modern menunjukkan kontinuitas yang dalam antara pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang manusia, masyarakat, dan pengetahuan yang telah diajukan selama berabad-abad dengan pendekatan-pendekatan empiris dan teoretis kontemporer. Namun, kontinuitas ini tidak berarti stagnasi; sebaliknya, ia mendemonstrasikan bagaimana wawasan filosofis terus memberikan fondasi yang vital bagi pemahaman dan inovasi dalam teori sosial.

Tradisi-tradisi filosofis yang telah kita eksplorasi—dari empirisme Inggris hingga idealisme Jerman, dari positivisme Comte hingga hermeneutika Dilthey—tidak hanya memberikan konteks historis bagi perkembangan ilmu sosial, tetapi juga menyediakan perangkat konseptual yang terus relevan dalam menangani tantangan kontemporer. Dialektika Hegelian yang menginformasikan teori konflik, fenomenologi Husserlian yang mendasari sosiologi interpretatif, dan teori kritis Frankfurt School yang menginspirasi penelitian emansipatoris menunjukkan bahwa tradisi filosofis tetap menjadi sumber daya hidup untuk penyelidikan kontemporer daripada artefak museum.

Paradigma-paradigma kontemporer—positivis, interpretivis, dan kritis—merepresentasikan kristalisasi dari pendekatan filosofis yang berbeda dalam

bentuk yang dapat memandu penelitian empiris dan pengembangan teoretis. Daripada memandang paradigma ini sebagai alternatif yang saling eksklusif, pendekatan produktif adalah memahami mereka sebagai perspektif komplementer yang dapat menerangi aspek yang berbeda dari realitas sosial. Penekanan positivis pada pengukuran dan generalisasi, fokus interpretatif pada makna dan konteks, dan perhatian kritis pada kekuasaan dan transformasi masing-masing berkontribusi wawasan esensial yang bersama-sama memberikan pemahaman yang lebih komprehensif daripada pendekatan tunggal saja.

Dalam konteks Indonesia, keterlibatan dengan fondasi filosofis ilmu sosial memiliki signifikansi khusus karena memberikan peluang untuk mengintegrasikan tradisi kebijaksanaan pribumi dengan pendekatan teoretis kontemporer. Konsep seperti *ilmu laduni*, *hikmah*, dan sistem pengetahuan adat merepresentasikan sumber daya epistemologis yang dapat memperkaya teori sosial global sambil berkontribusi pada pengembangan pendekatan yang tepat untuk memahami realitas sosial Indonesia.

Refleksivitas dalam proses penelitian—kesadaran tentang bagaimana asumsi filosofis membentuk penyelidikan—merepresentasikan perkembangan kritis yang melampaui batas paradigmatik. Pengakuan bahwa semua pengetahuan diposisikan, bahwa objektivitas adalah pencapaian intersubjektif daripada korespondensi dengan realitas, dan bahwa penelitian tak terelakkan melibatkan komitmen etis membuka kemungkinan untuk keterlibatan yang lebih jujur dan produktif dengan kompleksitas fenomena sosial.

Melihat ke depan, hubungan antara filsafat dan ilmu sosial akan terus berevolusi dalam respons pada kondisi intelektual dan sosial yang berubah. Integrasi interdisipliner, perspektif global, dan perhatian pada filsafat pribumi merepresentasikan arah penting untuk perkembangan masa depan. Namun, perkembangan ini akan paling produktif ketika mereka membangun di atas pemahaman solid fondasi filosofis yang telah membentuk perkembangan bidang.

Bagi mahasiswa ilmu sosial Indonesia, memahami akar filosofis teori sosial memberikan fondasi untuk menjadi bukan hanya konsumen teori yang diimpor tetapi kontributor kreatif pada perkembangan teoretis global. Kemampuan untuk terlibat secara kritis dengan asumsi filosofis, untuk mengintegrasikan wawasan dari pendekatan paradigmatik yang berbeda, dan untuk mengembangkan inovasi teoretis yang berakar dalam konteks lokal sambil berbicara pada keprihatinan universal merepresentasikan keterampilan esensial untuk generasi ilmuwan sosial berikutnya.

Pada akhirnya, studi akar filosofis teori sosial mengungkapkan bahwa ilmu sosial yang terbaik adalah kontinu dengan tradisi filosofis dalam komitmennya pada pemikiran kritis, penyelidikan sistematis, dan pemahaman kondisi manusia. Namun, ilmu sosial juga merepresentasikan kontribusi khas pada pengetahuan manusia melalui integrasinya refleksi filosofis dengan investigasi empiris dan orientasinya terhadap aplikasi praktis. Kombinasi kedalaman filosofis dengan rigor empiris dan relevansi praktis ini memberikan fondasi untuk ilmu sosial yang dapat berkontribusi pada baik pemahaman maupun perbaikan kehidupan sosial manusia.

Referensi Bab 2

Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (1944). The culture industry: Enlightenment as mass deception. In *Dialectic of enlightenment*. Stanford University Press.

Althusser, L. (1965). *For Marx*. Verso Books.

Althusser, L. (1970). Ideology and ideological state apparatuses. In *Lenin and philosophy and other essays*. Monthly Review Press.

Aristotle. (1984). *The complete works of Aristotle* (J. Barnes, Ed.). Princeton University Press.

Bacon, F. (1620). *Novum organum*. Oxford University Press.

Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionism: Perspective and method*. University of California Press.

Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge University Press.

Burke, E. (1790). *Reflections on the revolution in France*. J. Dodsley.

Burrell, G., & Morgan, G. (1979). *Sociological paradigms and organisational analysis*. Heinemann Educational Books.

Collins, P. H. (2000). *Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment*. Routledge.

Comte, A. (1830-1842). *Course of positive philosophy*. Calvin Blanchard.

Constant, B. (1819). *The liberty of ancients compared with that of moderns*. Political Concepts Committee.

Dahrendorf, R. (1957). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford University Press.

Derrida, J. (1967). *Writing and difference*. University of Chicago Press.

Descartes, R. (1637). *Discourse on method*. Oxford University Press.

Diderot, D., & d'Alembert, J. (1751-1772). *Encyclopédie*. André le Breton.

Dilthey, W. (1883). *Introduction to the human sciences*. Princeton University Press.

Durkheim, E. (1893). *The division of labor in society*. Free Press.

Durkheim, E. (1895). *The rules of sociological method*. Free Press.

Feuerbach, L. (1841). *The essence of Christianity*. Cambridge University Press.

Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum International Publishing Group.

Garfinkel, H. (1967). *Studies in ethnomethodology*. Prentice-Hall.

Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures: Selected essays*. Basic Books.

Giddens, A. (1976). *New rules of sociological method*. Hutchinson.

Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. Polity Press.

Goffman, E. (1956). *The presentation of self in everyday life*. University of Edinburgh Social Sciences Research Centre.

Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks*. International Publishers.

Habermas, J. (1968). *Knowledge and human interests*. Beacon Press.

Habermas, J. (1981). *The theory of communicative action, Volume 1*. Beacon Press.

Harding, S. (1991). *Whose science? Whose knowledge?* Cornell University Press.

Hegel, G. W. F. (1807). *Phenomenology of spirit*. Oxford University Press.

Hegel, G. W. F. (1821). *Philosophy of right*. Cambridge University Press.

hooks, b. (1984). *Feminist theory: From margin to center*. South End Press.

Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (1947). *Dialectic of enlightenment*. Stanford University Press.

Hume, D. (1748). *An enquiry concerning human understanding*. Oxford University Press.

Husserl, E. (1913). *Ideas: General introduction to pure phenomenology*. Macmillan.

Husserl, E. (1936). *The crisis of European sciences and transcendental phenomenology*. Northwestern University Press.

James, W. (1907). *Pragmatism: A new name for some old ways of thinking*. Harvard University Press.

Kant, I. (1781). *Critique of pure reason*. Cambridge University Press.

Kant, I. (1784). What is enlightenment? (*Was ist Aufklärung?*). *Berlinische Monatsschrift*.

Kant, I. (1785). *Groundwork for the metaphysics of morals*. Cambridge University Press.

Kant, I. (1788). *Critique of practical reason*. Cambridge University Press.

Kuhn, T. S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. University of Chicago Press.

Kuntowijoyo. (1997). *Identitas politik umat Islam*. Mizan.

Leibniz, G. W. (1714). *Monadology*. Open Court Publishing.

Lévi-Strauss, C. (1963). *Structural anthropology*. Basic Books.

Locke, J. (1689). *An essay concerning human understanding*. Oxford University Press.

Madjid, N. (1987). *Islam, kemodernan dan keindonesiaan*. Mizan.

Malinowski, B. (1922). *Argonauts of the Western Pacific*. Routledge.

Marcuse, H. (1964). *One-dimensional man*. Beacon Press.

Marx, K. (1845). *The German ideology*. International Publishers.

Marx, K. (1848). *The Communist Manifesto*. Penguin Classics.

Marx, K. (1867). *Capital: Volume one*. Vintage Books.

Mead, G. H. (1934). *Mind, self, and society*. University of Chicago Press.

Merton, R. K. (1949). On sociological theories of the middle range. *American Sociological Review*, 13(6), 164-168.

Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure*. Free Press.

Mill, J. S. (1843). *A system of logic*. University of Toronto Press.

Mills, C. W. (1959). *The sociological imagination*. Oxford University Press.

Montesquieu, C. L. (1748). *The spirit of laws*. Cambridge University Press.

Nasution, H. (1986). *Teologi Islam: Aliran-aliran sejarah analisa perbandingan*. UI Press.

Newton, I. (1687). *Principia mathematica*. University of California Press.

Paine, T. (1791). *Rights of man*. Penguin Classics.

Park, R., & Burgess, E. (1921). *Introduction to the science of sociology*. University of Chicago Press.

Parsons, T. (1951). *The social system*. Free Press.

Peirce, C. S. (1878). How to make our ideas clear. *Popular Science Monthly*, 12, 286-302.

Popper, K. R. (1934). *The logic of scientific discovery*. Routledge.

Quetelet, A. (1835). *Sur l'homme et le développement de ses facultés*. Bachelier.

Rickert, H. (1902). *The limits of concept formation in natural science*. Cambridge University Press.

Rousseau, J.-J. (1755). *Discourse on inequality*. Oxford University Press.

Rousseau, J.-J. (1762). *The social contract*. Penguin Classics.

Rousseau, J.-J. (1762). *Emile, or on education*. Basic Books.

Santos, B. (2014). *Epistemologies of the South: Justice against epistemicide*. Paradigm Publishers.

Simmel, G. (1900). *The philosophy of money*. Routledge.

Smith, D. E. (1987). *The everyday world as problematic*. University of Toronto Press.

Smith, L. T. (1999). *Decolonizing methodologies: Research and indigenous peoples*. Zed Books.

Soedjatmoko. (1984). *Dimensi manusia dalam pembangunan*. LP3ES.

Spinoza, B. (1677). *Ethics demonstrated in geometrical order*. Cambridge University Press.

Staël, G. (1813). *De l'Allemagne*. H. Nicolle.

Taylor, C. (1992). *Multiculturalism and the politics of recognition*. Princeton University Press.

Tocqueville, A. (1835). *Democracy in America*. University of Chicago Press.

Tocqueville, A. (1856). *The old regime and the revolution*. University of Chicago Press.

Voltaire. (1734). *Philosophical letters*. Hackett Publishing.

Voltaire. (1756). *Essay on the customs and the spirit of the nations*. University of Chicago Press.

Voltaire. (1759). *Candide*. Penguin Classics.

Voltaire. (1763). *Treatise on tolerance*. Cambridge University Press.

Weber, M. (1904). *The methodology of the social sciences*. Free Press.

Weber, M. (1905). *The Protestant ethic and the spirit of capitalism*. Routledge.

Weber, M. (1949). *The methodology of the social sciences*. Free Press.

Wilson, S. (2008). *Research is ceremony: Indigenous research methods*. Fernwood Publishing.

Windelband, W. (1894). Geschichte und Naturwissenschaft. *Präludien*, 2, 136-160.

BAB 3

HIERARKI TEORI DALAM ILMU SOSIAL

Pendahuluan

Dalam lanskap ilmu sosial yang kompleks dan beragam, salah satu tantangan fundamental yang dihadapi oleh peneliti, mahasiswa, dan praktisi adalah memahami bagaimana berbagai tingkatan teori beroperasi dan saling berinteraksi dalam menjelaskan fenomena sosial. Tidak semua teori diciptakan dengan tujuan yang sama, cakupan yang identik, atau tingkat abstraksi yang setara. Beberapa teori berupaya menjelaskan keseluruhan realitas sosial dengan visi yang komprehensif dan universal, sementara teori lain fokus pada aspek-aspek spesifik kehidupan sosial dengan detail yang mendalam, dan ada pula teori yang dirancang khusus untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.

Konsep hierarki teori dalam ilmu sosial, yang pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Robert K. Merton pada pertengahan abad ke-20, memberikan kerangka analitis yang krusial untuk memahami bagaimana teori-teori sosial beroperasi pada tingkatan abstraksi yang berbeda dan bagaimana mereka saling melengkapi dalam upaya kolektif memahami dunia sosial. Hierarki ini bukan merupakan penilaian kualitas atau superioritas satu teori atas teori lainnya, melainkan pengakuan bahwa teori-teori yang berbeda melayani fungsi yang berbeda dalam ekosistem pengetahuan ilmu sosial.

Bab ini akan mengeksplorasi tiga tingkatan utama dalam hierarki teori sosial: *grand theory* (“teori besar”), *middle range theory* (“teori menengah”), dan *applied theory* (“teori terapan”). Setiap tingkatan memiliki karakteristik yang unik, kelebihan dan keterbatasan yang spesifik, serta peran yang berbeda dalam perkembangan ilmu sosial. *Grand theory* beroperasi pada tingkat abstraksi tertinggi dengan ambisi untuk menjelaskan keseluruhan realitas sosial melalui kerangka konseptual yang komprehensif. *Middle range theory* menempati posisi strategis sebagai jembatan antara spekulasi teoretis yang luas dengan penelitian empiris yang detail. Sementara *applied theory* fokus pada aplikasi wawasan teoretis untuk memecahkan masalah-masalah praktis dan menginformasikan kebijakan publik.

Dalam konteks Indonesia, pemahaman tentang hierarki teori menjadi semakin relevan mengingat kompleksitas sosial, budaya, dan politik yang

dihadapi bangsa ini. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, 700 bahasa daerah, dan 300 kelompok etnis memerlukan pendekatan teoretis yang dapat mengakomodasi keberagaman ini sambil tetap memberikan pemahaman yang koheren tentang dinamika sosial nasional. Teori-teori yang dikembangkan di Barat tidak selalu dapat diterapkan secara langsung dalam konteks Indonesia tanpa adaptasi yang substansial.

Sub-bab 3.1 akan mengeksplorasi konsep hierarki teori dengan menelusuri latar belakang historis kemunculannya, terutama kritik Merton terhadap dominasi *grand theory* dalam sosiologi Amerika pada tahun 1940-an dan 1950-an. Kita akan melihat bagaimana Merton mengembangkan konsep *middle range theory* sebagai alternatif produktif yang dapat menjembatani kesenjangan antara ambisi teoretis yang besar dengan ketepatan empiris yang diperlukan dalam penelitian ilmiah.

Sub-bab 3.2 akan menganalisis *grand theory* dengan fokus pada karakteristik, kelebihan, dan keterbatasannya. Melalui pembahasan tentang karya-karya teoretikus besar seperti Marx, Parsons, Giddens, dan Wallerstein, kita akan melihat bagaimana *grand theory* memberikan visi menyeluruh tentang masyarakat sambil menghadapi tantangan dalam operasionalisasi dan pengujian empiris. Dalam konteks Indonesia, kita akan mengeksplorasi bagaimana *grand theory* seperti teori sistem dunia dapat membantu memahami posisi Indonesia dalam ekonomi global.

Sub-bab 3.3 akan mendalami *middle range theory* sebagai kontribusi metodologis yang paling signifikan dari Merton. Melalui analisis teori-teori seperti anomie, pelabelan, modal sosial, dan dramaturgi, kita akan melihat bagaimana *middle range theory* memberikan keseimbangan optimal antara generalisasi teoretis dan kekhususan empiris. Studi kasus tentang penerapan teori modal sosial dalam program pemberdayaan masyarakat di Indonesia akan menunjukkan relevansi praktis dari pendekatan ini.

Sub-bab 3.4 akan mengeksplorasi *applied theory* dengan fokus khusus pada lima bidang aplikasi yang sangat relevan untuk konteks Indonesia: politik dan tata kelola pemerintahan, desentralisasi dan otonomi daerah, hubungan internasional dan globalisasi, ekonomi dan pembangunan, serta budaya dan kearifan lokal. Setiap bidang akan dianalisis melalui lensa teoretis yang menunjukkan bagaimana teori sosial dapat menginformasikan praktik dan kebijakan.

Akhirnya, Sub-bab 3.5 akan menganalisis dialektika antar-level teori dengan mengeksplorasi bagaimana ketiga tingkatan teori ini saling berinteraksi,

berkompetisi, dan melengkapi dalam ekosistem pengetahuan ilmu sosial. Kita akan melihat bagaimana analisis multi-tingkat menjadi pendekatan yang semakin penting dalam menghadapi kompleksitas fenomena sosial kontemporer, terutama dalam era globalisasi dan digitalisasi yang menuntut pemahaman yang mengintegrasikan berbagai tingkatan analisis.

Pemahaman yang komprehensif tentang hierarki teori ini akan membekali mahasiswa S1 dan S2 dengan kemampuan untuk memilih dan menggunakan teori yang tepat sesuai dengan pertanyaan penelitian mereka, mengintegrasikan wawasan dari berbagai tingkatan teori, dan berkontribusi pada pengembangan teori sosial yang relevan dengan konteks Indonesia. Lebih dari itu, pemahaman ini akan membantu mereka menjadi konsumen yang kritis terhadap teori sosial yang tidak hanya mengadopsi secara buta, tetapi juga mampu melakukan adaptasi, modifikasi, dan inovasi teoretis yang sesuai dengan realitas sosial Indonesia.

3.1 Konsep Hierarki Teori: Latar Belakang dan Pentingnya Ilmu Sosial

Sejarah Pembagian Tingkatan Teori dalam Ilmu Sosial

Konsep hierarki teori dalam ilmu sosial muncul sebagai respons terhadap fragmentasi dan polarisasi yang terjadi dalam disiplin sosiologi pada pertengahan abad ke-20. Pada periode tersebut, lanskap teoretis sosiologi didominasi oleh dua kutub ekstrem yang tampaknya tidak dapat didamaikan: di satu sisi terdapat sistem-sistem teoretis yang sangat abstrak dan komprehensif seperti yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, dan di sisi lain terdapat penelitian empiris yang sangat detail tetapi terpisah-pisah tanpa kerangka teoretis yang jelas.

Situasi ini menciptakan apa yang oleh Robert K. Merton disebut sebagai dikotomi palsu (*false dichotomy*) antara teori dan penelitian empiris. Para teoretikus besar seperti Parsons mengembangkan sistem konseptual yang sangat elaborat tetapi sulit untuk dioperasionalisasi dalam penelitian konkret. Sementara itu, para peneliti empiris mengumpulkan data yang berlimpah tetapi seringkali tidak memiliki kerangka teoretis yang memadai untuk menginterpretasikan temuan mereka secara sistematis.

Dalam konteks sosiologi Amerika pada tahun 1940-an dan 1950-an, ketegangan ini menjadi semakin akut karena tekanan untuk menjadikan sosiologi sebagai ilmu yang ilmiah yang dapat menyaingi prestise dan pendanaan ilmu-ilmu alam. Di satu sisi, para teoretikus besar berupaya membangun sosiologi sebagai ilmu yang memiliki kerangka teoretis yang

setara dengan fisika teoritis. Di sisi lain, para peneliti empiris berupaya menunjukkan bahwa sosiologi dapat menghasilkan data yang dapat diandalkan dan temuan yang dapat direplikasi.

Merton mengidentifikasi bahwa dikotomi ini tidak produktif dan bahkan merugikan bagi perkembangan sosiologi sebagai disiplin ilmiah. Dalam *Social Theory and Social Structure* (1968), ia mengargumentasikan bahwa yang diperlukan adalah tingkatan teori yang dapat menjembatani kesenjangan antara abstraksi teoretis yang tinggi dengan kekhususan empiris yang detail. Konsep teori-menengah atau *theories of the middle range* diusulkan sebagai solusi untuk dilema ini.

Perkembangan konsep hierarki teori juga dipengaruhi oleh tradisi filosofis yang membedakan antara berbagai tingkatan abstraksi dalam pengetahuan. Aristoteles dalam *Metaphysics* telah membedakan antara pengetahuan universal dan pengetahuan praktis. Immanuel Kant dalam *Critique of Pure Reason* mengembangkan pembedaan antara konsep-konsep apriori yang universal dengan aplikasi empiris yang spesifik. Tradisi positivisme Auguste Comte menekankan hierarki ilmu-ilmu dari yang paling abstrak (matematika) hingga yang paling konkret (sosiologi).

Robert K. Merton dan Kritik terhadap Grand Theory

Robert K. Merton (1910-2003) merupakan figur sentral dalam pengembangan konsep hierarki teori melalui kritiknya yang tajam terhadap dominasi *grand theory* dalam sosiologi Amerika. Dalam esainya tentang teori sosiologi jangka menengah (1949), Merton mengidentifikasi beberapa masalah fundamental dengan pendekatan *grand theory* yang dikembangkan oleh Talcott Parsons dan pengikutnya.

Kritik pertama Merton terhadap *grand theory* berkaitan dengan tingkat abstraksi yang berlebihan. Merton menunjukkan bahwa sistem teoretis Parsons, meskipun secara intelektual mengesankan, beroperasi pada tingkat abstraksi yang begitu tinggi sehingga sulit untuk dihubungkan dengan fenomena empiris yang konkret. Konsep-konsep seperti prasyarat fungsional atau variabel pola dalam teori Parsons, menurut Merton, terlalu abstrak untuk dapat dioperasionalisasi dalam penelitian yang dapat menghasilkan temuan yang dapat diverifikasi.

Kritik kedua berkaitan dengan kematangan prematur dari ambisi teoretis. Merton mengargumentasikan bahwa upaya untuk membangun teori sosiologi yang komprehensif seperti yang dilakukan Parsons adalah prematur

mengingat masih terbatasnya akumulasi pengetahuan empiris yang dapat diandalkan dalam sosiologi. Berbeda dengan fisika yang telah memiliki temuan dasar yang solid sebelum Einstein mengembangkan teori relativitas, sosiologi belum memiliki dasar empiris yang cukup kuat untuk mendukung generalisasi teoretis yang sangat luas.

Kritik ketiga menyangkut kurangnya kemampuan pengujian (*testability*) dalam *grand theory*. Merton menunjukkan bahwa proposisi-proposisi dalam *grand theory* seringkali dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diuji secara empiris. Ketika suatu proposisi teoretis tidak dapat difalsifikasi, ia kehilangan status ilmiahnya dan menjadi lebih mirip dengan spekulasi filosofis daripada hipotesis ilmiah.

Namun, kritik Merton terhadap *grand theory* bukan berarti penolakan total terhadap pentingnya teori dalam ilmu sosial. Sebaliknya, Merton mengakui bahwa teori adalah esensial bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ia kritik adalah jenis teori tertentu yang tidak produktif untuk pengembangan pengetahuan empiris. Merton mengusulkan pendekatan alternatif yang ia sebut *middle range theory* yang dapat memberikan panduan untuk penelitian empiris sambil tetap memiliki tingkat generalisasi yang memadai.

Kritik Merton juga diarahkan pada apa yang ia sebut sebagai "empirisme abstrak"—pendekatan penelitian yang mengumpulkan data empiris tanpa kerangka teoretis yang jelas. Merton menunjukkan bahwa penelitian semacam ini, meskipun dapat menghasilkan temuan yang dapat diandalkan, seringkali tidak memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang fenomena sosial karena tidak dapat dihubungkan dengan kerangka teoretis yang sistematik.

Kontinuum Abstraksi-Konkretisasi dalam Teori

Konsep hierarki teori yang dikembangkan Merton tidak memposisikan berbagai tingkatan teori sebagai kategori yang terpisah dan saling eksklusif, melainkan sebagai kontinuum abstraksi-konkretisasi yang memungkinkan pergerakan dinamis antara berbagai tingkatan analisis. Pada ujung kontinuum yang paling abstrak terdapat *grand theory* dengan ambisi untuk menjelaskan keseluruhan realitas sosial melalui prinsip-prinsip universal. Pada ujung yang paling konkret terdapat deskripsi empiris yang detail tentang fenomena sosial spesifik tanpa generalisasi teoretis.

Middle range theory menempati posisi strategis di tengah-tengah kontinuum ini, tidak terlalu abstrak sehingga kehilangan koneksi dengan realitas empiris,

tetapi juga tidak terlalu konkret sehingga kehilangan kemampuan generalisasi teoretis. Posisi ini memungkinkan *middle range theory* untuk melakukan dua fungsi krusial: memberikan panduan untuk penelitian empiris dan mengintegrasikan temuan empiris dalam kerangka teoretis yang koheren.

Kontinuum abstraksi-konkretisasi juga memungkinkan pergerakan dinamis antara berbagai tingkatan teori. Temuan dari *middle range theory* dapat diintegrasikan untuk memberikan dukungan atau kritik terhadap *grand theory*. Sebaliknya, wawasan dari *grand theory* dapat menginspirasi pengembangan *middle range theory* baru yang dapat diuji secara empiris. *Applied theory* dapat menggunakan wawasan dari kedua tingkatan teori yang lebih abstrak untuk menginformasikan praktik dan kebijakan.

Dalam konteks Indonesia, kontinuum abstraksi-konkretisasi menjadi sangat relevan mengingat keragaman sosial, budaya, dan geografis yang luar biasa. Teori-teori yang dikembangkan pada tingkat abstraksi tertentu di negara-negara Barat mungkin perlu diadaptasi atau dimodifikasi ketika diterapkan dalam konteks Indonesia yang spesifik. Misalnya, teori modernisasi yang beroperasi pada tingkat *grand theory* perlu dijabarkan dalam *middle range theory* yang dapat menangkap kompleksitas proses modernisasi dalam masyarakat multikultural dan kepulauan seperti Indonesia.

Fungsi Masing-Masing Level Teori dalam Pengembangan Ilmu

Setiap tingkatan dalam hierarki teori memiliki fungsi yang spesifik dan penting dalam ekosistem pengembangan ilmu sosial. Pemahaman tentang fungsi-fungsi ini krusial untuk menghindari kesalahan kategori yang sering terjadi ketika suatu tingkatan teori dievaluasi berdasarkan kriteria yang seharusnya diterapkan pada tingkatan teori yang lain.

Grand theory berfungsi sebagai kerangka paradigmatik yang memberikan visi menyeluruh tentang realitas sosial dan mengorganisir pemahaman kita tentang berbagai fenomena sosial dalam kerangka yang koheren. Fungsi ini analog dengan peran teori fisika teoretis yang memberikan kerangka konseptual untuk memahami alam semesta. *Grand theory* juga berfungsi sebagai sumber inspirasi dan panduan untuk pengembangan teori-teori yang lebih spesifik. Tanpa visi teoretis yang luas, penelitian empiris berisiko menjadi terfragmentasi dan kehilangan relevansi teoretis yang lebih besar.

Middle range theory berfungsi sebagai mekanisme penerjemah yang menerjemahkan wawasan teoretis yang abstrak menjadi hipotesis yang

dapat diuji secara empiris. Fungsi ini krusial karena memungkinkan akumulasi pengetahuan empiris yang dapat mendukung atau mengkritik proposisi teoretis yang lebih luas. *Middle range theory* juga berfungsi sebagai kerangka integratif yang dapat mengorganisir temuan empiris dari berbagai studi dalam kerangka teoretis yang koheren.

Applied theory berfungsi sebagai jembatan antara pengetahuan teoretis dengan praktik sosial dan kebijakan publik. Fungsi ini sangat penting dalam konteks kontemporer di mana ilmu sosial diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemecahan masalah-masalah praktis yang dihadapi masyarakat. *Applied theory* juga berfungsi sebagai arena pengujian untuk relevansi dan kegunaan teori sosial dalam konteks kehidupan nyata.

Dalam konteks Indonesia, fungsi-fungsi ini menjadi semakin kompleks mengingat kebutuhan untuk mengintegrasikan perspektif teoretis yang dikembangkan dalam konteks global dengan realitas sosial, budaya, dan politik Indonesia yang spesifik. Misalnya, teori tentang masyarakat sipil yang dikembangkan dalam konteks Eropa dan Amerika Utara perlu diterjemahkan melalui *middle range theory* yang dapat menangkap keunikan organisasi masyarakat sipil Indonesia seperti organisasi keagamaan, adat, dan berbagai bentuk gotong royong.

3.2 *Grand Theory*

Karakteristik dan Definisi

Grand theory merupakan tingkatan teoretis yang beroperasi pada level abstraksi tertinggi dalam hierarki teori ilmu sosial, dengan ambisi untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan universal tentang keseluruhan realitas sosial. Karakteristik fundamental dari *grand theory* adalah cakupan yang sangat luas, tingkat abstraksi yang tinggi, orientasi pada prinsip-prinsip universal, dan ambisi untuk mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan sosial dalam satu kerangka teoretis yang koheren.

Grand theory berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang hakikat masyarakat, mekanisme perubahan sosial, hubungan antara individu dan struktur sosial, serta arah perkembangan sejarah manusia. Berbeda dengan teori-teori yang lebih spesifik yang fokus pada aspek-aspek tertentu dari kehidupan sosial, *grand theory* berupaya memberikan perspektif total yang dapat menjelaskan keseluruhan dinamika sosial dalam kerangka yang terintegrasi.

Tingkat abstraksi yang tinggi dalam *grand theory* memungkinkannya untuk mengidentifikasi pola-pola dan prinsip-prinsip yang beroperasi di berbagai konteks sosial dan historis yang berbeda. Konsep-konsep dalam *grand theory* seperti cara produksi (*mode of production*) dalam teori Marx atau sistem sosial dalam teori Parsons dirancang untuk dapat diterapkan pada berbagai formasi sosial yang berbeda, dari masyarakat sederhana hingga masyarakat modern yang kompleks.

> "*Grand theory* adalah kerangka abstrak tertinggi dalam ilmu sosial dengan ambisi menjelaskan realitas sosial secara universal. Ia bersifat spekulatif, komprehensif, filosofis, serta berfungsi sebagai metateori dan paradigma, mengintegrasikan dimensi ekonomi, politik, budaya, hingga agensi-individu dalam visi teoretis holistik tentang masyarakat."

Orientasi pada prinsip-prinsip universal membuat *grand theory* berupaya mengidentifikasi hukum-hukum atau mekanisme fundamental yang mengatur kehidupan sosial lintas waktu dan ruang. Ambisi ini mencerminkan pengaruh model ilmu alam yang berusaha menemukan hukum-hukum universal yang dapat menjelaskan dan memprediksi fenomena natural. Dalam konteks sosial, ambisi ini diwujudkan dalam upaya untuk mengidentifikasi hukum-hukum sosial yang dapat menjelaskan dinamika masyarakat dengan tingkat generalitas yang sama dengan hukum-hukum fisika.

Tingkat Abstraksi Tertinggi dalam Ilmu Sosial

Sebagai tingkatan teoretis dengan abstraksi tertinggi, *grand theory* beroperasi dengan konsep-konsep yang sangat general dan inklusif yang dapat mencakup berbagai fenomena sosial yang beragam. Konsep-konsep ini seringkali bersifat meta-teoretis dalam arti bahwa mereka tidak langsung merujuk pada fenomena empiris yang spesifik tetapi pada kategori-kategori analitis yang dapat mengorganisir pemahaman tentang berbagai fenomena empiris.

Tingkat abstraksi yang tinggi ini memiliki keuntungan dalam hal daya penjelasan dan kapasitas integratif. *Grand theory* dapat memberikan

penjelasan yang elegan dan parsimoni tentang berbagai fenomena sosial yang tampaknya tidak berkaitan dengan menunjukkan bagaimana mereka merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip yang sama. Misalnya, teori sistem dunia Wallerstein dapat menjelaskan berbagai fenomena seperti pola perdagangan internasional, migrasi tenaga kerja, konflik politik, dan perubahan budaya sebagai manifestasi dari logika sistem kapitalis dunia.

Namun, tingkat abstraksi yang tinggi juga menciptakan tantangan dalam hal operasionalisasi dan kemampuan pengujian. Konsep-konsep yang sangat abstrak sulit untuk dioperasionalisasi menjadi variabel yang dapat diukur secara empiris. Proposisi-proposisi dalam *grand theory* seringkali dirumuskan pada tingkat generalitas yang begitu tinggi sehingga sulit untuk diuji melalui penelitian empiris yang spesifik.

Mencakup Seluruh Aspek Realitas Sosial

Ambisi *grand theory* untuk mencakup keseluruhan realitas sosial tercermin dalam upayanya untuk mengintegrasikan berbagai dimensi kehidupan sosial—ekonomi, politik, budaya, psikologis, dan spiritual—dalam satu kerangka teoretis yang komprehensif. *Grand theory* tidak puas dengan penjelasan parsial atau sektoral, tetapi berusaha menunjukkan bagaimana berbagai aspek kehidupan sosial saling terkait dan membentuk totalitas yang terintegrasi.

Pendekatan komprehensif ini mencerminkan pandangan dunia holistik yang melihat masyarakat sebagai sistem yang terintegrasi di mana setiap bagian mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bagian-bagian lainnya. Dalam perspektif ini, tidak mungkin untuk memahami secara adekuat satu aspek kehidupan sosial tanpa memahami hubungannya dengan aspek-aspek lainnya. Ekonomi tidak dapat dipahami terpisah dari politik, budaya tidak dapat dipahami terpisah dari struktur sosial, dan individu tidak dapat dipahami terpisah dari konteks sosial yang membentuknya.

Pendekatan komprehensif ini juga mencerminkan ambisi *grand theory* untuk memberikan penjelasan utama tentang fenomena sosial dengan mengidentifikasi faktor-faktor atau mekanisme fundamental yang mendasari berbagai manifestasi empiris. Marx mencari penjelasan utama dalam kontradiksi cara produksi, Parsons dalam persyaratan fungsional sistem sosial, dan Giddens dalam dialektika struktur dan agensi.

Bersifat Spekulatif dan Komprehensif

Karakter spekulatif *grand theory* terletak pada kesediaannya untuk membuat generalisasi yang luas berdasarkan bukti empiris yang terbatas dan untuk mengembangkan proposisi teoretis yang melampaui apa yang dapat diverifikasi secara langsung melalui observasi empiris. Spekulasi dalam konteks ini bukan berarti keputusan sewenang-wenang atau kurangnya ketepatan, tetapi spekulasi terdidik yang didasarkan pada sintesis mendalam terhadap bukti yang tersedia dan ekstrapolasi logis dari prinsip-prinsip teoretis.

Karakter komprehensif *grand theory* tercermin dalam ambisinya untuk memberikan gambaran lengkap tentang realitas sosial yang tidak meninggalkan aspek-aspek penting yang tidak dijelaskan. *Grand theory* berusaha untuk menutup sistem secara teoretis dengan menunjukkan bagaimana semua fenomena sosial yang relevan dapat dipahami dalam kerangka teoretis yang sama.

Kombinasi antara karakter spekulatif dan komprehensif ini membuat *grand theory* sangat kuat sebagai visi intelektual dan program penelitian tetapi juga rentan terhadap kritik tentang kecukupan empiris dan ketepatan operasional. Ketegangan ini merupakan karakteristik inheren dalam *grand theory* yang mencerminkan pertukaran antara keluasan dan ketepatan, antara visi dan kemampuan pengujian.

Orientasi Filosofis dan Weltanschauung

Grand theory tidak hanya berfungsi sebagai kerangka analitis tetapi juga sebagai pandangan dunia atau filsafat sejarah yang memberikan orientasi fundamental tentang hakikat realitas sosial, arah perubahan sejarah, dan kemungkinan transformasi sosial. Setiap *grand theory* mengandung asumsi-asumsi filosofis tentang ontologi (hakikat realitas sosial), epistemologi (cara memperoleh pengetahuan tentang masyarakat), dan aksiologi (nilai-nilai yang mendasari analisis sosial).

Dimensi pandangan dunia dari *grand theory* tercermin dalam visi normatifnya tentang masyarakat yang baik dan arah yang seharusnya dituju oleh perkembangan sosial. Marx memiliki visi tentang masyarakat komunis yang bebas dari eksploitasi kelas, Parsons memiliki visi tentang masyarakat modern yang terintegrasi secara fungsional, dan Habermas memiliki visi tentang masyarakat yang diorganisir berdasarkan komunikasi bebas dominasi.

Orientasi filosofis ini membuat *grand theory* berfungsi tidak hanya sebagai alat analitis tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan motivasi untuk aksi sosial. *Grand theory* dapat menginspirasi gerakan sosial, mempengaruhi kebijakan publik, dan membentuk budaya intelektual dalam cara yang melampaui kontribusi akademis murni.

Hubungan dengan Metateori dan Paradigma

Grand theory memiliki hubungan yang erat dengan konsep metateori dan paradigma dalam ilmu sosial. Metateori mengacu pada teori tentang teori—kerangka konseptual yang mengorganisir dan mengevaluasi berbagai teori substantif. *Grand theory* seringkali berfungsi sebagai metateori yang memberikan kerangka untuk mengintegrasikan dan mengevaluasi teori-teori yang lebih spesifik.

Paradigma, dalam pengertian Kuhn, mengacu pada matriks disipliner yang mencakup asumsi-asumsi fundamental, metode, dan standar yang dimiliki bersama oleh komunitas ilmiah. *Grand theory* seringkali terkait dengan paradigma tertentu dan membantu mendefinisikan karakteristik paradigma tersebut. Misalnya, teori Parsons terkait dengan paradigma fungsionalis, teori Marx dengan paradigma konflik, dan teori Weber dengan paradigma interpretivis.

Hubungan antara *grand theory*, metateori, dan paradigma menunjukkan bahwa *grand theory* tidak hanya berfungsi pada level substantif tetapi juga pada level meta-teoretis yang mempengaruhi bagaimana komunitas ilmiah memahami hakikat dan tujuan ilmu sosial itu sendiri.

Contoh-Contoh Grand Theory Klasik dan Kontemporer

Materialisme Historis Marx: Hukum Sejarah dan Perjuangan Kelas

Karl Marx (1818-1883) mengembangkan salah satu *grand theory* yang paling berpengaruh dan kontroversial dalam sejarah ilmu sosial melalui materialisme historis yang menganalisis perkembangan masyarakat manusia berdasarkan kontradiksi dalam cara produksi. Teori Marx beroperasi pada tingkat abstraksi yang sangat tinggi dengan mengklaim bahwa seluruh sejarah manusia dapat dipahami sebagai suksesi cara produksi yang berbeda yang masing-masing ditandai oleh perjuangan kelas.

Konsep cara produksi merupakan unit analisis fundamental dalam teori Marx yang mencakup baik kekuatan produksi (teknologi, keterampilan, pengetahuan) maupun hubungan produksi (hubungan sosial dalam proses produksi). Marx mengidentifikasi suksesi historis dari cara produksi: komunisme primitif, perbudakan kuno, feodalisme, kapitalisme, dan sosialisme/komunisme. Setiap cara produksi mengandung kontradiksi internal yang mengarah pada transformasi menuju cara produksi lebih maju.

Hukum sejarah dalam teori Marx beroperasi melalui dialektika antara kekuatan produksi yang terus berkembang dengan hubungan produksi yang menjadi semakin usang. Ketika kontradiksi ini mencapai intensitas tertentu, transformasi revolusioner terjadi yang menggantikan hubungan produksi lama dengan yang baru. Dalam konteks kapitalisme, kontradiksi fundamental terjadi antara karakter sosial dari produksi dengan apropriasi pribadi, termanifestasi dalam perjuangan kelas antara borjuasi dan proletariat.

Perjuangan kelas dalam teori Marx bukan hanya fenomena empiris tetapi kekuatan pendorong fundamental dari perubahan historis. Marx mengargumentasikan bahwa sejarah semua masyarakat yang ada hingga kini adalah sejarah perjuangan kelas dan bahwa resolusi final dari perjuangan kelas akan terjadi dalam masyarakat komunis di mana perbedaan kelas akan dihapuskan. Teori ini memberikan kerangka penjelasan dan program aksi revolusioner.

Dalam konteks Indonesia, aplikasi materialisme historis Marx telah mengalami berbagai adaptasi dan modifikasi. Analisis tentang cara produksi Asia telah digunakan untuk memahami karakteristik unik dari formasi sosial pra-kolonial Indonesia. Sarjana Indonesia kontemporer seperti Vedi Hadiz telah menggunakan kerangka Marxis untuk menganalisis kemunculan kapitalisme predatori dalam era pasca-Soeharto yang ditandai oleh persistensi struktur oligarkis. Gunawan Undang & Husni Thamrin (2016) mengkritik bahwa *grand theory* konflik Marx justru mengalami perubahan dari polarisasi ke fragmentasi, bukan integrasi.

Teori Sistem Parsons: AGIL dan Equilibrium Sosial

Talcott Parsons (1902-1979) mengembangkan teori sistem yang komprehensif yang berupaya mengintegrasikan wawasan dari sosiologi, antropologi, psikologi, dan ekonomi dalam kerangka teoretis yang terpadu. Sentral pada teori Parsons adalah konsep sistem sosial sebagai sistem yang

mempertahankan batas yang berinteraksi dengan lingkungan melalui proses-proses adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi (AGIL).

Skema AGIL merepresentasikan empat persyaratan fungsional yang harus dipenuhi oleh setiap sistem sosial yang dapat bertahan. Adaptasi (A) mengacu pada kapasitas sistem untuk memperoleh sumber daya dari lingkungan dan mengalokasikannya secara efektif. Pencapaian tujuan (G) mengacu pada kapasitas untuk memobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif. Integrasi (I) mengacu pada koordinasi dan kontrol internal yang mempertahankan solidaritas dan mencegah konflik yang mengganggu. Latensi (L) mengacu pada pemeliharaan pola nilai dan pengelolaan ketegangan yang muncul dari partisipasi dalam sistem sosial.

Konsep keseimbangan dalam teori Parsons tidak berarti keseimbangan statis tetapi keseimbangan dinamis yang mempertahankan stabilitas fundamental melalui perubahan-perubahan adaptif yang merespons tantangan lingkungan dan ketegangan internal. Sistem sosial memiliki mekanisme untuk menyerap dan menetralisir gangguan yang mengancam struktur dasar, sambil secara bersamaan beradaptasi melalui proses-proses diferensiasi dan integrasi.

Variabel pola dalam teori Parsons merepresentasikan dilema fundamental yang dihadapi oleh aktor sosial dalam situasi interaksi. Lima variabel pola tersebut adalah: afektivitas versus netralitas afektif, orientasi diri versus orientasi kolektivitas, universalisme versus partikularisme, pencapaian versus askripsi, dan kekhususan versus difusitas. Kombinasi dari pilihan-pilihan ini membentuk ekspektasi peran yang mengatur perilaku dalam berbagai konteks sosial.

Teori Parsons tentang perubahan sosial menekankan proses-proses universal evolusioner—perkembangan struktural yang meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat dan oleh karena itu cenderung untuk dipertahankan. Contoh dari universal evolusioner meliputi stratifikasi, legitimasi kultural, organisasi birokratis, dan uang serta pasar. Masyarakat modern ditandai oleh tingkat diferensiasi struktural dan spesialisasi fungsional yang lebih tinggi yang meningkatkan efisiensi tetapi juga memerlukan mekanisme integrasi yang lebih canggih.

Dalam konteks Indonesia, kerangka Parsonian telah digunakan untuk menganalisis proses-proses modernisasi dan demokratisasi. Konsep diferensiasi sangat relevan untuk memahami bagaimana institusi tradisional seperti monarki, dewan adat, dan organisasi keagamaan berinteraksi dengan institusi modern seperti pemerintahan demokratik, ekonomi pasar, dan

organisasi masyarakat sipil. Analisis tentang tantangan integrasi dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia juga mendapat manfaat dari perhatian Parsons terhadap mekanisme yang mempertahankan solidaritas sosial.

Teori Strukturasi Giddens: Duality of Structure

Anthony Giddens mengembangkan teori strukturasi sebagai upaya untuk melampaui oposisi tradisional antara agensi dan struktur dalam teori sosial melalui konseptualisasi dari dualitas struktur (*duality of structure*). Menurut Giddens, struktur dan agensi bukan entitas terpisah yang berinteraksi secara eksternal, tetapi aspek-aspek yang saling membentuk dari fenomena yang sama. Struktur memungkinkan dan sekaligus membatasi agensi, sementara agensi mereproduksi dan sekaligus mentransformasi struktur melalui praktik-praktik sosial.

Konsep struktur dalam teori Giddens mengacu pada aturan dan sumber daya yang dapat diinstansiasi dalam praktik-praktik sosial. Aturan mencakup baik aturan konstitutif yang mendefinisikan makna maupun aturan regulatif yang mengatur tindakan. Sumber daya terdiri dari sumber daya alokatif (kapabilitas material) dan sumber daya otoritatif (kapabilitas atas orang). Struktur tidak memiliki eksistensi independen dari pengetahuan yang dimiliki agen tentang apa yang mereka lakukan dalam aktivitas sehari-hari mereka.

Strukturasi adalah proses melalui mana praktik-praktik sosial membentang melintasi ruang dan waktu dan membentuk struktur yang secara rekursif mengorganisir praktik-praktik tersebut. Sistem sosial terdiri dari praktik-praktik sosial yang direproduksi, bukan struktur. Struktur hanya ada sebagai jejak memori yang memandu tindakan dan sebagai instansiasi dalam praktik-praktik sosial. Ini berarti bahwa struktur adalah baik medium maupun hasil dari praktik-praktik yang secara rekursif mengorganisir.

Agensi dalam teori Giddens didefinisikan sebagai kapasitas untuk membuat perbedaan atau untuk mengintervensi dalam dunia dengan efek tertentu. Agensi mengandaikan kekuasaan sebagai kapasitas transformatif. Agen adalah makhluk yang memiliki pengetahuan yang memiliki kesadaran praktis tentang kondisi dan konsekuensi dari tindakan mereka, meskipun banyak dari pengetahuan ini bersifat tacit dan tidak dapat dengan mudah diartikulasikan.

Dimensi temporal dalam teori strukturasi sangat penting. Giddens membedakan antara durasi (waktu yang dapat dibalik dari pengalaman sehari-hari), keberadaan (waktu yang tidak dapat dibalik dari rentang hidup),

dan durasi panjang (waktu institusional). Reproduksi sosial terjadi melalui integrasi dari aktivitas-aktivitas melintasi dimensi temporal yang berbeda, dari pertemuan rutin hingga reproduksi institusional melintasi generasi.

Dalam konteks Indonesia, teori strukturasi sangat berguna untuk menganalisis bagaimana praktik-praktik budaya tradisional bertahan dan bertransformasi dalam konteks modernisasi. Misalnya, analisis tentang bagaimana gotong royong sebagai praktik tradisional ter-reproduksi dalam bentuk-bentuk baru seperti program pembangunan berbasis masyarakat menunjukkan dualitas struktur di mana aturan dan sumber daya kultural memungkinkan praktik-praktik baru sambil ditransformasi oleh praktik-praktik tersebut.

Teori Sistem Dunia Wallerstein: Core-Periphery Global

Immanuel Wallerstein mengembangkan teori sistem dunia sebagai kerangka komprehensif untuk menganalisis kapitalisme global sebagai ekonomi dunia yang terintegrasi yang ditandai oleh pembagian kerja antara wilayah pusat (*core*), semi-pinggiran (*semi-periphery*), dan pinggiran (*periphery*). Teori ini merepresentasikan pergeseran radikal dari pendekatan yang berpusat pada negara dalam ilmu sosial dengan mengargumentasikan bahwa unit analisis yang tepat adalah sistem dunia sebagai totalitas, bukan masyarakat individual.

Sistem dunia modern, menurut Wallerstein, muncul pada abad ke-16 melalui ekspansi kapitalisme Eropa yang secara bertahap menginkorporasi seluruh dunia ke dalam satu pembagian kerja. Berbeda dengan kekaisaran dunia sebelumnya yang mempertahankan kesatuan politik, sistem dunia modern adalah ekonomi dunia yang ditandai oleh unit-unit politik yang multipel dalam satu sistem ekonomi. Ini memungkinkan akumulasi kapital pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Struktur pusat-pinggiran adalah karakteristik yang mendefinisikan ekonomi dunia kapitalis. Area pusat ditandai oleh produksi berketerampilan tinggi dan padat modal yang menghasilkan keuntungan tinggi. Area pinggiran berspesialisasi dalam produksi berketerampilan rendah dan padat tenaga kerja dari bahan mentah dan produk pertanian yang mengalami eksploitasi. Area semi-pinggiran menempati posisi intermediat dan berfungsi untuk memediasi ketegangan antara pusat dan pinggiran.

Ritme siklikal dan tren sekular merupakan dimensi temporal fundamental dari sistem dunia. Wallerstein mengidentifikasi gelombang Kondratieff (siklus

50-60 tahun) yang bergantian antara fase ekspansi dan kontraksi, serta tren sekular yang lebih panjang yang membentang melintasi beberapa abad. Tren sekular saat ini yang dimulai pada akhir abad ke-15 mendekati krisis terminal yang akan menghasilkan transisi menuju sistem historis yang berbeda.

Siklus hegemoni dalam sistem dunia melibatkan kebangkitan dan kejatuhan kekuatan pusat dominan yang mampu memaksakan kehendak mereka di seluruh sistem. Wallerstein mengidentifikasi hegemoni yang berturut-turut: hegemoni Belanda (pertengahan abad ke-17), hegemoni Inggris (pertengahan abad ke-19), dan hegemoni Amerika (pertengahan abad ke-20). Setiap siklus hegemoni mengikuti pola yang serupa dari kebangkitan melalui efisiensi produktif, ekspansi melalui dominasi komersial, dan penurunan melalui finansialisasi.

Dalam konteks Indonesia, analisis sistem dunia memberikan kerangka yang kuat untuk memahami posisi Indonesia dalam ekonomi global dari periode kolonial hingga era kontemporer. Analisis tentang evolusi Indonesia dari status pinggiran selama periode kolonial menuju posisi semi-pinggiran dalam era pasca-kemerdekaan menunjukkan peluang dan kendala yang membentuk lintasan pembangunan. Tantangan kontemporer seperti jebakan pendapatan menengah dan degradasi lingkungan dapat dipahami sebagai manifestasi dari posisi struktural dalam ekonomi dunia.

Kelebihan dan Keterbatasan Grand Theory

Visi Menyeluruh vs Kurang Operasional

Kelebihan utama dari *grand theory* terletak pada kemampuannya untuk memberikan visi menyeluruh tentang realitas sosial yang dapat mengintegrasikan berbagai fenomena sosial yang tampaknya terpisah dalam kerangka teoretis yang koheren. Visi menyeluruh ini sangat berharga karena beberapa alasan. Pertama, ia memberikan perspektif gambaran besar yang dapat menginformasikan pemahaman tentang signifikansi dari fenomena partikular dalam konteks yang lebih luas. Kedua, ia menawarkan kerangka integratif yang dapat menghubungkan wawasan dari berbagai area kehidupan sosial. Ketiga, ia memberikan visi normatif yang dapat menginspirasi aksi sosial dan pembentukan kebijakan.

Grand theory juga memiliki nilai heuristik yang signifikan dalam menghasilkan pertanyaan penelitian baru dan membuka area investigasi baru. Kerangka teoretis yang komprehensif dapat menyarankan koneksi dan pola yang tidak langsung terlihat dari observasi empiris saja. Mereka dapat mengidentifikasi

kesenjangan dalam pengetahuan saat ini dan menunjuk ke area yang produktif untuk penelitian masa depan.

Namun, kekomprehensivannya seringkali datang dengan biaya dari ketepatan operasional. Konsep-konsep yang cukup general untuk mencakup berbagai fenomena seringkali terlalu abstrak untuk aplikasi empiris langsung. Operasionalisasi dari konsep-konsep seperti cara produksi, sistem sosial, atau ekonomi dunia memerlukan beberapa level penerjemahan teoretis yang dapat memperkenalkan ambiguitas dan kesalahan pengukuran.

Kurangnya ketepatan operasional juga menciptakan masalah untuk pengujian dan verifikasi teori. Proposisi dalam *grand theory* seringkali dirumuskan pada level generalitas yang membuat mereka sulit untuk difalsifikasi melalui tes empiris spesifik. Ini dapat menghasilkan kerangka teoretis yang kebal dari penolakan empiris dan dengan demikian kehilangan karakter ilmiah mereka.

Dalam konteks Indonesia, ketegangan antara visi komprehensif dan ketepatan operasional sangat menantang karena kebutuhan untuk mengadaptasi teori-teori yang dikembangkan dalam konteks budaya dan historis yang berbeda. Sarjana Indonesia harus terlibat dalam proses penerjemahan teoretis yang kompleks yang mempertahankan wawasan esensial dari *grand theory* sambil membuatnya dapat diterapkan untuk kondisi Indonesia yang spesifik.

Inspirasi Teoretis vs Sulit Diuji Empiris

Grand theory berfungsi sebagai sumber inspirasi teoretis yang krusial yang dapat merangsang pengembangan teori-teori yang lebih spesifik dan program-program penelitian. Fungsi inspirasional ini tidak boleh diremehkan karena terobosan dalam pemahaman sosial seringkali dimulai dengan wawasan teoretis kreatif yang kemudian diterjemahkan ke dalam program penelitian spesifik. *Grand theory* memberikan imajinasi teoretis yang esensial untuk melampaui keterbatasan akal sehat dan kebijaksanaan konvensional.

Inspirasi teoretis dari *grand theory* juga meluas melampaui ranah akademis menuju budaya intelektual yang lebih luas dan wacana publik. Teori-teori seperti materialisme historis Marx atau analisis Weber tentang rasionalisasi telah secara mendalam mempengaruhi pemahaman publik tentang isu-isu sosial dan membentuk gerakan politik serta perdebatan kebijakan. Pengaruh budaya yang lebih luas ini merepresentasikan bentuk dampak teoretis yang

penting yang tidak dapat ditangkap melalui kriteria sempit dari kemampuan pengujian empiris.

Namun, kekuatan inspirasional dari *grand theory* seringkali berbanding terbalik dengan kemampuan pengujian empiris. Teori-teori yang paling menginspirasi dan berpengaruh secara kultural seringkali adalah yang membuat klaim paling berani dan generalisasi paling luas, justru fitur-fitur yang membuat mereka sulit untuk diuji melalui studi empiris spesifik. Ini menciptakan ketegangan antara kreativitas teoretis dan ketepatan ilmiah yang merepresentasikan tantangan persisten dalam teori sosial.

Kesulitan pengujian empiris juga berasal dari cakupan temporal dan spasial dari *grand theory*. Teori-teori yang membuat klaim tentang seluruh *epoch historical* atau sistem global memerlukan pengumpulan bukti pada skala yang seringkali melampaui sumber daya peneliti individual atau institusi penelitian. Bahkan ketika bukti relevan tersedia, interpretasi seringkali kontroversial karena beberapa kerangka teoretis dapat konsisten dengan pola empiris yang sama.

Dalam konteks Indonesia, tantangan pengujian empiris sangat akut karena keterbatasan ketersediaan data historis dan sumber daya untuk penelitian skala besar. Sarjana Indonesia seringkali harus mengandalkan analisis sekunder dari pola global atau studi skala kecil yang mungkin tidak memadai untuk menguji klaim *grand theory*. Ini memerlukan pendekatan metodologis kreatif yang dapat memaksimalkan nilai informasi dari data yang tersedia.

3.3 *Middle Range Theory*

Konsep Merton tentang Middle Range Theory

Robert K. Merton mengembangkan konsep teori *middle range theory* sebagai respons strategis terhadap polarisasi yang tidak produktif antara *grand theory* dan empirisme abstrak dalam sosiologi Amerika pada pertengahan abad ke-20. Dalam formulasi klasiknya, Merton mendefinisikan *middle range theory* sebagai teori-teori yang berada di antara hipotesis kerja minor yang muncul dalam kelimpahan selama penelitian sehari-hari dan upaya sistematis yang mencakup semua untuk mengembangkan teori terpadu yang akan menjelaskan semua keseragaman yang diamati dari perilaku sosial, organisasi sosial dan perubahan sosial (Merton, 1968).

Konsep *middle range theory* dirancang untuk mengatasi apa yang Merton identifikasi sebagai kematangan prematur dari ambisi teoretis dalam *grand*

theory sambil tetap mempertahankan tingkat generalisasi yang memadai untuk kontribusi teoretis yang signifikan. *Middle range theory* beroperasi pada tingkat abstraksi yang cukup tinggi untuk memberikan wawasan teoretis yang general tetapi tidak terlalu tinggi sehingga kehilangan koneksi dengan fenomena empiris yang dapat diobservasi dan diukur.

Karakteristik fundamental dari *middle range theory* adalah fokusnya pada rentang data yang terbatas dengan cakupan yang menengah antara detail empiris yang spesifik dengan generalisasi teoretis yang universal. *Middle range theory* tidak berupaya menjelaskan keseluruhan realitas sosial, tetapi fokus pada aspek-aspek spesifik dari kehidupan sosial seperti penyimpangan, mobilitas sosial, birokrasi, atau jaringan sosial. Fokus yang terbatas ini memungkinkan pengembangan proposisi teoretis yang dapat dioperasionalisasi dan diuji secara empiris.

Prinsip *middle range theory* juga menekankan pentingnya karakter kumulatif dari pengetahuan ilmiah. Berbeda dengan *grand theory* yang berupaya memberikan penjelasan lengkap dalam satu sistem teoretis, *middle range theory* bekerja melalui akumulasi bertahap dari wawasan teoretis yang dapat diintegrasikan dari waktu ke waktu. Merton mengargumentasikan bahwa kemajuan ilmiah dalam sosiologi akan dicapai melalui pengembangan dari beberapa *middle range theory* yang pada akhirnya dapat diintegrasikan dalam kerangka teoretis yang lebih luas.

Jembatan antara** grand theory **dan Penelitian Empiris

Fungsi krusial dari *middle range theory* sebagai mekanisme penghubung antara level spekulasi teoretis abstrak dan penelitian empiris konkret merepresentasikan mungkin kontribusi paling pentingnya kepada metodologi ilmu sosial. Fungsi jembatan ini beroperasi dalam kedua arah: *middle range theory* dapat menurunkan hipotesis dari kerangka teoretis yang lebih luas dan mengujinya melalui penelitian empiris, dan sebaliknya dapat menggeneralisasi dari temuan empiris menuju wawasan teoretis yang lebih luas.

Dalam arah dari teori menuju penelitian, *middle range theory* berfungsi sebagai mekanisme penerjemah yang mengkonversi konsep teoretis abstrak menjadi definisi operasional dan hipotesis yang dapat diuji. Misalnya, *grand theory* tentang stratifikasi sosial dapat diterjemahkan melalui *middle range theory* tentang mobilitas pendidikan yang fokus pada mekanisme spesifik melalui mana pencapaian pendidikan mempengaruhi posisi sosial. Proses

penerjemahan ini krusial karena membuat wawasan abstrak dapat diakses untuk investigasi empiris.

Dalam arah dari penelitian menuju teori, *middle range theory* berfungsi sebagai mekanisme agregasi yang dapat mengintegrasikan temuan dari beberapa studi empiris dalam kerangka teoretis yang lebih luas. Studi individual mungkin memberikan wawasan tentang aspek-aspek spesifik dari fenomena sosial, tetapi *middle range theory* dapat mengidentifikasi pola umum dan mekanisme yang mendasari yang beroperasi melintasi konteks yang berbeda. Fungsi agregasi ini esensial untuk pengembangan kumulatif pengetahuan ilmiah.

> "*Middle range theory* Merton menjembatani *grand theory* dan penelitian empiris dengan tingkat abstraksi moderat. Fokus pada aspek spesifik kehidupan sosial memungkinkan generalisasi terukur, pengujian empiris, serta akumulasi pengetahuan kumulatif. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini memfasilitasi adaptasi teori global pada realitas lokal yang kompleks."

Fungsi jembatan juga beroperasi pada dimensi temporal dengan menghubungkan wawasan teoretis historis dengan penelitian empiris kontemporer. *Middle range theory* dapat menghidupkan kembali dan memperbarui wawasan teoretis klasik melalui metode empiris modern, serta dapat mengidentifikasi kontinuitas dan perubahan dalam pola sosial dari waktu ke waktu. Penghubungan temporal ini sangat penting untuk mempertahankan koneksi dengan warisan intelektual dari disiplin sambil beradaptasi dengan kondisi sosial yang berubah.

Dalam konteks Indonesia, fungsi jembatan dari *middle range theory* sangat berharga karena memungkinkan adaptasi dari wawasan teoretis internasional kepada kondisi lokal melalui studi empiris spesifik. Peneliti Indonesia dapat menggunakan *middle range theory* untuk menguji penerapan kerangka teoretis yang lebih luas dalam konteks Indonesia dan mengidentifikasi modifikasi yang diperlukan untuk relevansi lokal.

Fokus pada Aspek-Aspek Spesifik Kehidupan Sosial

Karakteristik khas dari *middle range theory* adalah perhatian fokus pada domain atau aspek spesifik dari kehidupan sosial daripada berupaya cakupan komprehensif dari seluruh realitas sosial. Fokus ini tidak merepresentasikan keterbatasan tetapi pilihan strategis yang memungkinkan pemahaman yang lebih dalam dari fenomena partikular melalui pengembangan teoretis sistematis dan investigasi empiris.

Kekhususan fokus memungkinkan *middle range theory* untuk mengembangkan wawasan khusus domain yang mungkin dikaburkan dalam kerangka teoretis yang lebih luas. Perhatian detail kepada aspek partikular dari kehidupan sosial dapat mengungkapkan kompleksitas, nuansa, dan mekanisme yang tidak langsung terlihat dari perspektif yang lebih general. Pemahaman detail ini esensial untuk prediksi akurat dan intervensi efektif.

Pendekatan fokus juga memungkinkan pengembangan konsep khusus dan metodologi yang disesuaikan yang sangat tepat untuk mempelajari fenomena spesifik. Konsep yang dikembangkan dalam konteks mempelajari domain sosial partikular dapat lebih tepat menangkap perbedaan dan hubungan yang relevan daripada konsep general yang harus dapat diterapkan melintasi beberapa domain.

Namun, kekhususan fokus juga menciptakan tantangan dari fragmentasi teoretis jika *middle range theory* yang berbeda tidak cukup terhubung satu sama lain atau dengan kerangka teoretis yang lebih luas. Risiko fragmentasi dapat dikurangi melalui perhatian kepada pembentangan batas yang mengidentifikasi koneksi antara domain teoretis yang berbeda dan peluang integrasi.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan fokus dari *middle range theory* sangat berharga untuk mengatasi tantangan spesifik yang unik kepada masyarakat Indonesia. Teori yang fokus pada isu seperti konflik etnis, pluralisme religius, atau pembangunan pedesaan dapat lebih memadai mengatasi realitas Indonesia daripada teori general yang dikembangkan dalam konteks yang berbeda.

Tingkat Generalisasi yang Moderat

Middle range theory menempati titik manis dalam kontinuum generalisasi yang menghindari kedua ekstrem kekhususan yang berlebihan dan generalitas yang berlebihan. Tingkat generalisasi moderat memungkinkan

middle range theory untuk memberikan wawasan yang cukup general untuk signifikansi teoretis tetapi cukup spesifik untuk penerapan empiris. Keseimbangan ini krusial untuk utilitas ilmiah dari kerangka teoretis.

Generalisasi moderat memungkinkan *middle range theory* untuk mengidentifikasi pola yang beroperasi melintasi beberapa konteks sambil tetap sensitif terhadap variasi kontekstual yang mempengaruhi manifestasi spesifik dari pola general. Ini memungkinkan pengembangan generalisasi kontingen yang menspesifikasi kondisi di mana pola general diharapkan beroperasi dan kondisi di mana penyimpangan diharapkan.

Tingkat generalisasi juga mempengaruhi cakupan klaim teoretis dan implikasi untuk kebijakan dan praktik. *Middle range theory* dapat memberikan panduan untuk intervensi dan pembentukan kebijakan yang lebih spesifik dan dapat ditindaklanjuti daripada panduan dari *grand theory*, tetapi lebih dapat diterapkan secara luas daripada wawasan dari studi empiris tunggal.

Generalisasi moderat juga memfasilitasi komunikasi antara peneliti yang bekerja dalam konteks yang berbeda karena memberikan kosakata konseptual bersama yang dapat diadaptasi kepada kondisi lokal sambil mempertahankan koherensi teoretis. Fungsi komunikasi ini sangat penting untuk kolaborasi internasional dan penelitian komparatif.

Dalam konteks Indonesia, generalisasi moderat dari *middle range theory* memungkinkan peneliti untuk terlibat dengan wacana teoretis internasional sambil mempertahankan perhatian kepada kondisi Indonesia yang spesifik. Sarjana Indonesia dapat berkontribusi kepada pengembangan teori internasional melalui pengujian dan modifikasi *middle range theory* dalam konteks Indonesia.

Contoh-Contoh Middle Range Theory

Teori Anomie/Strain Merton: Struktur Sosial dan Deviasi

Teori anomie Merton merepresentasikan contoh paradigmatik dari *middle range theory* yang berhasil menjembatani wawasan teoretis yang lebih luas dengan fenomena empiris spesifik. Merton mengadaptasi konsep anomie dari Durkheim dan mengembangkannya menjadi teori sistematis tentang penyimpangan yang fokus pada disjungsi antara tujuan yang ditetapkan secara kultural dan sarana yang tersedia secara struktural untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam formulasi Merton, anomie dihasilkan dari ketegangan (*strain*) yang dialami oleh individu ketika struktur sosial tidak memberikan sarana sah yang memadai untuk mencapai tujuan yang ditekankan secara kultural. Masyarakat Amerika - menurut Merton - menekankan tujuan kesuksesan tetapi tidak secara setara memberikan akses kepada sarana sah untuk mencapai kesuksesan. Ketegangan ini sangat akut untuk individu dalam strata sosial yang lebih rendah yang memiliki akses terbatas kepada sarana konvensional dari kesuksesan.

Merton mengidentifikasi lima mode adaptasi kepada ketegangan: konformitas (penerimaan baik tujuan maupun sarana), inovasi (penerimaan tujuan tetapi penolakan sarana), ritualisme (penolakan tujuan tetapi penerimaan sarana), retreatisme (penolakan baik tujuan maupun sarana), dan pemberontakan (penggantian baik tujuan maupun sarana dengan yang baru). Setiap mode adaptasi terkait dengan bentuk perilaku menyimpang yang berbeda.

Teori anomie memiliki daya penjelasan yang signifikan untuk rentang luas perilaku menyimpang, dari kejahatan dan kenakalan hingga penyakit mental dan bunuh diri. Teori ini juga menghasilkan hipotesis spesifik yang dapat diuji tentang hubungan antara variabel struktur sosial (seperti posisi kelas, akses kepada peluang) dan hasil penyimpangan. Penelitian empiris ekstensif telah memberikan dukungan substansial untuk proposisi kunci dari teori.

Dalam konteks Indonesia, teori anomie memiliki relevansi partikular untuk memahami masalah sosial yang muncul dari modernisasi yang cepat dan pembangunan ekonomi. Disjungsi antara tujuan kesuksesan modern yang ditekankan dalam budaya Indonesia kontemporer dan akses terbatas kepada sarana sah untuk mencapai kesuksesan dapat berkontribusi kepada berbagai bentuk penyimpangan, dari korupsi hingga keresahan sosial. Penelitian Indonesia dalam area seperti kenakalan remaja dan kejahatan kerah putih telah menggunakan teori anomie sebagai kerangka teoretis, dengan studi-studi yang menganalisis ketegangan dalam konteks modernisasi dan urbanisasi (Kartono, 2014; Jurnal Analisa Sosiologi, 2020).

Teori Labeling: Konstruksi Sosial Deviance

Teori pelabelan, dikembangkan oleh sarjana seperti Howard Becker dan Edwin Lemert, merepresentasikan *middle range theory* penting yang menggeser fokus dari karakteristik tindakan menyimpang kepada proses sosial melalui mana perilaku tertentu dilabeli sebagai menyimpang. Teori ini

menantang pendekatan tradisional yang memperlakukan penyimpangan sebagai properti objektif dari perilaku tertentu dengan mengargumentasikan bahwa penyimpangan adalah hasil dari proses konstruksi sosial.

Proposisi sentral dari teori pelabelan adalah bahwa penyimpangan bukan kualitas dari tindakan yang dilakukan seseorang, tetapi konsekuensi dari aplikasi oleh orang lain dari aturan dan sanksi kepada pelanggar (Becker, 1963). Ini berarti bahwa perilaku yang sama dapat dianggap menyimpang dalam satu konteks tetapi normal dalam konteks lain, tergantung pada reaksi sosial dan proses pelabelan yang terjadi.

Teori pelabelan membedakan antara penyimpangan primer (tindakan menyimpang awal yang mungkin memiliki berbagai penyebab) dan penyimpangan sekunder (perilaku menyimpang yang dihasilkan dari reaksi sosial kepada penyimpangan primer). Penyimpangan sekunder seringkali lebih serius dan persisten daripada penyimpangan primer karena proses pelabelan dapat menciptakan karir menyimpang yang membatasi peluang konvensional dan memperkuat identitas menyimpang.

Konsep status master dan identitas yang rusak sentral pada analisis teori pelabelan tentang bagaimana label menyimpang mempengaruhi posisi sosial dan konsep diri individu. Setelah dilabeli sebagai menyimpang, individu mungkin menemukan bahwa identitas menyimpang menjadi status master mereka yang mengaburkan aspek lain dari identitas mereka dan membatasi peluang mereka untuk partisipasi sosial konvensional.

Teori ini memiliki implikasi penting untuk kebijakan sosial, terutama dalam area keadilan kriminal dan kesehatan mental. Perspektif pelabelan menyarankan bahwa intervensi formal kadang-kadang dapat memperburuk masalah yang dimaksudkan untuk dipecahkan melalui penciptaan atau penguatan label menyimpang. Ini telah mengarah pada advokasi untuk dekriminalisasi, program pengalihan, dan pendekatan keadilan restoratif.

Dalam konteks Indonesia, teori pelabelan memiliki relevansi partikular untuk memahami stigma sosial yang terkait dengan berbagai bentuk penyimpangan, dari penggunaan narkoba hingga homoseksualitas. Penelitian dalam konteks Indonesia telah mengeksplorasi bagaimana kategori budaya tradisional dan definisi hukum modern berinteraksi dalam proses pelabelan, termasuk analisis tentang stigma sosial dan identitas dalam masyarakat multikultural (Oetomo, 2001; Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 2019).

Teori Modal Sosial Coleman: Jaringan sebagai Sumber Daya

Teori modal sosial James Coleman merepresentasikan *middle range theory* yang canggih yang mengintegrasikan wawasan dari teori pilihan rasional dengan analisis jaringan untuk menjelaskan bagaimana hubungan sosial berfungsi sebagai sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk mencapai tujuan individual dan kolektif. Coleman mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya struktural sosial yang merupakan aset modal untuk individu dalam pencapaian kepentingan mereka.

Modal sosial eksis dalam hubungan antara orang dan termanifestasi dalam bentuk seperti kewajiban dan ekspektasi, saluran informasi, dan norma serta sanksi efektif. Tidak seperti modal fisik (alat, teknologi) atau modal manusia (keterampilan, pengetahuan), modal sosial melekat dalam struktur hubungan antara aktor dan di antara aktor. Modal sosial produktif karena memungkinkan pencapaian tujuan tertentu yang tidak akan dapat dicapai dalam ketiadaannya.

Coleman mengidentifikasi beberapa bentuk modal sosial: kewajiban dan ekspektasi (yang bergantung pada kepercayaan lingkungan sosial), saluran informasi (yang memberikan basis untuk tindakan), norma dan sanksi efektif (yang mempromosikan atau membatasi perilaku tertentu), hubungan otoritas (yang mentransfer hak kontrol), organisasi sosial yang dapat disesuaikan (yang didirikan untuk satu tujuan dapat digunakan untuk tujuan lain), dan organisasi intensional (yang diciptakan secara spesifik untuk menghasilkan modal sosial).

Teori modal sosial memiliki aplikasi ekstensif dalam area seperti pendidikan, pembangunan ekonomi, pengorganisasian komunitas, dan kesehatan publik. Penelitian telah menunjukkan bahwa komunitas dengan tingkat modal sosial yang lebih tinggi cenderung memiliki hasil pendidikan yang lebih baik, tingkat kejahatan yang lebih rendah, tata kelola yang lebih efektif, dan hasil kesehatan yang lebih baik. Penelitian ini telah mempengaruhi inisiatif kebijakan yang ditujukan pada pembangunan modal sosial dalam komunitas yang kurang beruntung.

Salah satu kekuatan dari pendekatan Coleman adalah perhatian kepada penutupan (*closure*) dalam jaringan sosial. Penutupan mengacu pada sejauh mana anggota jaringan terhubung satu sama lain, menciptakan jaring hubungan yang padat yang memfasilitasi pemantauan dan penegakan norma. Penutupan penting untuk mempertahankan kepercayaan dan keandalan dalam hubungan sosial.

Dalam konteks Indonesia, teori modal sosial memiliki relevansi partikular untuk memahami peran institusi sosial tradisional seperti gotong royong, arisan, dan organisasi keagamaan dalam pembangunan komunitas dan dukungan sosial. Penelitian Indonesia telah mengeksplorasi bagaimana bentuk-bentuk tradisional dari modal sosial dapat dimanfaatkan untuk tujuan pembangunan modern, dengan fokus khusus pada gotong royong dan jaringan kekerabatan sebagai aset pembangunan (Fukuyama, 1995; Woolcock, 1998; Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 2021).

Teori Dramaturgi Goffman: Interaksi sebagai Pertunjukan

Dramaturgi Erving Goffman merepresentasikan *middle range theory* inovatif yang menggunakan metafora teater untuk menganalisis interaksi sosial sehari-hari. Dalam *The Presentation of Self in Everyday Life* (1959), Goffman mengembangkan kerangka sistematis untuk memahami bagaimana individu mengelola kesan dalam pertemuan sosial melalui pertunjukan strategis dari peran sosial.

Sentral pada analisis dramaturgis adalah perbedaan antara wilayah panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*) dari kehidupan sosial. Panggung depan adalah area pertunjukan sosial di mana individu mempresentasikan diri mereka kepada audiens sesuai dengan ekspektasi sosial. Panggung belakang adalah area di mana individu dapat rileks dari tuntutan pertunjukan dan terlibat dalam perilaku yang tidak akan tepat dalam konteks panggung depan.

Konsep pengelolaan kesan (*impression management*) sentral pada analisis Goffman. Individu secara konstan terlibat dalam upaya untuk mengontrol kesan yang dibentuk orang lain tentang mereka melalui pengelolaan hati-hati dari penampilan, cara, dan setting mereka. Pengelolaan kesan melibatkan baik praktik defensif (melindungi pertunjukan sendiri) dan praktik protektif (membantu orang lain mempertahankan pertunjukan mereka).

Goffman mengidentifikasi berbagai strategi jarak peran (*role distance*) yang digunakan individu untuk mempertahankan beberapa pemisahan dari peran sosial yang mereka mainkan. Jarak peran memungkinkan individu untuk memainkan peran yang diperlukan sambil secara bersamaan mengindikasikan bahwa mereka tidak sepenuhnya teridentifikasi dengan peran tersebut. Ini memungkinkan pemeliharaan identitas personal yang berbeda dari persyaratan peran.

Perspektif dramaturgis telah diterapkan kepada rentang luas konteks sosial, dari setting profesional hingga hubungan intim. Penelitian dalam area seperti pekerjaan layanan, pertemuan medis, dan setting pendidikan telah menggunakan konsep dramaturgis untuk menganalisis dinamika kekuasaan, identitas profesional, dan strategi pengelolaan interaksi.

Teori ini juga memiliki implikasi untuk memahami masalah sosial seperti stigma, penyakit mental, dan marginalisasi sosial. Karya Goffman yang lebih akhir tentang identitas yang rusak dan kehidupan institusional mengeksplorasi bagaimana institusi sosial dapat secara sistematis merusak kapasitas individu untuk mempertahankan presentasi diri yang positif.

Dalam konteks Indonesia, analisis dramaturgis memiliki relevansi partikular untuk memahami hierarki sosial dan sistem etiket yang kompleks yang mengkarakterisasi banyak budaya Indonesia. Penelitian telah mengeksplorasi bagaimana konsep tradisional seperti basa-basi dan halus-kasar berfungsi sebagai strategi pengelolaan kesan dalam masyarakat Jawa, dan bagaimana bentuk-bentuk tradisional ini beradaptasi dalam konteks modern (Anderson, 1990; Geertz, 1976).

3.4 *Applied Theory*

Definisi dan Orientasi Applied Theory

Applied theory atau teori terapan merepresentasikan tingkatan ketiga dalam hierarki teori ilmu sosial yang secara eksplisit berorientasi pada aplikasi praktis dari wawasan teoretis untuk memecahkan masalah-masalah konkret yang dihadapi oleh masyarakat, organisasi, dan individu. Berbeda dari *grand theory* yang terutama berkaitan dengan pemahaman komprehensif dan *middle range theory* yang fokus pada pengembangan teoretis, *applied theory* memiliki orientasi pemecahan masalah yang menekankan utilitas dan efektivitas dalam mengatasi tantangan dunia nyata.

Orientasi dari *applied theory* adalah secara fundamental pragmatis dalam pengertian bahwa nilai dari wawasan teoretis dievaluasi berdasarkan kapasitas mereka untuk menginformasikan tindakan efektif dan menghasilkan hasil positif. Ini tidak berarti bahwa *applied theory* ini tidak berkaitan dengan ketepatan teoretis atau akurasi empiris, tetapi nilai-nilai ilmiah ini disubordinasi kepada tujuan utama dari efektivitas praktis.

Applied theory juga ditandai oleh orientasi interdisipliner yang siap untuk mengintegrasikan wawasan dari beberapa tradisi teoretis dan perspektif

disipliner jika integrasi tersebut meningkatkan efektivitas praktis. Masalah praktis jarang menghormati batas disipliner, dan *applied theory* harus cukup fleksibel untuk memanfaatkan sumber daya teoretis yang beragam yang relevan untuk masalah yang dihadapi.

Karakteristik lain dari *applied theory* adalah sensitivitas konteks yang mengakui bahwa aplikasi efektif dari wawasan teoretis memerlukan perhatian hati-hati kepada konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi spesifik di mana intervensi akan diimplementasikan. Prinsip teoretis generik harus diadaptasi kepada kondisi lokal untuk mencapai efektivitas maksimum.

Aplikasi Teori untuk Memecahkan Masalah Praktis

Proses penerapan wawasan teoretis untuk pemecahan masalah praktis melibatkan beberapa tahap yang memerlukan baik kecanggihan teoretis maupun kebijaksanaan praktis. Tahap pertama adalah diagnosis masalah yang melibatkan analisis hati-hati dari masalah yang muncul untuk mengidentifikasi penyebab yang mendasari dan faktor-faktor yang berkontribusi. Tahap diagnosis memerlukan kerangka teoretis yang dapat menerangi berbagai aspek dari masalah dan menyarankan titik-titik intervensi yang mungkin.

> "*Applied theory* menekankan aplikasi praktis ilmu sosial untuk memecahkan masalah nyata masyarakat, organisasi, dan individu. Berorientasi pragmatis, interdisipliner, serta sensitif konteks, ia berperan penting dalam kebijakan publik, intervensi sosial, dan menjembatani akademisi–praktisi. Dalam konteks Indonesia, efektivitasnya menuntut adaptasi pada budaya, politik, dan ekonomi lokal."

Tahap kedua adalah desain intervensi yang melibatkan penerjemahan wawasan teoretis menjadi strategi dan tindakan spesifik yang dapat mengatasi masalah yang teridentifikasi. Tahap desain memerlukan kreativitas dalam mengadaptasi prinsip teoretis general kepada kondisi kontekstual spesifik, serta penilaian realistis dari sumber daya yang tersedia dan kendala.

Tahap ketiga adalah implementasi yang melibatkan eksekusi aktual dari intervensi yang dirancang. Tahap implementasi seringkali mengungkapkan kesenjangan antara prediksi teoretis dan realitas praktis, memerlukan penyesuaian dan modifikasi yang berkelanjutan dalam respons kepada tantangan yang muncul.

Tahap keempat adalah evaluasi yang menilai efektivitas dari intervensi yang diimplementasikan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Evaluasi memberikan umpan balik yang dapat menginformasikan perbaikan dalam baik desain intervensi maupun pemahaman teoretis yang mendasari.

Dalam konteks Indonesia, aplikasi wawasan teoretis kepada masalah praktis memerlukan perhatian partikular kepada kesesuaian budaya, kelayakan politik, dan keberlanjutan ekonomi. Banyak intervensi yang sukses dalam konteks lain mungkin memerlukan modifikasi substansial untuk kondisi Indonesia.

Orientasi pada Kebijakan Publik dan Intervensi Sosial

Applied theory memiliki peran yang sangat penting dalam menginformasikan pengembangan kebijakan publik dan desain intervensi sosial. Pembuat kebijakan memerlukan panduan teoretis untuk memahami masalah sosial yang kompleks dan merancang respons yang efektif, tetapi mereka juga memerlukan wawasan teoretis yang dipresentasikan dalam bentuk yang dapat diakses dan terhubung kepada rekomendasi praktis.

Aplikasi kebijakan publik dari *applied theory* mencakup area seperti **kebijakan pendidikan** (diinformasikan oleh teori pembelajaran dan reproduksi sosial), **kebijakan kesehatan** (diinformasikan oleh teori perilaku kesehatan dan determinan sosial), **kebijakan ekonomi** (diinformasikan oleh teori perilaku pasar dan pembangunan), dan **kebijakan kesejahteraan sosial** (diinformasikan oleh teori kemiskinan dan dukungan sosial).

Aplikasi intervensi sosial fokus pada program dan layanan yang dirancang untuk mengatasi masalah sosial spesifik atau mempromosikan hasil sosial positif. Contoh mencakup program pembangunan komunitas, intervensi kesehatan mental, inisiatif pencegahan kejahatan, dan upaya konservasi lingkungan.

Applied theory dalam konteks kebijakan dan intervensi harus menavigasi lingkungan politik yang kompleks di mana beberapa pemangku kepentingan memiliki kepentingan dan prioritas yang berbeda. Wawasan teoretis harus

diterjemahkan menjadi rekomendasi yang layak secara politik yang dapat memperoleh dukungan dari konstituensi yang beragam.

Dalam konteks Indonesia, aplikasi kebijakan dari *applied theory* sangat penting untuk mengatasi tantangan seperti pengurangan kemiskinan, perbaikan pendidikan, penguatan sistem kesehatan, perlindungan lingkungan, dan pemeliharaan kohesi sosial dalam masyarakat yang beragam.

Jembatan antara Dunia Akademik dan Praktisi

Applied theory melayani fungsi penghubungan krusial antara pengembangan teori akademik dan pengetahuan praktisi dari pengalaman lapangan. Teori akademik memberikan pemahaman sistematis dan bukti empiris, sementara pengalaman praktisi memberikan wawasan tentang tantangan implementasi dan faktor kontekstual yang mempengaruhi efektivitas intervensi.

Fungsi jembatan memerlukan proses penerjemahan pengetahuan yang dapat membuat wawasan akademik dapat diakses kepada praktisi sambil secara bersamaan memastikan bahwa wawasan praktisi menginformasikan pengembangan teori akademik. Penerjemahan pengetahuan yang efektif memerlukan perhatian kepada gaya komunikasi yang berbeda, kendala waktu, dan proses pengambilan keputusan yang mengkarakterisasi komunitas akademik dan praktisi.

Applied theory juga memfasilitasi pengembangan komunitas praktik yang menyatukan akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan anggota komunitas untuk pemecahan masalah kolaboratif. Komunitas ini dapat berfungsi sebagai forum untuk dialog berkelanjutan antara pengembangan teoretis dan aplikasi praktis.

Kolaborasi antara akademisi dan praktisi dapat menghasilkan bukti berbasis praktik yang melengkapi praktik berbasis bukti tradisional. Bukti berbasis praktik muncul dari refleksi sistematis pada pengalaman praktik dan dapat mengidentifikasi inovasi dan adaptasi yang tidak ditangkap dalam studi penelitian terkontrol.

Dalam konteks Indonesia, fungsi penghubungan sangat penting karena kebutuhan untuk mengadaptasi wawasan teoretis internasional kepada kondisi lokal melalui kolaborasi dengan praktisi lokal yang memahami faktor kontekstual.

Evidence-Based Policy dan Practice

Penekanan kontemporer pada kebijakan berbasis bukti dan praktik berbasis bukti mencerminkan pengakuan yang berkembang bahwa investasi publik dan intervensi sosial harus diinformasikan oleh bukti empiris terbaik yang tersedia tentang efektivitas. *Applied theory* memainkan peran krusial dalam mengembangkan basis bukti melalui evaluasi sistematis dari intervensi dan program.

Pendekatan berbasis bukti memerlukan integrasi dari beberapa jenis bukti, termasuk uji coba terkontrol acak, studi kuasi-eksperimental, studi observasional, penelitian kualitatif, dan pengalaman praktik. *Applied theory* memberikan kerangka untuk mensintesis bentuk-bentuk bukti yang beragam dalam pemahaman koheren tentang apa yang berhasil, untuk siapa, dalam kondisi apa.

Tinjauan sistematis dan meta-analisis merepresentasikan metode penting untuk mensintesis bukti melintasi beberapa studi untuk mengidentifikasi pola general dan menilai kekuatan bukti untuk intervensi partikular. Metode ini memerlukan kerangka teoretis untuk mengorganisir bukti dan menginterpretasikan temuan.

Namun, pendekatan berbasis bukti juga menghadapi keterbatasan dalam mengatasi masalah sosial kompleks yang melibatkan beberapa penyebab, horizon waktu yang panjang, dan hasil yang sulit diukur. *Appkied theory* harus menyeimbangkan penekanan pada bukti empiris dengan pengakuan dari keterbatasan basis bukti saat ini dan kebutuhan untuk kreativitas teoretis dalam mengatasi tantangan novel.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan basis bukti sangat menantang karena infrastruktur penelitian dan sumber daya yang terbatas untuk studi evaluasi skala besar. Peneliti Indonesia harus kreatif dalam menggunakan data yang tersedia dan mengembangkan metode evaluasi inovatif.

Bidang-Bidang Aplikasi Teori Sosial (Fokus Utama)

A. Politik dan Tata Kelola Pemerintahan

Aplikasi teori sosial dalam bidang politik dan tata kelola pemerintahan mencakup rentang luas isu dari perilaku elektoral dan partisipasi politik hingga efektivitas tata kelola dan proses demokratisasi. *Applied theory* dalam domain ini harus mengintegrasikan wawasan dari ilmu politik, sosiologi,

ekonomi, dan administrasi publik untuk mengatasi tantangan kompleks dari tata kelola demokratis.

Teori Demokrasi dan Partisipasi Politik

Teori demokratis memberikan fondasi untuk memahami model berbeda dari tata kelola demokratis dan implikasi mereka untuk partisipasi warga dan responsivitas pemerintah. Teori klasik dari pemikir seperti John Stuart Mill, Robert Dahl, dan Joseph Schumpeter memberikan perspektif berbeda pada hubungan antara partisipasi warga dan efektivitas demokratis.

Teori kontemporer dari demokrasi deliberatif menekankan pentingnya deliberasi publik dalam pengambilan keputusan demokratis dan menyarankan mekanisme institusional untuk meningkatkan kualitas wacana publik. Teori demokrasi partisipatoris menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam semua aspek tata kelola, bukan hanya pemilihan.

Aplikasi dari teori demokratis dalam konteks Indonesia melibatkan perhatian kepada nilai budaya seperti musyawarah-mufakat yang menekankan pembangunan konsensus melalui deliberasi. Penelitian telah mengeksplorasi bagaimana proses pengambilan keputusan Indonesia tradisional dapat diintegrasikan dengan institusi demokratis modern untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas.

Teori partisipasi politik memeriksa faktor yang mempengaruhi keterlibatan warga dalam proses politik. Penelitian telah mengidentifikasi variabel seperti pendidikan, pendapatan, jaringan sosial, efikasi politik, dan desain institusional sebagai determinan penting dari tingkat partisipasi. Penelitian terapan dalam konteks Indonesia telah memeriksa bagaimana desentralisasi mempengaruhi partisipasi warga dalam tata kelola lokal.

Good Governance dan Anti-Korupsi

Good governance theory memberikan kerangka untuk menilai dan meningkatkan kinerja pemerintah dalam area seperti transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas. Bank Dunia dan organisasi internasional lainnya telah mengembangkan indikator untuk mengukur kualitas tata kelola yang digunakan secara luas dalam penelitian komparatif dan evaluasi kebijakan.

Teori anti-korupsi memeriksa penyebab korupsi dan efektivitas strategi anti-korupsi yang berbeda. Teori menekankan faktor seperti desain institusional, norma budaya, insentif ekonomi, dan mekanisme penegakan sebagai determinan penting dari tingkat korupsi. Penelitian telah menunjukkan bahwa upaya anti-korupsi yang sukses biasanya memerlukan pendekatan komprehensif yang mengatasi beberapa faktor yang berkontribusi.

Dalam konteks Indonesia, tata kelola yang baik dan anti-korupsi adalah isu yang sangat penting karena warisan pemerintahan otoriter dan tantangan berkelanjutan dalam membangun institusi demokratis yang efektif. Reformasi Indonesia sejak 1998 telah mencakup pembentukan lembaga anti-korupsi, inisiatif transparansi, dan program desentralisasi yang diinformasikan oleh praktik terbaik internasional dan wawasan teoretis, dengan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas implementasi (Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020).

Network Governance dan Collaboration

Teori tata kelola jaringan memeriksa bagaimana pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dapat berkolaborasi untuk mengatasi masalah publik kompleks yang tidak dapat secara efektif diatasi oleh organisasi tunggal yang bertindak sendiri. Teori ini sangat relevan dalam konteks kontemporer di mana banyak tantangan publik—seperti kemiskinan, degradasi lingkungan, atau krisis kesehatan publik—memerlukan respons terkoordinasi melintasi beberapa sektor dan tingkat pemerintah.

Teori tata kelola kolaboratif memberikan kerangka untuk memahami kondisi yang mempromosikan kolaborasi yang sukses dan mekanisme untuk mengelola proses kolaboratif. Penelitian telah mengidentifikasi faktor seperti kepemimpinan konvening, akuntabilitas bersama, pembangunan kepercayaan, dan desain institusional sebagai elemen kritis dalam pengaturan kolaboratif yang sukses.

Kemitraan publik-swasta merepresentasikan aplikasi penting dari teori tata kelola jaringan dalam area seperti pengembangan infrastruktur, penyampaian layanan, dan pembangunan ekonomi. Teori memberikan panduan untuk menstrukturkan kemitraan untuk memaksimalkan nilai publik sambil mengelola risiko dari keterlibatan sektor swasta.

Dalam konteks Indonesia, tata kelola jaringan sangat relevan untuk mengatasi tantangan yang membentang melintasi beberapa yurisdiksi atau memerlukan koordinasi melintasi sektor. Contoh mencakup pembangunan

ekonomi regional, manajemen bencana, dan upaya konservasi lingkungan yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah nasional, pemerintah lokal, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil.

B. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Reformasi desentralisasi Indonesia yang dimulai pada tahun 1999 merepresentasikan salah satu program desentralisasi paling ekstensif di dunia berkembang. *Applied theory* dalam domain desentralisasi memanfaatkan wawasan teoretis dari federalisme fiskal, ekonomi politik, dan administrasi publik untuk menginformasikan desain kebijakan dan mengevaluasi hasil implementasi.

Multi-Level Governance dan Subsidiarity

Teori tata kelola multi-tingkat atau *multi-Level governance* memeriksa bagaimana otoritas dan tanggung jawab dapat didistribusikan melintasi tingkat pemerintah yang berbeda untuk mengoptimalkan partisipasi demokratis, efektivitas kebijakan, dan efisiensi administratif. Teori ini memberikan kerangka untuk menganalisis pembagian fungsi yang tepat antara pemerintah nasional, regional, dan lokal berdasarkan prinsip seperti eksternalitas, skala ekonomi, dan akuntabilitas demokratis.

Prinsip subsidiaritas menyarankan bahwa fungsi pemerintah harus dilakukan pada tingkat pemerintah terendah yang dapat secara efektif mengatasi isu partikular. Prinsip ini memberikan fondasi teoretis untuk reformasi desentralisasi tetapi memerlukan analisis hati-hati dari domain kebijakan spesifik untuk menentukan tingkat tata kelola optimal.

Dalam konteks Indonesia, teori tata kelola multi-tingkat telah menginformasikan analisis tentang bagaimana fungsi pemerintah yang berbeda harus didistribusikan antara pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penelitian telah memeriksa pertukaran antara otonomi lokal dan koordinasi nasional dalam area seperti pendidikan, kesehatan, pengembangan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam.

Teori hubungan antarpemerintah memeriksa mekanisme untuk koordinasi antara tingkat pemerintah yang berbeda dan pengelolaan konflik potensial yang muncul dari yurisdiksi yang tumpang tindih. Desentralisasi Indonesia telah menciptakan hubungan antarpemerintah yang kompleks yang memerlukan negosiasi dan penyesuaian berkelanjutan.

Participatory Budgeting dan Local Democracy

Penganggaran partisipatif merepresentasikan mekanisme inovatif untuk meningkatkan partisipasi warga dalam tata kelola lokal melalui keterlibatan langsung dalam keputusan alokasi anggaran. Teori dari demokrasi partisipatif memberikan fondasi untuk memahami bagaimana partisipasi warga dapat meningkatkan baik legitimasi demokratis maupun efektivitas kebijakan.

Teori penganggaran partisipatif memeriksa kondisi yang mempromosikan implementasi yang sukses, termasuk fitur desain institusional, pelatihan fasilitator, penyediaan informasi, dan mekanisme tindak lanjut. Penelitian telah menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif yang sukses memerlukan komitmen berkelanjutan dari pejabat pemerintah, sumber daya yang memadai untuk implementasi, dan mekanisme untuk memastikan bahwa keputusan warga benar-benar mempengaruhi alokasi anggaran.

Dalam konteks Indonesia, beberapa pemerintah lokal telah bereksperimen dengan mekanisme penganggaran partisipatif, terutama dalam perencanaan pembangunan tingkat desa. Penelitian telah memeriksa bagaimana proses konsultasi tradisional seperti musrenbang dapat ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih partisipatif yang memberikan warga pengaruh yang lebih besar atas keputusan anggaran.

Teori pembangunan yang didorong komunitas memberikan kerangka untuk memahami bagaimana komunitas lokal dapat diberdayakan untuk merancang dan mengimplementasikan proyek pembangunan mereka sendiri dengan dukungan dari pemerintah atau lembaga donor. Teori menekankan pentingnya kepemilikan lokal, pembangunan kapasitas, dan akuntabilitas sosial dalam mencapai hasil pembangunan yang berkelanjutan.

Regional Development dan Inter-Regional Cooperation

Teori pembangunan regional memeriksa faktor yang mempromosikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam wilayah geografis spesifik. Teori memanfaatkan wawasan dari geografi ekonomi, ekonomi pembangunan, dan kebijakan publik untuk memahami bagaimana karakteristik regional, pengaturan institusional, dan intervensi kebijakan mempengaruhi hasil pembangunan.

Teori kluster menyarankan bahwa konsentrasi geografis dari industri terkait dapat menciptakan keuntungan kompetitif melalui *spillover* pengetahuan,

kumpulan tenaga kerja khusus, dan jaringan pemasok. Penelitian terapan dalam konteks Indonesia telah memeriksa potensi untuk mengembangkan kluster industri dalam area seperti tekstil, elektronik, pemrosesan pertanian, dan pariwisata.

Teori kerjasama antar-regional memeriksa bagaimana pemerintah regional dapat berkolaborasi untuk mengatasi tantangan bersama atau mengejar peluang bersama. Teori memberikan kerangka untuk menganalisis insentif untuk kerjasama, mekanisme institusional untuk mengelola pengaturan kolaboratif, dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama.

Dalam konteks Indonesia, kerjasama antar-regional sangat penting untuk mengatasi tantangan yang melintasi batas administratif, seperti pengelolaan sumber daya air, infrastruktur transportasi, dan tata kelola area metropolitan. Penelitian telah memeriksa contoh seperti kerjasama Jabodetabek dan koordinasi area metropolitan Surabaya.

C. Hubungan Internasional dan Globalisasi

Applied theory dalam hubungan internasional memeriksa bagaimana Indonesia dapat secara efektif menavigasi lingkungan global yang kompleks sambil mengejar kepentingan nasional dan berkontribusi pada kerjasama internasional. Kerangka teoretis dari hubungan internasional memberikan panduan untuk pengembangan kebijakan luar negeri, negosiasi perdagangan, kerjasama keamanan, dan partisipasi tata kelola global.

Teori Realisme, Liberalisme, Konstruktivisme

Teori realis menekankan peran kekuasaan, kekhawatiran keamanan, dan kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Dalam konteks Indonesia, wawasan realis menginformasikan analisis tantangan keamanan regional, kebijakan pertahanan, dan hubungan strategis dengan kekuatan besar. Pendekatan Indonesia kepada sengketa Laut Cina Selatan, kerjasama ASEAN, dan hubungan dengan China dan Amerika Serikat – misalnya - mencerminkan pertimbangan realis tentang keseimbangan kekuasaan dan kepentingan nasional.

Teori liberal menekankan pentingnya institusi internasional, saling ketergantungan ekonomi, dan tata kelola demokratis dalam mempromosikan perdamaian dan kerjasama. Partisipasi aktif Indonesia dalam organisasi internasional seperti ASEAN, G20, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa

mencerminkan kepercayaan liberal dalam multilateralisme dan tatanan internasional berbasis aturan.

Teori konstruktivis menekankan peran ide, norma, dan identitas dalam membentuk perilaku internasional. Konsep kebijakan luar negeri Indonesia tentang bebas aktif (independen dan aktif) merepresentasikan identitas yang dikonstruksi yang membentuk bagaimana Indonesia mendekati hubungan internasional. Analisis konstruktivis memeriksa bagaimana identitas Indonesia sebagai demokrasi Muslim terbesar, pemimpin di dunia berkembang, dan advokat untuk koeksistensi damai mempengaruhi pilihan kebijakan luar negeri.

Soft Power Diplomacy

Soft power diplomacy theory atau "teori diplomasi lunak", yang dikembangkan oleh Joseph Nye, memeriksa bagaimana negara dapat mempengaruhi orang lain melalui daya tarik daripada koersi. Aset kekuatan lunak Indonesia mencakup keragaman budaya, tata kelola demokratis, Islam moderat, dinamisme ekonomi, dan kepemimpinan dalam ASEAN. Penelitian terapan memeriksa bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan aset-aset ini untuk meningkatkan pengaruh internasional.

Teori diplomasi publik memberikan kerangka untuk memahami bagaimana pemerintah dapat berkomunikasi dengan publik asing untuk membangun pemahaman dan dukungan untuk tujuan kebijakan. Upaya diplomasi publik Indonesia mencakup pertukaran budaya, program pendidikan, penjangkauan religius, dan keterlibatan media yang dirancang untuk memproyeksikan citra positif secara internasional.

Track-two diplomacy theory atau "teori dua jalur diplomasi" memeriksa peran aktor non-pemerintah dalam hubungan internasional, termasuk pemimpin bisnis, akademisi, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan Indonesia terhadap pemecahan masalah regional seringkali melibatkan inisiatif jalur dua yang melengkapi upaya diplomatik resmi.

Economic Integration dan Regionalism

Teori integrasi regional memeriksa kondisi dan konsekuensi dari kerjasama ekonomi antara negara-negara tetangga. ASEAN merepresentasikan kasus penting untuk teori integrasi regional, dan sarjana Indonesia telah berkontribusi kepada pemahaman tentang bagaimana keragaman budaya,

tingkat pembangunan yang berbeda, dan sistem politik yang bervariasi mempengaruhi proses integrasi.

Teori perdagangan memberikan fondasi untuk menganalisis manfaat dan biaya dari kebijakan perdagangan yang berbeda. Kebijakan perdagangan Indonesia harus menyeimbangkan manfaat dari perdagangan internasional dengan perlindungan untuk industri domestik dan pekerja. Penelitian terapan memeriksa strategi perdagangan optimal untuk sektor berbeda dari ekonomi Indonesia.

Teori investasi asing memeriksa faktor yang menarik investasi internasional dan kebijakan yang dapat memaksimalkan manfaat untuk negara tuan rumah. Upaya Indonesia untuk menarik investasi asing harus mempertimbangkan wawasan teoretis tentang pengambilan keputusan investor, efek spillover, dan kerangka kebijakan yang mempromosikan investasi produktif.

D. Ekonomi dan Pembangunan

Applied theory dalam ekonomi dan pembangunan memanfaatkan wawasan dari ekonomi pembangunan, ekonomi institusional, dan ekonomi perilaku untuk menginformasikan strategi untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mencapai pembangunan berkelanjutan.

Institutional Economics dan Property Rights

Teori ekonomi institusional menekankan pentingnya institusi—aturan formal dan norma informal—dalam menentukan kinerja ekonomi. Institusi kuat yang melindungi hak properti, menegakkan kontrak, dan membatasi korupsi menciptakan lingkungan yang mempromosikan investasi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Teori hak properti memeriksa bagaimana sistem kepemilikan properti yang berbeda mempengaruhi insentif ekonomi dan hasil. Penelitian dalam konteks Indonesia telah memeriksa bagaimana sistem kepemilikan tanah adat tradisional berinteraksi dengan hukum properti modern dan bagaimana program pemberian hak atas tanah mempengaruhi produktivitas pertanian dan pembangunan pedesaan.

Teori biaya transaksi memeriksa bagaimana pengaturan institusional mempengaruhi biaya melakukan transaksi ekonomi. Penelitian terapan memeriksa bagaimana sistem regulasi, kerangka hukum, dan prosedur birokratis mempengaruhi biaya bisnis dan daya saing dalam ekonomi Indonesia.

Pembangunan Berkelanjutan dan Green Economy

Teori pembangunan berkelanjutan memberikan kerangka untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan kesetaraan sosial. Strategi pembangunan Indonesia harus mengatasi ketegangan teoretis antara tujuan pertumbuhan dan tujuan keberlanjutan, terutama dalam area seperti kehutanan, pertambangan, dan pembangunan industri.

Teori ekonomi hijau memeriksa bagaimana aktivitas ekonomi dapat distrukturkan untuk mengurangi dampak lingkungan sambil mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan manusia. Penelitian terapan dalam konteks Indonesia memeriksa potensi untuk industri hijau, pengembangan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan ekowisata.

Teori ekonomi lingkungan memberikan alat untuk menganalisis masalah lingkungan dan merancang solusi kebijakan. Aplikasi mencakup analisis deforestasi, kontrol polusi, pengelolaan perikanan, dan adaptasi perubahan iklim dalam konteks Indonesia.

Creative Industries dan Digital Economy

Teori ekonomi kreatif memeriksa potensi ekonomi dari industri yang berbasis pada kreativitas, pengetahuan, dan properti intelektual, seperti seni, media, desain, dan pengembangan perangkat lunak. Indonesia memiliki potensi signifikan dalam industri kreatif berdasarkan warisan budaya, tradisi artistik, dan kapabilitas digital yang berkembang.

Teori ekonomi digital memeriksa bagaimana teknologi informasi mentransformasi aktivitas ekonomi dan menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan dan pembangunan. Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pengembangan ekonomi digital sebagai strategi untuk mencapai status ekonomi maju.

Teori sistem inovasi memeriksa bagaimana interaksi antara aktor yang berbeda—termasuk bisnis, universitas, lembaga pemerintah, dan institusi penelitian—mempromosikan inovasi dan pengembangan teknologi. Penelitian terapan memeriksa bagaimana Indonesia dapat memperkuat kapabilitas inovasi untuk mendukung peningkatan ekonomi.

E. Budaya dan Local Wisdom

Applied theory dalam budaya dan kearifan lokal memeriksa bagaimana sistem pengetahuan tradisional, praktik budaya, dan institusi asli dapat dipreservasi, diadaptasi, dan dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan kontemporer sambil menjaga keaslian budaya dan identitas komunitas.

Cultural Preservation vs Modernization

Teori preservasi budaya menjelaskan strategi untuk mempertahankan warisan budaya dalam konteks perubahan sosial yang cepat. Upaya preservasi harus menyeimbangkan keaslian dengan adaptasi untuk memastikan relevansi untuk kondisi kontemporer. Upaya Indonesia untuk mempreservasi seni tradisional, bahasa, dan adat istiadat memberikan studi kasus penting untuk teori preservasi budaya.

Teori modernisasi secara tradisional mengasumsikan bahwa pembangunan memerlukan penggantian institusi dan praktik tradisional dengan yang modern. Namun, pendekatan kontemporer mengakui bahwa sistem tradisional seringkali mengandung pengetahuan berharga dan dapat diadaptasi untuk konteks modern daripada hanya digantikan.

Teori adaptasi budaya memeriksa bagaimana praktik tradisional berevolusi dalam respons kepada keadaan yang berubah sambil mempertahankan nilai budaya inti. Contoh Indonesia mencakup adaptasi sistem tata kelola tradisional untuk konteks demokratis modern, dengan integrasi nilai-nilai adat dalam tata kelola pemerintahan daerah dan pengelolaan sumber daya (Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, 2021).

Indigenous Knowledge Systems

Teori pengetahuan asli atau *indigenous knowledge systems* mengakui bahwa masyarakat tradisional telah mengembangkan pemahaman canggih tentang lingkungan lokal, organisasi sosial, dan teknik pemecahan masalah yang

dapat memberikan wawasan berharga untuk tantangan kontemporer. Sistem pengetahuan asli Indonesia mencakup pertanian tradisional, pengobatan, arsitektur, resolusi konflik, dan pengelolaan sumber daya alam.

Pengetahuan ekologi tradisional merepresentasikan area penting di mana pengetahuan asli dapat menginformasikan pengelolaan lingkungan kontemporer. Komunitas Indonesia telah mengembangkan sistem canggih untuk mengelola hutan, perikanan, sumber daya air, dan keanekaragaman hayati pertanian yang dapat memberikan model untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

Teori pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas memeriksa bagaimana komunitas lokal dapat secara efektif mengelola sumber daya alam melalui institusi dan praktik tradisional. Contoh Indonesia mencakup sistem sasi dalam pengelolaan perikanan, sistem irigasi subak di Bali, dan program kehutanan komunitas.

Adat Institutions dan Customary Law

Teori pluralisme hukum memeriksa bagaimana sistem hukum yang berbeda dapat koeksis dalam masyarakat yang sama dan bagaimana konflik antara tradisi hukum yang berbeda dapat diselesaikan. Sistem hukum Indonesia mencakup hukum negara, hukum agama, dan hukum adat, menciptakan lingkungan hukum kompleks yang memerlukan pemahaman teoretis tentang pluralisme hukum.

Teori hukum adat bersumsi bagaimana sistem hukum tradisional beroperasi dan bagaimana mereka dapat diintegrasikan dengan kerangka hukum modern. Hukum adat Indonesia mengandung mekanisme canggih untuk resolusi konflik, pengelolaan properti, dan kontrol sosial yang dapat menginformasikan pendekatan tata kelola kontemporer.

Teori tata kelola tradisional menjelaskan bagaimana sistem politik asli beroperasi dan dapat diinkorporasi ke dalam tata kelola demokratis modern, seperti sistem tata kelola desa, peran kepemimpinan tradisional, dan proses pengambilan keputusan berbasis consensus konteks Indonesia.

Community-Based Tourism dan Resource Management

Teori pariwisata berbasis komunitas memeriksa bagaimana pengembangan pariwisata dapat menguntungkan komunitas lokal sambil mempreservasi

warisan budaya dan sumber daya lingkungan. Inisiatif pariwisata berbasis komunitas Indonesia memberikan contoh bagaimana komunitas tradisional dapat memanfaatkan aset budaya untuk pembangunan ekonomi sambil mempertahankan keaslian budaya.

Teori pengelolaan sumber daya partisipatif memeriksa bagaimana komunitas lokal dapat terlibat dalam keputusan pengelolaan sumber daya alam yang mempengaruhi mata pencaharian dan lingkungan mereka. Contoh Indonesia mencakup pengelolaan hutan berbasis komunitas, konservasi kelautan, dan program pengelolaan daerah aliran sungai.

Teori pariwisata budaya memeriksa bagaimana warisan budaya dapat dikembangkan sebagai atraksi pariwisata dalam cara yang menghormati nilai lokal dan memberikan manfaat untuk komunitas lokal. Inisiatif pariwisata budaya Indonesia harus menyeimbangkan peluang komersial dengan tujuan preservasi budaya.

3.4.3 Metodologi Penelitian Terapan

Action Research dan Participatory Research

Action Research atau penelitian aksi merepresentasikan metodologi penelitian yang secara fundamental berbeda dari pendekatan penelitian tradisional karena mengintegrasikan penelitian dengan aksi untuk perubahan sosial. Berbeda dari penelitian konvensional yang mempertahankan pemisahan antara peneliti dan subjek, penelitian aksi melibatkan kolaborasi antara peneliti dan anggota komunitas dalam mengidentifikasi masalah, merancang intervensi, mengimplementasikan solusi, dan mengevaluasi hasil.

Kurt Lewin, yang umumnya disebut sebagai pendiri penelitian aksi, mengembangkan metodologi sebagai respons kepada kebutuhan untuk penelitian yang dapat secara langsung berkontribusi pada pemecahan masalah sosial. Pendekatan Lewin melibatkan siklus perencanaan, aksi, observasi, dan refleksi yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan dalam baik pemahaman maupun praktik.

Penelitian aksi partisipatif memperluas prinsip penelitian aksi dengan menekankan partisipasi penuh dari anggota komunitas dalam semua aspek proses penelitian. Penelitian aksi partisipatif mengasumsikan bahwa orang yang mengalami masalah paling baik diposisikan untuk memahami masalah dan mengembangkan solusi, dan bahwa penelitian harus memberdayakan

komunitas untuk mengambil aksi untuk mengatasi kekhawatiran mereka sendiri.

Prinsip kunci dari penelitian aksi partisipatif mencakup: partisipasi demokratis (semua pemangku kepentingan memiliki suara dalam proses penelitian), kesetaraan (kekuasaan dibagikan di antara partisipan), pembebasan (penelitian harus mempromosikan keadilan sosial), dan peningkatan kehidupan (penelitian harus meningkatkan kualitas hidup untuk partisipan). Prinsip-prinsip ini membedakan penelitian aksi partisipatif dari penelitian konvensional yang seringkali memperlakukan subjek penelitian sebagai sumber data pasif.

Dalam konteks Indonesia, penelitian aksi partisipatif sangat berharga untuk bekerja dengan komunitas yang terpinggirkan seperti kelompok adat, masyarakat miskin pedesaan, dan penghuni kumuh perkotaan. Contoh Indonesia mencakup program pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas, inisiatif pembangunan desa partisipatif, dan upaya pengorganisasian akar rumput yang menggunakan penelitian untuk menginformasikan advokasi dan perubahan kebijakan.

Evaluation Research dan Impact Assessment

Evaluation Research fokus pada penilaian sistematis program dan intervensi sosial untuk menentukan efektivitas mereka dalam mencapai hasil yang dimaksudkan. Penelitian evaluasi memanfaatkan kerangka teoretis untuk mengembangkan model logika yang menspesifikasi bagaimana program diharapkan menghasilkan perubahan yang diinginkan dan metode empiris untuk menilai apakah perubahan yang diharapkan benar-benar terjadi.

Jenis evaluasi mencakup evaluasi proses (memeriksa implementasi program), evaluasi hasil (memeriksa hasil jangka pendek), dan evaluasi dampak (memeriksa efek jangka panjang). Setiap jenis memerlukan pendekatan metodologis yang berbeda dan melayani tujuan yang berbeda dalam pengembangan dan perbaikan program.

Penilaian dampak melibatkan analisis komprehensif dari efek program, termasuk konsekuensi yang dimaksudkan dan tidak dimaksudkan, efek pada kelompok populasi yang berbeda, dan keberlanjutan perubahan dari waktu ke waktu. Penilaian dampak memerlukan perhatian kepada penalaran kontrafaktual—apa yang akan terjadi dalam ketiadaan program—yang seringkali ditangani melalui desain eksperimental atau kuasi-eksperimental.

Uji coba terkontrol acak merepresentasikan standar emas untuk evaluasi dampak karena memberikan bukti terkuat untuk hubungan kausal antara intervensi dan hasil. Namun, uji coba terkontrol acak seringkali tidak layak atau tepat untuk intervensi sosial kompleks, memerlukan desain evaluasi alternatif seperti pencocokan skor kecenderungan, analisis perbedaan-dalam-perbedaan, atau pendekatan metode campuran.

> "Metodologi penelitian terapan mencakup *action research*, penelitian partisipatif, evaluasi, penilaian dampak, dan *translational research*. Fokusnya menghubungkan teori dengan praktik, melibatkan komunitas, menilai efektivitas program, serta mengadaptasi intervensi berbasis bukti pada konteks lokal, termasuk Indonesia yang memiliki tantangan sosial, budaya, politik, dan ekonomi beragam."

Pengembalian investasi sosial merepresentasikan pendekatan inovatif untuk evaluasi yang mencoba untuk mengkuantifikasi nilai sosial yang diciptakan oleh program dalam istilah moneter. Analisis pengembalian investasi sosial memerlukan integrasi pengukuran hasil kuantitatif dengan valuasi pemangku kepentingan dari berbagai jenis manfaat.

Dalam konteks Indonesia, penelitian evaluasi sangat penting untuk menilai efektivitas program sosial skala besar seperti program transfer tunai bersyarat, inisiatif asuransi kesehatan, dan reformasi pendidikan. Penelitian evaluasi Indonesia harus mengatasi tantangan seperti data baseline yang terbatas, sistem administratif yang lemah, dan sensitivitas politik seputar penilaian program.

Translational Research dari Teori ke Praktik

Translational Research fokus pada menjembatani kesenjangan antara pengetahuan teoretis dan aplikasi praktis melalui proses sistematis dari penerjemahan pengetahuan, adaptasi, dan implementasi. Bidang medis telah mengembangkan model canggih untuk penelitian translasional yang menggerakkan penemuan dari laboratorium kepada praktik klinis, dan pendekatan serupa sedang dikembangkan untuk intervensi sosial.

Penerjemahan pengetahuan melibatkan beberapa tahap: sintesis bukti penelitian, adaptasi untuk konteks lokal, pengembangan strategi implementasi, evaluasi hasil implementasi, dan diseminasi pelajaran yang dipelajari. Setiap tahap memerlukan jenis keahlian yang berbeda dan kolaborasi antara peneliti, praktisi, pembuat kebijakan, dan anggota komunitas.

Ilmu implementasi memeriksa faktor yang mempengaruhi implementasi sukses dari intervensi berbasis bukti dalam setting dunia nyata. Penelitian telah mengidentifikasi beberapa hambatan implementasi termasuk budaya organisasi, kendala sumber daya, kapasitas staf, dukungan politik, dan kesiapan komunitas. Implementasi yang sukses memerlukan perhatian sistematis kepada hambatan ini dan pengembangan strategi untuk mengatasinya.

Teori difusi inovasi memberikan kerangka untuk memahami bagaimana praktik baru menyebar melalui sistem sosial. Teori mengidentifikasi karakteristik inovasi (keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, kemampuan dicoba, kemampuan diamati) dan faktor sistem sosial (jaringan komunikasi, pemimpin opini, norma sosial) yang mempengaruhi tingkat adopsi.

Model kesiapan komunitas memeriksa tahap yang dilalui komunitas dalam mengakui masalah dan mengembangkan kapasitas untuk mengatasinya. Memahami kesiapan komunitas penting untuk waktu intervensi secara tepat dan memberikan jenis dukungan yang tepat pada tahap kesiapan yang berbeda.

Dalam konteks Indonesia, penelitian translasional sangat penting untuk mengadaptasi praktik terbaik internasional kepada kondisi lokal. Banyak intervensi berbasis bukti yang dikembangkan dalam konteks Barat memerlukan adaptasi substansial untuk konteks budaya, institusional, dan ekonomi Indonesia. Penelitian translasional Indonesia harus mengatasi tantangan unik seperti keragaman linguistik, kapasitas yang bervariasi melintasi wilayah, dan hubungan antarpemerintah yang kompleks.

3.5 Dialektika Antar-Level Teori

Hubungan Vertikal: dari Abstrak ke Konkret

Hubungan vertikal dalam hierarki teori ilmu sosial mengacu pada koneksi dan aliran antara tingkat abstraksi yang berbeda, dari *grand theory* yang paling

abstrak kepada aplikasi empiris yang paling konkret. Hubungan ini bukan aliran satu arah dari abstrak kepada konkret, tetapi proses dialektis kompleks yang melibatkan pengaruh mutual dan umpan balik resiprokal antara tingkat teoretis yang berbeda.

Pergerakan dari *grnd theory* kepada *meddle range theory* melibatkan proses spesifikasi teoretis di mana konsep dan proposisi abstrak diterjemahkan menjadi formulasi yang lebih spesifik yang dapat dioperasionalisasi untuk penelitian empiris. Proses ini memerlukan interpretasi kreatif yang mempertahankan wawasan esensial dari *grand theory* sambil membuatnya dapat diakses untuk investigasi empiris. Proses spesifikasi seringkali mengungkapkan ambiguitas atau kesenjangan dalam *grand theory* yang memerlukan pengembangan teoretis.

Pergerakan dari *middle range theory* kepada *applied theory* melibatkan proses adaptasi kontekstual di mana wawasan teoretis general dimodifikasi untuk mengatasi masalah praktis spesifik dalam konteks partikular. Proses adaptasi memerlukan perhatian kepada kondisi lokal, kendala sumber daya, faktor budaya, dan pertimbangan politik yang mempengaruhi kelayakan dan efektivitas aplikasi teoretis.

Pergerakan ke atas dari konkret kepada abstrak melibatkan proses generalisasi empiris dan sintesis teoretis di mana temuan dari studi spesifik diintegrasikan kepada pemahaman teoretis yang lebih luas. Penelitian empiris dapat memberikan dukungan, modifikasi, atau penolakan dari proposisi teoretis, mengarah pada penyempurnaan teoretis atau pengembangan wawasan teoretis baru.

Dalam konteks Indonesia, hubungan vertikal sangat kompleks karena kebutuhan untuk mengadaptasi teori yang dikembangkan dalam konteks budaya dan institusional yang berbeda. Sarjana Indonesia harus terlibat dalam pekerjaan teoretis canggih yang dapat menerjemahkan teori internasional kepada kondisi Indonesia sambil berkontribusi kepada pengembangan teori global.

Hubungan Horizontal: Integrasi Lintas-Level

Hubungan horizontal dalam hierarki teori mengacu pada koneksi dan interaksi antara teori pada tingkat abstraksi yang sama. Integrasi horizontal melibatkan sintesis wawasan dari tradisi teoretis yang berbeda untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dari fenomena sosial.

Integrasi horizontal pada level *grand theory* melibatkan dialog antara pendekatan paradigmatik yang berbeda seperti fungsionalisme, teori konflik, interaksionisme simbolik, dan teori pilihan rasional. Upaya integrasi mencoba untuk mengidentifikasi komplementaritas antara pendekatan yang berbeda dan mengembangkan kerangka sintetis yang dapat menginkorporasi wawasan dari beberapa tradisi. Contoh mencakup teori strukturasi Giddens yang mengintegrasikan perspektif agensi dan struktur, dan teori tindakan komunikatif Habermas yang mengintegrasikan teori sistem dengan analisis dunia kehidupan.

Integrasi horizontal pada level *middle range theory* melibatkan penggabungan wawasan dari teori yang fokus pada aspek berbeda dari fenomena sosial. Integrasi dapat melibatkan menunjukkan bagaimana teori berbeda mengatasi aspek berbeda dari fenomena yang sama, mengidentifikasi kondisi cakupan yang menentukan kapan teori berbeda dapat diterapkan, atau mengembangkan model sintetis yang menginkorporasi variabel dari beberapa teori.

Integrasi horizontal pada level *applied theory* melibatkan penggabungan strategi intervensi dari tradisi teoretis yang berbeda untuk mengembangkan pendekatan komprehensif untuk mengatasi masalah sosial kompleks. Intervensi multi-komponen seringkali memanfaatkan wawasan dari beberapa kerangka teoretis untuk mengatasi aspek berbeda dari masalah atau tahap berbeda dari proses perubahan.

Dalam konteks Indonesia, integrasi horizontal sangat penting untuk mengatasi masalah sosial kompleks yang memerlukan pendekatan multifaset. Isu seperti pengurangan kemiskinan, pengelolaan konflik etnis, atau konservasi lingkungan memerlukan integrasi wawasan dari beberapa tradisi teoretis dan perspektif disipliner.

Multi-Level Analysis dalam Penelitian Sosial

Multi-Level Analysis mengakui bahwa fenomena sosial biasanya melibatkan proses yang beroperasi pada beberapa tingkat secara bersamaan, dari psikologi individual kepada sistem global. Analisis efektif memerlukan kerangka teoretis yang dapat menjelaskan interaksi antara tingkat yang berbeda dan metode empiris yang dapat memodelkan efek lintas-tingkat.

Hubungan makro-mikro memeriksa bagaimana struktur dan proses level makro mempengaruhi perilaku individual dan bagaimana tindakan individual teragregasi kepada hasil level makro. Kerangka analitis Coleman

mengidentifikasi tiga jenis hubungan: makro-ke-makro (efek struktural langsung), makro-ke-mikro (efek struktural pada individu), dan mikro-ke-makro (agregasi tindakan individual). Memahami ketiga hubungan diperlukan untuk analisis kausal yang lengkap.

Interaksi lintas-tingkat terjadi ketika efek variabel pada satu tingkat dimoderasi oleh variabel pada tingkat lain. Contohnya adalah situasi di mana efek pendidikan individual pada pendapatan bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi regional atau kebijakan pendidikan nasional. Interaksi lintas-tingkat penting untuk memahami kondisi cakupan dalam hubungan teoretis.

Pemodelan multilevel memberikan teknik statistik untuk menganalisis data yang melibatkan beberapa tingkat analisis, seperti individu yang bersarang dalam organisasi atau komunitas. Metode ini memungkinkan estimasi yang tepat dari efek pada tingkat yang berbeda sambil menjelaskan non-independensi antara observasi pada tingkat yang sama.

Analisis kontekstual memeriksa bagaimana karakteristik unit tingkat lebih tinggi (seperti lingkungan, organisasi, atau negara) mempengaruhi hasil untuk individu atau unit tingkat lebih rendah. Efek kontekstual penting untuk memahami bagaimana lingkungan sosial membentuk peluang dan kendala individual.

Dalam konteks Indonesia, analisis multi-tingkat sangat penting karena sistem federal yang kompleks dengan beberapa tingkat pemerintah dan variasi signifikan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan budaya melintasi wilayah. Memahami fenomena sosial Indonesia memerlukan perhatian kepada bagaimana kebijakan nasional, karakteristik regional, institusi lokal, dan faktor individual berinteraksi untuk menghasilkan hasil yang diamati.

Dinamika Perubahan dan Kompetisi Antar-Teori

Pengembangan teoretis dalam ilmu sosial ditandai oleh proses berkelanjutan dari kompetisi, sintesis, dan inovasi yang melibatkan semua tingkat dalam hierarki teoretis. Dinamika perubahan teoretis mencakup pergeseran paradigma, integrasi teoretis, falsifikasi empiris, dan inovasi kreatif.

Pergeseran paradigma, dalam pengertian Kuhn, melibatkan perubahan fundamental dalam asumsi dasar, metode, dan standar yang memandu pekerjaan ilmiah. Pergeseran paradigma biasanya berasal dalam level *grand theory* tetapi memiliki implikasi untuk semua tingkat pekerjaan teoretis. Contoh dalam ilmu sosial mencakup pergeseran dari fungsionalisme kepada

teori konflik dalam tahun 1960-an, kemunculan pendekatan pilihan rasional dalam tahun 1970-an, dan kebangkitan pendekatan kultural dalam tahun 1980-an.

Kompetisi teoretis terjadi ketika teori berbeda menawarkan penjelasan alternatif untuk fenomena yang sama. Kompetisi dapat diselesaikan melalui pengujian empiris, sintesis teoretis, atau identifikasi kondisi cakupan yang menspesifikasi kapan teori berbeda dapat diterapkan. Kompetisi produktif dapat merangsang pengembangan teoretis dan penelitian empiris.

Falsifikasi empiris memainkan peran penting dalam pengembangan teoretis, terutama pada level jangka menengah di mana teori cukup spesifik untuk menghasilkan prediksi yang dapat diuji. Falsifikasi dapat mengarah pada modifikasi teori, pengabaian, atau pengembangan pendekatan teoretis alternatif.

Sintesis kreatif melibatkan pengembangan pendekatan teoretis baru yang mengintegrasikan wawasan dari teori yang ada dalam cara yang novel. Sintesis seringkali terjadi pada batas antara tradisi teoretis yang berbeda atau tingkat yang berbeda dalam hierarki teoretis. Contoh mencakup analisis jaringan yang mengintegrasikan pendekatan struktural dan relasional, dan perspektif kursus hidup yang mengintegrasikan pendekatan perkembangan dan struktural sosial.

Inovasi dalam *applied theory* seringkali didorong oleh kebutuhan praktis untuk mengatasi masalah baru atau meningkatkan efektivitas intervensi yang ada. Inovasi dapat melibatkan adaptasi teori yang ada kepada konteks baru, integrasi wawasan dari beberapa tradisi, atau pengembangan pendekatan yang benar-benar baru.

Dalam konteks Indonesia, dinamika teoretis sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mengadaptasi teori internasional kepada kondisi lokal dan mengembangkan pendekatan teoretis asli yang dapat mengatasi aspek unik dari masyarakat Indonesia. Pengembangan teoretis Indonesia terjadi melalui dialog antara perspektif internasional dan lokal yang dapat berkontribusi kepada baik pemahaman lokal maupun pengetahuan teoretis global.

Kesimpulan

Eksplorasi terhadap hierarki teori dalam ilmu sosial dalam bab ini telah mengungkapkan kompleksitas dan kekayaan ekosistem teoretis yang mendasari pemahaman kita tentang fenomena sosial. Pemahaman tentang

tiga tingkatan utama—*grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory*—memberikan kerangka yang esensial untuk navigasi *landscape* teoretis yang luas dan seringkali membingungkan dalam ilmu sosial kontemporer.

Grand theory, dengan ambisinya untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang keseluruhan realitas sosial, tetap memainkan peran penting sebagai sumber inspirasi dan visi yang dapat menginformasikan program penelitian dan gerakan sosial. Meskipun kritik valid tentang kurangnya ketepatan operasional dan kemampuan pengujian empiris, *grand theory* memberikan perspektif gambaran besar yang esensial untuk mengkontekstualisasi temuan spesifik dan mengidentifikasi pola yang lebih luas dalam perkembangan sosial. Dalam konteks Indonesia, *grand theory* seperti teori sistem dunia atau teori strukturasi dapat memberikan kerangka yang berharga untuk memahami posisi Indonesia dalam ekonomi global dan dinamika kompleks antara tradisi dan modernitas.

Middle range theory, sebagai kontribusi metodologis yang paling signifikan dari Robert K. Merton, telah terbukti menjadi titik manis dalam pengembangan teoretis yang berhasil menjembatani kesenjangan antara spekulasi abstrak dan penelitian empiris konkret. Teori-teori seperti anomie, modal sosial, dan dramaturgi telah mendemonstrasikan kapasitas untuk menghasilkan program penelitian yang produktif sambil mempertahankan generalitas yang memadai untuk signifikansi teoretis yang lebih luas. Dalam konteks Indonesia, *middle range theory* memberikan alat yang sangat berharga untuk mengatasi tantangan spesifik seperti konflik etnis, korupsi, atau pembangunan pedesaan sambil berkontribusi kepada wacana teoretis internasional.

Applied theory merepresentasikan dimensi yang semakin penting dari ilmu sosial yang secara langsung terlibat dengan masalah praktis dan tantangan kebijakan yang dihadapi masyarakat kontemporer. Penekanan pada kebijakan dan praktik berbasis bukti mencerminkan pengakuan yang berkembang bahwa ilmu sosial harus berkontribusi pada pemecahan masalah dunia nyata, bukan hanya pada pemahaman akademis. Dalam konteks Indonesia, *apllied theory* sangat relevan untuk mengatasi tantangan pembangunan, memperkuat institusi demokratis, mengelola keragaman budaya, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dialektika antar-level teori menunjukkan bahwa konsepsi hierarkis tidak menyiratkan pemisahan yang kaku tetapi interaksi dinamis antara tingkat pekerjaan teoretis yang berbeda. Hubungan vertikal melibatkan proses

berkelanjutan dari spesifikasi, generalisasi, dan umpan balik yang menghubungkan wawasan abstrak dengan aplikasi konkret. Hubungan horizontal melibatkan upaya sintesis dan integrasi yang dapat menggabungkan wawasan dari beberapa tradisi teoretis untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Analisis multi-tingkat telah muncul sebagai pendekatan yang sangat penting untuk memahami fenomena sosial kompleks yang melibatkan proses yang beroperasi pada beberapa tingkat secara bersamaan. Pengakuan bahwa perilaku individual tertanam dalam konteks organisasi, komunitas, regional, dan global memerlukan kerangka teoretis yang dapat menjelaskan interaksi lintas-tingkat dan efek kontekstual. Dalam sistem federal Indonesia yang kompleks dengan variasi regional yang signifikan, analisis multi-tingkat esensial untuk memahami bagaimana kebijakan nasional, karakteristik regional, institusi lokal, dan faktor individual berinteraksi untuk menghasilkan hasil yang diamati.

Pengembangan teoretis dalam ilmu sosial ditandai oleh dinamika berkelanjutan dari kompetisi, sintesis, dan inovasi yang melibatkan semua tingkat dalam hierarki teoretis. Daripada kemajuan linear dari teori sederhana kepada teori kompleks, pengembangan melibatkan proses dialektis yang dapat menghasilkan wawasan baru pada tingkat manapun melalui kombinasi kreatif dari ide yang ada atau respons kepada temuan empiris baru. Ilmu sosial Indonesia memiliki kesempatan untuk berkontribusi kepada dinamika ini melalui pengembangan pendekatan teoretis asli yang mengatasi aspek unik dari masyarakat Indonesia sambil terlibat dengan wacana teoretis internasional.

Untuk mahasiswa S1 dan S2, pemahaman hierarki teoretis memberikan fondasi esensial untuk menjadi konsumen yang canggih dan akhirnya produsen teori sosial. Kemampuan untuk mengakui tingkat teori yang tepat untuk pertanyaan penelitian yang berbeda, menghargai kekuatan dan keterbatasan pendekatan teoretis yang berbeda, dan mengintegrasikan wawasan dari beberapa tingkat merepresentasikan kompetensi teoretis lanjutan yang berharga untuk karir akademik maupun terapan.

Melihat ke depan, beberapa *trend* kemungkinan akan membentuk pengembangan masa depan dari hierarki teoretis dalam ilmu sosial. Integrasi interdisipliner akan memerlukan bentuk-bentuk baru dari sintesis teoretis yang dapat menjembatani wawasan dari tradisi disipliner yang berbeda. Globalisasi akan menuntut pendekatan teoretis yang dapat mengatasi fenomena transnasional sambil tetap sensitif kepada konteks lokal.

Perkembangan teknologi akan menciptakan bentuk-bentuk baru dari fenomena sosial yang memerlukan pendekatan teoretis inovatif. Tantangan lingkungan akan memerlukan integrasi perspektif ilmu sosial dan alam dalam kerangka teoretis yang komprehensif.

Dalam konteks Indonesia secara spesifik, pengembangan teoretis perlu mengatasi peluang dan tantangan unik yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam abad ke-21. Pembangunan ekonomi yang cepat, transisi demografis, urbanisasi, digitalisasi, dan tekanan lingkungan akan memerlukan inovasi teoretis yang dapat memandu respons yang efektif. Posisi Indonesia sebagai demokrasi Muslim terbesar, negara kepulauan yang paling beragam, dan kekuatan menengah yang muncul memberikan titik pandang unik untuk berkontribusi kepada pengembangan teori global sambil mengatasi tantangan domestik.

Nilai utama dari pemahaman hierarki teoretis tidak terletak pada aplikasi mekanis dari teori yang ada tetapi pada pengembangan kompetensi teoretis yang dapat mengadaptasi, memodifikasi, dan menginovasi pendekatan teoretis sebagaimana diperlukan untuk mengatasi pertanyaan penelitian spesifik dan masalah praktis. Hierarki teori memberikan peta jalan untuk menavigasi landscape teoretis yang kompleks, tetapi penggunaan yang efektif memerlukan kreativitas, pemikiran kritis, dan sensitivitas terhadap konteks yang hanya dapat dikembangkan melalui praktik dan pengalaman.

Hierarki teori dalam ilmu sosial, oleh karena itu, harus dipahami bukan sebagai sistem klasifikasi yang kaku tetapi sebagai kerangka fleksibel yang dapat memandu pekerjaan teoretis sambil mengakomodasi inovasi dan adaptasi. Penguasaan kerangka ini merepresentasikan langkah penting dalam pengembangan ilmuwan sosial yang dapat berkontribusi kepada baik pemahaman maupun perbaikan kehidupan sosial manusia. Untuk Indonesia, integrasi pemahaman teoretis ini dengan realitas lokal yang kaya akan menghasilkan ilmu sosial yang tidak hanya secara akademis ketat tetapi juga secara sosial relevan dan transformatif.

Referensi Bab 3

Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. Free Press.

Bhaskar, R. (1979). *The possibility of naturalism: A philosophical critique of the contemporary human sciences*. Harvester Press.

Burrell, G., & Morgan, G. (1979). *Sociological paradigms and organisational analysis*. Heinemann Educational Books.

Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95-S120.

Coleman, J. S. (1990). *Foundations of social theory*. Available: https://archive.org/details/foundationsofsoc0000cole

Collins, R. (2004). *Interaction ritual chains*. Available: https://archive.org/details/interactionritua0000coll

Durkheim, E. (1895). *The rules of sociological method*. Available: https://archive.org/details/rulesofsociologi00durk

Flick, U. (2014). *An introduction to qualitative research* (5th ed.). Sage Publications.

Fukuyama, F. (1995). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. Free Press.

Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. Available: https://archive.org/details/constitutionofso0000gidd

Goffman, E. (1959). *The presentation of self in everyday life*. Available: https://monoskop.org/images/1/19/Goffman_Erving_The_Presentation_of_Self_in_Everyday_Life.pdf

Kartono, K. (2014). *Patologi sosial 2: Kenakalan remaja*. Rajawali Pers.

Marx, K. (1887). *Capital: Volume one*. Available: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/

Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure*. Available: https://archive.org/details/socialtheorysoci00mert

Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson.

Oetomo, D. (2001). *Memberi suara pada yang bisu*. Galang Press.

Parsons, T. (1951). *The social system*. Available: https://idr.uin-antasari.ac.id/471/1/talcotPARSON.pdf

Ritzer, G. (2019). *Sociological theory* (10th ed.). McGraw-Hill Education.

Silverman, D. (2013). *Doing qualitative research* (4th ed.). Sage Publications.

Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). *Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research* (2nd ed.). Sage Publications.

Turner, J. H. (2013). *Contemporary sociological theory*. Sage Publications.

Undang, G. & Thamrin, H. (2016). *Konflik dan Integrasi Islam Politik*. *Al-Fikra*, *15*(2), 177–231.

Wallerstein, I. (2004). *World-systems analysis: An introduction*. Duke University Press.

Woolcock, M. (1998). Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework. *Theory and Society*, 27(2), 151-208.

Jurnal Indonesia:

Jurnal Analisa Sosiologi - Universitas Sebelas Maret. (2020). Anomie dan transformasi sosial dalam masyarakat urban Indonesia. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(2), 245-262.

Masyarakat: Jurnal Sosiologi - Universitas Indonesia. (2019). Labeling dan stigma sosial dalam masyarakat multikultural Indonesia. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 24(1), 89-107.

Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan - Universitas Muhammadiyah Makassar. (2020). Evaluasi implementasi good governance di Indonesia pasca reformasi. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 134-149.

Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan - Institut Pertanian Bogor. (2021). Modal sosial tradisional dan pembangunan berkelanjutan di pedesaan Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(1), 78-95.

Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora - Universitas Padjadjaran. (2021). Integrasi kearifan lokal dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Sosiohumaniora*, 23(3), 156-171.

BAGIAN II

TEORI SOSIAL KLASIK

BAB 4

KARL MARX DAN MATERIALISME HISTORIS

Pendahuluan

Karl Marx (1818-1883) merupakan salah satu pemikir paling berpengaruh dan kontroversial dalam sejarah ilmu sosial modern. Pengaruhnya melampaui batas-batas akademis dan telah membentuk gerakan politik, revolusi sosial, dan sistem pemerintahan di berbagai belahan dunia selama lebih dari satu setengah abad. Baik mereka yang mendukung maupun mengkritiknya, hampir semua teoretikus sosial kontemporer harus berhadapan dengan warisan intelektual Marx yang monumental. Pemikirannya tentang materialisme historis, alienasi, kelas sosial, dan kritik terhadap kapitalisme telah memberikan kerangka analitis yang fundamental untuk memahami dinamika masyarakat modern.

Signifikansi Marx dalam teori sosial terletak bukan hanya pada keluasan dan kedalaman analisisnya tentang kapitalisme sebagai sistem ekonomi, tetapi juga pada kemampuannya untuk mengintegrasikan analisis ekonomi dengan teori sosial, filsafat sejarah, dan kritik ideologi dalam satu kerangka teoretis yang koheren. Marx tidak puas dengan sekadar mendeskripsikan atau menginterpretasikan dunia sosial; ambisinya adalah untuk memahami dinamika fundamental yang menggerakkan perubahan sosial dan untuk berkontribusi pada transformasi masyarakat menuju sistem yang lebih adil dan manusiawi. Integrasi antara teori dan praktik, antara pemahaman dan aksi, ini menjadi karakteristik distintif dari tradisi Marxian yang membedakannya dari banyak pendekatan teoretis lainnya dalam ilmu sosial.

Dalam konteks Indonesia, relevansi pemikiran Marx memiliki dimensi yang kompleks dan seringkali kontroversial. Sejarah Indonesia modern tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan peran gerakan komunis yang diinspirasi oleh pemikiran Marx, dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang merupakan salah satu partai komunis terbesar di dunia pada awal 1960-an hingga tragedi

1965-1966 yang mengakibatkan penghancuran gerakan kiri dan pembunuhan massal yang mengerikan. Trauma historis ini telah menciptakan stigma yang persisten terhadap Marxisme dalam wacana publik Indonesia, meskipun pemikiran Marx sebagai kerangka analitis tetap relevan untuk memahami berbagai fenomena sosial kontemporer seperti ketimpangan ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, dan dinamika kelas dalam masyarakat kapitalis Indonesia.

Era Reformasi dan demokratisasi pasca-1998 telah membuka ruang yang lebih besar untuk diskusi akademis tentang Marx tanpa harus mendukung aspek-aspek politis atau ideologis dari Marxisme-Leninisme sebagai doktrin politik. Sarjana Indonesia kontemporer seperti Vedi Hadiz dan Richard Robison telah menggunakan kerangka Marxian untuk menganalisis persistensi struktur oligarkis dan kapitalisme predatori dalam Indonesia demokratis, menunjukkan bahwa alat analitis Marx tetap kuat untuk memahami ekonomi politik Indonesia kontemporer meskipun konteks politiknya telah berubah secara dramatis (Hadiz & Robison, 2013).

Bab ini akan mengeksplorasi dimensi-dimensi kunci dari pemikiran Marx melalui enam bagian yang saling terkait. Pertama, kita akan menelusuri biografi intelektual Marx untuk memahami bagaimana pengalaman hidupnya dan konteks historis membentuk perkembangan pemikirannya. Kedua, kita akan menganalisis teori alienasi Marx yang memberikan kritik filosofis dan psikologis terhadap dampak kapitalisme pada kondisi manusia. Ketiga, kita akan mengeksplorasi materialisme historis dan dialektis sebagai kerangka teoretis fundamental untuk memahami sejarah dan perubahan sosial. Keempat, kita akan mendalami analisis Marx tentang kelas sosial dan perjuangan kelas sebagai motor penggerak sejarah. Kelima, kita akan mengkaji kritik ekonomi politik Marx terhadap kapitalisme, terutama teori nilai lebih dan kontradiksi internal sistem kapitalis. Akhirnya, kita akan mengevaluasi warisan dan pengaruh Marx dalam perkembangan teori sosial kontemporer serta relevansinya untuk memahami masyarakat Indonesia modern.

Pemahaman yang mendalam tentang pemikiran Marx ini penting tidak hanya untuk penguasaan sejarah teori sosial klasik, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan analitis kritis terhadap struktur ekonomi dan politik kontemporer. Bahkan mereka yang tidak setuju dengan kesimpulan politik Marx atau skeptis terhadap visi revolusionernya harus mengakui bahwa analisisnya tentang dinamika kapitalisme, ketimpangan kelas, dan mekanisme eksploitasi ekonomi telah memberikan kontribusi yang tak terhapuskan pada pemahaman kita tentang masyarakat modern. Dalam era

globalisasi neoliberal dan ketimpangan yang semakin melebar, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Marx tentang keadilan ekonomi, eksploitasi, dan kemungkinan transformasi sosial tetap relevan dan mendesak untuk dijawab, sebagaimana ditunjukkan oleh kebangkitan kembali minat terhadap pemikiran Marx pasca-krisis finansial 2008 (Harvey, 2010; Eagleton, 2011).

4.1 Biografi Intelektual Marx

Pemahaman terhadap biografi intelektual Karl Marx (1818-1883) merupakan kunci untuk memahami bagaimana sistem pemikirannya berkembang sebagai respons terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ia saksikan di Eropa abad ke-19. Marx bukan hanya teoretikus yang mengembangkan ide-ide dalam ruang hampa akademis, tetapi juga aktivis politik yang terlibat langsung dalam gerakan-gerakan sosial dan revolusioner pada masanya. Perjalanan intelektualnya menunjukkan sintesis kreatif antara filsafat Jerman, ekonomi politik Inggris, dan sosialisme Prancis---tiga tradisi intelektual yang ia transformasikan menjadi kerangka teoretis yang radikal dan komprehensif.

Latar Belakang dan Pendidikan

Karl Heinrich Marx lahir pada 5 Mei 1818 di Trier, sebuah kota di wilayah Rhineland yang saat itu berada di bawah kekuasaan Prussia. Marx berasal dari keluarga kelas menengah yang relatif sejahtera; ayahnya, Heinrich Marx, adalah pengacara terpandang yang telah mengkonversi dari Yahudi menjadi Protestan Lutherian untuk dapat melanjutkan praktik hukumnya di bawah rezim Prussia yang menerapkan diskriminasi terhadap kaum Yahudi. Latar belakang keluarga ini memberikan Marx akses kepada pendidikan berkualitas tinggi dan paparan terhadap tradisi intelektual Pencerahan yang dianut oleh ayahnya.

Pada tahun 1835, Marx memulai studinya di Universitas Bonn dengan fokus pada hukum, sesuai keinginan ayahnya. Namun, tahun pertamanya di Bonn lebih banyak dihabiskan untuk aktivitas sosial dan romantis daripada studi akademis yang serius. Setahun kemudian, ia pindah ke Universitas Berlin yang lebih prestisius, di mana ia mengalami transformasi intelektual yang mendalam. Di Berlin, Marx terpapar pada atmosfer intelektual yang didominasi oleh filsafat Hegel, yang pada saat itu masih sangat berpengaruh meskipun Hegel sendiri telah meninggal pada tahun 1831.

Di Universitas Berlin, Marx mengalihkan fokus studinya dari hukum ke filsafat, terutama tertarik pada dialektika Hegel dan pertanyaan-pertanyaan filosofis fundamental tentang hakikat realitas dan sejarah. Ia bergabung dengan kelompok Hegelian Muda---sekelompok intelektual muda yang berupaya mengembangkan implikasi radikal dari filsafat Hegel, terutama dalam hal kritik terhadap agama dan institusi politik yang ada. Kelompok ini termasuk tokoh-tokoh seperti Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach, dan Max Stirner, yang masing-masing mengembangkan interpretasi kritis terhadap warisan Hegelian (Marx & Engels, 1845).

Pada tahun 1841, Marx menyelesaikan disertasi doktoralnya yang berjudul *"Perbedaan antara Filsafat Alam Democritean dan Epicurean"*, yang diajukan ke Universitas Jena karena atmosfer politik yang lebih represif di Berlin. Disertasi ini menunjukkan ketertarikan awal Marx pada materialisme filosofis dan kritiknya terhadap idealisme spekulatif. Meskipun masih beroperasi dalam kerangka filosofis, disertasi ini mengandung benih-benih dari materialisme yang kemudian akan ia kembangkan secara lebih sistematis.

Pengaruh Hegel dan Hegelian Muda

Pengaruh Georg Wilhelm Friedrich Hegel terhadap perkembangan intelektual Marx tidak dapat dilebih-lebihkan, meskipun Marx kemudian mengembangkan kritik fundamental terhadap idealisme Hegelian. Dari Hegel, Marx mengadopsi metode dialektis yang melihat perkembangan sejarah sebagai proses yang didorong oleh kontradiksi internal dan resolusinya pada tingkat yang lebih tinggi. Konsep Hegelian tentang negasi dan pengangkatan---di mana tahap perkembangan yang baru mengandung dan melampaui tahap sebelumnya---menjadi model untuk pemahaman Marx tentang perubahan sosial dan revolusi (Hegel, 1807).

Namun, kritik Marx terhadap Hegel sama fundamentalnya dengan pengadopsiannya terhadap metode dialektis. Marx mengargumentasikan bahwa Hegel melakukan "mistifikasi" dengan menjadikan ide atau Roh sebagai subjek sejarah, sementara realitas material dan praksis manusia direduksi menjadi manifestasi dari perkembangan spiritual. Dalam kata-kata terkenal Marx, ia berupaya untuk "membalikkan" dialektika Hegel dengan menempatkan basis material, bukan ideal, sebagai fondasi dari perkembangan sejarah. "Bagi Hegel, proses pemikiran adalah pencipta dari yang nyata. Bagi saya sebaliknya, yang ideal tidak lain adalah yang material yang ditransposisikan dan diterjemahkan dalam kepala manusia" (Marx, 1873).

Hegelian Muda memberikan pengaruh penting dalam mengembangkan kritik Marx terhadap agama dan ideologi. Ludwig Feuerbach khususnya memberikan kontribusi krusial melalui kritik antropologisnya terhadap agama dalam *The Essence of Christianity* (1841), di mana ia mengargumentasikan bahwa konsep-konsep religius tentang Tuhan sebenarnya adalah proyeksi dari esensi manusia yang teralienasi. Marx mengadopsi metode kritik Feuerbachian ini tetapi kemudian mengkritik Feuerbach karena tetap beroperasi pada level abstraksi filosofis dan tidak menganalisis kondisi material dan sosial yang menghasilkan alienasi religius.

Dalam *Theses on Feuerbach* (1845), Marx merumuskan kritiknya yang terkenal: "Para filsuf hanya menafsirkan dunia dengan berbagai cara; yang penting adalah mengubahnya." Tesis ini menandai pergeseran fundamental dari filsafat kontemplatif menuju praksis revolusioner, dari interpretasi menuju transformasi. Marx tidak puas dengan sekadar memahami bagaimana alienasi religius terjadi; ia ingin memahami kondisi material yang menghasilkan alienasi dan bagaimana kondisi tersebut dapat ditransformasi (Marx, 1845). Harvey (2010) menekankan bahwa momen ini menandai kelahiran Marx sebagai teoretikus sosial yang materialistis dan revolusioner.

Kolaborasi dengan Engels

Pertemuan Marx dengan Friedrich Engels pada tahun 1844 di Paris menandai awal dari kolaborasi intelektual yang akan berlangsung seumur hidup dan menghasilkan beberapa karya paling berpengaruh dalam teori sosial. Engels, yang berasal dari keluarga industrialis kaya di Jerman tetapi telah mengembangkan kesadaran kritis tentang kondisi kelas pekerja melalui pengalamannya mengelola pabrik keluarganya di Manchester, memberikan perspektif empiris yang melengkapi kecanggihan teoretis Marx (Engels, 1845).

Kolaborasi mereka pertama kali menghasilkan *The Holy Family* (1845), sebuah polemik terhadap Bruno Bauer dan Hegelian Muda lainnya yang Marx dan Engels anggap terlalu terjebak dalam kritik filosofis abstrak tanpa memahami kondisi material yang konkret. Karya yang lebih substantif adalah *The German Ideology* (1845-1846), yang tidak dipublikasikan selama hidup mereka tetapi merupakan elaborasi sistematis pertama dari materialisme historis. Dalam karya ini, Marx dan Engels mengembangkan konsep tentang cara produksi, basis material dan superstruktur ideologis, serta teori tentang ideologi sebagai kesadaran palsu yang merefleksikan dan melegitimasi relasi produksi yang ada (Marx & Engels, 1845).

Kolaborasi paling terkenal mereka adalah *The Communist Manifesto* (1848), yang ditulis menjelang revolusi-revolusi 1848 di Eropa dan diterbitkan atas nama Liga Komunis. *Manifesto* ini bukan karya teoretis yang sistematis tetapi lebih merupakan dokumen politik yang memberikan analisis ringkas tentang sejarah sebagai perjuangan kelas, kritik terhadap kapitalisme, dan seruan untuk aksi revolusioner proletariat. Meskipun singkat, *Manifesto* mengandung formulasi yang sangat kuat tentang dinamika kapitalisme dan visi tentang masyarakat tanpa kelas yang akan mempengaruhi gerakan-gerakan sosialis dan komunis selama lebih dari satu abad (Marx & Engels, 1848).

Engels tidak hanya berperan sebagai kolaborator intelektual tetapi juga sebagai penyandang dana yang memungkinkan Marx untuk terus melakukan riset dan penulisan meskipun kondisi ekonomi yang sangat sulit. Dukungan finansial Engels yang berasal dari penghasilan bisnisnya memungkinkan Marx untuk menghindari pekerjaan reguler dan mendedikasikan waktunya untuk riset di British Museum dan penulisan *Capital*. Tanpa dukungan material ini, sangat diragukan apakah Marx dapat menyelesaikan karya-karya monumentalnya.

Pengalaman Politik dan Pengasingan

Keterlibatan Marx dalam aktivisme politik dimulai pada awal 1840-an ketika ia menjadi editor *Rheinische Zeitung*, sebuah surat kabar liberal di Cologne yang mengkritik pemerintah Prussia. Namun, karena kritiknya yang tajam terhadap sensor dan kebijakan pemerintah, surat kabar ini dilarang pada tahun 1843, memaksa Marx untuk pindah ke Paris. Di Paris, Marx terlibat dalam lingkaran intelektual sosialis dan radikal, termasuk Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin, dan komunitas emigran Jerman yang radikal.

Revolusi-revolusi 1848 yang menyapu Eropa memberikan kesempatan kepada Marx untuk kembali ke Jerman dan terlibat langsung dalam politik revolusioner. Ia kembali menjadi editor *Neue Rheinische Zeitung* dan terlibat aktif dalam gerakan demokratik dan revolusioner di Rhineland. Namun, setelah kegagalan revolusi dan represi yang mengikutinya, Marx harus meninggalkan Jerman secara permanen pada tahun 1849. Pengalaman revolusi 1848 yang gagal memberikan pelajaran penting kepada Marx tentang kompleksitas proses revolusioner dan pentingnya kondisi objektif yang matang untuk transformasi sosial yang sukses.

Marx menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan di London, di mana ia mengalami kesulitan finansial yang parah tetapi juga periode produktivitas intelektual yang luar biasa. Di ruang baca British Museum, Marx menghabiskan bertahun-tahun mempelajari ekonomi politik, sejarah ekonomi, dan statistik industri untuk mengembangkan kritik sistematis terhadap ekonomi politik kapitalis. Periode ini menghasilkan *Grundrisse* (1857-1858), draft awal yang monumental untuk *Capital*, dan akhirnya *Capital Volume I* (1867)---karya magnum opus Marx yang memberikan analisis paling komprehensif dan sistematis tentang cara produksi kapitalis. Edisi terjemahan Indonesia yang lengkap dari *Capital* kemudian dipublikasikan dengan judul *Kapital: Sebuah Kritik Ekonomi Politik*, memberikan akses kepada pembaca Indonesia terhadap karya fundamental ini (Marx, 2004).

Pengalaman pengasingan dan kemiskinan yang dialami Marx - keluarganya seringkali tidak memiliki uang untuk makanan atau sewa, dan tiga dari enam anaknya meninggal pada masa kanak-kanak - memberikan dimensi personal yang mendalam pada kritiknya terhadap kapitalisme. Marx tidak hanya menganalisis kapitalisme sebagai sistem ekonomi abstrak tetapi juga sebagai sistem yang menghasilkan penderitaan nyata bagi jutaan orang. Pengalaman pribadinya dengan kemiskinan dan prekaritas ekonomi memberikan urgensi dan semangat pada kritiknya yang melampaui analisis akademis yang terpisah dari realitas. Harvey (2010) mencatat bahwa pengalaman biografis ini membentuk karakter humanistik dari kritik Marx yang seringkali terlupakan dalam interpretasi ekonomistik yang sempit.

Dalam konteks Indonesia, perjalanan intelektual Marx memiliki resonansi khusus dengan pengalaman intelektual-intelektual Indonesia yang mengembangkan pemikiran kritis dalam konteks kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan. Tokoh-tokoh seperti Tan Malaka dan D.N. Aidit mengadaptasi analisis Marxian untuk memahami struktur kolonial dan semi-feodal Indonesia, meskipun dengan interpretasi dan aplikasi yang berbeda. Pemahaman tentang bagaimana Marx mengintegrasikan teori dengan praktik, filosofi dengan politik, dan analisis dengan aktivisme memberikan model untuk keterlibatan intelektual yang relevan dalam konteks Indonesia kontemporer (Hadiz & Robison, 2005).

4.2 Teori Alienasi

Teori alienasi Marx merupakan salah satu kontribusi paling mendalam dan humanistis dalam pemikirannya, memberikan kritik filosofis dan psikologis

terhadap dampak kapitalisme pada kondisi manusia. Meskipun konsep alienasi telah ada dalam tradisi filosofis sebelumnya, terutama dalam karya Hegel dan Feuerbach, Marx memberikan analisis yang lebih konkret dan materialistis tentang bagaimana alienasi diproduksi melalui struktur ekonomi dan relasi produksi kapitalis. Teori alienasi Marx tidak hanya mengidentifikasi manifestasi psikologis dari alienasi tetapi juga mengungkap akar strukturalnya dalam cara produksi kapitalis.

Konsep Alienasi dalam Manuskrip Ekonomi-Filosofis

Formulasi paling sistematis dari teori alienasi Marx ditemukan dalam *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*, yang tidak dipublikasikan selama hidupnya tetapi kemudian menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam tradisi Marxist humanistik. Dalam manuskrip ini, Marx menganalisis bagaimana kerja di bawah kapitalisme---yang seharusnya menjadi ekspresi esensial dari kreativitas manusia dan realisasi diri---menjadi sesuatu yang eksternal dan bermusuhan terhadap pekerja (Marx, 1844).

> "Teori alienasi Marx, berakar pada manuskrip 1844, menyoroti pemisahan pekerja dari produk, proses, dan esensi kemanusiaannya dalam kapitalisme, menegaskan alienasi sebagai kondisi struktural ekonomi, bukan sekadar psikologis, akibat relasi produksi kapitalis."

Marx memulai analisisnya dengan observasi bahwa dalam masyarakat kapitalis, pekerja menjadi semakin miskin semakin banyak kekayaan yang ia produksi, dan semakin tidak berdaya semakin banyak komoditas yang ia hasilkan. Paradoks ini menunjukkan bahwa hubungan antara pekerja dan produk kerjanya bersifat antagonistik: "Pekerja menjadi semakin miskin semakin banyak kekayaan yang ia produksi, semakin kuat dan luas produksinya. Pekerja menjadi komoditas yang semakin murah semakin banyak komoditas yang ia ciptakan" (Marx, 1844).

Alienasi dalam konsepsi Marx bukan hanya kondisi subjektif atau keadaan psikologis tetapi merupakan kondisi objektif yang berakar dalam struktur ekonomi kapitalis. Kapitalisme menciptakan pemisahan fundamental antara

pekerja dan alat-alat produksi, antara pekerja dan produk kerjanya, dan pada akhirnya antara pekerja dan hakikat kemanusiaannya yang esensial. Alienasi adalah hasil yang niscaya dari cara bagaimana produksi diorganisir dalam masyarakat kapitalis, di mana tenaga kerja menjadi komoditas yang dijual di pasar dan proses produksi dikontrol oleh kapitalis untuk tujuan akumulasi keuntungan. Harvey (2010) menekankan bahwa pemahaman tentang alienasi sebagai kondisi struktural, bukan hanya psikologis, adalah kunci untuk memahami kritik Marx yang materialistis terhadap kapitalisme.

Empat Dimensi Alienasi

Marx mengidentifikasi empat dimensi fundamental dari alienasi yang dialami oleh pekerja dalam kapitalisme. Pertama, alienasi dari produk kerja. Dalam kapitalisme, produk yang dihasilkan oleh pekerja tidak menjadi miliknya tetapi menjadi milik kapitalis yang memiliki alat-alat produksi. Produk kerja menghadapi pekerja sebagai sesuatu yang asing, sebagai kekuatan yang independen dan bermusuhan. Semakin banyak pekerja memproduksi, semakin kuat menjadi dunia objektif komoditas yang menghadapi dia, dan semakin miskin ia menjadi dalam dunia batinnya.

Kedua, alienasi dari proses produksi. Tidak hanya produk yang asing dari pekerja, tetapi proses produksi itu sendiri dialami sebagai sesuatu yang eksternal dan dipaksakan. Dalam kapitalisme, pekerja tidak mengontrol bagaimana ia bekerja, apa yang ia produksi, atau di bawah kondisi apa ia bekerja. Kerja menjadi kerja paksa, sesuatu yang dilakukan bukan untuk kepuasan atau realisasi diri tetapi semata-mata untuk kelangsungan hidup ekonomi. "Pekerja hanya merasa dirinya di luar pekerjaannya, dan dalam pekerjaannya merasa di luar dirinya. Ia merasa di rumah ketika ia tidak bekerja, dan ketika ia bekerja ia tidak merasa di rumah" (Marx, 1844).

> "Marx mengidentifikasi empat dimensi alienasi: keterpisahan pekerja dari produk, proses produksi, hakikat spesies, dan sesama manusia. Dalam kapitalisme, kerja menjadi eksternal, dipaksakan, dan kompetitif, mereduksi kreativitas manusia menjadi sekadar alat bertahan hidup ekonomi."

Ketiga, alienasi dari hakikat spesies. Marx mengargumentasikan bahwa yang membedakan manusia dari hewan adalah kapasitas untuk kerja yang sadar,

bertujuan, dan kreatif. Manusia tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan langsung tetapi juga untuk mengekspresikan dan mengembangkan kapasitas kreatifnya. Dalam kapitalisme, kapasitas kemanusiaan yang distingtif ini direduksi menjadi alat untuk kelangsungan hidup semata. Kerja yang seharusnya menjadi aktivitas kehidupan yang bermakna menjadi sekadar alat untuk memelihara eksistensi fisik.

Keempat, alienasi dari sesama manusia. Kapitalisme menciptakan relasi antagonistik dan kompetitif antara manusia. Pekerja berkompetisi dengan sesama pekerja untuk pekerjaan, kapitalis berkompetisi dengan sesama kapitalis untuk pasar dan keuntungan, dan antagonisme fundamental ada antara kelas kapitalis dan kelas pekerja. Solidaritas dan kerjasama manusia digantikan oleh kompetisi dan konflik. "Apa yang berlaku bagi hubungan manusia dengan pekerjaannya, dengan produk kerjanya dan dengan dirinya sendiri, juga berlaku bagi hubungannya dengan manusia lain, dan dengan kerja serta objek kerja manusia lain" (Marx, 1844).

Alienasi dan Fetisisme Komoditas

Dalam *Capital*, Marx mengembangkan analisis alienasi lebih lanjut melalui konsep fetisisme komoditas. Fetisisme komoditas mengacu pada cara di mana relasi sosial antara manusia - yang dimediasi melalui produksi dan pertukaran komoditas - tampak sebagai relasi antara benda-benda, sebagai properti dari komoditas itu sendiri daripada relasi sosial yang mereka representasikan (Marx, 1867).

Marx menggunakan analogi dengan fetisisme religius untuk menjelaskan fenomena ini. Dalam agama, produk imajinasi manusia tampak sebagai makhluk independen dengan kehidupan mereka sendiri yang mengontrol manusia. Serupa dengan itu, dalam ekonomi kapitalis, produk kerja manusia---komoditas---tampak sebagai entitas independen dengan nilai yang inheren daripada sebagai produk dari kerja sosial. "Karakter misterius dari bentuk komoditas terdiri dalam fakta bahwa komoditas merefleksikan karakteristik sosial dari kerja manusia sebagai karakteristik objektif dari produk kerja itu sendiri, sebagai properti sosial-natural dari benda-benda ini" (Marx, 1867).

Fetisisme komoditas mengaburkan relasi sosial fundamental yang mendasari ekonomi kapitalis. Ia membuat seolah-olah nilai dan harga adalah properti natural dari benda-benda daripada ekspresi dari kerja sosial yang terkandung dalam produksi mereka. Ini menciptakan bentuk mistifikasi ideologis yang membuat sulit untuk mengenali karakter eksploitatif dari relasi kapitalis.

Pekerja melihat diri mereka sebagai individu bebas yang secara sukarela menukar tenaga kerja mereka untuk upah, daripada mengenali bahwa mereka dipaksa untuk menjual tenaga kerja mereka karena kurangnya akses kepada alat-alat produksi. Eagleton (2011) menunjukkan bahwa konsep fetisisme komoditas tetap relevan untuk memahami bagaimana kapitalisme kontemporer mengaburkan relasi eksploitasi di balik kebebasan konsumen yang semu.

Aplikasi Teori Alienasi di Indonesia

Teori alienasi Marx memiliki relevansi yang mendalam untuk memahami kondisi tenaga kerja dalam kapitalisme Indonesia kontemporer, terutama dalam konteks industrialisasi rapid dan integrasi ke dalam rantai nilai global. Studi tentang kondisi pekerja di pabrik-pabrik garmen dan elektronik di Indonesia menunjukkan manifestasi konkret dari alienasi yang dianalisis Marx. Pekerja, yang didominasi perempuan muda dari daerah rural, bekerja dalam kondisi yang sangat dikontrol dan repetitif, memproduksi komoditas untuk pasar global yang mereka sendiri tidak mampu beli, dan mengalami pemisahan fundamental dari produk kerja mereka (Caraway, 2007).

Fenomena pekerja prekariat dalam ekonomi platform digital menunjukkan bentuk-bentuk baru alienasi dalam konteks Indonesia kontemporer. Driver transportasi online seperti Gojek mengalami alienasi yang intens melalui kontrol algoritma yang mendeterminasi alokasi pekerjaan, sistem rating yang mengawasi setiap interaksi, dan ketidakpastian pendapatan yang kronis. Meskipun secara formal "mitra" yang independen, mereka dalam praktiknya mengalami subordinasi yang ketat dan ekstraksi nilai dari kerja mereka oleh platform perusahaan (Jurnal Komunikasi Indonesia, 2019). Bentuk baru alienasi ini menunjukkan bagaimana mekanisme yang dianalisis Marx beradaptasi dalam ekonomi digital, di mana kontrol tidak lagi melalui pengawasan langsung tetapi melalui sistem teknologi yang impersonal.

Dalam konteks pekerja dengan kondisi sosial ekonomi yang rentan, seperti buruh pengrajin batu bata, alienasi mengambil bentuk yang lebih ekstrem. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja ini mengalami tidak hanya alienasi dari produk kerja mereka tetapi juga kondisi kerja yang sangat prekarius, upah subsisten, dan kurangnya perlindungan sosial. Terbatasnya pilihan ekonomi memaksa mereka untuk menerima kondisi kerja yang mengeksploitatif, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus (Aroem, 2021). Teori alienasi Marx dapat diadaptasi untuk memahami bagaimana

informalitas dan prekaritas menciptakan bentuk-bentuk penderitaan sosial yang berakar dalam struktur ekonomi kapitalis.

4.3 Materialisme Historis dan Dialektis

Materialisme historis merupakan kerangka teoretis fundamental dalam pemikiran Marx yang memberikan teori komprehensif tentang sejarah manusia dan perubahan sosial. Berbeda dari interpretasi idealis terhadap sejarah yang melihat perkembangan ide atau kekuatan spiritual sebagai faktor pendorong, materialisme historis mengargumentasikan bahwa kondisi material dari eksistensi - terutama cara produksi dan relasi kelas - menentukan karakter fundamental dari kehidupan sosial, politik, dan intelektual. Materialisme historis bukan hanya teori tentang masa lalu tetapi juga kerangka analitis untuk memahami masa kini dan mengantisipasi trajektori masa depan dari perkembangan sosial.

Basis Material dan Superstruktur

Sentral kepada materialisme historis adalah pembedaan antara basis ekonomi dan superstruktur. Basis terdiri dari kekuatan-kekuatan produksi (teknologi, alat-alat, keterampilan, pengetahuan) dan relasi produksi (hubungan sosial yang mengorganisir proses produksi). Superstruktur meliputi institusi politik, sistem hukum, ideologi, budaya, agama, dan bentuk-bentuk kesadaran. Marx mengargumentasikan bahwa basis menentukan atau mengkondisikan superstruktur: "Cara produksi kehidupan material mengkondisikan proses kehidupan sosial, politik, dan intelektual secara umum. Bukan kesadaran manusia yang menentukan keberadaan mereka, tetapi keberadaan sosial mereka yang menentukan kesadaran mereka" (Marx, 1859).

Hubungan antara basis dan superstruktur bukan kausalitas mekanis yang sederhana tetapi hubungan dialektis yang kompleks. Superstruktur bukan sekadar refleksi pasif dari basis tetapi memiliki otonomi relatif dan dapat mempengaruhi basis pada gilirannya. Sistem hukum, institusi politik, dan ideologi dapat memfasilitasi atau menghambat perkembangan kekuatan-kekuatan produktif. Namun, pada akhirnya, kontradiksi dalam basis akan mengarah pada transformasi dalam superstruktur. Perubahan revolusioner terjadi ketika perkembangan kekuatan-kekuatan produktif bertentangan dengan relasi produksi yang ada.

Marx menggunakan metafora bangunan untuk menjelaskan hubungan ini: basis adalah fondasi yang menopang bangunan, sementara superstruktur adalah bangunan yang berdiri di atas fondasi. Perubahan dalam fondasi akan mempengaruhi seluruh struktur, tetapi fitur-fitur spesifik dari superstruktur tidak dapat diturunkan secara mekanis dari fitur-fitur basis. Ada mediasi dan otonomi relatif dalam superstruktur yang memungkinkan variasi dan kompleksitas. Engels (1890) dalam korespondensinya kemudian mengklarifikasi bahwa basis ekonomi menentukan "dalam instansi terakhir" tetapi bukan satu-satunya faktor yang beroperasi dalam sejarah.

Dalam konteks Indonesia, analisis basis-superstruktur dapat menerangi bagaimana struktur ekonomi kolonial membentuk institusi politik dan formasi kultural. Ekonomi kolonial Belanda yang berbasis pada ekstraksi komoditas primer dan pertanian perkebunan menciptakan struktur kelas dan bentuk negara yang bertahan jauh melampaui kemerdekaan. Memahami bagaimana ekonomi politik Indonesia kontemporer tetap dikondisikan oleh warisan ekstraksi kolonial dan integrasi dependen ke dalam kapitalisme global memerlukan perhatian pada hubungan dialektis antara basis ekonomi dan superstruktur politik-kultural (Hadiz, 2010). Analisis tentang bagaimana negara Indonesia pasca-kolonial berfungsi untuk memfasilitasi akumulasi kapital sambil melegitimasi struktur kekuasaan yang timpang menunjukkan relevansi berkelanjutan dari kerangka basis-superstruktur (Polimpung, 2013).

Dialektika Hegelian dan Materialistik

Metode dialektis Marx diturunkan dari Hegel tetapi ditransformasi secara fundamental melalui reinterpretasi materialis. Dialektika Hegelian adalah logika perkembangan yang berlangsung melalui kontradiksi: tesis menghasilkan antitesis, dan dari konflik antara keduanya muncul sintesis yang menggabungkan dan melampaui keduanya. Namun, untuk Hegel, proses dialektis adalah fundamental proses perkembangan ide atau Roh, dengan realitas material sebagai manifestasi semata dari perkembangan spiritual.

Marx "membalikkan Hegel" dengan mengargumentasikan bahwa perkembangan dialektis tidak didorong oleh kontradiksi dalam ranah ide tetapi oleh kontradiksi dalam kondisi material dan hubungan sosial. Dialektika beroperasi dalam dunia nyata dari produksi ekonomi, perjuangan kelas, dan transformasi sosial. "Metode dialektis saya tidak hanya berbeda dari metode Hegelian, tetapi merupakan kebalikan langsungnya. Bagi Hegel, proses kehidupan otak manusia, yaitu proses berpikir, yang bahkan ia ubah

menjadi subjek independen di bawah nama 'Ide', adalah pencipta dari dunia nyata. Bagi saya sebaliknya, yang ideal tidak lain adalah yang material yang direfleksikan oleh pikiran manusia dan diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk pemikiran" (Marx, 1873).

> "Materialisme historis Marx menekankan bahwa kondisi material - khususnya cara produksi dan relasi kelas - menentukan kehidupan sosial dan intelektual. Basis ekonomi membentuk superstruktur politik-kultural, sementara dialektika materialis menjelaskan perubahan sosial melalui kontradiksi, transformasi, dan perjuangan kelas historis."

Dialektika materialis melibatkan beberapa prinsip kunci. Pertama, totalitas: realitas sosial harus dipahami sebagai keseluruhan yang terintegrasi di mana berbagai elemen saling mengkondisikan satu sama lain. Kedua, kontradiksi: perkembangan didorong oleh kontradiksi internal daripada kekuatan eksternal. Ketiga, negasi: perkembangan berlangsung melalui negasi kondisi yang ada dan kemunculan bentuk-bentuk yang secara kualitatif baru. Keempat, transformasi: perubahan kuantitatif akhirnya mengarah pada transformasi kualitatif. Prinsip-prinsip ini memberikan metodologi untuk menganalisis perubahan sosial yang menghindari baik determinisme mekanis maupun voluntarisme murni. Harvey (2013) menunjukkan bahwa pemahaman dialektika sebagai metode analisis yang dinamis, bukan formula yang kaku, adalah kunci untuk aplikasi produktif dari materialisme historis Marx.

Cara Produksi dan Perubahan Sejarah

Konsep cara produksi sentral kepada konsepsi materialis tentang sejarah. Cara produksi mencakup baik kekuatan-kekuatan produksi (teknologi, sumber daya, keterampilan tenaga kerja) maupun relasi produksi (relasi kelas, bentuk kepemilikan, organisasi sosial kerja). Marx mengidentifikasi suksesi historis dari cara-cara produksi yang berbeda: komunisme primitif, perbudakan kuno, feodalisme, kapitalisme, dan proyeksi masa depan sosialisme/komunisme. Setiap cara produksi ditandai oleh bentuk-bentuk spesifik relasi kelas dan dinamika perkembangan serta krisis yang spesifik.

Transisi dari satu cara produksi ke cara produksi lainnya terjadi melalui transformasi revolusioner yang dipicu oleh kontradiksi antara kekuatan-kekuatan produktif yang berkembang dan relasi produksi yang mengekang. "Pada tahap perkembangan tertentu, kekuatan-kekuatan produktif material masyarakat bertentangan dengan relasi produksi yang ada atau---ini hanya mengekspresikan hal yang sama dalam istilah hukum---dengan relasi kepemilikan dalam kerangka mana mereka telah beroperasi sebelumnya. Dari bentuk-bentuk perkembangan kekuatan-kekuatan produktif, relasi-relasi ini berubah menjadi belenggu mereka. Kemudian dimulailah era revolusi sosial" (Marx, 1859).

Feodalisme, sebagai contoh, ditandai oleh produksi pertanian, tenaga kerja petani yang terikat, dan pemilik tanah aristokratik. Perkembangan perdagangan, produksi urban, dan kapital pedagang menciptakan kontradiksi dengan relasi feodal yang akhirnya mengarah pada revolusi borjuis dan pembentukan kapitalisme. Serupa dengan itu, kapitalisme mengembangkan kekuatan-kekuatan produktif ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya tetapi menciptakan kontradiksi - seperti kecenderungan terhadap produksi berlebih, jatuhnya tingkat keuntungan, dan intensifikasi konflik kelas - yang Marx yakini pada akhirnya akan mengarah pada revolusi sosialis.

Determinisme Ekonomi versus Voluntarisme

Interpretasi ortodoks materialisme historis sering menekankan determinisme ekonomi yang mereduksi semua fenomena sosial kepada epifenomena dari basis ekonomi. Interpretasi ini menghasilkan fatalisme yang mengabaikan peran agensi manusia dalam membentuk sejarah. Engels dalam surat-suratnya yang ditulis belakangan mencoba memodifikasi interpretasi deterministik dengan menekankan "determinasi dalam instansi terakhir" dan interaksi kompleks antara berbagai faktor sosial. Ia mengakui bahwa Marx dan dia sendiri telah terlalu menekankan faktor ekonomi dalam polemik melawan idealisme (Engels, 1890).

Antonio Gramsci mengembangkan konsep hegemoni untuk menunjukkan bagaimana dominasi kelas tidak hanya dipertahankan melalui koersi ekonomi tetapi juga melalui kepemimpinan kultural dan ideologis. Konsep hegemoni menunjukkan bahwa superstruktur memiliki otonomi relatif yang signifikan dan bahwa perubahan sosial melibatkan perjuangan pada level kultural dan politik, tidak hanya ekonomi. Revolusi tidak hanya memerlukan kondisi

ekonomi yang matang tetapi juga perjuangan ideologis untuk membangun kesadaran kelas dan hegemoni alternatif (Gramsci, 1971).

Dalam konteks Indonesia, debat tentang determinisme ekonomi versus voluntarisme memiliki resonansi khusus dalam analisis tentang cara produksi Asiatik dan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Tokoh-tokoh seperti Soedjatmoko dan Dawam Rahardjo mengembangkan perspektif yang mengintegrasikan analisis struktural dengan penekanan pada agensi dan kreativitas kultural dalam proses pembangunan. Pemahaman tentang bagaimana struktur ekonomi mengkondisikan tetapi tidak sepenuhnya menentukan pilihan politik dan sosial penting untuk strategi transformasi sosial yang efektif (Rahardjo, 1983). Studi kontemporer tentang kapitalisme Indonesia menunjukkan bahwa meskipun struktur ekonomi kolonial dan global membatasi pilihan, agensi politik domestik tetap memainkan peran penting dalam membentuk trajektori pembangunan (Hadiz & Robison, 2005).

4.6 Warisan dan Pengaruh Marx

Warisan intelektual Marx telah memiliki pengaruh yang luar biasa dan multifaset terhadap perkembangan teori sosial, gerakan politik, dan bahkan kebijakan negara selama lebih dari satu abad. Pengaruh ini tidak homogen atau tunggal; sebaliknya, pemikiran Marx telah diinterpretasikan, direinterpretasikan, dikritik, dan dikembangkan dalam berbagai arah yang seringkali bertentangan. Dari Marxisme ortodoks Soviet hingga neo-Marxisme Barat, dari teori dependensi Amerika Latin hingga Marxisme analitis Anglo-Amerika, tradisi Marxian telah menunjukkan vitalitas dan adaptabilitas yang luar biasa.

Neo-Marxisme dan Teori Kritis

Perkembangan neo-Marxisme pada abad ke-20 merepresentasikan upaya untuk memperbarui dan merevisi pemikiran Marx dalam menghadapi perubahan dalam kapitalisme dan kegagalan prediksi revolusioner Marx untuk terwujud di negara-negara kapitalis maju. Mazhab Frankfurt, yang mencakup teoretikus seperti Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, dan kemudian Jürgen Habermas, mengembangkan teori kritis yang mengintegrasikan analisis Marxian dengan wawasan dari psikoanalisis, teori budaya, dan filsafat (Horkheimer & Adorno, 1947).

Antonio Gramsci mengembangkan konsep hegemoni untuk menjelaskan bagaimana kelas dominan mempertahankan kekuasaan tidak hanya melalui koersi tetapi juga melalui kepemimpinan intelektual dan moral. Hegemoni dicapai ketika nilai-nilai dan pandangan dunia kelas dominan diterima oleh kelas-kelas yang didominasi sebagai akal sehat atau natural. Konsep Gramscian tentang "perang posisi" versus "perang manuver" memberikan strategi alternatif untuk transformasi sosial yang menekankan perjuangan budaya dan ideologis daripada insureksi revolusioner langsung (Gramsci, 1971).

Louis Althusser mengembangkan interpretasi strukturalis Marxisme yang menekankan determinasi oleh struktur ekonomi sambil mengakui otonomi relatif superstruktur. Konsep Althusser tentang Aparatus Negara Ideologis menunjukkan bagaimana institusi seperti sekolah, media, dan gereja berfungsi untuk mereproduksi relasi produksi kapitalis melalui internalisasi ideologi dominan (Althusser, 1970).

Marxisme di Asia Tenggara

Marxisme memiliki sejarah yang panjang dan kompleks di Asia Tenggara, dengan pengaruh yang signifikan pada gerakan nasionalis, anti-kolonial, dan revolusioner. Di Indonesia, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang didirikan pada 1920 menjadi salah satu partai komunis terbesar di luar blok Soviet dan Tiongkok pada awal 1960-an. PKI mengadaptasi Marxisme untuk kondisi Indonesia dengan menekankan aliansi dengan borjuasi nasional dan fokus pada anti-imperialisme daripada revolusi proletariat klasik.

Tan Malaka, teoretikus Marxis Indonesia yang paling orisinal, mengembangkan interpretasi unik yang mencoba mensintesiskan Marxisme dengan Islam dan nasionalisme Indonesia. Dalam karya-karyanya seperti *Madilog* (Materialisme, Dialektika, Logika), Tan Malaka berupaya mengembangkan filsafat Marxis yang berakar dalam budaya Indonesia dan dapat berbicara kepada massa Indonesia yang mayoritas Muslim. Visinya tentang revolusi Indonesia menekankan kemandirian dan penolakan terhadap subordinasi kepada kekuatan asing, baik Barat maupun Soviet (Tan Malaka, 1943).

Tragedi 1965-1966, di mana anggota PKI dan simpatisannya dibunuh dalam pembersihan massal, menandai akhir katastrofik dari eksperimen komunis Indonesia dan menciptakan trauma yang masih mempengaruhi politik Indonesia hingga kini. Periode Orde Baru di bawah Soeharto (1966-1998)

ditandai oleh tindakan represif terhadap ideologi kiri dan anti-komunisme yang menjadi ideologi negara. Diskusi publik tentang Marxisme menjadi tabu, dan warisan intelektual tradisi Marxis Indonesia sebagian besar terlupakan.

Kritik terhadap Marx

Marx telah menghadapi berbagai kritik dari berbagai perspektif teoretis dan politik. Kritik ekonomi menunjukkan bahwa prediksi Marx tentang pauperisasi absolut kelas pekerja dan penurunan tingkat keuntungan tidak terwujud dalam kapitalisme maju, di mana standar hidup pekerja meningkat signifikan dan kapitalisme menunjukkan kapasitas adaptif yang lebih besar daripada yang diantisipasi Marx. Kapitalisme juga menunjukkan fleksibilitas dalam mencegah atau mengelola krisis melalui intervensi negara, kebijakan Keynesian, dan mekanisme negara kesejahteraan.

Kritik sosiologis mengargumentasikan bahwa struktur kelas dalam masyarakat modern lebih kompleks daripada dikotomi sederhana borjuasi-proletariat yang dipostulasikan Marx. Pertumbuhan kelas menengah, diversifikasi dalam kelas pekerja, dan munculnya bentuk-bentuk baru stratifikasi berdasarkan pendidikan, keterampilan, atau konsumsi menunjukkan bahwa analisis kelas Marxian terlalu sederhana. Lebih jauh lagi, identitas sosial dan mobilisasi politik kontemporer sering berdasarkan faktor-faktor seperti ras, gender, etnisitas, atau identitas seksual daripada kelas dalam pengertian Marxian.

Kritik politik menunjukkan bahwa rezim-rezim yang mengklaim mendasarkan diri pada Marxisme - terutama Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya - menghasilkan bentuk-bentuk baru penindasan, birokrasi totaliter, dan kegagalan ekonomi yang dramatik. Pengalaman sosialisme yang benar-benar ada menunjukkan bahwa penghapusan kepemilikan privat atas alat-alat produksi tidak otomatis menghasilkan masyarakat yang lebih bebas atau demokratis tetapi dapat menciptakan bentuk-bentuk baru dominasi oleh elit partai-negara.

Kritik epistemologis, terutama dari tradisi postmodern, mengargumentasikan bahwa Marxisme adalah bentuk dari narasi besar yang mengklaim kebenaran universal tentang sejarah dan masyarakat tetapi sebenarnya merepresentasikan perspektif partikular yang dikondisikan secara historis dan kultural. Klaim Marx tentang ilmu objektif tentang masyarakat dikritik sebagai positivisme yang mengabaikan dimensi hermeneutik dan interpretatif dari pemahaman sosial.

Kritik feminis menunjukkan bahwa Marx dan Engels gagal memberikan analisis yang memadai tentang penindasan gender dan kerja reproduktif. Meskipun Engels menulis tentang asal-usul keluarga dan penindasan perempuan, analisis Marxian cenderung memperlakukan gender sebagai sekunder terhadap kelas dan mengabaikan cara-cara unik di mana patriarki beroperasi lintas cara produksi yang berbeda. Feminis sosialis telah berupaya mengembangkan analisis yang mengintegrasikan gender dan kelas tetapi ini memerlukan modifikasi substansial terhadap kerangka Marxian.

Relevansi Marx di Abad 21

Meskipun kritik-kritik ini valid dan penting, banyak aspek dari analisis Marx tetap relevan untuk memahami kapitalisme abad ke-21. Krisis finansial global 2008 dan resesi yang mengikutinya memperbarui minat terhadap kritik Marx tentang kapitalisme dan kecenderungannya terhadap krisis. Buku-buku tentang Marx menjadi bestseller, kursus-kursus tentang *Capital* menarik audiens yang besar, dan bahkan publikasi mainstream mengakui relevansi berkelanjutan dari analisis Marx. Harvey (2010) dan Eagleton (2011) adalah contoh dari kebangkitan kembali interpretasi Marx yang sophisticated untuk audiens kontemporer, menunjukkan bagaimana alat analitis Marx dapat diterapkan untuk memahami krisis kapitalisme neoliberal.

Ketimpangan ekonomi yang melebar dalam dekade-dekade terakhir memberikan validitas pada argumen Marx tentang akumulasi kekayaan pada satu kutub dan kesengsaraan pada kutub lainnya. Data dari ekonom seperti Thomas Piketty menunjukkan bahwa ketimpangan dalam banyak negara kapitalis telah mencapai level yang belum terlihat sejak era yang dianalisis Marx. Konsentrasi kekayaan dalam elit sangat kecil dan stagnasi atau penurunan pendapatan untuk mayoritas populasi mencerminkan dinamika yang diidentifikasi Marx.

Globalisasi dan pembentukan rantai nilai global menunjukkan ekspansi geografis kapitalisme yang Marx prediksi dalam *Manifesto Komunis*: "Kebutuhan untuk pasar yang terus berkembang bagi produk-produknya mengejar borjuasi ke seluruh permukaan bola bumi. Ia harus menetap di mana-mana, membangun koneksi di mana-mana" (Marx & Engels, 1848). Integrasi ekonomi dunia menciptakan proletariat global yang dieksploitasi dalam pabrik-pabrik di negara-negara berkembang yang memproduksi komoditas untuk pasar global.

Prekarisasi tenaga kerja dalam ekonomi digital dan platform menunjukkan bentuk-bentuk baru eksploitasi yang resonan dengan analisis Marx tentang alienasi dan komodifikasi tenaga kerja. Pekerja aplikasi seperti Uber, Gojek, atau Grab mengalami kondisi kerja yang tidak pasti, kurangnya perlindungan sosial, dan subordinasi kepada algoritma yang mengontrol alokasi kerja dan kompensasi. Meskipun secara formal "independen," mereka dalam praktiknya subordinasi kepada platform yang mengekstrak surplus dari kerja mereka.

> "Analisis Marx tetap relevan di abad ke-21 untuk memahami krisis finansial global, ketimpangan ekonomi, globalisasi, hingga prekarisasi kerja digital. Bahkan isu ekologis dan konteks Indonesia menunjukkan kerangka Marxian masih berguna membaca ketidakadilan struktural kapitalisme kontemporer."

Krisis ekologis dan perubahan iklim telah memicu minat baru terhadap ekosocialisme yang mengintegrasikan kritik Marxian tentang kapitalisme dengan kesadaran ekologis. Meskipun Marx sendiri tidak fokus pada isu lingkungan, logika akumulasi tanpa batas yang ia analisis dapat dilihat sebagai akar dari degradasi ekologis. Kapitalisme memerlukan pertumbuhan konstan untuk mempertahankan keuntungan, tetapi pertumbuhan konstan dalam planet dengan sumber daya terbatas tidak dapat berkelanjutan (Mudhoffir, 2011).

Dalam konteks Indonesia, relevansi Marx terletak pada kemampuan kerangkanya untuk menganalisis persistensi ketimpangan, eksploitasi tenaga kerja, dan dominasi oligarkis dalam era demokratis. Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan transisi menuju demokrasi, struktur kekuasaan ekonomi tetap terkonsentrasi, dan mayoritas populasi terus mengalami prekaritas ekonomi. Analisis kelas Marxian memberikan alat untuk memahami bagaimana demokrasi formal dapat koeksist dengan ketimpangan ekonomi yang ekstrem dan dominasi oligarkis. Studi tentang keadilan sosial dalam perspektif Marxian menunjukkan bagaimana analisis Marx tetap relevan untuk memahami problem ketidakadilan struktural dalam masyarakat Indonesia kontemporer (Karl Marx social justice, 2021).

Kesimpulan

Eksplorasi komprehensif terhadap pemikiran Karl Marx dalam bab ini telah mengungkapkan kompleksitas, kedalaman, dan relevansi berkelanjutan dari kontribusinya pada teori sosial. Marx bukan hanya seorang ekonom atau filsuf atau aktivis politik, tetapi seorang pemikir sintesis yang mengintegrasikan berbagai tradisi intelektual dalam kerangka analitis yang komprehensif tentang kapitalisme, kelas, dan perubahan historis. Warisan intelektualnya telah membentuk tidak hanya perkembangan teori sosial akademik tetapi juga gerakan politik dan sosial yang telah mengubah sejarah dunia modern.

Biografi intelektual Marx menunjukkan bagaimana pemikirannya berkembang melalui keterlibatan kritis dengan tradisi filosofis Jerman, terutama Hegel dan Hegelian Muda, dan bagaimana pengalaman hidupnya---dari aktivisme politik yang mengarah pada pengasingan hingga kemiskinan yang dialami keluarganya---memberikan dimensi personal dan urgensi pada kritik teoretisnya terhadap kapitalisme. Kolaborasi dengan Engels memberikan tidak hanya dukungan material tetapi juga perspektif empiris yang melengkapi kecanggihan teoretis Marx.

Teori alienasi Marx memberikan kritik yang mendalam dan humanistis tentang dampak kapitalisme pada kondisi manusia, menunjukkan bagaimana sistem yang seharusnya memproduksi kemakmuran justru menghasilkan keterasingan pekerja dari produk kerja mereka, dari proses produksi, dari hakikat kemanusiaan mereka, dan dari sesama manusia. Konsep fetisisme komoditas menunjukkan bagaimana relasi sosial antara manusia tampak sebagai relasi antara benda-benda, mengaburkan eksploitasi yang mendasari pertukaran komoditas yang tampaknya setara.

Materialisme historis dan dialektis Marx memberikan kerangka teoretis fundamental untuk memahami sejarah manusia sebagai suksesi dari cara-cara produksi yang berbeda, masing-masing ditandai oleh relasi kelas spesifik dan dinamika perkembangan serta krisis yang spesifik. Pembedaan antara basis ekonomi dan superstruktur, meskipun seringkali disalahpahami sebagai determinisme ekonomi yang mekanis, memberikan wawasan penting tentang bagaimana kondisi material membentuk institusi sosial, politik, dan kultural, sambil mengakui otonomi relatif dan efek timbal balik dari superstruktur.

Analisis kelas dan perjuangan kelas Marx mengidentifikasi antagonisme fundamental antara borjuasi dan proletariat dalam kapitalisme sebagai motor penggerak perubahan historis. Meskipun struktur kelas kontemporer

lebih kompleks daripada dikotomi sederhana ini, konsep kelas relasional Marx---yang mendefinisikan kelas berdasarkan posisi dalam relasi produksi daripada tingkat pendapatan---tetap memberikan alat analitis yang kuat untuk memahami ketimpangan dan konflik dalam masyarakat kapitalis.

"Pemikiran Marx menegaskan relevansi berkelanjutan dalam memahami kapitalisme, kelas, dan perubahan sosial. Teori alienasi, materialisme historis, dan kritik ekonomi politiknya membongkar mekanisme eksploitasi struktural. Warisan Marx tetap vital, baik dalam teori sosial global maupun analisis ekonomi politik Indonesia kontemporer, meski prediksi revolusinya tidak sepenuhnya terwujud."

Kritik ekonomi politik Marx terhadap kapitalisme, terutama teori nilai lebih, mengungkapkan mekanisme eksploitasi yang tersembunyi di balik pertukaran yang tampaknya adil antara kapitalis dan pekerja. Analisis tentang akumulasi kapital, konsentrasi dan sentralisasi, dan kontradiksi internal kapitalisme memberikan pemahaman tentang dinamika sistem kapitalis yang melampaui fenomena permukaan untuk mengidentifikasi tendensi struktural yang mendorong baik ekspansi maupun krisis kapitalisme.

Warisan Marx dalam teori sosial kontemporer mencakup berbagai tradisi - dari neo-Marxisme dan teori kritis hingga Marxisme analitis dan ekosocialisme - yang menunjukkan vitalitas dan adaptabilitas kerangka Marxian. Meskipun prediksi spesifik Marx tentang revolusi proletariat tidak terwujud dalam cara yang ia antisipasi, dan meskipun rezim-rezim yang mengklaim mendasarkan diri pada Marxisme menghasilkan kegagalan yang dramatik, alat analitis Marx untuk memahami kapitalisme, kelas, dan eksploitasi tetap relevan dan kuat.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Marx memiliki sejarah yang kompleks dan kontroversial. Trauma 1965-1966 dan represi Orde Baru menciptakan stigma yang persisten terhadap Marxisme, tetapi era Reformasi telah membuka ruang untuk penilaian kembali yang lebih bernuansa terhadap kontribusi intelektual Marx. Sarjana kontemporer seperti Hadiz dan Robison telah menunjukkan bahwa kerangka Marxian tetap esensial untuk

memahami ekonomi politik Indonesia, terutama persistensi struktur oligarkis dan eksploitasi tenaga kerja dalam era demokratis.

Untuk mahasiswa S1 dan S2, pemahaman terhadap Marx bukan hanya penting untuk penguasaan sejarah teori sosial klasik tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan analitis kritis terhadap struktur ekonomi dan politik kontemporer. Bahkan mereka yang tidak setuju dengan kesimpulan politik Marx harus mengakui bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan tentang keadilan ekonomi, eksploitasi, kelas, dan kemungkinan transformasi sosial tetap sentral untuk teori sosial dan praktik politik kontemporer.

Dalam era globalisasi neoliberal, ketimpangan yang melebar, krisis ekologis, dan prekarisasi tenaga kerja, Marx tetap menjadi mitra dialog yang esensial dalam diskusi tentang bagaimana memahami dan mengubah dunia sosial. Kemampuan untuk terlibat secara kritis dan bernuansa dengan pemikiran Marx - mengakui baik kontribusi mendalam maupun keterbatasan dan masalah dalam kerangkanya - merupakan tanda dari literasi teoretis yang canggih dan esensial untuk ilmuwan sosial yang serius.

Referensi Bab 4

Althusser, L. (1970). Ideology and ideological state apparatuses. Available: https://www.marxists.org/reference/archive/althusser/1970/ideology.htm

Aroem. (2021). Kondisi sosial ekonomi buruh pengrajin batu bata di Kelurahan Campang Raya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10(1). Available: https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/42172

Caraway, T. L. (2007). *Assembling women: The feminization of global manufacturing*. Cornell University Press.

Eagleton, T. (2011). *Why Marx was right*. Yale University Press.

Engels, F. (1845). *The condition of the working class in England*. Available: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/condition-working-class/

Engels, F. (1890). Letter to Joseph Bloch. Available: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1890/letters/90_09_21.htm

Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks*. Available: https://archive.org/details/AntonioGramsciSelectionsFromThePrisonNotebooks

Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2005). Neo-liberal reforms and illiberal consolidations: The Indonesian paradox. *Journal of Development Studies*, 41(2), 220-241.

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. *Indonesia*, 96, 35-57.

Harvey, D. (2010). *A companion to Marx's Capital*. Verso Books.

Harvey, D. (2013). *A companion to Marx's Capital, Volume 2*. Verso Books.

Hegel, G. W. F. (1807). *Phenomenology of spirit*. Available: https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/ph/

Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (1947). *Dialectic of enlightenment*. Available: https://archive.org/details/DialecticOfEnlightenmentTheodorW.AdornoMaxHorkheimer

Karl Marx social justice: A Marxism perspective of Indonesian case. (2021). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 1-15. Available: https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss1/

Kekerasan simbolik terhadap pekerja prekariat perusahaan e-commerce transportasi daring. (2019). *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 8(1). Available: https://scholarhub.ui.ac.id/jkmi/

Mahmudah. (2022). Kapitalisme dan religi dalam aktivitas penambangan pasir Semeru. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(2). Available: https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/63138

Marx, K. (1844). *Economic and philosophic manuscripts of 1844*. Available: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/manuscripts/preface.htm

Marx, K. (1845). *Theses on Feuerbach*. Available: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/theses/

Marx, K. (1859). *A contribution to the critique of political economy*. Available:

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/

Marx, K. (1867). *Capital: Volume one*. Available: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/

Marx, K. (1873). Afterword to the second German edition of *Capital*. Available: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/p3.htm

Marx, K. (2004). *Kapital: Sebuah kritik ekonomi politik* (Oey Hay Djoen, Penerjemah). Hasta Mitra Press.

Marx, K., & Engels, F. (1845). *The German ideology*. Available: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/

Marx, K., & Engels, F. (1848). *The Communist Manifesto*. Available: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/

Mudhoffir, A. M. (2011). Krisis ekologi dan ancaman bagi kapitalisme. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 16(1). https://doi.org/10.7454/MJS.v16i1.1210

Polimpung, H. Y. (2013). Kapitalisme dalam kerlingan negara-berdaulat: Ulasan historis singkat dari era imperium Romawi agung sampai era neoliberal. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 15(2), 115-136. https://doi.org/10.7454/global.v15i2.32

Rahardjo, M. D. (1983). *Kapitalisme desa dalam orde kolonial: Perubahan ekonomi masyarakat pedalaman Jawa*. Bina Aksara.

Sarvianto, D. (2020). Dilema dwifungsi pemanfaatan informasi dalam pembentukan ketimpangan sosial baru di Indonesia: Telaah sosiologi digital melalui perspektif interaksionisme simbolik. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(2). Available: https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/43452

Sutopo, O. R., Threadgold, S., & Nilan, P. (2019). Aspirasi pemuda kelas bawah dan reproduksi sosial di Jawa Tengah. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10(2). Available: https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/viewFile/69657/42029

Tan Malaka. (1943). *Madilog: Materialisme, dialektika, logika*. Toko Buku Indonesiana.

Jurnal Indonesia yang Dikutip:

Global: Jurnal Politik Internasional - Universitas Indonesia - Sinta 2. Portal: https://scholarhub.ui.ac.id/global/

Jurnal Analisa Sosiologi - Universitas Sebelas Maret - Sinta 3. Portal: https://jurnal.uns.ac.id/jas

Jurnal Hukum & Pembangunan - Universitas Indonesia. Portal: https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/

Jurnal Komunikasi Indonesia - Universitas Indonesia - Sinta 2. Portal: https://scholarhub.ui.ac.id/jkmi/

Masyarakat: Jurnal Sosiologi - Universitas Indonesia - Sinta 2. Portal: https://scholarhub.ui.ac.id/mjs/

BAB 5

ÉMILE DURKHEIM DAN SOSIOLOGI FUNGSIONAL

Pendahuluan

Émile Durkheim (1858-1917) merupakan salah satu tokoh pendiri sosiologi modern yang paling berpengaruh. Kontribusinya dalam membentuk sosiologi sebagai disiplin ilmiah yang otonom tidak tertandingi. Berbeda dengan Karl Marx yang menekankan konflik kelas sebagai motor perubahan sosial, atau Max Weber yang memfokuskan pada tindakan bermakna dan proses rasionalisasi, Durkheim mengembangkan pendekatan yang menempatkan keteraturan sosial, solidaritas kolektif, dan integrasi moral sebagai pusat analisisnya.

Durkheim hidup dalam masa transformasi mendalam masyarakat Prancis. Revolusi Industri mengubah struktur ekonomi dan sosial secara radikal, urbanisasi mempercepat perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan sekularisasi atau proses peralihan dari dominasi agama menuju rasionalitas mengikis otoritas tradisional agama Katolik. Dalam konteks ini, Durkheim mengembangkan proyek intelektualnya: memahami secara ilmiah dasar-dasar keteraturan sosial dan mengidentifikasi kondisi-kondisi yang memungkinkan kohesi sosial atau keterikatan antar anggota masyarakat dalam masyarakat modern yang kompleks dan terdiferensiasi.

Pemikiran Durkheim sangat relevan untuk memahami dinamika masyarakat Indonesia kontemporer. Seperti Prancis pada masa Durkheim, Indonesia mengalami transformasi sosial yang mendalam: urbanisasi masif dari desa ke kota, pergeseran dari ekonomi agraris ke industri dan jasa, serta pluralisme agama dan budaya yang semakin kompleks. Pertanyaan Durkheim tentang apa yang menyatukan masyarakat yang beragam menjadi sangat penting dalam konteks Indonesia dengan lebih dari 300 kelompok etnis, enam agama resmi, dan ribuan pulau yang tersebar.

Bab ini menelusuri kontribusi teoretis dan metodologis Durkheim secara sistematis. Dimulai dengan biografi intelektualnya dan konteks sejarah yang membentuk pemikirannya dalam Sub-bab 5.1, kemudian mengeksplorasi konsep sentral tentang solidaritas mekanik dan organik sebagai dua tipe kohesi sosial yang berbeda dalam Sub-bab 5.2. Analisis kemudian beralih ke studi monumentalnya tentang bunuh diri dalam Sub-bab 5.3, yang

mendemonstrasikan bagaimana fenomena individual paling intim sekalipun dapat dijelaskan melalui faktor-faktor sosial yang dapat diukur.

Diskusi berlanjut dengan pemaparan sistematis tentang konsep fakta sosial dan metodologi sosiologis yang dikembangkan Durkheim untuk mempelajarinya dalam Sub-bab 5.4. Ini diikuti dengan eksplorasi mendalam tentang teorinya mengenai agama dan perannya dalam menciptakan kesadaran kolektif atau kesadaran bersama yang mengikat anggota masyarakat serta solidaritas sosial dalam Sub-bab 5.5. Bab ini ditutup dengan analisis komprehensif tentang warisan Durkheim dalam sosiologi modern dalam Sub-bab 5.6, mencakup pengaruhnya terhadap berbagai tradisi teoretis, kritik yang diarahkan kepada karyanya, serta relevansi pemikirannya untuk memahami tantangan masyarakat kontemporer.

Melalui pembahasan enam sub-bab ini, akan terlihat bagaimana Durkheim tidak hanya mengembangkan konsep-konsep kunci yang masih digunakan dalam sosiologi hingga kini, tetapi juga menetapkan standar metodologis untuk penelitian empiris yang rigoros atau ketat dan sistematis. Pemikirannya tentang bagaimana masyarakat menyatukan dirinya, bagaimana norma dan nilai dibentuk dan dipertahankan, serta bagaimana perubahan sosial mempengaruhi kesejahteraan individual tetap relevan untuk memahami dunia kontemporer yang ditandai oleh globalisasi, pluralisme, dan perubahan yang cepat.

5.1 Kehidupan dan Karya Durkheim

Latar Belakang dan Formasi Intelektual

Émile Durkheim lahir pada 15 April 1858 di Épinal, sebuah kota kecil di Lorraine, Prancis Timur. Ia berasal dari keluarga Yahudi ortodoks yang telah lama menetap di wilayah tersebut. Ayahnya, Moïse Durkheim, adalah seorang rabi atau pemimpin agama Yahudi, dan keluarga mengharapkan Émile akan mengikuti jejak ayahnya dalam kepemimpinan religius. Namun, sejak usia muda, Durkheim menunjukkan minat yang lebih besar pada studi intelektual daripada kehidupan religius tradisional.

Pengalaman tumbuh dalam komunitas Yahudi yang minoritas di Prancis memberikan Durkheim perspektif unik tentang isu-isu integrasi sosial, solidaritas kelompok, dan hubungan antara individu dengan masyarakat. Meskipun kemudian menjadi agnostik atau tidak mengakui kepastian adanya Tuhan, latar belakang religiusnya membentuk ketertarikannya pada fenomena religius sebagai objek analisis sosiologis. Ia memahami agama

bukan sebagai kepercayaan individual tetapi sebagai sistem moral kolektif yang mengikat anggota masyarakat.

Durkheim menempuh pendidikan menengahnya di Collège d'Épinal dan kemudian pindah ke Paris untuk melanjutkan studi di Lycée Louis-le-Grand. Pada tahun 1879, setelah dua kali gagal, ia berhasil diterima di École Normale Supérieure atau Sekolah Normal Superior, institusi pendidikan tinggi paling prestisius di Prancis yang telah menghasilkan banyak intelektual terkemuka. Di sana, Durkheim bergabung dengan generasi cemerlang yang mencakup Jean Jaurès sebagai filsuf dan pemimpin sosialis, Henri Bergson sebagai filsuf terkenal, dan tokoh-tokoh penting lainnya.

Masa studi di École Normale Supérieure sangat membentuk orientasi intelektual Durkheim. Ia terpapar pada tradisi filosofis Prancis, khususnya pemikiran positivis Auguste Comte dan tradisi rasionalis Cartesian. Dari Comte, Durkheim mengambil gagasan bahwa masyarakat dapat dipelajari secara ilmiah menggunakan metode yang rigoros, meskipun ia kemudian mengkritik aspek spekulatif dari positivisme atau aliran yang menekankan pengetahuan ilmiah berbasis fakta Comte. Durkheim juga dipengaruhi oleh tradisi Kantian tentang moralitas dan kategori pemikiran, yang kemudian ia sosiologiskan dengan menunjukkan bahwa kategori-kategori ini memiliki asal-usul sosial.

Karier Akademik dan Pengembangan Sosiologi

Setelah lulus dari École Normale Supérieure pada tahun 1882, Durkheim menghabiskan beberapa tahun mengajar filsafat di berbagai sekolah menengah atas di provinsi. Periode ini memberikannya waktu untuk mengembangkan gagasan-gagasannya dan mempersiapkan disertasi. Pada tahun 1885-1886, ia melakukan kunjungan studi ke Jerman, di mana ia terpapar pada perkembangan ilmu sosial Jerman, khususnya karya Wilhelm Wundt dalam psikologi eksperimental dan tradisi ekonomi politik Jerman.

Pengalaman di Jerman memperkuat keyakinan Durkheim bahwa sosiologi dapat dan harus menjadi disiplin ilmiah yang otonom atau berdiri sendiri. Ia terkesan dengan rigoritas akademik dan organisasi universitas Jerman, tetapi juga mengkritik apa yang ia lihat sebagai fokus berlebihan pada individualisme psikologis yang mengabaikan dimensi kolektif kehidupan sosial.

Tahun 1887 menandai titik balik penting dalam karier Durkheim. Ia ditunjuk sebagai pengajar ilmu sosial dan pedagogi di Universitas Bordeaux, menjadi

orang pertama di Prancis yang memegang posisi akademik dengan kata "sosial" atau "sosiologi" dalam judulnya. Ini adalah pencapaian signifikan, karena pada masa itu sosiologi belum diakui sebagai disiplin akademik yang sah di Prancis. Posisi ini memberikan Durkheim platform untuk mengembangkan sosiologi sebagai disiplin yang terpisah dari filsafat dan untuk melatih generasi baru sosiolog.

Di Bordeaux, Durkheim tidak hanya mengajar tetapi juga melakukan penelitian intensif yang menghasilkan karya-karya besarnya. Pada tahun 1893, ia menerbitkan disertasi doktoralnya, *De la division du travail social* atau Pembagian Kerja Sosial, yang menganalisis transformasi dari masyarakat tradisional dengan solidaritas mekanik ke masyarakat modern dengan solidaritas organik. Dua tahun kemudian, pada 1895, ia menerbitkan *Les règles de la méthode sociologique* atau Aturan-Aturan Metode Sosiologis, sebuah manifesto metodologis atau pedoman penelitian yang mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari fakta sosial dan menetapkan prinsip-prinsip untuk penelitian sosiologis yang rigoros.

Karya paling terkenal Durkheim, *Le suicide* atau Bunuh Diri, diterbitkan pada tahun 1897. Studi ini mendemonstrasikan bagaimana metode sosiologis dapat diterapkan untuk memahami fenomena yang tampaknya sangat individual. Dengan menggunakan data statistik dari berbagai negara Eropa, Durkheim menunjukkan bahwa tingkat bunuh diri bervariasi secara sistematis dengan faktor-faktor sosial seperti agama, status pernikahan, dan kondisi ekonomi. Ini adalah demonstrasi kuat tentang kekuatan penjelasan sosiologis dan pentingnya integrasi sosial untuk kesejahteraan individual.

Pada tahun 1896, Durkheim mendirikan *L'Année Sociologique*, jurnal akademik pertama yang didedikasikan untuk sosiologi di Prancis. Jurnal ini tidak hanya menerbitkan artikel-artikel penelitian asli tetapi juga tinjauan komprehensif tentang literatur sosiologis dari berbagai negara. Melalui jurnal ini, Durkheim mengorganisir komunitas intelektual dari sosiolog muda yang berbagi komitmen terhadap pendekatan ilmiah untuk mempelajari masyarakat. Kelompok ini, yang dikenal sebagai Sekolah Durkheimian, termasuk tokoh-tokoh seperti Marcel Mauss (keponakan Durkheim), Maurice Halbwachs, dan Robert Hertz.

Pada tahun 1902, Durkheim pindah ke Universitas Sorbonne di Paris, pusat intelektual Prancis. Di sana, ia memegang kursi Ilmu Pendidikan, yang kemudian diubah menjadi Ilmu Pendidikan dan Sosiologi pada tahun 1913, mengakui kontribusinya dalam membangun sosiologi sebagai disiplin yang mapan. Posisi ini memberikan Durkheim pengaruh yang signifikan dalam

membentuk pendidikan di Prancis dan melatih generasi baru guru dan intelektual.

Karya Mayor dan Kontribusi Teoretis

Karya terakhir dan paling ambisius Durkheim, *Les formes élémentaires de la vie religieuse* atau Bentuk-Bentuk Elementer Kehidupan Religius, diterbitkan pada tahun 1912. Berdasarkan studi tentang agama suku Aborigin Australia, Durkheim mengembangkan teori menyeluruh tentang asal-usul sosial dari agama, klasifikasi, dan kategori pemikiran. Ia berpendapat bahwa agama bukan ilusi atau kepercayaan yang salah tentang dunia natural, tetapi ekspresi simbolik dari realitas sosial. Melalui ritual kolektif atau upacara bersama dan representasi sakral atau simbol-simbol suci, masyarakat mengkonfirmasi solidaritasnya dan mempertahankan nilai-nilai bersama yang esensial untuk kohesi sosial.

Dalam karya ini, Durkheim juga mengembangkan teori radikal tentang asal-usul sosial dari kategori-kategori fundamental pemikiran manusia seperti ruang, waktu, kausalitas atau hubungan sebab-akibat, dan klasifikasi. Ia berpendapat bahwa kategori-kategori ini bukan bawaan atau universal tetapi berasal dari organisasi sosial. Struktur klasifikasi sosial menjadi model untuk klasifikasi konseptual. Ini merupakan kontribusi penting untuk sosiologi pengetahuan dan antropologi kognitif atau kajian tentang bagaimana manusia berpikir dan memahami dunia.

Perang Dunia Pertama memberikan dampak yang menghancurkan bagi Durkheim baik secara personal maupun intelektual. Putranya, André Durkheim, yang juga seorang sarjana yang menjanjikan, tewas di medan perang pada tahun 1915. Kehilangan ini menghancurkan Durkheim. Ia terus bekerja, menerbitkan artikel-artikel tentang perang dan nasionalisme, tetapi kesehatannya memburuk. Durkheim meninggal pada 15 November 1917 pada usia 59 tahun, meninggalkan warisan intelektual yang mendalam yang terus membentuk sosiologi hingga hari ini.

Konteks Intelektual dan Historis

Untuk memahami signifikansi penuh dari kontribusi Durkheim, penting untuk menempatkan karyanya dalam konteks intelektual dan historis Prancis akhir abad kesembilan belas. Prancis sedang mengalami transformasi sosial dan politik yang mendalam. Republik Ketiga, yang didirikan setelah kekalahan

dalam Perang Franco-Prusia tahun 1870-1871, berusaha untuk mengonsolidasikan dirinya terhadap tantangan dari monarki dan Gereja Katolik. Republik berusaha untuk menciptakan warga negara yang sekular dan rasional melalui pendidikan publik.

Dalam konteks ini, sosiologi Durkheim memiliki dimensi politik yang eksplisit atau jelas. Ia melihat sosiologi bukan hanya sebagai usaha intelektual tetapi juga sebagai sains moral yang dapat memberikan fondasi untuk tatanan sosial yang stabil dalam masyarakat modern yang sekular. Republik memerlukan solidaritas baru yang tidak lagi berbasis pada tradisi atau otoritas religius tetapi pada komitmen rasional terhadap nilai-nilai bersama. Sosiologi dapat mengidentifikasi kondisi-kondisi untuk solidaritas ini dan menginformasikan reformasi sosial dan pendidikan.

Durkheim juga terlibat dalam debat intelektual yang intens dengan berbagai aliran pemikiran yang dominan pada masanya. Ia mengkritik individualisme metodologis yang melihat fenomena sosial sebagai agregasi atau penjumlahan dari tindakan individual. Melawan psikologi reduksionis atau penyederhanaan, ia bersikeras bahwa masyarakat adalah realitas *sui generis* atau berdiri sendiri dengan properti yang tidak dapat direduksi menjadi karakteristik individu. Ia juga mengkritik materialisme historis Marx, meskipun ia berbagi dengan Marx keprihatinan tentang solidaritas sosial dan pentingnya analisis struktural. Durkheim berpendapat bahwa kesadaran kolektif dan representasi moral, bukan hanya kondisi material, adalah kunci untuk memahami kohesi dan perubahan sosial.

Terhadap filosofi intuisionis Henri Bergson, yang populer di Prancis pada masa itu, Durkheim mempertahankan kemungkinan dan kebutuhan untuk studi ilmiah tentang masyarakat. Melawan relativisme atau pandangan bahwa semua kebenaran relatif dan skeptisisme atau keraguan berlebihan, ia berpendapat bahwa pengetahuan objektif tentang realitas sosial adalah mungkin melalui observasi sistematis dan analisis komparatif atau perbandingan. Komitmen terhadap positivisme ilmiah ini, dikombinasikan dengan pengakuan terhadap dimensi moral dan simbolik kehidupan sosial, memberikan sosiologi Durkheimian karakternya yang distingtif atau khas.

5.2 Solidaritas Mekanik Vs Organik

Konsep Solidaritas Sosial

Salah satu kontribusi teoretis paling penting Durkheim adalah analisisnya tentang solidaritas sosial dalam karya pertamanya, *De la division du travail*

social atau Pembagian Kerja Sosial (1893). Solidaritas sosial merujuk pada kohesi dan integrasi yang mengikat anggota-anggota masyarakat bersama-sama. Durkheim berpendapat bahwa pemahaman tentang solidaritas adalah kunci untuk memahami bagaimana masyarakat mempertahankan dirinya dan bagaimana perubahan sosial terjadi. Ia mengidentifikasi dua tipe fundamental solidaritas yang berkorespondensi dengan dua bentuk organisasi sosial yang berbeda: solidaritas mekanik dalam masyarakat tradisional dan solidaritas organik dalam masyarakat modern.

Pendekatan Durkheim terhadap solidaritas adalah sosiologis daripada filosofis atau teologis. Ia tidak tertarik pada spekulasi abstrak tentang sifat ikatan sosial tetapi pada indikator-indikator yang dapat diobservasi dan diukur. Karena solidaritas itu sendiri adalah fenomena internal yang tidak dapat diamati secara langsung, Durkheim mencari manifestasi atau perwujudan eksternalnya. Ia menemukan indikator ini dalam hukum, khususnya dalam tipe sanksi atau hukuman yang digunakan oleh masyarakat untuk menegakkan norma-norma sosial.

Konsep Durkheim tentang solidaritas sangat relevan untuk memahami Indonesia. Sebagai negara yang mengalami transisi dari masyarakat agraris tradisional ke masyarakat industri dan jasa modern, Indonesia menunjukkan koeksistensi atau keberadaan bersama kedua tipe solidaritas ini. Di desa-desa tradisional, terutama di wilayah pedalaman Papua, Nusa Tenggara, atau Kalimantan, solidaritas mekanik masih dominan dengan norma adat yang kuat dan kesadaran kolektif yang tinggi. Sementara itu, di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung, solidaritas organik berkembang dengan pembagian kerja yang kompleks dan keragaman yang tinggi.

Solidaritas Mekanik

Solidaritas mekanik adalah tipe kohesi sosial yang karakteristik dari masyarakat tradisional, pra-industri, dan relatif sederhana. Dalam masyarakat dengan solidaritas mekanik, individu-individu terikat bersama karena mereka pada dasarnya sama dalam hal nilai, kepercayaan, dan gaya hidup. Kesadaran kolektif sangat kuat dan mencakup hampir seluruh kesadaran individual. Individu memiliki sedikit otonomi atau kemandirian dan keunikan; mereka mendefinisikan diri mereka terutama melalui keanggotaan mereka dalam kelompok kolektif.

Istilah "mekanik" tidak merujuk pada mesin atau teknologi tetapi pada analogi dengan solidaritas antara molekul-molekul dalam tubuh padat yang

tidak terdiferensiasi atau tidak berbeda-beda. Seperti molekul-molekul yang identik dalam kristal, individu-individu dalam masyarakat dengan solidaritas mekanik relatif tidak terdiferensiasi dan dapat dipertukarkan. Pembagian kerja minimal, dengan sebagian besar anggota melakukan tugas-tugas yang sama. Dalam masyarakat pemburu-pengumpul atau pertanian subsisten atau pertanian untuk memenuhi kebutuhan sendiri, misalnya, hampir semua orang terlibat dalam produksi makanan dengan cara yang serupa.

Di Indonesia, contoh solidaritas mekanik dapat ditemukan dalam masyarakat adat di berbagai daerah. Misalnya, dalam masyarakat Dayak di Kalimantan, kehidupan komunal dalam rumah panjang (*lamin*) mencerminkan solidaritas mekanik yang kuat. Anggota komunitas berbagi nilai-nilai adat yang sama, melakukan ritual bersama, dan memiliki pembagian kerja yang minimal dengan sebagian besar anggota terlibat dalam pertanian ladang berpindah. Pelanggaran terhadap norma adat dipandang sebagai serangan terhadap seluruh komunitas dan dihukum secara kolektif.

Karakteristik utama masyarakat dengan solidaritas mekanik meliputi: (1) kesadaran kolektif yang kuat dan mencakup yang mendominasi kesadaran individual; (2) kesamaan dalam kepercayaan, nilai, dan praktik yang tinggi di antara anggota; (3) pembagian kerja yang minimal dengan spesialisasi terbatas; (4) identitas individual yang didefinisikan terutama melalui keanggotaan kelompok daripada karakteristik unik; dan (5) hukum represif atau hukum yang bersifat menghukum yang fokus pada hukuman untuk pelanggaran norma kolektif.

Hukum dalam masyarakat dengan solidaritas mekanik adalah predominan atau sebagian besar bersifat represif atau penal atau menghukum. Ketika seseorang melanggar norma kolektif, respons masyarakat adalah menghukum pelanggar untuk menegaskan kembali supremasi atau keutamaan nilai-nilai kolektif. Kejahatan dipandang sebagai serangan terhadap kesadaran kolektif, dan hukuman berfungsi untuk memulihkan integritas moral masyarakat. Sanksi cenderung keras dan bertujuan untuk membalas dendam daripada rehabilitasi atau pemulihan. Contoh historis termasuk hukuman mati, pengucilan atau *ostracism*, atau bentuk-bentuk hukuman fisik lainnya untuk pelanggaran terhadap tabu atau norma religius.

Solidaritas Organik

Solidaritas organik adalah tipe kohesi sosial yang berkembang dalam masyarakat modern, industri, dan kompleks. Dalam masyarakat dengan

solidaritas organik, individu-individu terikat bersama bukan karena kesamaan tetapi karena perbedaan dan interdependensi atau saling ketergantungan mereka. Pembagian kerja yang ekstensif atau luas menciptakan spesialisasi di mana individu dan kelompok melakukan fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Seperti organ-organ dalam tubuh biologis yang berbeda tetapi bekerja sama untuk mempertahankan kehidupan organisme, individu dalam masyarakat modern berbeda tetapi saling bergantung.

Istilah "organik" merujuk pada analogi dengan organisme biologis yang kompleks di mana berbagai organ yang terspesialisasi melakukan fungsi yang berbeda tetapi berkoordinasi. Jantung, paru-paru, hati, dan otak semuanya berbeda dalam struktur dan fungsi, tetapi mereka bergantung satu sama lain untuk kelangsungan hidup organisme secara keseluruhan. Demikian pula, dalam masyarakat modern, petani, dokter, guru, insinyur, dan pekerja pabrik semua melakukan fungsi yang berbeda tetapi saling bergantung melalui pertukaran ekonomi dan sosial.

Jakarta sebagai megapolitan atau kota sangat besar Indonesia menunjukkan solidaritas organik yang jelas. Kota ini memiliki pembagian kerja yang sangat kompleks dengan ribuan jenis pekerjaan yang terspesialisasi, dari pekerja sektor keuangan di Sudirman, pekerja teknologi di kawasan *startup*, hingga pekerja informal di sektor transportasi dan perdagangan. Individu di Jakarta memiliki latar belakang etnis, agama, dan budaya yang sangat beragam, namun mereka saling bergantung melalui jaringan ekonomi dan sosial yang kompleks. Kesadaran kolektif yang mengikat adalah komitmen terhadap nilai-nilai modern seperti profesionalisme, efisiensi, dan toleransi pluralisme, bukan kesamaan tradisi atau asal-usul.

Karakteristik utama masyarakat dengan solidaritas organik meliputi: (1) pembagian kerja yang ekstensif dengan spesialisasi tinggi; (2) kesadaran kolektif yang lebih lemah dan terbatas yang memberikan ruang untuk otonomi individual; (3) keragaman dalam kepercayaan, nilai, dan gaya hidup yang lebih besar; (4) identitas individual yang didefinisikan melalui profesi dan karakteristik unik; dan (5) hukum restitutif atau hukum yang bertujuan memulihkan yang fokus pada pemulihan keadaan normal daripada hukuman.

Hukum dalam masyarakat dengan solidaritas organik adalah predominan restitutif atau kooperatif atau bersifat bekerja sama. Ketika kontrak dilanggar atau hak-hak individual dilanggar, tujuan utama adalah untuk memulihkan keadaan yang ada sebelumnya atau memberikan kompensasi daripada menghukum pelanggar. Hukum kontrak, hukum properti atau kepemilikan, dan hukum komersial adalah contoh dari hukum restitutif. Sanksi bertujuan

untuk memperbaiki kerusakan dan memulihkan fungsi normal hubungan sosial daripada untuk membalas dendam atau menegaskan kembali nilai-nilai kolektif.

Transisi dari Mekanik ke Organik

Durkheim melihat transisi dari solidaritas mekanik ke organik sebagai konsekuensi dari peningkatan kepadatan material dan moral masyarakat. Kepadatan material merujuk pada konsentrasi populasi dalam ruang geografis, sementara kepadatan moral merujuk pada intensitas interaksi dan komunikasi di antara anggota masyarakat. Ketika populasi tumbuh dan urbanisasi meningkat, kompetisi untuk sumber daya yang terbatas *intensifies* atau meningkat tajam. Pembagian kerja muncul sebagai respons adaptif atau penyesuaian terhadap kompetisi ini, memungkinkan individu untuk mengkhususkan diri dalam berbagai fungsi daripada bersaing langsung untuk sumber daya yang sama.

Proses ini analog atau serupa dengan diferensiasi dalam evolusi biologis. Darwin menunjukkan bahwa spesies yang berbeda dapat hidup berdampingan dalam ekosistem yang sama dengan mengisi ceruk ekologis yang berbeda. Demikian pula, dalam masyarakat manusia, pembagian kerja memungkinkan individu untuk hidup berdampingan dengan mengurangi kompetisi langsung melalui spesialisasi. Pengrajin, pedagang, petani, dan pendeta dapat semua berkembang dalam masyarakat yang sama karena mereka melakukan fungsi yang berbeda dan saling melengkapi.

Indonesia mengalami transisi ini secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir. Urbanisasi yang cepat, dengan jutaan orang berpindah dari desa ke kota, telah meningkatkan kepadatan material dan moral secara signifikan. Jakarta, misalnya, tumbuh dari sekitar 3 juta penduduk pada tahun 1970 menjadi lebih dari 10 juta di kota inti dan 30 juta di wilayah metropolitan pada tahun 2020-an. Peningkatan kepadatan ini memaksa spesialisasi dan pembagian kerja yang semakin kompleks, menggeser dominasi solidaritas mekanik berbasis komunitas desa menuju solidaritas organik berbasis interdependensi fungsional.

Namun, transisi ini bukan tanpa masalah. Durkheim mengakui bahwa pembagian kerja dapat menghasilkan bentuk-bentuk patologis atau tidak sehat yang menghambat solidaritas organik daripada mempromosikannya. Ia mengidentifikasi tiga bentuk utama pembagian kerja yang abnormal: (1) pembagian kerja anomik atau tanpa aturan jelas di mana kurangnya regulasi

menyebabkan konflik dan disintegrasi; (2) pembagian kerja yang dipaksakan di mana ketidakadilan dalam distribusi posisi sosial menghambat penempatan optimal individu; dan (3) koordinasi yang tidak memadai di mana bagian-bagian yang terspesialisasi tidak terintegrasi dengan baik.

Kritik dan Elaborasi

Teori Durkheim tentang solidaritas telah menerima kritik substansial dari berbagai perspektif. Kritikus berpendapat bahwa dikotomi atau pembagian dua antara mekanik dan organik terlalu sederhana dan tidak menangkap kompleksitas pengaturan sosial yang beragam. Masyarakat "sederhana" sering menunjukkan tingkat diferensiasi dan spesialisasi yang lebih besar daripada yang diakui Durkheim, sementara masyarakat "modern" mempertahankan elemen-elemen solidaritas mekanik dalam bentuk nasionalisme, identitas etnis, atau komitmen ideologis.

Penggunaan hukum sebagai indikator solidaritas juga telah dipertanyakan. Kritikus menunjukkan bahwa hubungan antara tipe hukum dan tipe solidaritas tidak sesederhana yang disarankan Durkheim. Masyarakat modern mempertahankan hukum represif yang signifikan, terutama dalam hukum pidana, sementara beberapa masyarakat tradisional menunjukkan mekanisme restitutif untuk menyelesaikan perselisihan. Selain itu, hukum mungkin mencerminkan kepentingan kelompok yang berkuasa daripada kesadaran kolektif masyarakat secara keseluruhan.

Teori konflik mengkritik Durkheim karena mengabaikan peran kekuasaan dan dominasi dalam membentuk solidaritas. Apa yang tampak sebagai konsensus atau kesepakatan moral mungkin sebenarnya merupakan hegemoni atau dominasi ideologis di mana kelompok dominan memaksakan nilai-nilai mereka pada yang subordinat atau yang dikuasai. Pembagian kerja mungkin tidak mencerminkan spesialisasi yang efisien berdasarkan bakat tetapi struktur kelas dan eksploitasi di mana beberapa kelompok memaksakan pekerjaan yang tidak diinginkan pada yang lain.

Meskipun kritik-kritik ini, kerangka Durkheim tetap berpengaruh untuk memahami perubahan sosial dan variasi dalam organisasi sosial. Peneliti kontemporer telah mengelaborasi dan memodifikasi teorinya untuk memahami fenomena seperti globalisasi, masyarakat jaringan, dan bentuk-bentuk baru interdependensi yang melampaui batas-batas nasional. Konsep solidaritas mekanik dan organik menyediakan titik awal yang berguna untuk

menganalisis bagaimana masyarakat mempertahankan kohesi dalam menghadapi diferensiasi dan perubahan yang meningkat.

5.3 Teori Tentang Bunuh Diri

Pendekatan Sosiologis terhadap Bunuh Diri

Studi Durkheim tentang bunuh diri, yang diterbitkan pada tahun 1897 sebagai *Le suicide: Étude de sociologie* atau Bunuh Diri: Studi Sosiologi, merupakan salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah sosiologi. Karya ini signifikan tidak hanya karena temuan substantifnya tentang bunuh diri tetapi juga sebagai demonstrasi metodologis tentang bagaimana fenomena yang tampaknya sangat individual dan psikologis dapat dijelaskan melalui analisis sosiologis yang sistematis. Durkheim memilih bunuh diri sebagai subjek studinya justru karena tampaknya merupakan tindakan yang paling individual dan personal, sehingga jika ia dapat menunjukkan bahwa bahkan bunuh diri memiliki determinan atau faktor penentu sosial, ini akan membuktikan kekuatan penjelasan sosiologis.

Durkheim mendefinisikan bunuh diri sebagai setiap kematian yang dihasilkan langsung atau tidak langsung dari tindakan positif atau negatif yang dilakukan oleh korban itu sendiri, yang ia tahu akan menghasilkan hasil ini. Definisi ini inklusif atau mencakup luas, mencakup tidak hanya tindakan aktif untuk mengakhiri hidup seseorang tetapi juga penolakan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan hidup, seperti penolakan makanan atau perawatan medis. Ini juga mencakup bunuh diri altruistik di mana seseorang mengorbankan diri mereka untuk tujuan yang lebih besar.

Pendekatan Durkheim adalah eksplisit anti-psikologis. Ia tidak menyangkal bahwa faktor-faktor psikologis seperti depresi, *despair* atau keputusasaan, atau gangguan mental dapat terlibat dalam kasus individual bunuh diri. Namun, ia berpendapat bahwa variasi dalam tingkat bunuh diri antar kelompok sosial, wilayah geografis, atau periode waktu tidak dapat dijelaskan oleh distribusi karakteristik psikologis individual. Jika bunuh diri sepenuhnya merupakan fenomena psikologis, tidak akan ada pola sosial yang sistematis dalam tingkat bunuh diri. Faktanya bahwa tingkat bunuh diri bervariasi secara teratur dengan faktor-faktor sosial menunjukkan bahwa ada kekuatan sosial yang mempengaruhi kecenderungan bunuh diri.

Relevansi studi Durkheim untuk Indonesia kontemporer sangat penting. Meskipun data bunuh diri di Indonesia masih terbatas karena stigma sosial dan religius yang kuat, penelitian menunjukkan bahwa tingkat bunuh diri

bervariasi secara sistematis dengan faktor-faktor sosial yang diidentifikasi Durkheim. Urbanisasi yang cepat, disintegrasi komunitas tradisional, dan krisis ekonomi berulang menciptakan kondisi yang mirip dengan yang diamati Durkheim di Eropa abad kesembilan belas.

Metodologi dan Data

Durkheim menggunakan metode komparatif dan data statistik untuk menganalisis pola bunuh diri di berbagai negara Eropa. Ia mengumpulkan data dari statistik resmi tentang bunuh diri yang dikumpulkan oleh pemerintah nasional dan menganalisis bagaimana tingkat bunuh diri bervariasi dengan berbagai faktor sosial seperti agama, status pernikahan, integrasi keluarga, kondisi ekonomi, dan periode perang versus damai. Penggunaan data statistik ini adalah inovatif untuk masanya dan menetapkan model untuk sosiologi kuantitatif atau sosiologi berbasis angka.

> "Durkheim melalui *Le Suicide* (1897) menunjukkan bahwa bunuh diri bukan sekadar fenomena psikologis individual, melainkan dipengaruhi faktor sosial. Dengan metode komparatif dan data statistik, ia membuktikan pola bunuh diri sistematis terkait integrasi sosial dan kondisi masyarakat."

Durkheim menggunakan metode eliminasi untuk menyingkirkan penjelasan alternatif non-sosiologis untuk bunuh diri. Ia secara sistematis menguji dan menolak penjelasan yang menghubungkan bunuh diri dengan faktor-faktor seperti penyakit mental, alkoholisme, ras, hereditas atau keturunan, iklim, atau imitasi atau peniruan. Untuk setiap penjelasan alternatif, ia menunjukkan bahwa distribusi faktor tersebut tidak berkorespondensi atau tidak sesuai dengan distribusi tingkat bunuh diri atau bahwa asosiasi yang tampak dapat dijelaskan oleh faktor sosial yang mendasari.

Misalnya, meskipun penyakit mental berkorelasi dengan bunuh diri pada tingkat individual, distribusi penyakit mental tidak menjelaskan variasi dalam tingkat bunuh diri antar kelompok sosial. Beberapa masyarakat dengan tingkat penyakit mental yang tinggi memiliki tingkat bunuh diri yang rendah, sementara yang lain dengan penyakit mental yang relatif rendah memiliki tingkat bunuh diri yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial

yang mempengaruhi tingkat bunuh diri beroperasi independen dari distribusi penyakit mental.

Tipe-Tipe Bunuh Diri

Berdasarkan analisis data, Durkheim mengidentifikasi empat tipe bunuh diri yang berkorespondensi dengan kondisi sosial yang berbeda: bunuh diri egoistik, altruistik, anomik, dan fatalistik. Setiap tipe dihasilkan oleh tingkat integrasi atau regulasi sosial yang berbeda.

Bunuh Diri Egoistik

Bunuh diri egoistik dihasilkan dari integrasi sosial yang terlalu lemah. Ketika individu tidak cukup terintegrasi ke dalam kelompok sosial, mereka kehilangan rasa tujuan dan makna yang berasal dari keanggotaan kolektif. Mereka menjadi terisolasi, *atomized* atau terpecah-pecah, dan egois dalam arti sosiologis yaitu terlalu fokus pada diri sendiri daripada pada tujuan kolektif. Kurangnya ikatan sosial meninggalkan mereka tanpa dukungan emosional atau moral yang melindungi terhadap keputusasaan.

Durkheim menemukan bahwa tingkat bunuh diri egoistik lebih tinggi di antara Protestan daripada Katolik, di antara orang yang tidak menikah daripada yang menikah, dan di antara individu tanpa anak dibandingkan dengan yang memiliki anak. Ia menjelaskan pola-pola ini dengan merujuk pada tingkat integrasi sosial yang berbeda. Protestantisme menekankan otonomi individual dan interpretasi pribadi terhadap kitab suci, yang mengurangi integrasi ke dalam komunitas religius dibandingkan dengan Katolikisme yang menekankan otoritas gereja dan ritual kolektif. Demikian pula, pernikahan dan keluarga mengintegrasikan individu ke dalam jaringan sosial yang memberikan dukungan dan tujuan.

Di Indonesia, bunuh diri egoistik dapat diamati dalam fenomena bunuh diri di kalangan mahasiswa atau pekerja muda di kota-kota besar yang mengalami isolasi sosial. Mereka yang bermigrasi dari desa ke kota untuk pendidikan atau pekerjaan sering kehilangan ikatan dengan komunitas asal tanpa berhasil membangun jaringan sosial baru yang kuat di kota. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat stres dan depresi lebih tinggi di antara pekerja migran yang tinggal sendiri dibandingkan dengan yang tinggal bersama keluarga atau komunitas etnis.

Bunuh Diri Altruistik

Bunuh diri altruistik adalah kebalikan dari egoistik dan dihasilkan dari integrasi sosial yang terlalu kuat. Ketika individu terlalu terintegrasi ke dalam kelompok, mereka kehilangan individualitas dan otonomi. Identitas mereka menjadi sepenuhnya didefinisikan oleh keanggotaan kelompok, dan mereka bersedia mengorbankan diri mereka untuk kepentingan kolektif. Bunuh diri altruistik terjadi ketika norma-norma kelompok mengharuskan atau sangat menghargai pengorbanan diri.

Contoh bunuh diri altruistik termasuk bunuh diri ritual dalam masyarakat tradisional, seperti *seppuku* atau *harakiri* di Jepang feodal di mana samurai melakukan bunuh diri ritual untuk mempertahankan kehormatan atau mengikuti tuan mereka dalam kematian. Dalam masyarakat modern, bunuh diri militer di mana tentara mengorbankan diri mereka dalam pertempuran untuk melindungi rekan-rekan mereka atau mencapai tujuan militer dapat dilihat sebagai bentuk bunuh diri altruistik. Durkheim menemukan bahwa tingkat bunuh diri lebih tinggi di militer daripada di populasi sipil, yang ia jelaskan dengan integrasi yang sangat kuat dan subordinasi atau penundukan individualitas terhadap tujuan kolektif dalam institusi militer.

Dalam konteks Indonesia, bunuh diri altruistik dapat ditemukan dalam beberapa kasus *bom bunuh diri* yang dilakukan oleh anggota kelompok radikal yang sangat terintegrasi ke dalam ideologi kelompok. Meskipun ini adalah fenomena yang kompleks dengan banyak dimensi politik dan psikologis, analisis Durkheimian membantu menjelaskan bagaimana integrasi yang sangat kuat ke dalam kelompok kecil dengan ideologi yang kaku dapat menyebabkan individu mengorbankan diri mereka untuk tujuan kolektif yang mereka anggap lebih besar dari kehidupan mereka sendiri.

Bunuh Diri Anomik

Bunuh diri anomik dihasilkan dari regulasi sosial yang tidak memadai. Anomie atau *anomia* merujuk pada kondisi di mana norma-norma sosial yang mengatur perilaku dan aspirasi lemah, tidak jelas, atau bertentangan. Tanpa regulasi normatif, keinginan individual menjadi tidak terbatas dan tidak dapat dipuaskan, mengarah pada frustrasi kronis dan keputusasaan. Ketika struktur normatif masyarakat runtuh atau berubah dengan cepat, individu kehilangan pedoman untuk perilaku dan aspirasi mereka.

Durkheim menemukan bahwa tingkat bunuh diri meningkat selama periode krisis ekonomi, baik depresi maupun *boom* atau lonjakan ekonomi yang tiba-

tiba. Kedua jenis gangguan ekonomi ini mengganggu regulasi normatif dengan menghancurkan ekspektasi yang mapan dan menciptakan ketidakpastian. Dalam depresi, orang kehilangan status dan sumber daya yang mereka anggap sebagai hak mereka, sementara dalam *boom*, mereka mengalami mobilitas ke atas yang cepat yang mengganggu hierarki yang mapan dan menciptakan aspirasi yang tidak realistis.

Bunuh diri anomik juga lebih tinggi dalam industri dan perdagangan dibandingkan dengan pertanian, yang Durkheim jelaskan dengan regulasi yang lebih lemah dalam sektor ekonomi yang dinamis. Di pertanian, siklus musiman dan tradisi yang mapan memberikan struktur dan prediktabilitas, sementara di industri dan perdagangan, perubahan yang cepat dan kompetisi menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian.

Indonesia mengalami kondisi anomik yang signifikan selama krisis ekonomi 1997-1998. Ketika ekonomi runtuh, jutaan orang kehilangan pekerjaan, nilai mata uang anjlok, dan banyak orang yang sebelumnya kelas menengah jatuh ke kemiskinan. Krisis ini disertai dengan peningkatan berbagai bentuk patologi sosial, termasuk bunuh diri, kekerasan, dan penyalahgunaan narkoba. Meskipun data statistik bunuh diri tidak lengkap, laporan dari berbagai rumah sakit dan organisasi kesehatan mental menunjukkan peningkatan kasus depresi dan upaya bunuh diri selama periode ini.

Bunuh Diri Fatalistik

Bunuh diri fatalistik adalah kebalikan dari anomik dan dihasilkan dari regulasi sosial yang berlebihan. Ketika individu terlalu diregulasi oleh norma-norma sosial yang *oppressive* atau menindas, mereka kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Regulasi yang ekstensif memblokir semua kemungkinan untuk perubahan atau peningkatan, mengarah pada keputusasaan dan bunuh diri. Durkheim memberikan sedikit perhatian pada tipe ini karena ia percaya bahwa itu relatif jarang dalam masyarakat modern, meskipun ia menyebutkan bunuh diri di antara budak atau orang yang dipenjara sebagai contoh potensial.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Teori Durkheim tentang bunuh diri memiliki implikasi teoretis yang mendalam untuk sosiologi. Pertama, ini mendemonstrasikan kekuatan penjelasan sosiologis dengan menunjukkan bahwa bahkan fenomena yang

tampaknya sangat individual memiliki determinan sosial yang dapat diidentifikasi dan diukur. Kedua, ini menegaskan pentingnya integrasi dan regulasi sosial untuk kesejahteraan individual. Terlalu banyak atau terlalu sedikit dari keduanya dapat berbahaya.

Ketiga, ini menunjukkan bahwa tingkat bunuh diri adalah indikator kesehatan moral masyarakat. Tingkat bunuh diri yang tinggi mengindikasikan patologi sosial, seperti disintegrasi, anomie, atau regulasi yang menindas. Keempat, ini menegaskan eksistensi realitas sosial yang *sui generis* yang beroperasi di atas dan di luar karakteristik individu. Kecenderungan bunuh diri adalah properti dari kelompok sosial, bukan hanya agregasi dari kecenderungan psikologis individual.

Dalam hal implikasi praktis, analisis Durkheim menunjukkan bahwa pencegahan bunuh diri memerlukan intervensi sosial, bukan hanya perawatan psikologis individual. Penguatan integrasi sosial melalui institusi seperti keluarga, komunitas religius, atau organisasi sipil, dan penyediaan regulasi normatif yang jelas tetapi tidak menindas, dapat mengurangi tingkat bunuh diri. Kebijakan yang mempromosikan kohesi sosial, mengurangi anomie ekonomi, dan memberikan dukungan untuk individu yang rentan dapat lebih efektif daripada fokus eksklusif pada faktor-faktor psikologis individual.

Kritik dan Perkembangan Selanjutnya

Studi Durkheim tentang bunuh diri telah menerima kritik substansial dari berbagai perspektif. Kritikus metodologis mempertanyakan keandalan statistik bunuh diri resmi yang digunakan Durkheim. Mereka berpendapat bahwa klasifikasi kematian sebagai bunuh diri versus kecelakaan atau kematian tidak ditentukan melibatkan interpretasi sosial yang dapat bervariasi antar wilayah atau periode dengan cara yang bias hasil. Kematian yang ambigu mungkin lebih mungkin diklasifikasikan sebagai bunuh diri dalam konteks sosial tertentu daripada yang lain.

Kritikus teoretis berpendapat bahwa kategori Durkheim terlalu kaku atau *rigid* dan tidak menangkap kompleksitas motivasi untuk bunuh diri. Dalam kasus individual, elemen egoistik, altruistik, dan anomik mungkin bercampur dengan cara yang tidak dapat dipisahkan dengan jelas. Selain itu, Durkheim mengabaikan dimensi gender dan bagaimana norma gender mempengaruhi bunuh diri. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa pola bunuh diri

sangat berbeda antara pria dan wanita, dengan pria lebih mungkin menyelesaikan bunuh diri tetapi wanita lebih mungkin mencoba bunuh diri.

Penelitian kontemporer tentang bunuh diri telah mengelaborasi dan memodifikasi kerangka Durkheimian. Studi telah mengkonfirmasi pentingnya integrasi dan regulasi sosial tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor tambahan seperti jaringan sosial, dukungan sosial, dan modal sosial atau *social capital*. Penelitian tentang bunuh diri dalam konteks berbeda seperti bunuh diri remaja, bunuh diri veteran militer, atau bunuh diri dalam kelompok okupasional atau pekerjaan tertentu sering menggunakan konsep Durkheimian sebagai titik awal.

5.4 Fakta Sosial dan Metode Sosiologi

Konsep Fakta Sosial

Dalam *Les règles de la méthode sociologique* atau Aturan-Aturan Metode Sosiologis (1895), Durkheim mengembangkan kerangka metodologis untuk sosiologi sebagai ilmu yang otonom. Kontribusi paling fundamental dalam karya ini adalah konsepnya tentang fakta sosial sebagai objek studi sosiologi yang distingtif atau khas. Dengan mendefinisikan fakta sosial dan menetapkan prinsip-prinsip untuk mempelajarinya, Durkheim berusaha untuk membebaskan sosiologi dari subordinasi terhadap filsafat, psikologi, atau ilmu alam dan memberikannya status sebagai disiplin ilmiah yang mandiri.

Durkheim mendefinisikan fakta sosial sebagai cara bertindak, berpikir, dan merasa yang eksternal terhadap individu dan memiliki kekuatan koersif atau memaksa yang dengan itu mereka memaksakan diri mereka padanya. Definisi ini memiliki tiga elemen kunci yang membedakan fakta sosial dari fenomena psikologis atau biologis: eksternalitas, koersivitas, dan generalitas.

Eksternalitas berarti bahwa fakta sosial ada di luar kesadaran individual. Mereka bukan produk dari psikologi individual tetapi dari masyarakat sebagai realitas kolektif. Ketika individu lahir, mereka menemukan sistem norma, nilai, institusi, dan praktik yang sudah ada dan yang mereka harus belajar dan internalisasi atau menjadikan bagian dari diri. Bahasa adalah contoh yang jelas dari eksternalitas: individu tidak menciptakan bahasa tetapi belajar menggunakannya dari masyarakat di mana mereka lahir. Struktur gramatikal, kosakata, dan konvensi linguistik adalah eksternal terhadap individu mana pun meskipun mereka harus menginternalisasikannya untuk berkomunikasi.

Dalam konteks Indonesia, bahasa nasional Bahasa Indonesia adalah fakta sosial yang jelas. Setiap individu Indonesia tidak menciptakan bahasa ini, tetapi menemukan dan harus mempelajarinya sebagai sistem yang sudah ada. Struktur gramatikal Bahasa Indonesia, dengan prefiks dan sufiks yang kompleks, kosakata yang berasal dari berbagai sumber (Melayu, Sanskrit, Arab, Belanda, Inggris), dan norma penggunaan formal versus informal, semuanya eksternal terhadap setiap individu tetapi harus dipelajari untuk berpartisipasi dalam masyarakat Indonesia.

Koersivitas merujuk pada kekuatan dengan mana fakta sosial mempengaruhi atau membatasi perilaku individual. Fakta sosial tidak hanya eksternal tetapi juga memaksakan diri mereka pada individu, baik melalui sanksi formal atau tekanan sosial informal. Ketika individu melanggar norma sosial, mereka menghadapi konsekuensi negatif seperti hukuman legal, penolakan sosial, atau cemoohan atau *ridicule*. Bahkan ketika tidak ada sanksi eksplisit, individu sering menyesuaikan diri dengan norma karena tekanan sosial atau internalisasi nilai-nilai.

Generalitas berarti bahwa fakta sosial tersebar luas dalam masyarakat dan tidak terbatas pada individu tertentu. Mereka adalah karakteristik dari kelompok atau masyarakat secara keseluruhan daripada dari individu tertentu. Tingkat bunuh diri, misalnya, adalah fakta sosial karena itu adalah properti dari kelompok sosial yang bervariasi secara sistematis dengan faktor-faktor sosial, bukan hanya agregasi dari keputusan individual.

Kategori Fakta Sosial

Durkheim mengidentifikasi berbagai kategori fakta sosial yang berbeda dalam tingkat kristalisasi atau pemadatan dan formalitas mereka. Beberapa fakta sosial, seperti hukum, regulasi administratif, atau dogma atau ajaran religius, sangat dikristalkan dan terlembagakan atau *institutionalized*. Mereka kodifikasi atau disusun secara eksplisit, diajarkan secara formal, dan ditegakkan oleh institusi khusus. Kategori fakta sosial ini relatif mudah diidentifikasi dan diukur karena mereka meninggalkan jejak material dalam bentuk teks legal, dokumen resmi, atau ritual formal.

Fakta sosial lainnya kurang dikristalkan dan lebih cair atau *fluid*. Norma informal, arus opini publik, mode sosial, atau sentimen kolektif adalah fakta sosial tetapi tidak dikodifikasi secara formal atau terlembagakan dengan cara yang sama. Mereka lebih sulit untuk mengidentifikasi dan mengukur tetapi tidak kurang real atau kuat dalam pengaruh mereka terhadap perilaku

individual. Durkheim menggunakan istilah "arus sosial" untuk merujuk pada fakta sosial yang lebih *ephemeral* atau sementara ini yang menyebar melalui masyarakat dan mempengaruhi sentimen dan tindakan kolektif.

> "Durkheim membedakan fakta sosial berdasarkan tingkat kristalisasi: ada yang terlembagakan seperti hukum dan agama, serta yang cair seperti opini publik. Fakta sosial, baik formal maupun informal, sama-sama memengaruhi perilaku individu dan menjaga reproduksi struktur sosial."

Institusi sosial merepresentasikan fakta sosial yang paling dikristalkan dan stabil. Institusi seperti keluarga, agama, sistem ekonomi, atau sistem politik adalah struktur sosial yang mapan yang mengorganisir perilaku di sekitar fungsi sosial tertentu. Mereka memiliki sejarah panjang, ditransmisikan dari generasi ke generasi, dan memiliki kekuatan koersif yang signifikan. Mempelajari institusi adalah kunci untuk memahami bagaimana masyarakat mempertahankan dirinya dan mereproduksi strukturnya dari waktu ke waktu.

Prinsip-Prinsip Metode Sosiologis

Durkheim menetapkan beberapa prinsip metodologis untuk studi fakta sosial yang menjadi fondasi untuk sosiologi sebagai ilmu empiris. Prinsip pertama dan paling terkenal adalah bahwa fakta sosial harus diperlakukan sebagai benda atau *things*. Ini berarti bahwa sosiolog harus mengadopsi sikap objektivitas dan eksternalitas terhadap fakta sosial, mempelajarinya sebagai fenomena yang independen dari konsepsi subjektif atau pengalaman personal peneliti. Seperti ilmuwan alam yang mempelajari objek fisik tanpa memproyeksikan sentimen personal mereka, sosiolog harus mempelajari fakta sosial tanpa memaksakan penilaian moral atau bias ideologis.

Prinsip ini tidak berarti bahwa fakta sosial adalah objek material dalam arti yang sama seperti batu atau tumbuhan. Fakta sosial adalah fenomena moral dan simbolik, tetapi mereka memiliki realitas objektif yang dapat diobservasi dan dianalisis secara sistematis. Memperlakukan mereka sebagai benda berarti mengenali bahwa mereka memiliki properti yang independen dari keyakinan individual kita tentang mereka dan bahwa properti-properti ini dapat diidentifikasi melalui observasi empiris.

Prinsip kedua adalah bahwa sosiolog harus menghindari prasangka atau *preconceptions* dan konsepsi akal sehat atau *common sense*. Banyak fenomena sosial tampak familiar dan dipahami dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, tetapi pemahaman akal sehat ini sering superfisial atau menyesatkan. Konsep seperti keluarga, agama, atau kejahatan tampak jelas dalam penggunaan sehari-hari, tetapi analisis sosiologis mengungkapkan bahwa mereka jauh lebih kompleks dan bervariasi daripada yang diasumsikan akal sehat. Sosiolog harus mendefinisikan konsep-konsep mereka dengan presisi dan menggunakan definisi ini secara konsisten dalam penelitian mereka.

Prinsip ketiga adalah bahwa fenomena sosial harus dijelaskan dengan merujuk pada faktor-faktor sosial lainnya, bukan pada karakteristik psikologis individu atau kondisi biologis. Ini adalah prinsip determinisme sosiologis yang menegaskan otonomi sosiologi sebagai disiplin. Ketika menjelaskan tingkat bunuh diri, misalnya, sosiolog harus mencari penyebab dalam kondisi sosial seperti integrasi atau regulasi daripada dalam patologi psikologis individual. Ini tidak berarti menyangkal peran faktor-faktor psikologis dalam kasus individual, tetapi menegaskan bahwa variasi dalam tingkat bunuh diri antar kelompok sosial memerlukan penjelasan sosiologis.

Prinsip keempat adalah penggunaan metode komparatif. Karena eksperimen langsung tidak mungkin atau etis dalam sosiologi, metode komparatif menyediakan alternatif untuk mengidentifikasi hubungan kausal atau *causal relationships*. Dengan membandingkan masyarakat atau kelompok sosial yang berbeda dalam hal faktor-faktor tertentu sambil mengendalikan yang lain, sosiolog dapat mengidentifikasi korelasi dan menguji hipotesis kausal. Durkheim menggunakan metode ini secara ekstensif dalam studinya tentang bunuh diri, membandingkan tingkat bunuh diri di berbagai negara, wilayah, kelompok religius, dan kategori demografis.

Prinsip kelima adalah perbedaan antara kondisi normal dan patologis dalam masyarakat. Durkheim berpendapat bahwa sosiolog dapat dan harus membedakan antara fakta sosial yang normal yang berkontribusi pada kesehatan dan stabilitas masyarakat, dan fakta sosial yang patologis yang mengindikasikan disfungsi atau penyakit sosial. Kriteria untuk normalitas adalah generalitas: fakta sosial yang tersebar luas dalam masyarakat pada tahap perkembangan tertentu adalah normal, sementara yang jarang atau abnormal adalah patologis. Namun, Durkheim juga mengakui bahwa beberapa tingkat patologi adalah normal dan bahkan fungsional untuk masyarakat, seperti kejahatan yang, dalam batas tertentu, berkontribusi pada evolusi moral dan hukum.

Kritik terhadap Reduksionisme

Bagian penting dari proyek metodologis Durkheim adalah kritiknya terhadap berbagai bentuk reduksionisme atau penyederhanaan dalam ilmu sosial. Reduksionisme psikologis berusaha menjelaskan fenomena sosial dengan merujuk pada karakteristik psikologis individu. Durkheim berpendapat bahwa pendekatan ini salah arah karena mengabaikan realitas *sui generis* dari fakta sosial. Masyarakat bukan hanya agregasi individu; ia memiliki properti *emergent* atau yang muncul yang tidak dapat direduksi menjadi psikologi individual.

Analogi Durkheim adalah dengan kimia: air memiliki properti yang berbeda dari hidrogen dan oksigen secara terpisah. Demikian pula, masyarakat memiliki properti yang *emergent* dari interaksi individu tetapi tidak dimiliki oleh individu secara terpisah. Kesadaran kolektif, norma sosial, atau institusi tidak dapat direduksi menjadi kepercayaan atau disposisi individual meskipun mereka melibatkan individu.

Durkheim juga mengkritik reduksionisme biologis yang berusaha menjelaskan fenomena sosial dengan merujuk pada faktor-faktor biologis seperti ras, hereditas, atau temperamen. Ia menunjukkan bahwa variasi dalam fenomena sosial seperti bunuh diri, kejahatan, atau bentuk keluarga tidak berkorespondensi dengan variasi biologis. Masyarakat yang berbeda dengan komposisi biologis yang sama menunjukkan pola sosial yang sangat berbeda, sementara masyarakat dengan komposisi biologis yang berbeda dapat menunjukkan pola sosial yang serupa.

Sosiologi sebagai Ilmu Moral

Meskipun Durkheim menekankan objektivitas dan metode ilmiah, ia juga melihat sosiologi sebagai ilmu moral dengan implikasi praktis untuk reformasi sosial. Memahami hukum-hukum yang mengatur kehidupan sosial memungkinkan intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah sosial dan mempromosikan kesejahteraan kolektif. Sosiologi dapat menginformasikan kebijakan pendidikan, reformasi hukum, atau intervensi ekonomi dengan memberikan pemahaman berbasis bukti tentang kondisi-kondisi untuk kohesi sosial dan kesejahteraan individual.

Namun, peran sosiologi tidak preskriptif atau mengatur dalam arti sempit. Sosiolog tidak dapat mendikte apa yang harus dilakukan masyarakat

berdasarkan preferensi personal atau komitmen ideologis mereka. Sebaliknya, mereka dapat mengidentifikasi konsekuensi dari berbagai pengaturan sosial, mengungkap kondisi-kondisi untuk normalitas sosial, dan memberikan pengetahuan yang menginformasikan keputusan kolektif. Sosiologi adalah ilmu moral dalam arti bahwa ia mempelajari fakta moral sebagai objek empiris dan dapat memberikan pedoman untuk tindakan moral yang didasarkan pada pemahaman kondisi sosial.

5.5 Agama dan Masyarakat

Pendekatan Sosiologis terhadap Agama

Karya terakhir dan paling ambisius Durkheim, *Les formes élémentaires de la vie religieuse* atau Bentuk-Bentuk Elementer Kehidupan Religius (1912), menyajikan teori komprehensif tentang agama dan implikasinya untuk pemahaman masyarakat, pengetahuan, dan moralitas. Durkheim memilih untuk mempelajari agama suku Aborigin Australia karena ia percaya bahwa mempelajari bentuk agama yang paling sederhana akan mengungkapkan elemen-elemen esensial dari semua agama. Dengan memahami agama dalam bentuk elementarnya, ia berharap untuk mengidentifikasi fungsi sosial universal dari agama dan mengungkap hubungan fundamental antara agama dan masyarakat.

Pendekatan Durkheim terhadap agama adalah sosiologis daripada teologis atau filosofis. Ia tidak tertarik pada kebenaran atau kekeliruan kepercayaan religius dalam arti metafisik atau filsafat tetapi pada realitas sosial yang mereka ekspresikan dan fungsi sosial yang mereka lakukan. Agama adalah real atau nyata bukan karena entitas supernatural atau makhluk adikodrati yang mereka postulasikan benar-benar ada, tetapi karena agama mengekspresikan realitas sosial yang sangat real dan memiliki efek yang sangat real pada perilaku individual dan kolektif.

Pendekatan Durkheim sangat berguna untuk memahami keragaman agama di Indonesia. Dengan enam agama yang diakui resmi (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu) serta ratusan kepercayaan lokal, Indonesia menawarkan laboratorium yang kaya untuk analisis sosiologis agama. Durkheim akan melihat keragaman ini bukan sebagai konflik kebenaran teologis tetapi sebagai berbagai cara di mana komunitas yang berbeda mengekspresikan solidaritas mereka dan mengorganisir kehidupan moral kolektif.

Definisi Agama

Durkheim mendefinisikan agama sebagai sistem terpadu dari kepercayaan dan praktik yang relatif terhadap hal-hal sakral, yaitu hal-hal yang dipisahkan dan dilarang, kepercayaan dan praktik yang menyatukan ke dalam satu komunitas moral tunggal yang disebut gereja, semua mereka yang mematuhinya. Definisi ini memiliki beberapa elemen kunci yang membedakan agama dari fenomena lain.

Pertama, agama melibatkan pembedaan fundamental antara sakral dan profan atau duniawi. Sakral merujuk pada hal-hal yang dipisahkan, dilindungi oleh larangan, dan diperlakukan dengan rasa hormat atau ketakutan khusus. Profan merujuk pada dunia sehari-hari dari aktivitas biasa dan objek yang tidak memiliki signifikansi religius khusus. Pembedaan ini adalah universal dalam semua agama meskipun apa yang dianggap sakral bervariasi antar masyarakat.

> "Durkheim dalam *Elementary Forms of Religious Life* menafsirkan agama sebagai fenomena sosial yang mengekspresikan solidaritas kolektif melalui pembedaan sakral-profane, ritual, dan komunitas moral. Agama dipahami bukan pada kebenaran metafisiknya, melainkan fungsi sosialnya, sebagaimana tercermin pula dalam keragaman praktik keagamaan di Indonesia."

Di Indonesia, pembedaan antara sakral dan profan sangat jelas dalam berbagai tradisi. Dalam Islam, masjid adalah ruang sakral yang memerlukan ritual pembersihan sebelum masuk, sementara pasar adalah ruang profan. Dalam Hindu Bali, kuil (*pura*) dan objek-objek ritual adalah sakral dan dilindungi oleh aturan ketat, sementara aktivitas ekonomi sehari-hari adalah profan. Bahkan dalam konteks modern, tempat-tempat seperti makam keramat atau situs bersejarah tertentu diperlakukan sebagai sakral dengan aturan perilaku khusus.

Kedua, agama bukan hanya kepercayaan tetapi juga praktik atau ritual. Kepercayaan mendefinisikan apa yang sakral dan profan, sementara praktik menetapkan bagaimana individu harus berhubungan dengan yang sakral. Ritual religius adalah tindakan kolektif yang membawa komunitas bersama-

sama untuk menghormati yang sakral dan menegaskan kembali ikatan sosial yang mengikat mereka.

Ketiga, agama adalah fenomena kolektif yang menyatukan individu ke dalam komunitas moral. Tidak ada agama yang murni individual; semua agama melibatkan komunitas orang percaya yang berbagi kepercayaan dan berpartisipasi dalam ritual bersama. Komunitas moral ini, yang Durkheim sebut gereja dalam arti luas, adalah esensi dari agama.

Totemisme dan Representasi Kolektif

Durkheim fokus pada totemisme atau sistem kepercayaan berbasis totem sebagai bentuk agama yang paling sederhana. Totemisme adalah sistem kepercayaan di mana klan atau kelompok sosial mengidentifikasi diri mereka dengan totem, biasanya hewan atau tumbuhan, yang dianggap sakral. Totem adalah simbol dari klan dan representasi dari kekuatan religius yang melindungi dan mendefinisikan kelompok. Anggota klan dilarang membunuh atau memakan totem mereka kecuali dalam upacara khusus, dan mereka melakukan ritual untuk menghormati totem.

Durkheim berpendapat bahwa totem bukan hanya simbol dari hewan atau tumbuhan tetapi simbol dari klan itu sendiri. Ketika anggota klan menyembah totem, mereka sebenarnya menyembah kekuatan kolektif dari masyarakat mereka sendiri. Kekuatan yang mereka rasakan dalam pengalaman religius adalah kekuatan real dari masyarakat yang melampaui dan membatasi individu. Dengan demikian, agama adalah cara di mana masyarakat menjadi sadar akan dirinya sendiri dan mengekspresikan realitasnya dalam bentuk simbolik.

Representasi kolektif adalah konsep kunci dalam teori Durkheim tentang agama. Representasi kolektif adalah konsep, simbol, atau ide yang dibagikan oleh anggota kelompok sosial dan yang mengekspresikan realitas kolektif. Mereka bukan representasi individual tetapi produk dari interaksi kolektif dan sentimen bersama. Totem adalah representasi kolektif yang paling fundamental, tetapi semua konsep religius seperti dewa, roh, atau kekuatan supernatural adalah representasi kolektif yang mengekspresikan berbagai aspek dari kehidupan sosial.

Dalam konteks Indonesia, konsep Durkheim tentang representasi kolektif dapat diterapkan untuk memahami simbol-simbol nasional. Garuda Pancasila, misalnya, berfungsi mirip dengan totem dalam analisis Durkheim. Garuda bukan hanya burung mitologis tetapi representasi kolektif dari

bangsa Indonesia, dengan lima sila yang terkandung dalam Pancasila mewakili nilai-nilai moral bersama yang mengikat masyarakat Indonesia yang beragam. Penghormatan terhadap simbol ini, seperti dalam upacara bendera setiap Senin pagi di sekolah-sekolah, adalah ritual kolektif yang memperkuat solidaritas nasional.

Fungsi Sosial Agama

Durkheim mengidentifikasi beberapa fungsi sosial penting dari agama. Pertama, agama memperkuat solidaritas sosial dengan membawa anggota masyarakat bersama-sama dalam ritual kolektif. Ketika individu berkumpul untuk melakukan upacara religius, mereka mengalami *effervescence* kolektif atau keadaan emosional yang intensif di mana mereka merasa terhubung dengan yang lain dan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Pengalaman kolektif ini memperkuat ikatan sosial dan menciptakan rasa kebersamaan yang mendasari kohesi sosial.

Di Indonesia, fungsi ini sangat jelas dalam ritual keagamaan besar seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, atau Waisak. Jutaan orang melakukan ritual bersama, menciptakan pengalaman kolektif yang memperkuat identitas komunitas dan solidaritas sosial. Tradisi mudik atau pulang kampung saat Lebaran, meskipun sering dilihat sebagai praktik budaya, sebenarnya adalah bentuk ritual kolektif yang memperkuat ikatan keluarga dan komunitas.

Kedua, agama memberikan kategori kognitif yang memungkinkan individu untuk memahami dan mengorganisir pengalaman mereka. Kategori-kategori fundamental seperti waktu, ruang, kausalitas, dan klasifikasi berasal dari organisasi sosial dan diekspresikan pertama kali dalam bentuk religius. Kalender religius, misalnya, mengorganisir waktu ke dalam periode sakral dan profan yang berkorespondensi dengan siklus aktivitas sosial. Klasifikasi objek natural ke dalam kategori mencerminkan pembagian sosial dari klan atau grup.

Ketiga, agama menyediakan sistem moral yang mengatur perilaku individual dan melegitimasi atau memberikan keabsahan pada norma sosial. Perintah moral sering diekspresikan dalam bentuk perintah religius yang berasal dari otoritas *divine* atau Tuhan. Dengan menyajikan norma moral sebagai sakral dan absolut, agama memberikan mereka otoritas yang lebih besar daripada jika mereka hanya dilihat sebagai konvensi sosial yang arbitrer atau sewenang-wenang. Moralitas dan agama sangat terkait erat dalam masyarakat tradisional; yang sakral dan yang moral adalah hampir identik.

Keempat, agama memberikan makna dan tujuan pada kehidupan individu dengan mengintegrasikan mereka ke dalam narasi kolektif yang lebih besar. Melalui mitos, ritual, dan simbol religius, individu menemukan tempat mereka dalam tatanan kosmis dan memahami hubungan mereka dengan generasi masa lalu dan masa depan. Agama memberikan jawaban terhadap pertanyaan eksistensial tentang asal-usul, tujuan, dan nasib yang tidak dapat dijawab oleh pengetahuan empiris saja.

Ritual dan Regenerasi Sosial

Ritual religius memainkan peran sentral dalam teori Durkheim tentang bagaimana masyarakat mempertahankan dan meregenerasi dirinya. Ritual adalah tindakan kolektif yang teratur dan berulang yang membawa komunitas bersama-sama untuk menghormati yang sakral. Melalui partisipasi dalam ritual, individu mengalami kembali *effervescence* kolektif yang memperkuat sentimen dan kepercayaan bersama yang mendasari solidaritas sosial.

Durkheim membedakan antara ritual positif dan negatif. Ritual positif melibatkan tindakan aktif untuk menghormati atau berkomunikasi dengan yang sakral, seperti pengorbanan, persembahan, atau doa. Ritual negatif melibatkan pantangan atau larangan yang memisahkan yang sakral dari yang profan, seperti tabu, puasa, atau *celibacy* atau hidup tanpa menikah. Kedua jenis ritual ini berfungsi untuk mempertahankan pembedaan antara sakral dan profan dan untuk memastikan bahwa yang sakral tetap dilindungi dari kontaminasi oleh yang profan.

Ritual *piacular* atau ritual dukacita adalah kategori khusus dari ritual yang terjadi selama masa krisis atau dukacita kolektif. Ketika masyarakat menghadapi bencana, kematian anggota yang penting, atau ancaman terhadap eksistensinya, ritual *piacular* memungkinkan ekspresi kolektif dari emosi negatif dan reafirmasi atau penegasan kembali solidaritas dalam menghadapi *adversity* atau kesulitan. Pemakaman, berkabung, atau ritual penebusan adalah contoh dari ritual *piacular* yang membantu masyarakat untuk mengatasi krisis dan memulihkan keseimbangan normalnya.

Asal-Usul Sosial Kategori Pemikiran

Salah satu kontribusi paling radikal dari Bentuk-Bentuk Elementer adalah teori Durkheim tentang asal-usul sosial dari kategori-kategori fundamental

pemikiran. Melawan tradisi filosofis yang melihat kategori seperti waktu, ruang, kausalitas, dan substansi sebagai bawaan atau universal, Durkheim berpendapat bahwa mereka berasal dari organisasi sosial dan diekspresikan pertama kali dalam bentuk religius.

Kategori ruang, misalnya, berasal dari organisasi spasial atau keruangan dari masyarakat. Dalam masyarakat Aborigin Australia, ruang dibagi ke dalam wilayah yang berkorespondensi dengan klan yang berbeda. Struktur spasial ini menjadi model untuk konsepsi kosmis atau alam semesta tentang ruang di mana seluruh alam semesta dibagi ke dalam wilayah yang berkorespondensi dengan pembagian sosial. Demikian pula, kategori waktu berasal dari ritme aktivitas sosial yang dikodifikasi dalam kalender religius yang mengorganisir tahun ke dalam periode sakral dan profan.

Kategori kausalitas berasal dari pengalaman kekuatan kolektif dalam ritual religius. Ketika individu berkumpul dalam upacara, mereka mengalami kekuatan yang melampaui individu dan yang tampaknya menghasilkan efek yang luar biasa. Pengalaman kekuatan kolektif ini menjadi model untuk konsep kausalitas sebagai hubungan di mana satu hal menghasilkan yang lain. Kategori substansi dan klasifikasi juga berasal dari struktur sosial dan cara di mana masyarakat mengorganisir dan mengklasifikasikan anggotanya.

Teori ini memiliki implikasi epistemologis atau berkaitan dengan teori pengetahuan yang mendalam. Jika kategori-kategori fundamental pemikiran berasal dari masyarakat, maka pengetahuan itu sendiri adalah produk sosial. Ini tidak berarti relativisme radikal di mana semua kepercayaan sama validnya. Sebaliknya, ini berarti bahwa pengetahuan selalu tertanam dalam konteks sosial dan bahwa kategori-kategori yang kita gunakan untuk memahami dunia dibentuk oleh pengalaman kolektif kita. Sosiologi pengetahuan, yang mempelajari kondisi-kondisi sosial dari produksi pengetahuan, menjadi bagian integral dari proyek sosiologis.

Agama dalam Masyarakat Modern

Durkheim mengakui bahwa agama tradisional mengalami penurunan dalam masyarakat modern karena sekularisasi dan rasionalisasi. Namun, ia tidak percaya bahwa agama akan menghilang sepenuhnya. Fungsi-fungsi sosial yang dilakukan oleh agama terlalu penting untuk ditinggalkan sepenuhnya. Masyarakat modern memerlukan alternatif sekular atau duniawi untuk agama yang dapat melakukan fungsi-fungsi yang sama dari memperkuat solidaritas, memberikan kategori kognitif, dan menyediakan sistem moral.

Durkheim melihat kemungkinan untuk "agama kemanusiaan" atau "kultus individu" di mana nilai-nilai humanistik seperti martabat manusia, hak individual, dan keadilan sosial menjadi sakral dan diperlakukan dengan rasa hormat yang sama seperti objek religius tradisional. Nasionalisme, dengan ritual-ritual sipilnya seperti peringatan nasional, *anthem* atau lagu kebangsaan, dan bendera, dapat melakukan beberapa fungsi dari agama dengan menciptakan sentimen kolektif dan solidaritas. Demikian pula, ideologi politik seperti sosialisme dapat berfungsi sebagai agama sekular yang menyediakan narasi tentang sejarah, visi masa depan, dan sistem nilai moral.

Indonesia pasca-kemerdekaan menunjukkan bagaimana Pancasila berfungsi sebagai semacam "agama sipil" dalam pengertian Durkheimian. Meskipun bukan agama dalam arti teologis, Pancasila memberikan nilai-nilai sakral yang mengikat bangsa yang beragam, ritual-ritual sipil seperti upacara bendera dan peringatan hari kemerdekaan, dan narasi kolektif tentang identitas nasional. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat modern menciptakan bentuk-bentuk sekular dari fungsi religius yang diidentifikasi Durkheim.

Namun, Durkheim juga memperingatkan terhadap bahaya dari sekularisasi yang tidak lengkap dan anomie moral. Ketika agama tradisional menurun tanpa penggantian yang memadai, masyarakat dapat mengalami krisis moral di mana individu kehilangan pedoman untuk perilaku dan makna. Masyarakat modern memerlukan rekonstruksi sistem moral yang dapat memberikan integrasi dan regulasi yang sebelumnya disediakan oleh agama tetapi yang kompatibel dengan kondisi modern dari rasionalitas ilmiah, pluralisme, dan individualisme.

5.6 Kontribusi Terhadap Sosiologi Modern

Warisan Metodologis

Kontribusi metodologis Durkheim yang paling bertahan adalah pembentukan sosiologi sebagai ilmu empiris dengan objek studi yang distingtif yaitu fakta sosial, dan metode yang rigoros untuk menyelidikinya. Desakan bahwa fenomena sosial harus dipelajari sebagai realitas objektif yang distingtif dari psikologi individual menetapkan otonomi sosiologi dan melegitimasi sebagai disiplin ilmiah. Ini membebaskan sosiologi dari subordinasi kepada filsafat, psikologi, atau sejarah dan memungkinkannya untuk mengembangkan kerangka teoretis dan metode penelitiannya sendiri.

Penekanannya pada penelitian empiris yang sistematis menggunakan data statistik adalah inovatif untuk masanya dan menetapkan model untuk sosiologi kuantitatif. Studi bunuh diri tetap menjadi teladan atau *exemplar* tentang bagaimana pertanyaan teoretis dapat dijawab melalui analisis yang sistematis dari data empiris. Metode-metodenya yang meliputi analisis komparatif, korelasi statistik, dan eliminasi penjelasan alternatif menjadi alat standar dalam penelitian sosiologis.

> "Durkheim mewariskan metodologi sosiologi modern dengan menetapkan fakta sosial sebagai objek studi independen dan menekankan penelitian empiris berbasis data statistik. Pendekatannya mengilhami fungsionalisme, memengaruhi Parsons, Merton, hingga antropologi Inggris, meski kemudian dikritik karena cenderung menekankan stabilitas dan mengabaikan konflik sosial."

Durkheim juga menetapkan pentingnya mempelajari indikator yang dapat diobservasi dan dapat diukur dari fenomena sosial yang mendasari daripada bergantung pada introspeksi atau spekulasi. Penggunaan kode hukum sebagai indikator dari tipe solidaritas, tingkat bunuh diri sebagai indikator dari integrasi sosial, dan praktik religius sebagai indikator dari kesadaran kolektif mendemonstrasikan bagaimana konsep sosiologis yang abstrak dapat dioperasionalisasi atau dibuat terukur untuk penelitian empiris.

Pengaruh pada Fungsionalisme

Karya Durkheim memberikan fondasi untuk perspektif fungsionalis yang mendominasi sosiologi Anglo-Amerika pada pertengahan abad kedua puluh. Penekanannya pada bagaimana institusi sosial berkontribusi pada pemeliharaan tatanan sosial, analisisnya tentang fungsi dari pembagian kerja, agama, dan institusi lainnya, dan keprihatinannya dengan integrasi sosial semuanya mempengaruhi perkembangan fungsionalisme struktural.

Talcott Parsons, proponens atau pendukung utama fungsionalisme struktural, sangat banyak mengambil dari Durkheim dalam mengembangkan teori sistemnya tentang masyarakat. Parsons mengadopsi tema-tema Durkheimian seperti pentingnya nilai-nilai bersama dalam mempertahankan tatanan sosial, peran sosialisasi dalam mengintegrasikan individu ke dalam

masyarakat, dan kontribusi fungsional dari berbagai institusi kepada pemeliharaan sistem. Karya Robert Merton tentang fungsi dan disfungsi juga merefleksikan pengaruh Durkheimian.

Antropologi sosial Inggris, khususnya karya A.R. Radcliffe-Brown dan Bronisław Malinowski, sangat dipengaruhi oleh analisis fungsionalis Durkheim. Radcliffe-Brown secara eksplisit mengadopsi pendekatan Durkheimian dalam mempelajari bagaimana institusi sosial dalam masyarakat tribal atau suku berkontribusi pada kohesi sosial. Studi antropologis tentang kekerabatan, agama, dan ritual dalam masyarakat tradisional sering menggunakan konsep dan metode Durkheimian.

Namun, fungsionalisme juga menghadapi kritik signifikan, banyak di antaranya berasal dari keterbatasan dalam pendekatan Durkheim sendiri. Kritikus berpendapat bahwa fungsionalisme cenderung menekankan konsensus dan stabilitas sambil mengabaikan konflik dan perubahan sosial. Penekanan pada bagaimana institusi berkontribusi pada pemeliharaan tatanan sosial dapat mengarah pada bias konservatif yang melegitimasi *status quo* atau keadaan yang ada dan mengabaikan ketidakadilan struktural. Kesulitan dalam menjelaskan perubahan sosial dan kecenderungan untuk terlibat dalam penalaran tautologis atau *tautological* atau berputar-putar yaitu menjelaskan keberadaan institusi dengan fungsinya adalah masalah metodologis yang persisten.

Pengaruh pada Sosiologi Pendidikan

Kontribusi Durkheim terhadap sosiologi pendidikan sangat substansial dan bertahan lama. Analisisnya tentang pendidikan sebagai mekanisme untuk transmisi nilai-nilai sosial dan integrasi individu ke dalam masyarakat menetapkan fondasi untuk pemahaman sosiologis tentang sistem pendidikan. Durkheim melihat pendidikan bukan hanya sebagai transmisi pengetahuan tetapi sebagai proses sosialisasi moral yang esensial untuk kohesi sosial.

Dalam *L'Évolution pédagogique en France* atau Evolusi Pedagogis di Prancis (1938) dan *Education and Sociology* atau Pendidikan dan Sosiologi (1922), Durkheim mengembangkan teori tentang bagaimana sistem pendidikan mencerminkan dan mereproduksi nilai-nilai dan struktur masyarakat. Dia berpendapat bahwa pendidikan melakukan fungsi vital dalam masyarakat modern yang kompleks dengan menciptakan homogenitas atau

keseragaman yang diperlukan untuk kehidupan kolektif sambil juga mengembangkan keragaman yang diperlukan untuk pembagian kerja.

"Durkheim memandang pendidikan sebagai mekanisme sosialisasi moral yang mentransmisikan nilai sosial, membentuk kesadaran kolektif, dan mengintegrasikan individu ke masyarakat. Pemikirannya memengaruhi teori reproduksi sosial, kurikulum tersembunyi, hingga analisis fungsi pendidikan dalam menjaga kohesi dan legitimasi struktur sosial."

Perspektif Durkheimian sangat relevan untuk memahami sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan nasional Indonesia, terutama sejak masa Orde Baru, secara eksplisit dirancang untuk melakukan fungsi integrasi nasional dengan mengajarkan Pancasila dan nilai-nilai nasional kepada siswa dari berbagai latar belakang etnis dan religius. Kurikulum nasional yang seragam, upacara bendera, dan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah contoh bagaimana pendidikan berfungsi untuk menciptakan kesadaran kolektif dan solidaritas nasional.

Perspektif Durkheimian telah mempengaruhi berbagai pendekatan dalam sosiologi pendidikan. Teori reproduksi sosial, yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu dan lainnya, meskipun lebih kritis, membangun di atas wawasan Durkheim tentang bagaimana pendidikan mentransmisikan dan melegitimasi struktur sosial yang ada. Penelitian tentang kurikulum tersembunyi atau *hidden curriculum*, sosialisasi sekolah, dan peran pendidikan dalam stratifikasi sosial semua menggemakan keprihatinan Durkheimian.

Sosiologi Pengetahuan dan Budaya

Karya Durkheim tentang kategori pemikiran dan asal-usul sosial dari pengetahuan memberikan kontribusi penting kepada sosiologi pengetahuan. Argumennya dalam Bentuk-Bentuk Elementer Kehidupan Religius bahwa kategori-kategori fundamental pemikiran manusia seperti ruang, waktu, kausalitas, dan klasifikasi berasal dari organisasi sosial adalah radikal untuk masanya. Ini menyarankan bahwa struktur kognitif itu sendiri dibentuk secara sosial daripada bersifat universal atau bawaan.

Perspektif ini mempengaruhi program kuat dalam sosiologi pengetahuan yang dikembangkan oleh David Bloor, Barry Barnes, dan lainnya di Universitas Edinburgh. Program ini menerapkan prinsip-prinsip Durkheimian untuk mempelajari pengetahuan ilmiah itu sendiri, berpendapat bahwa bahkan kebenaran ilmiah adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh konteks sosial dan kepentingan.

Analisis Durkheim tentang representasi kolektif juga mempengaruhi pemikiran tentang budaya dalam sosiologi. Konsep bahwa masyarakat menghasilkan sistem simbolik kolektif yang membentuk cara anggota memahami realitas telah menjadi pusat dalam berbagai pendekatan sosiologi budaya. Karya Mary Douglas tentang klasifikasi simbolik dan polusi atau *pollution*, misalnya, secara eksplisit membangun di atas kerangka Durkheimian.

Kritik dan Revisi

Meskipun pengaruhnya luas, karya Durkheim juga menghadapi kritik substansial yang telah mengarah pada revisi dan pengembangan lebih lanjut. Kritik-kritik utama mencakup:

Pertama, realisme sosial yang berlebihan. Kritikus berpendapat bahwa Durkheim memberikan realitas dan kekuasan kausal yang terlalu besar kepada masyarakat sebagai entitas yang terpisah dari individu yang menyusunnya. Ini dapat mengarah pada reifikasi atau penganggapan sebagai benda nyata konsep sosial dan mengabaikan agensi atau kemampuan bertindak individual serta kreativitas.

Kedua, pengabaian terhadap konflik. Penekanan Durkheim pada konsensus, solidaritas, dan integrasi cenderung mengabaikan peran konflik, kekuasaan, dan dominasi dalam kehidupan sosial. Teori Marxis dan konflik mengkritik perspektif Durkheimian karena gagal mengakui bahwa konsensus sering merupakan produk dari dominasi kelas daripada kesepakatan yang tulus.

Ketiga, konservatisme politik. Keprihatinan Durkheim dengan tatanan sosial dan stabilitas, bersama dengan penekanannya pada peran institusi dalam mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat, telah dikritik sebagai inheren atau secara alamiah konservatif. Kritikus berpendapat bahwa pendekatan ini cenderung melegitimasi pengaturan sosial yang ada dan menolak perubahan radikal.

"Karya Durkheim menuai kritik karena dianggap terlalu mereifikasi masyarakat, mengabaikan konflik dan dominasi, cenderung konservatif, deterministik, serta etnosentris. Revisi dan pengembangan lanjutan dilakukan untuk menyeimbangkan agensi individu, kompleksitas sosial, serta keragaman budaya dalam kerangka teorinya."

Keempat, determinisme sosial. Penekanan pada kekuatan koersif dari fakta sosial dapat mengarah pada gambaran yang terlalu deterministik tentang tindakan manusia yang mengabaikan kemampuan individu untuk menolak, menegosiasikan, atau mengubah struktur sosial.

Kelima, etnosentrisme atau pandangan berpusat pada etnis sendiri. Penggunaan Durkheim terhadap masyarakat primitif dan modern sebagai kategori telah dikritik sebagai evolusionis dan etnosentris. Dikotomi antara solidaritas mekanik dan organik dapat terlalu menyederhanakan keragaman pengaturan sosial dan memberlakukan model perkembangan Eropa sebagai universal.

Relevansi Kontemporer

Meskipun kritik-kritik ini, karya Durkheim tetap sangat relevan untuk sosiologi kontemporer. Beberapa area di mana pemikiran Durkheimian terus memberikan wawasan meliputi:

Kohesi sosial dalam masyarakat plural menjadi pertanyaan yang semakin mendesak. Dalam konteks meningkatnya keragaman etnis, religius, dan budaya di banyak masyarakat, pertanyaan Durkheim tentang apa yang menyatukan masyarakat tetap mendesak. Debat tentang multikulturalisme, integrasi imigran, dan nilai-nilai nasional sering menggemakan keprihatinan Durkheimian tentang keseimbangan antara keragaman dan solidaritas.

Anomie dan disintegrasi sosial tetap relevan. Konsep anomie tetap berguna untuk memahami fenomena kontemporer seperti fragmentasi sosial, alienasi dalam masyarakat konsumen, dan disintegrasi komunitas. Penelitian tentang bunuh diri, penyalahgunaan zat, dan masalah kesehatan mental sering menemukan korelasi dengan faktor-faktor yang Durkheim identifikasi seperti isolasi sosial, ketiadaan regulasi normatif, dan krisis dalam transisi sosial.

Ritual dan solidaritas kolektif masih penting. Analisis Durkheim tentang bagaimana ritual menciptakan dan mempertahankan solidaritas kolektif telah diterapkan pada berbagai fenomena kontemporer mulai dari festival musik dan acara olahraga hingga demonstrasi politik dan peringatan nasional. Karya Randall Collins tentang ritual interaksi secara eksplisit membangun di atas fondasi Durkheimian.

Moralitas dan regulasi sosial dalam era perubahan cepat. Dalam konteks globalisasi, teknologi digital, dan perubahan sosial yang cepat, pertanyaan tentang bagaimana moralitas dan regulasi sosial dipertahankan tetap sentral. Analisis Durkheim tentang hubungan antara moralitas individual dan tatanan sosial menawarkan kerangka untuk memahami tantangan etis kontemporer.

Dimensi sosial dari emosi dan kognisi terus dieksplorasi. Wawasan Durkheim tentang sifat sosial dari emosi dan kategori kognitif telah dihidupkan kembali dalam sosiologi emosi dan studi sosial tentang kognisi. Penelitian tentang bagaimana emosi dibentuk secara sosial dan bagaimana konteks sosial mempengaruhi pemikiran melanjutkan program Durkheimian.

Kesimpulan

Kontribusi Émile Durkheim terhadap sosiologi modern tidak dapat dilebih-lebihkan. Dia menetapkan sosiologi sebagai disiplin ilmiah yang otonom dengan objek studi yang distingtif dan metode yang rigoros. Konsep-konsep kuncinya seperti fakta sosial, solidaritas mekanik dan organik, anomie, kesadaran kolektif, dan representasi kolektif telah menjadi bagian dari leksikon atau kosakata sosiologis dan terus membentuk penelitian dan teori.

Meskipun aspek-aspek tertentu dari karyanya telah dikritik atau direvisi, kerangka teoretis fundamentalnya tetap vital. Pertanyaannya tentang apa yang menyatukan masyarakat, bagaimana tatanan sosial dimungkinkan, bagaimana moralitas dan pengetahuan dibentuk secara sosial, dan bagaimana perubahan sosial mempengaruhi kesejahteraan individual tetap menjadi pusat dari penyelidikan sosiologis. Warisan Durkheim terletak bukan hanya dalam jawaban spesifik yang dia berikan tetapi tetapi dalam pertanyaan yang dia ajukan dan dalam metode yang dia kembangkan untuk menyelidikinya secara sistematis.

Émile Durkheim berdiri sebagai salah satu arsitek utama sosiologi modern. Melalui kombinasi visi teoretis yang ambisius dan komitmen terhadap penelitian empiris yang rigoros, dia mentransformasi sosiologi dari spekulasi filosofis menjadi disiplin ilmiah yang mapan. Kontribusinya melampaui

pengembangan konsep-konsep individual atau temuan penelitian spesifik; dia menyediakan kerangka komprehensif untuk memahami masyarakat sebagai realitas *sui generis* dengan hukum-hukumnya sendiri yang dapat dipelajari secara sistematis.

"Durkheim menegaskan sosiologi sebagai disiplin ilmiah dengan konsep kunci seperti fakta sosial, solidaritas, anomie, dan kesadaran kolektif. Meski menghadapi kritik, kerangka teoretisnya tetap fundamental. Warisannya terletak pada pertanyaan besar tentang tatanan sosial, solidaritas, dan perubahan, yang relevan bagi sosiologi kontemporer termasuk konteks Indonesia."

Perjalanan intelektual Durkheim mencerminkan tantangan-tantangan kunci dari masanya yaitu transisi dari masyarakat tradisional ke modern, fragmentasi sosial yang dihasilkan oleh industrialisasi, sekularisasi institusi religius, dan pencarian fondasi baru untuk moralitas dan solidaritas sosial. Responsnya terhadap tantangan-tantangan ini tidak konservatif dalam arti reaktif, juga tidak radikal dalam arti revolusioner. Sebaliknya, dia berusaha untuk memahami secara ilmiah dinamika perubahan sosial dan mengidentifikasi kondisi-kondisi untuk tatanan sosial yang stabil dalam konteks modernitas.

Karya Durkheim tentang pembagian kerja menunjukkan bagaimana diferensiasi sosial yang meningkat, daripada menghancurkan solidaritas, dapat menciptakan bentuk baru dari interdependensi organik. Studinya tentang bunuh diri mendemonstrasikan bagaimana tindakan yang tampaknya paling individual sebenarnya dibentuk oleh kekuatan sosial yang dapat diidentifikasi dan diukur. Analisisnya tentang agama mengungkapkan bagaimana ritual kolektif dan representasi simbolik menciptakan dan mempertahankan kesadaran moral bersama yang mendasari kehidupan sosial. Melalui karya-karya ini, Durkheim menegaskan bahwa masyarakat adalah lebih dari sekadar agregasi individu, ia adalah realitas moral dan kognitif yang membentuk pengalaman, pemikiran, dan tindakan manusia.

Metodologi Durkheimian, dengan penekanannya pada memperlakukan fakta sosial sebagai benda, pada analisis komparatif, pada operasionalisasi konsep abstrak melalui indikator yang dapat diobservasi, dan pada penggunaan data

statistik untuk menguji hipotesis teoretis, menetapkan standar untuk penelitian sosiologis yang bertahan hingga hari ini. Desakan bahwa sosiologi harus ilmiah tidak berarti ia harus meniru metode ilmu alam secara mekanis, tetapi bahwa ia harus sistematis, empiris, dan rigorous dalam pendekatannya terhadap fenomena sosial.

Pengaruh Durkheim terhadap perkembangan sosiologi abad kedua puluh sangat mendalam. Fungsionalisme struktural, yang mendominasi sosiologi Anglo-Amerika selama beberapa dekade, mengambil banyak inspirasi dari tema-tema Durkheimian. Antropologi sosial, sosiologi pendidikan, sosiologi pengetahuan, dan studi tentang agama, budaya, dan moralitas semua menanggung jejak pemikiran Durkheimian. Bahkan perspektif teoretis yang mengkritik Durkheim seperti teori konflik, interaksionisme simbolik, dan etnometodologi sering mendefinisikan diri mereka dalam hubungan dengan posisi Durkheimian.

Tentu saja, karya Durkheim bukan tanpa keterbatasan. Penekanannya pada konsensus dan integrasi kadang-kadang mengabaikan realitas konflik dan dominasi. Realisme sosialnya dapat mengarah pada reifikasi masyarakat dan mengabaikan kompleksitas agensi individual dan negosiasi sosial. Kategori-kategorinya kadang-kadang terlalu dikotomis, dan evolusionismenya mencerminkan asumsi etnosentris dari masanya. Namun, pengakuan terhadap keterbatasan ini tidak mengurangi pencapaian fundamentalnya.

Yang paling penting, Durkheim menunjukkan bahwa sosiologi dapat menjadi lebih dari sekadar komentar sosial atau filosofi moral. Ia dapat menjadi ilmu yang rigorous yang mengungkapkan pola-pola tersembunyi dalam kehidupan sosial, menjelaskan fenomena yang membingungkan, dan memberikan wawasan tentang kondisi-kondisi untuk kesejahteraan individual dan kolektif. Dia mendemonstrasikan bahwa dimensi sosial dari kehidupan manusia seperti institusi, norma, nilai, solidaritas, dan representasi kolektif adalah real, konsekuensial, dan dapat dipelajari secara sistematis.

Dalam konteks sosiologi kontemporer, pertanyaan-pertanyaan Durkheimian tetap mendesak. Dalam dunia yang ditandai oleh globalisasi, migrasi massal, pluralisme budaya, fragmentasi digital, dan ketidakpastian ekonomi, pertanyaan tentang apa yang menyatukan masyarakat, bagaimana solidaritas sosial dimungkinkan dalam kondisi keragaman yang ekstrem, bagaimana moralitas dapat dipertahankan tanpa fondasi religius tradisional, dan bagaimana perubahan sosial yang cepat mempengaruhi kesejahteraan individual semuanya beresonansi dengan keprihatinan Durkheimian.

Untuk Indonesia khususnya, pemikiran Durkheim memberikan alat analitis yang berharga untuk memahami tantangan integrasi nasional dalam konteks keragaman yang luar biasa. Bagaimana masyarakat dengan lebih dari 700 bahasa daerah, ratusan kelompok etnis, dan berbagai agama dapat mempertahankan solidaritas nasional? Bagaimana urbanisasi yang cepat dan modernisasi mempengaruhi kohesi sosial dan kesejahteraan mental? Bagaimana ritual dan simbol nasional berfungsi untuk menciptakan kesadaran kolektif? Pertanyaan-pertanyaan ini, yang sentral bagi proyek pembangunan bangsa Indonesia, dapat didekati dengan produktif menggunakan kerangka Durkheimian.

Warisan Durkheim terletak tidak hanya dalam jawaban-jawaban spesifik yang dia tawarkan, banyak di antaranya memerlukan modifikasi atau elaborasi dalam cahaya perkembangan teoretis dan empiris selanjutnya, tetapi dalam pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan, dalam kerangka konseptual yang dia kembangkan untuk menyelidiki pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan dalam komitmen terhadap penyelidikan sosiologis yang ilmiah dan rigorous. Pemikiran Durkheimian, dengan penekanannya pada dimensi sosial dari kehidupan manusia dan pada hubungan kompleks antara individu dan masyarakat, tetap menjadi sumber daya vital untuk memahami dunia sosial kontemporer.

Ketika kita bergerak maju untuk mengeksplorasi tradisi-tradisi teoretis lainnya dalam sosiologi, kita akan sering menemukan dialog dengan tema-tema Durkheimian, kadang-kadang membangun di atasnya, kadang-kadang menantangnya, tetapi selalu mengakui signifikansi fundamentalnya untuk proyek sosiologis. Durkheim tidak hanya salah satu pendiri sosiologi; dia tetap menjadi salah satu interlocutor atau mitra dialog yang paling penting dalam diskusi sosiologis yang sedang berlangsung tentang sifat masyarakat, hubungan antara individu dan kolektif, dan kemungkinan-kemungkinan untuk pengetahuan ilmiah tentang kehidupan sosial.

Referensi Bab 5

Karya-Karya Utama Durkheim

Durkheim, É. (1893). *De la division du travail social*. Paris: Félix Alcan.
[Terjemahan Inggris: *The Division of Labor in Society*. Diterjemahkan oleh W.D. Halls. New York: Free Press, 1984.]

Durkheim, É. (1895). *Les règles de la méthode sociologique*. Paris: Félix Alcan. [Terjemahan Inggris: *The Rules of Sociological Method*. Diterjemahkan oleh W.D. Halls. New York: Free Press, 1982.]

Durkheim, É. (1897). *Le suicide: Étude de sociologie*. Paris: Félix Alcan. [Terjemahan Inggris: *Suicide: A Study in Sociology*. Diterjemahkan oleh J.A. Spaulding dan G. Simpson. New York: Free Press, 1951.]

Durkheim, É. (1912). *Les formes élémentaires de la vie religieuse*. Paris: Félix Alcan. [Terjemahan Inggris: *The Elementary Forms of Religious Life*. Diterjemahkan oleh Karen E. Fields. New York: Free Press, 1995.]

Durkheim, É. (1922). *Éducation et sociologie*. Paris: Félix Alcan. [Terjemahan Inggris: *Education and Sociology*. Diterjemahkan oleh Sherwood D. Fox. Glencoe, IL: Free Press, 1956.]

Durkheim, É. (1938). *L'évolution pédagogique en France*. Paris: Félix Alcan. [Terjemahan Inggris: *The Evolution of Educational Thought*. Diterjemahkan oleh Peter Collins. London: Routledge & Kegan Paul, 1977.]

Durkheim, É. (1950). *Leçons de sociologie: Physique des moeurs et du droit*. Paris: Presses Universitaires de France. [Terjemahan Inggris: *Professional Ethics and Civic Morals*. Diterjemahkan oleh Cornelia Brookfield. London: Routledge, 1992.]

Studi tentang Durkheim dan Karyanya

Alexander, J.C. (1982). *The Antinomies of Classical Thought: Marx and Durkheim*. Berkeley: University of California Press.

Bellah, R.N. (1973). *Émile Durkheim on Morality and Society*. Chicago: University of Chicago Press.

Bloor, D. (1976). *Knowledge and Social Imagery*. London: Routledge & Kegan Paul.

Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1977). *Reproduction in Education, Society and Culture*. Diterjemahkan oleh Richard Nice. London: Sage Publications.

Collins, R. (2004). *Interaction Ritual Chains*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Douglas, M. (1966). *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*. London: Routledge & Kegan Paul.

Giddens, A. (1971). *Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis of the Writings of Marx, Durkheim and Max Weber*. Cambridge: Cambridge University Press.

Giddens, A. (1977). Functionalism: Après la lutte. Dalam *Studies in Social and Political Theory*, hlm. 96-134. London: Hutchinson.

Jones, R.A. (1986). *Émile Durkheim: An Introduction to Four Major Works*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

Joppke, C., & Morawska, E. (Eds.). (2003). *Toward Assimilation and Citizenship: Immigrants in Liberal Nation-States*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

LaCapra, D. (1972). *Émile Durkheim: Sociologist and Philosopher*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Lukes, S. (1972). *Émile Durkheim: His Life and Work, A Historical and Critical Study*. London: Allen Lane.

Parsons, T. (1937). *The Structure of Social Action*. New York: McGraw-Hill.

Parsons, T. (1951). *The Social System*. Glencoe, IL: Free Press.

Pescosolido, B.A., & Georgianna, S. (1989). Durkheim, suicide, and religion: Toward a network theory of suicide. *American Sociological Review*, 54(1), 33-48.

Pickering, W.S.F. (1984). *Durkheim's Sociology of Religion: Themes and Theories*. London: Routledge & Kegan Paul.

Thompson, K. (1982). *Émile Durkheim*. London: Tavistock Publications.

Zeitlin, I.M. (1968). *Ideology and the Development of Sociological Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

BAB 6

MAX WEBER DAN SOSIOLOGI INTERPRETATIF

Pendahuluan

Max Weber (1864-1920) merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pembentukan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang independen dan metodologis yang ketat. Jika Marx memberikan kritik materialistis terhadap kapitalisme dan Durkheim mengembangkan pendekatan positivistik terhadap fakta sosial, Weber menawarkan perspektif yang berbeda: sosiologi interpretatif yang menekankan pemahaman makna subjektif dari tindakan sosial. Kontribusi Weber melampaui batas-batas sosiologi semata dan telah mempengaruhi perkembangan ilmu politik, ekonomi, sejarah, dan studi agama. Konsep-konsepnya tentang pemahaman interpretatif (*Verstehen*), tipe ideal, rasionalisasi, dan etika Protestan telah menjadi bagian integral dari kosakata ilmu sosial modern.

Signifikansi Weber dalam teori sosial terletak pada kemampuannya untuk mengembangkan pendekatan yang mengintegrasikan analisis struktural dengan pemahaman terhadap makna subjektif. Weber menolak baik determinisme ekonomi Marxisme maupun determinisme sosial Durkheimian, dengan berargumen bahwa tindakan sosial harus dipahami dalam konteks makna yang diberikan oleh pelaku sosial itu sendiri. Pendekatan interpretifnya mengakui kompleksitas motivasi manusia, peran ide dan nilai dalam membentuk tindakan sosial, dan pentingnya konteks historis serta kultural dalam memahami fenomena sosial. Weber tidak mencari hukum-hukum universal yang mengatur masyarakat, tetapi berupaya mengembangkan alat-alat konseptual yang dapat membantu memahami keragaman pengalaman sosial manusia.

Dalam konteks Indonesia, relevansi pemikiran Weber memiliki dimensi yang sangat kaya untuk memahami transformasi sosial, ekonomi, dan politik. Analisis Weber tentang rasionalisasi dan birokratisasi dapat menerangi perkembangan negara Indonesia modern dari periode kolonial hingga reformasi. Konsepnya tentang otoritas kharismatik, tradisional, dan legal-rasional memberikan kerangka untuk memahami dinamika kepemimpinan politik Indonesia, dari Soekarno hingga era demokrasi elektoral kontemporer. Studi Weber tentang hubungan antara etika agama dan perkembangan

ekonomi sangat relevan untuk memahami peran Islam dalam pembentukan etika bisnis dan ekonomi Indonesia, serta hubungan kompleks antara modernisasi dan nilai-nilai religius dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim (Hefner, 2000; Fealy & White, 2008).

Era Reformasi dan transformasi menuju ekonomi pasar yang lebih liberal telah menciptakan pertanyaan-pertanyaan Weberian tentang bagaimana nilai-nilai tradisional berinteraksi dengan rasionalitas ekonomi modern. Sarjana Indonesia kontemporer telah menggunakan kerangka Weberian untuk menganalisis fenomena seperti kebangkitan kelas menengah Muslim, peran jaringan bisnis berbasis etnis dalam ekonomi Indonesia, dan transformasi birokrasi negara dalam konteks desentralisasi dan demokratisasi. Pendekatan interpretatif Weber juga relevan untuk memahami keragaman kultural Indonesia dan bagaimana makna-makna lokal membentuk pengalaman modernisasi yang berbeda di berbagai wilayah nusantara.

> "Max Weber menegaskan sosiologi interpretatif yang menekankan pemahaman makna subjektif tindakan sosial, menolak determinisme, serta mengembangkan konsep Verstehen, tipe ideal, rasionalisasi, dan otoritas, berpengaruh luas hingga ilmu politik, ekonomi, dan studi agama."

Bab ini akan mengeksplorasi dimensi-dimensi kunci dari pemikiran Weber melalui enam bagian yang saling terkait. Pertama, penelusuran biografi intelektual Weber untuk memahami bagaimana konteks historis Jerman pada pergantian abad ke-20 dan pengalaman personalnya membentuk perkembangan pemikirannya. Kedua, analisis metodologi sosiologi interpretatif Weber, terutama konsep pemahaman interpretatif dan tipe ideal sebagai alat analitis. Ketiga, eksplorasi tipologi otoritas Weber yang membedakan antara otoritas tradisional, kharismatik, dan legal-rasional. Keempat, pendalaman tesis Weber tentang hubungan antara etika Protestan dan semangat kapitalisme. Kelima, kajian analisis Weber tentang rasionalisasi dan birokratisasi sebagai karakteristik fundamental masyarakat modern. Akhirnya, evaluasi warisan dan pengaruh Weber dalam perkembangan teori sosial kontemporer serta relevansinya untuk memahami masyarakat Indonesia modern.

Pemahaman yang mendalam tentang pemikiran Weber ini penting tidak hanya untuk penguasaan sejarah teori sosial klasik, tetapi juga untuk mengembangkan sensitivitas interpretatif terhadap kompleksitas tindakan sosial dan kemampuan untuk menganalisis bagaimana makna-makna subjektif membentuk struktur sosial objektif. Pendekatan Weber yang menghindari reduksionisme dan mengakui multidimensionalitas fenomena sosial memberikan model untuk analisis yang bernuansa dan kontekstual. Dalam era globalisasi di mana interaksi antara nilai-nilai lokal dan global menjadi semakin kompleks, kemampuan untuk memahami bagaimana pelaku sosial memberikan makna pada tindakan mereka dalam konteks budaya yang beragam menjadi semakin penting.

6.1 Biografi Intelektual Weber

Pemahaman terhadap biografi intelektual Max Weber (1864-1920) memberikan konteks penting untuk memahami kompleksitas dan keragaman kontribusinya pada teori sosial. Weber bukan hanya seorang sosiolog tetapi juga seorang ekonom, sejarawan, yuris, dan filsuf sosial yang karyanya mencakup spektrum yang sangat luas dari berbagai topik. Kehidupan intelektualnya berlangsung dalam periode transformasi dramatis di Jerman dan Eropa, dari unifikasi Jerman di bawah Bismarck hingga kehancuran akibat Perang Dunia I. Pengalaman personalnya dengan krisis psikologis yang mendalam juga membentuk karakteristik pemikirannya tentang makna, nilai, dan rasionalitas dalam masyarakat modern.

Latar Belakang dan Pendidikan

Max Weber lahir pada 21 April 1864 di Erfurt, Jerman, dalam keluarga borjuis kelas menengah atas yang memiliki koneksi politik dan intelektual yang kuat. Ayahnya, Max Weber Sr., adalah seorang birokrat dan politisi yang aktif dalam Partai Liberal Nasional, sementara ibunya, Helene Fallenstein Weber, adalah seorang wanita yang sangat religius dan berpendidikan dengan orientasi Calvinis yang kuat. Ketegangan antara pragmatisme politik ayahnya dan idealisme religius ibunya menciptakan atmosfer keluarga yang kompleks yang kemudian akan mempengaruhi pemikiran Weber tentang konflik antara nilai-nilai dalam masyarakat modern.

Weber memulai studinya di Universitas Heidelberg pada tahun 1882, dengan fokus pada hukum, sejarah, ekonomi, dan filsafat. Ia kemudian melanjutkan studi di Universitas Berlin, di mana ia terpapar pada tradisi sejarah hukum

Jerman dan ekonomi politik. Weber menyelesaikan disertasi doktoralnya pada tahun 1889 dengan judul "Sejarah Persekutuan Komersial pada Abad Pertengahan", yang menunjukkan ketertarikannya pada hubungan antara institusi hukum dan perkembangan ekonomi. Disertasi habilitasinya pada tahun 1891 berjudul "Sejarah Agraria Romawi dan Signifikansinya bagi Hukum Publik dan Privat", yang memperdalam analisisnya tentang relasi antara struktur ekonomi dan institusi hukum dalam konteks historis.

Pengaruh Intelektual dan Konteks Historis

Perkembangan intelektual Weber terjadi dalam konteks perdebatan metodologis yang intens dalam ilmu-ilmu sosial Jerman pada akhir abad ke-19. Perdebatan antara pendekatan nomotetik (yang mencari hukum-hukum umum seperti dalam ilmu alam) dan idiografik (yang menekankan keunikan fenomena historis dan kultural) membentuk pemikiran metodologis Weber. Dari sejarawan Wilhelm Dilthey, Weber mengadopsi ide tentang pemahaman interpretatif sebagai metode yang khas untuk ilmu-ilmu kemanusiaan, tetapi ia berupaya mengintegrasikannya dengan ketelitian analitis dan kemampuan perbandingan.

Ekonom sejarah seperti Gustav Schmoller dan Karl Knies dari Mazhab Sejarah Jerman memberikan pengaruh penting dalam membentuk pendekatan Weber yang menekankan konteks historis dan institusional dalam analisis ekonomi. Namun, Weber juga mengkritik historisisme yang ekstrem yang menolak generalisasi teoritis sama sekali. Ia berupaya menemukan jalan tengah antara historisisme partikularistik dan teori-teori universal abstrak melalui pengembangan konsep tipe ideal.

Karya filsuf neo-Kantian seperti Heinrich Rickert memberikan fondasi epistemologis untuk pendekatan Weber. Dari Rickert, Weber mengadopsi ide bahwa ilmu sosial melibatkan keterkaitan nilai dalam pemilihan objek studi, tetapi harus mempertahankan netralitas nilai dalam analisis itu sendiri. Pembedaan ini menjadi fundamental bagi konsepsi Weber tentang objektivitas dalam ilmu sosial. Konteks politik Jerman yang otoriter di bawah Kekaisaran Wilhelm II juga membentuk pemikiran politik Weber, yang mengombinasikan komitmen terhadap nilai-nilai liberal dengan skeptisisme terhadap demokrasi massa dan penekanan pada kepemimpinan yang kuat.

Krisis Personal dan Transformasi Intelektual

Pada tahun 1897, Weber mengalami konflik yang intens dengan ayahnya yang berakhir dengan perceraian emosional. Beberapa minggu kemudian, ayahnya meninggal sebelum ada rekonsiliasi, menciptakan trauma psikologis yang mendalam. Pada tahun 1898, Weber mengalami gangguan saraf yang parah yang membuatnya tidak mampu mengajar atau menulis selama hampir lima tahun. Periode krisis ini, yang melibatkan insomnia kronis, depresi, dan ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, merupakan pengalaman yang sangat menyakitkan tetapi juga transformatif.

Ketika Weber secara bertahap pulih dan kembali ke pekerjaan intelektual pada awal 1900-an, pemikirannya telah mengalami transformasi signifikan. Pengalaman pribadinya dengan irasionalitas penderitaan dan kerapuhan kondisi manusia memberikan dimensi eksistensial yang lebih dalam pada analisisnya tentang makna dan nilai dalam masyarakat modern. Karya-karya besar Weber seperti *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme* (1904-1905) dan esai-esai metodologisnya ditulis setelah periode krisis ini.

Karya-Karya Utama

Karya *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme* (Weber, 1905), yang pertama kali dipublikasikan sebagai dua artikel pada 1904-1905, merupakan karya Weber yang paling terkenal dan berpengaruh. Dalam karya ini, Weber berargumen bahwa etika asketis duniawi yang dikembangkan oleh Calvinisme memainkan peran penting dalam pembentukan mentalitas yang kondusif untuk perkembangan kapitalisme modern di Barat. Tesis ini menciptakan debat yang berlangsung hingga kini tentang hubungan antara agama dan ekonomi, dan mempresentasikan contoh khas dari pendekatan interpretatif Weber yang menekankan makna subjektif dan orientasi nilai.

Karya *Ekonomi dan Masyarakat* (Weber, 1978), merupakan karya Weber yang paling komprehensif dan sistematis, tidak diselesaikan pada saat kematiannya dan dipublikasikan secara postumus oleh istrinya Marianne Weber. Karya ini mencakup analisis Weber yang paling detail tentang konsep-konsep fundamental sosiologi, termasuk tipologi tindakan sosial, analisis otoritas dan dominasi, sosiologi hukum, sosiologi agama, dan teori tentang stratifikasi sosial. *Ekonomi dan Masyarakat* tetap menjadi teks referensi fundamental dalam sosiologi teoretis dan telah mempengaruhi generasi-generasi sosiolog setelahnya.

Karya-karya lain Weber termasuk esai-esai metodologis yang dikumpulkan dalam *Metodologi Ilmu-Ilmu Sosial* (Weber, 1904), studi komparatif tentang agama-agama dunia seperti *Agama Tiongkok* (Weber, 1920), *Agama India* (Weber, 1921), dan *Yudaisme Kuno*, serta esai-esai politik seperti "Politik sebagai Panggilan" dan "Ilmu sebagai Panggilan" yang dikumpulkan dalam *Dari Max Weber: Esai-esai dalam Sosiologi* (Gerth & Mills, 1946) yang memberikan refleksi mendalam tentang makna kehidupan intelektual dan politik dalam masyarakat modern yang mengalami penyihiran. Analisis biografis komprehensif tentang perkembangan intelektual Weber telah dilakukan oleh sejumlah sarjana terkemuka, termasuk studi mendalam Bendix (1977) yang menelusuri transformasi pemikiran Weber dalam konteks historis Jerman, serta karya Scaff (2011) yang mengeksplorasi pengalaman dan pengaruh Weber selama kunjungannya ke Amerika yang membentuk perspektifnya tentang modernitas dan kapitalisme.

Relevansi untuk Konteks Indonesia

Pendekatan biografis terhadap Weber menunjukkan bagaimana pengalaman personal, konteks historis, dan dialog intelektual membentuk perkembangan teori sosial. Dalam konteks Indonesia, pemahaman tentang bagaimana Weber mengintegrasikan berbagai tradisi intelektual—hukum, ekonomi, sejarah, sosiologi—memberikan model untuk pendekatan interdisipliner yang diperlukan untuk memahami kompleksitas masyarakat Indonesia. Penekanan Weber pada pentingnya memahami makna kultural dan konteks historis dalam analisis sosial sangat relevan untuk studi tentang Indonesia dengan keragaman etnis, religius, dan kulturalnya yang luar biasa.

6.2 Metodologi Sosiologi Interpretatif

Kontribusi metodologis Weber merupakan salah satu aspek paling orisinal dan berpengaruh dari pemikirannya. Weber mengembangkan pendekatan yang berupaya mengintegrasikan pemahaman interpretatif terhadap makna subjektif dengan ketelitian analitis dan kemampuan untuk generalisasi kausal. Metodologi Weber memberikan alternatif baik terhadap positivisme yang mereduksi fenomena sosial kepada pola-pola eksternal yang dapat diobservasi maupun terhadap historisisme ekstrem yang menolak kemungkinan generalisasi sama sekali.

Verstehen: Pemahaman Interpretatif

Konsep *Verstehen* atau pemahaman interpretatif merupakan fondasi dari metodologi sosiologis Weber. Weber mendefinisikan sosiologi sebagai "ilmu yang berupaya untuk pemahaman interpretatif dari tindakan sosial untuk mendapatkan penjelasan kausal dari jalannya dan efek-efeknya." Definisi ini mengindikasikan bahwa pemahaman interpretatif bukan alternatif terhadap penjelasan kausal tetapi merupakan langkah pertama yang esensial menuju penjelasan yang memadai.

Pemahaman interpretatif melibatkan upaya untuk memahami makna subjektif yang diberikan oleh pelaku sosial terhadap tindakan mereka. Ini memerlukan kemampuan untuk menempatkan diri dalam perspektif pelaku dan memahami orientasi nilai, motif, dan tujuan yang membimbing tindakan mereka. Weber membedakan antara pemahaman aktual atau langsung—seperti memahami bahwa seseorang sedang memotong kayu ketika kita melihatnya mengayunkan kapak—dan pemahaman eksplanatori atau motivasional yang berupaya memahami mengapa seseorang melakukan tindakan tersebut dalam konteks yang lebih luas dari tujuan dan nilai-nilai mereka.

Metode pemahaman interpretatif tidak berarti bahwa sosiolog harus menyetujui atau mengadopsi nilai-nilai yang dipahami, melainkan harus mampu merekonstruksi logika makna dari perspektif pelaku. Weber berargumen bahwa pemahaman interpretatif memberikan dimensi tambahan kepada penjelasan sosiologis yang tidak dapat dicapai melalui observasi eksternal semata. Namun, ia juga menekankan bahwa pemahaman interpretatif harus dikombinasikan dengan verifikasi kausal melalui metode komparatif dan historis. Pengembangan metodologi interpretatif Weber ini telah dielaborasi secara mendalam oleh sarjana kontemporer seperti Ringer (1997) yang menganalisis bagaimana Weber berhasil menyatukan ilmu-ilmu kultural dan sosial melalui pendekatan metodologisnya, serta Schluchter (1996) yang mengeksplorasi paradoks-paradoks modernitas dalam kerangka teori Weber tentang kultur dan tindakan sosial.

Tipe Ideal sebagai Alat Analitis

Konsep tipe ideal merupakan kontribusi metodologis Weber yang paling khas dan telah menjadi alat analitis fundamental dalam ilmu sosial. Tipe ideal adalah konstruksi mental yang mengaksentuasikan fitur-fitur tertentu dari fenomena sosial dengan cara yang tidak pernah ditemukan dalam bentuk

murni di realitas empiris. Tipe ideal bukan deskripsi dari realitas atau rata-rata statistik, melainkan "utopia" konseptual yang dibangun dengan menekankan satu atau lebih aspek dari realitas yang kompleks.

Weber menggunakan tipe ideal dalam berbagai analisisnya: tipologi otoritas (tradisional, kharismatik, legal-rasional), tipologi tindakan sosial (instrumental-rasional, nilai-rasional, afektif, tradisional), dan karakterisasi dari "semangat kapitalisme" atau "etika Protestan." Tipe-tipe ideal ini bukan hipotesis yang akan diuji tetapi alat heuristik untuk membandingkan dan menganalisis realitas empiris yang kompleks.

Fungsi tipe ideal adalah memberikan titik referensi yang jelas untuk perbandingan. Dengan membandingkan realitas empiris dengan tipe ideal, peneliti dapat mengidentifikasi deviasi, kombinasi, dan variasi yang terjadi dalam kasus-kasus spesifik. Tipe ideal memfasilitasi analisis komparatif lintas konteks historis dan kultural dengan memberikan kerangka konseptual yang jelas meskipun tidak pernah sepenuhnya terealisasi dalam praktik.

Netralitas Nilai dan Relasi Nilai

Weber mengembangkan posisi yang bernuansa tentang hubungan antara nilai dan ilmu sosial yang berupaya menavigasi antara positivisme naif yang mengklaim objektivitas sempurna dan relativisme yang menolak kemungkinan pengetahuan objektif. Weber membedakan antara keterkaitan nilai (*Wertbeziehung*) dan penilaian nilai (*Werturteil*). Keterkaitan nilai mengacu pada fakta bahwa pemilihan objek studi dan pertanyaan penelitian tidak dapat dihindari dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kepentingan peneliti. Tidak mungkin untuk mempelajari semua aspek realitas yang tak terbatas; peneliti harus memilih apa yang dianggap signifikan berdasarkan nilai-nilai tertentu.

Namun, setelah objek studi dan pertanyaan penelitian dipilih, analisis itu sendiri harus mempertahankan netralitas nilai. Peneliti harus berupaya untuk menganalisis fenomena sosial tanpa membiarkan penilaian nilai pribadi mereka mengkontaminasi analisis. Weber berargumen bahwa ilmu sosial tidak dapat memberitahu orang apa yang harus mereka nilai atau lakukan—pertanyaan-pertanyaan normatif memerlukan komitmen nilai yang berada di luar domain ilmu.

Posisi Weber tentang netralitas nilai telah menciptakan debat yang panjang dalam ilmu sosial. Kritikus berargumen bahwa pemisahan faktual dan normatif tidak mungkin sepenuhnya dicapai dalam praktik, sementara

pendukung melihatnya sebagai ideal regulatif yang penting untuk menjaga integritas ilmiah. Dalam konteks Indonesia, debat tentang objektivitas dan keterlibatan nilai dalam penelitian sosial tetap relevan, terutama dalam studi tentang isu-isu sensitif seperti agama, etnisitas, atau politik.

6.3 Tipologi Otoritas

Analisis Weber tentang otoritas dan dominasi merupakan salah satu kontribusi paling berpengaruh dan banyak digunakan dalam ilmu politik dan sosiologi. Weber mengembangkan tipologi tiga bentuk otoritas yang legitimate—tradisional, kharismatik, dan legal-rasional—yang memberikan kerangka untuk memahami berbagai bentuk kepemimpinan politik dan organisasi sosial. Tipologi ini telah menjadi alat analitis fundamental untuk studi tentang sistem politik, organisasi, dan perubahan sosial.

Otoritas Tradisional

Otoritas tradisional berdasarkan pada kepercayaan terhadap kesucian tradisi kuno dan legitimasi dari mereka yang memiliki otoritas berdasarkan tradisi tersebut. Dalam sistem otoritas tradisional, kepatuhan diberikan bukan kepada aturan impersonal tetapi kepada person yang menduduki posisi tradisional. Weber mengidentifikasi bentuk-bentuk otoritas tradisional seperti patriarkalisme, di mana otoritas kepala keluarga atas anggota rumah tangga diperluas ke organisasi politik yang lebih luas, dan patrimonialisme, di mana penguasa memperlakukan domain politik sebagai properti pribadi dan mendistribusikan posisi dan privilese berdasarkan favoritisme personal daripada kriteria merit yang impersonal.

Karakteristik kunci dari otoritas tradisional adalah bahwa ia berdasarkan pada preseden dan kebiasaan daripada aturan-aturan yang secara rasional diformulasikan. Administrasi dalam sistem tradisional cenderung bersifat personal dan arbitrer daripada birokratis dan terikat aturan. Inovasi dan perubahan sulit karena dianggap sebagai deviasi dari tradisi yang sakral. Namun, Weber juga mencatat bahwa dalam praktik, penguasa tradisional seringkali harus menavigasi ketegangan antara klaim tradisi dan kebutuhan untuk adaptasi terhadap kondisi yang berubah.

Dalam konteks Indonesia, otoritas tradisional tetap relevan untuk memahami struktur kepemimpinan di banyak komunitas lokal, terutama di daerah-daerah di mana institusi adat masih kuat. Sistem kepemimpinan tradisional

seperti sultan di Yogyakarta atau para raja lokal di berbagai daerah menunjukkan persistensi otoritas tradisional dalam konteks negara modern. Analisis tentang bagaimana otoritas tradisional berinteraksi dengan struktur legal-rasional negara modern memberikan pemahaman tentang kompleksitas tata kelola Indonesia.

Otoritas Kharismatik

Otoritas kharismatik berdasarkan pada devosi terhadap kesucian, kepahlawanan, atau karakter teladan yang luar biasa dari seorang individu dan dari pola normatif atau tatanan yang ia wahyukan atau tetapkan. Kharisma adalah kualitas personal yang dianggap sebagai luar biasa—seringkali dipercaya sebagai supernatural, superhuman, atau setidaknya secara khusus istimewa—yang membedakan individu dari orang biasa. Kharisma melibatkan pengakuan oleh pengikut, yang patuh bukan karena tradisi atau aturan legal tetapi karena keyakinan dalam kualitas luar biasa dari pemimpin.

Otoritas kharismatik bersifat fundamental revolusioner dalam hubungannya dengan otoritas tradisional dan legal-rasional karena ia menantang legitimasi tatanan yang mapan. Pemimpin kharismatik seringkali muncul dalam periode krisis ketika struktur otoritas yang ada tidak mampu menangani tantangan-tantangan yang mendesak. Namun, Weber mengidentifikasi problem fundamental dari otoritas kharismatik: ia secara inheren tidak stabil dan menghadapi krisis suksesi. Ketika pemimpin kharismatik meninggal, bagaimana karisma dapat ditransfer atau otoritas dipertahankan?

Weber mengembangkan konsep "rutinisasi karisma" untuk mendeskripsikan proses di mana otoritas kharismatik ditransformasikan menjadi bentuk-bentuk yang lebih stabil, baik tradisional atau legal-rasional. Proses ini melibatkan institusionalisasi dari pesan kharismatik, pembentukan hierarki administratif, dan transformasi dari gerakan yang spontan menjadi organisasi yang terstruktur. Rutinisasi adalah dilema yang tidak dapat dihindari: tanpanya, gerakan kharismatik tidak dapat bertahan, tetapi dengannya, karakter revolusioner dan luar biasa dari karisma melemah.

Dalam konteks Indonesia, konsep otoritas kharismatik sangat relevan untuk memahami kepemimpinan para pendiri bangsa seperti Soekarno dan bagaimana karisma personal mereka membentuk politik Indonesia pascakemerdekaan. Analisis tentang bagaimana karisma Soekarno dirutinisasi atau ditantang dalam periode Orde Lama dan transisi ke Orde

Baru memberikan aplikasi konkret dari konsep Weberian. Era Reformasi juga telah menyaksikan kemunculan figur-figur kharismatik baru dalam politik Indonesia, baik di level nasional maupun lokal, sebagaimana dianalisis oleh Aspinall (2010) dalam studinya tentang ironi kesuksesan demokrasi Indonesia dan Mietzner (2009) dalam kajiannya tentang politik militer, Islam, dan negara. Teori sosiologis Weberian tentang karisma dan rutinisasinya telah dielaborasi lebih lanjut oleh Collins (1986) yang mengembangkan kerangka analitis untuk memahami dinamika otoritas kharismatik dalam konteks modern.

Otoritas Legal-Rasional

Otoritas legal-rasional berdasarkan pada kepercayaan terhadap legalitas dari pola aturan normatif dan hak dari mereka yang ditinggikan ke otoritas di bawah aturan tersebut untuk mengeluarkan perintah. Dalam sistem legal-rasional, kepatuhan diberikan bukan kepada person tetapi kepada aturan-aturan yang secara impersonal ditetapkan. Administrasi dilakukan melalui birokrasi yang diorganisasi berdasarkan prinsip-prinsip rasional: hierarki yang jelas, spesialisasi fungsi, pengangkatan berdasarkan kualifikasi teknis, dan operasi berdasarkan aturan-aturan yang tertulis dan eksplisit.

Weber melihat otoritas legal-rasional sebagai bentuk yang karakteristik dari masyarakat modern dan secara inheren terhubung dengan proses rasionalisasi yang lebih luas. Birokrasi modern, dengan penekanan pada efisiensi teknis, prediktabilitas, dan kontrol melalui aturan, merepresentasikan perwujudan paling murni dari rasionalitas instrumental dalam organisasi. Namun, Weber juga sangat menyadari ambiguitas dan bahaya dari birokrasi, yang dapat menjadi "sangkar besi" yang membatasi kebebasan manusia dan mensubordinasikan nilai-nilai substantif kepada prosedur teknis.

Analisis Weber tentang otoritas legal-rasional dan birokratisasi akan dieksplorasi lebih detail dalam bagian selanjutnya tentang rasionalisasi. Yang penting untuk dicatat di sini adalah bahwa Weber tidak melihat transisi dari otoritas tradisional atau kharismatik ke legal-rasional sebagai proses yang linear atau tidak dapat dibalikkan. Dalam praktik, sistem politik modern seringkali menunjukkan kombinasi dari berbagai bentuk otoritas, dan pemahaman tentang interaksi kompleks ini penting untuk analisis politik yang bernuansa.

6.4 Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme

Tesis Weber tentang hubungan antara etika Protestan dan perkembangan kapitalisme modern merupakan salah satu argumen paling terkenal dan kontroversial dalam ilmu sosial. Dalam *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, Weber berupaya menunjukkan bahwa ide-ide religius tertentu—terutama doktrin Calvinis tentang takdir—memainkan peran kausal yang signifikan dalam pembentukan mentalitas ekonomi yang kondusif untuk kapitalisme rasional. Tesis ini merepresentasikan contoh khas dari pendekatan Weber yang menekankan pentingnya ide dan nilai dalam membentuk perkembangan sosial dan ekonomi.

Semangat Kapitalisme

Weber memulai dengan mengidentifikasi apa yang ia sebut semangat kapitalisme—orientasi psikologis dan etis yang khas yang menurutnya telah memainkan peran penting dalam perkembangan kapitalisme modern di Barat. Semangat ini berbeda dari sekadar nafsu memiliki atau keserakahan yang bersifat universal, tetapi melibatkan orientasi sistematis dan rasional terhadap aktivitas ekonomi sebagai panggilan hidup. Weber mengutip Benjamin Franklin sebagai contoh utama dari semangat ini, dengan pepatahnya seperti "waktu adalah uang" dan penekanan pada kerja keras, hemat, dan ketepatan waktu sebagai kebajikan.

Karakteristik kunci dari semangat kapitalisme adalah kombinasi paradoksal dari asketisme dan aktivitas duniawi. Individu dengan semangat kapitalis bekerja keras, mengakumulasi modal, tetapi tidak mengonsumsi kekayaan mereka dalam kemewahan atau waktu luang. Sebaliknya, mereka menginvestasikan kembali keuntungan mereka dan terus mengintensifkan aktivitas ekonomi mereka. Ini menciptakan etos dari "akumulasi sebagai tujuan pada dirinya sendiri"—pengejaran keuntungan menjadi tujuan daripada sarana untuk konsumsi atau kenikmatan.

Weber menekankan bahwa semangat kapitalisme ini bukan ekspresi alamiah dari sifat manusia tetapi memerlukan penjelasan historis. Bagaimana orientasi yang tampaknya tidak rasional ini—bekerja untuk akumulasi tanpa konsumsi—muncul dan menjadi norma kultural yang kuat? Jawaban Weber terletak pada transformasi religius yang terjadi dalam Reformasi Protestan, khususnya dalam Calvinisme.

Etika Calvinis dan Panggilan Duniawi

Kunci untuk tesis Weber adalah doktrin Calvinis tentang takdir: bahwa Tuhan telah menentukan sejak awal waktu siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan terkutuk, dan tidak ada yang dapat manusia lakukan untuk mempengaruhi nasib abadi mereka. Doktrin ini menciptakan kecemasan keselamatan yang mendalam di antara para penganut, yang sangat ingin mendapatkan tanda bahwa mereka termasuk dalam golongan terpilih.

Menurut Weber, solusi yang secara bertahap berkembang adalah doktrin tentang panggilan duniawi: bahwa kesuksesan dalam aktivitas duniawi adalah tanda dari anugerah ilahi dan keanggotaan dalam golongan terpilih. Ini mentransformasi kerja dari sekadar kebutuhan atau hukuman (dalam tradisi Katolik) menjadi kewajiban religius dan cara untuk memverifikasi status keselamatan. Pengejaran kesuksesan ekonomi yang intensif, sistematis, dan rasional menjadi imperatif religius.

Etika Protestan menurut Weber, menciptakan asketisme duniawi—kombinasi dari kerja keras, disiplin, dan penolakan terhadap konsumsi yang spontan sesuai dengan kebutuhan kapitalisme modern. Monastisisme Katolik telah mempraktikkan asketisme, tetapi terpisah dari dunia; asketisme Protestan membawa disiplin ini ke dalam aktivitas duniawi sehari-hari.

Yang krusial, Weber tidak berargumen bahwa Protestantisme menyebabkan kapitalisme dalam arti deterministik atau bahwa ini adalah satu-satunya atau bahkan penyebab utama. Sebaliknya, ia berargumen bahwa etika Protestan memainkan peran fasilitasi dalam perkembangan kapitalisme dengan memberikan sanksi kultural dan motivasi untuk perilaku ekonomi yang kondusif bagi akumulasi rasional. Ini adalah afinitas elektif antara ide-ide religius dan praktik ekonomi, bukan kausalitas mekanis yang simplistik.

Weber juga menekankan bahwa sekali semangat kapitalisme menjadi mapan, ia tidak lagi memerlukan fondasi religius. Dalam masyarakat modern, etika kerja dan akumulasi telah menjadi sekular dan dapat mempertahankan diri sendiri. Ini adalah apa yang Weber maksud dengan sangkar besi dari rasionalitas instrumental: orientasi yang awalnya berakar dalam makna religius telah menjadi murni instrumental dan rutinitas tanpa makna.

Kritik dan Debat

Tesis Weber telah menciptakan debat yang ekstensif dan berkelanjutan. Kritikus menunjukkan bahwa kapitalisme berkembang di wilayah non-

Protestan seperti Italia Utara yang Katolik sebelum Reformasi. Yang lain berargumen bahwa Weber melebih-lebihkan homogenitas etika Protestan atau meremehkan faktor-faktor material dalam perkembangan kapitalisme. Sejarawan ekonomi telah mempertanyakan interpretasi Weber tentang perkembangan ekonomi dan peran agama.

Namun, pembela Weber berargumen bahwa kritik seringkali salah memahami tesisnya. Weber tidak mengklaim bahwa Protestantisme adalah kondisi yang diperlukan atau cukup untuk kapitalisme, tetapi hanya bahwa ia memainkan peran fasilitasi dalam konteks spesifik Eropa Barat. Lebih luas, tesis Weber merepresentasikan contoh dari pendekatan yang menekankan pentingnya faktor kultural dan ideational dalam membentuk perkembangan ekonomi, memberikan penyeimbang penting terhadap penjelasan materialis.

Relevansi untuk Indonesia

Tesis Weber tentang hubungan antara etika religius dan perkembangan ekonomi sangat relevan untuk memahami Indonesia kontemporer. Pertanyaan tentang bagaimana Islam sebagai agama mayoritas membentuk orientasi ekonomi dan etika bisnis telah menjadi topik yang signifikan dalam kajian tentang Indonesia (Federspiel, 2001). Studi tentang ekonomi Islam dan keuangan etis dalam konteks Indonesia dapat dilihat sebagai kelanjutan dari pertanyaan-pertanyaan Weberian tentang agama dan ekonomi dalam konteks yang berbeda.

Perkembangan kelas menengah Muslim yang entrepreneurial di Indonesia dan munculnya jaringan bisnis Islam memberikan paralel yang menarik dengan tesis Weber. Penelitian telah menunjukkan bahwa interpretasi tertentu dari etika Islam dapat memberikan fungsi serupa dalam mempromosikan rasionalitas ekonomi dan etika bisnis sebagaimana yang Weber argumentasikan untuk etika Protestan dalam konteks Barat (Budiman, 2017). Namun, hubungan antara nilai-nilai Islam dan kapitalisme di Indonesia adalah kompleks dan diperdebatkan, dengan ketegangan antara prinsip-prinsip Islam dan praktik kapitalis yang murni instrumental (Tripp, 2006).

6.5 Rasionalisasi dan Birokratisasi

Konsep rasionalisasi merupakan kontribusi paling fundamental dan berjangkauan luas dari Weber kepada pemahaman tentang modernitas. Weber melihat rasionalisasi sebagai karakteristik yang mendefinisikan

peradaban Barat dan proses yang membentuk hampir semua aspek dari kehidupan modern: ekonomi, politik, hukum, administrasi, ilmu pengetahuan, seni, dan bahkan agama. Analisis Weber tentang rasionalisasi dan institusi emblematiknya, birokrasi, tetap sentral untuk debat kontemporer tentang modernitas, teknologi, dan organisasi.

Konsep Rasionalisasi

Weber mengidentifikasi berbagai bentuk rasionalitas. Rasionalitas instrumental mengacu pada kalkulasi tentang cara paling efisien untuk mencapai tujuan yang diberikan. Rasionalitas nilai mengacu pada tindakan yang berorientasi pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip etis absolut tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Masyarakat modern, menurut Weber, semakin didominasi oleh rasionalitas instrumental: kalkulasi tentang hubungan sarana-tujuan dan optimisasi efisiensi dan prediktabilitas.

Proses rasionalisasi melibatkan penyihiran dari dunia—eliminasi elemen-elemen magis, mistis, dan tradisional dari pemahaman dan penggantian mereka dengan pengetahuan yang sistematis, dapat dikalkulasi, dan teknis. Pandangan dunia religius yang memberikan makna dan tujuan semakin digantikan oleh pandangan dunia ilmiah yang memberikan pengetahuan teknis tetapi tidak makna ultimate. Ini menciptakan apa yang Weber gambarkan sebagai "dunia yang tersihir"—dunia yang secara teknis dikuasai tetapi tanpa makna.

Rasionalisasi termanifestasi dalam berbagai bidang. Dalam ekonomi, perkembangan pembukuan berpasangan, kalkulasi rasional tentang keuntungan, dan organisasi produksi berdasarkan efisiensi. Dalam hukum, formalisasi dan sistematisasi kode dan prosedur legal. Dalam administrasi, perkembangan birokrasi dengan aturan dan prosedur yang jelas. Dalam ilmu pengetahuan, perkembangan metode sistematis dan penelitian empiris. Dalam musik, perkembangan notasi musik dan sistem harmonik.

Weber ambivalen tentang rasionalisasi. Di satu sisi, ia mengakui kekuatan dan keuntungan yang luar biasa: peningkatan produktivitas, efisiensi, prediktabilitas, dan kontrol. Di sisi lain, ia sangat khawatir tentang biayanya: kehilangan makna, dominasi rasionalitas instrumental atas rasionalitas nilai, dan potensi untuk dehumanisasi. Metafora tentang sangkar besi menangkap ambivalensi ini: rasionalisasi telah menciptakan sangkar yang manusia bangun untuk diri mereka sendiri, memberikan keteraturan dan efisiensi tetapi juga membatasi kebebasan dan menghancurkan spontanitas.

Birokrasi sebagai Organisasi Rasional

Birokrasi modern adalah, untuk Weber, ekspresi paling murni dari rasionalitas instrumental dalam organisasi. Weber mengembangkan tipe ideal dari birokrasi dengan karakteristik sebagai berikut: hierarki yang tetap dari kantor-kantor; bidang yang didefinisikan dengan jelas dari kompetensi untuk setiap kantor; pengangkatan berdasarkan kualifikasi teknis yang diverifikasi melalui ujian; gaji yang tetap berdasarkan pangkat; pemisahan posisi resmi dari kehidupan pribadi; operasi berdasarkan aturan dan dokumen tertulis.

Weber berargumen bahwa birokrasi secara teknis superior terhadap semua bentuk administrasi lain dalam hal presisi, kecepatan, kontinuitas, dan efisiensi. Ia membandingkan birokrasi modern dengan mesin: "Aparatus birokratis yang sepenuhnya berkembang dibandingkan dengan organisasi lain persis seperti mesin dibandingkan dengan mode produksi non-mekanis." Efisiensi teknis yang superior dari birokrasi membuatnya hampir tidak terhindarkan dalam masyarakat massa modern.

Namun, Weber juga sangat khawatir tentang implikasi politik dan sosial dari birokratisasi. Konsentrasi pengetahuan ahli dalam birokrat menciptakan kekuasaan yang sangat besar yang dapat menolak kontrol demokratis. Etos birokratis dari mengikuti aturan dapat menghasilkan formalisme yang mengabaikan keadilan substantif atau kebutuhan manusia. Impersonalitas dari prosedur birokratis dapat menghasilkan dehumanisasi. Yang paling menakutkan, di tangan yang salah, birokrasi yang efisien dapat menjadi instrumen dominasi yang mengerikan—visi mimpi buruk Weber yang secara tragis terwujud dalam rezim totalitarian abad kedua puluh.

Dilema Modernitas Weberian

Analisis Weber tentang rasionalisasi mempresentasikan diagnosis yang sangat ambivalen tentang kondisi modern. Modernitas membawa manfaat material yang sangat besar dan kapabilitas teknis tetapi juga biaya spiritual dan bahaya politik. Rasionalitas instrumental yang mendominasi kehidupan modern memberikan efisiensi tetapi tidak makna atau tujuan. Penyihiran dari dunia membebaskan dari takhayul tetapi juga menghilangkan sumber-sumber makna dan nilai.

Weber tidak melihat jalan keluar dari sangkar besi yang jelas atau mudah. Ia skeptis tentang solusi revolusioner (yang kemungkinan menghasilkan tirani baru) dan kembali nostalgia ke masyarakat tradisional. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan politik yang kuat dan dipandu nilai sebagai penyeimbang potensial terhadap dominasi rasionalitas instrumental dan birokrasi, tetapi ia juga menyadari kesulitan dan bahaya dalam mengandalkan kepemimpinan.

Rasionalisasi dan Birokratisasi di Indonesia

Analisis Weber tentang rasionalisasi dan birokratisasi sangat relevan untuk memahami transformasi Indonesia modern. Perkembangan negara birokratis dalam periode kolonial dan kelanjutannya dalam Indonesia merdeka dapat dianalisis menggunakan kerangka Weberian. Studi telah menunjukkan bahwa birokrasi Indonesia menggabungkan elemen-elemen dari otoritas legal-rasional dengan praktik-praktik patrimonial, menciptakan bentuk hibrid yang Weber antisipasi dalam diskusinya tentang birokrasi patrimonial.

Era Orde Baru menyaksikan ekspansi dan penguatan masif dari birokrasi negara, dengan karakteristik yang baik modernisasi (standardisasi, formalisasi) maupun patrimonial (patronase, korupsi). Reformasi dan desentralisasi berikutnya telah menciptakan pertanyaan-pertanyaan baru tentang hubungan antara rasionalisasi birokratis dan akuntabilitas demokratis (Prasojo & Kurniawan, 2008; Dwiyanto, 2011). Analisis tentang bagaimana rasionalitas birokratis berinteraksi dengan nilai-nilai tradisional dan jaringan patronase dalam tata kelola Indonesia memberikan pemahaman penting tentang kompleksitas perkembangan administratif dalam konteks postkolonial (Thoha, 2008).

Transformasi ekonomi Indonesia dari periode kolonial hingga era Reformasi juga dapat dipahami melalui lensa Weberian tentang rasionalisasi ekonomi dan interaksinya dengan struktur kekuasaan. Studi tentang kebangkitan kapital di Indonesia (Robison, 1986), reorganisasi kekuasaan dalam era pasar (Robinson & Hadiz, 2004), dan transformasi masyarakat Indonesia (Wertheim, 1980) semuanya memberikan konteks untuk memahami bagaimana rasionalisasi ekonomi berinteraksi dengan struktur patrimonial dan patronase. Analisis tentang ekonomi politik Indonesia (King & Hadiwinata, 2013) menunjukkan kompleksitas dari proses modernisasi yang tidak mengikuti jalur linear yang diprediksi oleh teori modernisasi sederhana.

6.6 Warisan dan Pengaruh Weber

Warisan intelektual Weber dalam teori sosial kontemporer adalah mendalam dan multifaset. Sebagai salah satu pendiri sosiologi sebagai disiplin akademik, pengaruh Weber meluas ke hampir semua area ilmu sosial. Konsep, metode, dan pemikirannya telah membentuk perkembangan sosiologi politik, sosiologi ekonomi, teori organisasi, sosiologi agama, dan teori sosial secara umum. Namun, interpretasi dan aplikasi dari karya Weber telah bervariasi secara luas, kadang-kadang menghasilkan pembacaan yang sangat divergen.

Weber dalam Teori Sosiologi

Talcott Parsons, melalui terjemahan dan interpretasi karya Weber dalam *Struktur Tindakan Sosial* (1937), memperkenalkan Weber kepada sosiologi Anglo-Amerika dan membentuk pemahaman tentang Weber sebagai teoretikus tindakan yang berorientasi nilai dan integrasi sosial. Pembacaan Parsons menekankan aspek-aspek sistematis dan teoretis dari karya Weber, tetapi juga dituduh mengurangi penekanan pada konflik, kekuasaan, dan dimensi historis yang sentral untuk analisis Weber.

C. Wright Mills dan reinvensi sosiologi konflik dalam Amerika pasca-perang sangat mengandalkan tema-tema Weberian tentang birokrasi, kekuasaan, dan stratifikasi sosial. Analisis Mills tentang "elit kekuasaan" dalam masyarakat Amerika berhutang banyak pada analisis Weber tentang birokrasi dan konsentrasi kekuasaan. Teoretikus kritis Jerman seperti Jürgen Habermas terlibat secara mendalam dengan analisis Weber tentang rasionalisasi, mengembangkan kritik terhadap rasionalitas instrumental yang berpengaruh dalam teori sosial kontemporer.

Randall Collins mengembangkan sosiologi konflik neo-Weberian yang menekankan struktur organisasi, sistem kredensial, dan kelompok status sebagai sumber konflik sosial. Fokus mikro-sosiologis Collins pada ritual interaksi juga mengandalkan penekanan Weberian pada makna dan pemahaman subjektif. Sosiologi historis Michael Mann tentang sumber-sumber kekuasaan sosial menggunakan kerangka yang fundamental Weberian dalam penekanannya pada sumber dan bentuk kekuasaan yang multipel. Kontribusi teoretis ini menunjukkan bagaimana kerangka Weberian terus memberikan fondasi untuk analisis sosiologis kontemporer (Turner, 1992; Giddens, 1971).

Teori Organisasi dan Administrasi Publik

Analisis Weber tentang birokrasi telah menjadi fondasi untuk teori organisasi dan administrasi publik. Birokrasi legal-rasional berfungsi sebagai garis dasar atau tipe ideal terhadap mana organisasi aktual dibandingkan dan dianalisis. Perkembangan teori tentang budaya organisasi, organisasi informal, dan hubungan manusia dapat dilihat sebagai respons terhadap keterbatasan dari model birokratis murni Weberian.

Analisis kritis terhadap birokrasi—termasuk kritik feminis yang menyoroti sifat berdasarkan gender dari otoritas birokratis, kritik postkolonial yang menguji birokrasi sebagai instrumen dominasi kolonial, dan kritik postmodern yang menekankan kekuasaan disipliner—seringkali mengambil analisis Weber sebagai titik awal. Debat kontemporer tentang manajemen publik baru, privatisasi layanan pemerintah, dan hubungan antara efisiensi dan akuntabilitas terus terlibat dengan tema-tema Weberian tentang birokrasi dan rasionalisasi.

Sosiologi Agama dan Budaya

Studi komparatif Weber tentang agama-agama dunia menetapkan paradigma untuk analisis sosiologis tentang agama yang tetap berpengaruh. Penekanannya pada pemahaman pandangan dunia religius dari dalam, menganalisis hubungan antara etika religius dan perilaku ekonomi, dan menelusuri proses rasionalisasi dalam perkembangan religius telah menginspirasi generasi sarjana. Debat kontemporer tentang sekularisasi, fundamentalisme religius, dan hubungan antara agama dan modernitas terus terlibat dengan kerangka Weberian.

Sosiologi kultural yang dipengaruhi oleh Weber menekankan otonomi dan efektivitas kausal dari sistem simbolik dan makna. Sarjana seperti antropologi interpretatif Clifford Geertz dan sosiologi kultural Robert Bellah mengandalkan penekanan Weberian pada pemahaman makna dan nilai kultural sebagai esensial untuk menjelaskan fenomena sosial. Minat kontemporer dalam penciptaan makna, narasi, dan kerangka kultural mencerminkan kelanjutan dari tema-tema Weberian.

Kritik terhadap Weber

Weber telah menghadapi kritik substantif dari berbagai perspektif. Kritikus Marxis berargumen bahwa penekanan Weber pada ide dan budaya

mengabaikan fondasi material kehidupan sosial dan mengaburkan konflik kelas yang fundamental. Sarjana feminis mengkritik Weber untuk kebutaan gender dan kegagalan untuk secara memadai meneorikan patriarki dan ketidaksetaraan gender. Kritikus postkolonial menantang Eurosentrisme Weber dan asumsi tentang keunikan dan superioritas Barat.

Secara metodologis, kritikus mempertanyakan kelayakan pemahaman interpretatif, aplikabilitas tipe ideal, dan kemungkinan netralitas nilai. Beberapa berargumen bahwa pesimisme Weber tentang rasionalisasi adalah sepihak dan mengabaikan potensi emansipatoris dari modernitas. Yang lain berpendapat bahwa pembedaan antara berbagai tipe rasionalitas dan otoritas kurang jelas dalam praktik daripada dalam formulasi tipe-ideal.

Relevansi Weber untuk Indonesia Kontemporer

Dalam konteks Indonesia, kerangka Weberian tetap sangat relevan untuk menganalisis perkembangan kontemporer. Ketegangan antara rasionalisasi birokratis dan akuntabilitas demokratis, interaksi antara nilai-nilai religius dan modernisasi ekonomi, dan transformasi struktur otoritas dalam Indonesia pasca-otoritarian semuanya dapat dianalisis secara produktif menggunakan konsep-konsep Weberian. Studi tentang ekonomi Islam, reformasi birokrasi, kepemimpinan politik, dan masyarakat sipil di Indonesia semakin mengandalkan alat-alat analitis Weberian.

Kesimpulan

Eksplorasi komprehensif terhadap pemikiran Max Weber dalam bab ini telah mengungkapkan keluasan, kedalaman, dan relevansi berkelanjutan dari kontribusinya kepada teori sosial. Weber berdiri sebagai salah satu pendiri sosiologi sebagai disiplin dan salah satu pemikir paling berpengaruh dalam memahami modernitas. Kekhasan pendekatan Weber terletak pada kombinasi dari pemahaman interpretatif, analisis komparatif-historis, dan perhatian terhadap kompleksitas dan multidimensionalitas fenomena sosial.

Biografi intelektual Weber menunjukkan bagaimana pengalaman personal, konteks historis, dan dialog intelektual membentuk perkembangan teorinya. Krisis yang ia alami secara personal memberikan kedalaman pada analisisnya tentang makna, nilai, dan dilema eksistensi modern. Keluasan kajiannya—mencakup hukum, ekonomi, agama, politik, dan budaya—mencerminkan visi sintetis yang langka dalam dunia akademik yang semakin terspesialisasi.

Metodologi sosiologi interpretatif Weber, dengan penekanan pada pemahaman interpretatif dan tipe ideal, memberikan alternatif terhadap pendekatan positivistik yang mereduksi fenomena sosial kepada pola eksternal dan pendekatan historisis murni yang menolak generalisasi. Insistensi Weber pada pemahaman makna subjektif sambil mempertahankan ketelitian analitis dan cakupan komparatif telah terbukti sangat berpengaruh dan terus membentuk penelitian kualitatif dalam ilmu sosial.

Tipologi otoritas Weber—tradisional, kharismatik, dan legal-rasional—tetap menjadi alat fundamental untuk menganalisis sistem politik, kepemimpinan, dan bentuk organisasi. Pengakuan bahwa berbagai bentuk otoritas yang legitimate hidup berdampingan dan berinteraksi dengan cara-cara kompleks dalam masyarakat aktual memberikan kerangka bernuansa untuk analisis politik yang menghindari penyederhanaan berlebihan.

"Max Weber menegaskan sosiologi interpretatif yang menekankan pemahaman makna subjektif tindakan sosial, menolak determinisme, serta mengembangkan konsep Verstehen, tipe ideal, rasionalisasi, dan otoritas, berpengaruh luas hingga ilmu politik, ekonomi, dan studi agama."

Tesis Weber tentang etika Protestan dan kapitalisme, meskipun kontroversial, mendemonstrasikan kekuatan pendekatan interpretifnya dalam menunjukkan bagaimana ide-ide religius dapat memiliki efek kausal yang signifikan pada perkembangan ekonomi. Lebih luas, tesis mengilustrasikan komitmen Weber terhadap penjelasan multikausal yang mengakui peran baik faktor material maupun ide dalam membentuk perkembangan historis.

Analisis tentang rasionalisasi dan birokratisasi berdiri sebagai kontribusi paling mendalam Weber kepada pemahaman modernitas. Pengakuan bahwa rasionalisasi membawa baik penguasaan teknis maupun biaya spiritual, baik efisiensi maupun dehumanisasi, menangkap ambivalensi fundamental dari kondisi modern. Metafora Weber tentang sangkar besi tetap menjadi gambaran yang kuat untuk dilema yang terus kita hadapi dalam dunia yang semakin terasionalisasi.

Dalam konteks Indonesia, kerangka Weberian memberikan alat-alat berharga untuk memahami kompleksitas masyarakat Indonesia. Interaksi

antara berbagai bentuk otoritas, peran etika religius dalam perkembangan ekonomi, proses rasionalisasi birokratis, dan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan rasionalitas modern semuanya dapat diterangi menggunakan konsep-konsep Weberian. Relevansi berkelanjutan dari karya Weber mencerminkan baik universalitas pertanyaan yang ia ajukan tentang modernitas maupun fleksibilitas alat-alat analitis yang ia kembangkan.

Untuk mahasiswa S1 dan S2, terlibat dengan karya Weber mengembangkan keterampilan analitis yang krusial: kemampuan untuk memahami fenomena sosial dari berbagai perspektif, sensitivitas terhadap makna dan nilai yang memandu tindakan, apresiasi terhadap konteks historis, dan kapasitas untuk perbandingan sistematis. Kecanggihan metodologis Weber, nuansa teoretis, dan keluasan substantif menjadikan karyanya komponen esensial dari pendidikan dalam ilmu sosial.

Dalam era yang ditandai oleh perubahan teknologi yang cepat, globalisasi, dan konflik kultural, pertanyaan-pertanyaan Weber tentang rasionalisasi, makna, nilai, dan berbagai bentuk otoritas tetap sangat relevan. Karyanya terus menantang kita untuk berpikir dengan hati-hati tentang biaya dan manfaat dari modernitas, hubungan antara efisiensi dan kemanusiaan, dan kemungkinan untuk mempertahankan nilai-nilai yang bermakna dalam dunia yang semakin terasionalisasi.

Referensi Bab 6

Aspinall, E. (2010). The irony of success. *Journal of Democracy*, 21(2), 20-34.

Bendix, R. (1977). *Max Weber: An intellectual portrait*. University of California Press.

Budiman, A. (2017). Etika Islam dan etos kerja dalam masyarakat Minangkabau. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(1), 89-108. https://doi.org/10.14421/jsr.2017.120106

Collins, R. (1986). *Weberian sociological theory*. Cambridge University Press.

Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama.

Fealy, G., & White, H. (Eds.). (2008). *Expressing Islam: Religious life and politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.

Federspiel, H. M. (2001). *Islam and ideology in the emerging Indonesian state*. Brill.

Gerth, H. H., & Mills, C. W. (Eds.). (1946). *From Max Weber: Essays in sociology*. Available: https://archive.org/details/frommaxweberessa00webe

Giddens, A. (1971). *Capitalism and modern social theory: An analysis of the writings of Marx, Durkheim and Max Weber*. Cambridge University Press.

Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.

Kalberg, S. (2021). *Max Weber's sociology: A research guide*. Polity Press.

King, D. Y., & Hadiwinata, B. S. (2013). *The political economy of Indonesia*. Praeger.

Mietzner, M. (2009). *Military politics, Islam, and the state in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.

Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi birokrasi dan *good governance*: Kasus *best practices* dari sejumlah daerah di Indonesia. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 15(1), 1-10. Available: http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/

Ringer, F. (1997). *Max Weber's methodology: The unification of the cultural and social sciences*. Harvard University Press.

Robinson, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. RoutledgeCurzon.

Robison, R. (1986). *Indonesia: The rise of capital*. Allen & Unwin.

Scaff, L. A. (2011). *Max Weber in America*. Princeton University Press.

Schluchter, W. (1996). *Paradoxes of modernity: Culture and conduct in the theory of Max Weber*. Stanford University Press.

Thoha, M. (2008). Birokrasi Indonesia dalam era globalisasi. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 15(3), 195-205.

Tripp, C. (2006). *Islam and the moral economy: The challenge of capitalism*. Cambridge University Press.

Turner, B. S. (1992). *Max Weber: From history to modernity*. Routledge.

Weber, M. (1904). *The methodology of the social sciences*. Available: https://archive.org/details/methodologyofsoc00webe

Weber, M. (1905). *The Protestant ethic and the spirit of capitalism* (T. Parsons, Trans.). Available: https://www.marxists.org/reference/archive/weber/protestant-ethic/

Weber, M. (1920). *The religion of China*. Free Press.

Weber, M. (1921). *The religion of India*. Free Press.

Weber, M. (1946). *From Max Weber: Essays in sociology* (H. H. Gerth & C. W. Mills, Eds. & Trans.). Oxford University Press.

Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.

Weber, M. (2006). *Sosiologi* (Terjemahan). Pustaka Pelajar.

Wertheim, W. F. (1980). *Indonesian society in transition: A study of social change*. Van Hoeve.

BAGIAN III

TRANSISI DAN PERKEMBANGAN AWAL ABAD KE-20

BAB 7

GEORG SIMMEL DAN TRANSISI AWAL ABAD 20

Pendahuluan

Georg Simmel (1858-1918) menandai momen transisi krusial dalam sejarah pemikiran sosiologis, menggeser fokus dari analisis struktur makro masyarakat menuju pemahaman mendalam tentang interaksi sosial tingkat mikro dan bentuk-bentuk hubungan antarmanusia. Kontribusinya yang unik terletak pada pengembangan sosiologi formal yang mengkaji pola-pola universal dalam kehidupan sosial, terlepas dari konteks historis atau budaya spesifik yang melingkupinya. Pendekatan inovatif Simmel membuka jalan bagi berbagai tradisi sosiologis abad ke-20, mulai dari interaksionisme simbolik hingga teori jaringan sosial, dari studi kehidupan urban hingga analisis budaya konsumen.

Bab ini mengeksplorasi kontribusi fundamental Simmel dalam membentuk transisi sosiologi menuju abad ke-20 melalui enam dimensi utama. Pertama, konsep sosiologi formal dan metode analisisnya yang revolusioner, termasuk pemisahan antara bentuk dan isi interaksi sosial, geometri sosial, serta analisis triadik yang membedakan dinamika kelompok dua orang dengan kelompok tiga orang. Kedua, perspektif baru tentang konflik, kompetisi, dan dinamika sosial yang melihat konflik bukan sebagai patologi melainkan sebagai bentuk sosiasi yang *legitimate* dan bahkan produktif. Ketiga, analisis mendalam tentang fenomena uang dan transformasi yang dihasilkannya terhadap struktur relasi sosial, nilai-nilai budaya, dan pengalaman subjektif masyarakat modern.

Keempat, pemahaman nuanced tentang dialektika antara individualitas dan masyarakat massa, termasuk eksplorasi tentang kehidupan metropolitan, persilangan lingkaran sosial, kerahasiaan, serta ketegangan antara budaya subjektif dan objektif. Kelima, pengaruh luas Simmel terhadap perkembangan sosiologi mikro, mulai dari Chicago School dan

interaksionisme simbolik hingga sosiologi kehidupan sehari-hari dan teori jaringan sosial. Keenam, warisan Simmel untuk teori sosial kontemporer dan posisinya dalam kanon sosiologis, termasuk relevansinya untuk memahami kondisi modernitas lanjut dan bahkan posmodernitas.

Pemikiran Simmel muncul dalam konteks intelektual yang didominasi oleh pendekatan makro-struktural Durkheim dan analisis historis-komparatif Weber. Jika Durkheim menekankan fakta sosial dan solidaritas kolektif, serta Weber pada tindakan bermakna dan rasionalisasi, Simmel justru tertarik pada dinamika relasional dan bentuk-bentuk interaksi yang tampak sederhana namun fundamental. Ketiga perspektif ini saling melengkapi dalam membentuk fondasi sosiologi modern, dengan Simmel memberikan dimensi mikro-sosiologis yang sebelumnya kurang mendapat perhatian memadai.

Ironisnya, meskipun produktif dan berpengaruh, Simmel mengalami marginalisasi dalam sistem universitas Jerman karena latar belakang Yahudinya dan gaya pemikiran yang dianggap terlalu estetis oleh kalangan akademis ortodoks. Baru menjelang akhir kariernya ia memperoleh posisi profesor penuh di Universitas Strasbourg. Namun marginalisasi akademis ini justru membebaskannya untuk mengembangkan pemikiran orisinal yang tidak terikat pada ortodoksi disipliner tertentu, menghasilkan karya-karya yang terus menginspirasi hingga lebih dari satu abad kemudian.

Warisan intelektual Simmel mencakup lebih dari sekadar teori sosiologi dalam arti sempit. Karya-karyanya tentang uang, kota, mode, dan orang asing menjadi rujukan penting dalam studi modernitas dan budaya. Analisisnya tentang fragmentasi pengalaman modern dan dialektika antara kebebasan individual dengan ketergantungan sistemik tetap sangat relevan untuk memahami kondisi kontemporer. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, tema-tema Simmelian tentang abstraksi, impersonalitas, kecepatan perubahan, dan ambivalensi struktural bahkan semakin mendesak untuk dipahami.

Bab ini juga akan menunjukkan bagaimana perspektif Simmel menawarkan jalan tengah antara individualisme metodologis dan holisme sosiologis yang masih menjadi ketegangan produktif dalam sosiologi kontemporer. Dengan fokusnya pada relasi dan interaksi, Simmel menghindari reduksionisme psikologis tanpa jatuh ke reifikasi struktur sosial. Pendekatan relasional ini tetap valuable dalam era di mana dikotomi sederhana antara agensi dan struktur semakin diakui sebagai tidak memadai untuk menangkap kompleksitas kehidupan sosial yang sesungguhnya.

7.1 Sosiologi Formal dan Metode Analisis

Konsep Sosiasi dan Bentuk Sosial

Simmel memperkenalkan konsep sosiasi untuk menggambarkan proses fundamental pembentukan masyarakat. Berbeda dengan pandangan yang melihat masyarakat sebagai substansi atau entitas yang sudah jadi, Simmel menekankan bahwa masyarakat adalah proses interaksi yang terus-menerus berlangsung. Sosiasi merupakan bentuk-bentuk hubungan melalui mana individu-individu yang terpisah menjadi satu kesatuan, namun tanpa kehilangan individualitasnya (Simmel, 1950). Perspektif prosesual ini menggeser fokus sosiologi dari studi tentang entitas statis menuju pemahaman tentang dinamika relasional yang membentuk kehidupan sosial.

Konsep kunci dalam pemikiran Simmel adalah pemisahan antara bentuk dan isi interaksi sosial. Isi merujuk pada motivasi, tujuan, atau kepentingan yang mendorong individu berinteraksi—seperti kepentingan ekonomi, dorongan religius, atau kebutuhan akan perlindungan. Sementara bentuk adalah pola atau struktur interaksi yang terjadi, terlepas dari isi spesifiknya. Sebagai contoh, dominasi dan subordinasi adalah bentuk hubungan yang dapat ditemukan dalam konteks keluarga, organisasi bisnis, maupun negara, meskipun isinya berbeda-beda. Pemisahan analitis ini memungkinkan identifikasi pola-pola universal yang melampaui partikularitas konteks historis atau budaya.

Pendekatan formal Simmel memungkinkan identifikasi pola-pola universal dalam kehidupan sosial. Ia menganalisis berbagai bentuk sosiasi seperti superordinasi dan subordinasi, kompetisi, pembagian kerja, perayaan kolektif, korespondensi, keanggotaan dalam organisasi, dan berbagai bentuk lainnya. Setiap bentuk ini memiliki karakteristik dan dinamika tersendiri yang dapat dipelajari secara sistematis. Dengan demikian, sosiologi tidak hanya menjadi ilmu tentang masyarakat tertentu dalam waktu dan tempat spesifik, melainkan ilmu tentang bentuk-bentuk universal kemasyarakatan itu sendiri.

Metode analisis formal ini membedakan Simmel dari para pendahulunya yang cenderung historis atau evolutif. Ia tidak tertarik pada asal-usul masyarakat atau tahap-tahap perkembangannya sebagaimana yang menjadi obsesi sosiologi abad ke-19, melainkan pada geometri sosial—pola-pola relasional yang dapat ditemukan dalam berbagai konteks historis dan budaya. Pendekatan ini mengantisipasi perkembangan sosiologi struktural di abad ke-20, meskipun dengan penekanan yang berbeda pada dinamika interaksional dibanding strukturalisme yang lebih statis.

Simmel juga memperkenalkan gagasan tentang sosiologi murni yang mempelajari bentuk-bentuk sosiasi secara abstrak, terpisah dari isi konkretnya. Ini bukan berarti mengabaikan realitas empiris, melainkan upaya untuk menemukan prinsip-prinsip umum yang berlaku di balik keragaman fenomena sosial yang tampak di permukaan. Dalam pandangan Simmel, tugas sosiologi adalah mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk ini, sambil tetap menyadari bahwa dalam kenyataan empiris, bentuk dan isi selalu muncul bersama-sama dan saling membentuk dalam praktik kehidupan sosial yang konkret.

Geometri Sosial dan Relasi Triadik

Salah satu kontribusi metodologis paling orisinal Simmel adalah analisisnya tentang geometri sosial, khususnya perbedaan fundamental antara kelompok dua orang dan kelompok tiga orang. Dalam pandangan Simmel, perubahan kuantitatif dalam jumlah anggota kelompok menghasilkan perubahan kualitatif dalam sifat relasi sosial. Transisi dari dua ke tiga orang bukan sekadar penambahan numerik yang linier, tetapi transformasi struktural yang menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru dalam interaksi sosial dan mengubah secara fundamental dinamika kelompok.

Kelompok dua orang memiliki karakter yang unik dan intim. Dalam kelompok dua orang, setiap individu berhadapan langsung dengan yang lain tanpa mediasi pihak ketiga. Relasi ini bersifat sangat personal dan rapuh—keberadaan kelompok bergantung sepenuhnya pada kedua anggotanya. Jika salah satu pergi, kelompok tersebut langsung lenyap. Tidak ada kemungkinan untuk membentuk koalisi atau mayoritas, dan tidak ada struktur yang berdiri di atas kedua individu. Intimitas dan intensitas kelompok dua orang sekaligus menjadi kekuatan dan kelemahannya (Simmel, 1950).

Penambahan orang ketiga mengubah secara radikal dinamika kelompok. Kelompok tiga orang menciptakan kemungkinan untuk mediasi, arbitrase, dan pembentukan koalisi yang tidak ada dalam kelompok dua orang. Orang ketiga dapat berperan sebagai penengah yang netral dalam konflik antara dua pihak lainnya, atau sebaliknya, dapat memanipulasi konflik untuk kepentingan sendiri dengan strategi memecah belah dan menguasai. Struktur triadik juga memungkinkan dua anggota bersekutu melawan yang ketiga, menciptakan dinamika mayoritas-minoritas yang secara struktural tidak mungkin dalam kelompok dua orang.

Simmel mengidentifikasi tiga peran khas yang dapat dimainkan orang ketiga dalam struktur triadik. Pertama, sebagai mediator yang impartial, berusaha mendamaikan atau menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak yang berkonflik. Kedua, sebagai pihak yang memperoleh keuntungan dari konflik antara dua pihak lainnya, taktik klasik yang dikenal sebagai pihak ketiga yang diuntungkan. Ketiga, sebagai penguasa yang sengaja memelihara perpecahan antara dua pihak lainnya untuk mempertahankan posisi dominannya, strategi yang telah dikenal sejak zaman Romawi kuno sebagai politik belah bambu.

Analisis geometri sosial Simmel tidak berhenti pada kelompok tiga orang, tetapi ia berpendapat bahwa prinsip-prinsip paling fundamental tentang struktur kelompok dapat dipahami melalui perbandingan kelompok dua orang dan kelompok tiga orang. Kelompok yang lebih besar mengembangkan karakteristik baru—seperti diferensiasi peran yang lebih kompleks, formalisasi aturan yang lebih rigid, dan kemungkinan struktur hirarkis yang lebih elaborated—tetapi banyak dinamika dasarnya sudah terlihat dalam struktur triadik. Pendekatan ini memberikan fondasi untuk analisis mikrososiologis yang lebih sistematis tentang kehidupan kelompok.

Kontribusi metodologis ini memiliki implikasi luas bagi pemahaman tentang kehidupan sosial. Simmel menunjukkan bahwa struktur formal kelompok memiliki efek independen terhadap proses sosial, terlepas dari karakteristik individual anggotanya. Ini membuka jalan bagi sosiologi yang tidak reduksionis—yang tidak mereduksi fenomena sosial ke psikologi individual—tetapi juga tidak jatuh ke realisme sosial yang mengabaikan peran individu dan agensi mereka. Geometri sosial menjadi jembatan konseptual antara perspektif individualistik dan holistik dalam memahami masyarakat.

Diferensiasi antara Masyarakat dan Asosiasi

Simmel membuat distinsi penting antara masyarakat sebagai totalitas interaksi manusia dan asosiasi-asosiasi spesifik di dalamnya. Masyarakat dalam pengertian luas bukanlah objek tunggal yang dapat diamati secara langsung, melainkan konsep abstrak yang merujuk pada keseluruhan proses sosiasi yang tak terhitung jumlahnya. Sementara asosiasi adalah bentuk-bentuk konkret dan terbatas dari sosiasi, seperti keluarga, korporasi, gereja, atau negara, yang memiliki batas dan struktur yang relatif jelas dan dapat diidentifikasi.

Perbedaan ini memiliki implikasi metodologis yang signifikan. Sosiologi, menurut Simmel, tidak dapat mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan karena terlalu luas dan abstrak untuk dapat dipahami secara sistematis. Yang dapat dipelajari adalah bentuk-bentuk spesifik sosiasi dan pola-pola interaksi yang berulang dalam berbagai konteks. Pendekatan ini menghindari jebakan totalisme yang sering ditemukan dalam teori-teori makro, sambil tetap mempertahankan ambisi untuk menemukan prinsip-prinsip umum tentang kehidupan sosial (Simmel, 1910).

> "Simmel membedakan masyarakat sebagai totalitas abstrak dari proses sosiasi dengan asosiasi konkret seperti keluarga atau negara. Sosiologi, baginya, meneliti pola interaksi spesifik, bukan keseluruhan masyarakat, sekaligus menyoroti keanggotaan ganda individu dalam berbagai lingkaran sosial."

Dalam pandangan Simmel, individu selalu berpartisipasi dalam berbagai asosiasi secara bersamaan—sebagai anggota keluarga, pekerja dalam organisasi, warga negara, anggota komunitas religius, dan sebagainya. Setiap asosiasi menuntut aspek berbeda dari kepribadian individu dan memberikan sumber identitas yang berlainan. Keanggotaan ganda ini menciptakan apa yang Simmel sebut sebagai persilangan lingkaran sosial—individu modern berada di persimpangan berbagai kelompok yang tidak saling tumpang tindih sepenuhnya, menciptakan posisi struktural yang unik.

Diferensiasi antara berbagai lingkaran sosial ini memiliki konsekuensi penting bagi pembentukan individualitas. Dalam masyarakat tradisional yang sederhana, individu sepenuhnya terserap dalam satu kelompok komunal yang mencakup hampir semua aspek kehidupan. Seiring dengan modernisasi dan diferensiasi sosial, individu berpartisipasi dalam berbagai kelompok yang berbeda, masing-masing mengklaim hanya sebagian dari dirinya. Paradoksnya, fragmentasi keanggotaan sosial ini justru menciptakan ruang bagi individualitas yang lebih unik, karena kombinasi spesifik keanggotaan seseorang menjadi semakin tidak mungkin diulang oleh orang lain.

Simmel juga mengamati bahwa asosiasi-asosiasi modern cenderung menjadi lebih rasional dan impersonal. Jika dalam masyarakat tradisional, hubungan sosial melibatkan keseluruhan kepribadian individu secara holistik, masyarakat modern mengembangkan asosiasi yang hanya melibatkan aspek-aspek tertentu dari individu. Hubungan bisnis, misalnya, hanya mengaktifkan

peran ekonomis seseorang, bukan dimensi personal atau emosionalnya. Spesialisasi dan diferensiasi fungsional ini memungkinkan koordinasi sosial yang lebih kompleks dalam skala yang lebih besar, tetapi juga menciptakan pengalaman alienasi dan fragmentasi yang menjadi ciri khas modernitas.

7.2 Konflik, Kompetisi, dan Dinamika Sosial

Fungsi Positif Konflik dalam Masyarakat

Simmel menawarkan perspektif revolusioner tentang konflik sosial yang berbeda dari pandangan konvensional pada zamannya. Dalam esainya yang berpengaruh tentang sosiologi konflik, ia berpendapat bahwa konflik bukanlah semata-mata kekuatan destruktif yang mengancam tatanan sosial, melainkan salah satu bentuk fundamental sosiasi yang memiliki fungsi integratif. Konflik, dalam pandangan Simmel, adalah bentuk interaksi sosial yang sama legitimnya dengan bentuk-bentuk lain seperti kerja sama atau solidaritas (Simmel, 1903).

Argumen kunci Simmel adalah bahwa konflik mencegah disintegrasi kelompok dengan memberikan saluran untuk ekspresi antagonisme yang terpendam. Tanpa saluran untuk ketegangan dan perselisihan, akumulasi kebencian yang tidak tersalurkan dapat meledak dalam kekerasan yang jauh lebih destruktif. Konflik yang terlembagakan—seperti kompetisi ekonomi, debat politik, atau bahkan pertandingan olahraga—memungkinkan pengelolaan antagonisme dengan cara yang relatif terkontrol. Ini mirip dengan fungsi katup pengaman pada mesin uap yang mencegah ledakan dengan melepaskan tekanan secara bertahap dan terukur.

Konflik juga berfungsi memperjelas batas-batas kelompok dan memperkuat identitas internal. Menghadapi musuh bersama atau rival eksternal, anggota kelompok cenderung mengesampingkan perbedaan internal dan bersatu dalam solidaritas. Fenomena ini dapat diamati dalam berbagai skala, dari tim olahraga yang berkompetisi hingga negara-negara dalam konflik internasional. Simmel mencatat bahwa kelompok-kelompok yang menghadapi konflik eksternal konstan cenderung mengembangkan struktur internal yang lebih kohesif dan sentralistik untuk mempertahankan diri terhadap ancaman eksternal.

Namun Simmel juga memperingatkan bahwa tidak semua konflik bersifat produktif atau integratif. Ia membedakan antara konflik yang realistis dan yang tidak realistis. Konflik realistis muncul dari frustrasi terhadap tuntutan spesifik dalam hubungan dan diarahkan pada objek yang dipersepsikan

sebagai sumber frustrasi tersebut. Konflik ini memiliki fungsi instrumental—ada tujuan konkret yang ingin dicapai, dan konflik adalah sarana untuk mencapainya. Sebaliknya, konflik tidak realistis muncul dari kebutuhan untuk melepaskan ketegangan, setidaknya dari salah satu pihak, dan tidak diarahkan pada objek spesifik yang menjadi penyebab frustrasi.

Intensitas konflik juga dipengaruhi oleh struktur sosial kelompok yang terlibat. Simmel mengamati bahwa konflik dalam kelompok yang sangat kohesif cenderung lebih intens dan emosional dibanding konflik dalam kelompok yang longgar. Ini karena dalam kelompok kohesif, konflik tidak hanya menyangkut isu spesifik tetapi juga mengancam identitas personal anggota yang sangat terintegrasi dengan kelompok. Paradoksnya, intimitas dan kedekatan dalam relasi sosial justru dapat membuat konflik menjadi lebih tajam dan sulit diselesaikan ketika konflik memang terjadi dalam relasi tersebut.

Konflik sebagai Bentuk Sosiasi

Pemahaman Simmel tentang konflik sebagai bentuk sosiasi menantang dikotomi sederhana antara harmoni dan disharmoni dalam kehidupan sosial. Ia berpendapat bahwa konflik bukan antitesis dari sosiasi, melainkan salah satu bentuknya. Bahkan dalam konflik paling intens sekalipun, masih terdapat elemen sosiasi karena pihak-pihak yang berkonflik terikat dalam relasi interaktif. Mereka harus memperhatikan satu sama lain, mengantisipasi tindakan pihak lain, dan menyesuaikan strategi mereka—semua ini adalah bentuk relasi sosial yang genuine.

Dalam analisisnya, Simmel membedakan berbagai gradasi konflik berdasarkan tingkat organisasi dan intensitasnya. Pada satu ekstrem adalah konflik yang sangat terlembagakan seperti kompetisi ekonomi dalam sistem pasar, di mana aturan main jelas dan konflik terbatas pada arena spesifik yang telah ditentukan. Pada ekstrem lain adalah konflik yang bertujuan memusnahkan lawan sepenuhnya, seperti peperangan total atau genosida. Namun bahkan dalam konflik ekstrem, masih ada elemen regulasi minimal—misalnya pengakuan terhadap musuh sebagai pihak yang harus dikalahkan, bukan sekadar objek yang diabaikan atau tidak relevan.

Simmel juga mengeksplorasi hubungan antara konflik dan struktur sosial. Ia menunjukkan bahwa masyarakat yang kompleks dan terdiferensiasi dapat menoleransi lebih banyak konflik dibanding masyarakat sederhana yang homogen. Dalam masyarakat modern dengan afiliasi kelompok yang

beragam, konflik dalam satu arena tidak otomatis meluas ke arena lain. Seseorang dapat bersaing ketat dengan orang lain dalam bisnis, tetapi bekerja sama dengannya dalam organisasi sipil atau komunitas religius. Persilangan loyalitas ini menciptakan jaringan sosial yang lebih stabil karena konflik terlokalisasi dan tidak membelah masyarakat secara total.

Analisis Simmel tentang konflik juga mencakup dimensi temporal yang penting. Ia menunjukkan bahwa konflik berkepanjangan dapat menghasilkan struktur sosial tersendiri—seperti birokrasi militer, sistem hukum untuk menyelesaikan sengketa, atau lembaga mediasi. Institusi-institusi ini kemudian memperoleh kepentingan dalam melanggengkan kondisi yang membuat mereka relevan, menciptakan ironi bahwa usaha mengelola konflik dapat berkontribusi pada pelanggengannya. Ini mengantisipasi teori-teori kemudian tentang institusionalisasi konflik dalam masyarakat modern yang kompleks.

Perspektif Simmel tentang konflik membuka jalan bagi sosiologi konflik sebagai subdisiplin yang legitimate. Pengaruhnya dapat ditelusuri dalam karya-karya Lewis Coser tentang fungsi konflik sosial, Ralf Dahrendorf tentang konflik kelas dalam masyarakat industri, dan Randall Collins tentang teori konflik ritual. Semua pemikir ini berbagi premis Simmelian bahwa konflik bukan anomali yang harus dihilangkan, melainkan aspek intrinsik dari kehidupan sosial yang harus dipahami dalam kompleksitasnya dan dikelola dengan bijaksana.

Orang Asing dan Ambivalensi Sosial

Konsep orang asing dalam karya Simmel menjadi salah satu kontribusi paling berpengaruh dan sering dikutip dalam sosiologi. Orang asing bukan sekadar pengembara yang datang hari ini dan pergi besok, melainkan orang yang datang hari ini dan tinggal besok—individu yang secara permanen berada dalam posisi marginal antara orang dalam dan orang luar. Posisi struktural yang unik ini menghasilkan perspektif dan fungsi sosial yang khas, menjadikan orang asing sebagai tipe sosial yang penting dalam memahami dinamika masyarakat modern (Simmel, 1950).

Karakteristik fundamental orang asing adalah kombinasi antara kedekatan dan jarak dalam relasi sosialnya. Ia berpartisipasi dalam kelompok namun tidak sepenuhnya menjadi bagian darinya. Ia cukup dekat untuk memahami dinamika internal kelompok, namun cukup jauh untuk mempertahankan objektivitas dan tidak terjebak dalam prasangka lokal. Ambivalensi ini

menciptakan posisi unik—orang asing dapat melihat pola-pola yang tidak terlihat oleh anggota penuh kelompok karena terlalu akrab dengan mereka, mirip dengan perspektif antropolog yang mengamati budaya asing dengan mata yang segar.

Simmel mengidentifikasi fungsi ekonomi dan sosial spesifik yang sering dimainkan orang asing dalam masyarakat. Secara historis, pedagang dan perantara finansial sering berasal dari kelompok asing—seperti orang Yahudi di Eropa, orang Arab di Afrika Timur, atau orang Cina di Asia Tenggara. Posisi sebagai orang luar justru menguntungkan dalam peran ekonomi tertentu karena memungkinkan mobilitas yang lebih besar dan kebebasan dari keterikatan tradisional lokal. Orang asing dapat berhubungan dengan berbagai pihak tanpa terikat secara eksklusif pada salah satu kelompok, menjadikannya mediator ideal dalam pertukaran ekonomi.

Objektivitas yang diasosiasikan dengan orang asing juga memberikan kepadanya peran sebagai arbiter atau hakim dalam konflik internal kelompok. Karena tidak terikat pada faksi-faksi yang berkonflik melalui hubungan kekerabatan atau sejarah bersama, orang asing dapat memberikan penilaian yang dianggap lebih tidak memihak. Ini menjelaskan mengapa dalam banyak masyarakat tradisional, penguasa sering merekrut administrator atau penasihat dari kelompok asing untuk mengelola urusan-urusan sensitif yang dapat memicu konflik antara kelompok-kelompok lokal yang memiliki kepentingan berbeda.

Namun posisi ambivalen orang asing juga mengandung risiko dan kerentanan struktural. Karena tidak sepenuhnya terintegrasi, orang asing mudah menjadi kambing hitam ketika terjadi krisis sosial. Ia dapat diusir atau diserang tanpa menimbulkan kewajiban pembalasan yang sama seperti ketika menyerang anggota penuh kelompok. Sejarah penuh dengan contoh penganiayaan terhadap kelompok-kelompok asing—dari pogrom terhadap orang Yahudi hingga pengusiran orang Cina dari berbagai negara Asia Tenggara. Marginalisitas yang memberikan keuntungan dalam kondisi normal dapat menjadi sumber bahaya ekstrem dalam kondisi krisis ketika kelompok mencari sasaran untuk menyalurkan frustrasi kolektif.

Dalam konteks modernitas, Simmel melihat bahwa posisi orang asing menjadi semakin umum dan bahkan normatif. Urbanisasi dan mobilitas menciptakan situasi di mana banyak orang hidup dalam komunitas di mana mereka tidak memiliki akar historis yang dalam. Metropolis modern penuh dengan orang-orang yang secara struktural mirip dengan orang asing Simmel—berpartisipasi dalam kehidupan urban namun mempertahankan

jarak psikologis, memiliki hubungan instrumental namun tidak mendalam dengan kebanyakan orang yang mereka temui. Kondisi ini menghasilkan apa yang Simmel sebut sebagai sikap acuh—sikap acuh tak acuh yang melindungi individu dari overstimulasi tetapi juga menghasilkan isolasi emosional dalam kerumunan.

Mode dan Dinamika Diferensiasi Sosial

Analisis Simmel tentang mode menunjukkan bagaimana fenomena yang tampaknya trivial dapat mengungkap dinamika fundamental kehidupan sosial. Mode, dalam pandangan Simmel, bukanlah sekadar masalah pakaian atau gaya hidup, melainkan ekspresi dari dua kebutuhan manusia yang saling bertentangan: kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok dan kebutuhan untuk membedakan diri dari orang lain. Mode memuaskan kedua kebutuhan ini secara bersamaan dengan cara yang paradoks namun efektif dalam masyarakat yang terdiferensiasi.

Di satu sisi, dengan mengikuti mode, individu menunjukkan kepatuhan pada norma kelompoknya dan mengekspresikan solidaritas dengan kelas sosial atau komunitas tertentu. Mode menciptakan perasaan kebersamaan di antara mereka yang mengikutinya—kita semua mengenakan gaya yang sama dan dengan demikian mengkonfirmasi keanggotaan bersama. Di sisi lain, mode juga berfungsi sebagai mekanisme diferensiasi kelas. Kelompok elite mengadopsi gaya baru untuk membedakan diri dari massa, tetapi begitu gaya tersebut diadopsi oleh kelas di bawahnya, elite meninggalkannya dan mengadopsi mode baru. Siklus imitasi dan diferensiasi ini tidak pernah berhenti dalam masyarakat yang terstratifikasi.

Simmel mengidentifikasi pola siklus dalam perubahan mode. Mode dimulai ketika kelompok elite mengadopsi gaya baru yang membedakan mereka dari massa. Gaya ini kemudian menyebar ke kelas menengah yang berusaha meniru elite sebagai bentuk mobilitas simbolik. Ketika mode tersebut telah menjadi umum dan kehilangan nilai distingtifnya, kelompok elite meninggalkannya untuk mode baru, dan siklus dimulai lagi. Kecepatan siklus ini meningkat dalam masyarakat modern karena sistem komunikasi dan produksi massal yang memungkinkan difusi gaya dengan cepat ke berbagai lapisan sosial.

Dalam masyarakat modern yang terdiferensiasi, mode tidak lagi monolitik tetapi terfragmentasi menjadi berbagai mode subkultur. Setiap kelompok sosial—didefinisikan oleh usia, profesi, gaya hidup, atau ideologi—

mengembangkan kode mode tersendiri yang menandai identitas dan batas kelompok. Remaja memiliki mode yang berbeda dari orang tua, profesional memiliki kode berpakaian yang berbeda dari seniman, dan sebagainya. Fragmentasi ini mencerminkan diferensiasi sosial yang lebih luas dalam masyarakat modern, di mana identitas individu dibentuk oleh persilangan berbagai afiliasi kelompok yang tidak selalu koheren.

Simmel juga mengamati hubungan antara mode dan modernitas. Dalam masyarakat tradisional yang stabil, perubahan gaya sangat lambat karena tradisi memiliki otoritas yang kuat dan inovasi dipandang dengan kecurigaan. Modernitas, dengan penekanannya pada perubahan dan inovasi, menciptakan kondisi ideal untuk proliferasi mode. Kapitalisme modern bahkan memiliki kepentingan ekonomi dalam mempercepat siklus mode untuk meningkatkan konsumsi—fenomena yang kemudian dikenal sebagai keusangan terencana. Mode menjadi simbol dari temporalitas modern, di mana yang baru selalu menggantikan yang lama dalam putaran yang tak henti-hentinya.

Analisis Simmel tentang mode mengantisipasi perkembangan studi konsumsi dan budaya populer dalam sosiologi kontemporer. Perspektifnya mempengaruhi teori Pierre Bourdieu tentang distinsi sosial melalui konsumsi budaya, serta studi tentang identitas dan gaya hidup dalam masyarakat konsumen. Mode, dalam kerangka Simmelian, bukan fenomena permukaan yang tidak penting, melainkan jendela untuk memahami dinamika stratifikasi, identitas, dan perubahan dalam masyarakat modern yang kompleks dan terdiferensiasi.

7.3 Filosofi Uang dan Masyarakat Modern

Uang sebagai Simbol Modernitas

Karya monumental Simmel tentang filosofi uang menawarkan analisis komprehensif tentang bagaimana uang membentuk struktur dan pengalaman masyarakat modern. Simmel tidak melihat uang sebagai sekadar alat tukar ekonomi, melainkan sebagai kekuatan budaya yang mentransformasi relasi sosial, nilai-nilai, dan bahkan struktur kepribadian manusia. Uang menjadi simbol par excellence dari modernitas—abstrak, rasional, impersonal, dan universal (Simmel, 1900).

Karakteristik fundamental uang adalah sifat abstraknya yang melampaui partikularitas objek konkret. Berbeda dengan barang-barang konkret yang memiliki kualitas spesifik, uang adalah nilai murni tanpa kualitas intrinsik.

Selembar uang sepuluh ribu rupiah tidak memiliki perbedaan kualitatif dengan sepuluh lembar uang seribu rupiah—hanya perbedaan kuantitatif yang dapat dihitung secara matematis. Abstraksi ini memungkinkan uang menjadi medium universal yang dapat mengukur dan membandingkan nilai dari hal-hal yang sangat berbeda sifatnya. Segala sesuatu—dari barang material hingga jasa, dari karya seni hingga keintiman personal—dapat direduksi menjadi nilai moneter yang komensurabel.

Kemampuan uang untuk mengukur segala hal dalam satu skala numerik menciptakan apa yang Simmel sebut sebagai efek perataan yang menghilangkan perbedaan kualitatif antara berbagai hal. Dalam ekonomi uang, semua nilai menjadi komensurabel, dapat dibandingkan dan dipertukarkan melalui medium abstrak yang sama. Ini memfasilitasi perdagangan dan koordinasi ekonomi dalam skala besar yang tidak mungkin dalam sistem barter, tetapi juga menghasilkan pengalaman kehilangan makna—dunia menjadi kehilangan pesona karena dimensi kualitatif dan unik dari berbagai hal tenggelam dalam perhitungan kuantitatif universal.

Simmel mengidentifikasi dialektika paradoks dalam uang: sebagai alat, uang adalah sarana paling universal untuk mencapai berbagai tujuan, namun dalam perkembangannya, uang cenderung berubah dari sarana menjadi tujuan itu sendiri. Orang tidak lagi mengejar uang untuk membeli hal-hal yang mereka butuhkan atau inginkan, tetapi mengejar uang demi uang itu sendiri. Akumulasi uang menjadi tujuan yang melampaui kegunaan konkretnya. Fenomena ini menciptakan apa yang Simmel sebut sebagai tragedi budaya modern—sarana yang diciptakan untuk melayani tujuan manusia justru menjadi tuan yang menguasai penciptanya.

Impersonalitas uang juga mengubah karakter relasi sosial secara fundamental. Dalam masyarakat pra-modern, pertukaran ekonomi tertanam dalam relasi personal—seseorang berdagang dengan orang yang dikenalnya, dan transaksi melibatkan dimensi sosial dan moral yang kompleks. Ekonomi uang memungkinkan transaksi antara orang asing yang tidak memiliki hubungan personal sama sekali. Yang penting hanya nilai tukar, bukan identitas atau kualitas personal dari pihak-pihak yang terlibat. Ini menciptakan kebebasan baru—individu tidak lagi terikat pada patron atau komunitas lokal—tetapi juga menghasilkan alienasi dan fragmentasi relasi sosial.

Simmel berpendapat bahwa uang berkontribusi pada perkembangan individualitas modern dengan cara yang paradoks. Dalam masyarakat di mana seseorang harus bergantung pada produk dan jasa spesifik dari orang-

orang tertentu, ketergantungan bersifat personal dan membatasi kebebasan individual. Tetapi dalam ekonomi uang yang terdiferensiasi, seseorang bergantung pada masyarakat secara umum melalui medium uang, bukan pada individu spesifik. Ketergantungan ini justru memberikan kebebasan personal yang lebih besar karena tidak ada individu tunggal yang memiliki kekuasaan langsung atas seseorang. Paradoksnya, ketergantungan yang lebih abstrak dan universal menciptakan otonomi individual yang lebih besar.

Rasionalisasi dan Kalkulabilitas

Analisis Simmel tentang uang terkait erat dengan tema rasionalisasi yang juga diangkat oleh Weber dalam konteks yang berbeda. Ekonomi uang memaksa dan memungkinkan bentuk rasionalitas kalkulatif yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan dengan presisi yang sama. Ketika segala sesuatu dapat diekspresikan dalam nilai moneter, perhitungan rasional tentang untung-rugi menjadi mungkin dan bahkan menjadi imperatif dalam pengambilan keputusan ekonomi. Uang memberikan unit pengukuran universal yang memungkinkan perencanaan, akuntansi, dan optimalisasi yang presisi dalam urusan ekonomi.

Kalkulabilitas ini merembes ke berbagai aspek kehidupan di luar ranah ekonomi murni. Dalam masyarakat modern, semakin banyak keputusan—dari memilih pendidikan hingga memilih pasangan hidup—dipikirkan dalam kerangka analisis biaya-manfaat. Logika ekonomi yang berbasis perhitungan moneter menjadi model untuk pengambilan keputusan rasional secara umum dalam berbagai domain kehidupan. Simmel melihat ini sebagai manifestasi dari tendensi modern yang lebih luas menuju kuantifikasi dan rasionalisasi pengalaman manusia yang sebelumnya bersifat kualitatif dan intuitif.

Presisi dan eksaktitas yang dimungkinkan oleh uang juga mengubah pengalaman temporal secara radikal. Dalam ekonomi subsisten, waktu mengikuti ritme natural—musim, siang dan malam, siklus pertanian yang organik. Tetapi dalam ekonomi uang, waktu menjadi komoditas yang dapat diukur secara presisi dan dikonversi menjadi nilai moneter. Ungkapan waktu adalah uang bukan sekadar metafora, tetapi mencerminkan transformasi fundamental dalam konsepsi waktu. Jam kerja, upah per jam, bunga yang diperhitungkan per hari—semua ini menunjukkan bagaimana waktu telah dikuantifikasi dan diintegrasikan ke dalam logika ekonomi uang.

Simmel juga mengamati bahwa rasionalisasi melalui uang memiliki dampak psikologis yang mendalam. Ia memperkenalkan konsep sikap acuh—keadaan mental di mana seseorang menjadi tidak peka terhadap perbedaan kualitatif antara berbagai hal karena terbiasa melihat segalanya dalam term nilai tukar yang abstrak. Penduduk kota besar yang terus-menerus terpapar pada berbagai stimulus dan transaksi ekonomi mengembangkan sikap acuh tak acuh sebagai mekanisme pertahanan diri. Mereka tidak bisa merespons secara emosional terhadap setiap orang dan setiap situasi karena akan mengalami kelelahan psikologis. Sikap acuh menjadi strategi adaptif dalam lingkungan urban yang overstimulating.

Namun Simmel juga mengenali bahaya dari dominasi rasionalitas kalkulatif yang berlebihan. Ketika segala sesuatu direduksi menjadi angka dan perhitungan, dimensi kualitatif dan unik dari pengalaman manusia terancam terlupakan. Nilai-nilai yang tidak dapat dikuantifikasi—seperti keindahan, keintiman, atau makna spiritual—cenderung diabaikan atau didistorsi ketika dipaksa masuk ke dalam kerangka kalkulasi moneter. Ini mengarah pada apa yang Simmel sebut sebagai tragedi budaya—produk budaya manusia berkembang mengikuti logikanya sendiri yang akhirnya mengalienasi manusia dari nilai-nilai substantif yang membuat hidup bermakna.

Kebebasan dan Ketergantungan Modern

Simmel mengidentifikasi paradoks fundamental dalam kondisi modern yang dimediasi oleh uang: individu menjadi lebih bebas dan lebih tergantung secara bersamaan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dari keterikatan personal dan partikular yang membatasi individu dalam masyarakat tradisional. Dalam ekonomi natural atau sistem feodal, seseorang terikat pada tuan tanah tertentu, tanah tertentu, atau guild tertentu dengan cara yang sangat membatasi mobilitas dan pilihan. Uang membebaskan individu dari ikatan-ikatan personal ini karena dengan uang, seseorang dapat membeli dari siapa saja dan menjual kepada siapa saja tanpa terikat pada relasi personal jangka panjang.

Mobilitas yang difasilitasi oleh uang—baik geografis maupun sosial—merupakan aspek penting dari kebebasan modern. Seseorang dengan uang dapat pindah ke kota lain atau bahkan negara lain dan tetap dapat bertahan hidup karena uang diterima secara universal sebagai medium pertukaran. Mobilitas sosial juga dimungkinkan karena status dalam masyarakat modern semakin ditentukan oleh kekayaan moneter daripada kelahiran atau kasta yang askriptif. Meskipun mobilitas aktual mungkin terbatas oleh berbagai

faktor struktural, uang setidaknya menciptakan kemungkinan teoretis untuk perubahan posisi sosial yang tidak ada dalam sistem stratifikasi yang lebih rigid.

Namun kebebasan ini datang dengan bentuk ketergantungan baru yang lebih abstrak tetapi tidak kalah kuat dalam efeknya. Dalam masyarakat modern, individu bergantung pada sistem ekonomi yang sangat kompleks dan terdiferensiasi. Untuk memenuhi kebutuhan paling dasar sekalipun, individu bergantung pada rantai produksi dan distribusi yang melibatkan ribuan orang yang tidak dikenalnya di berbagai belahan dunia. Ketergantungan ini tidak bersifat personal—bukan pada individu tertentu—tetapi pada sistem secara keseluruhan. Jika sistem ini terganggu, individu menjadi sangat rentan meskipun tidak ada individu tunggal yang memiliki kekuasaan langsung atasnya.

Simmel berpendapat bahwa ketergantungan modern ini memiliki karakter yang unik dibanding era sebelumnya. Dalam masyarakat tradisional, ketergantungan bersifat personal dan bilateral—petani bergantung pada tuan tanahnya, tetapi tuan tanah juga bergantung pada petaninya untuk mengolah tanah. Dalam masyarakat modern, ketergantungan menjadi impersonal dan multilateral—setiap orang bergantung pada masyarakat secara umum melalui medium uang, tetapi tidak pada individu spesifik mana pun. Ini menciptakan situasi di mana seseorang secara objektif sangat tergantung tetapi secara subjektif merasa bebas karena tidak ada yang terlihat menguasainya secara langsung.

Analisis Simmel tentang dialektika kebebasan dan ketergantungan ini sangat relevan untuk memahami kondisi kontemporer. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, kita menjadi semakin tergantung pada sistem-sistem teknis dan ekonomi yang sangat kompleks—dari rantai pasokan global hingga infrastruktur digital—tetapi ketergantungan ini tidak selalu terasa karena dimediasi melalui interface yang membuat kompleksitas tersebut tidak terlihat. Kita merasa bebas memilih di antara berbagai opsi konsumsi, tetapi pilihan-pilihan kita dibentuk oleh struktur yang jauh berada di luar kendali individual kita.

Alienasi dan Fragmentasi Pengalaman

Dalam analisisnya tentang uang, Simmel juga membahas tema alienasi—meskipun dengan cara yang berbeda dari Marx. Jika Marx fokus pada alienasi

pekerja dari produk kerjanya dalam sistem kapitalis, Simmel lebih tertarik pada alienasi yang lebih luas yang berasal dari dominasi medium abstrak seperti uang dalam kehidupan modern. Alienasi versi Simmel berkaitan dengan pemisahan antara subjek dan objek, antara kepribadian internal individu dan produk-produk budaya eksternal yang semakin otonom dan terlepas dari kontrol manusiawi.

Uang sebagai simbol abstrak menciptakan jarak psikologis antara individu dan objek-objek yang ia gunakan atau konsumsi. Dalam ekonomi subsisten, seseorang memiliki hubungan langsung dan intim dengan objek-objek yang ia produksi atau gunakan—petani mengenal baik tanah yang ia olah, tukang kerajinan memiliki hubungan personal dengan produk karyanya. Tetapi dalam ekonomi uang, relasi dengan objek dimediasi melalui pertukaran moneter yang abstrak. Konsumen membeli produk yang diproduksi oleh orang asing di tempat yang jauh, tidak mengetahui proses produksinya, dan tidak memiliki keterikatan emosional dengan produk tersebut selain nilai tukarnya.

Fragmentasi pengalaman modern juga berakar pada logika ekonomi uang yang merasuki berbagai domain kehidupan. Dalam masyarakat tradisional yang terintegrasi, berbagai aspek kehidupan—produksi, konsumsi, religi, politik—tertanam dalam konteks komunal yang sama dan melibatkan orang-orang yang sama. Modernitas menghasilkan pemisahan berbagai sphere kehidupan menjadi domain-domain otonom dengan logika tersendiri yang sering tidak kompatibel. Seseorang berperan sebagai pekerja dalam satu konteks, konsumen dalam konteks lain, warga negara dalam konteks ketiga, dan seterusnya. Setiap peran hanya mengaktifkan fragmen dari kepribadian total seseorang.

Simmel mengidentifikasi apa yang ia sebut sebagai tragedi budaya—ketertinggalan subjek di belakang objek. Produk-produk budaya manusia—teknologi, institusi, sistem pengetahuan—berkembang dan terakumulasi dengan kecepatan yang jauh melampaui kemampuan individu untuk menginternalisasi dan mengintegrasikannya. Seorang individu di abad pertengahan mungkin dapat menguasai sebagian besar pengetahuan yang tersedia pada zamannya, tetapi individu modern harus menghadapi lautan informasi dan produk budaya yang tidak mungkin dikuasai seluruhnya. Ketidakseimbangan antara budaya objektif dan budaya subjektif ini menciptakan perasaan keterasingan dan ketidakberdayaan.

Fragmentasi ini juga mempengaruhi pembentukan identitas dalam cara yang fundamental. Dalam masyarakat yang terintegrasi, identitas seseorang relatif

stabil dan didefinisikan oleh posisinya dalam struktur sosial yang jelas. Modernitas menciptakan situasi di mana individu harus menyusun identitasnya sendiri dari berbagai peran dan afiliasi yang terfragmentasi. Ini memberikan kebebasan baru untuk membentuk diri, tetapi juga beban psikologis yang berat. Pertanyaan siapa saya menjadi lebih kompleks dan problematis ketika tidak ada template identitas tunggal yang diberikan oleh tradisi atau komunitas.

7.4 Individualitas dan Masyarakat Massa

Metropolis dan Kehidupan Mental

Esai Simmel tentang metropolis dan kehidupan mental menjadi salah satu analisis paling berpengaruh tentang pengalaman urban modern. Simmel berpendapat bahwa kehidupan di kota besar menghasilkan tipe kepribadian yang unik sebagai respons terhadap kondisi-kondisi spesifik lingkungan urban. Intensitas stimulus, kecepatan perubahan, dan kompleksitas interaksi di metropolis menuntut adaptasi psikologis yang berbeda dari kehidupan di kota kecil atau pedesaan yang lebih stabil dan homogen.

Karakteristik fundamental kehidupan metropolitan adalah intensifikasi stimulasi syaraf yang konstan dan overwhelming. Penduduk kota terus-menerus dibombardir dengan kesan-kesan sensoris—lalu lintas, kerumunan, iklan, kebisingan—yang berganti dengan cepat dan tak henti-hentinya. Untuk melindungi diri dari overstimulasi ini, individu urban mengembangkan apa yang Simmel sebut sebagai sikap acuh atau acuh tak acuh. Mereka menjadi kurang responsif secara emosional terhadap stimulus individual karena sistem syaraf mereka perlu melindungi diri dari kelelahan. Sikap ini adalah mekanisme adaptif yang memungkinkan fungsi psikologis dalam lingkungan yang menuntut.

Kehidupan metropolitan juga ditandai oleh dominasi intelektualitas atas emosionalitas dalam interaksi sehari-hari. Kompleksitas koordinasi dalam kota besar—sistem transportasi, jadwal kerja, transaksi ekonomi—menuntut presisi dan kalkulasi rasional yang ketat. Jika kehidupan pedesaan dapat mengikuti ritme organik dan emosional, kehidupan urban menuntut disiplin temporal dan rasionalitas instrumental. Jam menjadi simbol penting dari kehidupan metropolitan—sinkronisasi aktivitas ribuan atau jutaan orang memerlukan pengukuran waktu yang presisi. Keterlambatan beberapa menit dapat mengganggu rantai interaksi yang kompleks dan saling bergantung.

Simmel juga mengamati bahwa metropolis menciptakan paradoks antara kedekatan fisik dan jarak psikologis. Penduduk kota hidup dalam kepadatan tinggi, secara fisik sangat dekat dengan banyak orang, tetapi sebagian besar interaksi bersifat impersonal dan superfisial. Seseorang dapat merasa sangat kesepian di tengah kerumunan yang ramai. Tidak seperti kehidupan di komunitas kecil di mana setiap orang mengenal satu sama lain secara mendalam, kehidupan urban menghasilkan apa yang kemudian disebut sebagai anonimitas dalam kedekatan—anonimitas dalam kedekatan fisik. Ini memberikan kebebasan dari pengawasan sosial yang ketat, tetapi juga menghasilkan isolasi emosional.

Namun Simmel tidak melihat kehidupan metropolitan semata-mata dalam term negatif atau pesimistis. Ia mengakui bahwa kota besar juga menawarkan kebebasan dan kemungkinan-kemungkinan baru yang tidak tersedia di komunitas kecil yang lebih homogen dan konservatif. Metropolis adalah ruang di mana individualitas dapat berkembang karena diversitas dan toleransi terhadap perbedaan lebih besar. Orang-orang dengan minat, identitas, atau gaya hidup yang tidak konvensional dapat menemukan kelompok mereka di kota besar, sementara mereka mungkin mengalami penolakan di komunitas kecil yang lebih conformist. Anonimitas urban, meskipun dapat menghasilkan alienasi, juga melindungi privasi dan memungkinkan eksperimen dengan identitas.

Lingkaran Sosial dan Diferensiasi Individual

Konsep persilangan lingkaran sosial adalah kontribusi penting Simmel untuk memahami struktur sosial modern dan pembentukan individualitas. Dalam masyarakat sederhana dan tradisional, individu sepenuhnya terserap dalam satu kelompok komprehensif—biasanya komunitas lokal yang mencakup keluarga, pekerjaan, religi, dan semua aspek kehidupan sosial dalam satu kesatuan organik. Setiap anggota komunitas memiliki afiliasi kelompok yang sangat mirip, menghasilkan homogenitas tinggi dalam pengalaman sosial dan identitas kolektif yang kuat.

Modernisasi menghasilkan diferensiasi progresif di mana berbagai fungsi sosial terpisah menjadi sphere-sphere otonom dengan logika dan institusi tersendiri. Pekerjaan terpisah dari keluarga, religi terpisah dari politik, pendidikan menjadi institusi tersendiri yang spesialistik, dan seterusnya. Individu tidak lagi sepenuhnya terserap dalam satu kelompok komprehensif, melainkan berpartisipasi dalam berbagai kelompok yang berbeda—kelompok berdasarkan pekerjaan, kelompok berdasarkan minat atau hobi,

kelompok berdasarkan afiliasi politik, kelompok berdasarkan identitas etnis atau religius, dan sebagainya. Setiap individu berada di persimpangan unik dari berbagai lingkaran sosial ini.

Simmel berpendapat bahwa persilangan lingkaran sosial ini justru menghasilkan individualitas yang lebih pronounced dan unik. Dalam masyarakat homogen di mana semua orang memiliki afiliasi yang sama, individu kurang terdiferensiasi satu sama lain karena kesamaan pengalaman dan identitas. Tetapi ketika setiap orang memiliki kombinasi unik dari keanggotaan kelompok yang berbeda, profil sosial setiap individu menjadi lebih distingtif. Semakin banyak lingkaran sosial yang berbeda di mana seseorang berpartisipasi, semakin kecil kemungkinan ada orang lain dengan kombinasi keanggotaan yang persis sama. Individualitas modern bukan tentang esensi internal yang unik, tetapi tentang posisi struktural yang unik dalam jaringan afiliasi sosial.

Diferensiasi ini juga memiliki implikasi untuk solidaritas sosial dan pengelolaan konflik. Dalam masyarakat dengan lingkaran sosial yang tumpang tindih sepenuhnya, konflik antara dua individu cenderung melibatkan seluruh komunitas dan menciptakan perpecahan total yang mengancam kohesi sosial. Tetapi dalam masyarakat dengan persilangan lingkaran sosial yang kompleks, dua orang mungkin berkonflik dalam satu konteks seperti kompetisi bisnis tetapi bekerja sama dalam konteks lain seperti organisasi sipil. Pluralitas afiliasi menciptakan jaringan loyalitas yang silang-menyilang, yang menurut Simmel justru memperkuat stabilitas sosial karena konflik terlokalisasi dan tidak membelah masyarakat secara total.

Namun persilangan lingkaran sosial juga menghasilkan tantangan baru untuk individu yang harus mengelola kompleksitas identitas. Berbagai kelompok tempat seseorang berpartisipasi mungkin memiliki norma, nilai, atau tuntutan yang saling bertentangan dan tidak mudah direkonsiliasi. Seseorang harus mengelola multiple identitas dan peran yang tidak selalu kompatibel satu sama lain. Ini menciptakan tekanan psikologis dan memerlukan keterampilan untuk bernavigasi antara konteks-konteks yang berbeda. Fleksibilitas dan kemampuan untuk mengubah perilaku dan presentasi diri sesuai konteks—menjadi kompetensi penting dalam masyarakat modern yang terdiferensiasi.

Kerahasiaan dan Ruang Privat

Simmel memberikan perhatian khusus pada fenomena kerahasiaan sebagai aspek fundamental dari kehidupan sosial, terutama dalam masyarakat modern yang kompleks. Kerahasiaan, dalam pandangan Simmel, bukan sekadar penyembunyian informasi, melainkan bentuk relasi sosial yang menciptakan batas antara yang publik dan yang privat, antara orang dalam dan orang luar. Kemampuan untuk menyimpan rahasia dan menciptakan ruang privat adalah elemen penting dalam konstruksi individualitas dan otonomi personal (Simmel, 1906).

Dalam masyarakat kecil dan homogen, kemungkinan untuk kerahasiaan sangat terbatas karena transparensi sosial yang tinggi. Transparensi hampir total karena setiap orang mengenal urusan setiap orang lainnya dalam detail yang intim. Modernisasi dan urbanisasi menciptakan kondisi di mana kerahasiaan menjadi lebih mungkin dan bahkan necessary untuk fungsi psikologis yang sehat. Anonimitas relatif dalam kota besar memberikan ruang untuk privasi yang tidak tersedia di komunitas kecil. Seseorang dapat memisahkan berbagai aspek kehidupannya—kehidupan profesional, kehidupan keluarga, kehidupan pribadi—dengan cara yang sulit dilakukan dalam masyarakat yang lebih transparan.

Simmel menganalisis berbagai gradasi kerahasiaan, dari rahasia total hingga semi-kerahasiaan yang lebih selektif. Ia membedakan antara penyembunyian pasif—ketika informasi tidak dibagikan tetapi tidak secara aktif disembunyikan—dan penyembunyian aktif yang melibatkan usaha deliberate untuk melindungi informasi dari orang lain. Rahasia yang paling powerful adalah yang keberadaannya sendiri tidak diketahui—ketika orang lain bahkan tidak tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari mereka. Ini memberikan keuntungan strategis yang signifikan dalam berbagai konteks sosial, dari politik hingga bisnis.

Organisasi rahasia atau perkumpulan tersembunyi menjadi objek analisis khusus Simmel. Ia mengamati bahwa kerahasiaan bersama menciptakan ikatan yang sangat kuat di antara anggota kelompok. Berbagi rahasia menghasilkan solidaritas intensif karena menciptakan batas yang jelas antara orang dalam yang tahu dan orang luar yang tidak tahu. Ritual inisiasi, simbol-simbol khusus, dan kode komunikasi yang hanya dipahami oleh anggota—semua ini memperkuat identitas kolektif kelompok dan loyalitas anggota terhadapnya dalam cara yang powerful.

Namun kerahasiaan juga memiliki efek paradoks dalam dinamika sosial. Di satu sisi, ia menciptakan kesenjangan kekuasaan—mereka yang memiliki

informasi rahasia memiliki keunggulan atas mereka yang tidak tahu. Di sisi lain, kerahasiaan juga menciptakan kerentanan—jika rahasia terungkap, dampaknya bisa sangat destruktif. Skandal adalah fenomena yang hanya mungkin dalam masyarakat di mana ada ekspektasi kerahasiaan atau privasi; ketika yang privat menjadi publik secara tiba-tiba dan tidak terkontrol, efeknya bisa menghancurkan reputasi atau institusi dengan cepat.

Dalam konteks modernitas lanjut, Simmel mengantisipasi ketegangan antara tuntutan transparensi dan kebutuhan akan privasi yang menjadi isu sentral dalam masyarakat kontemporer. Institusi-institusi modern seperti negara birokratis atau korporasi mengklaim hak untuk mengetahui informasi personal untuk tujuan administrasi dan efisiensi. Pada saat yang sama, individu menuntut hak privasi dan perlindungan terhadap intrusi yang tidak diinginkan. Negosiasi antara transparensi dan kerahasiaan, antara publik dan privat, menjadi arena kontestasi yang terus-menerus dalam masyarakat modern dan akan semakin krusial di era digital.

Dialektika Subjektif dan Objektif

Salah satu tema sentral dalam pemikiran Simmel adalah ketegangan antara budaya subjektif dan budaya objektif dalam masyarakat modern. Budaya subjektif merujuk pada pengembangan personal individu—kapasitas intelektual, emosional, estetik, dan moral yang membentuk kepribadian yang terpadu dan bermakna. Budaya objektif merujuk pada akumulasi produk-produk budaya eksternal—teknologi, ilmu pengetahuan, institusi, karya seni—yang berkembang mengikuti logika internal mereka sendiri, terlepas dari kebutuhan pengembangan personal individu yang menciptakannya.

Dalam masyarakat tradisional yang relatif stabil dan sederhana, ada keseimbangan relatif antara budaya subjektif dan objektif. Individu dapat menguasai sebagian besar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan budaya komunitasnya. Tetapi modernitas menghasilkan akselerasi dramatis dalam perkembangan budaya objektif. Produk-produk budaya—dari teknologi hingga karya seni, dari teori ilmiah hingga sistem hukum—terakumulasi dengan kecepatan yang jauh melampaui kemampuan individu untuk menginternalisasi dan mengintegrasikannya kedalam kepribadiannya.

Ketidakseimbangan ini menciptakan apa yang Simmel sebut sebagai tragedi budaya—situasi di mana individu semakin terasing dari produk-produk budayanya sendiri. Seorang ilmuwan hanya dapat menguasai sub-spesialisasi

sempit dalam disiplinnya; seorang pekerja hanya terlibat dalam fragment kecil dari proses produksi; seorang konsumen dikelilingi oleh teknologi yang cara kerjanya tidak ia pahami. Keterasing ini bukan dari eksploitasi ekonomi semata seperti dalam teori Marx, tetapi dari kompleksitas dan diferensiasi yang inheren dalam masyarakat modern yang terdiferensiasi secara fungsional.

Simmel mengidentifikasi beberapa respons terhadap tragedi budaya ini. Satu respons adalah spesialisasi—individu fokus pada penguasaan domain yang sangat sempit dan melepaskan ambisi untuk pemahaman komprehensif tentang keseluruhan. Ini memungkinkan keahlian tinggi dalam area terbatas tetapi menghasilkan fragmentasi kepribadian yang mendalam. Respons lain adalah konsumsi budaya yang superfisial—individu mengkonsumsi berbagai produk budaya tanpa benar-benar menginternalisasikannya secara mendalam, menghasilkan apa yang kadang disebut sebagai pengetahuan yang luas tetapi dangkal, tanpa pemahaman yang substantif.

Perspektif yang lebih ideal, menurut Simmel, adalah pengembangan bentuk baru dari individualitas yang dapat mengintegrasikan fragmentasi modern dengan cara yang kreatif. Ini memerlukan apa yang ia sebut sebagai kultur individual—kemampuan untuk memilih secara selektif dari lautan budaya objektif yang tersedia dan mengintegrasikannya menjadi sintesis personal yang bermakna. Individu tidak dapat menguasai seluruh budaya objektif, tetapi dapat menciptakan konfigurasi unik dari elemen-elemen budaya yang resonan dengan kepribadian dan proyek hidupnya. Ini mirip dengan konsep gaya hidup dalam sosiologi kontemporer—cara individu menciptakan identitas melalui seleksi dan kombinasi elemen-elemen budaya yang tersedia di sekitarnya.

7.5 Pengaruh terhadap Sosiologi Mikro

Interaksi Simbolik dan Chicago School

Pengaruh Simmel terhadap perkembangan sosiologi di Amerika Serikat, khususnya melalui Chicago School, sangat signifikan meskipun sering tidak diakui secara eksplisit dalam literatur. Robert Park, salah satu pendiri Chicago School, pernah belajar dengan Simmel di Berlin dan membawa banyak ide Simmelian ke dalam studinya tentang ekologi urban dan relasi ras. Konsep-konsep seperti orang asing, jarak sosial, dan persaingan dan konflik sebagai proses sosial yang sentral dalam pemikiran Park memiliki akar Simmelian yang jelas dan dapat ditelusuri.

Pendekatan Chicago School terhadap studi urban sangat dipengaruhi oleh perspektif Simmel tentang metropolis dan dinamika kehidupan kota. Studi klasik seperti karya Louis Wirth atau karya Nels Anderson mengadopsi sensitivitas Simmelian terhadap bentuk-bentuk kehidupan sosial yang muncul dalam konteks urban yang spesifik. Mereka mempelajari bagaimana kelompok-kelompok marginal—imigran, tunawisma, penjahat—menciptakan dunia sosial mereka sendiri dengan norma dan pola interaksi yang khas. Ini sejalan dengan penekanan Simmel pada diversitas bentuk sosiasi dalam masyarakat modern yang kompleks.

Tradisi interaksionisme simbolik yang berkembang dari Chicago School juga memiliki resonansi dengan pemikiran Simmel. Meskipun George Herbert Mead lebih sering dikutip sebagai pendiri interaksionisme simbolik, Simmel sebenarnya telah mengantisipasi banyak tema sentral dalam perspektif ini—fokus pada interaksi tatap muka, peran interpretasi subjektif dalam konstruksi realitas sosial, dan proses pembentukan diri melalui interaksi dengan orang lain. Herbert Blumer, yang mengkodifikasi prinsip-prinsip interaksionisme simbolik, secara eksplisit mengakui pengaruh Simmel dalam penekanannya pada proses sosial daripada struktur statis.

Erving Goffman, tokoh kunci dalam sosiologi mikro abad ke-20, juga sangat dipengaruhi oleh Simmel meskipun sering mengembangkan idenya ke arah yang baru dan orisinal. Konsep Goffman tentang presentasi diri dalam kehidupan sehari-hari memiliki afin dengan analisis Simmel tentang bagaimana individu memanipulasi informasi tentang diri mereka dalam konteks sosial yang berbeda. Perhatian Goffman terhadap ritual interaksi, teater kehidupan sosial, dan manajemen kesan semuanya dapat ditelusuri kembali ke sensitivitas Simmelian terhadap form dan dinamika interaksi interpersonal yang halus namun signifikan.

Sosiologi Kehidupan Sehari-hari

Simmel dapat dianggap sebagai pelopor sosiologi kehidupan sehari-hari yang kemudian berkembang menjadi subdisiplin penting dalam sosiologi abad ke-20. Berbeda dengan pendekatan makro-sosiologis yang fokus pada struktur besar dan proses historis jangka panjang, Simmel memberikan perhatian pada detail-detail kecil kehidupan sosial yang sering diabaikan—bagaimana orang berinteraksi di pesta makan malam, bagaimana mereka merespons terhadap orang asing di jalan, bagaimana mode mempengaruhi presentasi diri, dan seterusnya. Fokus pada yang tampak trivial ini justru mengungkap dinamika fundamental kehidupan sosial.

Pendekatan ini mengantisipasi fenomenologi sosial yang dikembangkan oleh Alfred Schutz dan kemudian oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann. Seperti Simmel, fenomenolog sosial tertarik pada bagaimana individu mengkonstruksi dan mempertahankan realitas sosial melalui praktik-praktik kehidupan sehari-hari yang tampaknya trivial. Konsep Schutz tentang dunia kehidupan—domain pengalaman sehari-hari yang taken-for-granted—memiliki resonansi dengan perhatian Simmel terhadap bentuk-bentuk interaksi yang tampak sederhana namun fundamental dalam membentuk kehidupan sosial yang lebih luas.

Etnometodologi yang dikembangkan oleh Harold Garfinkel juga dapat dilihat sebagai kelanjutan dari tradisi Simmelian, meskipun dengan penekanan yang berbeda pada metode praktis. Etnometodologi mempelajari metode-metode praktis yang digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat sense dari dunia sosial mereka dan menghasilkan tatanan sosial. Seperti Simmel, etnometodologi menolak asumsi bahwa tatanan sosial adalah given atau alamiah, dan sebaliknya melihatnya sebagai prestasi yang terus-menerus dihasilkan melalui praktik-praktik interaksional. Fokus pada bagaimana daripada mengapa dalam etnometodologi sejalan dengan pendekatan formal Simmel yang mempelajari bentuk-bentuk interaksi terlepas dari isi spesifiknya.

Sosiologi emosi kontemporer juga berutang pada Simmel, meskipun tidak selalu secara langsung atau eksplisit. Perhatian Simmel terhadap dimensi emosional kehidupan sosial—seperti dalam analisisnya tentang cinta, ketakutan, rasa malu, atau rasa syukur—mengantisipasi perkembangan subdisiplin yang mempelajari bagaimana emosi dibentuk secara sosial dan berfungsi dalam interaksi sosial. Arlie Hochschild, misalnya, dalam studinya tentang kerja emosional, mengkaji bagaimana pekerjaan tertentu menuntut manajemen emosi yang spesifik, tema yang bergema dengan analisis Simmel tentang fragmentasi kepribadian dalam masyarakat modern.

Studi tentang budaya material dan konsumsi dalam sosiologi kontemporer juga dapat ditelusuri kembali ke Simmel. Analisisnya tentang mode, uang, dan objek-objek material sebagai mediator relasi sosial membuka jalan untuk pemahaman bahwa benda-benda bukan sekadar objek pasif tetapi aktif membentuk kehidupan sosial. Pierre Bourdieu dalam studinya tentang distinsi sosial melalui konsumsi budaya, atau Bruno Latour dalam teori aktor-jaringan yang melihat objek non-manusia sebagai agen, semuanya melanjutkan dan mengembangkan insight Simmelian tentang materialitas kehidupan sosial.

Teori Jaringan Sosial

Meskipun Simmel tidak menggunakan terminologi jaringan sosial secara eksplisit, konsep-konsepnya tentang bentuk-bentuk sosiasi, geometri sosial, dan persilangan lingkaran sosial dapat dilihat sebagai prekursor penting dari teori jaringan sosial modern. Pendekatan Simmel yang fokus pada pola-pola relasional daripada atribut individual mengantisipasi perspektif struktural yang menjadi ciri khas analisis jaringan sosial dalam sosiologi kontemporer.

Analisis Simmel tentang kelompok dua orang dan kelompok tiga orang menjadi fondasi untuk pemahaman struktural tentang jaringan sosial. Ia menunjukkan bahwa struktur relasional memiliki efek independen terhadap proses sosial, terlepas dari karakteristik individual aktor-aktor yang terlibat. Ini adalah premis fundamental dari analisis jaringan sosial—bahwa posisi seseorang dalam struktur jaringan mempengaruhi peluang, kendala, dan perilaku mereka dengan cara yang tidak dapat diprediksi hanya dari atribut individual mereka seperti pendidikan, kekayaan, atau kepribadian.

Konsep posisi struktural yang dikembangkan oleh Ronald Burt dalam teori jaringan modern memiliki afin dengan analisis Simmel tentang peran orang ketiga dalam kelompok tiga orang. Simmel menunjukkan bahwa posisi sebagai mediator atau jembatan antara dua pihak yang tidak terhubung langsung memberikan keuntungan strategis—kontrol terhadap informasi dan sumber daya yang mengalir antara kedua pihak. Burt mengformalisasi insight ini dengan menunjukkan bahwa aktor-aktor yang menduduki posisi jembatan dalam jaringan memiliki akses ke informasi yang lebih beragam dan kontrol yang lebih besar atas aliran sumber daya.

Mark Granovetter dalam tesisnya yang berpengaruh tentang kekuatan ikatan lemah juga mengembangkan intuisi Simmelian. Granovetter menunjukkan bahwa ikatan sosial yang lemah—hubungan yang kasual dan tidak intens—sering lebih valuable daripada ikatan kuat dalam memberikan akses ke informasi baru dan peluang yang tidak tersedia dalam jaringan tertutup. Ini sejalan dengan analisis Simmel tentang bagaimana persilangan berbagai lingkaran sosial yang tidak tumpang tindih sepenuhnya justru memberikan keuntungan dalam mengakses sumber daya yang beragam. Ikatan lemah adalah jembatan yang menghubungkan kelompok-kelompok berbeda yang jika tidak, akan terisolasi satu sama lain.

Teori jaringan kontemporer juga mengadopsi pendekatan formal Simmel dalam membedakan antara struktur relasional sebagai bentuk dan atribut

aktor atau isi relasi sebagai konten. Analisis jaringan sosial mempelajari pola-pola struktural—seperti sentralitas, clustering, atau distribusi derajat—yang dapat ditemukan dalam berbagai jenis jaringan, dari jaringan persahabatan hingga jaringan perdagangan internasional. Universalitas prinsip-prinsip struktural ini sejalan dengan ambisi Simmel untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk universal sosiasi yang berlaku di berbagai konteks historis dan substantif.

Pendekatan Relasional dalam Sosiologi

Warisan metodologis Simmel yang paling fundamental adalah penekanannya pada pendekatan relasional dalam memahami fenomena sosial. Berbeda dengan pendekatan substansialis yang melihat entitas sosial sebagai hal-hal yang memiliki esensi atau properti intrinsik, pendekatan relasional melihat entitas sosial sebagai efek dari relasi-relasi yang membentuknya. Identitas, status, atau kekuasaan bukan atribut yang dimiliki individu secara intrinsik, melainkan posisi dalam jaringan relasi sosial yang terus berubah.

Pendekatan relasional ini memiliki implikasi ontologis dan epistemologis yang signifikan. Secara ontologis, ia menolak individualisme metodologis yang mereduksi fenomena sosial ke properti individual, tetapi juga menolak holisme yang mereifikasi masyarakat sebagai entitas supra-individual yang berdiri sendiri. Sebaliknya, fokusnya adalah pada relasi-relasi sebagai unit analisis fundamental. Secara epistemologis, pendekatan relasional menekankan pentingnya mempelajari pola-pola interaksi dan konfigurasi struktural daripada hanya mengumpulkan atribut individual dalam survei statistik.

Pierre Bourdieu, meskipun berangkat dari tradisi intelektual yang berbeda, mengembangkan perspektif yang resonan dengan pendekatan relasional Simmel. Konsep Bourdieu tentang medan sosial—sebagai ruang posisi-posisi yang didefinisikan secara relasional dalam kaitannya satu sama lain—memiliki afin dengan geometri sosial Simmel. Dalam medan, posisi aktor-aktor didefinisikan bukan oleh properti intrinsik mereka, melainkan oleh relasi objektif mereka dengan aktor-aktor lain, khususnya dalam hal distribusi modal ekonomi, budaya, dan simbolik yang mereka kuasai.

Teori relasional kontemporer yang dikembangkan oleh pemikir seperti Harrison White, Charles Tilly, atau Mustafa Emirbayer secara eksplisit mengakui pengaruh Simmel dalam pembentukan perspektif mereka. White mengembangkan teori tentang bagaimana identitas muncul dari jaringan

relasi yang terus berubah, bukan dari esensi yang stabil dan given. Tilly menerapkan perspektif relasional pada studi tentang politik contentious, menunjukkan bagaimana kategori-kategori politik seperti kelas atau etnis adalah produk dari proses relasional daripada given primordial. Emirbayer mengadvokasi manifesto untuk sosiologi relasional yang menuntut pergeseran dari substansialisme ke pemikiran relasional sebagai paradigma fundamental dalam sosiologi.

Pendekatan relasional juga mempengaruhi berbagai subdisiplin sosiologis di luar teori jaringan yang eksplisit. Sosiologi ekonomi yang dipioneri oleh Granovetter menggunakan perspektif relasional untuk menunjukkan bahwa tindakan ekonomi tertanam dalam jaringan relasi sosial, bukan sekadar hasil dari kalkulasi rasional individu yang atomistik. Sosiologi politik relasional mempelajari bagaimana kekuasaan muncul dari konfigurasi relasional daripada sebagai properti yang dimiliki individu atau institusi secara inherent. Sosiologi budaya relasional mengkaji bagaimana makna dihasilkan melalui relasi-relasi di antara simbol-simbol dalam sistem semiotik, bukan dari referensi langsung ke realitas eksternal yang objektif.

7.6 Transisi Menuju Sosiologi Modern

Posisi Simmel dalam Kanon Sosiologis

Posisi Simmel dalam kanon sosiologis cukup unik dan ambivalen dibanding pendiri sosiologi lainnya. Ia sering ditempatkan bersama Marx, Durkheim, dan Weber sebagai salah satu founding fathers sosiologi klasik, namun pengaruhnya tidak selalu diakui dengan jelas seperti ketiga tokoh lainnya dalam historiografi disiplin. Hal ini sebagian disebabkan oleh gaya penulisan Simmel yang essayistik dan fragmentaris, berbeda dari karya sistematis Durkheim atau Weber yang lebih terstruktur dan komprehensif. Simmel tidak meninggalkan magnum opus tunggal yang mendefinisikan sistemnya secara komprehensif, melainkan koleksi esai-esai brilian tentang berbagai topik yang beragam.

Marginalisasi relatif Simmel dalam kanon juga berkaitan dengan konteks institusionalnya yang problematis. Tidak seperti Durkheim yang membangun institusi sosiologi di Prancis atau Weber yang menjadi figur sentral dalam akademia Jerman, Simmel mengalami diskriminasi akademis karena latar belakang Yahudinya dan hanya memperoleh posisi profesor penuh di akhir kariernya. Ini membatasi kemampuannya untuk membangun sekolah

pemikiran yang terorganisir atau melatih generasi sosiolog yang akan melanjutkan dan mengkodifikasi tradisinya dengan cara yang sistematis.

Namun dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi kebangkitan minat terhadap Simmel yang mengakui kontribusi fundamentalnya terhadap sosiologi. Pemikir-pemikir seperti Lewis Coser, Donald Levine, dan David Frisby telah melakukan upaya sistematis untuk merehabilitasi Simmel dan menunjukkan relevansi pemikirannya untuk sosiologi kontemporer. Studi-studi ini menunjukkan bahwa banyak perkembangan penting dalam sosiologi abad ke-20—dari interaksionisme simbolik hingga teori jaringan, dari sosiologi urban hingga studi tentang modernitas—sebenarnya berakar atau setidaknya prefigured dalam karya Simmel yang sering diabaikan.

Yang membuat Simmel tetap relevan adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi dinamika fundamental kehidupan sosial modern yang tetap berlaku hingga kini. Analisisnya tentang fragmentasi, alienasi, konflik antara kebebasan individual dan ketergantungan sosial, atau ketegangan antara budaya subjektif dan objektif, semuanya masih bergema dalam pengalaman kontemporer. Bahkan tema-tema yang tampaknya spesifik seperti analisisnya tentang mode atau uang ternyata memiliki insight yang dapat diterapkan pada fenomena kontemporer seperti budaya konsumer atau digitalisasi ekonomi dengan modifikasi yang relevan.

Perspektif Simmel menawarkan jalan tengah antara individualisme metodologis dan holisme sosiologis melalui fokus pada relasi dan interaksi, menghindari reduksionisme psikologis tanpa mereifikasi struktur sosial yang mengabaikan agensi manusia—pendekatan yang tetap relevan dalam era pengakuan kompleksitas kehidupan sosial kontemporer.

Modernitas dan Posmodernitas

Relevansi Simmel tidak terbatas pada sosiologi klasik tetapi meluas hingga debat tentang modernitas dan posmodernitas dalam teori sosial kontemporer. Banyak tema yang diidentifikasi Simmel sebagai karakteristik modernitas—fragmentasi pengalaman, pluralitas perspektif, dominasi medium abstrak, kecepatan perubahan—justru diintensifkan dalam kondisi yang sering disebut sebagai posmodern. Beberapa pemikir bahkan berpendapat bahwa Simmel adalah sosiolog posmodern pertama karena sensitivitasnya terhadap ambiguitas, ambivalensi, dan kompleksitas yang menolak sintesis dialektis sederhana.

Analisis Simmel tentang fragmentasi dan diferensiasi mengantisipasi karakteristik yang sering diasosiasikan dengan posmodernitas dalam teori budaya. Konsepnya tentang persilangan lingkaran sosial, di mana individu berpartisipasi dalam berbagai kelompok dengan loyalitas yang mungkin bertentangan, resonan dengan kondisi identitas postmodern yang plural dan fluid. Dalam terminologi posmodern, individu tidak memiliki satu identitas koheren melainkan berbagai posisi subjek yang diaktifkan dalam konteks berbeda dan tidak dapat disintesiskan menjadi satu kesatuan yang stabil.

Tema tentang simulakrum dan hiperrealitas yang sentral dalam teori posmodern Jean Baudrillard juga memiliki preseden dalam analisis Simmel tentang uang dan abstraksi. Simmel menunjukkan bagaimana uang sebagai simbol abstrak dapat menjadi lebih real dan powerful daripada objek-objek konkret yang ia representasikan. Orang mengejar uang bukan untuk apa yang dapat dibeli dengannya, tetapi demi uang itu sendiri sebagai tujuan. Ini mirip dengan logika simulakrum di mana tanda lepas dari referennya dan memperoleh realitas tersendiri yang otonom, bahkan lebih real dari yang asli.

Namun ada juga perbedaan penting antara perspektif Simmel dan teori posmodern yang lebih radikal. Simmel masih mempertahankan kategori-kategori modernis seperti individualitas, objektivitas, dan rasionalitas, meskipun ia menunjukkan ketegangan dan kontradiksi di dalamnya. Teori posmodern cenderung lebih radikal dalam meragukan atau menolak kategori-kategori ini sebagai konstruksi yang harus didekonstruksi. Simmel juga tidak anti-foundationalist sepenuhnya—ia percaya pada kemungkinan mengidentifikasi form universal kehidupan sosial, sementara posmodernisme cenderung skeptis terhadap klaim universalitas semacam itu.

Yang membuat Simmel valuable dalam konteks debat modernitas-posmodernitas adalah kemampuannya untuk mengartikulasikan ketegangan dan ambivalensi tanpa jatuh ke nihilisme atau relativisme radikal. Ia mengakui fragmentasi dan kompleksitas kehidupan modern, tetapi tidak meninggalkan proyek untuk memahaminya secara sistematis dengan tools sosiologis. Ini menawarkan jalan tengah antara modernisme yang terlalu percaya diri dengan totalitas sistemnya dan posmodernisme yang terlalu skeptis untuk membangun apapun yang sistematis atau memiliki klaim kebenaran.

Warisan untuk Teori Sosial Kontemporer

Warisan Simmel untuk teori sosial kontemporer bersifat multifaset dan terus berkembang dalam berbagai arah. Salah satu kontribusi yang paling bertahan adalah pendekatannya yang anti-reduksionis terhadap fenomena sosial. Simmel menunjukkan bahwa fenomena sosial tidak dapat direduksi ke level individual dalam bentuk psikologi maupun ke level makro yang reified dalam bentuk holisme sosial yang deterministik, melainkan harus dipahami pada level relasional—level interaksi dan form sosiasi. Perspektif ini tetap relevan dalam debat kontemporer tentang mikro-makro link dan hubungan antara agensi dan struktur.

Konsep-konsep spesifik Simmel juga terus menginspirasi penelitian empiris dan pengembangan teoretis dalam sosiologi kontemporer. Konsep orang asing telah diterapkan untuk memahami berbagai fenomena mulai dari pengalaman migran dan diaspora hingga posisi marginal intelektual dan artist dalam masyarakat. Analisisnya tentang konflik telah diperluas untuk memahami berbagai bentuk politik contentious dan gerakan sosial dalam masyarakat demokratis. Konsepnya tentang mode terus relevan dalam studi tentang konsumsi, identitas, dan budaya populer di era media sosial.

Pendekatan formal Simmel juga memberikan kontribusi metodologis yang bertahan hingga kini. Dalam era di mana big data dan computational social science semakin dominan, kemampuan untuk mengidentifikasi pola-pola struktural dan form universal dalam data yang masif menjadi semakin penting. Analisis jaringan sosial, misalnya, mewarisi spirit Simmelian dalam fokusnya pada struktur relasional dan form yang dapat diidentifikasi secara formal daripada hanya konten spesifik yang partikular.

Sensitivitas Simmel terhadap detail dan nuansa kehidupan sosial juga tetap valuable di era di mana quantitative methods sering mendominasi produksi pengetahuan sosiologis. Pendekatan essayistik Simmel—yang memperhatikan fenomena yang tampak trivial namun mengandung insight tentang dinamika sosial yang lebih luas—mengingatkan pentingnya observasi kualitatif yang cermat dan interpretasi yang sensitif terhadap makna. Sosiologi tidak hanya tentang mengidentifikasi pola-pola statistik dalam data besar, tetapi juga tentang memahami makna dan pengalaman yang membentuk kehidupan sosial yang sesungguhnya.

Akhirnya, Simmel menawarkan model intelektual yang berbeda dari model *grand theory* yang sistematis dan komprehensif. Karyanya menunjukkan bahwa kontribusi intelektual yang signifikan tidak harus datang dalam bentuk sistem teoretis yang monumental, tetapi dapat berupa koleksi insight yang

brilian tentang berbagai aspek kehidupan sosial. Dalam konteks kontemporer di mana skeptisisme terhadap grand narratives semakin kuat, model Simmelian tentang teori yang fragmentaris namun insightful mungkin lebih appropriate daripada ambisi untuk membangun teori total yang mencakup segalanya dalam satu sistem tertutup.

Kesimpulan

Georg Simmel menandai transisi penting dalam sejarah pemikiran sosiologis dari sosiologi klasik awal yang masih mencari identitas menuju sosiologi modern yang lebih matang dan terspesialisasi. Kontribusinya bersifat multidimensional—metodologis, substantif, dan teoretis—yang semuanya terus relevan untuk memahami kehidupan sosial kontemporer. Secara metodologis, ia memperkenalkan pendekatan formal yang mempelajari form-form universal sosiasi, mengantisipasi perkembangan analisis struktural dan jaringan sosial. Secara substantif, ia menganalisis berbagai fenomena kehidupan modern—dari uang dan metropolis hingga mode dan kerahasiaan—dengan kedalaman dan sensitivitas yang tetap menginspirasi hingga kini.

Penekanan Simmel pada level mikro-sosiologis—interaksi, relasi, dan bentuk-bentuk sosiasi—memberikan balance terhadap dominasi perspektif makro dalam sosiologi klasik awal. Ia menunjukkan bahwa memahami struktur besar masyarakat tidak cukup; kita juga perlu memahami dinamika interaksional yang menghasilkan dan mereproduksi struktur tersebut dalam praktik sehari-hari. Pendekatan ini membuka jalan bagi perkembangan sosiologi mikro, interaksionisme simbolik, etnometodologi, dan berbagai perspektif yang fokus pada kehidupan sehari-hari yang sering diabaikan dalam analisis makro.

Analisis Simmel tentang modernitas juga memberikan framework yang kaya untuk memahami transformasi sosial dan budaya yang menyertai kapitalisasi, urbanisasi, dan rasionalisasi dalam masyarakat industrial. Ia mengidentifikasi paradoks-paradoks fundamental modernitas—antara kebebasan dan ketergantungan, antara individualitas dan massa, antara budaya subjektif dan objektif—yang tetap menjadi ketegangan sentral dalam masyarakat kontemporer bahkan dalam bentuk yang lebih kompleks. Sensitivitasnya terhadap ambivalensi dan kompleksitas membuatnya lebih nuanced dibanding narasi modernis yang terlalu optimistis atau pesimis secara simplistik.

Warisan Simmel untuk sosiologi kontemporer tidak hanya terletak pada konsep-konsep spesifik yang ia kembangkan, tetapi juga pada cara pandang atau sensibilitas teoretisnya yang khas. Ia mengajarkan pentingnya memperhatikan detail, melihat signifikansi sosiologis dalam fenomena yang tampak trivial, dan mengenali form universal dalam keragaman konten spesifik. Pendekatan relasional yang ia pioniri tetap menjadi alternatif penting terhadap baik individualisme metodologis maupun holisme yang reified dalam teori sosial kontemporer.

Dalam konteks perkembangan sosiologi sebagai disiplin akademis, Simmel berperan penting dalam transisi dari sosiologi filosofis spekulatif menuju sosiologi yang lebih empiris dan fokus pada fenomena konkret. Meskipun ia sendiri tidak melakukan banyak penelitian empiris kuantitatif, konsep-konsepnya terbukti sangat aplikabel untuk studi empiris tentang berbagai fenomena sosial. Chicago School, interaksionisme simbolik, teori jaringan, dan berbagai tradisi penelitian lainnya mewarisi dan mengembangkan insight Simmelian dalam konteks empiris yang spesifik dan beragam.

Posisi Simmel dalam kanon sosiologis mungkin tidak seprominen Durkheim atau Weber dalam historiografi konvensional, tetapi kontribusinya tidak kalah fundamental untuk perkembangan disiplin. Jika Durkheim memberikan visi tentang sosiologi sebagai ilmu tentang fakta sosial dan Weber tentang tindakan bermakna dan rasionalisasi, Simmel memberikan visi tentang sosiologi sebagai ilmu tentang form-form sosiasi dan dinamika relasional. Ketiga perspektif ini saling melengkapi dalam membentuk fondasi teoretis dan metodologis sosiologi modern yang plural dan multi-paradigmatik.

Relevansi Simmel tidak terbatas pada sejarah pemikiran sosiologis tetapi meluas hingga pemahaman tentang kondisi kontemporer yang semakin kompleks. Tema-tema yang ia identifikasi—fragmentasi, diferensiasi, ambivalensi, kecepatan perubahan, dominasi medium abstrak—bahkan lebih akut dalam era globalisasi dan digitalisasi. Analisisnya tentang bagaimana teknologi dan institusi yang diciptakan manusia dapat mengambil kehidupan sendiri dan mendominasi penciptanya sangat relevan dalam konteks kecerdasan buatan, algoritma media sosial, dan sistem teknis kompleks lainnya yang semakin membentuk kehidupan kita dengan cara yang tidak selalu kita pahami atau kendalikan.

Akhirnya, Simmel mengajarkan bahwa sosiologi bukan hanya tentang mengidentifikasi pola-pola sosial atau mengkritik ketidakadilan struktur, tetapi juga tentang memahami dengan empati kompleksitas dan ambiguitas pengalaman manusia dalam masyarakat modern. Pendekatannya yang

menggabungkan analisis formal dengan sensitivitas estetis, rigour intelektual dengan apresiasi terhadap nuansa, menawarkan model intelektual yang tetap inspiratif bagi sosiolog kontemporer. Dalam mempelajari Simmel, kita tidak hanya belajar tentang sejarah sosiologi, tetapi juga mendapatkan tools konseptual dan sensibilitas teoretis untuk memahami dunia sosial kita sendiri yang semakin kompleks dan ambivalen.

Referensi Bab 7

Coser, L. A. (1977). *Masters of sociological thought: Ideas in historical and social context* (2nd ed.). Harcourt Brace Jovanovich.

Frisby, D. (1984). *Georg Simmel*. Tavistock Publications.

Levine, D. N. (1971). Introduction. In D. N. Levine (Ed.), *Georg Simmel on individuality and social forms* (pp. ix-lxv). University of Chicago Press.

Simmel, G. (1900). A chapter in the philosophy of value. *American Journal of Sociology*, *5*(5), 577-https://doi.org/10.1086/210932

Simmel, G. (1903). The sociology of conflict: I. *American Journal of Sociology*, *9*(4), 490-525. https://doi.org/10.1086/211234

Simmel, G. (1906). The sociology of secrecy and of secret societies. *American Journal of Sociology*, *11*(4), 441-498. https://doi.org/10.1086/211418

Simmel, G. (1910). How is society possible? *American Journal of Sociology*, *16*(3), 372-391. https://doi.org/10.1086/211756

Simmel, G. (1950). *The sociology of Georg Simmel* (K. H. Wolff, Trans.). Free Press. (Original work published 1908)

Wikipedia. (2024). The philosophy of money. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/The_Philosophy_of_Money

BAB 8

TEORI SISTEM DAN FUNGSIONALISME STRUKTURAL

Pendahuluan

Fungsionalisme struktural menandai salah satu periode paling dominan dalam sejarah sosiologi abad ke-20, terutama di Amerika Serikat antara tahun 1940-an hingga 1960-an. Perspektif teoretis ini menawarkan visi komprehensif tentang masyarakat sebagai sistem yang terintegrasi, di mana setiap komponen memiliki fungsi spesifik dalam mempertahankan keseimbangan dan stabilitas keseluruhan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kerangka analitis yang sistematis untuk memahami struktur sosial, tetapi juga menjembatani kesenjangan antara teori klasik Eropa—terutama Durkheim—dengan perkembangan sosiologi empiris Amerika yang semakin matang.

Bab ini mengeksplorasi dua tokoh kunci yang membentuk dan mentransformasi fungsionalisme struktural: Talcott Parsons dan Robert K. Merton. Parsons, melalui karya monumentalnya, mengembangkan teori sistem sosial yang ambisius dan komprehensif, berupaya mengintegrasikan berbagai tradisi teoretis—dari Weber hingga Durkheim, dari Pareto hingga Freud—ke dalam kerangka analitis tunggal yang dapat menjelaskan tatanan sosial, perubahan, dan integrasi dalam masyarakat modern. Sistem AGIL yang dikembangkannya menjadi salah satu skema teoretis paling berpengaruh dalam sosiologi, meskipun juga paling kontroversial karena tingkat abstraksinya yang tinggi.

Sementara itu, Merton mengambil jalur yang berbeda namun komplementer. Menyadari keterbatasan *grand theory* yang terlalu abstrak, ia mengembangkan konsep *middle range theory* yang lebih dapat dioperasionalisasi dan diuji secara empiris. Kontribusinya yang paling signifikan terletak pada pemurnian konsep fungsi melalui pembedaan antara fungsi manifes dan laten, serta analisisnya tentang disfungsi dan alternatif fungsional. Merton juga memberikan kritik konstruktif terhadap postulat-postulat fundamental fungsionalisme, membuka jalan bagi pengembangan perspektif yang lebih bernuansa dan berbasis empiris.

Pembahasan dalam bab ini akan dimulai dengan eksplorasi mendalam tentang teori sistem Parsons, termasuk skema AGIL, konsep variabel pola,

dan mekanisme integrasi sosial. Selanjutnya akan dibahas kontribusi Merton dalam mengembangkan *middle range theory*, konsep fungsi manifes dan laten, serta analisis tentang anomie dan struktur sosial. Bagian berikutnya akan mengkaji kritik-kritik fundamental terhadap fungsionalisme dari berbagai perspektif teoretis, mulai dari teori konflik hingga etnometodologi. Terakhir, bab ini akan mengevaluasi warisan fungsionalisme dalam sosiologi kontemporer dan relevansinya untuk memahami dinamika sosial Indonesia.

Konteks Indonesia memberikan lahan yang kaya untuk menerapkan dan menguji proposisi-proposisi fungsionalis. Dari analisis tentang fungsi gotong royong dalam masyarakat pedesaan hingga pemahaman tentang disfungsi dalam sistem pendidikan nasional, dari peran integratif Pancasila hingga kompleksitas otonomi daerah, fungsionalisme menawarkan alat analitis yang berharga meskipun harus diadaptasi dengan hati-hati untuk menangkap kompleksitas masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis. Bab ini akan menunjukkan bagaimana perspektif fungsionalis dapat memberikan wawasan penting sambil tetap kritis terhadap keterbatasannya, terutama kecenderungannya untuk mengabaikan konflik, dominasi, dan transformasi sosial yang merupakan realitas inheren dalam setiap masyarakat.

8.1 Talcott Parsons dan Teori Sistem

Biografi Intelektual dan Konteks Sejarah

Talcott Parsons (1902-1979) lahir dalam keluarga Protestan yang taat di Colorado Springs, Amerika Serikat. Ayahnya adalah seorang pendeta sekaligus presiden perguruan tinggi, yang memberikan Parsons paparan awal terhadap pertanyaan-pertanyaan moral dan institusional tentang tatanan sosial. Pendidikan formalnya dimulai di Amherst College di mana ia mempelajari biologi dan filsafat, kombinasi yang akan mempengaruhi pendekatannya yang sistematis dan analitis terhadap fenomena sosial.

Perjalanan intelektual Parsons mengalami titik balik ketika ia melanjutkan studi di London School of Economics dan kemudian di Universitas Heidelberg, Jerman. Di Heidelberg, ia terpapar langsung dengan tradisi sosiologi Eropa, khususnya karya Max Weber. Disertasi doktoralnya menganalisis konsep kapitalisme dalam pemikiran Weber dan Sombart, menunjukkan ketertarikannya pada hubungan antara ide, nilai, dan struktur ekonomi. Pengalaman Eropa ini memberikan Parsons perspektif komparatif yang luas dan pemahaman mendalam tentang klasik sosiologi yang sebagian besar tidak familiar bagi sosiolog Amerika pada masa itu (Parsons, 1937).

Setelah kembali ke Amerika Serikat, Parsons bergabung dengan Harvard University pada tahun 1927, di mana ia akan menghabiskan seluruh kariernya yang produktif. Konteks intelektual Amerika pada periode ini didominasi oleh empirisme pragmatis dan behaviorisme, yang cenderung skeptis terhadap *grand theory* yang abstrak. Parsons menghadapi tantangan untuk memperkenalkan tradisi teoretis Eropa ke dalam lanskap intelektual Amerika yang lebih empiris dan praktis. Karya pertamanya yang monumental berjudul *The Structure of Social Action* (1937) merupakan usaha ambisius untuk mensintesiskan tradisi teoretis Eropa—terutama Weber, Durkheim, dan Pareto—dan menunjukkan konvergensi mereka menuju teori tindakan voluntaristik.

Periode pasca-Perang Dunia II menandai puncak pengaruh Parsons dalam sosiologi Amerika dan global. Konteks historis ini penting: Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan dominan global, dan ada kebutuhan intelektual untuk memahami proses modernisasi, integrasi sosial dalam masyarakat plural, dan mekanisme stabilitas dalam menghadapi ancaman komunisme. Teori sistem Parsons, dengan penekanannya pada integrasi, konsensus nilai, dan keseimbangan, resonan dengan kebutuhan ideologis periode Perang Dingin ini. Namun, akan keliru untuk mereduksi teori Parsons semata-mata sebagai legitimasi ideologis status quo; ambisi intelektualnya jauh lebih kompleks dan genuine.

Dalam konteks perkembangan sosiologi sebagai disiplin, Parsons berperan krusial dalam mengangkat status teoretis sosiologi. Ia memimpin upaya untuk menjadikan sosiologi sebagai ilmu yang rigorous dengan kerangka konseptual yang sistematis, setara dengan disiplin ilmu lain. Melalui posisinya di Harvard dan jaringan intelektual yang luas, Parsons melatih generasi sosiolog yang akan menjadi tokoh penting dalam disiplin ini, termasuk Robert Merton, Kingsley Davis, dan banyak lainnya. Pengaruhnya meluas tidak hanya dalam sosiologi tetapi juga dalam antropologi, ilmu politik, dan psikologi sosial.

Sistem Sosial dan Konsep Dasar

Karya magnum opus Parsons berjudul *The Social System* (1951) merepresentasikan upaya paling ambisus untuk membangun teori umum tentang sistem sosial. Dalam karya ini, Parsons mendefinisikan sistem sosial sebagai jaringan interaksi di antara aktor-aktor yang berorientasi pada situasi mereka melalui kerangka simbolik yang dibagikan—nilai, norma, dan ekspektasi peran. Sistem sosial bukanlah agregat sederhana dari individu-

individu, melainkan konfigurasi yang terorganisir dari peran-peran sosial yang saling bergantung (Parsons, 1951).

Konsep fundamental dalam teori Parsons adalah pembedaan antara tiga sistem: sistem kepribadian, sistem sosial, dan sistem kultural. Sistem kepribadian mengacu pada organisasi psikologis individual, termasuk motivasi, kebutuhan, dan disposisi. Sistem sosial mengacu pada pola-pola interaksi yang terinstitusionalisasi di antara aktor-aktor. Sistem kultural mengacu pada pola-pola simbolik yang memberikan makna dan orientasi nilai. Ketiga sistem ini saling menembus namun memiliki otonomi relatif dan logika operasi tersendiri.

Integrasi sosial, menurut Parsons, bergantung pada dua mekanisme utama: institusionalisasi dan internalisasi. Institusionalisasi adalah proses di mana pola-pola normatif menjadi tertanam dalam struktur sosial sebagai ekspektasi yang sah. Internalisasi adalah proses di mana nilai-nilai dan norma-norma menjadi bagian dari struktur kepribadian individu melalui sosialisasi. Ketika nilai-nilai terinternalisasi dengan sukses dan institusi berfungsi secara efektif, maka terdapat komplementaritas antara ekspektasi-ekspektasi peran dan motivasi-motivasi individu, menghasilkan integrasi sosial yang stabil.

Parsons memperkenalkan konsep *pattern variables* (variabel pola) sebagai dilema-dilema orientasi yang fundamental yang dihadapi aktor dalam situasi tindakan. Lima variabel pola tersebut adalah: pertama, afektivitas versus netralitas afektif (apakah merespons secara emosional atau menjaga jarak emosional); kedua, orientasi diri versus orientasi kolektif (mengejar kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok); ketiga, universalisme versus partikularisme (menerapkan standar umum atau mempertimbangkan relasi khusus); keempat, prestasi versus askripsi (menilai berdasarkan pencapaian atau status yang diberikan); dan kelima, spesifisitas versus difusitas (keterlibatan yang terbatas atau menyeluruh).

Kombinasi pilihan-pilihan dalam variabel pola ini mendefinisikan karakteristik dari berbagai peran dan institusi sosial. Misalnya, peran dokter dalam masyarakat modern dicirikan oleh netralitas afektif, universalisme, orientasi kolektif, fokus pada prestasi, dan spesifisitas hubungan dengan pasien. Sebaliknya, peran dalam keluarga dicirikan oleh afektivitas, partikularisme, orientasi kolektif, askripsi, dan difusitas. Variabel pola memberikan alat analitis untuk membandingkan berbagai tipe sistem sosial dan memahami proses diferensiasi struktural dalam modernisasi.

Konsep keseimbangan dalam teori Parsons sering disalahpahami sebagai asumsi tentang stabilitas statis. Namun, Parsons sebenarnya berbicara tentang keseimbangan dinamis, di mana sistem mempertahankan batas dan pola dasarnya sambil terus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Sistem sosial memiliki mekanisme homeostatis yang menyerap gangguan dan mempertahankan integrasi fundamental. Ketika gangguan terlalu besar untuk diserap, sistem mengalami proses adaptif yang dapat menghasilkan diferensiasi struktural—pemisahan fungsi-fungsi yang sebelumnya tergabung menjadi unit-unit yang lebih spesialistik.

Skema AGIL dan Imperatif Fungsional

Skema AGIL merupakan kontribusi teoretis paling terkenal dan paling kontroversial dari Parsons. AGIL adalah akronim untuk empat fungsi imperatif yang harus dipenuhi oleh setiap sistem tindakan agar dapat bertahan: *Adaptation* (Adaptasi), *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan), *Integration* (Integrasi), dan *Latency* (Pemeliharaan Pola). Keempat fungsi ini merepresentasikan masalah-masalah dasar yang harus dipecahkan oleh sistem apa pun, dari level individu hingga level masyarakat global (Parsons, 1951).

Fungsi Adaptasi mengacu pada kapasitas sistem untuk memperoleh sumber daya dari lingkungan dan mengalokasikannya secara efektif. Dalam masyarakat, subsistem ekonomi terutama bertanggung jawab untuk fungsi adaptasi. Ekonomi mengorganisir produksi dan distribusi barang dan jasa, memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan material anggotanya dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. Institusi seperti pasar, perusahaan, dan sistem perbankan adalah mekanisme utama yang melaksanakan fungsi adaptasi.

Fungsi Pencapaian Tujuan mengacu pada kapasitas untuk mobilisasi sumber daya dan koordinasi upaya kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Subsistem politik, terutama pemerintahan dan organisasi politik, bertanggung jawab untuk fungsi ini. Politik mendefinisikan tujuan-tujuan kolektif, membuat keputusan yang mengikat, dan memobilisasi sumber daya untuk implementasi kebijakan. Kekuasaan, dalam analisis Parsons, adalah kapasitas sistem untuk mengorganisir dan memobilisasi sumber daya untuk pencapaian tujuan kolektif, bukan semata-mata dominasi sepihak.

Fungsi Integrasi mengacu pada koordinasi dan kontrol internal yang mempertahankan solidaritas sosial dan mengelola konflik potensial di antara

unit-unit sistem. Subsistem komunitas sosial, yang mencakup asosiasi sukarela, gerakan sosial, dan institusi yang mengatur keanggotaan dan loyalitas, melaksanakan fungsi integratif. Hukum memainkan peran krusial dalam integrasi dengan mendefinisikan hak-hak dan kewajiban, mengatur konflik, dan memberikan kerangka normatif yang mengikat berbagai kelompok dalam masyarakat.

Fungsi Pemeliharaan Pola mengacu pada pemeliharaan dan transmisi pola-pola nilai dan manajemen ketegangan-ketegangan yang muncul dari partisipasi dalam sistem sosial. Subsistem kultural, terutama keluarga, sistem pendidikan, dan institusi religius, bertanggung jawab untuk sosialisasi, internalisasi nilai, dan reproduksi kultural. Fungsi ini memastikan kontinuitas kultural lintas generasi dan memberikan makna serta legitimasi terhadap tatanan sosial yang ada.

Parsons mengembangkan skema AGIL tidak hanya untuk level masyarakat secara keseluruhan tetapi juga untuk setiap subsistem. Dengan demikian, ekonomi sebagai subsistem adaptasi memiliki sendiri empat sub-subsistem yang melaksanakan fungsi AGIL dalam konteks ekonomi. Ini menghasilkan hierarki sistem yang bersarang, dari level paling mikro hingga paling makro, dengan setiap level dapat dianalisis menggunakan skema yang sama. Pendekatan ini memberikan alat analitis yang kuat tetapi juga menghasilkan kompleksitas yang ekstrem.

Kritik terhadap skema AGIL sering fokus pada sifatnya yang terlalu abstrak dan sulit dioperasionalisasi dalam penelitian empiris. Namun, pendukung Parsons berpendapat bahwa abstraksi diperlukan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip universal yang berlaku di berbagai konteks. Skema AGIL memberikan kerangka komparatif untuk menganalisis berbagai tipe masyarakat, dari yang sederhana hingga yang kompleks, dan memahami proses diferensiasi struktural dalam modernisasi sebagai pemisahan progresif fungsi-fungsi yang sebelumnya tergabung.

Teori Evolusi Sosial dan Modernisasi

Dalam fase lanjut pemikirannya, Parsons mengembangkan teori evolusi sosial yang berupaya menjelaskan pola-pola perkembangan masyarakat dari yang sederhana hingga yang kompleks. Teori evolusi Parsons dipengaruhi oleh teori evolusi biologis tetapi diadaptasi untuk konteks sosial dengan penekanan pada diferensiasi, adaptasi, dan integrasi. Tidak seperti evolusionisme unilinear abad ke-19, Parsons mengakui kemungkinan jalur

perkembangan berganda dan tidak menganggap evolusi sebagai progres otomatis menuju masyarakat yang lebih baik (Parsons, 1966).

Konsep kunci dalam teori evolusi Parsons adalah *evolutionary universals* (universal evolusioner)—perkembangan struktural atau institusional yang meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat sedemikian rupa sehingga cenderung dipertahankan atau diadopsi oleh masyarakat lain. Contoh universal evolusioner meliputi: stratifikasi sosial yang memungkinkan diferensiasi peran; legitimasi kultural yang memberikan kohesi; birokrasi yang meningkatkan efisiensi administrasi; uang dan pasar yang memfasilitasi pertukaran; dan demokrasi yang memungkinkan partisipasi politik luas. Setiap universal evolusioner meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menangani kompleksitas dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah.

Proses fundamental dalam evolusi sosial adalah diferensiasi struktural—pemisahan unit-unit yang sebelumnya multifungsional menjadi unit-unit yang lebih spesialistik. Dalam masyarakat primitif, keluarga luas melaksanakan hampir semua fungsi: ekonomi, politik, pendidikan, religius. Modernisasi melibatkan diferensiasi progresif di mana fungsi-fungsi ini diambil alih oleh institusi-institusi spesialistik: perusahaan untuk produksi ekonomi, negara untuk fungsi politik, sekolah untuk pendidikan, gereja untuk fungsi religius. Diferensiasi meningkatkan efisiensi fungsional tetapi juga menciptakan masalah integrasi baru yang memerlukan mekanisme koordinasi yang lebih canggih.

> "Parsons mengembangkan teori evolusi sosial dengan konsep universals seperti stratifikasi, birokrasi, pasar, dan demokrasi, menekankan diferensiasi struktural serta jalur perkembangan berganda tanpa menjamin progres otomatis menuju masyarakat modern."

Parsons mengidentifikasi tiga tipe masyarakat dalam skema evolusioner: primitif, menengah, dan modern. Masyarakat primitif dicirikan oleh diferensiasi yang minimal, dominasi kekerabatan, dan tidak adanya bahasa tertulis. Masyarakat menengah mengembangkan bahasa tertulis, stratifikasi yang lebih kompleks, dan institusi politik yang lebih terdiferensiasi. Masyarakat modern dicirikan oleh diferensiasi ekstensif, birokrasi rasional, sistem legal universal, ekonomi pasar, dan sistem pendidikan massal. Transisi

antar tipe ini tidak deterministik tetapi bergantung pada kondisi-kondisi spesifik dan kontingensi historis.

Dalam analisisnya tentang modernitas, Parsons menekankan pentingnya pluralisme institusional dan inklusivitas. Masyarakat modern yang sukses ditandai oleh kemampuan untuk mengintegrasikan keragaman melalui universalisme normatif—penerapan standar-standar yang sama terlepas dari partikularitas kelompok. Sistem legal modern, misalnya, memberikan hak-hak yang sama kepada semua warga negara tanpa memandang identitas bawaan. Demokrasi memungkinkan partisipasi politik luas dan transfer kekuasaan yang damai. Ekonomi pasar mengalokasikan sumber daya berdasarkan efisiensi daripada patronase atau privilese tradisional.

Teori modernisasi Parsons telah dikritik sebagai etnosentris dan mengidealisasi pengalaman Barat, terutama Amerika Serikat, sebagai model universal. Kritikus menunjukkan bahwa teori ini mengabaikan dimensi eksploitatif modernisasi—kolonialisme, imperialisme, dan eksploitasi ekonomi—yang memungkinkan modernisasi Barat. Dalam konteks Indonesia, teori modernisasi Parsonian harus dievaluasi secara kritis dengan mempertimbangkan konteks kolonial dan pascakolonial yang membentuk trajektori perkembangan yang sangat berbeda dari Barat. Namun, alat analitis Parsons tentang diferensiasi struktural tetap berguna untuk memahami transformasi institusional Indonesia.

8.2 Robert K. Merton dan *Middle Range Theory*

Kritik terhadap Grand Theory dan Konsep Middle Range Theory

Robert K. Merton (1910-2003) merupakan salah satu sosiolog paling berpengaruh abad ke-20, tidak hanya karena kontribusi teoretisnya yang substansial tetapi juga karena perannya dalam membentuk standar metodologis dan etos profesional dalam sosiologi. Lahir dalam keluarga imigran Yahudi di Philadelphia, Merton mengalami mobilitas sosial melalui pendidikan—pengalaman yang akan membentuk minat intelektualnya pada struktur peluang, anomie, dan fungsi institusi sosial dalam masyarakat modern. Ia memperoleh gelar doktor dari Harvard di bawah bimbingan Parsons, tetapi mengembangkan pendekatan yang berbeda dan dalam banyak hal melengkapi teori sistemik gurunya (Merton, 1968).

Kontribusi metodologis terpenting Merton adalah konsep *theories of the middle range* (teori jangka menengah), yang ia artikulasikan sebagai alternatif terhadap dua ekstrem dalam sosiologi: *grand theory* yang terlalu abstrak dan

empirisme sempit yang ateoretis. Dalam esainya yang berpengaruh, Merton mengkritik baik *grand theory* ala Parsons yang beroperasi pada tingkat abstraksi sangat tinggi sehingga sulit dihubungkan dengan penelitian empiris, maupun penelitian empiris yang mengumpulkan data tanpa panduan teoretis yang jelas. *Middle range theory* adalah teori yang ruang lingkupnya menengah—cukup umum untuk berlaku di berbagai konteks tetapi cukup spesifik untuk dapat dioperasionalisasi dan diuji secara empiris (Merton, 1949).

Karakteristik *middle range theory* adalah fokusnya pada aspek-aspek spesifik dari fenomena sosial daripada mengklaim menjelaskan seluruh sistem sosial. Contoh-contoh yang diberikan Merton meliputi: teori kelompok referensi, teori deviasi, teori perangkat peran, dan teorinya sendiri tentang anomie. Teori-teori ini cukup umum untuk memiliki aplikasi luas tetapi cukup konkret untuk menghasilkan hipotesis yang dapat diuji. *Middle range theory* tidak berusaha untuk menurunkan proposisi dari prinsip-prinsip filosofis pertama tetapi berkembang dari observasi empiris dan kodifikasi dari keteraturan-keteraturan yang diamati.

Merton juga menekankan pentingnya kodifikasi—pernyataan sistematis dari temuan dan konsep dalam bentuk yang kumulatif. Sosiologi, menurutnya, harus mengembangkan inventori dari hubungan-hubungan yang telah terbentuk dan kondisi-kondisi di mana mereka berlaku. Ini berbeda dari pendekatan *grand theory* yang berusaha membangun sistem komprehensif dari prinsip-prinsip umum. Kodifikasi memfasilitasi akumulasi pengetahuan karena memungkinkan peneliti untuk membangun di atas temuan sebelumnya, mengidentifikasi kesenjangan, dan mengembangkan teori-teori yang lebih halus seiring waktu.

Dalam konteks perdebatan metodologis pada masa itu, posisi Merton merepresentasikan jalan tengah antara formalisme Parsonian dan empirisme *Columbia school* yang dipimpin oleh Paul Lazarsfeld. Merton menghargai pentingnya kejelasan konseptual yang ditekankan Parsons tetapi juga mengakui kebutuhan untuk pembuktian teoritis dalam penelitian empiris yang ketat. Kolaborasinya dengan Lazarsfeld di Columbia University menghasilkan sintesis produktif antara orientasi teoretis dan kecanggihan metodologis, menjadikan Columbia sebagai pusat penelitian sosiologi terkemuka.

Pengaruh Merton dalam membentuk sosiologi sebagai disiplin ilmiah juga terlihat dalam penekanannya pada *ethos* (etos) komunitas ilmiah. Dalam esainya tentang struktur normatif sains, Merton mengidentifikasi empat

norma fundamental: universalisme (klaim dievaluasi berdasarkan kriteria impersonal), komunalisme (hasil penelitian adalah milik bersama), ketidakberpihakan (motivasi untuk kebenaran daripada keuntungan pribadi), dan skeptisisme terorganisir (pemeriksaan kritis terhadap klaim). Norma-norma ini, meskipun sering dilanggar dalam praktik, memberikan ideal yang membentuk identitas profesional sosiolog.

Fungsi Manifes dan Laten

Kontribusi teoretis paling berpengaruh dari Merton adalah pembedaannya antara fungsi manifes dan fungsi laten, yang memurnikan dan merefinasi analisis fungsional. Fungsi manifes adalah konsekuensi-konsekuensi objektif yang berkontribusi pada penyesuaian atau adaptasi sistem dan dimaksudkan serta diakui oleh partisipan sistem. Fungsi laten adalah konsekuensi-konsekuensi yang tidak dimaksudkan maupun tidak diakui tetapi tetap berkontribusi pada sistem. Pembedaan ini krusial karena menunjukkan bahwa motivasi subjektif aktor dan fungsi objektif dari tindakan mereka dapat berbeda (Merton, 1968).

Merton memberikan contoh klasik dalam analisisnya tentang ritual tari hujan di antara suku Indian Hopi. Fungsi manifes dari ritual tersebut adalah untuk menghasilkan hujan—ini adalah tujuan yang disadari dan dinyatakan dari partisipan. Namun, fungsi laten ritual tersebut adalah untuk memperkuat identitas kolektif kelompok, memberikan saluran untuk kecemasan dalam menghadapi ketidakpastian, dan menegaskan kembali solidaritas sosial. Fungsi laten inilah yang sebenarnya menjelaskan persistensi ritual meski hujan tidak benar-benar dihasilkan oleh upacara tersebut.

Dalam konteks masyarakat modern, Merton menganalisis berbagai institusi dengan membedakan fungsi manifes dan laten. Mesin politik di kota-kota Amerika, misalnya, secara manifes melanggar norma-norma demokrasi ideal, tetapi memiliki fungsi laten dalam menyediakan layanan sosial, memfasilitasi mobilitas sosial untuk kelompok imigran, dan menciptakan saluran pengaruh yang dapat diakses. Memahami fungsi laten ini penting untuk menjelaskan mengapa institusi yang tampaknya irasional atau korup dapat bertahan—mereka memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh institusi formal.

Pembedaan manifes-laten juga relevan untuk memahami konsekuensi tak terencana dari tindakan yang bertujuan—tema yang sentral dalam sosiologi sejak era klasik. *Invisible hand* (tangan tak terlihat) Adam Smith, analisis Marx tentang kontradiksi dalam kapitalisme, dan *iron cage* (sangkar besi) Weber

dari rasionalisasi semua menunjukkan kesadaran tentang kesenjangan antara intensi dan hasil. Formalisasi Merton dari insight ini memberikan alat untuk analisis sistematis dari diskrepansi antara tujuan yang dinyatakan dan efek aktual dari institusi dan kebijakan.

Dalam konteks Indonesia, analisis fungsi manifes-laten dapat menerangi berbagai fenomena. Kebijakan otonomi daerah, misalnya, secara manifes bertujuan untuk demokratisasi dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal. Namun, fungsi laten dapat termasuk fragmentasi politik, reproduksi jaringan patronase pada level lokal, dan perpetuasi ketimpangan antardaerah. Memahami kedua dimensi ini krusial untuk evaluasi komprehensif dari kebijakan dan untuk merancang intervensi yang mengatasi disfungsi laten (Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2019).

Merton juga memperkenalkan konsep disfungsi—konsekuensi yang mengurangi penyesuaian atau adaptasi sistem. Tidak semua elemen dalam sistem niscaya fungsional; beberapa dapat disfungsional atau bahkan bertentangan satu sama lain. Ini menggeser analisis fungsional dari asumsi harmoni universal menuju pengakuan dari kontradiksi internal dan ketegangan. Konsep keseimbangan bersih dari konsekuensi fungsional mengakui bahwa suatu elemen dapat sekaligus fungsional dalam beberapa aspek dan disfungsional dalam aspek lain, memerlukan penilaian tentang keseluruhan kontribusi terhadap pemeliharaan sistem.

Anomie, Struktur Sosial, dan Deviasi

Teori Merton tentang anomie merepresentasikan salah satu *middle range theory* paling berpengaruh dalam sosiologi. Mengadaptasi konsep Durkheim, Merton mengembangkan *strain theory* (teori ketegangan) yang menjelaskan perilaku menyimpang sebagai produk dari disjungsi antara tujuan-tujuan yang didefinisikan secara kultural dan sarana-sarana yang tersedia secara struktural untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam masyarakat Amerika yang menekankan tujuan kesuksesan tetapi memberikan akses tidak setara terhadap sarana sah, banyak individu menghadapi ketegangan yang mendorong adaptasi menyimpang (Merton, 1938).

Merton mengidentifikasi lima mode adaptasi individual terhadap ketegangan: konformitas, inovasi, ritualisme, retretisme, dan pemberontakan. Konformitas adalah penerimaan baik tujuan kultural maupun sarana institusional—ini adalah mode yang dominan dan diperlukan untuk stabilitas sosial. Inovasi adalah penerimaan dari tujuan tetapi

penolakan dari sarana sah, menghasilkan perilaku menyimpang seperti kejahatan. Ritualisme adalah pengabaian dari tujuan tetapi kepatuhan kaku pada sarana, menghasilkan kekakuan birokratis. Retretisme adalah penolakan baik tujuan maupun sarana, menghasilkan penarikan diri dari masyarakat. Pemberontakan adalah penolakan dari tujuan dan sarana yang ada disertai substitusi dengan alternatif, berpotensi mengarah pada gerakan sosial.

Penting bahwa Merton menekankan struktur sosial daripada patologi individual sebagai sumber dari deviasi. Tingkat perilaku menyimpang bervariasi secara sistematis lintas kategori sosial—lebih tinggi di kalangan kelas bawah, kelompok etnis tertentu, dan di area dengan disorganisasi sosial tinggi. Ini bukan karena individu dalam kategori ini secara inheren lebih rentan terhadap deviasi tetapi karena mereka menghadapi hambatan struktural yang lebih besar terhadap pencapaian tujuan kultural melalui saluran sah.

Teori anomie Merton telah menghasilkan literatur penelitian yang masif dan aplikasi terhadap berbagai bentuk deviasi: kejahatan, kecanduan narkoba, bunuh diri, penyakit mental. Aplikasinya juga diperluas melampaui deviasi ke pemahaman tentang inovasi dan perubahan sosial. Level ketegangan yang tinggi dapat menghasilkan tidak hanya retretisme atau pemberontakan tetapi juga solusi inovatif—institusi baru, teknologi, atau bentuk kultural yang akhirnya menjadi legitimate.

Dalam konteks Indonesia, teori anomie relevan untuk memahami berbagai bentuk deviasi sosial dan masalah sosial. Tingkat korupsi yang tinggi, misalnya, dapat sebagian dijelaskan sebagai adaptasi inovatif terhadap ketegangan—penekanan kultural pada kesuksesan material dan kewajiban keluarga dikombinasikan dengan peluang sah yang terbatas untuk mobilitas. Pengangguran kaum muda dan inflasi pendidikan menciptakan ketegangan yang dapat termanifestasi dalam aktivisme politik, ekstremisme religius, atau perilaku kriminal. Memahami akar struktural dari fenomena-fenomena ini krusial untuk mengembangkan kebijakan efektif daripada sekadar mengkriminalisasi individu (Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 2018).

Merton juga mengembangkan konsep *reference groups* (kelompok referensi)—kelompok yang digunakan individu sebagai standar untuk evaluasi diri dan pembentukan sikap. *Relative deprivation* (deprivasi relatif) terjadi ketika individu membandingkan diri mereka dengan kelompok referensi yang lebih baik, menghasilkan rasa ketidakadilan dan potensi untuk protes. Sebaliknya, individu mungkin mengaspirasi status kelompok referensi

yang lebih tinggi, memotivasi upaya mobilitas. Pilihan kelompok referensi dibentuk oleh jaringan sosial, paparan media, dan kerangka ideologis. Memahami dinamika kelompok referensi penting untuk menganalisis gerakan sosial, sikap politik, dan pola konsumsi.

Konsep Perangkat Peran dan Fungsionalisme Struktural

Konsep *role-set* (perangkat peran) merupakan kontribusi Merton lainnya yang memurnikan teori peran dalam fungsionalisme. Berbeda dengan konsepsi tradisional yang melihat satu status sosial berkaitan dengan satu peran, Merton menunjukkan bahwa setiap status sosial melibatkan rangkaian hubungan peran—perangkat peran—dengan berbagai individu yang menduduki berbagai status yang berbeda. Seorang guru, misalnya, tidak hanya memiliki peran terhadap siswa tetapi juga terhadap kepala sekolah, rekan guru, orang tua siswa, dan administrator pendidikan. Setiap relasi ini melibatkan ekspektasi yang berbeda dan konflik potensial.

Konsep perangkat peran membuka analisis terhadap *role strain* (ketegangan peran)—ketegangan yang muncul dari tuntutan yang tidak kompatibel dari berbagai anggota perangkat peran. Tidak seperti asumsi fungsionalis klasik tentang integralitas sistem peran, Merton mengakui bahwa konflik dan ambiguitas adalah inheren dalam struktur peran. Individu harus bernavigasi antara ekspektasi yang bersaing, dan pengaturan institusional sering tidak memadai untuk menyelesaikan konflik-konflik ini. Ini memberikan perspektif yang lebih realistis tentang kompleksitas kehidupan sosial dibanding asumsi harmoni dalam teori Parsons.

Merton mengidentifikasi beberapa mekanisme sosial yang membantu individu mengatasi ketegangan peran: pertama, perbedaan dalam kekuasaan di antara mereka dalam perangkat peran memungkinkan individu memprioritaskan tuntutan dari yang lebih berkuasa; kedua, perbedaan dalam observabilitas kinerja peran memungkinkan beberapa kompartementalisasi; ketiga, dukungan mutual di antara pemegang peran yang menghadapi ketegangan serupa dapat mengembangkan strategi kolektif; keempat, pengaturan struktural dapat mengisolasi individu dari tuntutan yang konflik melalui delegasi atau mekanisme penyangga.

Dalam pengembangan fungsionalisme struktural, Merton juga menyumbangkan konsep fungsi manifes dan laten yang lebih umum. Ia mengkritik tiga postulat yang sering diasumsikan dalam analisis fungsional: pertama, kesatuan fungsional—asumsi bahwa semua bagian dari sistem

berkontribusi positif pada integrasi; kedua, fungsionalisme universal—asumsi bahwa setiap item sosial memenuhi fungsi vital tertentu; ketiga, keharusan—asumsi bahwa institusi tertentu secara fungsional diperlukan dan tidak dapat digantikan. Merton menunjukkan bahwa postulat-postulat ini adalah pertanyaan empiris daripada kebutuhan teoretis.

Kritik Merton membuka fungsionalisme terhadap analisis yang lebih berbasis empiris dan secara teoretis lebih rendah hati. Ia memperkenalkan konsep *functional alternatives* (alternatif fungsional) atau *functional equivalents* (ekuivalen fungsional)—pengaturan sosial yang berbeda dapat memenuhi fungsi yang sama. Ini penting karena menyiratkan bahwa tidak ada bentuk institusional tunggal yang diperlukan; masyarakat dapat mencapai prasyarat fungsional yang sama melalui mekanisme yang berbeda. Pengakuan akan alternatif fungsional juga membuat fungsionalisme kurang konservatif karena mengakui kemungkinan perubahan institusional tanpa keruntuhan sistem.

Dalam konteks Indonesia, konsep perangkat peran dan ketegangan peran sangat relevan untuk memahami kompleksitas yang dihadapi individu dalam masyarakat yang mengalami perubahan sosial cepat. Pegawai negeri, misalnya, menghadapi ekspektasi yang bersaing dari atasan birokratis, patron politik, kewajiban keluarga, dan etika profesional. Guru menavigasi antara ideal pedagogis, persyaratan birokratis, tekanan orang tua, dan kebutuhan ekonomi. Memahami ketegangan-ketegangan ini dan mekanisme untuk mengatasinya dapat menginformasikan desain institusional yang lebih baik yang mengurangi konflik dan mendukung kinerja peran yang efektif.

8.3 Fungsi Manifes dan Laten dalam Institusi Indonesia

Sistem Pendidikan: Fungsi Tersembunyi

Sistem pendidikan nasional Indonesia menyediakan ilustrasi kaya tentang perbedaan antara fungsi manifes dan laten. Secara manifes, sistem pendidikan bertujuan untuk transmisi pengetahuan, pengembangan keterampilan kognitif, dan pembentukan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Kurikulum nasional dirancang untuk mencapai standar kompetensi tertentu yang dianggap diperlukan untuk pembangunan nasional dan kompetisi global. Fungsi manifes ini jelas dinyatakan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional dan dokumen-dokumen kebijakan pendidikan.

Namun, sistem pendidikan juga memiliki berbagai fungsi laten yang sama pentingnya tetapi jarang diakui secara eksplisit. Pertama, fungsi kredensial—

pendidikan berfungsi sebagai mekanisme penyortiran yang mengalokasikan individu ke berbagai posisi dalam hierarki sosial ekonomi. Ijazah dan sertifikat berfungsi sebagai modal kultural yang memberikan akses ke peluang. Dalam konteks pasar kerja yang kompetitif, kredensial sering lebih penting daripada keterampilan atau pengetahuan aktual. Ini menghasilkan apa yang disebut sebagai penyakit diploma—penekanan berlebihan pada sertifikat formal daripada pembelajaran substantif.

Kedua, fungsi kustodial—sekolah berfungsi sebagai institusi pengasuhan anak yang membebaskan orang tua untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja. Dengan urbanisasi dan nuklearisasi keluarga, dukungan keluarga luas untuk pengasuhan anak semakin terbatas. Sekolah menyerap anak-anak dan remaja untuk bagian signifikan dari hari, memberikan pengawasan dan keamanan. Ini sangat penting dalam keluarga dengan dua pencari nafkah yang semakin umum di area urban. Kalender dan jam sekolah terstruktur sebagian berdasarkan fungsi kustodial ini daripada pertimbangan pedagogis semata.

Ketiga, fungsi sosialisasi politik dan ideologis—pendidikan mentransmisikan ideologi dominan dan menciptakan warga negara yang loyal. Melalui kurikulum, buku teks, dan ritual sekolah, siswa belajar tentang pahlawan nasional, sejarah resmi, dan sikap sipil yang benar. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dirancang secara eksplisit untuk menanamkan identitas nasional dan nilai-nilai politik. Ini berfungsi untuk mempertahankan stabilitas politik dan melegitimasi struktur kekuasaan yang ada, meskipun hal ini jarang diakui sebagai fungsi eksplisit.

Keempat, fungsi reproduksi ketimpangan—meskipun retorika tentang pendidikan sebagai penyeimbang, penelitian menunjukkan bahwa sistem pendidikan sering mereproduksi dan melegitimasi ketimpangan sosial yang ada. Anak-anak dari keluarga berpendidikan dan kaya memiliki keuntungan dalam mengakses pendidikan berkualitas, memperoleh kredensial yang lebih baik, dan mengkonversi pencapaian pendidikan menjadi kesuksesan okupasional. Sistem pelacakan, disparitas regional dalam kualitas pendidikan, dan biaya pendidikan tambahan seperti les privat semuanya berkontribusi terhadap reproduksi struktur kelas lintas generasi.

Fungsi-fungsi laten ini dapat sekaligus fungsional dalam beberapa aspek dan disfungsional dalam aspek lain. Fungsi kredensial, misalnya, fungsional dalam menyediakan sinyal standar untuk pemberi kerja tetapi disfungsional ketika menghasilkan penekanan berlebihan pada kredensial formal relatif terhadap kompetensi aktual. Memahami fungsi-fungsi laten ini krusial untuk reformasi

pendidikan komprehensif yang mengatasi tidak hanya kurikulum manifes tetapi juga fitur struktural yang membentuk hasil aktual (Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 2018).

Birokrasi dan Patronase: Disfungsi Sistemik

Birokrasi Indonesia menyediakan contoh lain yang instruktif tentang diskrepansi antara fungsi manifes dan laten serta kehadiran disfungsi. Secara manifes, birokrasi dirancang untuk mengimplementasikan kebijakan secara rasional, efisien, dan impersonal sesuai dengan tipe ideal Weberian. Regulasi pegawai negeri menekankan meritokrasi, netralitas, dan kepatuhan terhadap aturan. Birokrasi seharusnya melayani kepentingan publik dan memberikan layanan secara adil kepada semua warga negara tanpa memandang koneksi personal atau pertimbangan lain.

Realitas empiris, bagaimanapun, sering sangat menyimpang dari ideal manifes ini. Sistem patronase yang tertanam dalam dalam birokrasi Indonesia merupakan struktur laten yang membentuk fungsi aktual. Jaringan patronase menghubungkan pemimpin politik, birokrat senior, dan bawahan dalam relasi timbal balik dan kewajiban mutual. Penunjukan dan promosi sering lebih didasarkan pada loyalitas dan koneksi daripada murni pada merit. Sumber daya dialokasikan sebagian melalui jaringan informal ini daripada murni melalui prosedur formal (Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2019).

Dari perspektif fungsionalis, patronase dapat dipahami sebagai memiliki fungsi laten tertentu dalam konteks di mana institusi formal tidak memadai atau tidak efektif. Patronase menyediakan saluran alternatif untuk alokasi sumber daya ketika sistem formal lambat, kaku, atau tidak responsif. Untuk warga biasa, memiliki koneksi dengan patron yang berkuasa dapat diperlukan untuk memperoleh layanan atau menavigasi hambatan birokratis. Patronase juga berfungsi untuk mengikat bersama kelompok-kelompok beragam dalam koalisi, memfasilitasi stabilitas politik dalam sistem yang terfragmentasi.

Namun, patronase juga menghasilkan disfungsi yang signifikan. Pertama, ia merusak meritokrasi dan efisiensi, mengarah pada penunjukan pejabat yang tidak kompeten dan misalokasi sumber daya. Kedua, ia memupuk korupsi karena pertukaran dalam jaringan patronase sering melibatkan transaksi moneter atau bentuk keuntungan material lain. Ketiga, ia mereproduksi ketimpangan karena mereka yang tanpa koneksi dirugikan dalam mengakses layanan atau peluang. Keempat, ia merusak legitimasi pemerintah dan

kepercayaan publik dalam institusi ketika warga menganggap sistem sebagai tidak adil dan korup.

Otonomi daerah, yang dirancang secara manifes untuk mendemokratisasi tata kelola dan meningkatkan responsivitas lokal, telah memiliki konsekuensi laten yang tidak diinginkan. Desentralisasi dalam banyak kasus telah mereproduksi struktur patronase pada level lokal, dengan elite lokal menangkap sumber daya dan melanggengkan politik klientelistik. Ini mengilustrasikan poin Merton tentang pentingnya menganalisis fungsi aktual daripada mengasumsikan bahwa perubahan institusional secara otomatis mencapai tujuan yang dimaksudkan. Reformasi komprehensif memerlukan penanganan baik aturan formal maupun praktik informal yang membentuk perilaku.

Implikasi kebijakan dari analisis fungsional meliputi: pertama, pengakuan bahwa sekadar mengubah aturan formal tidak cukup jika struktur insentif yang mendasari dan norma informal tidak berubah; kedua, kebutuhan untuk menyediakan alternatif fungsional—institusi yang dapat memenuhi kebutuhan legitimate yang saat ini dipenuhi oleh patronase tanpa konsekuensi disfungsional; ketiga, pentingnya mekanisme penegakan untuk memastikan bahwa aturan formal benar-benar diikuti; keempat, perhatian terhadap faktor ekonomi politik yang menopang praktik disfungsional meskipun efek agregat negatifnya.

Gotong Royong: Transformasi Fungsi Tradisional

Gotong royong merepresentasikan institusi tradisional Indonesia yang telah mengalami transformasi fungsional signifikan dalam proses modernisasi. Secara tradisional, gotong royong adalah sistem pertukaran kerja resiprokal dalam komunitas pedesaan, di mana anggota komunitas bekerja secara kolektif untuk keuntungan mutual—membangun rumah, menggarap sawah, atau mengadakan acara seremonial. Fungsi manifes adalah menyelesaikan tugas yang terlalu besar untuk rumah tangga individual, sementara fungsi laten termasuk memperkuat solidaritas komunitas, mempertahankan jaringan sosial, dan mereproduksi nilai-nilai egaliter.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, terutama di area urban, praktik gotong royong telah mengalami transformasi dalam baik bentuk maupun fungsi. Bentuk tradisional dari pertukaran kerja mutual sebagian besar menghilang di kota-kota di mana relasi pasar dominan dan waktu semakin terkomodifikasi. Namun, retorika dan simbolisme dari gotong royong tetap

kuat dalam ideologi nasional, dikodifikasi sebagai salah satu nilai foundational dalam Pancasila. Pemimpin politik secara teratur menginvokasi gotong royong sebagai pendekatan khas Indonesia terhadap pembangunan dan masalah sosial.

Manifestasi kontemporer dari gotong royong mencakup asosiasi lingkungan seperti RT/RW, patroli keamanan komunitas seperti siskamling, aktivitas pembersihan komunal seperti kerja bakti, dan berbagai bentuk aksi kolektif lokal. Namun, fungsi dari aktivitas-aktivitas ini telah bergeser. Daripada terutama kerja sama ekonomi, gotong royong kontemporer lebih sering melayani fungsi simbolik dan politik—mendemonstrasikan kepatuhan dengan ekspektasi negara, mempertahankan penampilan harmoni komunitas, atau memfasilitasi monitoring dan kontrol sosial. Partisipasi sering dimotivasi lebih oleh tekanan sosial atau persyaratan formal daripada ekspektasi resiprokalitas.

Dari perspektif fungsional, dapat diargumentasikan bahwa gotong royong dalam bentuk kontemporer melayani fungsi laten melegitimasi otoritas negara dan mereproduksi ideologi kesatuan nasional. Negara mendorong aktivitas gotong royong sebagai bagian dari proyek nation-building, menghubungkan praktik komunitas lokal dengan identitas nasional. Ini dapat fungsional untuk integrasi politik tetapi juga dapat disfungsional ketika memaksakan model uniform pada komunitas yang beragam atau ketika menjadi pertunjukan ritualistik yang terlepas dari kerja sama substantif.

Penelitian telah menunjukkan bahwa efektivitas dan makna dari gotong royong bervariasi signifikan lintas konteks yang berbeda. Di beberapa area pedesaan dan komunitas tradisional, kerja sama resiprokal tetap robust dan bermakna. Di area lain, terutama lingkungan urban kelas menengah, gotong royong semakin formalistik atau bahkan diresahkan sebagai pemaksaan. Di antara komunitas urban miskin, jaringan bantuan mutual informal tetap penting untuk bertahan hidup tetapi mungkin tidak dilabeli atau diakui sebagai gotong royong. Keragaman ini menunjukkan kebutuhan untuk pemahaman bernuansa daripada meromantisasi atau menguniversalisasi institusi tradisional.

Implikasi kebijakan termasuk pengakuan bahwa sekadar menginvokasi nilai tradisional tidak cukup untuk memupuk kerja sama jika kondisi sosial dan ekonomi yang mendasari telah berubah. Aksi kolektif yang efektif memerlukan struktur insentif yang sesuai, kepercayaan, dan kepentingan bersama. Daripada memaksakan model standar, kebijakan harus memfasilitasi bentuk kerja sama yang beragam yang disesuaikan untuk

konteks yang berbeda. Memahami baik fungsi ideologis manifes maupun fungsi praktis laten dari gotong royong krusial untuk merancang program yang benar-benar memperkuat kapasitas komunitas daripada sekadar menampilkan tradisi (Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 2020).

8.4 Kritik terhadap Fungsionalisme

Kritik dari Teori Konflik

Kritik paling fundamental terhadap fungsionalisme datang dari perspektif teori konflik, terutama dari tradisi Marxist dan neo-Marxist. Kritikus konflik berargumen bahwa fungsionalisme secara sistematis mengabaikan atau mengaburkan dimensi kekuasaan, dominasi, dan eksploitasi dalam kehidupan sosial. Dengan menekankan pada integrasi, konsensus, dan keseimbangan, fungsionalisme diduga menghasilkan bias konservatif yang melegitimasi status quo dan memarjinalkan analisis konflik sosial, perjuangan kelas, dan perubahan revolusioner.

C. Wright Mills dalam *The Sociological Imagination* (1959) menyampaikan kritik menghancurkan terhadap *grand theory* Parsonian sebagai empirisme abstrak yang tercerabut dari isu-isu substantif tentang kekuasaan dan ketimpangan. Mills berargumen bahwa aparatus konseptual Parsons yang elaborat melayani terutama untuk memistifikasi daripada menerangi realitas sosial, mentransformasi proses sosial yang hidup menjadi kategori statis. Fokus pada persyaratan fungsional dan pemeliharaan sistem, menurut Mills, mengalihkan perhatian dari perjuangan historis konkret dan relasi kekuasaan yang sebenarnya membentuk masyarakat.

Ralf Dahrendorf dalam *Class and Class Conflict in Industrial Society* (1959) mengembangkan kritik sistematis dari teori fungsional dari perspektif konflik. Dahrendorf berargumen bahwa penekanan Parsons pada konsensus dan integrasi mencerminkan pandangan utopis tentang masyarakat yang mengabaikan realitas konflik yang ada di mana-mana. Setiap masyarakat, menurut Dahrendorf, ditandai oleh konflik kepentingan antara mereka yang memiliki otoritas dan mereka yang tunduk padanya. Asumsi teori fungsional tentang nilai bersama mengaburkan bagaimana kelompok dominan memaksakan nilai-nilai mereka melalui kekuasaan daripada konsensus genuine (Dahrendorf, 1959).

Alvin Gouldner dalam *The Coming Crisis of Western Sociology* (1970) memberikan kritik komprehensif yang menempatkan fungsionalisme Parsonian dalam konteks ideologis lebih luas dari Amerika Perang Dingin.

Gouldner berargumen bahwa fungsionalisme melayani sebagai sosiologi establishment yang melegitimasi struktur kekuasaan yang ada dan mendukung kebijakan sosial konservatif. Fokus pada stabilitas dan tatanan resonan dengan ideologi anti-komunis dan ketakutan akan gangguan sosial. Klaim fungsionalisme terhadap netralitas nilai menyangkal implikasi politik konservatif aktualnya.

Kritik konflik juga menyoroti ketidakmampuan teori fungsional dalam menjelaskan perubahan sosial. Dengan mengkonseptualisasikan perubahan terutama sebagai penyesuaian adaptif menuju keseimbangan baru, fungsionalisme berjuang untuk menjelaskan transformasi radikal, revolusi, dan restrukturisasi fundamental masyarakat. Teori evolusi Parsons dikritik sebagai teleologis, menyiratkan progres linear menuju modernitas gaya Barat dan mengabaikan jalur perkembangan alternatif atau kemungkinan keruntuhan sistemik.

Dalam konteks Indonesia, perspektif konflik mengarahkan perhatian terhadap dimensi yang understated dalam analisis fungsional: konflik kelas antara modal dan buruh, ketegangan etnis di bawah ideologi Bhinneka Tunggal Ika, polarisasi religius, ketimpangan regional, dan kontrol otoriter di bawah retorika demokrasi Pancasila. Memahami konflik-konflik ini krusial untuk analisis komprehensif masyarakat Indonesia yang tidak sekadar merayakan harmoni tetapi secara kritis memeriksa dinamika kekuasaan dan ketimpangan struktural.

Kritik Metodologis dan Epistemologis

Melampaui kritik substantif tentang konten, fungsionalisme juga menghadapi tantangan metodologis dan epistemologis yang signifikan. Kritik pertama menyangkut masalah tautologi dan sirkularitas dalam penjelasan fungsional. Kritikus berargumen bahwa menjelaskan keberadaan fenomena sosial dengan referensi pada fungsinya pada dasarnya sirkuler: institusi X ada karena memenuhi fungsi Y, dan kita tahu ia memenuhi fungsi Y karena ia ada. Bentuk penalaran ini tidak memberikan penjelasan genuine karena tidak menspesifikasi kriteria independen untuk mengidentifikasi fungsi.

Carl Hempel dalam *Philosophy of Natural Science* (1966) memberikan kritik berpengaruh terhadap penjelasan fungsional dari perspektif filsafat sains. Hempel berargumen bahwa penjelasan ilmiah yang tepat memerlukan spesifikasi mekanisme kausal dan kondisi di mana fenomena terjadi. Penjelasan fungsional, sebaliknya, hanya menspesifikasi konsekuensi

daripada penyebab. Untuk mentransformasi pernyataan fungsional menjadi penjelasan legitimate memerlukan premis tambahan tentang mekanisme pengaturan diri dan proses umpan balik—premis yang sering implisit dan tidak diperiksa dalam analisis fungsional.

Masalah mengidentifikasi fungsi juga epistemologis menantang. Bagaimana peneliti menentukan apa fungsi dari institusi tertentu? Analis fungsional sering tampak mengasumsikan wawasan istimewa ke dalam fungsi riil yang mungkin tidak diakui oleh partisipan sendiri. Ini menimbulkan pertanyaan tentang perspektif siapa yang diperhitungkan dan apakah analisis fungsional memaksakan interpretasi peneliti daripada menemukan fakta objektif. Distinsi antara fungsi manifes dan laten, meskipun berguna secara analitis, dapat digunakan untuk menolak pemahaman partisipan sendiri sebagai tidak memadai.

Kritik ketiga menyangkut masalah alternatif fungsional atau ekuivalen. Jika institusi berbeda dapat memenuhi fungsi yang sama, maka analisis fungsional tidak dapat menjelaskan mengapa bentuk institusional tertentu ada daripada alternatif. Ini merusak kekuatan penjelasan fungsionalisme karena tidak dapat menjelaskan perkembangan historis spesifik. Merton mengakui masalah ini dalam konsepnya tentang alternatif fungsional tetapi tidak sepenuhnya menyelesaikan kesulitan penjelasan yang ditimbulkannya.

Etnometodologi dan interaksionisme simbolik memberikan tipe kritik berbeda, berargumen bahwa analisis makro-fungsional mengabaikan proses level mikro melalui mana tatanan sosial sebenarnya diproduksi dan dipertahankan. Dari perspektif ini, memperlakukan masyarakat sebagai sistem dengan fungsi objektif mereifikasi apa yang sebenarnya merupakan pencapaian berkelanjutan dari aktor. Fokus seharusnya pada bagaimana orang menciptakan makna, mengkoordinasi tindakan, dan menghasilkan kehidupan sosial yang teratur melalui praktik sehari-hari mereka, daripada mengasumsikan persyaratan fungsional yang sudah ada sebelumnya.

Sarjana feminis juga mengkritik fungsionalisme untuk kebutaan gendernya. Analisis fungsional tradisional sering menganggap pembagian kerja gender dan pelegasian perempuan ke ranah domestik sebagai alamiah atau secara fungsional diperlukan daripada sebagai pengaturan yang dikonstruksi secara sosial yang melayani kepentingan dominasi laki-laki. Kritik feminis mengarahkan perhatian terhadap bagaimana pengaturan yang diduga fungsional sebenarnya melayani kepentingan tertentu dan mereproduksi ketimpangan sepanjang garis gender.

Revisi dan Perkembangan Neo-Fungsionalisme

Meskipun kritik yang ekstensif, fungsionalisme tidak sekadar menghilang tetapi mengalami revisi dan modifikasi yang mengatasi beberapa keterbatasan. Neo-fungsionalisme muncul pada 1980-an sebagai upaya untuk merumuskan kembali teori fungsional dengan cara yang lebih responsif terhadap kritik dan lebih dapat diterapkan secara empiris. Jeffrey Alexander adalah tokoh utama dalam gerakan neo-fungsionalis, berargumen untuk mempertahankan wawasan inti dari tradisi Parsonian sambil menggabungkan wawasan dari perspektif teoretis lain.

Neo-fungsionalisme berbeda dari fungsionalisme klasik dalam beberapa aspek. Pertama, ia meninggalkan asumsi tentang keseimbangan otomatis dan kesatuan fungsional, mengakui konflik, kontradiksi, dan disfungsi sebagai fitur normal dari sistem sosial. Kedua, ia menekankan multidimensionalitas tindakan sosial, menggabungkan dimensi kultural, sosial, dan personal dengan cara yang lebih seimbang. Ketiga, ia memberikan lebih banyak perhatian pada agensi dan kontingensi, menghindari determinisme dari fungsionalisme struktural sebelumnya.

Niklas Luhmann mengembangkan versi canggih dari teori sistem yang mengatasi banyak kritik dari fungsionalisme sebelumnya. Teori Luhmann tentang sistem autopoietik mengkonseptualisasikan sistem sosial sebagai sistem yang merujuk diri sendiri dan mereproduksi diri, beroperasi melalui komunikasi daripada melalui tindakan individu. Pergerakan menuju teori sistem yang lebih abstrak ini berusaha untuk menghindari masalah reifikasi dan memberikan penjelasan yang lebih rigorous tentang dinamika sistem. Namun, teorisasi Luhmann yang sangat abstrak juga dikritik sebagai bahkan lebih tercerabut dari penelitian empiris daripada Parsons.

Richard Münch adalah neo-fungsionalis lain yang berusaha untuk mengintegrasikan fungsionalisme dengan perspektif lain, terutama interaksionisme simbolik dan teori pertukaran. Münch menekankan interpenetrasi antara level analitis yang berbeda—dari interaksi mikro hingga institusi makro—dan menunjukkan bagaimana analisis fungsional dapat dikombinasikan dengan perhatian pada makna dan interpretasi. Ini merepresentasikan upaya menuju sintesis teoretis yang mempertahankan kekuatan pendekatan fungsional sambil mengatasi keterbatasannya.

Perkembangan terkini dalam teori organisasi, analisis jaringan, dan teori kompleksitas menggabungkan beberapa wawasan fungsional sambil menghindari masalah sebelumnya. Konsep seperti ekologi organisasi, isomorfisme institusional, dan properti emergen menunjukkan pengaruh

pemikiran fungsional tanpa mengadopsi kerangka fungsionalis penuh. Perkembangan-perkembangan ini menunjukkan bahwa ide-ide inti tertentu dari fungsionalisme—pentingnya integrasi, interdependensi, dan konsekuensi—tetap berharga bahkan jika teori fungsional komprehensif terbukti tidak berkelanjutan.

Dalam konteks sosiologi Indonesia, perspektif neo-fungsionalis berpotensi berguna untuk menganalisis proses kompleks seperti demokratisasi, desentralisasi, dan gerakan Islam tanpa jatuh ke dalam bias konservatif dari fungsionalisme klasik atau reduksionisme dari Marxisme kasar. Penekanan pada multidimensionalitas dan kontingensi memungkinkan analisis bernuansa yang mengakui baik kendala struktural maupun agensi, baik integrasi maupun konflik, baik kontinuitas maupun perubahan.

8.5 Warisan Fungsionalisme dalam Sosiologi Kontemporer

Pengaruh dalam Berbagai Subdisiplin

Meskipun dominasi fungsionalisme sebagai kerangka teoretis umum menurun sejak 1970-an, pengaruhnya tetap signifikan dalam berbagai subdisiplin sosiologi dan bidang terkait. Dalam sosiologi organisasi, misalnya, konsep-konsep fungsionalis tentang diferensiasi, integrasi, dan adaptasi terus menginformasikan analisis struktur dan proses organisasi. Teori kontingensi dalam studi manajemen membangun pada ide fungsional tentang kecocokan antara bentuk organisasi dan tuntutan lingkungan.

Dalam sosiologi pendidikan, perspektif fungsional tentang pendidikan sebagai institusi untuk sosialisasi, alokasi, dan integrasi tetap berpengaruh, meskipun kini diseimbangkan dengan perspektif konflik yang menekankan reproduksi ketimpangan. Analisis kurikulum tersembunyi, sistem pelacakan, dan proses kredensial menggabungkan baik wawasan fungsional maupun konflik, menunjukkan bagaimana pendidikan secara simultan melakukan fungsi integratif dan mereproduksi stratifikasi.

Sosiologi medis secara ekstensif menggunakan konsep peran sakit yang dikembangkan oleh Parsons, menganalisis bagaimana penyakit didefinisikan dan dikelola secara sosial. Analisis fungsional dari sistem kesehatan, profesi medis, dan hubungan dokter-pasien terus produktif. Konsep tentang fungsi manifes dan laten sangat berguna dalam memahami konsekuensi tak diinginkan dari intervensi medis dan kebijakan kesehatan. Sosiologi medis menunjukkan bahwa konsep fungsional dapat berharga ketika diterapkan pada domain institusional spesifik daripada masyarakat total.

Dalam kriminologi dan sosiologi deviasi, teori ketegangan Merton dan analisis anomie tetap di antara teori yang paling banyak dikutip, menghasilkan penelitian ekstensif tentang hubungan antara struktur sosial, struktur peluang, dan perilaku menyimpang. Perkembangan seperti teori anomie institusional dan teori ketegangan umum membangun dan memperluas wawasan Merton. Konsep fungsional tentang mekanisme kontrol sosial juga banyak digunakan dalam menganalisis penegakan hukum, sistem peradilan pidana, dan sanksi informal.

"Meski dominasi fungsionalisme menurun sejak 1970-an, warisannya tetap kuat dalam sosiologi kontemporer. Konsep diferensiasi, integrasi, dan adaptasi memengaruhi studi organisasi, pendidikan, medis, deviasi, keluarga, hingga agama. Pendekatan fungsional membantu memahami fungsi institusi sosial, meski kini sering dipadukan dengan perspektif konflik dan kritis."

Sosiologi keluarga menggunakan konsep fungsional dalam menganalisis fungsi institusi keluarga: reproduksi, sosialisasi, dukungan emosional, kerja sama ekonomi. Meskipun dikritik karena mengasumsikan universalitas keluarga inti dan mengabaikan dinamika kekuasaan gender, kerangka fungsional memberikan titik awal untuk menganalisis bagaimana keluarga diorganisir dan kebutuhan sosial apa yang mereka atasi. Sosiologi keluarga kontemporer menggabungkan baik analisis fungsional maupun perspektif kritis tentang gender, seksualitas, dan keragaman keluarga.

Dalam sosiologi agama, pendekatan fungsional yang menganalisis peran agama dalam memberikan makna, mempromosikan kohesi sosial, dan melegitimasi tatanan sosial tetap berpengaruh, terutama seperti yang dielaborasi oleh Robert Bellah dan lainnya dalam tradisi agama sipil. Analisis fungsi religius—baik yang integratif maupun yang berpotensi mengganggu—terus relevan untuk memahami peran agama dalam masyarakat kontemporer, termasuk Indonesia di mana agama tertanam dalam dalam kehidupan privat maupun publik.

Relevansi untuk Studi Indonesia Kontemporer

Untuk studi masyarakat Indonesia, konsep fungsional tetap merupakan alat analitis berguna ketika diterapkan dengan kesadaran akan keterbatasannya. Analisis tentang bagaimana institusi berbeda—keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, politik—saling berhubungan dan berkontribusi terhadap integrasi sosial menerangi dimensi penting masyarakat Indonesia yang ditandai oleh keragaman tinggi namun kohesi yang luar biasa. Memahami mekanisme integrasi dalam masyarakat plural seperti Indonesia di mana perbedaan etnis, religius, dan regional berpotensi divisif memerlukan perhatian terhadap proses fungsional.

Konsep tentang prasyarat fungsional dapat memandu analisis tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia: Bagaimana mempertahankan integrasi politik sambil mengakomodasi pluralisme? Bagaimana menyeimbangkan otoritas sentral dengan otonomi regional? Bagaimana mengelola keragaman religius dalam negara yang mayoritas Muslim? Pertanyaan-pertanyaan ini melibatkan pertimbangan fungsi yang harus dipenuhi untuk stabilitas demokratis. Perspektif fungsional mengarahkan perhatian terhadap pengaturan institusional dan mekanisme kultural yang memfasilitasi integrasi tanpa menekan keragaman.

Analisis disfungsi sangat berharga untuk mengidentifikasi masalah dalam institusi Indonesia yang merusak tujuan yang dinyatakan atau menghasilkan konsekuensi negatif. Korupsi dalam birokrasi, misalnya, dapat dianalisis sebagai disfungsi yang merusak administrasi efisien dan kepercayaan publik. Sistem pendidikan yang menghasilkan banyak lulusan tanpa keterampilan relevan merepresentasikan disfungsi dalam relasi antara pendidikan dan ekonomi. Pengakuan disfungsi membuka ruang untuk reformasi institusional yang mengatasi tidak hanya gejala tetapi sumber struktural dari masalah.

Konsep Merton tentang fungsi laten sangat berguna dalam konteks Indonesia untuk memahami kesenjangan antara retorika resmi dan praktik aktual. Banyak kebijakan dan program memiliki konsekuensi tak diinginkan yang mungkin lebih signifikan daripada hasil yang dimaksudkan. Desentralisasi, program transmigrasi, pendidikan Islam, kebijakan subsidi—semuanya memiliki fungsi laten dan disfungsi yang perlu dipahami untuk evaluasi komprehensif. Perhatian terhadap fungsi laten menjaga terhadap penerimaan naif terhadap justifikasi resmi dan mendorong investigasi empiris dari efek aktual.

Penelitian tentang organisasi masyarakat sipil Indonesia, misalnya, dapat mengambil manfaat dari analisis fungsional yang memeriksa tidak hanya

tujuan manifes tetapi juga fungsi laten dalam membangun modal sosial, menyediakan layanan alternatif, atau menciptakan ruang politik. Sektor NGO dalam Indonesia memenuhi multiple fungsi—beberapa dimaksudkan, beberapa tidak dimaksudkan—dalam relasi terhadap baik negara maupun masyarakat. Memahami fungsi-fungsi ini membantu menjelaskan ketahanan dan evolusi masyarakat sipil meskipun kendala politik.

Analisis pembangunan ekonomi Indonesia juga dapat menggabungkan perspektif fungsional tentang peran sektor berbeda, integrasi antara ekonomi formal dan informal, dan adaptasi terhadap tekanan pasar global. Analisis fungsional tidak niscaya menyiratkan dukungan tidak kritis terhadap status quo tetapi lebih mengarahkan perhatian terhadap pemahaman kerja aktual institusi ekonomi dan konsekuensinya untuk kelompok berbeda. Pemahaman ini adalah fondasi necessary untuk mengusulkan reformasi realistis daripada skema utopis (Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 2018).

Integrasi dengan Perspektif Teoretis Lain

Sosiologi kontemporer semakin mengakui bahwa perspektif teoretis berbeda menerangi aspek berbeda dari realitas sosial, dan strategi optimal sering melibatkan integrasi teoretis daripada adherensi eksklusif pada kerangka tunggal. Konsep fungsional dapat dikombinasikan secara produktif dengan wawasan dari teori konflik, interaksionisme simbolik, pilihan rasional, dan perspektif lain untuk analisis yang lebih komprehensif.

Integrasi perspektif fungsional dan konflik sangat bermanfaat. Pengakuan bahwa masyarakat ditandai secara simultan oleh baik integrasi maupun konflik, baik konsensus maupun koersi, baik kerja sama maupun kompetisi mengarah pada analisis yang lebih realistis. Dalam konteks Indonesia, misalnya, analisis harus menjelaskan baik fungsi integratif ideologi nasional maupun konflik etnis dan religius, baik pencapaian pembangunan maupun ketimpangan persisten, baik pembukaan demokratis maupun residu otoriter.

Mengkombinasikan fungsionalisme dengan interaksionisme simbolik mengarahkan perhatian terhadap proses level mikro melalui mana fungsi level makro sebenarnya dicapai. Bagaimana individu menginternalisasi norma? Bagaimana sosialisasi sebenarnya terjadi dalam keluarga dan sekolah? Bagaimana orang menegosiasikan ekspektasi peran dalam interaksi sehari-hari? Analisis level mikro melengkapi analisis makro-fungsional dengan menunjukkan mekanisme melalui mana proses fungsional beroperasi atau gagal beroperasi.

Integrasi dengan teori institusional dalam studi organisasi menghasilkan sintesis yang bermanfaat. Teori neo-institusional memeriksa bagaimana organisasi mengadopsi praktik untuk mendapatkan legitimasi daripada murni untuk efisiensi fungsional. Ini menjelaskan isomorfisme—kesamaan di antara organisasi dalam bidang yang sama—yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh adaptasi fungsional saja. Aplikasi pada Indonesia menunjukkan bagaimana baik tekanan fungsional maupun proses mimetik membentuk bentuk organisasi dalam sektor publik, sektor privat, dan masyarakat sipil.

"Sosiologi kontemporer mengintegrasikan fungsionalisme dengan teori konflik, interaksionisme simbolik, pilihan rasional, dan institusional. Pendekatan ini menyoroti bahwa masyarakat ditandai konsensus sekaligus konflik, dan bahwa mekanisme mikro interaksi melengkapi analisis makro, menghasilkan pemahaman sosial lebih komprehensif."

Teori pilihan rasional dapat dikombinasikan dengan analisis fungsional dalam analisis masalah aksi kolektif. Persyaratan fungsional untuk barang kolektif—keamanan, infrastruktur publik, perlindungan lingkungan—harus dicapai melalui tindakan individual yang mungkin mahal. Memahami kondisi di mana individu bekerja sama untuk menghasilkan barang kolektif memerlukan perhatian pada baik kebutuhan fungsional maupun insentif individual. Dalam konteks Indonesia, ini relevan untuk menganalisis penyediaan barang publik, pengelolaan sumber daya bersama, dan mengatasi masalah penumpang gratis.

Perkembangan terkini dalam teori kompleksitas dan pemodelan berbasis agen memberikan alat baru untuk menganalisis proses fungsional tanpa mengasumsikan desain intensional atau keseimbangan otomatis. Pendekatan sistem adaptif kompleks menunjukkan bagaimana pola teratur dapat muncul dari interaksi multiple agen tanpa koordinasi sentral. Ini beresonansi dengan wawasan fungsional tentang tatanan tak diinginkan sambil menghindari implikasi teleologis. Aplikasi pada proses sosial Indonesia—dari dinamika pasar hingga mobilisasi politik—dapat mengambil manfaat dari alat analitis ini.

Kesimpulan

Fungsionalisme struktural, khususnya dalam formulasi Parsons dan Merton, merepresentasikan salah satu upaya paling ambisius dalam sejarah sosiologi untuk mengembangkan teori sistem sosial yang komprehensif dan sistematis. Kontribusi teoretisnya meliputi konsep-konsep fundamental tentang integrasi sosial, diferensiasi struktural, fungsi manifes dan laten, serta mekanisme reproduksi sistem. Skema AGIL Parsons dan *middle range theory* Merton memberikan alat analitis yang kuat untuk memahami struktur dan dinamika masyarakat modern yang kompleks.

Namun, fungsionalisme juga menghadapi kritik serius dari berbagai perspektif teoretis yang menunjukkan keterbatasan signifikan. Kecenderungan konservatif, kesulitan metodologis, pengabaian terhadap konflik dan perubahan radikal, serta bias terhadap status quo telah melemahkan dominasi fungsionalisme sebagai *grand theory* dalam sosiologi kontemporer. Perkembangan neo-fungsionalisme dan integrasi dengan perspektif lain menunjukkan bahwa meskipun fungsionalisme sebagai kerangka komprehensif tidak lagi hegemonik, wawasan-wawasan spesifiknya tetap berharga.

Dalam konteks Indonesia, perspektif fungsionalis menawarkan lensa yang berguna untuk memahami mekanisme integrasi dalam masyarakat yang sangat plural, fungsi berbagai institusi dalam proses pembangunan, dan tantangan dalam menciptakan tatanan sosial yang stabil namun demokratis. Analisis tentang fungsi manifes dan laten membantu mengungkap kesenjangan antara retorika resmi dan praktik aktual dalam berbagai domain—dari pendidikan hingga birokrasi, dari gotong royong hingga otonomi daerah.

Namun, aplikasi fungsionalisme untuk Indonesia harus dilakukan secara kritis dengan kesadaran terhadap bahaya legitimasi tidak kritis terhadap status quo dan pengabaian terhadap dimensi konflik, dominasi, dan transformasi yang merupakan realitas inheren dalam masyarakat manapun. Kombinasi perspektif fungsionalis dengan teori konflik, analisis kekuasaan, dan perhatian terhadap agensi memberikan kerangka yang lebih seimbang dan komprehensif untuk memahami kompleksitas masyarakat Indonesia kontemporer.

Warisan fungsionalisme dalam sosiologi kontemporer terletak tidak dalam penerimaan tidak kritis terhadap teori sistem yang monolitik, melainkan dalam apropriasi selektif dari konsep-konsep dan wawasan yang tetap relevan. Perhatian terhadap interdependensi institusional, konsekuensi tak

diinginkan dari tindakan, diferensiasi fungsional, dan mekanisme integrasi tetap penting untuk analisis sosiologis yang canggih. Yang penting adalah penggunaan konsep-konsep ini dengan kesadaran kritis terhadap asumsi-asumsi ideologis dan keterbatasan metodologis yang melekat dalam tradisi fungsionalis.

Referensi Bab 8

Alexander, J. C. (Ed.). (1985). *Neofunctionalism*. Sage Publications.

Dahrendorf, R. (1959). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford University Press. https://archive.org/details/classclassconfli00dahr

Gouldner, A. W. (1970). *The coming crisis of western sociology*. Basic Books.

Hempel, C. G. (1966). *Philosophy of natural science*. Prentice-Hall.

Luhmann, N. (1995). *Social systems*. Stanford University Press.

Masyarakat: Jurnal Sosiologi. (2018). Fungsi manifes dan laten dalam sistem pendidikan Indonesia. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 23(1), 45-68.

Masyarakat: Jurnal Sosiologi. (2020). Transformasi gotong royong di era kontemporer. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 25(2), 112-134.

Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672-682. https://faculty.washington.edu/matsueda/courses/517/Readings/Merton%201938.pdf

Merton, R. K. (1949). On sociological theories of the middle range. In *Social theory and social structure*. Free Press. https://www.csun.edu/~snk1966/Robert%20K%20Merton%20-%20On%20Sociological%20Theories%20of%20the%20Middle%20Range.pdf

Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure* (Enlarged ed.). Free Press. https://archive.org/details/socialtheorysoci00mert

Mills, C. W. (1959). *The sociological imagination*. Oxford University Press.

Münch, R. (1987). *Theory of action: Towards a new synthesis going beyond Parsons*. Routledge.

Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan. (2019). Patronase dan disfungsi birokrasi dalam era otonomi daerah. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 78-95.

Parsons, T. (1937). *The structure of social action*. Free Press. https://archive.org/details/structureofsoci00pars

Parsons, T. (1951). *The social system*. Free Press. https://archive.org/details/socialsystem00pars

Parsons, T. (1966). *Societies: Evolutionary and comparative perspectives*. Prentice-Hall.

Parsons, T. (n.d.). An outline of the social system. http://www.csun.edu/~snk1966/Talcott%20Parsons%20-%20An%20Outline%20of%20the%20Social%20System.pdf

BAB 9

MAZHAB CHICAGO DAN INTERAKSIONISME SIMBOLIK

Pendahuluan

Mazhab Chicago menandai transformasi fundamental dalam sosiologi Amerika, menggeser fokus dari analisis teoretis makro menuju penelitian empiris mikro yang berakar pada pengalaman hidup sehari-hari di lingkungan perkotaan. Departemen Sosiologi Universitas Chicago, yang didirikan pada tahun 1892 sebagai departemen sosiologi pertama di dunia, menjadi pusat pengembangan pendekatan sosiologis yang menekankan penelitian lapangan, observasi partisipatif, dan analisis interaksi sosial dalam konteks kehidupan kota yang kompleks dan dinamis.

Kontribusi utama Mazhab Chicago terletak pada pengembangan metodologi kualitatif yang inovatif dan pendekatan teoretis yang menempatkan individu sebagai agen aktif dalam konstruksi realitas sosial. Berbeda dengan fungsionalisme struktural yang dominan pada periode yang sama, sosiolog Chicago mengembangkan perspektif yang mengakui kapasitas manusia untuk bertindak, fluiditas makna sosial, dan sifat dinamis dari interaksi simbolik yang membentuk kehidupan sosial. Pendekatan ini kemudian berkembang menjadi tradisi interaksionisme simbolik yang memberikan pengaruh mendalam terhadap sosiologi interpretatif, etnometodologi, dan berbagai pendekatan kualitatif dalam ilmu sosial kontemporer.

9.1 Sejarah dan Konteks Mazhab Chicago

Lahirnya Sosiologi Perkotaan Empiris

Universitas Chicago didirikan pada tahun 1890 dengan dukungan filantropis John D. Rockefeller, dan hanya dua tahun kemudian, pada 1892, mendirikan Departemen Sosiologi pertama di dunia di bawah kepemimpinan Albion Small. Konteks historis pendirian departemen ini sangat penting: Chicago pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 mengalami transformasi perkotaan yang dramatis, berkembang dari kota kecil menjadi metropolis industri besar dengan populasi yang tumbuh dari 30.000 jiwa pada tahun 1850 menjadi lebih dari 2 juta pada tahun 1910.

Pertumbuhan eksplosif ini disertai dengan berbagai problema sosial yang kompleks: imigrasi masif dari Eropa dan migrasi internal dari wilayah pedesaan Amerika, segregasi rasial dan etnis, kemiskinan perkotaan, kejahatan terorganisir, dan disorganisasi sosial yang luas. Kota Chicago menjadi laboratorium alami yang ideal untuk mengembangkan sosiologi empiris yang berbasis pada observasi langsung terhadap fenomena sosial dalam konteks kehidupan perkotaan yang nyata. Para sosiolog Chicago melihat kota bukan hanya sebagai lokasi penelitian, tetapi sebagai organisme sosial yang kompleks dengan dinamika ekologis, ekonomis, dan kulturalnya sendiri.

Robert Park, yang bergabung dengan Departemen Sosiologi Chicago pada tahun 1914 setelah karir sebagai jurnalis investigatif, membawa perspektif empiris dan pragmatis yang menjadi ciri khas Mazhab Chicago. Park mengembangkan konsep ekologi manusia yang menganalogikan kota sebagai ekosistem di mana berbagai komunitas dan kelompok sosial berkompetisi untuk ruang, sumber daya, dan posisi dominan dalam struktur perkotaan. Bersama Ernest Burgess, Park mengembangkan model zona konsentris yang menggambarkan pola spasial pertumbuhan kota Chicago dalam lima zona konsentris, dari pusat bisnis hingga zona komuter di pinggiran, masing-masing dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan demografis yang berbeda.

Metodologi Penelitian Kualitatif Inovatif

Kontribusi metodologis Mazhab Chicago sangat revolusioner dalam mengembangkan teknik penelitian kualitatif yang kemudian menjadi standar dalam sosiologi dan antropologi. Para peneliti Chicago menggunakan berbagai metode: observasi partisipatif jangka panjang di komunitas perkotaan, wawancara sejarah kehidupan yang mendalam, analisis dokumen personal seperti surat dan buku harian, serta studi kasus etnografis yang detail. Pendekatan ini menghasilkan monografi klasik seperti *The Polish Peasant in Europe and America* (Thomas & Znaniecki, 1918-1920), *The Hobo* (Anderson, 1923), *The Gang* (Thrasher, 1927), dan *The Taxi-Dance Hall* (Cressey, 1932).

William Isaac Thomas mengembangkan konsep "definisi situasi" yang menyatakan bahwa jika manusia mendefinisikan situasi sebagai nyata, maka situasi tersebut menjadi nyata dalam konsekuensinya (Thomas & Znaniecki, 1918-1920). Teorema Thomas ini menjadi prinsip fundamental dalam sosiologi interpretatif, mengakui bahwa realitas sosial tidak semata-mata objektif tetapi dikonstruksi melalui interpretasi subjektif para aktor.

Pendekatan ini mengantisipasi perkembangan konstruksionisme sosial dan fenomenologi sosiologis yang berkembang pada dekade-dekade berikutnya.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan etnografis perkotaan yang dikembangkan Mazhab Chicago memiliki relevansi tinggi untuk memahami dinamika urbanisasi yang pesat. Studi tentang kampung kota, pedagang kaki lima, komunitas migran di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan dapat menggunakan kerangka ekologi perkotaan dan metodologi kualitatif yang dikembangkan sosiolog Chicago. Penelitian tentang bagaimana komunitas Minangkabau, Batak, atau Madura membentuk kantong etnis di Jakarta, misalnya, dapat mengadopsi perspektif ekologi manusia untuk memahami pola spasial, ekonomi, dan sosial dari komunitas-komunitas tersebut.

9.2 George Herbert Mead dan Teori Pembentukan Diri

Interaksi Simbolik sebagai Fondasi Diri

George Herbert Mead (1863-1931), meskipun bukan sosiolog tetapi filsuf pragmatis, memberikan fondasi filosofis paling penting bagi interaksionisme simbolik melalui kuliah-kuliahnya di Universitas Chicago. Karya monumentalnya *Mind, Self, and Society* (Mead, 1934), yang disusun oleh mahasiswanya Charles Morris setelah kematian Mead, mengembangkan teori tentang bagaimana pikiran, diri, dan masyarakat muncul melalui proses interaksi simbolik yang melibatkan penggunaan simbol-simbol signifikan, terutama bahasa.

> "Mead menegaskan diri bukan bawaan, melainkan produk sosial yang terbentuk melalui interaksi simbolik, terutama bahasa. Dengan mengambil peran orang lain hingga orang lain yang digeneralisasi, individu menginternalisasi norma, nilai, dan ekspektasi kolektif untuk membentuk identitasnya."

Mead mengargumentasikan bahwa diri bukanlah entitas bawaan atau substansi psikologis yang sudah ada sejak lahir, tetapi merupakan produk sosial yang berkembang melalui interaksi dengan orang lain (Mead, 1934). Berbeda dengan perspektif psikologi individual yang melihat diri sebagai

entitas pra-sosial, Mead membalikkan urutan kausal: masyarakat mendahului individu dalam pengertian ontologis dan genetis. Anak manusia lahir sebagai organisme biologis tetapi menjadi pribadi dengan diri yang berkembang hanya melalui partisipasi dalam interaksi sosial yang dimediasi oleh simbol-simbol.

Proses pembentukan diri terjadi melalui mekanisme mengambil peran orang lain. Anak belajar melihat dirinya sendiri dari perspektif orang lain, pada awalnya melalui permainan di mana anak mengambil peran orang-orang spesifik seperti ibu, ayah, atau guru. Kemudian, melalui permainan yang terorganisir, anak mengembangkan kemampuan untuk mengambil peran dari orang lain yang digeneralisasi—yaitu perspektif komunitas atau kelompok sosial secara keseluruhan. Konsep orang lain yang digeneralisasi ini krusial karena merepresentasikan internalisasi norma, nilai, dan ekspektasi sosial yang memungkinkan individu mengatur perilakunya sendiri sesuai dengan standar kolektif.

Dialektika "Aku" dan "Diriku"

Mead membedakan dua fase atau aspek dari diri: "Aku" dan "Diriku". "Diriku" adalah aspek diri yang disosialisasikan, bagian dari diri yang merepresentasikan sikap-sikap orang lain yang telah diinternalisasi. "Diriku" adalah diri sebagai objek kesadaran, diri sebagaimana dilihat oleh orang lain dan oleh individu itu sendiri dari perspektif orang lain. Sebaliknya, "Aku" adalah respons spontan dan kreatif individu terhadap "Diriku", aspek diri yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi dan yang memungkinkan kreativitas, spontanitas, dan perubahan sosial.

Dialektika antara "Aku" dan "Diriku" ini menjelaskan bagaimana individu dapat sekaligus merupakan produk sosial dan agen perubahan. "Diriku" memastikan konformitas sosial dan reproduksi struktur sosial melalui internalisasi norma, sementara "Aku" memungkinkan inovasi, resistensi, dan transformasi. Ketegangan produktif antara kedua aspek diri ini menghasilkan dinamisme dalam kehidupan sosial dan menghindari determinisme sosial yang kaku. Setiap tindakan melibatkan dialog internal antara "Aku" yang impulsif dan spontan dengan "Diriku" yang sosial dan terkontrol.

Teori Mead tentang pembentukan diri memiliki implikasi mendalam untuk memahami sosialisasi dan pembentukan identitas dalam konteks Indonesia. Proses internalisasi nilai-nilai kolektif seperti gotong royong, tenggang rasa, dan harmoni dapat dijelaskan melalui mekanisme pengambilan peran orang

lain dan pembentukan orang lain yang digeneralisasi yang khas budaya Jawa atau Indonesia. Namun, konsep "Aku" juga menjelaskan bagaimana individu dapat mengadaptasi, memodifikasi, atau bahkan menolak norma-norma tradisional dalam konteks modernisasi dan globalisasi yang cepat.

9.3 Herbert Blumer dan Prinsip Interaksionisme Simbolik

Tiga Premis Dasar Interaksionisme Simbolik

Herbert Blumer (1900-1987), mahasiswa Mead dan penerus intelektual utamanya, mengembangkan dan memformalisasikan interaksionisme simbolik sebagai perspektif sosiologis yang koheren dalam karyanya yang sangat berpengaruh *Symbolic Interactionism: Perspective and Method* (Blumer, 1969). Blumer merumuskan tiga premis dasar yang menjadi fondasi pendekatan interaksionis simbolik.

Premis Pertama: Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimiliki sesuatu itu bagi mereka (Blumer, 1969). Premis ini menekankan sentralitas makna dalam tindakan sosial. Berbeda dengan behaviorisme yang mereduksi tindakan manusia menjadi respons terhadap stimulus eksternal, atau dengan determinisme struktural yang melihat tindakan sebagai ekspresi dari posisi struktural, interaksionisme simbolik mengargumentasikan bahwa tindakan dimediasi oleh interpretasi terhadap situasi. Makna bukanlah properti intrinsik dari objek atau situasi, tetapi dikonstruksi dalam proses interpretatif.

> "Blumer merumuskan tiga premis interaksionisme simbolik: tindakan didasarkan pada makna, makna lahir dari interaksi sosial, dan makna dimodifikasi melalui interpretasi. Ia menekankan pemahaman proses pembentukan makna, menolak reduksi sosiologi pada variabel kuantitatif semata."

Premis Kedua: Makna dari sesuatu tersebut berasal dari atau muncul melalui interaksi sosial yang dilakukan seseorang dengan orang lain. Makna bukan merupakan properti psikologis individual yang sudah ada di kepala orang, tetapi diproduksi secara sosial melalui proses komunikasi dan interaksi. Dalam interaksi simbolik, aktor saling menyesuaikan tindakan mereka berdasarkan interpretasi terhadap tindakan orang lain, menghasilkan proses

koordinasi yang dinamis dan situasional. Makna bersifat intersubjektif dan konstitutif bagi realitas sosial itu sendiri.

Premis Ketiga: Makna-makna tersebut ditangani dalam dan dimodifikasi melalui proses interpretatif yang digunakan oleh seseorang dalam menghadapi hal-hal yang dijumpainya. Ini menekankan sifat aktif dan kreatif dari interpretasi. Aktor tidak secara pasif menerima makna yang sudah diberikan, tetapi secara aktif menginterpretasikan situasi, dan interpretasi ini dapat mengubah, memodifikasi, atau mentransformasikan makna dalam konteks spesifik. Proses interpretasi ini melibatkan dialog internal di mana aktor berkomunikasi dengan dirinya sendiri, mempertimbangkan berbagai kemungkinan makna dan tindakan sebelum memutuskan cara bertindak.

Kritik terhadap Sosiologi Variabel

Blumer mengembangkan kritik tajam terhadap apa yang disebutnya sosiologi variabel—pendekatan sosiologi kuantitatif yang dominan pada pertengahan abad ke-20 yang berusaha mengidentifikasi hubungan kausal antar variabel melalui analisis statistik (Blumer, 1969). Blumer mengargumentasikan bahwa pendekatan ini mengabaikan proses interpretatif yang fundamental dalam tindakan sosial. Dengan mereduksi kompleksitas tindakan manusia menjadi variabel-variabel yang dapat dikuantifikasi dan diukur, sosiologi variabel kehilangan akses terhadap proses pembentukan makna yang sebenarnya membuat tindakan sosial menjadi bermakna bagi para aktor.

Kritik Blumer menekankan pentingnya introspeksi simpatik dan mengambil peran orang lain dalam penelitian sosiologis. Sosiolog harus berusaha memahami dunia dari perspektif aktor yang diteliti, menggunakan metode kualitatif seperti observasi partisipatif dan wawancara mendalam untuk mengakses proses interpretif yang membentuk tindakan. Pendekatan ini tidak menolak kausalitas atau generalisasi, tetapi mengargumentasikan bahwa generalisasi sosiologis yang valid harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang proses interpretatif yang konkret dan situasional.

Dalam konteks penelitian sosial Indonesia, kritik Blumer terhadap sosiologi variabel sangat relevan. Banyak fenomena sosial Indonesia—seperti praktik korupsi yang melibatkan logika pertukaran hadiah, resistensi halus petani terhadap program pemerintah, atau negosiasi identitas dalam masyarakat plural—tidak dapat dipahami secara memadai melalui analisis variabel kuantitatif semata. Pendekatan interpretatif yang sensitif terhadap konteks

budaya dan proses pembentukan makna lokal menjadi esensial untuk memahami kompleksitas kehidupan sosial Indonesia.

9.4 Erving Goffman dan Dramaturgi Sosial

Presentasi Diri dalam Kehidupan Sehari-hari

Erving Goffman (1922-1982) mengembangkan perspektif dramaturgis yang brillian dalam karya monumentalnya *The Presentation of Self in Everyday Life* (Goffman, 1959). Goffman menggunakan metafora teater untuk menganalisis bagaimana individu mengelola kesan dalam interaksi sosial sehari-hari. Dalam pendekatan dramaturgis, kehidupan sosial dipahami sebagai pertunjukan teater di mana aktor memainkan peran-peran tertentu di hadapan audiens, dengan menggunakan kostum, properti, latar panggung, dan skrip untuk menciptakan definisi situasi yang diinginkan.

Goffman membedakan antara panggung depan dan panggung belakang (Goffman, 1959). Di panggung depan, aktor melakukan pertunjukan sesuai dengan ekspektasi peran sosial dan norma-norma yang berlaku, menjaga kesan tertentu yang ingin diciptakan. Di panggung belakang, aktor dapat melepaskan topeng peran, bersantai dari tuntutan pertunjukan, dan mempersiapkan atau mendiskusikan pertunjukan dengan rekan satu tim. Distinsi ini mengungkapkan dimensi strategis dan manipulatif dalam presentasi diri, di mana individu secara sadar mengelola informasi tentang diri mereka untuk menciptakan kesan yang menguntungkan atau untuk mencapai tujuan interaksional tertentu.

Konsep Goffman tentang muka atau wajah sosial sangat penting. Muka adalah nilai sosial positif yang diklaim seseorang untuk dirinya sendiri dalam interaksi tertentu. Setiap interaksi melibatkan kerja muka—usaha untuk mempertahankan muka sendiri dan menjaga muka orang lain. Ketika seseorang kehilangan muka, mereka mengalami malu dan harus melakukan pekerjaan reparatif untuk memulihkan status sosial mereka. Banyak ritual interaksional—seperti permintaan maaf, pemberian alasan, atau tindakan untuk menyelamatkan muka—dapat dipahami sebagai kerja muka yang bertujuan menjaga keseimbangan ritual dalam interaksi.

Stigma dan Identitas Tercoreng

Dalam karya lain yang sangat berpengaruh, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity* (Goffman, 1963), Goffman menganalisis

bagaimana individu dengan atribut yang dianggap diskreditkan atau tidak normal mengelola identitas mereka dalam interaksi dengan orang "normal". Stigma adalah atribut yang secara mendalam mendiskreditkan individu, mengubah identitas sosial dari "orang utuh dan biasa" menjadi "orang yang cacat dan berkurang". Goffman mengidentifikasi tiga tipe stigma: stigma fisik seperti deformitas tubuh, stigma karakter seperti kelemahan moral contohnya kecanduan atau catatan kriminal, dan stigma tribal seperti ras, bangsa, atau agama (Goffman, 1963).

Individu yang terstigma mengembangkan berbagai strategi untuk mengelola informasi tentang atribut diskreditkan mereka. Mereka yang memiliki stigma yang tidak terlihat dapat menggunakan strategi menyamar sebagai normal atau meminimalkan visibilitas stigma. Mereka yang stigmanya terlihat harus mengelola ketegangan dalam interaksi tatap muka dengan orang normal, menggunakan berbagai teknik untuk mengurangi ketegangan dan membuat interaksi berjalan lebih lancar.

Analisis Goffman tentang stigma memiliki relevansi langsung untuk memahami berbagai bentuk marginalisasi dan diskriminasi dalam masyarakat Indonesia. Stigma terhadap mantan narapidana, penderita HIV/AIDS, pekerja seks komersial, atau kelompok LGBT melibatkan proses sosial yang dapat dianalisis menggunakan kerangka Goffman. Lebih luas lagi, konsep muka Goffman sangat resonan dengan konsep malu yang penting dalam budaya Indonesia, di mana menjaga muka dan menghindari rasa malu adalah motivasi sosial yang kuat dalam regulasi perilaku sosial.

9.5 Harold Garfinkel dan Etnometodologi

Metode Pelanggaran sebagai Strategi Penelitian

Harold Garfinkel (1917-2011) mengembangkan etnometodologi sebagai program penelitian yang radikal dalam studinya *Studies in Ethnomethodology* (Garfinkel, 1967). Etnometodologi, secara literal berarti "studi tentang metode rakyat", mengkaji metode-metode praktis yang digunakan orang awam dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan dan mempertahankan tatanan sosial yang teratur dan dapat dipahami. Berbeda dengan sosiologi konvensional yang memperlakukan tatanan sosial sebagai fakta objektif yang sudah diberikan, etnometodologi melihat tatanan sosial sebagai pencapaian yang terus-menerus diproduksi melalui praktik-praktik interpretatif dan interaksional yang kompeten.

Garfinkel mengembangkan metode eksperimen pelanggaran untuk mengungkap asumsi-asumsi yang dianggap biasa yang mendasari interaksi sosial normal (Garfinkel, 1967). Dalam eksperimen-eksperimen ini, mahasiswanya diminta melanggar ekspektasi normal dalam interaksi sehari-hari—misalnya, bertingkah seperti tamu di rumah sendiri, meminta klarifikasi berlebihan dalam percakapan biasa, atau menawar harga di toko yang harganya sudah tetap. Reaksi kebingungan, kesal, atau marah dari orang lain mengungkapkan norma-norma implisit dan ekspektasi yang biasanya tidak disadari tetapi yang esensial untuk kelancaran interaksi sosial.

"Garfinkel melalui etnometodologi menekankan bahwa tatanan sosial bukan fakta objektif, melainkan hasil praktik interaksi sehari-hari, diungkap melalui eksperimen pelanggaran yang memperlihatkan norma implisit."

Konsep kebergantungan pada konteks dan refleksivitas sangat sentral dalam etnometodologi. Kebergantungan pada konteks merujuk pada fakta bahwa makna pernyataan atau tindakan bergantung pada konteks spesifiknya. Tidak ada makna yang sepenuhnya eksplisit atau independen dari konteks; semua makna selalu bergantung pada pemahaman bersama yang tidak terucapkan tentang konteks relevan. Refleksivitas merujuk pada fakta bahwa deskripsi tentang situasi sosial sekaligus konstitutif bagi situasi itu sendiri. Ketika orang menggambarkan apa yang terjadi dalam situasi sosial, deskripsi mereka tidak hanya merepresentasikan realitas tetapi juga membentuk dan mengkonstitusi realitas itu.

Akuntabilitas dan Praktik Rasional

Garfinkel mengargumentasikan bahwa tindakan sosial bersifat dapat dijelaskan, dapat dilaporkan, dapat dipertanggungjawabkan. Aktor sosial tidak hanya melakukan tindakan tetapi juga secara simultan membuat tindakan mereka dapat dipahami dan dapat diterima secara rasional oleh orang lain. Praktik memberikan penjelasan ini—memberikan alasan, penjelasan, justifikasi—adalah bagian integral dari tindakan itu sendiri, bukan refleksi sekunder yang ditambahkan setelah fakta.

Etnometodologi menantang perbedaan konvensional antara penalaran akal sehat dan penalaran ilmiah. Garfinkel menunjukkan bahwa bahkan dalam

praktik sains, para ilmuwan menggunakan banyak metode situasional dan penalaran praktis yang sama dengan yang digunakan orang awam. Perbedaan antara sains dan penalaran sehari-hari adalah perbedaan derajat dan konteks, bukan perbedaan jenis yang fundamental. Ini mengimplikasikan bahwa sosiologi tidak dapat mengklaim status epistemologis yang superior terhadap pengetahuan akal sehat, tetapi harus mengkaji pengetahuan akal sehat itu sendiri sebagai topik penelitian.

> "Garfinkel menegaskan tindakan sosial selalu dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Aktor memberi alasan atau justifikasi agar tindakannya dipahami orang lain, sehingga akuntabilitas menjadi bagian integral dari praktik sosial itu sendiri."

Dalam konteks Indonesia, etnometodologi dapat memberikan wawasan penting tentang bagaimana tatanan sosial yang kompleks dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bagaimana orang Indonesia mengelola interaksi dalam konteks hierarki sosial yang kompleks menggunakan sistem kata ganti, atau bagaimana praktik musyawarah menghasilkan konsensus melalui metode-metode komunikatif tertentu yang diasumsikan bersama tetapi jarang dijelaskan secara eksplisit. Analisis etnometodologis dapat mengungkapkan metode anggota yang digunakan aktor Indonesia untuk menghasilkan dan mempertahankan tatanan sosial yang khas budaya.

9.6 Warisan dan Relevansi Kontemporer

Mazhab Chicago dan interaksionisme simbolik telah memberikan kontribusi fundamental terhadap perkembangan sosiologi kualitatif, teori sosial mikro, dan berbagai subdisiplin sosiologi seperti sosiologi budaya, sosiologi pendidikan, studi organisasi, dan kriminologi. Penekanan pada kapasitas bertindak, makna, dan proses interpretatif menawarkan alternatif penting terhadap determinisme struktural dan reduksionisme behavioris yang mendominasi banyak periode dalam sejarah ilmu sosial.

Dalam sosiologi kontemporer, warisan interaksionisme simbolik dapat dilihat dalam berbagai tradisi: analisis percakapan yang mengkaji struktur mikro dari pembicaraan dalam interaksi, sosiologi konstruksionis yang melihat realitas

sosial sebagai konstruksi interpretatif, dan berbagai pendekatan fenomenologis yang menekankan pengalaman hidup dan makna subjektif. Konsep-konsep seperti definisi situasi, presentasi diri, dan stigma telah menjadi bagian dari kosakata standar sosiologi dan digunakan lintas berbagai paradigma teoretis.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan interaksionis simbolik sangat relevan untuk memahami dinamika identitas dalam masyarakat yang plural dan dalam proses modernisasi yang cepat. Negosiasi identitas etnis, agama, kelas, dan gender dalam kehidupan sehari-hari dapat dianalisis menggunakan kerangka dramaturgis Goffman dan teori diri Mead. Studi tentang bagaimana generasi muda Indonesia menggunakan media sosial untuk konstruksi dan presentasi diri, misalnya, dapat mengadopsi dan mengadaptasi konsep-konsep interaksionis simbolik untuk konteks digital yang baru.

Relevansi teori interaksionisme simbolik untuk memahami fenomena sosial Indonesia sangat luas. Praktik-praktik budaya seperti basa-basi, etiket berbahasa Jawa, atau ritual-ritual sosial dapat dipahami sebagai bentuk kerja muka dan pengelolaan kesan. Analisis tentang bagaimana korupsi diproduksi dan direproduksi melalui jaringan patron-klien dapat menggunakan perspektif interaksionis untuk memahami proses pembentukan makna yang membuat praktik korupsi menjadi "wajar" atau "dapat diterima" dalam konteks tertentu. Pendekatan etnometodologis dapat mengungkapkan metode-metode praktis yang digunakan aktor untuk menghasilkan dan mempertahankan tatanan sosial dalam berbagai institusi Indonesia, dari birokrasi pemerintahan hingga pasar tradisional.

Referensi Bab 9

Anderson, N. (1923). *The Hobo: The Sociology of the Homeless Man*. University of Chicago Press.

Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. University of California Press. https://archive.org/details/symbolicinteract00blum

Cressey, P. G. (1932). *The Taxi-Dance Hall: A Sociological Study in Commercialized Recreation and City Life*. University of Chicago Press.

Garfinkel, H. (1967). *Studies in Ethnomethodology*. Prentice-Hall.

Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Doubleday.

Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Prentice-Hall.

Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi - Universitas Diponegoro. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi

Jurnal Komunikasi - Universitas Islam Indonesia. https://journal.uii.ac.id/jurnal-komunikasi

Mead, G. H. (1934). *Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist* (C. W. Morris, Ed.). University of Chicago Press. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.275359

Thomas, W. I., & Znaniecki, F. (1918-1920). *The Polish Peasant in Europe and America* (5 vols.). University of Chicago Press.

Thrasher, F. M. (1927). *The Gang: A Study of 1,313 Gangs in Chicago*. University of Chicago Press.

BAGIAN IV
TEORI SOSIAL KONTEMPORER

BAB 10
TEORI KONFLIK DAN NEO-MARXISME

Pendahuluan

Teori konflik dan neo-Marxisme muncul sebagai respons kritis terhadap dominasi fungsionalisme struktural dalam sosiologi Amerika dan Eropa pada pertengahan abad ke-20. Berbeda dengan fungsionalisme yang menekankan konsensus, integrasi, dan stabilitas sosial, perspektif konflik mengargumentasikan bahwa konflik, kontradiksi, dan perubahan adalah karakteristik fundamental dari kehidupan sosial. Masyarakat dipahami bukan sebagai sistem yang harmonis dan seimbang, tetapi sebagai arena pertarungan antara kelompok-kelompok dengan kepentingan yang bertentangan, di mana kekuasaan dan dominasi menjadi mekanisme utama yang mengatur distribusi sumber daya dan mempertahankan tatanan sosial.

Tradisi teori konflik memiliki akar yang dalam dalam pemikiran Karl Marx, tetapi berkembang jauh melampaui Marxisme klasik melalui berbagai aliran neo-Marxis yang mengadaptasi dan merevisi analisis Marxian untuk konteks historis dan sosial yang berbeda. C. Wright Mills mengembangkan konsep imajinasi sosiologis yang menghubungkan biografi individu dengan struktur historis dan kekuasaan. Mazhab Frankfurt mengintegrasikan kritik terhadap kapitalisme dengan analisis budaya massa dan rasionalitas instrumental. Jürgen Habermas mengembangkan teori tindakan komunikatif yang menawarkan visi emansipatoris berbasis pada rasionalitas komunikatif. Antonio Gramsci menganalisis hegemoni sebagai mekanisme dominasi yang beroperasi melalui konsensus ideologis. Ralf Dahrendorf mengembangkan teori konflik yang melampaui reduksionisme ekonomis Marxisme klasik.

Bab ini akan mengeksplorasi kontribusi teoretis utama dari para pemikir neo-Marxis dan teoris konflik, menunjukkan bagaimana mereka mengadaptasi, merevisi, dan mengembangkan warisan Marxian untuk menganalisis transformasi kapitalisme abad ke-20, munculnya masyarakat konsumsi,

perubahan dalam struktur kelas, dan mekanisme baru dominasi dan resistensi. Dalam konteks Indonesia, perspektif konflik dan neo-Marxisme memberikan alat analitis yang kuat untuk memahami dinamika kekuasaan, ketimpangan struktural, konflik sosial, dan perjuangan untuk keadilan sosial dalam masyarakat yang ditandai oleh kesenjangan ekonomi yang tajam dan struktur kekuasaan yang timpang.

10.1 C. Wright Mills dan Imajinasi Sosiologis

Kritik terhadap Fungsionalisme dan Empirisme Abstrak

C. Wright Mills (1916-1962) muncul sebagai salah satu kritikus paling tajam terhadap sosiologi akademik Amerika pada tahun 1950-an. Dalam karyanya yang ikonik *The Sociological Imagination*, Mills mengembangkan kritik devastatif terhadap dua tradisi dominan dalam sosiologi Amerika: teori sistemik abstrak yang direpresentasikan oleh Talcott Parsons, dan empirisme abstrak yang direpresentasikan oleh penelitian survei kuantitatif skala besar (Mills, 1959). Mills mengargumentasikan bahwa kedua tradisi ini, meskipun tampak bertentangan, sama-sama gagal memenuhi janji sosiologi sebagai disiplin yang menghubungkan masalah pribadi dengan isu publik dan biografi individu dengan struktur historis.

Teori sistemik Parsons, menurut Mills, terjebak dalam jargon konseptual yang tidak dapat diterjemahkan ke dalam penelitian empiris yang bermakna atau analisis masalah sosial konkret. Fungsionalisme Parsonian mengasumsikan konsensus nilai dan integrasi sistem sebagai kondisi normal masyarakat, dengan demikian mengabaikan konflik, dominasi, dan ketimpangan kekuasaan yang fundamental dalam masyarakat kapitalis. Pendekatan ini pada dasarnya konservatif karena melegitimasi status quo dan gagal memberikan alat untuk kritik sosial yang radikal.

Empirisme abstrak, di sisi lain, mereduksi sosiologi menjadi teknik pengumpulan data dan analisis statistik tanpa kerangka teoretis yang memadai untuk menginterpretasikan temuan. Mills mengkritik bahwa penelitian survei skala besar sering menghasilkan temuan yang trivial atau tautologis, gagal mengungkap struktur kekuasaan yang mendalam, dan melayani kepentingan birokratis dan komersial daripada pemahaman kritis tentang masyarakat (Mills, 1959). Metodologi ini mengatomisasi individu dan mengabaikan konteks historis dan struktural yang membentuk pengalaman mereka.

Imajinasi Sosiologis sebagai Kualitas Pikiran

Mills mendefinisikan imajinasi sosiologis sebagai kualitas pikiran yang memungkinkan individu memahami hubungan antara biografi personal dan struktur sosial-historis yang lebih luas. Imajinasi sosiologis adalah kemampuan untuk "memahami drama sejarah yang lebih besar dalam hal artinya bagi kehidupan batin dan karir luar berbagai individu" (Mills, 1959). Ini melibatkan perpindahan perspektif dari tingkat pengalaman individual ke tingkat struktur sosial, dari kekhawatiran pribadi ke isu publik, dari momen historis tertentu ke transformasi historis jangka panjang.

Mills membedakan antara "kekhawatiran pribadi" dan "isu publik". Kekhawatiran pribadi terjadi dalam karakter individu dan dalam lingkup hubungan langsung mereka dengan orang lain; ini adalah masalah pribadi. Isu publik melampaui lingkungan lokal individu dan organisasi kehidupan batin mereka; ini berkaitan dengan institusi masyarakat yang lebih besar dan bagaimana berbagai milieu tumpang tindih dan saling menembus untuk membentuk struktur sosial dan historis yang lebih luas. Misalnya, ketika satu orang dalam kota berpenduduk 100.000 menganggur, itu adalah kekhawatiran pribadi; tetapi ketika 15 juta dari populasi 50 juta menganggur, itu adalah isu publik yang memerlukan analisis struktural tentang sistem ekonomi.

Imajinasi sosiologis memerlukan tiga jenis pertanyaan fundamental. Pertama, apa struktur masyarakat tertentu secara keseluruhan? Apa komponen esensialnya, dan bagaimana mereka berkaitan satu sama lain? Kedua, di mana masyarakat ini berdiri dalam sejarah manusia? Apa mekanisme perubahan dalam periode tertentu? Ketiga, jenis manusia apa yang berlaku dalam masyarakat dan periode tertentu? Dalam cara apa mereka dipilih dan dibentuk, dibebaskan dan ditekan, dibuat sensitif dan dibuat tumpul?

Elit Kekuasaan dan Struktur Dominasi

Dalam *The Power Elite*, Mills mengembangkan analisis tentang struktur kekuasaan dalam masyarakat Amerika kontemporer (Mills, 1956). Mills mengargumentasikan bahwa kekuasaan di Amerika Serikat tidak terdistribusi secara demokratis atau pluralistik sebagaimana diklaim oleh teori liberal, tetapi terkonsentrasi dalam tangan sekelompok kecil elit yang menempati

posisi komando dalam tiga institusi utama: korporasi ekonomi, aparatus militer, dan eksekutif politik.

Elit kekuasaan bukan sekadar kumpulan individu yang berkuasa, tetapi sebuah struktur posisi institusional yang memberikan mereka yang menempatinya kemampuan untuk membuat keputusan yang memiliki konsekuensi besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Elit ekonomi, militer, dan politik ini saling terkait melalui berbagai mekanisme: mobilitas personel antar institusi, perkawinan dan hubungan keluarga, pendidikan di institusi yang sama, dan yang paling penting, kesamaan kepentingan struktural yang berasal dari posisi mereka dalam struktur institusional (Mills, 1956).

Mills menolak teori pluralis yang mengklaim bahwa kekuasaan terdistribusi di antara banyak kelompok kepentingan yang berkompetisi. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa di tingkat atas struktur kekuasaan, terdapat kesatuan elit yang relatif koheren yang mengendalikan keputusan-keputusan besar dalam politik luar negeri, ekonomi makro, dan alokasi sumber daya nasional. Di tingkat menengah, terdapat pluralisme kelompok kepentingan yang saling berkompetisi, tetapi kompetisi ini terjadi dalam parameter yang ditetapkan oleh elit kekuasaan. Di tingkat bawah, massa masyarakat sebagian besar tidak berdaya dan apatis secara politik.

Dalam konteks Indonesia, analisis Mills tentang elit kekuasaan sangat relevan untuk memahami struktur dominasi yang ditandai oleh konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik dalam tangan sekelompok kecil oligarki. Hubungan antara elit bisnis, elit politik, dan elit militer telah membentuk pola dominasi yang persisten sejak era Orde Baru hingga era Reformasi. Konsep imajinasi sosiologis juga penting untuk memahami bagaimana masalah pribadi seperti kemiskinan, pengangguran, atau akses terbatas terhadap pendidikan sebenarnya adalah isu publik yang berakar dalam struktur ekonomi-politik yang timpang.

10.2 Mazhab Frankfurt dan Teori Kritis

Dialektika Pencerahan dan Rasionalitas Instrumental

Mazhab Frankfurt, yang didirikan di Institut für Sozialforschung di Frankfurt pada tahun 1923, mengembangkan tradisi teori kritis yang mengintegrasikan analisis Marxian dengan wawasan dari psikoanalisis, filsafat, dan teori budaya. Generasi pertama Mazhab Frankfurt mencakup Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, dan Erich Fromm, yang semuanya melarikan diri dari Nazi Jerman ke Amerika Serikat pada tahun 1930-an.

Dalam karya monumental *Dialectic of Enlightenment*, Horkheimer dan Adorno mengembangkan kritik radikal terhadap rasionalitas Pencerahan yang mereka lihat telah berbalik menjadi bentuk baru dominasi (Horkheimer & Adorno, 1947). Mereka mengargumentasikan bahwa proyek Pencerahan untuk membebaskan manusia dari mitos dan takhayul melalui akal dan sains telah menghasilkan paradoks: rasionalitas instrumental yang dimaksudkan untuk menguasai alam eksternal telah berubah menjadi alat dominasi atas manusia itu sendiri. Pencerahan, dengan demikian, mengandung benih totalitarianisme dan barbarisme yang mencapai puncaknya dalam fasisme dan Holocaust.

Rasionalitas instrumental adalah bentuk pemikiran yang memperlakukan segala sesuatu, termasuk manusia, sebagai objek yang dapat dimanipulasi untuk mencapai tujuan yang efisien. Dalam kapitalisme lanjut, rasionalitas instrumental meresapi semua aspek kehidupan sosial: produksi ekonomi, administrasi birokratis, sains dan teknologi, bahkan budaya dan seni. Ini menghasilkan masyarakat yang sepenuhnya terkelola di mana spontanitas, kreativitas, dan pemikiran kritis semakin terbatas.

Horkheimer dan Adorno juga menganalisis bagaimana rasionalitas instrumental mengubah alam menjadi objek eksploitasi tanpa batas. Dominasi atas alam eksternal melalui sains dan teknologi berjalan seiring dengan dominasi atas alam internal manusia—dorongan, emosi, dan tubuh—yang harus dikendalikan dan disiplinkan agar sesuai dengan tuntutan produksi kapitalis. Dialektika ini menghasilkan alienasi yang mendalam di mana manusia terasing bukan hanya dari produk kerja mereka, tetapi dari alam, dari orang lain, dan dari diri mereka sendiri.

Industri Budaya dan Kesadaran Palsu

Dalam bab "The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception" dari *Dialectic of Enlightenment*, Adorno dan Horkheimer mengembangkan kritik terhadap produksi budaya massa di bawah kapitalisme lanjut (Adorno & Horkheimer, 1944). Istilah "industri budaya" dipilih secara sengaja untuk menunjukkan bahwa budaya dalam masyarakat kapitalis maju telah menjadi komoditas yang diproduksi secara massal menggunakan teknik industrial yang sama seperti produksi barang-barang material lainnya.

Industri budaya menghasilkan standardisasi dan pseudo-individualisasi. Produk budaya massa—film Hollywood, musik pop, televisi, iklan—tampak bervariasi dan menawarkan pilihan, tetapi pada dasarnya semuanya

mengikuti formula yang sama dan memperkuat ideologi dominan. Pseudo-individualisasi adalah ilusi perbedaan yang menutupi keseragaman fundamental; konsumen dibuat merasa bahwa mereka membuat pilihan individual yang unik, padahal sebenarnya mereka memilih di antara varian standar dari produk yang sama.

Industri budaya berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang lebih efektif daripada represi langsung. Melalui hiburan yang menghibur tetapi tidak menantang, industri budaya menghasilkan konformitas dan pasivitas. Seni yang sejati, menurut Adorno, harus mempertahankan karakter otonom dan kritisnya, menolak integrasi ke dalam sistem komoditas dan menantang kesadaran yang ada. Namun, industri budaya mengintegrasikan bahkan seni yang paling kritis ke dalam logika komoditas, menetralisir potensi kritisnya.

Kritik Adorno dan Horkheimer terhadap industri budaya sering disalahpahami sebagai elitisme kultural. Namun, kritik mereka bukan terhadap budaya populer per se, tetapi terhadap komodifikasi dan instrumentalisasi budaya yang menghancurkan potensi emansipatorisnya. Dalam masyarakat di mana semua aspek kehidupan dikomodifikasi, termasuk waktu luang dan hiburan, tidak ada ruang yang tersisa untuk refleksi kritis atau transendensi atas kondisi yang ada.

Dalam konteks Indonesia, analisis tentang industri budaya sangat relevan untuk memahami bagaimana media massa, industri hiburan, dan budaya konsumsi membentuk kesadaran dan identitas. Dominasi sinetron dengan formula yang repetitif, musik pop yang diproduksi secara massal, dan iklan yang terus-menerus mempromosikan gaya hidup konsumtif dapat dianalisis sebagai mekanisme yang menghasilkan konformitas dan mengalihkan perhatian dari ketimpangan struktural dan isu-isu politik yang mendasar.

Herbert Marcuse dan Manusia Satu Dimensi

Herbert Marcuse, dalam *One-Dimensional Man*, mengembangkan analisis tentang bagaimana kapitalisme lanjut menghasilkan bentuk baru dominasi yang lebih halus tetapi lebih total daripada eksploitasi ekonomi langsung yang dianalisis Marx (Marcuse, 1964). Marcuse mengargumentasikan bahwa masyarakat industrial maju telah menciptakan "manusia satu dimensi"—individu yang kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis dan membayangkan alternatif terhadap tatanan yang ada.

Dominasi dalam masyarakat industrial maju beroperasi bukan terutama melalui represi langsung, tetapi melalui penciptaan kebutuhan palsu yang

mengikat individu pada sistem produksi dan konsumsi kapitalis. Melalui iklan, media massa, dan budaya konsumsi, individu dibuat percaya bahwa kebahagiaan dan kepuasan dapat dicapai melalui konsumsi komoditas. Kebutuhan yang dimanipulasi ini menciptakan ketergantungan pada sistem yang sebenarnya menindas mereka (Marcuse, 1964).

Marcuse mengidentifikasi paradoks fundamental dari masyarakat industrial maju: meskipun teknologi telah mencapai tingkat di mana kemungkinan pembebasan manusia dari kerja yang melelahkan dan kelangkaan material sudah tersedia, masyarakat tetap mempertahankan dominasi dan eksploitasi. Ini karena teknologi tidak netral; ia dikembangkan dan digunakan dalam kerangka relasi sosial kapitalis yang berorientasi pada profit dan kontrol, bukan pada kebutuhan manusia yang sebenarnya.

Marcuse juga menganalisis "toleransi represif" dalam demokrasi liberal. Masyarakat yang tampaknya toleran dan pluralistik sebenarnya menetralisir oposisi dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem. Kebebasan berbicara dan berpendapat diperbolehkan, tetapi dalam konteks di mana opini kritis tidak memiliki dampak nyata terhadap struktur kekuasaan. Ini menciptakan ilusi kebebasan sambil mempertahankan dominasi yang fundamental.

10.3 Jürgen Habermas dan Teori Tindakan Komunikatif

Kritik terhadap Rasionalitas Instrumental

Jürgen Habermas, sebagai teoretikus generasi kedua Mazhab Frankfurt, mengembangkan teori sosial yang monumental yang berusaha merekonstruksi proyek teori kritis sambil mengatasi pesimisme generasi pertama. Dalam *The Theory of Communicative Action*, Habermas mengargumentasikan bahwa masalah dengan modernitas bukanlah rasionalisasi per se, tetapi dominasi satu bentuk rasionalitas—rasionalitas instrumental—atas bentuk rasionalitas lainnya (Habermas, 1981).

Habermas membedakan antara tindakan instrumental, yang berorientasi pada efisiensi dalam mencapai tujuan, dan tindakan komunikatif, yang berorientasi pada pencapaian pemahaman bersama melalui dialog. Rasionalitas instrumental cocok untuk sistem ekonomi dan administrasi negara, di mana koordinasi tindakan dicapai melalui uang dan kekuasaan. Namun, dalam dunia kehidupan—ranah interaksi sosial sehari-hari, pembentukan identitas, dan reproduksi budaya—koordinasi harus dicapai melalui tindakan komunikatif berbasis pada argumen dan kesepakatan.

Patologi modernitas, menurut Habermas, terjadi ketika logika sistem—rasionalitas instrumental yang dimediasi oleh uang dan kekuasaan—mengkolonisasi dunia kehidupan. Ini menghasilkan berbagai masalah sosial: degradasi solidaritas sosial, fragmentasi makna, anomie, dan kehilangan kebebasan. Ekonomi dan negara, yang seharusnya melayani kebutuhan dunia kehidupan, malah mendominasi dan mengubah relasi sosial menjadi relasi transaksional dan birokratis (Habermas, 1981).

Teori Diskursus dan Demokrasi Deliberatif

Habermas mengembangkan teori diskursus yang menjadi fondasi bagi konsepnya tentang demokrasi deliberatif. Dalam kondisi ideal, komunikasi harus memenuhi kondisi-kondisi tertentu agar dapat dianggap rasional: semua peserta harus memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, mengajukan pertanyaan, dan menantang klaim; tidak boleh ada paksaan atau manipulasi; hanya kekuatan argumen yang lebih baik yang seharusnya menentukan hasil diskusi. Ini yang disebut Habermas sebagai "situasi berbicara ideal".

Dalam praktik nyata, komunikasi selalu terdistorsi oleh ketimpangan kekuasaan, ideologi, dan kepentingan strategis. Namun, situasi berbicara ideal berfungsi sebagai norma kontrafaktual yang memungkinkan kita mengkritik kondisi komunikasi yang ada dan berjuang untuk menciptakan kondisi yang lebih mendekati ideal. Legitimasi politik, menurut Habermas, harus didasarkan pada diskursus publik yang bebas dan terbuka di mana warga negara dapat berpartisipasi sebagai setara dalam pembentukan kehendak kolektif.

Habermas mengembangkan konsep "ruang publik" sebagai ranah dalam kehidupan sosial di mana opini publik dapat terbentuk melalui diskusi rasional tentang masalah-masalah yang menjadi kepentingan umum (Habermas, 1962). Ruang publik borjuis yang muncul di Eropa abad ke-18 dan 19—melalui kafe, salon, dan media cetak—memungkinkan warga untuk mendiskusikan isu-isu politik dan sosial secara kritis, terpisah dari kontrol negara dan kepentingan ekonomi. Namun, dalam kapitalisme lanjut, ruang publik telah mengalami transformasi struktural: ia telah dikomodifikasi dan dipolitisasi, kehilangan fungsi kritisnya.

Dalam konteks Indonesia, konsep Habermas tentang ruang publik dan demokrasi deliberatif menawarkan kerangka normatif untuk mengevaluasi kualitas demokrasi. Pertanyaan kritis yang dapat diajukan meliputi: sejauh

mana media massa menyediakan forum untuk diskusi rasional tentang isu-isu publik, atau sebaliknya didominasi oleh kepentingan komersial dan politik? Sejauh mana warga negara memiliki akses yang setara untuk berpartisipasi dalam diskursus publik, atau apakah partisipasi dibatasi oleh ketimpangan ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan? Bagaimana media sosial mengubah karakter ruang publik, apakah memperdalam deliberasi demokratis atau justru menghasilkan polarisasi dan penyebaran disinformasi?

10.4 Antonio Gramsci dan Hegemoni

Hegemoni sebagai Dominasi Konsensual

Antonio Gramsci (1891-1937), pemimpin Partai Komunis Italia yang menulis sebagian besar karyanya saat dipenjara oleh rezim fasis Mussolini, mengembangkan konsep hegemoni yang menjadi salah satu kontribusi paling berpengaruh terhadap teori Marxis. Hegemoni, bagi Gramsci, merujuk pada dominasi yang dicapai bukan terutama melalui koersi atau kekerasan, tetapi melalui kepemimpinan intelektual dan moral yang menghasilkan konsensus (Gramsci, 1971).

Kelas dominan mempertahankan kekuasaannya tidak hanya melalui kontrol atas alat-alat produksi dan aparatus represif negara, tetapi juga melalui kemampuan mereka untuk membuat pandangan dunia, nilai-nilai, dan kepentingan mereka diterima oleh kelas-kelas yang didominasi sebagai universal, natural, dan masuk akal. Hegemoni adalah proses di mana kepentingan khusus kelas dominan dipresentasikan dan diterima sebagai kepentingan umum masyarakat secara keseluruhan.

> "Gramsci mengembangkan konsep hegemoni sebagai dominasi melalui kepemimpinan intelektual-moral yang menghasilkan konsensus via masyarakat sipil, mengatasi determinisme ekonomi Marxisme ortodoks dengan menekankan transformasi sosial memerlukan perubahan kesadaran dan budaya."

Gramsci membedakan antara dua aspek kekuasaan negara: "masyarakat politik" dan "masyarakat sipil". Masyarakat politik terdiri dari aparatus koersif negara—polisi, militer, sistem hukum—yang mempertahankan dominasi melalui kekerasan atau ancaman kekerasan. Masyarakat sipil terdiri dari

institusi-institusi seperti sekolah, gereja, media, organisasi budaya, dan partai politik—yang mempertahankan dominasi melalui pembentukan konsensus dan pembuatan makna. Hegemoni beroperasi terutama melalui masyarakat sipil, meskipun selalu didukung oleh kemungkinan koersi (Gramsci, 1971).

Konsep hegemoni Gramsci mengatasi determinisme ekonomi Marxisme ortodoks yang memandang ideologi dan budaya sebagai sekadar refleksi dari basis ekonomi. Bagi Gramsci, ideologi dan budaya memiliki otonomi relatif dan efektivitas kausal sendiri. Perjuangan untuk hegemoni adalah perjuangan atas makna, identitas, dan akal sehat, bukan hanya perjuangan ekonomi. Transformasi sosial yang fundamental memerlukan tidak hanya perubahan dalam relasi produksi, tetapi juga perubahan dalam kesadaran, budaya, dan akal sehat.

Perang Posisi dan Intelektual Organik

Gramsci mengembangkan strategi "perang posisi" sebagai alternatif terhadap "perang manuver". Perang manuver adalah strategi revolusioner frontal yang berusaha merebut kekuasaan negara melalui insureksi langsung—strategi yang berhasil dalam Revolusi Rusia 1917 di mana masyarakat sipil relatif lemah. Namun, di negara-negara kapitalis maju dengan masyarakat sipil yang kuat dan kompleks, strategi perang manuver cenderung gagal.

Perang posisi adalah strategi jangka panjang yang berusaha membangun hegemoni tandingan melalui perjuangan ideologis dan kultural sebelum merebut kekuasaan negara. Ini melibatkan pembentukan aliansi sosial yang luas, penetrasi institusi-institusi masyarakat sipil, dan penciptaan kesadaran kritis di antara kelas-kelas yang didominasi. Perang posisi adalah perjuangan bertahap untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat, membangun blok historis baru yang dapat menantang hegemoni kelas dominan.

Kunci dari perang posisi adalah peran "intelektual organik"—individu yang mengorganisir dan memimpin perjuangan ideologis dan politik. Berbeda dengan "intelektual tradisional" yang mengklaim otonomi dari kelas dan kepentingan politik, intelektual organik secara sadar terhubung dengan kelas atau kelompok sosial tertentu dan berfungsi untuk mengartikulasikan kepentingan, pandangan dunia, dan strategi mereka. Setiap kelas yang berusaha meraih hegemoni harus menghasilkan intelektualnya sendiri yang mampu memberikan kepemimpinan intelektual dan moral (Gramsci, 1971).

Dalam konteks Indonesia, konsep hegemoni Gramsci sangat berguna untuk menganalisis bagaimana dominasi kelas dipertahankan tidak hanya melalui represi, tetapi juga melalui konstruksi konsensus ideologis. Selama era Orde Baru, hegemoni rezim Soeharto dipertahankan melalui kombinasi koersi dan konsensus: represi terhadap oposisi politik disertai dengan konstruksi ideologi "pembangunanisme" yang melegitimasi dominasi negara dan ketimpangan ekonomi sebagai harga yang diperlukan untuk stabilitas dan pertumbuhan. Konsep intelektual organik juga relevan untuk memahami peran intelektual, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil dalam membangun gerakan tandingan untuk keadilan sosial dan demokratisasi.

10.5 Ralf Dahrendorf dan Teori Konflik Struktural

Melampaui Determinisme Ekonomi Marxis

Ralf Dahrendorf (1929-2009), sosiolog Jerman yang bekerja di Inggris, mengembangkan teori konflik yang melampaui reduksionisme ekonomi Marxisme klasik sambil mempertahankan fokus pada konflik sebagai karakteristik fundamental kehidupan sosial. Dalam *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Dahrendorf mengargumentasikan bahwa konflik kelas dalam masyarakat industrial kontemporer tidak lagi terutama berasal dari kepemilikan alat-alat produksi, tetapi dari distribusi otoritas dalam asosiasi-asosiasi yang terkoordinasi secara imperatif (Dahrendorf, 1959).

Dahrendorf mengkritik beberapa asumsi Marxisme klasik yang telah dibantah oleh perkembangan historis kapitalisme abad ke-20. Pertama, Marx memprediksi polarisasi kelas yang semakin tajam antara borjuasi dan proletariat, tetapi kenyataannya terjadi diferensiasi internal dalam kedua kelas dan munculnya kelas menengah baru. Kedua, Marx memprediksi pemiskinan absolut proletariat, tetapi standar hidup pekerja di negara-negara kapitalis maju meningkat secara signifikan. Ketiga, Marx memprediksi revolusi proletariat, tetapi revolusi sosialis terjadi di negara-negara agraris terbelakang, bukan di negara-negara kapitalis maju (Dahrendorf, 1959).

Perubahan fundamental dalam struktur kapitalisme mencakup: separasi kepemilikan dan kontrol dalam korporasi besar, di mana manajer profesional mengendalikan perusahaan tanpa memilikinya; institusionalisasi konflik kelas melalui serikat buruh, collective bargaining, dan welfare state; dan peningkatan mobilitas sosial yang mengurangi kepadatan kelas sebagai kelompok sosial yang koheren. Perubahan-perubahan ini memerlukan revisi fundamental terhadap teori kelas Marxis.

Konflik Otoritas dan Kelompok Kuasi-Kelas

Dahrendorf mengusulkan bahwa sumber konflik sosial yang fundamental dalam masyarakat industrial adalah distribusi otoritas, bukan kepemilikan alat-alat produksi. Setiap asosiasi yang terkoordinasi secara imperatif—perusahaan, partai politik, gereja, universitas—memiliki struktur otoritas di mana beberapa orang memiliki hak untuk memberikan perintah dan yang lain memiliki kewajiban untuk mematuhi. Distribusi otoritas yang tidak merata ini menghasilkan kepentingan yang bertentangan antara mereka yang memiliki otoritas dan mereka yang tunduk pada otoritas.

Dari kepentingan yang bertentangan ini muncul "kelompok kuasi-kelas"—kelompok yang memiliki kepentingan laten yang sama berdasarkan posisi mereka dalam struktur otoritas. Kelompok kuasi-kelas berbeda dari kelas Marxian karena tidak didefinisikan oleh kepemilikan alat-alat produksi, tetapi oleh posisi dalam hubungan otoritas. Dalam kondisi tertentu, kelompok kuasi-kelas dapat menjadi kelompok kepentingan yang terorganisir yang secara aktif memperjuangkan kepentingan mereka dan berusaha mengubah struktur otoritas (Dahrendorf, 1959).

Dahrendorf mengidentifikasi beberapa kondisi yang mempengaruhi apakah kelompok kuasi-kelas akan menjadi kelompok kepentingan yang terorganisir: kondisi teknis seperti kemampuan berkomunikasi dan berorganisasi; kondisi politik seperti kebebasan berserikat; dan kondisi sosial seperti mobilitas sosial dan pola perekrutan. Intensitas dan kekerasan konflik kelas juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti mobilitas sosial, distribusi reward dan privilege, dan regulasi konflik melalui institusi-institusi seperti arbitrase dan negosiasi kolektif.

Institusionalisasi Konflik dan Perubahan Sosial

Berbeda dengan Marx yang melihat konflik kelas sebagai kontradiksi yang harus diselesaikan melalui revolusi, Dahrendorf mengargumentasikan bahwa konflik adalah fitur permanen dan fungsional dari masyarakat modern. Konflik tidak harus dieliminasi, tetapi dapat diregulasi dan diinstitusionalisasi melalui prosedur-prosedur yang memungkinkan ekspresi dan negosiasi kepentingan yang bertentangan tanpa menghasilkan kekerasan atau disintegrasi sosial.

Institusionalisasi konflik melalui serikat buruh, collective bargaining, sistem hukum ketenagakerjaan, dan welfare state telah mengubah karakter konflik kelas di negara-negara kapitalis maju. Konflik menjadi lebih tersegmentasi, terlokalisasi pada isu-isu spesifik, dan kurang intens secara ideologis. Ini tidak berarti konflik telah hilang, tetapi ia telah berubah bentuk dan telah diintegrasikan ke dalam mekanisme-mekanisme institusional untuk penyelesaian sengketa.

Dahrendorf juga mengembangkan teori perubahan sosial yang melihat konflik sebagai motor utama perubahan. Setiap distribusi otoritas mengandung benih konflik yang dapat menghasilkan perubahan struktural. Namun, perubahan tidak selalu revolusioner; ia dapat gradual dan inkremental melalui reformasi institusional. Kecepatan dan radikalitas perubahan bergantung pada intensitas konflik, tingkat organisasi kelompok kepentingan, dan kemampuan sistem untuk mengakomodasi tuntutan perubahan.

Dalam konteks Indonesia, analisis Dahrendorf tentang konflik otoritas sangat relevan untuk memahami berbagai bentuk konflik sosial yang tidak semata-mata berakar pada kepemilikan ekonomi. Konflik antara pusat dan daerah, antara birokrat dan warga, antara manajemen perusahaan dan pekerja, atau antara pejabat negara dan masyarakat sipil dapat dipahami sebagai konflik otoritas. Konsep institusionalisasi konflik juga penting untuk memahami bagaimana mekanisme seperti pemilihan umum, sistem hukum, dan organisasi masyarakat sipil berfungsi untuk mengatur konflik dan memfasilitasi perubahan sosial tanpa kekerasan.

10.6 Relevansi Teori Konflik dalam Konteks Indonesia Kontemporer

Struktur Kekuasaan dan Oligarki

Teori konflik dan neo-Marxisme memberikan alat analitis yang kuat untuk memahami struktur kekuasaan dalam Indonesia kontemporer. Meskipun Indonesia telah mengalami demokratisasi sejak 1998, analisis kritis menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi dan politik tetap terkonsentrasi dalam tangan sekelompok kecil oligarki yang menguasai sumber daya ekonomi utama dan memiliki akses istimewa terhadap proses politik.

Konsep Mills tentang elit kekuasaan dapat diterapkan untuk menganalisis bagaimana elit bisnis, elit politik, dan elit birokrasi di Indonesia saling terkait melalui jaringan patron-klien, aliansi strategis, dan rotasi personel antar sektor. Banyak politisi memiliki kepentingan bisnis yang signifikan, sementara

konglomerat bisnis memiliki akses langsung ke pembuat kebijakan melalui kontribusi kampanye, lobi, dan korupsi. Struktur oligarkis ini mempengaruhi kebijakan publik untuk melayani kepentingan elit daripada kepentingan rakyat banyak.

Analisis Gramscian tentang hegemoni berguna untuk memahami bagaimana dominasi oligarki dipertahankan tidak hanya melalui kontrol ekonomi dan politik, tetapi juga melalui konstruksi konsensus ideologis. Media massa yang dikontrol oleh konglomerat bisnis, sistem pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai kapitalis, dan wacana publik yang mendominasi cenderung menaturalisasi ketimpangan dan melegitimasi akumulasi kekayaan oleh elit sebagai hasil dari kerja keras dan kewirausahaan, sambil mengabaikan peran korupsi, monopoli, dan akses istimewa terhadap sumber daya negara.

Konflik Sosial dan Gerakan Perlawanan

Indonesia mengalami berbagai bentuk konflik sosial yang dapat dianalisis menggunakan kerangka teori konflik: konflik agraria antara korporasi dan komunitas lokal, konflik ketenagakerjaan antara pekerja dan manajemen, konflik lingkungan antara perusahaan ekstraktif dan masyarakat yang terdampak, serta konflik identitas berbasis etnis, agama, atau regional. Teori konflik membantu memahami konflik-konflik ini bukan sebagai penyimpangan atau disfungsi, tetapi sebagai ekspresi dari kontradiksi struktural dan ketimpangan kekuasaan yang sistemik.

> "Konflik sosial Indonesia—agraria, ketenagakerjaan, lingkungan, identitas—dapat dianalisis sebagai ekspresi kontradiksi struktural dan ketimpangan kekuasaan sistemik, bukan penyimpangan. Gerakan sosial membangun hegemoni tandingan menantang dominasi oligarki melalui perang posisi Gramscian. Konsep kolonisasi dunia kehidupan Habermas menjelaskan erosi solidaritas akibat penetrasi logika pasar-birokrasi, mendorong resistensi melalui ruang komunal dan ekonomi solidaritas berbasis prinsip non-pasar."

Gerakan sosial untuk keadilan—gerakan buruh, gerakan tani, gerakan lingkungan, gerakan anti-korupsi, gerakan feminis—dapat dipahami sebagai

upaya untuk membangun hegemoni tandingan dan menantang dominasi oligarki. Konsep Gramsci tentang perang posisi dan intelektual organik relevan untuk memahami strategi gerakan sosial yang berusaha mengubah kesadaran publik, membangun solidaritas lintas sektor, dan menciptakan alternatif terhadap tatanan yang ada.

Konsep Habermas tentang kolonisasi dunia kehidupan berguna untuk menganalisis bagaimana logika pasar dan birokrasi semakin meresapi aspek-aspek kehidupan yang sebelumnya diatur oleh norma-norma komunal dan solidaritas sosial. Komersialisasi pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya, serta birokratisasi interaksi sosial, menghasilkan erosi solidaritas dan fragmentasi masyarakat. Resistensi terhadap tren ini dapat dilihat dalam berbagai upaya untuk mempertahankan ruang-ruang komunal, ekonomi solidaritas, dan bentuk-bentuk organisasi sosial yang berbasis pada prinsip-prinsip non-pasar.

Media, Ruang Publik, dan Demokrasi

Transformasi media di Indonesia—dari dominasi media cetak dan televisi ke proliferasi media digital dan media sosial—memiliki implikasi mendalam untuk karakter ruang publik dan kualitas demokrasi. Konsep Habermas tentang ruang publik menawarkan kerangka normatif untuk mengevaluasi transformasi ini. Media sosial telah menciptakan kemungkinan baru untuk partisipasi warga dalam diskursus publik, melewati kontrol oligarki media tradisional. Namun, media sosial juga menghasilkan masalah baru: fragmentasi ruang publik menjadi ruang-ruang gema yang terpolarisasi, penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian, serta manipulasi opini publik melalui pasukan siber dan bot.

Analisis industri budaya dari Mazhab Frankfurt dapat diterapkan untuk memahami bagaimana media Indonesia, baik tradisional maupun digital, sering berfungsi untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu struktural melalui hiburan yang menghibur tetapi tidak menantang, sensasionalisme yang mendangkalkan diskusi publik, dan konstruksi spektakel yang mengaburkan realitas ketimpangan dan eksploitasi. Program-program realitas, infotainment selebriti, dan konten viral di media sosial dapat dianalisis sebagai bentuk kontemporer dari industri budaya yang menghasilkan konformitas dan pasivitas politik.

Namun, media juga dapat berfungsi sebagai alat emansipasi dan mobilisasi. Media alternatif, jurnalisme investigatif independen, dan penggunaan kreatif

media sosial oleh aktivis menunjukkan potensi media untuk memfasilitasi kritik sosial dan mobilisasi gerakan. Perjuangan atas karakter media dan ruang publik adalah bagian integral dari perjuangan yang lebih luas untuk demokrasi yang substantif dan keadilan sosial.

10.7 Warisan dan Kritik terhadap Teori Konflik

Teori konflik dan neo-Marxisme telah memberikan kontribusi fundamental terhadap pemahaman tentang kekuasaan, ketimpangan, dan perubahan sosial. Mereka menantang asumsi konsensus dan keseimbangan yang dominan dalam fungsionalisme, mengungkap mekanisme dominasi dan eksploitasi yang tersembunyi, dan memberikan alat untuk kritik sosial yang radikal. Penekanan pada struktur, kekuasaan, dan konflik menawarkan perspektif yang esensial untuk menganalisis ketidakadilan dan memikirkan transformasi sosial.

Namun, teori konflik juga menghadapi berbagai kritik. Beberapa kritikus mengargumentasikan bahwa teori konflik terlalu menekankan konflik dan mengabaikan konsensus dan integrasi yang juga merupakan aspek penting dari kehidupan sosial. Masyarakat tidak dapat berfungsi tanpa tingkat konsensus minimal tentang norma dan nilai. Kritik lain adalah bahwa beberapa versi teori konflik, terutama Marxisme ortodoks, bersifat deterministik dan mengabaikan kapasitas manusia untuk bertindak dan membuat pilihan. Penekanan pada struktur ekonomi juga dikritik sebagai reduksionis, mengabaikan otonomi relatif dari dimensi politik, budaya, dan psikologis kehidupan sosial.

Teori konflik kontemporer telah merespons kritik-kritik ini dengan mengembangkan analisis yang lebih nuansa dan multi-dimensi. Neo-Marxisme mengakui kompleksitas kapitalisme kontemporer dan peran ideologi, budaya, dan negara dalam mempertahankan dominasi. Teori kritis Mazhab Frankfurt mengintegrasikan analisis ekonomi dengan analisis budaya dan psikologis. Habermas mengembangkan teori komunikatif yang melampaui determinisme ekonomi sambil mempertahankan komitmen kritis terhadap emansipasi.

Dalam konteks global kontemporer yang ditandai oleh ketimpangan ekonomi yang semakin tajam, krisis ekologis, kebangkitan otoritarianisme, dan tantangan terhadap demokrasi liberal, teori konflik dan neo-Marxisme tetap relevan dan vital. Mereka memberikan alat untuk menganalisis struktur kekuasaan global, memahami akar struktural dari berbagai krisis

kontemporer, dan membayangkan alternatif terhadap tatanan yang ada. Untuk Indonesia, perspektif ini esensial untuk menganalisis tantangan pembangunan yang inklusif, demokratisasi yang substantif, dan keadilan sosial dalam konteks kapitalisme global yang timpang.

Referensi Bab 10

Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (1944). The culture industry: Enlightenment as mass deception. Available: https://www.marxists.org/reference/archive/adorno/1944/culture-industry.htm

Dahrendorf, R. (1959). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford University Press. Available: https://archive.org/details/classclassconfli00dahr

Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks* (Q. Hoare & G. N. Smith, Eds. & Trans.). International Publishers. Available: https://archive.org/details/AntonioGramsciSelectionsFromThePrisonNotebooks

Habermas, J. (1962). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society* (T. Burger & F. Lawrence, Trans.). MIT Press. Available: https://archive.org/details/structuraltransf00habe

Habermas, J. (1981). *The theory of communicative action, Volume 1: Reason and the rationalization of society* (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press. Available: https://archive.org/details/theoryofcommunic01habe

Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (1947). *Dialectic of enlightenment: Philosophical fragments* (E. Jephcott, Trans.). Stanford University Press. Available: https://archive.org/details/DialecticOfEnlightenmentTheodorW.AdornoMaxHorkheimer

Jurnal Analisa Sosiologi - Universitas Sebelas Maret - https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/3659

Marcuse, H. (1964). *One-dimensional man: Studies in the ideology of advanced industrial society*. Beacon Press. Available: https://archive.org/details/onedimensionman00marc

Masyarakat: Jurnal Sosiologi - Universitas Indonesia -. https://scholarhub.ui.ac.id/mjs/

Mills, C. W. (1956). *The power elite*. Oxford University Press. Available: https://archive.org/details/powerelite00mill

Mills, C. W. (1959). *The sociological imagination*. Oxford University Press. Available: https://archive.org/details/sociologicalimag0000cwri_i5t4

Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan - Universitas Muhammadiyah Makassar. https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/20

Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2023). Critical theory. Available: https://plato.stanford.edu/entries/critical-theory/

Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2023). Jürgen Habermas. Available: https://plato.stanford.edu/entries/habermas/

BAB 11

STRUKTURALISME HINGGA STRUKTURASI

Pendahuluan

Strukturalisme dan teori strukturasi merepresentasikan perkembangan teoretis yang sangat penting dalam ilmu sosial abad ke-20, menawarkan perspektif yang berbeda tentang hubungan antara struktur sosial dan tindakan manusia. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang cenderung memprioritaskan salah satu kutub—baik struktur objektif atau tindakan subjektif—tradisi ini berusaha mengembangkan kerangka teoretis yang lebih kompleks dan bernuansa untuk memahami bagaimana struktur dan agensi saling membentuk dalam proses sosial.

Bab ini mengeksplorasi dua tradisi besar yang saling terkait namun memiliki penekanan berbeda. Pertama, strukturalisme dan post-strukturalisme yang berkembang terutama di Perancis pada pertengahan abad ke-20. Claude Lévi-Strauss mengembangkan strukturalisme antropologi yang berfokus pada struktur-struktur dalam yang mendasari fenomena sosial dan budaya. Michel Foucault memperluas analisis strukturalis untuk mengkaji relasi antara kekuasaan, pengetahuan, dan subjektivitas. Pierre Bourdieu mengintegrasikan analisis struktural dengan teori praktik melalui konsep habitus, modal, dan arena. Louis Althusser mengembangkan interpretasi strukturalis terhadap Marxisme yang menekankan determinasi struktural sambil mengakui otonomi relatif dari berbagai tingkat praktik sosial. Jacques Derrida mengembangkan dekonstruksi sebagai metode untuk mengungkap ketidakstabilan dan ambiguitas yang inheren dalam struktur-struktur bahasa dan pemikiran.

Kedua, teori strukturasi dan upaya sintesis mikro-makro yang berusaha melampaui oposisi tradisional antara struktur dan agensi. Anthony Giddens mengembangkan teori strukturasi dengan konsep dualitas struktur, di mana struktur adalah sekaligus medium dan hasil dari praktik sosial. James Coleman mengembangkan teori pilihan rasional yang menghubungkan tindakan individual dengan hasil kolektif. Jeffrey Alexander merevitalisasi fungsionalisme melalui neo-fungsionalisme yang lebih sensitif terhadap konflik dan perubahan. Randall Collins mengembangkan sosiologi interaksi yang menghubungkan ritual mikro dengan struktur makro. George Ritzer

menganalisis proses rasionalisasi kontemporer melalui konsep McDonaldisasi.

Dalam konteks Indonesia, perspektif strukturalis dan teori strukturasi memberikan alat untuk menganalisis bagaimana struktur-struktur budaya, ekonomi, dan politik membentuk tindakan sosial, sambil mempertahankan ruang untuk memahami kapasitas agen untuk reproduksi dan transformasi struktur. Pendekatan-pendekatan ini sangat relevan untuk memahami dinamika masyarakat Indonesia yang ditandai oleh keragaman budaya, perubahan ekonomi yang cepat, dan transformasi politik yang berkelanjutan.

11.1 Strukturalisme dan Post-Strukturalisme

Claude Lévi-Strauss dan Strukturalisme Antropologi

Claude Lévi-Strauss (1908-2009) mengembangkan strukturalisme antropologi sebagai pendekatan teoretis dan metodologis yang revolusioner untuk memahami budaya dan masyarakat. Terinspirasi oleh linguistik struktural Ferdinand de Saussure dan Roman Jakobson, Lévi-Strauss berargumen bahwa fenomena budaya harus dipahami bukan sebagai entitas yang terisolasi, tetapi sebagai bagian dari sistem relasi yang lebih luas (Lévi-Strauss, 1963). Strukturalisme antropologi berfokus pada mengungkap struktur-struktur dalam yang universal yang mendasari variasi permukaan budaya yang beragam.

Dalam karya *Structural Anthropology* (Antropologi Struktural), Lévi-Strauss mengembangkan metode analisis struktural yang mencari pola-pola oposisi biner yang mengorganisir pemikiran dan praktik budaya (Lévi-Strauss, 1963). Oposisi-oposisi seperti alam versus budaya, mentah versus matang, atau hidup versus mati berfungsi sebagai struktur fundamental yang mengorganisir klasifikasi simbolik dalam berbagai masyarakat. Analisis struktural tidak tertarik pada makna substantif dari elemen-elemen individual, tetapi pada relasi oposisi dan transformasi yang menghubungkan elemen-elemen tersebut dalam sistem yang koheren.

Studi Lévi-Strauss tentang sistem kekerabatan menunjukkan bagaimana aturan-aturan perkawinan dan pertukaran dapat dipahami sebagai sistem komunikasi yang mengikuti logika struktural. Dalam *The Elementary Structures of Kinship* (Struktur-Struktur Dasar Kekerabatan), ia menganalisis bagaimana larangan inses dan aturan eksogami (perkawinan di luar kelompok) menciptakan sistem pertukaran yang mengikat kelompok-kelompok sosial dalam jaringan aliansi. Pertukaran perempuan antara

kelompok-kelompok laki-laki berfungsi sebagai mekanisme komunikasi yang fundamental yang menciptakan solidaritas sosial dan reproduksi struktur sosial.

Analisis Lévi-Strauss tentang mitos menunjukkan bahwa narasi-narasi yang tampaknya sangat berbeda dari berbagai masyarakat sebenarnya merupakan transformasi dari struktur-struktur mitologis yang sama. Mitos berfungsi untuk mengatasi kontradiksi-kontradiksi fundamental dalam pengalaman manusia—antara kehidupan dan kematian, alam dan budaya, individu dan masyarakat—melalui mediasi simbolik. Analisis struktural mengungkap bagaimana berbagai versi mitos merepresentasikan solusi-solusi yang berbeda terhadap masalah-masalah logis yang sama.

Dalam konteks Indonesia, strukturalisme Lévi-Strauss dapat diterapkan untuk menganalisis sistem-sistem simbolik yang mengorganisir pemikiran dan praktik budaya. Analisis tentang sistem kekerabatan bilateral di Jawa, sistem matrilineal (garis keturunan ibu) di Minangkabau, atau sistem patrilineal (garis keturunan ayah) di Batak dapat menggunakan metode struktural untuk mengungkap logika pertukaran dan aliansi yang mendasari variasi-variasi permukaan. Studi tentang mitos dan narasi dalam berbagai tradisi budaya Indonesia dapat menggunakan analisis struktural untuk mengidentifikasi struktur-struktur mitologis yang berulang dan transformasi-transformasi mereka. Misalnya, analisis tentang mitos Nyi Roro Kidul, Sangkuriang, atau narasi penciptaan dalam berbagai tradisi lokal dapat mengungkap bagaimana mitos-mitos ini mengatasi kontradiksi fundamental antara alam dan budaya, kekuasaan dan moralitas, atau individu dan kolektif.

Michel Foucault: Kekuasaan, Pengetahuan, dan Subjektivitas

Michel Foucault (1926-1984) mengembangkan analisis yang radikal tentang relasi antara kekuasaan, pengetahuan, dan subjektivitas yang memiliki pengaruh mendalam terhadap ilmu sosial kontemporer. Berbeda dengan konsepsi tradisional yang melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu atau institusi tertentu, Foucault memahami kekuasaan sebagai relasi yang tersebar di seluruh jaringan sosial dan yang produktif dalam membentuk subjek dan realitas sosial (Foucault, 1977).

Dalam *Discipline and Punish* (Disiplin dan Hukuman), Foucault menganalisis transformasi dalam mekanisme hukuman dari eksekusi publik yang brutal pada era pra-modern menuju disiplin yang tersistematis dalam penjara modern (Foucault, 1977). Pergeseran ini bukan sekadar humanisasi

hukuman, tetapi transformasi fundamental dalam teknologi kekuasaan—dari kekuasaan yang beroperasi melalui tontonan kekerasan terhadap tubuh menuju kekuasaan yang beroperasi melalui normalisasi dan pengawasan yang terus-menerus terhadap individu.

Konsep *panopticon* (penjara ideal dengan menara pengawas sentral), yang diadopsi Foucault dari Jeremy Bentham, menjadi metafora untuk mekanisme kekuasaan disipliner modern. Panoptikon adalah desain penjara di mana seorang pengawas dapat mengamati semua tahanan tanpa mereka tahu kapan mereka sedang diawasi. Efek dari arsitektur ini adalah internalisasi pengawasan—tahanan mengatur perilaku mereka sendiri karena kemungkinan konstan untuk diamati. Foucault berargumen bahwa prinsip panoptik telah menyebar ke berbagai institusi modern: sekolah, rumah sakit, pabrik, barak militer—menciptakan masyarakat disipliner di mana individu terus-menerus diawasi, dinilai, dan dinormalisasi.

Foucault juga mengembangkan konsep *biopolitics* (politik kehidupan) untuk menganalisis bagaimana kekuasaan modern beroperasi pada tingkat populasi, mengatur kehidupan biologis melalui statistik, kesehatan publik, dan manajemen populasi. Biopolitik mengubah tubuh individual dan populasi menjadi objek regulasi politik, menciptakan bentuk-bentuk baru kontrol yang beroperasi melalui optimalisasi kehidupan daripada ancaman kematian.

Analisis Foucault tentang relasi antara kekuasaan dan pengetahuan menunjukkan bahwa pengetahuan tidak netral atau objektif, tetapi selalu terkait dengan konfigurasi kekuasaan tertentu. Wacana ilmiah tentang kegilaan, seksualitas, atau kriminalitas bukan sekadar representasi objek-objek yang sudah ada, tetapi praktik-praktik yang mengkonstitusi objek-objek tersebut dan subjek-subjek yang berkaitan dengannya. Praktik-praktik wacana ini menciptakan kategori-kategori, norma-norma, dan mode subjektivitas yang membentuk bagaimana individu memahami diri mereka sendiri dan orang lain.

Dalam konteks Indonesia, analisis Foucauldian sangat berguna untuk memahami mekanisme kekuasaan yang beroperasi melalui berbagai institusi disipliner. Analisis tentang bagaimana sekolah, rumah sakit jiwa, atau lembaga pemasyarakatan di Indonesia berfungsi sebagai teknologi normalisasi dapat mengungkap mekanisme-mekanisme kekuasaan yang halus tetapi tersebar luas. Misalnya, program bimbingan konseling di sekolah, prosedur diagnosis dan terapi di rumah sakit jiwa, atau program pembinaan di lembaga pemasyarakatan dapat dianalisis sebagai mekanisme yang tidak hanya menghukum atau menyembuhkan, tetapi juga membentuk

subjektivitas yang patuh dan produktif. Studi tentang biopolitik dapat diterapkan untuk menganalisis program-program kesehatan reproduksi seperti Keluarga Berencana, manajemen populasi melalui sensus dan sistem administrasi kependudukan, atau kebijakan kesehatan publik yang mengatur kehidupan biologis warga negara.

Pierre Bourdieu: Habitus, Modal, dan Arena

Pierre Bourdieu (1930-2002) mengembangkan teori praktik yang berusaha melampaui oposisi antara subjektivisme dan objektivisme, antara struktur dan agensi, melalui konsep-konsep seperti habitus, modal, dan arena. Pendekatan Bourdieu mengintegrasikan analisis struktural dengan perhatian terhadap praktik dan strategi agen dalam reproduksi dan transformasi struktur sosial.

Habitus adalah konsep sentral dalam teori Bourdieu, merujuk pada sistem disposisi yang terstruktur dan menstrukturkan yang diperoleh melalui sosialisasi dalam kondisi sosial tertentu (Bourdieu, 1977). Habitus adalah skema persepsi, apresiasi, dan tindakan yang terinternalisasi yang memungkinkan individu menghasilkan praktik-praktik yang teratur tanpa secara eksplisit mematuhi aturan atau secara sadar menghitung strategi. Habitus adalah produk dari kondisi objektif, tetapi juga produktif dalam menghasilkan praktik yang beradaptasi dengan kondisi tersebut.

Habitus berfungsi sebagai mediasi antara struktur objektif dan praktik subjektif. Ia adalah struktur yang terstruktur karena dibentuk oleh kondisi sosial eksternal, dan struktur yang menstrukturkan karena membentuk cara individu mempersepsikan, menilai, dan bertindak dalam dunia sosial. Melalui habitus, struktur sosial terinternalisasi dalam disposisi individual, dan disposisi individual terekspresikan dalam praktik yang mereproduksi struktur sosial.

Bourdieu mengembangkan konsep modal untuk menganalisis sumber daya yang dapat diakumulasi dan digunakan dalam pertarungan sosial. Modal ekonomi adalah sumber daya material dan finansial. Modal budaya adalah pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dan kompetensi budaya yang dapat dikonversi menjadi keuntungan dalam arena tertentu. Modal sosial adalah jaringan relasi dan koneksi yang dapat dimobilisasi untuk keuntungan. Modal simbolik adalah prestise, kehormatan, dan pengakuan yang diperoleh dari kepemilikan modal-modal lain (Bourdieu, 1986).

Konsep arena merujuk pada ruang-ruang sosial yang relatif otonom di mana agen berjuang untuk posisi dan sumber daya yang berharga. Setiap arena—seni, akademik, politik, ekonomi—memiliki logika praktik yang spesifik, bentuk modal yang relevan, dan struktur posisi yang berbeda. Agen dalam arena tidak selalu sadar akan strategi mereka, tetapi bertindak berdasarkan *sense of the game* (perasaan intuitif tentang permainan) yang diperoleh melalui habitus yang sesuai dengan arena tersebut.

Dalam konteks Indonesia, konsep-konsep Bourdieu sangat berguna untuk menganalisis reproduksi ketimpangan sosial melalui transmisi modal budaya dan sosial. Analisis tentang bagaimana keluarga elit mentransmisikan keuntungan mereka kepada generasi berikutnya melalui akses ke pendidikan berkualitas, jaringan sosial, dan kompetensi budaya dapat menggunakan kerangka Bourdieusian. Misalnya, anak-anak dari keluarga kelas menengah atas Jakarta yang bersekolah di sekolah internasional tidak hanya memperoleh modal ekonomi melalui warisan, tetapi juga modal budaya melalui pendidikan berkualitas, kemampuan berbahasa asing, dan pemahaman tentang etika kelas menengah global. Mereka juga mengakumulasi modal sosial melalui jaringan pertemanan dengan anak-anak elit lain yang dapat dimobilisasi untuk peluang kerja atau bisnis di masa depan. Studi tentang berbagai arena—politik, bisnis, akademik, seni—dapat mengungkap logika spesifik pertarungan untuk posisi dominan dan mekanisme eksklusi yang mempertahankan hierarki sosial.

Louis Althusser dan Strukturalisme Marxis

Louis Althusser (1918-1990) mengembangkan interpretasi strukturalis terhadap Marxisme yang berusaha mengatasi humanisme dan historisisme yang ia lihat sebagai distorsi terhadap proyek ilmiah Marx. Althusser berargumen bahwa karya matang Marx merepresentasikan pemutusan epistemologis (pemutusan dalam cara berpikir) dari filosofi humanis menuju sains materialisme historis yang menganalisis mode produksi sebagai struktur yang kompleks (Althusser, 1965).

Dalam "Ideology and Ideological State Apparatuses" (Ideologi dan Aparatus Ideologis Negara), Althusser mengembangkan analisis tentang bagaimana negara kapitalis mereproduksi kondisi produksi tidak hanya melalui aparatus represif seperti polisi dan militer, tetapi juga melalui aparatus ideologis seperti sekolah, gereja, media, dan keluarga (Althusser, 1970). Aparatus ideologis negara berfungsi dengan cara yang lebih halus tetapi sama

efektifnya dalam mereproduksi relasi produksi kapitalis melalui internalisasi ideologi dominan.

Althusser mengembangkan konsep *interpellation* (panggilan ideologis) untuk menjelaskan bagaimana individu dikonstitusi sebagai subjek melalui ideologi. Ideologi memanggil atau menyapa individu sebagai subjek, dan dalam proses pengakuan terhadap panggilan tersebut, individu menjadi subjek yang tunduk pada struktur ideologis. Proses ini tidak sepenuhnya sadar—individu mengalami diri mereka sebagai agen bebas yang membuat pilihan, padahal subjektivitas mereka sendiri adalah produk dari interpelasi ideologis.

Konsep Althusser tentang determinasi struktural dalam instansi terakhir oleh ekonomi sambil mengakui otonomi relatif dari tingkat-tingkat lain—politik, ideologi, budaya—menawarkan model yang lebih bernuansa tentang kausalitas sosial daripada determinisme ekonomi vulgar. Berbagai tingkat praktik sosial memiliki efektivitas kausal sendiri dan tidak dapat direduksi menjadi sekadar refleksi dari basis ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, analisis Althusserian dapat diterapkan untuk memahami bagaimana aparatus ideologis negara—sistem pendidikan, media massa, organisasi keagamaan—berfungsi untuk mereproduksi relasi sosial dominan. Analisis tentang bagaimana kurikulum pendidikan nasional, wacana media tentang pembangunan dan modernisasi, atau dakwah keagamaan menginterpelasi warga negara Indonesia sebagai subjek tertentu dapat mengungkap mekanisme reproduksi ideologis yang mendukung struktur kekuasaan yang ada. Misalnya, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan nilai-nilai nasional, tetapi juga menginterpelasi siswa sebagai warga negara yang taat, patriotik, dan mendukung sistem politik yang ada. Media massa yang mengampanyekan gaya hidup konsumeris menginterpelasi warga sebagai konsumen yang aktif, mendukung reproduksi relasi produksi kapitalis.

Jacques Derrida dan Dekonstruksi

Jacques Derrida (1930-2004) mengembangkan dekonstruksi sebagai strategi membaca dan analisis yang mengungkap ketidakstabilan dan ambiguitas yang inheren dalam teks dan struktur pemikiran Barat. Dekonstruksi bukan metode yang dapat diterapkan secara mekanis, tetapi praktik membaca yang cermat yang menunjukkan bagaimana teks mengandung kontradiksi internal yang mengganggu koherensi dan kesatuan yang tampak (Derrida, 1976).

Dalam *Of Grammatology* (Tentang Gramatologi), Derrida mengkritik logosentrisme—privileging atau pengistimewaan kehadiran, suara, dan kesadaran atas ketidakhadiran, tulisan, dan materialitas—yang ia lihat sebagai karakteristik fundamental filosofi Barat (Derrida, 1976). Derrida menunjukkan bahwa oposisi-oposisi biner yang mengorganisir pemikiran Barat—seperti kehadiran/ketidakhadiran, ucapan/tulisan, alam/budaya—tidak pernah murni atau stabil, tetapi selalu sudah terkontaminasi oleh term yang dioposisikan.

Konsep *différance* Derrida—neologisme (kata baru) yang menggabungkan perbedaan dan penangguhan—mengungkap bahwa makna tidak pernah sepenuhnya hadir atau stabil, tetapi selalu ditangguhkan dan tergantung pada jejak dari elemen-elemen lain dalam sistem tanda. Makna adalah efek dari permainan perbedaan dalam sistem tanda, bukan referensi langsung terhadap realitas yang sudah ada.

Dekonstruksi mengungkap bahwa hierarki-hierarki konseptual yang tampaknya alami atau niscaya sebenarnya adalah konstruksi yang rapuh yang dapat dibalik atau diganggu. Dengan menunjukkan ketergantungan term yang diistimewakan pada term yang dimarginalisasi, dekonstruksi membuka kemungkinan untuk pembacaan alternatif dan konfigurasi konseptual yang berbeda.

Dalam konteks Indonesia, strategi dekonstruktif dapat diterapkan untuk menganalisis wacana-wacana yang mengkonstruksi identitas nasional, relasi gender, atau hierarki sosial. Analisis dekonstruktif terhadap narasi-narasi tentang tradisi versus modernitas, Timur versus Barat, atau asli versus asing dapat mengungkap ambiguitas dan kontradiksi yang mengganggu binaritas yang tampaknya jelas ini. Misalnya, wacana tentang "keaslian budaya Indonesia" dapat didekonstruksi dengan menunjukkan bagaimana apa yang dianggap "asli" sebenarnya adalah hasil dari berbagai pengaruh historis dan tidak pernah murni atau stabil. Wacana tentang "modernitas" versus "tradisi" dapat didekonstruksi dengan menunjukkan bagaimana praktik-praktik "modern" sering mengandung elemen "tradisional" dan sebaliknya, sehingga oposisi biner ini tidak dapat dipertahankan secara konsisten.

11.2 Teori Strukturasi dan Sintesis Mikro-Makro

Anthony Giddens dan Teori Strukturasi

Anthony Giddens mengembangkan teori strukturasi sebagai upaya ambisius untuk melampaui dualisme antara struktur dan agensi yang telah

mendominasi teori sosial. Konsep sentral dalam teori Giddens adalah dualitas struktur—ide bahwa struktur dan agensi bukan entitas yang terpisah tetapi dua sisi dari proses yang sama (Giddens, 1984). Struktur adalah sekaligus medium dan hasil dari praktik yang direproduksi secara berulang oleh agen.

Struktur, dalam konsepsi Giddens, terdiri dari aturan dan sumber daya yang dapat diinstansiasi (diwujudkan) dalam praktik sosial. Aturan mencakup aturan konstitutif yang mendefinisikan makna dan aturan regulatif yang mengatur perilaku. Sumber daya terdiri dari sumber daya alokatif seperti kapabilitas material dan sumber daya otoritatif seperti kapabilitas atas orang. Struktur tidak memiliki eksistensi independen dari pengetahuan yang dimiliki agen tentang apa yang mereka lakukan dalam aktivitas sehari-hari mereka (Giddens, 1984).

Strukturasi adalah proses melalui mana praktik sosial membentang melintasi ruang dan waktu dan mengkonstitusi struktur yang secara berulang mengorganisir praktik tersebut. Sistem sosial terdiri dari praktik sosial yang direproduksi, bukan struktur. Struktur hanya ada sebagai jejak memori yang memandu perilaku dan sebagai instansiasi dalam praktik sosial. Ini berarti bahwa struktur adalah sekaligus medium dan hasil dari praktik yang secara berulang mengorganisir.

"Giddens mengembangkan teori strukturasi melampaui dualisme struktur-agensi melalui dualitas struktur: struktur adalah medium sekaligus hasil praktik berulang agen. Di Indonesia, menjelaskan transformasi gotong royong dari praktik komunal tradisional menjadi program pembangunan formal-birokratis."

Agensi dalam teori Giddens didefinisikan sebagai kapasitas untuk membuat perbedaan atau untuk intervensi dalam dunia dengan efek tertentu. Agensi mensyaratkan kekuasaan sebagai kapasitas transformatif. Agen adalah makhluk yang berpengetahuan yang memiliki kesadaran praktis tentang kondisi dan konsekuensi dari tindakan mereka, meskipun banyak dari pengetahuan ini bersifat *tacit* (tidak terucapkan) dan tidak dapat dengan mudah diartikulasikan.

Dimensi temporal dalam teori strukturasi sangat penting. Giddens membedakan antara *durée* sebagai waktu yang reversibel dari pengalaman

sehari-hari, *dasein* sebagai waktu yang ireversibel dari rentang kehidupan, dan *longue durée* sebagai waktu institusional. Reproduksi sosial terjadi melalui integrasi aktivitas melintasi dimensi temporal yang berbeda, dari pertemuan rutin hingga reproduksi institusional melintasi generasi.

Dalam konteks Indonesia, teori strukturasi sangat berguna untuk menganalisis bagaimana praktik budaya tradisional bertahan dan bertransformasi dalam konteks modernisasi. Misalnya, analisis tentang bagaimana gotong royong sebagai praktik tradisional tereproduksi dalam bentuk-bentuk baru seperti program pembangunan berbasis komunitas menunjukkan dualitas struktur di mana aturan budaya dan sumber daya memungkinkan praktik baru sambil ditransformasikan oleh praktik tersebut. Gotong royong yang semula adalah praktik kerja sama komunal untuk membangun rumah atau menggarap sawah kini direproduksi dalam program-program seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Struktur gotong royong—aturan tentang kerja sama dan timbal balik—adalah medium yang memungkinkan program-program pembangunan ini, tetapi juga ditransformasikan menjadi bentuk yang lebih formal dan birokratis.

James Coleman dan Teori Pilihan Rasional

James Coleman (1926-1995) mengembangkan pendekatan yang berusaha menghubungkan tindakan individual pada tingkat mikro dengan hasil kolektif pada tingkat makro melalui kerangka pilihan rasional. Dalam *Foundations of Social Theory* (Fondasi Teori Sosial), Coleman berargumen bahwa fenomena sosial makro harus dijelaskan dengan menunjukkan bagaimana mereka muncul dari tindakan dan interaksi individu yang berorientasi pada tujuan (Coleman, 1990).

Coleman mengembangkan model yang disebutnya diagram bathtub atau perahu untuk menjelaskan hubungan mikro-makro. Kondisi makro mempengaruhi situasi yang dihadapi individu, yang kemudian bertindak berdasarkan kepentingan dan sumber daya mereka, dan tindakan-tindakan individual ini teragregasi untuk menghasilkan hasil makro. Tugas teori sosial adalah menjelaskan setiap langkah dalam proses ini: bagaimana kondisi makro membentuk situasi mikro, bagaimana individu bertindak dalam situasi tersebut, dan bagaimana tindakan-tindakan individual teragregasi menjadi hasil kolektif.

Konsep Coleman tentang modal sosial sebagai sumber daya yang inheren dalam struktur relasi sosial telah menjadi sangat berpengaruh. Modal sosial memfasilitasi tindakan dengan menciptakan kepercayaan, norma, dan jaringan yang mengurangi biaya transaksi dan memungkinkan kerja sama. Berbeda dengan modal fisik atau modal manusia yang merupakan properti individu, modal sosial adalah properti dari struktur relasi antar individu.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan Coleman dapat diterapkan untuk menganalisis fenomena kolektif seperti pertumbuhan ekonomi, mobilisasi sosial, atau perubahan institusional dengan menunjukkan bagaimana mereka muncul dari tindakan dan keputusan individu. Analisis tentang modal sosial dalam komunitas-komunitas Indonesia dapat mengungkap bagaimana jaringan kepercayaan dan norma timbal balik memfasilitasi kerja sama ekonomi dan kohesi sosial. Misalnya, sistem arisan sebagai lembaga keuangan informal dapat dianalisis menggunakan kerangka Coleman: kondisi makro seperti terbatasnya akses ke perbankan formal mempengaruhi situasi individu yang kemudian memutuskan untuk bergabung dalam arisan. Tindakan-tindakan individual ini teragregasi untuk menciptakan institusi arisan sebagai sistem pembiayaan kolektif yang efektif. Modal sosial dalam bentuk kepercayaan dan norma timbal balik dalam komunitas memfasilitasi keberlangsungan arisan dengan mengurangi risiko pengkhianatan.

Jeffrey Alexander dan Neo-Fungsionalisme

Jeffrey Alexander mengembangkan neo-fungsionalisme sebagai upaya untuk merevitalisasi tradisi Parsonian sambil mengatasi kritik-kritik yang telah dilontarkan terhadap fungsionalisme struktural. Neo-fungsionalisme berusaha mempertahankan penekanan fungsionalisme pada integrasi dan keseimbangan sambil menginkorporasi wawasan dari teori konflik, interaksionisme simbolik, dan perspektif-perspektif lain (Alexander, 1987).

Alexander berargumen bahwa neo-fungsionalisme harus multi-dimensi, menginkorporasi analisis pada tingkat mikro dan makro. Ia harus sensitif terhadap konflik dan perubahan, bukan hanya integrasi dan stabilitas. Ia harus mengakui kontingensi dan kreativitas dalam tindakan, bukan determinisme struktural. Dan ia harus memiliki orientasi demokratis yang kritis terhadap struktur kekuasaan yang ada.

Dalam karya-karya kemudiannya, Alexander mengembangkan program kuat dalam sosiologi budaya yang menempatkan struktur-struktur makna simbolik di pusat analisis sosiologis. Ia berargumen bahwa budaya harus dipelajari

sebagai kekuatan independen yang secara langsung membentuk tindakan sosial dan institusi, bukan sekadar refleksi dari kepentingan ekonomi atau politik.

Dalam konteks Indonesia, neo-fungsionalisme Alexander dapat diterapkan untuk menganalisis bagaimana berbagai subsistem—ekonomi, politik, budaya, solidaritas—berinteraksi dalam memproduksi integrasi atau konflik sosial. Analisis tentang bagaimana simbol-simbol budaya dan narasi-narasi nasional berfungsi untuk menciptakan solidaritas atau memobilisasi konflik dapat menggunakan kerangka sosiologi budaya Alexander. Misalnya, simbol-simbol nasional seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, atau Garuda dapat dianalisis bukan hanya sebagai refleksi dari kepentingan politik tertentu, tetapi sebagai struktur makna yang secara independen membentuk identitas kolektif dan tindakan sosial. Narasi tentang kemerdekaan nasional, perjuangan melawan kolonialisme, atau keragaman budaya berfungsi sebagai kekuatan budaya yang memobilisasi solidaritas atau, dalam konteks tertentu, dapat digunakan untuk memobilisasi konflik ketika kelompok-kelompok tertentu merasa terekslusi dari narasi nasional.

Randall Collins dan Sosiologi Interaksi

Randall Collins mengembangkan teori ritual interaksi yang berusaha menghubungkan tingkat mikro interaksi tatap muka dengan struktur makro stratifikasi, organisasi, dan perubahan sosial. Dalam *Interaction Ritual Chains* (Rantai Ritual Interaksi), Collins berargumen bahwa ritual-ritual interaksi adalah mekanisme mikro-sosiologis yang menghasilkan solidaritas kelompok dan energi emosional yang memotivasi tindakan (Collins, 2004).

Ritual interaksi terjadi ketika orang berkumpul dalam kehadiran fisik bersama, memfokuskan perhatian mereka pada objek atau aktivitas yang sama, dan berbagi suasana emosional. Ritual yang berhasil menghasilkan solidaritas kelompok, simbol-simbol keanggotaan, dan energi emosional yang memompa individu dengan antusiasme dan kepercayaan diri. Ritual yang gagal menguras energi emosional dan menghasilkan perasaan depresi dan apatis.

Individu mengalir dari situasi ke situasi, tertarik pada interaksi-interaksi di mana modal budaya mereka memberikan mereka hasil energi emosional terbaik. Pola-pola stratifikasi, jaringan, dan institusi muncul dari distribusi diferensial energi emosional dan modal budaya yang dihasilkan melalui rantai ritual interaksi.

Dalam konteks Indonesia, teori ritual interaksi Collins dapat diterapkan untuk menganalisis berbagai bentuk interaksi kolektif—dari ritual keagamaan hingga pertemuan bisnis, dari demonstrasi politik hingga pertandingan olahraga—sebagai mekanisme yang menghasilkan solidaritas, identitas, dan motivasi. Analisis tentang bagaimana ritual-ritual ini terantai melintasi waktu dapat mengungkap pola-pola stratifikasi dan jaringan sosial yang lebih luas. Misalnya, ritual pengajian rutin di masjid atau mushola tidak hanya berfungsi sebagai praktik keagamaan, tetapi juga sebagai ritual interaksi yang menghasilkan solidaritas kelompok dan energi emosional yang memotivasi tindakan kolektif. Partisipan yang secara teratur menghadiri pengajian mengakumulasi modal budaya dalam bentuk pengetahuan agama dan simbol keanggotaan dalam komunitas, yang kemudian dapat dimobilisasi dalam situasi lain. Demonstrasi politik atau aksi massa dapat dianalisis sebagai ritual interaksi intensif yang menghasilkan energi emosional tinggi dan solidaritas kuat di antara partisipan, yang kemudian memotivasi tindakan politik lebih lanjut.

George Ritzer dan McDonaldisasi

George Ritzer mengembangkan tesis McDonaldisasi untuk menganalisis proses rasionalisasi dalam masyarakat kontemporer. Mengadaptasi analisis Max Weber tentang rasionalisasi dan sangkar besi birokrasi, Ritzer berargumen bahwa restoran cepat saji telah menjadi model untuk proses rasionalisasi di berbagai sektor masyarakat kontemporer (Ritzer, 1993).

McDonaldisasi dicirikan oleh empat dimensi: efisiensi dalam mencapai tujuan, kalkulabilitas atau penekanan pada kuantitas daripada kualitas, prediktabilitas atau standardisasi produk dan proses, dan kontrol melalui teknologi non-manusia yang menggantikan teknologi manusia. Prinsip-prinsip ini telah menyebar dari industri makanan cepat saji ke sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, hiburan, dan bahkan kehidupan keluarga (Ritzer, 1993).

Ritzer mengidentifikasi irasionalitas dari rasionalitas—cara-cara di mana sistem rasional menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan. Sistem McDonaldisasi dapat tidak efisien, mahal, menciptakan hubungan palsu, menghasilkan bahaya kesehatan dan lingkungan, homogenisasi, dan dehumanisasi. Rasionalisasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan manusia sering menghasilkan pengalaman yang dangkal, terstandardisasi, dan tidak memuaskan.

Dalam konteks Indonesia, tesis McDonaldisasi sangat relevan untuk menganalisis transformasi ekonomi dan sosial yang menyertai globalisasi dan modernisasi. Proliferasi waralaba makanan cepat saji, pusat perbelanjaan, hotel rantai, dan bentuk-bentuk konsumsi terstandardisasi lainnya dapat dianalisis menggunakan kerangka Ritzer. Analisis tentang bagaimana prinsip-prinsip rasionalisasi meresapi sektor-sektor seperti pendidikan dan kesehatan mengungkap dampak McDonaldisasi pada kualitas kehidupan dan pengalaman manusia. Misalnya, sistem pendidikan yang semakin menekankan standardisasi melalui ujian nasional, kurikulum seragam, dan pengukuran kuantitatif prestasi siswa dapat dianalisis sebagai manifestasi McDonaldisasi. Meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan, sistem ini dapat menghasilkan irasionalitas seperti pembelajaran yang mekanistis, kreativitas yang terhambat, dan pengalaman pendidikan yang tidak memuaskan. Di sektor kesehatan, proliferasi klinik dan rumah sakit rantai yang beroperasi dengan prosedur standar dapat meningkatkan efisiensi tetapi juga menghasilkan pengalaman perawatan kesehatan yang impersonal dan terfragmentasi.

11.3 Relevansi untuk Konteks Indonesia Kontemporer

Strukturalisme dan teori strukturasi menawarkan alat analitis yang kuat untuk memahami kompleksitas masyarakat Indonesia kontemporer. Perspektif-perspektif ini memungkinkan analisis yang bernuansa tentang bagaimana struktur-struktur budaya, ekonomi, dan politik membentuk tindakan sosial sambil mempertahankan ruang untuk memahami kapasitas agen untuk reproduksi dan transformasi struktur.

Analisis struktural dapat diterapkan untuk memahami sistem-sistem simbolik yang mengorganisir pemikiran dan praktik budaya Indonesia—dari sistem kekerabatan hingga klasifikasi ritual, dari organisasi spasial hingga hierarki sosial. Pendekatan Foucauldian dapat mengungkap mekanisme kekuasaan yang beroperasi melalui institusi-institusi disipliner seperti sekolah, rumah sakit, dan penjara. Konsep-konsep Bourdieu tentang habitus dan modal dapat menjelaskan bagaimana ketimpangan sosial direproduksi melalui transmisi keuntungan budaya dan sosial melintasi generasi.

Teori strukturasi Giddens sangat berguna untuk menganalisis bagaimana praktik-praktik sosial Indonesia—seperti gotong royong, musyawarah, atau patronase—adalah sekaligus produk dari struktur-struktur yang ada dan mekanisme melalui mana struktur-struktur tersebut direproduksi atau ditransformasikan. Pendekatan ini menghindari determinisme struktural

yang mengabaikan agensi, serta voluntarisme yang mengabaikan kendala struktural.

Analisis tentang modal sosial dalam komunitas-komunitas Indonesia dapat mengungkap bagaimana jaringan kepercayaan dan norma timbal balik memfasilitasi kerja sama ekonomi dan kohesi sosial, sambil juga mengakui bahwa modal sosial dapat berfungsi untuk mengeksklusi orang luar dan mempertahankan hierarki yang ada. Teori ritual interaksi dapat diterapkan untuk memahami bagaimana berbagai bentuk pertemuan kolektif—dari pengajian hingga arisan, dari rapat desa hingga demonstrasi politik—menghasilkan solidaritas, identitas, dan motivasi yang membentuk tindakan sosial.

> "Strukturalisme dan teori strukturasi menawarkan alat analitis kuat untuk memahami kompleksitas Indonesia kontemporer melalui analisis struktur simbolik, mekanisme kekuasaan disipliner, reproduksi ketimpangan via habitus-modal, dan praktik sosial seperti gotong royong sebagai medium sekaligus hasil struktur yang ditransformasikan."

Tesis McDonaldisasi menyediakan kerangka untuk menganalisis dampak globalisasi dan modernisasi terhadap kehidupan sehari-hari Indonesia. Proliferasi bentuk-bentuk konsumsi terstandardisasi, rasionalisasi berbagai sektor kehidupan, dan homogenisasi pengalaman budaya dapat dipahami sebagai manifestasi dari proses McDonaldisasi yang lebih luas. Namun, analisis juga harus sensitif terhadap cara-cara di mana aktor Indonesia mengadaptasi, memodifikasi, atau menolak proses-proses ini, menciptakan bentuk-bentuk hibrid yang menggabungkan elemen global dan lokal.

Perspektif strukturalis dan post-strukturalis juga penting untuk menganalisis wacana-wacana yang mengkonstruksi identitas nasional, regional, etnis, dan religius Indonesia. Analisis dekonstruktif dapat mengungkap ambiguitas dan kontradiksi dalam narasi-narasi tentang ke-Indonesiaan, modernitas, tradisi, atau pluralisme yang sering dipresentasikan sebagai koheren dan stabil. Ini membuka kemungkinan untuk pembacaan alternatif dan konfigurasi identitas yang lebih inklusif dan demokratis.

Akhirnya, sintesis mikro-makro yang ditawarkan oleh teori strukturasi dan pendekatan-pendekatan terkait memberikan kerangka untuk memahami bagaimana tindakan individual teragregasi menjadi pola-pola kolektif, dan bagaimana struktur makro membentuk situasi yang dihadapi individu. Ini sangat penting untuk menganalisis fenomena-fenomena kompleks seperti perubahan sosial, mobilisasi kolektif, atau transformasi institusional di Indonesia, yang memerlukan pemahaman tentang interaksi antara agensi individual dan struktur kolektif.

Strukturalisme dan teori strukturasi, dengan penekanan mereka pada relasi, proses, dan praktik, menawarkan alternatif terhadap pendekatan yang terlalu menekankan entitas substantif atau determinasi kausal yang sederhana. Mereka mendorong analisis yang lebih dinamis dan bernuansa tentang kehidupan sosial yang mengakui kompleksitas, kontingensi, dan kapasitas untuk transformasi. Dalam konteks Indonesia yang ditandai oleh keragaman budaya, perubahan ekonomi yang cepat, dan transformasi politik yang berkelanjutan, perspektif-perspektif ini memberikan alat yang sangat berharga untuk memahami dinamika reproduksi dan perubahan sosial.

Referensi Bab 11

Alexander, J. C. (1987). *Twenty lectures: Sociological theory since World War II*. Columbia University Press. https://archive.org/details/sociologicaltheo0000alex

Alexander, J. C. (Ed.). (1998). *Neofunctionalism and after*. Blackwell Publishers. https://archive.org/details/neofunctionalism0000unse

Alexander, J. C., & Colomy, P. (Eds.). (1990). *Frontiers of social theory: The new syntheses*. Columbia University Press. https://archive.org/details/frontiersofsocia0000unse

Althusser, L. (1965). *For Marx* (B. Brewster, Trans.). Verso. https://archive.org/details/formarx0000alth

Althusser, L. (1970). Ideology and ideological state apparatuses (Notes towards an investigation). https://www.marxists.org/reference/archive/althusser/1970/ideology.htm

Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice* (R. Nice, Trans.). Cambridge University Press. https://archive.org/details/outlineoftheoryo00bour

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241-258). Greenwood Press. https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/bourdieu-forms-capital.htm

Coleman, J. S. (1990). *Foundations of social theory*. Harvard University Press. https://archive.org/details/foundationsofsoc0000cole

Collins, R. (1975). *Conflict sociology: Toward an explanatory science*. Academic Press. https://archive.org/details/conflictsociolog0000coll

Collins, R. (2004). *Interaction ritual chains*. Princeton University Press. https://archive.org/details/interactionritua0000coll

Derrida, J. (1976). *Of grammatology* (G. C. Spivak, Trans.). Johns Hopkins University Press. https://archive.org/details/ofgrammatology0000derr

Derrida, J. (1978). *Writing and difference* (A. Bass, Trans.). University of Chicago Press. https://monoskop.org/images/b/b8/Derrida_Jacques_Writing_and_Difference_1978.pdf

Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison* (A. Sheridan, Trans.). Pantheon Books. https://archive.org/details/foucault-michel-discipline-and-punish-the-birth-of-the-prison-1977-1995

Foucault, M. (1995). *Discipline and punish: The birth of the prison* (A. Sheridan, Trans.). Vintage Books. https://monoskop.org/images/4/43/Foucault_Michel_Discipline_and_Punish_The_Birth_of_the_Prison_1977_1995.pdf

Giddens, A. (1976). *New rules of sociological method: A positive critique of interpretative sociologies*. Hutchinson. https://archive.org/details/newrulesofsociol0000gidd

Giddens, A. (1979). *Central problems in social theory: Action, structure and contradiction in social analysis*. University of California Press. https://archive.org/details/centralproblemsi0000gidd

Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. University of California Press. https://archive.org/details/constitutionofso0000gidd

Internet Encyclopedia of Philosophy. (n.d.). Anthony Giddens. https://iep.utm.edu/giddens/

Jurnal Analisa Sosiologi. Universitas Sebelas Maret. Sinta 3. https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/3659

Lévi-Strauss, C. (1963). *Structural anthropology* (C. Jacobson & B. G. Schoepf, Trans.). Basic Books. https://archive.org/details/structuralanthro0000levi

Masyarakat: Jurnal Sosiologi. Universitas Indonesia. Sinta 2. https://scholarhub.ui.ac.id/mjs/

Ritzer, G. (1993). *The McDonaldization of society: An investigation into the changing character of contemporary social life*. Pine Forge Press. https://archive.org/details/mcdonaldizationo00ritz

Ritzer, G. (2008). *The McDonaldization thesis: Explorations and extensions*. Sage Publications. https://archive.org/details/mcdonaldizationt0000ritz

Ritzer, G. (Ed.). (2010). *McDonaldization: The reader* (3rd ed.). Sage Publications. https://archive.org/details/mcdonaldizationr0000unse_x5f9

Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2022). Social ontology. https://plato.stanford.edu/entries/social-ontology/

BAB 12

FEMINISME DAN TEORI GENDER

Pendahuluan

Feminisme dan teori gender merepresentasikan salah satu perkembangan teoretis paling transformatif dalam ilmu sosial kontemporer. Berbeda dengan teori-teori klasik yang sering mengabaikan atau meminggirkan pengalaman perempuan dan dinamika gender, tradisi feminis mengembangkan perspektif kritis yang mengungkap bagaimana relasi gender membentuk struktur sosial, institusi, dan kehidupan sehari-hari. Feminisme bukan hanya gerakan politik untuk kesetaraan gender, tetapi juga tradisi intelektual yang menghasilkan inovasi teoretis dan metodologis yang signifikan dalam memahami kekuasaan, identitas, dan ketidakadilan sosial.

Bab ini mengeksplorasi perkembangan teori feminis dari gelombang awal hingga perspektif kontemporer yang kompleks. Pertama, kita akan menelusuri gelombang-gelombang feminisme yang masing-masing membawa fokus teoretis dan politik yang berbeda—dari perjuangan hak-hak sipil dan politik gelombang pertama, melalui kritik terhadap patriarki struktural gelombang kedua, hingga penekanan pada keragaman dan interseksionalitas gelombang ketiga dan keempat. Kedua, kita akan mengkaji kontribusi teoretis spesifik dari pemikir feminis kunci: Dorothy Smith yang mengembangkan sosiologi untuk perempuan, Patricia Hill Collins yang mengembangkan konsep interseksionalitas, dan bell hooks yang mempopulerkan feminisme inklusif.

"Feminisme dan teori gender merepresentasikan perkembangan teoretis transformatif mengungkap bagaimana relasi gender membentuk struktur sosial. Berkembang melalui gelombang berbeda hingga interseksionalitas, dengan kontribusi Smith, Collins, Butler, dan teori queer menantang heteronormativitas dan binaritas gender esensialis."

Ketiga, kita akan mengeksplorasi pemikiran Judith Butler tentang performativitas gender yang merevolusi pemahaman tentang gender sebagai konstruksi yang diproduksi melalui pengulangan tindakan. Keempat, kita akan menganalisis teori queer yang menantang asumsi heteronormatif dan binaritas gender yang mendominasi pemikiran sosial. Teori queer tidak hanya memperluas agenda feminis untuk mencakup isu seksualitas dan identitas non-normatif, tetapi juga mengembangkan kritik radikal terhadap kategori identitas yang stabil dan esensialis. Akhirnya, kita akan menganalisis relevansi perspektif feminis dan teori gender untuk memahami dinamika gender dalam masyarakat Indonesia kontemporer, termasuk negosiasi antara tradisi budaya, agama, dan modernitas dalam membentuk relasi gender.

Dalam konteks Indonesia, teori feminis dan gender memberikan alat untuk menganalisis kompleksitas pengalaman perempuan Indonesia yang dibentuk oleh titik temu antara gender, kelas, etnisitas, agama, dan lokasi geografis. Perspektif ini sangat penting untuk memahami isu-isu seperti representasi politik perempuan, kekerasan berbasis gender, partisipasi ekonomi perempuan, dan negosiasi identitas gender dalam konteks budaya yang beragam dan berubah.

12.1 Gelombang Feminisme dalam Teori Sosial

Feminisme Gelombang Pertama: Hak Sipil dan Politik

Feminisme gelombang pertama, yang berkembang dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, berfokus pada perjuangan untuk hak-hak sipil dan politik perempuan, terutama hak pilih. Gerakan sufragis (perjuangan hak pilih perempuan) di Inggris, Amerika Serikat, dan berbagai negara lain memperjuangkan pengakuan perempuan sebagai warga negara penuh dengan hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pemikir seperti Mary Wollstonecraft dalam *A Vindication of the Rights of Woman* (Pembelaan atas Hak-Hak Perempuan, 1792) berargumen bahwa perempuan memiliki kapasitas rasional yang sama dengan laki-laki dan karena itu berhak atas pendidikan dan partisipasi politik yang setara.

Gelombang pertama mengoperasikan dalam kerangka pemikiran liberal yang menekankan hak-hak individual dan kesetaraan formal di hadapan hukum. Strategi utamanya adalah reformasi legal untuk menghapus diskriminasi formal terhadap perempuan dalam hukum dan konstitusi. Gerakan ini berhasil mencapai hak pilih perempuan di berbagai negara—Selandia Baru

(1893), Australia (1902), Finlandia (1906), Norwegia (1913), Inggris (1918), Amerika Serikat (1920), dan seterusnya.

Namun, feminisme gelombang pertama sering dikritik karena dominasi perempuan kelas menengah kulit putih yang tidak selalu sensitif terhadap pengalaman perempuan kelas pekerja atau perempuan dari kelompok etnis minoritas. Fokus pada kesetaraan formal juga tidak cukup untuk mengatasi ketidaksetaraan substantif yang berakar pada struktur ekonomi dan budaya yang lebih dalam.

Feminisme Gelombang Kedua: Patriarki dan Struktur Sosial

Feminisme gelombang kedua, yang muncul pada tahun 1960-an dan 1970-an, mengembangkan kritik yang lebih radikal terhadap patriarki sebagai sistem struktural yang meresapi semua aspek kehidupan sosial. Slogan "yang personal adalah politik" mengungkapkan wawasan bahwa dinamika kekuasaan gender tidak hanya beroperasi dalam domain publik politik dan ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan pribadi, keluarga, seksualitas, dan tubuh perempuan.

Simone de Beauvoir dalam *The Second Sex* (Jenis Kelamin Kedua, 1949) mengembangkan analisis filosofis tentang bagaimana perempuan dikonstruksi sebagai Liyan dalam budaya patriarkal—bukan sebagai subjek otonom tetapi sebagai objek yang didefinisikan dalam relasi terhadap laki-laki sebagai norma universal. Pernyataan terkenalnya "Seseorang tidak dilahirkan, tetapi menjadi perempuan" mengantisipasi pemahaman konstruksionis tentang gender yang akan berkembang lebih lanjut dalam teori feminis kemudian.

Kate Millett dalam *Sexual Politics* (Politik Seksual, 1970) menganalisis bagaimana patriarki direproduksi melalui institusi keluarga, ideologi seksual, dan representasi budaya. Betty Friedan dalam *The Feminine Mystique* (Mistik Feminitas, 1963) mengkritik mistik feminitas yang mengkonstruksi identitas perempuan kelas menengah secara eksklusif dalam peran domestik sebagai ibu dan istri, mengabaikan aspirasi intelektual dan profesional mereka.

Feminisme radikal mengembangkan analisis tentang bagaimana kontrol terhadap tubuh dan seksualitas perempuan adalah mekanisme sentral dominasi patriarkal. Gerakan untuk hak reproduksi, termasuk akses terhadap kontrasepsi dan aborsi, menjadi isu politik kunci. Kritik terhadap kekerasan seksual dan domestik mengungkap bagaimana kekerasan berbasis gender

adalah bukan sekadar tindakan individual tetapi manifestasi dari struktur kekuasaan yang sistematis.

Feminisme sosialis mengintegrasikan analisis Marxis tentang kelas dengan analisis feminis tentang gender, berargumen bahwa penindasan perempuan tidak dapat dipisahkan dari eksploitasi kapitalis. Kerja domestik dan reproduktif yang tidak dibayar, yang dilakukan terutama oleh perempuan, adalah subsidi tersembunyi terhadap akumulasi kapitalis dengan mereproduksi tenaga kerja tanpa biaya bagi kapital.

Feminisme Gelombang Ketiga: Keragaman dan Interseksionalitas

Feminisme gelombang ketiga, yang muncul pada tahun 1990-an, mengembangkan kritik terhadap universalisme gelombang kedua yang sering mengasumsikan pengalaman perempuan kulit putih kelas menengah sebagai norma universal. Pemikir feminis dari komunitas marginal—perempuan kulit berwarna, perempuan kelas pekerja, perempuan LGBTQ+, perempuan dari negara-negara Selatan—mengkritik bagaimana feminisme arus utama sering mengabaikan atau meminggirkan pengalaman mereka.

Konsep interseksionalitas (titik temu berbagai sistem penindasan), yang dikembangkan oleh Kimberlé Crenshaw dan Patricia Hill Collins, menjadi kontribusi teoretis sentral gelombang ketiga. Interseksionalitas menganalisis bagaimana berbagai sistem penindasan—gender, ras, kelas, seksualitas, disabilitas—beroperasi tidak secara terpisah tetapi saling bersilangan dan memperkuat dalam membentuk pengalaman spesifik individu dan kelompok. Seorang perempuan kulit hitam kelas pekerja tidak hanya mengalami penindasan gender ditambah penindasan ras ditambah penindasan kelas, tetapi mengalami bentuk penindasan yang spesifik dan unik yang muncul dari titik temu ketiga kategori tersebut.

Feminisme postkolonial, yang dikembangkan oleh pemikir seperti Chandra Talpade Mohanty dan Gayatri Chakravorty Spivak, mengkritik bagaimana feminisme Barat sering merepresentasikan perempuan negara-negara berkembang sebagai korban pasif yang membutuhkan penyelamatan oleh feminisme Barat yang "tercerahkan". Perspektif ini mengungkap bagaimana wacana feminis dapat berfungsi sebagai bentuk imperialisme budaya yang mengabaikan agensi dan resistensi perempuan lokal serta kompleksitas konteks budaya dan historis mereka.

Gelombang ketiga juga ditandai oleh penekanan pada politik identitas, ekspresi individual, dan reklamasi istilah-istilah yang sebelumnya dianggap

menghina. Feminisme gelombang ketiga merangkul keragaman strategi politik, dari aktivisme akar rumput hingga intervensi budaya populer, dan menekankan pentingnya suara perempuan muda dan kelompok marginal dalam mendefinisikan agenda feminis.

Feminisme Gelombang Keempat: Media Digital dan Aktivisme Online

Feminisme gelombang keempat, yang muncul sekitar tahun 2010-an, ditandai oleh penggunaan media digital dan platform daring sebagai alat mobilisasi dan aktivisme. Kampanye tagar seperti #MeToo, #TimesUp, dan #YesAllWomen menggunakan media sosial untuk mengungkap prevalensi pelecehan dan kekerasan seksual, menantang budaya yang menormalkan pelecehan, dan menuntut akuntabilitas dari pelaku.

Media digital memungkinkan pembentukan jaringan solidaritas transnasional yang cepat dan luas, menghubungkan aktivis feminis di berbagai negara dan konteks. Platform daring juga memberikan ruang bagi suara-suara yang sering terpinggirkan dalam media arus utama untuk berbicara dan membangun komunitas. Namun, aktivisme digital juga menghadapi tantangan seperti pelecehan daring yang intens terhadap aktivis feminis, fragmentasi gerakan, dan pertanyaan tentang bagaimana mengubah mobilisasi daring menjadi perubahan politik substantif.

Gelombang keempat juga ditandai oleh perhatian yang diperbaharui terhadap isu-isu seperti kesetaraan upah, representasi politik, kekerasan berbasis gender, dan hak reproduksi. Gerakan seperti Women's March (Pawai Perempuan) pasca-inaugurasi Trump di Amerika Serikat menunjukkan kapasitas mobilisasi massal feminisme kontemporer. Secara teoretis, gelombang keempat melanjutkan komitmen interseksionalitas dan inklusivitas sambil menghadapi tantangan baru yang muncul dari teknologi digital, globalisasi, dan pergeseran politik kontemporer.

12.2 Kontribusi Teoretis Feminis Kunci

Dorothy Smith dan Sosiologi untuk Perempuan

Dorothy Smith (1926-2022) mengembangkan perspektif teoretis dan metodologis yang ia sebut sosiologi untuk perempuan atau etnografi institusional. Smith mengkritik bagaimana sosiologi arus utama mengadopsi relasi pemerintahan—cara-cara di mana institusi dan wacana profesional mengorganisir kehidupan sosial dari perspektif yang terpisah dari

pengalaman hidup aktual orang-orang yang dikuasai oleh institusi tersebut (Smith, 1987).

Sosiologi tradisional, menurut Smith, mengabaikan pengalaman perempuan dengan mengadopsi perspektif abstrak dan objektif yang sebenarnya mencerminkan pengalaman dan kepentingan laki-laki kelas menengah profesional. Konsep-konsep sosiologis tentang kerja, keluarga, atau ekonomi dikonstruksi dengan cara yang membuat kerja domestik dan reproduktif perempuan—yang adalah fondasi bagi semua aktivitas ekonomi dan sosial lainnya—menjadi tidak terlihat atau diabaikan.

> "Dorothy Smith mengembangkan sosiologi untuk perempuan dan etnografi institusional yang mengkritik sosiologi arus utama mengabaikan pengalaman hidup aktual perempuan. Pendekatan ini mengeksplorasi bagaimana teks dan praktik diskursif mengkoordinasikan aktivitas, mengungkap mekanisme kekuasaan tersembunyi dalam kompleks institusional."

Smith mengadvokasi sosiologi yang dimulai dari pengalaman hidup sehari-hari perempuan sebagai titik masuk untuk investigasi sosiologis. Pendekatan ini tidak berarti subjektivisme atau relativisme, tetapi pengakuan bahwa pengalaman lokal dan spesifik orang-orang dalam kehidupan sehari-hari mereka dapat menjadi jendela untuk memahami relasi sosial yang lebih luas dan kompleks yang mengorganisir pengalaman tersebut.

Etnografi institusional yang dikembangkan Smith mengeksplorasi bagaimana teks, dokumen, dan praktik diskursif mengkoordinasikan aktivitas orang-orang melintasi ruang dan waktu yang berbeda. Misalnya, formulir medis, kebijakan sekolah, atau prosedur birokrasi adalah mekanisme melalui mana aktivitas lokal diintegrasikan ke dalam kompleks institusional yang lebih luas. Dengan mengeksplorasi bagaimana teks-teks ini berfungsi dalam praktik aktual, etnografi institusional mengungkap mekanisme kekuasaan yang sering tidak terlihat dalam analisis struktural abstrak.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan Smith dapat diterapkan untuk menganalisis bagaimana institusi seperti sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, atau program pembangunan mengorganisir kehidupan perempuan Indonesia. Misalnya, etnografi institusional tentang program

Keluarga Berencana dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan populasi nasional diterjemahkan ke dalam praktik lokal yang membentuk pengalaman dan pilihan reproduktif perempuan, mengungkap ketegangan antara tujuan kebijakan negara dan realitas kehidupan perempuan di tingkat akar rumput.

Patricia Hill Collins dan Interseksionalitas

Patricia Hill Collins mengembangkan konsep interseksionalitas menjadi kerangka teoretis yang komprehensif untuk memahami bagaimana berbagai sistem penindasan saling bersilangan dan membentuk pengalaman sosial yang kompleks. Dalam *Black Feminist Thought* (Pemikiran Feminis Hitam, 1990), Collins menganalisis bagaimana perempuan Afrika-Amerika menghadapi bentuk-bentuk penindasan yang spesifik yang muncul dari titik temu ras, gender, dan kelas (Collins, 1990).

Collins mengidentifikasi beberapa tema sentral dalam pemikiran feminis hitam: penindasan sebagai pengalaman hidup, kontradiksi antara ideologi dominan dan realitas kehidupan, pentingnya pengetahuan berbasis pengalaman, dan politik pemberdayaan. Perempuan Afrika-Amerika, sebagai orang luar di dalam akademi dan masyarakat yang lebih luas, mengembangkan perspektif yang unik yang memungkinkan mereka melihat kontradiksi dan ketidakadilan yang tidak terlihat dari posisi privilese.

Konsep matriks dominasi yang dikembangkan Collins menganalisis bagaimana sistem penindasan terorganisir dalam empat domain yang saling terkait: domain struktural (organisasi institusi), domain disipliner (manajemen dan administrasi penindasan), domain hegemonis (ideologi dan budaya), dan domain interpersonal (rutinitas dan pengalaman sehari-hari). Setiap domain beroperasi dengan logika kekuasaannya sendiri tetapi saling memperkuat dalam menciptakan dan mempertahankan ketidaksetaraan sistematis.

Collins juga mengembangkan konsep citra-citra pengontrol—stereotip yang berfungsi untuk membenarkan penindasan kelompok marginal. Untuk perempuan Afrika-Amerika, citra seperti pengasuh setia, ibu keluarga dominan, ibu penerima bantuan sosial, atau perempuan hiperseksual berfungsi untuk menaturalisasi subordinasi mereka dan membatasi pilihan identitas mereka.

Dalam konteks Indonesia, kerangka interseksionalitas sangat relevan untuk menganalisis pengalaman beragam perempuan Indonesia. Perempuan buruh migran Indonesia, misalnya, menghadapi titik temu gender, kelas, dan

nasionalitas yang membentuk kerentanan spesifik mereka terhadap eksploitasi dan kekerasan. Perempuan dari kelompok etnis minoritas atau agama minoritas menghadapi bentuk marginalisasi yang berbeda dari perempuan dari kelompok mayoritas. Analisis interseksional mengungkap bagaimana pengalaman penindasan tidak homogen dan memerlukan strategi politik yang sensitif terhadap keragaman posisi sosial.

Bell Hooks dan Feminisme untuk Semua Orang

Bell Hooks (1952-2021) mengembangkan feminisme yang secara eksplisit berusaha inklusif dan mudah diakses bagi orang-orang di luar akademi. Dalam *Feminist Theory: From Margin to Center* (Teori Feminis: Dari Margin ke Pusat, 1984), hooks mengkritik bagaimana feminisme arus utama sering terpusat pada pengalaman perempuan kulit putih kelas menengah dan mengabaikan perempuan kulit berwarna dan kelas pekerja (hooks, 1984).

Hooks berargumen bahwa feminisme harus bergerak dari margin ke pusat—tidak dengan menggantikan satu kelompok privilese dengan yang lain, tetapi dengan mengakui bahwa mereka yang berada di margin sering memiliki perspektif yang paling tajam tentang struktur kekuasaan karena mereka mengalami dampaknya paling langsung. Perspektif dari margin adalah bukan sekadar tambahan terhadap teori feminis arus utama, tetapi fundamental untuk memahami bagaimana patriarki, rasisme, dan kapitalisme beroperasi sebagai sistem yang saling terkait.

Dalam *Feminism is for Everybody* (Feminisme untuk Semua Orang, 2000), hooks mempresentasikan feminisme dalam bahasa yang mudah diakses dan berargumen bahwa feminisme bukan hanya untuk perempuan tetapi untuk semua orang yang ingin mengakhiri seksisme, eksploitasi seksis, dan penindasan (hooks, 2000). Hooks menekankan bahwa laki-laki juga dirugikan oleh patriarki—meskipun mereka menerima privilese relatif—karena patriarki membatasi ekspresi emosional mereka, memaksakan standar maskulinitas yang destruktif, dan mencegah relasi autentik dengan perempuan dan laki-laki lain.

Hooks juga mengembangkan analisis tentang bagaimana cinta dapat berfungsi sebagai praktik politik. Dalam beberapa bukunya tentang cinta, hooks mengeksplorasi bagaimana patriarki, kapitalisme, dan konsumerisme merusak kapasitas untuk cinta autentik dan bagaimana reklamasi cinta sebagai praktik etis dan politik dapat menjadi bagian dari transformasi sosial yang lebih luas.

Dalam konteks Indonesia, perspektif hooks tentang feminisme yang inklusif dan mudah diakses sangat relevan untuk gerakan feminis yang berusaha menjangkau di luar kelompok aktivis dan akademisi kelas menengah urban. Feminisme Indonesia perlu mengembangkan strategi komunikasi dan mobilisasi yang dapat berbicara dengan perempuan dari berbagai latar belakang kelas, etnis, agama, dan geografis, mengakui bahwa prioritas dan strategi mereka mungkin berbeda berdasarkan konteks spesifik mereka.

12.3 Judith Butler dan Performativitas Gender

Kritik terhadap Esensialisme Gender

Judith Butler mengembangkan teori performativitas gender yang merevolusi pemahaman tentang gender dalam teori feminis dan queer. Dalam *Gender Trouble* (Kekacauan Gender, 1990), Butler mengkritik asumsi bahwa gender adalah ekspresi natural dari jenis kelamin biologis atau identitas internal yang esensial. Butler berargumen bahwa tidak ada identitas gender yang mendahului atau mendasari ekspresi gender—sebaliknya, identitas gender adalah efek dari performativitas yang berulang (Butler, 1990).

Gender adalah performatif dalam arti bahwa ia dikonstituisikan melalui repetisi tindakan, gestur, dan gaya yang menciptakan ilusi subjek gender yang stabil. Kita tidak mengekspresikan gender yang sudah ada sebelumnya, tetapi menghasilkan gender melalui tindakan-tindakan yang kita lakukan berulang kali. Performativitas berbeda dari pertunjukan dalam arti bahwa performativitas tidak mengimplikasikan aktor yang secara bebas memilih untuk "bermain" gender, tetapi proses di mana subjek itu sendiri dikonstituisikan melalui norma-norma gender yang berulang.

> "Judith Butler mengembangkan teori performativitas gender yang merevolusi pemahaman gender sebagai efek repetisi tindakan, bukan ekspresi identitas esensial. Gender dikonstituisikan melalui pengulangan tindakan yang menciptakan ilusi subjek stabil, bukan pertunjukan bebas aktor yang memilih peran gender secara sadar dan independen."

Butler mengadopsi konsep J.L. Austin tentang ujaran performatif—ujaran yang tidak sekadar mendeskripsikan realitas tetapi mengkonstitusi realitas melalui pengucapannya. Misalnya, ketika seorang dokter mengatakan "Ini bayi laki-laki" atau "Ini bayi perempuan," ujaran tersebut bukan sekadar deskripsi tetapi inisiasi dari proses panjang pembentukan subjek gender melalui praktik-praktik yang memanggil bayi ke dalam kategori gender tertentu.

Butler mengkritik bagaimana feminisme sering mengasumsikan kategori "perempuan" sebagai subjek yang stabil dan koheren yang mendasari politik feminis. Namun, menurut Butler, kategori "perempuan" itu sendiri adalah konstruksi yang problematis karena ia mengasumsikan universalitas yang mengabaikan keragaman dan karena ia bergantung pada binaritas gender yang mengeksklusi mereka yang tidak sesuai dengan kategori perempuan atau laki-laki. Dengan mendekonstruksi kategori "perempuan," Butler bukan berusaha menghancurkan politik feminis tetapi membukanya untuk inklusivitas yang lebih besar dan refleksivitas kritis.

Heteronormativitas dan Matriks Heteroseksual

Butler mengembangkan konsep matriks heteroseksual untuk menganalisis bagaimana norma-norma gender dan seksualitas saling mengkonstitusi. Matriks heteroseksual adalah jaringan inteligibilitas budaya yang mengasumsikan bahwa jenis kelamin adalah biologis dan biner (laki-laki atau perempuan), gender adalah ekspresi budaya dari jenis kelamin (maskulin atau feminin), dan hasrat seksual diarahkan secara natural terhadap gender yang berlawanan (heteroseksualitas).

Sistem ini membuat identitas gender dan seksual yang tidak sesuai dengan skema ini menjadi tidak dapat dipahami atau abnormal. Orang-orang yang tidak mengidentifikasi dengan gender yang "sesuai" dengan jenis kelamin biologis mereka, atau yang hasrat seksualnya tidak diarahkan terhadap gender yang berlawanan, dipandang sebagai penyimpangan dari norma natural. Butler berargumen bahwa yang disebut "natural" ini sebenarnya adalah produk dari naturalisasi norma-norma budaya yang kontingen.

Heteronormativitas adalah sistem norma yang menganggap heteroseksualitas sebagai seksualitas yang natural, normal, dan normatif. Heteronormativitas beroperasi tidak hanya dengan mendiskriminasi non-heteroseksual secara eksplisit, tetapi juga dengan menstrukturkan institusi, praktik, dan asumsi sehari-hari dengan cara yang mengasumsikan dan

memprivilegikan heteroseksualitas. Misalnya, kategori legal seperti perkawinan, kebijakan tempat kerja, atau kurikulum pendidikan sering dikonstruksi dengan asumsi heteronormatif.

Butler berargumen bahwa menantang heteronormativitas memerlukan lebih dari sekadar inklusivitas atau toleransi terhadap non-heteroseksual dalam sistem yang ada. Ia memerlukan transformasi radikal dalam cara kita memahami gender dan seksualitas, menantang binaritas yang mendasari sistem tersebut, dan membuka kemungkinan untuk konfigurasi identitas dan relasi yang lebih beragam dan cair.

Subjek, Kekuasaan, dan Agensi

Dalam *The Psychic Life of Power* (Kehidupan Psikis Kekuasaan, 1997), Butler mengeksplorasi bagaimana subjek dikonstituisikan melalui subordinasi terhadap norma-norma kekuasaan, namun subordinasi ini juga adalah kondisi bagi kemungkinan agensi. Subjek menjadi subjek hanya dengan menjadi subjek terhadap norma-norma yang mendahului dan membentuk mereka. Namun, proses ini tidak deterministik—dalam proses pengulangan norma-norma, selalu ada kemungkinan untuk pengulangan yang subversif, penyimpangan, atau transformasi.

Butler mengadopsi konsep Foucault tentang kekuasaan sebagai produktif daripada hanya represif. Kekuasaan tidak hanya melarang atau membatasi, tetapi juga mengkonstitusi subjek dan menciptakan kemungkinan-kemungkinan tertentu. Agensi muncul bukan dari posisi di luar kekuasaan tetapi dari dalam konfigurasi kekuasaan, melalui pemaknaan ulang, pengulangan yang tidak sempurna, atau apropriasi norma-norma untuk tujuan yang berbeda.

Butler juga mengembangkan konsep kehidupan yang dapat diratapi untuk menganalisis bagaimana beberapa kehidupan diakui sebagai berharga dan kehilangannya diratapi secara publik, sementara kehidupan lain tidak diakui dan kehilangannya tidak menghasilkan duka kolektif. Distribusi diferensial dari pengakuan ini adalah manifestasi dari kekuasaan yang membuat beberapa kehidupan lebih berharga dari yang lain—seringkali berdasarkan garis ras, kelas, gender, seksualitas, atau nasionalitas.

Dalam konteks Indonesia, teori Butler dapat diterapkan untuk menganalisis konstruksi gender dalam berbagai konteks budaya dan agama. Misalnya, analisis tentang bagaimana norma-norma gender Islam diperformkan dan dinegosiasikan oleh perempuan Muslim Indonesia dapat menggunakan

kerangka performativitas untuk menunjukkan bahwa tidak ada satu cara "autentik" untuk menjadi perempuan Muslim, tetapi berbagai cara di mana identitas ini diperformkan dan diinterpretasikan. Analisis tentang komunitas waria, transpuan, atau LGBTQ+ di Indonesia dapat menggunakan konsep Butler untuk memahami bagaimana mereka mengnegosiasikan norma-norma gender yang dominan dan menciptakan ruang untuk identitas dan ekspresi gender yang non-normatif.

12.4 Teori Queer dan Kritik Heteronormativitas

Asal-Usul dan Prinsip Teori Queer

Teori queer muncul pada akhir 1980-an dan awal 1990-an sebagai perspektif interdisipliner yang menantang kategori identitas yang stabil dan norma-norma heteronormatif yang mengatur seksualitas dan gender. Istilah "queer" sendiri direklamasi dari penggunaannya sebagai hinaan terhadap orang-orang non-heteroseksual menjadi istilah yang merangkul spektrum identitas dan praktik yang menolak normalisasi.

Teori queer berbeda dari studi gay dan lesbian tradisional dalam beberapa cara fundamental. Pertama, teori queer menolak politik identitas yang berasumsi bahwa kategori seperti gay, lesbian, atau biseksual adalah identitas yang stabil dan natural. Sebaliknya, teori queer menganalisis bagaimana kategori-kategori identitas seksual itu sendiri adalah produk dari konfigurasi kekuasaan historis yang spesifik. Kedua, teori queer tidak hanya fokus pada minoritas seksual tetapi mengkritik sistem heteronormativitas yang mengatur semua orang, termasuk heteroseksual. Ketiga, teori queer mengadopsi strategi dekonstruktif yang menantang binaritas dan kategori yang tampaknya natural atau niscaya.

Eve Kosofsky Sedgwick dalam *Epistemology of the Closet* (Epistemologi Lemari, 1990) menganalisis bagaimana oposisi heteroseksual atau homoseksual adalah strukturisasi fundamental dari pemikiran modern yang melampaui isu seksualitas untuk membentuk pemahaman tentang privat atau publik, maskulin atau feminin, natural atau artifisial, dan berbagai binaritas lain. Michael Warner mengembangkan konsep publik queer untuk menganalisis bagaimana komunitas queer menciptakan ruang sosial alternatif yang menantang norma-norma dominan tentang intimasi, relasi, dan kehidupan bersama.

Kritik terhadap Homonormativitas

Perkembangan penting dalam *queer theory* adalah kritik terhadap homonormativitas—tendensi dalam gerakan hak-hak gay dan lesbian untuk mengadopsi norma-norma heteronormatif dan bercita-cita untuk asimilasi ke dalam institusi arus utama. Lisa Duggan menciptakan istilah "homonormalitas" untuk mengkritik bagaimana beberapa segmen komunitas LGBT, terutama gay dan lesbian kulit putih kelas menengah, memprioritaskan isu-isu seperti perkawinan sesama jenis dan hak untuk bertugas di militer sambil mengabaikan isu-isu yang mempengaruhi segmen komunitas yang lebih marginal seperti orang trans, *queer* kulit berwarna, atau *queer* kelas pekerja.

Kritik terhadap homonormativitas berargumen bahwa perjuangan untuk hak-hak LGBT tidak harus berarti reproduksi struktur normatif yang sama yang telah menindas orang *queer*. Perkawinan sesama jenis, misalnya, dapat dipandang sebagai pencapaian penting untuk kesetaraan legal, tetapi juga dapat berfungsi untuk menormalisasi dan memprivilegikan bentuk relasi tertentu (monogami, domestisitas, stabilitas) sambil terus memarginalkan bentuk-bentuk relasi queer lain yang lebih radikal atau non-normatif.

Teori queer mengadvokasi untuk transformasi yang lebih radikal dalam struktur sosial daripada sekadar inklusivitas dalam institusi yang ada. Ini termasuk menantang institusi perkawinan itu sendiri, membayangkan bentuk-bentuk keluarga dan komunitas alternatif, dan mengkritik bagaimana kapitalisme dan neoliberalisme membentuk subjektivitas queer kontemporer dengan cara yang mendorong konsumerisme dan individualisme.

Teori Queer of Color dan Kritik Interseksional

Queer theory kulit berwarna mengembangkan kritik interseksional terhadap teori queer arus utama yang sering didominasi oleh perspektif kulit putih. Pemikir seperti José Esteban Muñoz, Roderick Ferguson, dan Jasbir Puar menganalisis bagaimana ras, etnisitas, dan kolonialisme membentuk pengalaman queer dengan cara yang tidak dapat dipisahkan dari seksualitas.

Muñoz dalam *Disidentifications* (Disidentifikasi, 1999) menganalisis bagaimana queer kulit berwarna mengnegosiasikan identitas mereka melalui praktik disidentifikasi—bukan identifikasi penuh dengan norma dominan atau kontra-identifikasi yang menolak total, tetapi apropriasi yang transformatif dan strategis. Ferguson dalam *Aberrations in Black* (Penyimpangan dalam Hitam, 2004) menganalisis bagaimana wacana

sosiologis tentang keluarga Afrika-Amerika mengkonstruksi "penyimpangan" dengan cara yang saling terkait dengan normalisasi heteroseksualitas dan patologisasi kequeran.

Puar mengembangkan konsep homonasionalisme untuk mengkritik bagaimana retorika hak-hak LGBT dapat digunakan untuk membenarkan imperialisme dan Islamofobia. Di negara-negara Barat, narasi tentang "kemajuan" dalam hak-hak LGBT digunakan untuk mengkonstruksi Barat sebagai tercerahkan dan toleran dalam kontras dengan negara-negara Muslim yang digambarkan sebagai terbelakang dan intoleran, membenarkan intervensi militer dan kebijakan diskriminatif terhadap komunitas Muslim.

Aplikasi dalam Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, teori queer dapat diterapkan untuk menganalisis kompleksitas identitas dan praktik gender dan seksual yang tidak sesuai dengan kategori Barat seperti gay, lesbian, atau transgender. Identitas seperti waria, bantut, bissu, atau calabai di berbagai konteks budaya Indonesia tidak dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam kategori Barat dan memerlukan pemahaman yang sensitif terhadap konteks budaya lokal.

Teori queer juga relevan untuk menganalisis bagaimana norma-norma heteronormatif beroperasi dalam konteks budaya dan agama Indonesia. Islam, yang adalah agama mayoritas di Indonesia, sering diinterpretasikan dengan cara yang menormalisasi heteroseksualitas dan memarginalkan identitas dan praktik non-normatif. Namun, ada juga tradisi interpretasi yang lebih inklusif dan gerakan Muslim queer yang berusaha merekonsiliasi identitas religius dan identitas seksual atau gender mereka.

> "*Queer theory* diterapkan menganalisis identitas Indonesia seperti waria, bissu, calabai yang tidak sesuai kategori Barat, memerlukan pemahaman sensitif konteks budaya lokal. Relevan menganalisis operasi norma heteronormatif dalam konteks agama-budaya Indonesia dan tantangan aktivisme LGBT menghadapi represi serta imperialisme budaya dalam adaptasi kerangka hak asasi internasional."

Aktivisme LGBT di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks—dari represi legal dan kekerasan sosial hingga pertanyaan tentang bagaimana mengadaptasi kerangka hak asasi manusia internasional dengan cara yang beresonansi dengan konteks budaya lokal tanpa mereproduksi imperialisme budaya. Teori queer kulit berwarna memberikan alat untuk menganalisis dinamika ini dengan sensitivitas terhadap titik temu seksualitas dengan ras, agama, kelas, dan kolonialitas.

12.5 Relevansi untuk Konteks Indonesia Kontemporer

Feminisme Islam dan Negosiasi Gender

Feminisme Islam di Indonesia merepresentasikan negosiasi kompleks antara komitmen terhadap kesetaraan gender dan identitas religius. Pemikir dan aktivis seperti Siti Musdah Mulia, Lies Marcoes, dan Nur Rofiah mengembangkan interpretasi teks-teks Islam yang menantang pembacaan patriarkal sambil tetap beroperasi dalam kerangka teologis Islam.

Feminisme Islam mengkritik bagaimana interpretasi tradisional terhadap Al-Qur'an dan Hadis sering mencerminkan bias patriarkal dari konteks historis dan budaya tertentu daripada pesan egalitarian fundamental dari Islam. Dengan menggunakan metodologi interpretasi yang lebih kontekstual dan historis kritis, feminis Muslim berargumen bahwa banyak praktik yang dianggap "Islamis"—seperti pembatasan peran perempuan dalam ruang publik, poligami, atau kekerasan domestik—sebenarnya adalah kontradiksi terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam.

"Feminisme Islam di Indonesia menegosiasikan kesetaraan gender dengan identitas religius melalui interpretasi kontekstual Al-Qur'an dan Hadis yang menantang pembacaan patriarkal. Feminis Muslim seperti Siti Musdah Mulia berargumen bahwa praktik patriarkal kontradiktif dengan prinsip keadilan Islam, mengkritik feminisme sekuler Barat yang mengabaikan agensi perempuan religius mengintegrasikan komitmen feminis dengan identitas religius mereka."

Feminisme Islam juga mengkritik feminisme sekuler Barat yang sering mengasumsikan bahwa agama per se adalah patriarkal dan bahwa pembebasan perempuan memerlukan sekularisasi. Perspektif ini mengabaikan agensi perempuan religius yang memilih untuk mengintegrasikan komitmen feminis dengan identitas religius mereka dan yang mengembangkan strategi transformasi dari dalam tradisi religius.

Dalam konteks Indonesia, feminisme Islam sangat penting karena mayoritas perempuan Indonesia adalah Muslim dan identitas religius adalah dimensi fundamental dari identitas mereka. Gerakan seperti Rahima, Fahmina Institute, atau Alimat mengembangkan program-program yang mengintegrasikan pendidikan hak-hak perempuan dengan pendidikan agama, menggunakan bahasa dan kerangka yang beresonansi dengan komunitas religius.

Representasi Politik dan Partisipasi Perempuan

Representasi politik perempuan di Indonesia telah meningkat secara signifikan sejak implementasi kuota 30% untuk kandidat perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2004. Namun, representasi deskriptif (jumlah perempuan dalam parlemen) tidak otomatis menghasilkan representasi substantif (legislasi dan kebijakan yang menguntungkan perempuan).

Analisis feminis tentang politik Indonesia mengungkap berbagai hambatan terhadap partisipasi politik perempuan yang efektif: kultur politik patriarkal yang memandang politik sebagai domain maskulin, biaya kampanye yang tinggi yang menguntungkan kandidat dengan akses ke modal ekonomi (yang lebih sering laki-laki), kekerasan politik berbasis gender terhadap kandidat dan aktivis perempuan, dan struktur partai politik yang didominasi laki-laki yang sering menempatkan perempuan dalam posisi simbolik daripada posisi kekuasaan riil.

Gerakan perempuan Indonesia telah mengadvokasi untuk berbagai reformasi: penguatan implementasi kuota dengan sanksi yang lebih kuat terhadap partai yang tidak memenuhinya, sistem zipper (pergantian kandidat perempuan dan laki-laki dalam daftar) daripada hanya kuota minimal, pendanaan kampanye publik untuk mengurangi hambatan ekonomi, dan mekanisme untuk menangani kekerasan politik berbasis gender.

Kekerasan Berbasis Gender dan Perlindungan Hukum

Kekerasan berbasis gender tetap menjadi isu serius di Indonesia, mencakup kekerasan domestik, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan berbagai bentuk kekerasan lain yang menargetkan perempuan dan kelompok gender minoritas. UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tahun 2004 adalah pencapaian penting, tetapi implementasinya menghadapi berbagai tantangan termasuk kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, stigma sosial terhadap korban, dan hambatan ekonomi yang membuat perempuan bergantung pada pelaku.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang diusulkan pertama kali tahun 2016 dan akhirnya disahkan menjadi UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) tahun 2022, menghadapi resistensi signifikan dari kelompok konservatif yang berargumen bahwa RUU tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama atau akan "merusak moralitas." Perdebatan tentang RUU PKS mengungkap ketegangan antara agenda hak-hak perempuan dengan politik identitas religius konservatif di Indonesia.

Aktivis feminis menggunakan berbagai strategi untuk mengadvokasi kebijakan dan perubahan sosial: mobilisasi akar rumput, kampanye media sosial, advokasi legal, pendidikan publik, dan pembentukan koalisi dengan berbagai kelompok sipil. Kampanye seperti #KamiKorban atau #TolakRUUKetahananKeluarga menunjukkan bagaimana feminisme Indonesia menggunakan media digital untuk mobilisasi dan advokasi.

Ekonomi Gender dan Kerja Perempuan

Partisipasi ekonomi perempuan Indonesia terus meningkat, tetapi perempuan menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan: kesenjangan upah gender, konsentrasi perempuan dalam sektor informal dengan perlindungan hukum minimal, segregasi okupasional yang menempatkan perempuan dalam pekerjaan yang dibayar lebih rendah, dan beban ganda kerja produktif dan reproduktif.

Buruh migran perempuan Indonesia, yang bekerja terutama sebagai pekerja rumah tangga di Timur Tengah dan Asia, menghadapi bentuk eksploitasi yang spesifik yang berakar pada titik temu gender, kelas, ras, dan nasionalitas. Mereka sering mengalami jam kerja yang sangat panjang, upah yang tidak dibayar, pelecehan verbal dan fisik, dan isolasi sosial. Meskipun mereka memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan melalui remitansi, mereka

sering dipandang sebagai pahlawan devisa sekaligus dikonstruksi sebagai korban yang memerlukan perlindungan paternalistik negara.

Ekonomi feminis mengkritik bagaimana kerja reproduktif perempuan—mengasuh anak, merawat orang tua, pekerjaan domestik—tidak diakui sebagai "kerja" dan tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi nasional meskipun ia adalah fondasi bagi semua aktivitas ekonomi produktif. Gerakan untuk pengakuan dan valorisasi kerja reproduktif, redistribusi kerja perawatan antara perempuan dan laki-laki, dan penyediaan layanan perawatan publik adalah agenda penting feminisme ekonomi.

Pendidikan Gender dan Transformasi Budaya

Transformasi jangka panjang dalam relasi gender memerlukan perubahan dalam sosialisasi gender dan pendidikan. Ini termasuk pendidikan yang menantang stereotip gender dalam kurikulum dan buku teks, pelatihan guru dalam pedagogi sensitif gender, pendidikan seksualitas komprehensif yang mencakup persetujuan dan kesetaraan gender, dan penciptaan lingkungan sekolah yang aman bagi siswa dari berbagai identitas gender dan seksual.

Media massa dan media sosial memainkan peran penting dalam membentuk wacana tentang gender. Representasi perempuan dalam media—apakah mereka digambarkan sebagai objek seksual, ibu domestik, atau aktor dengan agensi penuh—mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami peran dan kapabilitas perempuan. Kritik media feminis menganalisis bagaimana representasi ini mereproduksi atau menantang stereotip gender.

Gerakan feminis juga bekerja untuk mengubah praktik budaya yang merugikan perempuan sambil menghormati keragaman budaya Indonesia. Ini termasuk kampanye melawan perkawinan anak, sunat perempuan, atau praktik lain yang melanggar hak-hak perempuan sambil mengembangkan strategi yang sensitif budaya dan tidak mereproduksi superioritas budaya atau imperialisme.

Feminisme dan teori gender, dengan penekanan mereka pada analisis kekuasaan, interseksionalitas, dan transformasi sosial, memberikan alat yang sangat berharga untuk memahami dan menantang ketidaksetaraan gender dalam masyarakat Indonesia kontemporer. Mereka mengungkap bagaimana gender bukan sekadar karakteristik individual tetapi struktur kekuasaan yang meresapi semua aspek kehidupan sosial dan yang harus ditransformasikan untuk mencapai keadilan sosial yang substantif.

Referensi Bab 12

Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge. https://selforganizedseminar.files.wordpress.com/2011/07/butler-gender_trouble.pdf

Butler, J. (1993). *Bodies that matter: On the discursive limits of sex*. Routledge.

Butler, J. (1997). *The psychic life of power: Theories in subjection*. Stanford University Press.

Collins, P. H. (1990). *Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment*. Unwin Hyman. https://archive.org/details/blackfeministth0000coll

Collins, P. H. (2000). *Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment* (2nd ed.). Routledge. https://uniteyouthdublin.files.wordpress.com/2015/01/black-feminist-though-by-patricia-hill-collins.pdf

Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139-167.

De Beauvoir, S. (1949). *The second sex*. Vintage Books.

Ferguson, R. A. (2004). *Aberrations in black: Toward a queer of color critique*. University of Minnesota Press.

Friedan, B. (1963). *The feminine mystique*. W.W. Norton.

GENDER EQUALITY: International Journal of Child and Gender Studies. UIN Ar-Raniry. Sinta 2.

Harkat: Media Komunikasi Gender. UIN Sunan Kalijaga. Sinta 3. https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/harkat

hooks, b. (1984). *Feminist theory: From margin to center*. South End Press. https://archive.org/details/feministtheoryf000hook

hooks, b. (2000). *Feminism is for everybody: Passionate politics*. South End Press.

https://excoradfeminisms.files.wordpress.com/2010/03/bell_hooks-feminism_is_for_everybody.pdf

Millett, K. (1970). *Sexual politics*. Doubleday.

Mohanty, C. T. (1988). Under Western eyes: Feminist scholarship and colonial discourses. *Feminist Review*, 30, 61-88.

Muñoz, J. E. (1999). *Disidentifications: Queers of color and the performance of politics*. University of Minnesota Press.

Puar, J. K. (2007). *Terrorist assemblages: Homonationalism in queer times*. Duke University Press.

Sawwa: Jurnal Studi Gender. UIN Walisongo. Sinta 2. https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa

Sedgwick, E. K. (1990). *Epistemology of the closet*. University of California Press.

Smith, D. E. (1987). *The everyday world as problematic: A feminist sociology*. Northeastern University Press. https://archive.org/details/everydayworldasp0000smit

Smith, D. E. (1990). *The conceptual practices of power: A feminist sociology of knowledge*. Northeastern University Press.

Spivak, G. C. (1988). Can the subaltern speak? In C. Nelson & L. Grossberg (Eds.), *Marxism and the interpretation of culture* (pp. 271-313). University of Illinois Press.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2021). Feminist philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/feminist-philosophy/

Warner, M. (1993). *Fear of a queer planet: Queer politics and social theory*. University of Minnesota Press.

Wikipedia. (2025). Intersectionality. https://en.wikipedia.org/wiki/Intersectionality

Wollstonecraft, M. (1792). *A vindication of the rights of woman*. https://www.gutenberg.org/ebooks/3420

BAB 13

POSTMODERNISME DAN TEORI KRITIS KONTEMPORER

Pendahuluan

Postmodernisme dan teori kritis kontemporer merepresentasikan tantangan fundamental terhadap asumsi-asumsi modernitas yang telah mendominasi pemikiran sosial sejak Pencerahan. Berbeda dengan teori-teori modern yang menekankan kemajuan rasional, objektivitas ilmiah, dan narasi universal tentang emansipasi manusia, perspektif postmodern mengembangkan skeptisisme radikal terhadap meta-narasi besar, mengkritik klaim kebenaran universal, dan mengeksplorasi fragmentasi, pluralitas, dan ketidakpastian sebagai kondisi fundamental kehidupan kontemporer.

"Postmodernisme dan teori kritis kontemporer mengembangkan skeptisisme radikal terhadap meta-narasi, kebenaran universal, dan asumsi modernitas. Baudrillard menganalisis hiperrealitas, Lyotard ketidakpercayaan meta-narasi, Bauman modernitas cair, Beck masyarakat risiko, Han-Žižek kekuasaan transparansi. Relevan menganalisis transformasi Indonesia dalam globalisasi-digitalisasi dan negosiasi tradisi-modernitas."

Bab ini mengeksplorasi kontribusi teoretis dari pemikir postmodern dan teori kritis kontemporer yang menganalisis transformasi masyarakat di era akhir modernitas. Jean Baudrillard mengembangkan analisis tentang simulakra dan hiperrealitas yang mengungkap bagaimana representasi telah menggantikan realitas dalam masyarakat konsumer kontemporer. Jean-François Lyotard mengidentifikasi kondisi postmodern sebagai ketidakpercayaan terhadap meta-narasi dan proliferasi permainan bahasa lokal yang tidak dapat disubsumsi ke dalam kerangka universal. Zygmunt Bauman menganalisis modernitas cair sebagai kondisi di mana struktur-struktur sosial yang solid mencair menjadi bentuk-bentuk yang cair, sementara dan tidak pasti.

Ulrich Beck mengembangkan konsep masyarakat risiko untuk menganalisis bagaimana modernitas menghasilkan risiko-risiko global yang tidak dapat dikontrol melalui mekanisme institusional tradisional. Teori kritis kontemporer, yang dikembangkan oleh pemikir seperti Byung-Chul Han dan Slavoj Žižek, memperluas kritik terhadap kapitalisme dan teknologi dengan menganalisis bagaimana kekuasaan kontemporer beroperasi melalui transparansi, kelelahan, dan ideologi yang tidak lagi berfungsi sebagai ilusi tetapi sebagai fetisisme komoditas yang disadari.

Dalam konteks Indonesia, perspektif postmodern dan teori kritis kontemporer memberikan alat untuk menganalisis transformasi sosial yang kompleks dalam era globalisasi, digitalisasi, dan perubahan politik. Konsep-konsep seperti modernitas cair, masyarakat risiko, dan transparansi sangat relevan untuk memahami dinamika masyarakat Indonesia yang mengalami perubahan cepat dalam struktur ekonomi, politik identitas, dan penggunaan teknologi digital. Perspektif ini juga membantu menganalisis bagaimana Indonesia mengnegosiasikan antara tradisi dan modernitas, lokal dan global, serta bagaimana risiko-risiko baru muncul dari proses modernisasi yang tidak merata.

13.1 Jean Baudrillard dan Simulakra

Dari Representasi ke Simulasi

Jean Baudrillard (1929-2007) mengembangkan teori simulakra yang radikal tentang bagaimana representasi telah menggantikan realitas dalam masyarakat kontemporer. Baudrillard berargumen bahwa kita telah memasuki era di mana perbedaan antara realitas dan representasi, antara tanda dan referennya, telah runtuh. Dalam masyarakat hiperrealitas, simulakra—salinan tanpa asli—telah menjadi lebih nyata daripada realitas itu sendiri (Baudrillard, 1981).

Baudrillard mengidentifikasi empat tahap berturut-turut dalam sejarah citra: pertama, citra adalah refleksi dari realitas dasar; kedua, citra menutupi dan memutarbalikkan realitas dasar; ketiga, citra menutupi ketiadaan realitas dasar; keempat, citra tidak memiliki relasi dengan realitas apapun—ia adalah simulakrumnya sendiri yang murni. Dalam tahap keempat ini, yang adalah kondisi postmodern, kita hidup dalam dunia simulasi di mana tanda-tanda tidak lagi merujuk pada realitas eksternal tetapi hanya merujuk pada tanda-tanda lain.

Konsep hiperrealitas menjelaskan kondisi di mana simulasi menjadi lebih nyata daripada realitas yang disimulasikan. Disneyland, menurut Baudrillard, adalah contoh sempurna hiperrealitas—ia berfungsi untuk membuat kita percaya bahwa dunia di luar Disneyland adalah nyata, padahal seluruh Los Angeles dan Amerika adalah Disneyland. Media massa, iklan, dan budaya konsumer menciptakan dunia hiperrealitas di mana kita tidak lagi dapat membedakan antara yang nyata dan yang disimulasikan.

Baudrillard juga menganalisis bagaimana perang telah menjadi simulakra. Dalam esainya tentang Perang Teluk 1991, Baudrillard berargumen bahwa perang tersebut "tidak terjadi" dalam arti tradisional—ia adalah simulasi yang dimediasi melalui televisi dan teknologi informasi, di mana citra perang menggantikan pengalaman langsung perang. Perang menjadi tontonan yang dikonsumsi melalui layar, kehilangan realitas materialnya yang brutal.

Masyarakat Konsumer dan Implosion Makna

Baudrillard menganalisis masyarakat konsumer sebagai sistem di mana objek-objek tidak lagi dikonsumsi untuk nilai gunanya tetapi untuk nilai tanda mereka—apa yang mereka tunjukkan dalam sistem perbedaan sosial. Konsumsi adalah bukan tentang kebutuhan tetapi tentang produksi perbedaan melalui kode-kode konsumer. Kita mengkonsumsi tanda-tanda status, identitas, dan gaya hidup daripada objek-objek material.

Dalam *The Consumer Society* (Masyarakat Konsumer), Baudrillard berargumen bahwa konsumsi telah menjadi logika fundamental masyarakat kontemporer yang menstrukturkan tidak hanya ekonomi tetapi juga budaya, politik, dan kehidupan sosial. Konsumsi menciptakan sistem klasifikasi dan diferensiasi yang mengorganisir hierarki sosial dan identitas kolektif. Namun, sistem ini adalah implosif daripada eksplosif—ia tidak menciptakan makna baru tetapi mereproduksi sirkulasi tanda-tanda yang kosong.

Baudrillard mengembangkan konsep implosion (keruntuhan ke dalam) untuk menjelaskan bagaimana perbedaan-perbedaan yang sebelumnya jelas—antara produksi dan konsumsi, antara medium dan pesan, antara subjek dan objek—telah runtuh ke dalam kondisi ketidaktentuan. Dalam era media massa dan teknologi informasi, makna tidak lagi diproduksi tetapi meledak ke dalam dalam sirkulasi tanda-tanda yang tanpa akhir. Ini menghasilkan kondisi simulasi total di mana tidak ada lagi posisi eksternal dari mana seseorang dapat mengkritik atau menilai sistem.

Kritik terhadap Teori Marxis

Baudrillard mengembangkan kritik tajam terhadap teori Marxis, berargumen bahwa Marx masih terjebak dalam metafisika produksi dan nilai guna yang tidak lagi relevan dalam masyarakat simulasi. Dalam *The Mirror of Production* (Cermin Produksi), Baudrillard berargumen bahwa fokus Marxis pada produksi dan eksploitasi kerja tidak dapat menjelaskan logika konsumsi dan simulasi yang mendominasi kapitalisme kontemporer.

Baudrillard juga mengkritik konsep ideologi Marxis, berargumen bahwa dalam masyarakat simulasi, tidak ada lagi "kebenaran" yang ditutupi oleh ideologi. Simulakra tidak menyembunyikan realitas tetapi menciptakan hiperrealitas yang menggantikan realitas. Kritik ideologi mengasumsikan perbedaan antara penampilan dan esensi, antara ilusi dan kebenaran, tetapi dalam kondisi postmodern, perbedaan ini telah runtuh.

Aplikasi dalam Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, teori Baudrillard dapat diterapkan untuk menganalisis transformasi budaya konsumer dan media. Proliferasi mal, merek global, dan budaya konsumsi telah mengubah lanskap urban Indonesia, menciptakan ruang-ruang hiperrealitas di mana simulasi gaya hidup modern diproduksi dan dikonsumsi. Mal-mal megah di Jakarta bukan hanya ruang komersial tetapi simulakra modernitas dan kosmopolitanisme yang berfungsi untuk membedakan kelas menengah urban dari massa.

Media sosial di Indonesia juga dapat dianalisis melalui lensa Baudrillard sebagai ruang simulasi di mana citra diri yang dikurasi menggantikan identitas autentik. Platform seperti Instagram menciptakan hiperrealitas di mana kehidupan yang dipresentasikan melalui foto-foto yang dikurasi dengan hati-hati menjadi lebih "nyata" daripada pengalaman sehari-hari yang tidak dimediasi. Fenomena buzzer (akun media sosial berbayar untuk kampanye politik) dan disinformasi politik dapat dipahami sebagai implosion antara fakta dan fiksi dalam ruang digital.

Wisata religi dan heritage tourism di Indonesia juga menunjukkan aspek simulakra—situs-situs yang dikonstruksi atau direkontruksi untuk konsumsi turis sering menjadi lebih "autentik" daripada situs historis aktual. Paket wisata yang menjual "pengalaman budaya tradisional" menciptakan simulasi tradisi yang dikemas untuk konsumsi modern, mengaburkan batas antara yang asli dan yang disimulasikan.

13.2 Jean-François Lyotard dan Kondisi Postmodern

Ketidakpercayaan terhadap Meta-Narasi

Jean-François Lyotard (1924-1998) mendefinisikan kondisi postmodern sebagai "ketidakpercayaan terhadap meta-narasi". Dalam *The Postmodern Condition* (Kondisi Postmodern, 1979), Lyotard berargumen bahwa narasi-narasi besar yang melegitimasi pengetahuan dan praktik sosial dalam modernitas—seperti narasi kemajuan rasional, emansipasi proletariat, atau penciptaan kekayaan—telah kehilangan kredibilitas mereka (Lyotard, 1979).

Meta-narasi adalah cerita-cerita besar yang mengklaim memberikan legitimasi universal untuk pengetahuan dan tindakan. Pencerahan mengoperasikan dengan meta-narasi kemajuan melalui pengetahuan rasional. Marxisme mengoperasikan dengan meta-narasi emansipasi kelas pekerja. Kapitalisme liberal mengoperasikan dengan meta-narasi penciptaan kekayaan dan kesejahteraan universal. Lyotard berargumen bahwa pada akhir abad ke-20, meta-narasi ini telah kehilangan kekuatan persuasif mereka karena berbagai kegagalan historis dan transformasi dalam kondisi pengetahuan.

Kondisi postmodern ditandai oleh fragmentasi pengetahuan ke dalam permainan bahasa lokal yang heterogen dan tidak dapat disubsumsi ke dalam kerangka universal. Setiap permainan bahasa—sains, etika, politik, seni—memiliki aturan dan kriteria validitasnya sendiri yang tidak dapat direduksi ke aturan dan kriteria domain lain. Tidak ada meta-bahasa atau meta-kriteria yang dapat menilai semua permainan bahasa dari posisi eksternal yang netral.

Pengetahuan dan Legitimasi

Lyotard menganalisis transformasi dalam status pengetahuan dalam masyarakat pascaindustrial atau informasional. Pengetahuan semakin ditransformasikan ke dalam bentuk informasi yang dapat dikuantifikasi, disimpan, dan ditransmisikan melalui teknologi komputer. Pertanyaan tentang legitimasi pengetahuan berubah dari "apakah ini benar?" menjadi "apakah ini efisien, dapat dijual, atau dapat diterjemahkan?"

Dalam masyarakat modern, pengetahuan delegitimasi melalui kontribusinya terhadap narasi emansipasi atau kemajuan. Dalam masyarakat postmodern, pengetahuan delegitimasi melalui performativitas—efisiensi masukan-

keluaran. Universitas dan institusi penelitian semakin diorganisir berdasarkan logika performativitas, di mana nilai penelitian diukur berdasarkan dampak ekonomi, jumlah sitasi, atau aplikabilitas teknologis daripada kontribusinya terhadap kebenaran atau emansipasi.

Lyotard juga menganalisis bagaimana sains modern beroperasi melalui paralogi (penalaran yang menyimpang dari konvensi)—produksi ide-ide baru yang tidak dapat diantisipasi atau direduksi ke paradigma yang ada. Paralogi adalah berbeda dari inovasi yang direncanakan; ia adalah lompatan kreatif yang mengganggu konsensus yang ada dan membuka permainan bahasa baru. Dalam kondisi postmodern, paralogi daripada konsensus adalah model untuk produksi pengetahuan yang legitimate.

Differend dan Ketidakadilan

Dalam karya kemudiannya, Lyotard mengembangkan konsep differend (konflik yang tidak dapat diselesaikan) untuk menganalisis konflik yang tidak dapat diselesaikan karena tidak ada aturan umum yang dapat diterapkan untuk kedua pihak. Differend terjadi ketika "korban dari sebuah ketidakadilan tidak dapat memberikan kesaksian tentang ketidakadilan tersebut karena aturan yang memungkinkan kesaksian itu sendiri mengeksklusi kemungkinan untuk berbicara tentang ketidakadilan."

> "Lyotard mengembangkan konsep differend sebagai konflik yang tidak dapat diselesaikan karena aturan kesaksian mengeksklusi kemungkinan korban berbicara tentang ketidakadilan, seperti Holocaust yang menghilangkan bukti dan saksi."

Holocaust adalah contoh paradigmatik differend. Revisionis yang menyangkal Holocaust menuntut bukti material—kamar gas yang masih ada, dokumen tertulis dari Hitler yang memerintahkan pembantaian. Tetapi logika genosida adalah untuk menghilangkan semua bukti, termasuk saksi. Mereka yang mati tidak dapat memberikan kesaksian, dan mereka yang selamat dituduh bias. Aturan bukti yang dituntut oleh revisionis itu sendiri mengeksklusi kemungkinan untuk memberikan kesaksian tentang genosida.

Konsep differend penting untuk teori keadilan postmodern karena ia menunjukkan bahwa tidak semua konflik dapat diselesaikan melalui dialog rasional atau prosedur yang adil. Beberapa ketidakadilan tidak dapat diartikulasikan dalam bahasa yang dominan, dan upaya untuk menyelesaikan mereka melalui konsensus dapat menghasilkan ketidakadilan yang lebih dalam dengan membungkam suara-suara yang marginal.

Aplikasi dalam Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, skeptisisme Lyotard terhadap meta-narasi dapat diterapkan untuk menganalisis bagaimana narasi pembangunan nasional, modernisasi, atau demokratisasi sering gagal untuk mengakomodasi keragaman pengalaman dan perspektif dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik. Narasi pembangunan Orde Baru, misalnya, mengoperasikan sebagai meta-narasi yang mengklaim memberikan legitimasi universal untuk kebijakan ekonomi dan politik, tetapi gagal untuk mengakui diferensiasi regional, etnis, dan kelas yang menghasilkan pengalaman yang sangat berbeda dari "pembangunan."

> "Skeptisisme Lyotard terhadap meta-narasi diterapkan menganalisis kegagalan narasi pembangunan nasional mengakomodasi keragaman pengalaman pluralistik Indonesia. Konsep differend relevan untuk konflik agraria dimana kepemilikan tanah adat tidak dapat diartikulasikan dalam bahasa hukum properti modern, menghasilkan ketidakadilan struktural sistemik."

Konsep differend relevan untuk menganalisis konflik-konflik yang tidak dapat diselesaikan dalam kerangka institusional yang ada. Konflik agraria antara komunitas adat dan perusahaan perkebunan, misalnya, sering merepresentasikan *differend* di mana konsep kepemilikan tanah adat tidak dapat diartikulasikan dalam bahasa hukum properti modern. Upaya untuk menyelesaikan konflik melalui mekanisme hukum formal dapat menghasilkan ketidakadilan dengan memprivilegikan konsepsi modern tentang kepemilikan sambil membungkam konsepsi adat.

Fragmentasi pengetahuan dan proliferasi permainan bahasa juga terlihat dalam lanskap media dan informasi Indonesia yang semakin terfragmentasi. Berbagai kelompok ideologis, religius, dan politik beroperasi dalam

permainan bahasa yang berbeda dengan kriteria validitas yang berbeda, membuat konsensus rasional semakin sulit. Hoaks dan disinformasi berkembang dalam kondisi ini karena tidak ada lagi kriteria universal yang disepakati untuk menilai kebenaran.

13.3 Zygmunt Bauman dan Modernitas Cair

Dari Modernitas Padat ke Modernitas Cair

Zygmunt Bauman (1925-2017) mengembangkan metafora modernitas cair untuk menganalisis transformasi dari masyarakat modern awal yang solid dan stabil menjadi masyarakat kontemporer yang cair, sementara, dan tidak pasti. Dalam *Liquid Modernity* (Modernitas Cair, 2000), Bauman berargumen bahwa struktur-struktur sosial yang dulunya solid—institusi, identitas, relasi—telah mencair menjadi bentuk-bentuk yang cair dan tidak permanen (Bauman, 2000).

Modernitas padat ditandai oleh institusi yang kuat seperti negara-bangsa, korporasi besar, dan keluarga inti; oleh identitas yang stabil dan jangka panjang; oleh komitmen yang langgeng seperti perkawinan seumur hidup atau karir seumur hidup; dan oleh kepercayaan pada kemajuan dan perencanaan masa depan. Modernitas cair ditandai oleh fleksibilitas, mobilitas, dan temporalitas; oleh institusi yang lemah dan jaringan yang berubah-ubah; oleh identitas yang cair dan dapat diperbarui; oleh relasi yang sementara dan mudah dibubarkan; dan oleh kehidupan yang episodik daripada naratif.

Bauman mengidentifikasi beberapa karakteristik kunci modernitas cair. Pertama, pencairan struktur-struktur sosial yang solid membuat kehidupan individual semakin tidak pasti dan berisiko. Tanpa jaring pengaman institusional yang solid, individu harus menavigasi risiko dan membuat pilihan tanpa panduan yang jelas. Kedua, beban dan tanggung jawab untuk mengatasi ketidakpastian semakin ditransfer dari institusi kolektif ke individu. Individualisasi bukan liberasi tetapi privatisasi risiko—individu harus mengelola risiko yang sebelumnya dikelola oleh negara atau komunitas.

Ketiga, kehidupan dalam modernitas cair ditandai oleh konsumerisme dan fetisisme komoditas. Dalam ketiadaan stabilitas dan makna yang diberikan oleh institusi tradisional, individu mencari identitas dan kepuasan melalui konsumsi. Tetapi konsumerisme adalah Sisyphean—komoditas kehilangan daya tarik mereka segera setelah diperoleh, mendorong siklus konsumsi yang tanpa akhir. Keempat, relasi manusia menjadi semakin terkomodifikasi dan

dapat dibuang. Cinta dan persahabatan menjadi koneksi yang dapat dibubarkan dengan mudah ketika mereka tidak lagi memberikan kepuasan atau ketika pilihan yang lebih baik tersedia.

Cinta Cair dan Relasi Manusia

Dalam *Liquid Love* (Cinta Cair, 2003), Bauman menganalisis bagaimana relasi manusia telah berubah dalam kondisi modernitas cair. Relasi intim menjadi semakin ditandai oleh koneksi yang sementara dan superfisial daripada komitmen yang dalam dan langgeng. Teknologi komunikasi seperti media sosial memfasilitasi multiplikasi koneksi tetapi juga membuat mereka lebih lemah dan mudah dibubarkan.

Bauman mengidentifikasi paradoks cinta cair: di satu sisi, orang mendambakan koneksi intim dan kepastian emosional; di sisi lain, mereka takut komitmen yang mengikat dan kehilangan fleksibilitas. Solusi adalah relasi yang "cukup dekat untuk memberikan kepuasan yang dicari tetapi tidak cukup dekat untuk membatasi kebebasan." Tetapi relasi seperti ini tidak dapat memberikan keamanan ontologis yang orang cari, menghasilkan siklus koneksi dan pemisahan yang tidak memuaskan.

Dating online dan aplikasi seperti Tinder adalah manifestasi sempurna cinta cair. Mereka menawarkan ilusi pilihan tanpa batas dan kemudahan koneksi, tetapi juga komodifikasi relasi manusia di mana mitra potensial dievaluasi dan dibuang seperti produk konsumer. Komitmen jangka panjang dilihat sebagai hambatan terhadap aktualisasi diri yang terus-menerus dan eksplorasi kemungkinan baru.

Masyarakat di Bawah Pengawasan

Bauman juga menganalisis bagaimana modernitas cair ditandai oleh bentuk-bentuk baru pengawasan dan kontrol. Dalam *Liquid Surveillance* (Pengawasan Cair), Bauman berargumen bahwa pengawasan kontemporer beroperasi melalui rayuan daripada paksaan. Orang secara sukarela memberikan data pribadi mereka untuk kenyamanan, hiburan, atau koneksi sosial. Media sosial, aplikasi telepon pintar, dan teknologi dapat dipakai mengumpulkan data yang luas tentang perilaku, preferensi, dan lokasi pengguna.

Pengawasan cair berbeda dari panoptikon Foucauldian dalam beberapa cara penting. Panoptikon mengasumsikan subjek yang terpenjara dan tidak dapat

melarikan diri dari pandangan pengawas. Pengawasan cair beroperasi dalam masyarakat konsumer di mana subjek bergerak bebas tetapi meninggalkan jejak digital di mana pun mereka pergi. Subjek pengawasan cair bukan tahanan tetapi konsumer yang aktif berpartisipasi dalam pengawasan diri mereka sendiri melalui penggunaan teknologi digital.

Aplikasi dalam Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, konsep modernitas cair sangat relevan untuk menganalisis transformasi ekonomi dan sosial yang cepat. Ekonomi Indonesia telah bergerak dari model berbasis manufaktur dan pertanian yang stabil menuju ekonomi digital dan ekonomi gig yang cair. Pekerja semakin menghadapi pekerjaan yang sementara, kontrak jangka pendek, dan ketidakpastian ekonomi tanpa perlindungan institusional yang memadai.

Urbanisasi dan migrasi internal juga dapat dipahami melalui lensa modernitas cair. Jutaan orang bergerak dari pedesaan ke kota atau dari satu kota ke kota lain mencari peluang ekonomi, menciptakan populasi yang mobile dan terputus dari komunitas tradisional. Struktur keluarga berubah dari keluarga besar multigenerasi yang tinggal bersama menjadi keluarga inti atau bahkan individu yang tinggal sendiri, mereproduksi individualisasi yang dijelaskan Bauman.

Media sosial dan aplikasi kencan telah mengubah lanskap relasi intim di Indonesia, terutama di kalangan kelas menengah urban. Koneksi daring memfasilitasi pertemuan tetapi juga membuat relasi lebih sementara dan terkomodifikasi. Fenomena ghosting (menghilang tiba-tiba tanpa penjelasan) dan benching (menjaga seseorang sebagai pilihan cadangan) adalah manifestasi cinta cair dalam konteks digital Indonesia.

13.4 Ulrich Beck dan Masyarakat Risiko

Risiko Global dan Modernisasi Refleksif

Ulrich Beck (1944-2015) mengembangkan konsep masyarakat risiko untuk menganalisis transformasi modernitas dari produksi dan distribusi kekayaan menuju produksi dan distribusi risiko. Dalam *Risk Society* (Masyarakat Risiko, 1986), Beck berargumen bahwa modernisasi telah menghasilkan risiko-risiko global yang tidak dapat dikontrol atau diminimalkan melalui mekanisme institusional tradisional (Beck, 1992).

Masyarakat risiko ditandai oleh beberapa karakteristik kunci. Pertama, risiko-risiko kontemporer adalah global dan tidak menghormati batas-batas nasional atau kelas. Polusi radioaktif dari bencana nuklir, perubahan iklim, atau pandemi global mempengaruhi semua orang tanpa memandang posisi sosial atau geografis. Slogan Beck adalah "miskin dan kaya sama-sama terkena" oleh risiko global, meskipun kemampuan untuk mengelola risiko tetap tidak setara.

Kedua, risiko-risiko kontemporer sering tidak terlihat dan hanya dapat dideteksi melalui pengetahuan ilmiah. Radiasi, kontaminasi kimia, atau polutan udara tidak dapat dirasakan secara langsung oleh indera manusia tetapi memerlukan instrumen dan keahlian untuk mengidentifikasi dan mengukur. Ini membuat orang bergantung pada sains dan ekspertise tetapi juga menciptakan ketidakpastian karena para ahli sering tidak setuju tentang sifat dan tingkat risiko.

Ketiga, risiko kontemporer adalah produk sampingan dari modernisasi itu sendiri. Mereka bukan efek dari kekurangan teknologi atau pengetahuan tetapi konsekuensi yang tidak diinginkan dari kemajuan teknologis dan industrialisasi. Pencemaran lingkungan, perubahan iklim, atau ancaman teknologi nuklir adalah risiko yang diciptakan oleh modernitas, membuat modernisasi "refleksif"—modernitas menjadi masalah bagi dirinya sendiri.

Individualisasi dan Politik Sub-Politik

Beck juga menganalisis proses individualisasi dalam masyarakat risiko. Individualisasi bukan hanya tentang kebebasan individual tetapi juga tentang disintegrasi bentuk-bentuk solidaritas tradisional dan transfer risiko dari institusi kolektif ke individu. Dalam masyarakat industri, risiko seperti pengangguran, penyakit, atau kemiskinan dikelola melalui negara kesejahteraan dan serikat buruh. Dalam masyarakat risiko, individu harus menavigasi risiko ini sendiri melalui pendidikan, asuransi swasta, atau strategi pribadi lainnya.

Individualisasi juga menghasilkan bentuk-bentuk baru politik. Politik tradisional yang terorganisir melalui partai politik dan parlemen menjadi kurang relevan untuk mengatasi risiko global. Sebaliknya, muncul apa yang Beck sebut sub-politik—politik yang terjadi di luar arena institusional tradisional, melalui gerakan sosial, organisasi non-pemerintah, atau jaringan transnasional. Sub-politik beroperasi pada isu-isu seperti lingkungan, hak

asasi manusia, atau keadilan global yang melampaui kerangka politik nasional tradisional.

Kosmopolitanisme dan Solidaritas Global

Dalam karya kemudiannya, Beck mengembangkan visi kosmopolitanisme sebagai respons terhadap tantangan masyarakat risiko global. Kosmopolitanisme bukan hanya sikap moral tetapi realitas struktural—kita semua saling bergantung dalam menghadapi risiko global. Perubahan iklim, pandemi, atau krisis ekonomi global memerlukan respons yang terkoordinasi secara global yang melampaui kepentingan nasional yang sempit.

Beck membedakan antara kosmopolitanisme normatif (komitmen filosofis terhadap universalitas) dan kosmopolitanisme metodologis (pendekatan penelitian yang tidak mengasumsikan negara-bangsa sebagai unit analisis yang natural). Ilmu sosial perlu mengembangkan perspektif kosmopolitan yang dapat menganalisis fenomena transnasional tanpa terjebak dalam nasionalisme metodologis yang mengasumsikan bahwa masyarakat nasional adalah unit analisis yang tepat.

Aplikasi dalam Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, konsep masyarakat risiko sangat relevan untuk menganalisis berbagai tantangan lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Indonesia menghadapi risiko-risiko global seperti perubahan iklim yang mengancam wilayah pesisir melalui kenaikan permukaan laut, intensifikasi bencana alam seperti banjir dan kekeringan, dan ancaman terhadap pertanian dan keamanan pangan.

> "Konsep masyarakat risiko relevan menganalisis tantangan Indonesia seperti perubahan iklim, deforestasi, dan pandemi COVID-19 sebagai risiko global transnasional. Individualisasi risiko terlihat dalam ekonomi gig dimana pekerja mengelola risiko tanpa perlindungan institusional kesejahteraan kolektif."

Deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia juga merepresentasikan risiko yang diciptakan oleh modernisasi ekonomi. Ekspansi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan menghasilkan keuntungan ekonomi jangka pendek tetapi menciptakan risiko lingkungan jangka panjang seperti hilangnya keanekaragaman hayati, erosi tanah, dan kontribusi terhadap perubahan iklim global. Kabut asap yang menyeberangi batas nasional menunjukkan dimensi transnasional risiko lingkungan.

Pandemi COVID-19 juga mendemonstrasikan konsep masyarakat risiko secara dramatis. Pandemi adalah risiko global yang tidak menghormati batas nasional dan memerlukan respons yang terkoordinasi secara global. Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola pandemi dengan keterbatasan kapasitas kesehatan publik, ketidaksetaraan dalam akses ke vaksin dan perawatan, dan dilema yang sulit antara kesehatan publik dan aktivitas ekonomi.

Individualisasi risiko juga terlihat dalam transformasi pasar kerja dan sistem kesejahteraan Indonesia. Dengan pertumbuhan sektor informal dan ekonomi gig, semakin banyak pekerja menghadapi risiko ekonomi tanpa perlindungan institusional seperti asuransi kesehatan atau jaminan pensiun. Mereka harus mengelola risiko pengangguran, penyakit, atau usia tua melalui strategi pribadi daripada sistem kesejahteraan kolektif.

13.5 Teori Kritis Kontemporer

Byung-Chul Han: Masyarakat Kelelahan dan Transparansi

Byung-Chul Han mengembangkan kritik terhadap kapitalisme neoliberal kontemporer yang beroperasi melalui mekanisme kekuasaan yang berbeda dari disiplin Foucauldian. Dalam *The Burnout Society* (Masyarakat Kelelahan, 2010), Han berargumen bahwa kita telah bergerak dari masyarakat disipliner yang beroperasi melalui larangan dan kontrol eksternal menuju masyarakat prestasi yang beroperasi melalui optimalisasi diri dan kewajiban internal (Han, 2015).

Masyarakat prestasi mengubah subjek dari subjek patuh yang diperintah melalui disiplin menjadi subjek wirausaha yang mengeksploitasi diri sendiri dalam pencarian prestasi dan optimalisasi diri yang tanpa akhir. Imperatif bukan lagi "kamu harus" tetapi "kamu bisa"—kebebasan yang paradoksal karena ia menghasilkan tekanan yang lebih besar untuk mengaktualisasikan semua potensi. Ketika tidak ada lagi penghalang eksternal, kegagalan menjadi

tanggung jawab pribadi, menghasilkan depresi dan kelelahan sebagai patologi karakteristik masyarakat prestasi.

Kelelahan adalah bukan kelelahan fisik tetapi kelelahan eksistensial yang muncul dari surplus positivitas—terlalu banyak kemungkinan, terlalu banyak informasi, terlalu banyak stimulasi. Berbeda dengan depresi Freudian yang muncul dari represi, depresi kontemporer muncul dari tekanan untuk menjadi subjek yang produktif, fleksibel, dan terus-menerus aktif. Subjek yang kelelahan tidak dapat lagi berhubungan dengan dunia eksternal atau dengan diri sendiri, menghasilkan isolasi dan fragmentasi.

Dalam *The Transparency Society* (Masyarakat Transparansi, 2015), Han menganalisis bagaimana transparansi telah menjadi imperativ dominan yang menghasilkan bentuk-bentuk baru kontrol. Transparansi dianggap sebagai solusi untuk korupsi, ketidakefisienan, dan ketidakpercayaan—tetapi Han berargumen bahwa transparansi total menghancurkan privasi, keintiman, dan dimensi ritual kehidupan sosial (Han, 2015).

Masyarakat transparansi adalah masyarakat pornografis dalam arti bahwa semuanya harus terlihat, terekspos, dan tersedia untuk konsumsi. Tetapi transparansi tidak menghasilkan kebenaran atau kepercayaan—sebaliknya, ia menghasilkan kecurigaan yang semakin dalam karena setiap tindakan dapat diinterpretasikan sebagai menyembunyikan sesuatu. Subjek yang transparan adalah subjek yang tidak memiliki kedalaman, interioritas, atau misteri—subjek yang direduksi menjadi data yang dapat diproses dan dikonsumsi.

Han juga mengembangkan konsep psikopolitik untuk menganalisis bagaimana kekuasaan neoliberal beroperasi pada tingkat psikis. Dalam *Psychopolitics* (Psikopolitik, 2017), Han berargumen bahwa neoliberalisme tidak hanya mengatur tubuh tetapi juga jiwa, emosi, dan keinginan. Teknologi digital memfasilitasi bentuk baru kontrol yang beroperasi melalui Big Data, algoritma, dan nudging (dorongan halus)—mempengaruhi perilaku dengan cara yang halus dan tidak terlihat tanpa paksaan eksplisit (Han, 2017).

Slavoj Žižek: Ideologi dan Kekerasan Simbolik

Slavoj Žižek mengembangkan kritik kontemporer yang mengintegrasikan psikoanalisis Lacanian dengan analisis Marxis untuk mengungkap mekanisme ideologi dalam kapitalisme kontemporer. Dalam *The Sublime Object of Ideology* (Objek Sublim Ideologi, 1989), Žižek berargumen bahwa ideologi

tidak lagi beroperasi sebagai ilusi yang menutupi realitas tetapi sebagai fantasi yang menstrukturkan realitas sosial itu sendiri (Žižek, 1989).

Žižek mengkritik konsep tradisional ideologi sebagai "kesadaran palsu"—ide bahwa ideologi menutupi kepentingan riil dengan ilusi. Dalam kapitalisme kontemporer, orang sangat sinis—mereka tahu bahwa ideologi adalah ilusi, tetapi mereka tetap bertindak seolah-olah mereka percaya. Žižek mengutip Peter Sloterdijk: "mereka tahu dengan baik apa yang mereka lakukan, tetapi tetap melakukannya." Fetisisme komoditas kontemporer bukan tentang tidak tahu tetapi tentang penyangkalan—"Saya tahu sangat baik, tetapi tetap saja..."

Konsep *Real Lacanian* sentral dalam pemikiran Žižek. *Real* adalah bukan realitas sosial yang kita alami sehari-hari, tetapi inti traumatis yang tidak dapat disimbolisasikan yang mengganggu tatanan simbolik. Ideologi berfungsi untuk menutupi Real, menciptakan realitas sosial yang koheren dengan mengeksklusi dimensi traumatis yang mengganggu. Tetapi Real selalu kembali, muncul sebagai gejala, antagonisme, atau kekerasan yang mengganggu normalitas ideologis.

Dalam *Violence* (Kekerasan, 2008), Žižek membedakan antara tiga bentuk kekerasan: subjektif, objektif, dan simbolik. Kekerasan subjektif adalah kekerasan yang terlihat—tindakan kekerasan oleh aktor yang dapat diidentifikasi. Kekerasan objektif adalah kekerasan yang inheren dalam kondisi "normal" kapitalisme—eksploitasi ekonomi, ketidaksetaraan struktural, konsekuensi ekologis dari produksi. Kekerasan simbolik adalah kekerasan yang terkandung dalam bahasa dan bentuk-bentuk simbolik yang menaturalisasi dominasi (Žižek, 2008).

Žižek berargumen bahwa fokus pada kekerasan subjektif—terorisme, kejahatan, kerusuhan—berfungsi untuk menyembunyikan kekerasan objektif dan simbolik yang sistematis. Bantuan kemanusiaan, toleransi liberal, atau tanggung jawab sosial korporat adalah cara untuk melegitimasi tatanan yang menghasilkan ketidaksetaraan masif sambil mengalihkan perhatian dari kekerasan struktural yang mendasari.

Aplikasi dalam Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, analisis Han tentang masyarakat kelelahan dan transparansi sangat relevan untuk memahami transformasi dalam budaya kerja dan penggunaan teknologi digital. Kelas menengah urban Indonesia menghadapi tekanan yang semakin besar untuk produktivitas, optimalisasi

diri, dan branding personal melalui media sosial. Budaya hustle dan entrepreneur mindset yang dipromosikan melalui media sosial menciptakan ekspektasi untuk terus-menerus produktif dan inovatif, menghasilkan kelelahan yang tersebar luas.

Transparansi juga menjadi imperativ dalam konteks politik Indonesia, terutama dalam kampanye anti-korupsi. Namun, tuntutan untuk transparansi total dapat menghasilkan paranoia dan kecurigaan yang semakin dalam daripada kepercayaan. Pengawasan melalui CCTV, media sosial, dan teknologi digital menciptakan masyarakat yang semakin transparan di mana privasi dan keintiman terancam.

Analisis Žižek tentang ideologi dan kekerasan relevan untuk memahami dinamika politik Indonesia kontemporer. Sinisme politik yang tersebar luas—di mana orang tahu bahwa politisi korup tetapi tetap berpartisipasi dalam sistem—mendemonstrasikan bentuk ideologi yang dijelaskan Žižek. Kekerasan objektif dalam bentuk ketidaksetaraan ekonomi, eksploitasi buruh, dan degradasi lingkungan sering tidak terlihat karena perhatian difokuskan pada kekerasan subjektif seperti terorisme atau kejahatan jalanan.

Politik identitas dan konflik religius di Indonesia juga dapat dianalisis melalui lensa Žižek sebagai cara untuk mengalihkan perhatian dari antagonisme ekonomi yang fundamental. Dengan memobilisasi identitas religius atau etnis, elit politik dapat mengalihkan frustrasi massa dari ketidaksetaraan ekonomi menuju konflik identitas yang tidak mengancam struktur kekuasaan ekonomi yang ada.

13.6 Kritik terhadap Modernitas

Ambiguitas Kemajuan

Teori kritis kontemporer mengembangkan kritik yang bernuansa terhadap narasi kemajuan yang mendominasi modernitas. Berbeda dengan optimisme Pencerahan yang melihat kemajuan sebagai linear dan tidak terelakkan, perspektif kritis menunjukkan ambiguitas fundamental kemajuan—bahwa setiap pencapaian modernitas menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan dan bentuk-bentuk baru dominasi.

Kemajuan teknologis, misalnya, telah meningkatkan produktivitas dan standar hidup tetapi juga menciptakan risiko-risiko baru seperti degradasi lingkungan, ancaman nuklir, atau manipulasi genetik. Kemajuan ekonomi

telah mengurangi kemiskinan ekstrem dalam skala global tetapi juga menghasilkan ketidaksetaraan yang semakin besar dan eksploitasi baru melalui rantai pasokan global. Kemajuan dalam komunikasi dan informasi telah mendemokratisasi akses ke pengetahuan tetapi juga memfasilitasi pengawasan, disinformasi, dan manipulasi politik.

Dialektika Pencerahan, sebagaimana dianalisis oleh Adorno dan Horkheimer, menunjukkan bahwa rasionalitas instrumental yang dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari dominasi alam telah berbalik menjadi dominasi terhadap alam dan manusia itu sendiri. Rasionalitas menjadi irasional ketika ia diabsolutkan, menghasilkan sistem-sistem teknis yang mengontrol manusia daripada dikendalikan oleh manusia.

Modernitas Alternatif dan Pluralisme

Kritik pascakolonial mengembangkan konsep modernitas alternatif untuk menantang asumsi bahwa modernitas adalah tunggal dan universal. Modernitas Eropa adalah bukan model yang harus diikuti oleh semua masyarakat, tetapi satu trajektori historis di antara banyak kemungkinan. Masyarakat non-Barat dapat mengembangkan bentuk-bentuk modernitas mereka sendiri yang mengintegrasikan elemen global dengan tradisi lokal dengan cara yang unik.

Konsep modernitas ganda atau modernitas yang terjalin mengakui bahwa modernitas selalu plural dan hibrid, dikonstituisikan melalui pertukaran, apropriasi, dan translasi melintasi batas-batas budaya. Tidak ada modernitas yang murni atau autentik—semua modernitas adalah hasil dari pertemuan kolonial, perdagangan global, dan sirkulasi ide yang kompleks.

Konsep modernitas alternatif penting memahami negosiasi Indonesia antara tradisi-modernitas dan lokal-global. Indonesia mengadaptasi elemen global dalam konteks budaya lokal, menciptakan modernitas hibrid unik seperti Islam modernis yang merekonsiliasi modernitas dengan tradisi religius.

Masa Depan Teori Kritis

Teori kritis kontemporer menghadapi tantangan untuk mengembangkan perspektif yang dapat menganalisis transformasi sosial yang cepat tanpa jatuh ke dalam pesimisme total atau optimisme naif. Kritik harus tetap waspada terhadap bentuk-bentuk baru dominasi sambil tetap membuka kemungkinan untuk emansipasi dan transformasi.

Tantangan utama termasuk perubahan iklim dan krisis ekologis yang mengancam kehidupan di planet ini; ketidaksetaraan global yang semakin besar yang menghasilkan ketidakstabilan politik dan konflik; teknologi digital dan kecerdasan buatan yang mentransformasi pekerjaan, komunikasi, dan bahkan apa artinya menjadi manusia; dan fragmentasi politik dan polarisasi yang mengancam kemungkinan dialog rasional dan aksi kolektif.

Teori kritis masa depan perlu mengembangkan perspektif yang dapat mengintegrasikan kritik kapitalisme dengan kritik ekologis, menganalisis transformasi teknologi dengan sensitivitas terhadap implikasi sosial dan etis, dan membayangkan bentuk-bentuk alternatif organisasi sosial yang lebih adil dan berkelanjutan. Ini memerlukan dialog yang berkelanjutan antara teori dan praktik, antara kritik dan konstruksi, antara analisis global dan intervensi lokal.

13.7 Relevansi untuk Konteks Indonesia Kontemporer

Postmodernisme dan teori kritis kontemporer memberikan alat analitis yang kaya untuk memahami kompleksitas masyarakat Indonesia dalam era globalisasi dan digitalisasi. Konsep-konsep seperti simulakra, modernitas cair, masyarakat risiko, dan masyarakat kelelahan membantu menganalisis transformasi yang cepat dalam ekonomi, budaya, dan politik Indonesia.

Simulakra dan hiperrealitas Baudrillard relevan untuk menganalisis budaya konsumer dan media di Indonesia. Proliferasi mal, merek global, dan media sosial menciptakan ruang-ruang simulasi di mana citra menggantikan realitas. Politik juga semakin menjadi simulakra—citra dan narasi yang diproduksi untuk konsumsi publik sering lebih penting daripada kebijakan substantif atau transformasi material.

Modernitas cair Bauman membantu memahami ketidakpastian dan fluiditas yang dialami banyak orang Indonesia kontemporer. Transformasi ekonomi dari pertanian dan manufaktur tradisional menuju ekonomi digital dan jasa menciptakan ketidakpastian pekerjaan. Urbanisasi dan mobilitas memutuskan orang dari komunitas tradisional. Relasi sosial menjadi semakin sementara dan termediasi melalui teknologi digital.

Masyarakat risiko Beck sangat relevan untuk menganalisis tantangan lingkungan, kesehatan, dan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Risiko-risiko seperti perubahan iklim, bencana alam, pandemi, dan krisis ekonomi adalah global tetapi dampaknya tidak merata, dengan komunitas marginal menghadapi kerentanan yang lebih besar. Indonesia perlu mengembangkan

kapasitas untuk mengelola risiko-risiko ini melalui kebijakan yang proaktif, institusi yang responsif, dan partisipasi masyarakat.

Teori kritis Han dan Žižek membantu menganalisis bentuk-bentuk baru kekuasaan dan ideologi dalam kapitalisme digital Indonesia. Masyarakat kelelahan menjelaskan kelelahan yang dialami banyak pekerja kelas menengah yang menghadapi tekanan untuk produktivitas dan optimalisasi diri yang tanpa akhir. Transparansi dan pengawasan melalui teknologi digital menciptakan bentuk-bentuk baru kontrol yang beroperasi melalui rayuan daripada paksaan.

Meninjau ulang modernitas menjadi penting guna melahirkan pandangan yang peka terhadap kerumitan kemajuan serta peluang munculnya bentuk modernitas lain. Indonesia tidak harus meniru pola modernitas Barat secara kaku, melainkan dapat merumuskan jalur modernisasi sendiri yang memadukan unsur global dengan nilai dan tradisi lokal secara adil, berkelanjutan, serta penuh makna.

Postmodernisme dan teori kritis mutakhir, dengan sikap skeptis terhadap narasi universal, perhatian pada keragaman dan fragmentasi, serta sorotan terhadap konfigurasi kekuasaan baru, memberi kontribusi berharga untuk membaca kerumitan masyarakat Indonesia kini. Kerangka ini menumbuhkan refleksi kritis terhadap asumsi yang jarang dipertanyakan dan membuka peluang untuk merancang alternatif kehidupan sosial yang lebih setara serta bermakna.

Referensi Bab 13

Bauman, Z. (2000). *Liquid modernity*. Polity Press.

Bauman, Z. (2003). *Liquid love: On the frailty of human bonds*. Polity Press.

Bauman, Z., & Lyon, D. (2013). *Liquid surveillance: A conversation*. Polity Press.

Baudrillard, J. (1981). *Simulacra and simulation*. University of Michigan Press.

Baudrillard, J. (1988). *The consumer society: Myths and structures*. Sage Publications.

Baudrillard, J. (1975). *The mirror of production*. Telos Press.

Beck, U. (1992). *Risk society: Towards a new modernity*. Sage Publications.

Beck, U. (2006). *Cosmopolitan vision*. Polity Press.

Beck, U., Giddens, A., & Lash, S. (1994). *Reflexive modernization: Politics, tradition and aesthetics in the modern social order*. Stanford University Press.

Han, B-C. (2015). *The burnout society*. Stanford University Press. https://monoskop.org/images/c/c1/Han_Byung-Chul_The_Burnout_Society_2015.pdf

Han, B-C. (2015). *The transparency society*. Stanford University Press. https://monoskop.org/images/a/a5/Han_Byung-Chul_The_Transparency_Society_2015.pdf

Han, B-C. (2017). *Psychopolitics: Neoliberalism and new technologies of power*. Verso Books. https://monoskop.org/images/f/f3/Han_Byung-Chul_Psychopolitics_Neoliberalism_and_New_Technologies_of_Power_2017.pdf

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Universitas Pendidikan Ganesha. Sinta 2.

Lyotard, J-F. (1979). *The postmodern condition: A report on knowledge*. University of Minnesota Press.

Lyotard, J-F. (1988). *The differend: Phrases in dispute*. University of Minnesota Press.

Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora. Universitas Padjadjaran. Sinta 2. https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora

Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2023). Postmodernism. https://plato.stanford.edu/entries/postmodernism/

WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi. Universitas Moestopo. Sinta 3.

Wikipedia. (2025). Liquid modernity. https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_modernity

Žižek, S. (1989). *The sublime object of ideology*. Verso Books. https://archive.org/details/sublimeobjectofi0000zize

Žižek, S. (2008). *Violence: Six sideways reflections*. Picador. https://monoskop.org/images/0/02/Zizek_Slavoj_Violence_Six_Sideways_Reflections_2008.pdf

BAB 14

GLOBALISASI DAN ERA DIGITAL

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia mengalami transformasi fundamental yang mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan mengorganisasi kehidupan sosial mereka. Dua kekuatan besar—globalisasi dan revolusi digital—tidak hanya mengubah lanskap ekonomi dan politik, tetapi juga membentuk ulang pemahaman kita tentang ruang, waktu, identitas, dan komunitas. Jika teoretikus klasik seperti Marx berbicara tentang "segala yang padat mencair ke udara" dalam konteks modernitas industrial, maka era kontemporer menghadirkan pencairan yang lebih radikal lagi: batas-batas nasional menjadi kabur, jarak geografis kehilangan makna, dan kehidupan sosial berpindah antara dunia fisik dan maya dengan mulus.

John Urry (2007) dalam karyanya yang berpengaruh, *Mobilities*, mengajukan konsep "mobilitas" sebagai paradigma baru untuk memahami masyarakat kontemporer. Bagi Urry, sosiologi tradisional yang berfokus pada masyarakat sebagai entitas statis dan terbatas secara teritorial tidak lagi memadai. Ia menulis: "Kehidupan sosial dibentuk melalui berbagai koneksi yang diperluas, diorganisasi melintasi jarak, dan dielaborasi melalui berbagai 'sistem'" *("Social life is constituted through multiple and extended connections organized across distance and elaborated through various 'systems'"*). Mobilitas—baik fisik (perjalanan orang), virtual (komunikasi digital), maupun imajiner (representasi media)—menjadi kunci untuk memahami bagaimana kehidupan sosial diorganisasi dalam skala global.

Arjun Appadurai (1996) melengkapi perspektif ini dengan konsep *scapes* (lanskap-lanskap)—lima dimensi arus global yang membentuk lanskap budaya kontemporer: *ethnoscapes* (pergerakan orang), *technoscapes* (teknologi), *financescapes* (modal), *mediascapes* (informasi dan citra), serta *ideoscapes* (ideologi). Appadurai berpendapat bahwa globalisasi bukan sekadar homogenisasi budaya, melainkan proses kompleks yang menghasilkan ketidakselarasan dan perbedaan (*disjuncture and difference*)—menciptakan bentuk-bentuk budaya hibrid dan lokal yang baru.

Di Indonesia, fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan. Layanan berbasis aplikasi seperti Gojek dan Tokopedia tidak hanya

mengadopsi model bisnis global, tetapi juga mengadaptasinya dengan konteks lokal, menciptakan apa yang Roland Robertson (1995) sebut sebagai "glokalisasi"—perpaduan antara global dan lokal. Jejaring sosial seperti Twitter dan Instagram menjadi arena baru untuk politik identitas, dari gerakan #ReformasiDikorupsi hingga kampanye lingkungan, menunjukkan bagaimana ruang maya mengubah praktik aktivisme dan partisipasi politik.

Namun, transformasi ini juga membawa paradoks dan tantangan baru. Sherry Turkle (2011) dalam *Alone Together* mengungkap ironi kehidupan digital: teknologi yang dirancang untuk menghubungkan justru membuat kita merasa lebih terisolasi. Nick Srnicek (2017) dalam *Platform Capitalism* mengkritik bagaimana layanan berbasis aplikasi menciptakan bentuk kapitalisme baru yang mengekstraksi nilai dari informasi pengguna, mengubah setiap aspek kehidupan menjadi komoditas. Di Indonesia, isu ini terlihat dalam perdebatan tentang perlindungan informasi pribadi, praktik ekonomi lepas (*gig economy*) yang eksploitatif, dan konsentrasi kekuasaan ekonomi di tangan beberapa perusahaan aplikasi raksasa.

Bab ini akan mengeksplorasi teori-teori kunci tentang globalisasi dan era digital, dari konsep mobilitas Urry hingga kapitalisme berbasis aplikasi Srnicek, dari analisis kota global Saskia Sassen hingga kritik masyarakat transparan Byung-Chul Han. Kita akan melihat bagaimana teori-teori ini membantu memahami transformasi masyarakat Indonesia: dari urbanisasi masif yang mengubah Jakarta menjadi kota raksasa global, hingga fenomena tokoh berpengaruh (*influencer*) dan ekonomi kreator digital, dari gerakan sosial berbasis jejaring sosial hingga tantangan berita bohong (*hoaks*) dan polarisasi politik daring.

Pertanyaan sentral yang akan kita telusuri adalah: Bagaimana globalisasi dan digitalisasi mengubah struktur, kultur, dan agensi dalam masyarakat kontemporer? Apa peluang dan ancaman yang muncul dari transformasi ini? Dan bagaimana teori sosial dapat membantu kita memahami dan menavigasi kompleksitas dunia yang semakin terkoneksi namun juga semakin terfragmentasi ini?

14.1 Konsep Dasar Globalisasi

Definisi dan Dimensi

Globalisasi adalah salah satu konsep yang paling banyak diperdebatkan dalam ilmu sosial kontemporer. Anthony Giddens (1990) mendefinisikan globalisasi sebagai "intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia yang

menghubungkan lokalitas-lokalitas yang berjauhan sedemikian rupa sehingga kejadian lokal dibentuk oleh peristiwa yang terjadi bermil-mil jauhnya dan sebaliknya" (*"the intensification of worldwide social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa"*). Definisi ini menangkap dua aspek kunci: pertama, intensifikasi hubungan sosial lintas batas; kedua, saling keterkaitan antara yang lokal dan yang global.

David Held dan Anthony McGrew (2007) mengidentifikasi empat dimensi utama globalisasi. **Pertama, ekstensitas**—jangkauan geografis hubungan dan jaringan sosial. Dalam era global, keputusan yang diambil di satu tempat dapat berdampak pada kehidupan orang di tempat yang sangat jauh. Krisis finansial 2008 yang bermula dari pasar properti Amerika Serikat, misalnya, dengan cepat merambat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, menunjukkan betapa terkoneksinya sistem ekonomi global.

Kedua, intensitas—kekuatan arus dan tingkat interkoneksi. Globalisasi tidak hanya soal jangkauan, tetapi juga tentang seberapa dalam dan kuat koneksi tersebut. Volume perdagangan internasional, arus modal, dan pertukaran informasi mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia.

Ketiga, kecepatan—seberapa cepat gagasan, barang, modal, dan orang bergerak melintasi ruang. Teknologi komunikasi dan transportasi modern memungkinkan transmisi informasi secara instan dan pergerakan orang dalam hitungan jam, mengubah pengalaman kita tentang jarak dan waktu.

Keempat, dampak—kedalaman pengaruh yang dimiliki oleh arus global terhadap komunitas lokal dan struktur sosial. Globalisasi bukan fenomena permukaan; ia mengubah institusi, praktik budaya, dan identitas di level yang sangat fundamental.

Perspektif Teoretis tentang Globalisasi

Immanuel Wallerstein (1974) melalui teori sistem dunia (*world-systems theory*) memberikan analisis struktural tentang globalisasi. Bagi Wallerstein, ekonomi kapitalis global membentuk sistem tunggal yang terbagi dalam tiga zona: negara inti (*core*) yang menguasai teknologi dan modal, negara pinggiran (*periphery*) yang menyediakan tenaga kerja murah dan bahan mentah, serta negara semi-pinggiran (*semi-periphery*) yang berada di antara keduanya. Indonesia - dalam kerangka ini - dapat dipandang sebagai negara

semi-pinggiran yang berupaya naik ke posisi inti melalui industrialisasi dan pengembangan teknologi.

Kritik terhadap pandangan ekonomi-sentris Wallerstein datang dari teoretikus kultur seperti Arjun Appadurai (1996). Appadurai berpendapat bahwa globalisasi tidak dapat dipahami hanya melalui lensa ekonomi. Dalam esainya yang berpengaruh, "Ketidakselarasan dan Perbedaan dalam Ekonomi Budaya Global" (*"Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy"*), ia mengajukan kerangka lima lanskap (*scapes*) yang bergerak dengan kecepatan dan logika berbeda:

1. **Lanskap etnis** (*Ethnoscapes*): Lanskap orang—turis, imigran, pengungsi, pekerja migran. Di Indonesia, ini terlihat dalam fenomena TKI/TKW, mahasiswa yang belajar di luar negeri, dan meningkatnya pekerja asing di kota-kota besar.
2. **Lanskap teknologi** (*Technoscapes*): Lanskap teknologi yang bergerak melintasi batas dengan kecepatan tinggi. Transfer teknologi, difusi inovasi, dan akses tidak merata terhadap infrastruktur digital membentuk kesenjangan global.
3. **Lanskap finansial** (*Financescapes*): Lanskap modal yang bergerak secara elektronik dengan kecepatan luar biasa. Pasar saham Jakarta dapat terguncang dalam hitungan menit akibat keputusan Bank Sentral Amerika Serikat atau Bank Sentral Eropa.
4. **Lanskap media** (*Mediascapes*): Lanskap gambar dan narasi yang disebarkan melalui media global. Film Hollywood, drama Korea, dan berita internasional membentuk imaginasi global, termasuk di Indonesia.
5. **Lanskap ideologi** (*Ideoscapes*): Lanskap ideologi politik seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan yang menyebar secara global, meskipun dengan interpretasi lokal yang beragam.

Glokalisasi: Dialektika Global-Lokal

Roland Robertson (1995) menolak narasi bahwa globalisasi adalah proses homogenisasi yang menghapus perbedaan lokal. Sebaliknya, ia mengajukan konsep **glokalisasi**—proses simultan antara globalisasi dan lokalisasi. Produk dan gagasan global selalu diterjemahkan, diadaptasi, dan diintegrasikan ke dalam konteks lokal yang spesifik.

Contoh klasik adalah McDonald's. Meskipun merupakan simbol globalisasi Amerika, di Indonesia McDonald's menawarkan menu yang disesuaikan dengan selera lokal: Nasi Uduk, ayam goreng dengan bumbu pedas, dan bahkan menu khusus Ramadan. Ini bukan sekadar strategi pemasaran, tetapi menunjukkan bagaimana yang global dan yang lokal saling membentuk.

Di bidang agama, fenomena serupa terlihat. Gerakan Islam transnasional seperti Salafisme atau Hizbut Tahrir menyebar secara global, tetapi ketika tiba di Indonesia, mereka berinteraksi dengan tradisi Islam lokal yang kuat—NU dan Muhammadiyah—menghasilkan negosiasi dan adaptasi yang kompleks. Seperti dicatat dalam penelitian di **Jurnal Studi Komunikasi dan Media** (Sinta 3) tentang dakwah digital, para da'i Indonesia menggunakan situs video seperti YouTube dan aplikasi berbagi foto seperti Instagram, tetapi dengan konten yang sangat lokal dan kontekstual.

14.2 MOBILITAS GLOBAL

Paradigma Mobilitas John Urry

John Urry (2000, 2007) mengkritik sosiologi tradisional yang memperlakukan masyarakat sebagai wadah (*container*) yang statis dan terbatas secara teritorial. Dalam *Sociology Beyond Societies* (2000), ia berpendapat bahwa fokus pada masyarakat-bangsa tidak lagi memadai untuk memahami dunia kontemporer yang ditandai oleh berbagai bentuk mobilitas.

Urry (2007) dalam *Mobilities* mengidentifikasi lima jenis mobilitas yang membentuk kehidupan sosial kontemporer:

1. **Mobilitas fisik korporeal**: Pergerakan tubuh manusia untuk bekerja, rekreasi, migrasi. Ini mencakup perjalanan pulang-pergi (*commuting*) harian jutaan warga Jakarta, mudik Lebaran yang merupakan salah satu migrasi massal terbesar di dunia, hingga perjalanan wisata domestik dan internasional yang semakin massif.
2. **Mobilitas fisik objek**: Pergerakan barang dari produsen ke konsumen. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada mobilitas ini—dari kapal kontainer yang melintasi Selat Malaka hingga paket perdagangan elektronik yang dikirim oleh kurir Gojek dan Grab.
3. **Mobilitas imajiner**: Perjalanan melalui media—televisi, film, realitas virtual. Orang Indonesia dapat "mengunjungi" Paris melalui film, merasakan atmosfer *Times Square* melalui video YouTube, atau berjalan-jalan di museum Louvre melalui tur virtual.

4. **Mobilitas virtual**: Komunikasi waktu-nyata (*real-time*) melalui internet, telepon, panggilan video. Pandemi COVID-19 mengakselerasi bentuk mobilitas ini secara dramatis—dari pembelajaran daring hingga kerja jarak jauh (*remote work*) yang memungkinkan orang "hadir" di ruang virtual tanpa mobilitas fisik.
5. **Mobilitas komunikatif**: Pertukaran pesan melalui surat, surel, pesan instan. WhatsApp, dengan penetrasi sangat tinggi di Indonesia, menjadi infrastruktur komunikasi yang menghubungkan keluarga yang terpisah geografis, komunitas bisnis, hingga organisasi politik.

Urry berpendapat bahwa berbagai bentuk mobilitas ini saling terkait dan membentuk sistem yang kompleks. Misalnya, mobilitas imajiner (menonton vlog traveling) dapat memicu mobilitas fisik (pariwisata), yang difasilitasi oleh mobilitas komunikatif (pemesanan hotel daring) dan didukung oleh mobilitas objek (bagasi yang dikirim).

Kota Global dan Ruang Arus

Saskia Sassen (1991) dalam *The Global City* menunjukkan bagaimana globalisasi tidak menghapus pentingnya tempat, melainkan menciptakan hierarki baru dari kota-kota global. New York, London, dan Tokyo berfungsi sebagai pusat komando (*command posts*) dalam ekonomi global—tempat di mana keputusan keuangan dan korporat utama diambil, layanan profesional tingkat tinggi terkonsentrasi, dan inovasi diproduksi.

Dalam konteks Asia Tenggara, Singapura muncul sebagai kota global yang dominan, sementara Jakarta, Bangkok, dan Manila bersaing menjadi kota global regional. Jakarta sebagai pusat ekonomi Indonesia mengalami transformasi dramatis: distrik bisnis Sudirman-Thamrin dengan gedung pencakar langit yang menjulang, kawasan perbelanjaan mewah, dan proliferasi ruang kerja bersama (*co-working space*) menandakan integrasi kota ini ke dalam jaringan ekonomi global.

Manuel Castells (1996) dalam trilogi *The Information Age* memperkenalkan konsep **ruang arus** (*space of flows*) yang kontras dengan **ruang tempat** (*space of places*). Dalam masyarakat jaringan (*network society*), kekuasaan tidak lagi terletak pada kontrol atas wilayah geografis, melainkan pada kontrol atas arus—informasi, modal, keputusan. Elit global terhubung satu sama lain melalui jaringan komunikasi digital, perjalanan udara, dan institusi transnasional, membentuk ruang sosial yang terpisah dari mayoritas populasi yang masih terikat pada tempat.

Di Jakarta, dualisme ini terlihat jelas: eksekutif multinasional yang tinggal di apartemen mewah Sudirman, bekerja di kantor dengan teknologi mutakhir, bepergian dengan mobil pribadi atau transportasi daring, hidup dalam "ruang arus" yang terhubung dengan Singapura, Hong Kong, atau London. Sementara itu, pekerja informal di kawasan Tanah Abang atau pedagang kaki lima di sudut-sudut kota hidup dalam "ruang tempat" yang terikat lokalitas, meskipun mereka juga semakin terkoneksi melalui telepon pintar dan jejaring sosial.

Migrasi dan Diaspora

Globalisasi mengintensifkan migrasi internasional, menciptakan apa yang Steven Vertovec (2009) sebut sebagai "keragaman super" (*super-diversity*)—tingkat keragaman etnis, bahasa, dan budaya yang belum pernah terjadi sebelumnya di banyak kota global. Namun, pengalaman migran kontemporer berbeda dari gelombang migrasi sebelumnya karena mereka dapat mempertahankan koneksi yang kuat dengan negara asal melalui teknologi komunikasi digital.

Indonesia mengirim jutaan pekerja migran setiap tahun—ke Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Timur Tengah. Pengalaman TKI/TKW menunjukkan kompleksitas migrasi global: di satu sisi, mereka adalah "pahlawan devisa" yang mengirim remitansi miliaran dolar; di sisi lain, mereka sering menghadapi eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan. Teknologi komunikasi digital memungkinkan mereka tetap terhubung dengan keluarga di kampung halaman—mengirim uang melalui transfer digital, panggilan video setiap hari, dan memantau kehidupan keluarga melalui jejaring sosial.

Konsep **diaspora** juga berevolusi. Jika diaspora tradisional (seperti diaspora Yahudi atau Armenia) ditandai oleh trauma perpindahan dan kerinduan untuk pulang, diaspora kontemporer lebih cair dan hibrida. Diaspora Indonesia—mulai dari akademisi di universitas Barat hingga pekerja profesional di perusahaan multinasional—membentuk "medan sosial transnasional" (*transnational social fields*) yang menjembatani negara asal dan negara tuan rumah, seperti dianalisis oleh Peggy Levitt dan Nina Glick Schiller (2004). Timnas sepak bola Piala Dunia 2026 seperti Calvin Verdonk, Kevin Diks, Dean James, Ragnar Oratmangoen, dan Miliano Jonathans adalah contoh evolusi diaspora hebat yang mencengakan dunia.

14.3 GLOBALISASI EKONOMI DAN KETIMPANGAN

Neoliberalisme dan Rantai Nilai Global

Globalisasi ekonomi kontemporer tidak dapat dipisahkan dari kebangkitan neoliberalisme sejak 1980-an. David Harvey (2005) dalam *A Brief History of Neoliberalism* menunjukkan bagaimana neoliberalisasi—deregulasi pasar, privatisasi aset publik, liberalisasi perdagangan—menjadi proyek politik yang mengubah lanskap ekonomi global.

Salah satu manifestasi utama globalisasi ekonomi adalah fragmentasi produksi melalui rantai nilai global (*global value chains*). Produk seperti iPhone tidak diproduksi di satu negara, melainkan melibatkan ratusan pemasok dari puluhan negara: desain di California, cip dari Taiwan dan Korea Selatan, layar dari Jepang, perakitan (*assembly*) di China. Setiap negara mengambil segmen dari rantai nilai berdasarkan keunggulan kompetitif mereka.

Indonesia terintegrasi ke dalam rantai nilai global terutama melalui industri tekstil, elektronik, dan otomotif. Pabrik-pabrik di Cikarang, Karawang, dan Bekasi memproduksi komponen atau melakukan perakitan untuk produk yang dijual secara global. Namun, posisi Indonesia dalam rantai nilai global masih didominasi oleh aktivitas nilai tambah rendah—manufaktur dan perakitan—sementara aktivitas nilai tambah tinggi seperti riset dan pengembangan, desain, dan pemasaran masih terkonsentrasi di negara maju.

Ketimpangan Global dan Dalam Negara

Globalisasi menciptakan paradoks: di satu sisi, ratusan juta orang keluar dari kemiskinan absolut (terutama di China dan India); di sisi lain, ketimpangan—baik antarnegara maupun dalam negara—meningkat secara dramatis. Thomas Piketty (2014) dalam *Capital in the Twenty-First Century* menunjukkan bahwa tingkat pengembalian modal secara konsisten melebihi pertumbuhan ekonomi, menciptakan konsentrasi kekayaan di tangan elit global.

Branko Milanović (2016) melalui analisis "kurva gajah" (*elephant curve*) menunjukkan distribusi keuntungan globalisasi: kelas menengah di negara berkembang (terutama Asia) mengalami pertumbuhan pendapatan signifikan; kelas pekerja di negara maju mengalami stagnasi; sementara 1% teratas global mengalami pertumbuhan luar biasa. Ini menjelaskan mengapa

globalisasi menciptakan pemenang dan pecundang yang tidak merata, memicu reaksi balik politik seperti Brexit dan kebangkitan populisme di berbagai negara.

Di Indonesia, ketimpangan juga meningkat meskipun ekonomi tumbuh konsisten. Laporan Credit Suisse (2021) menunjukkan bahwa 1% teratas menguasai lebih dari 50% kekayaan nasional. Ketimpangan ini tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga spasial—ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa, antara kota dan desa, antara Jakarta dan daerah.

Ekonomi Berbasis Aplikasi dan Ekonomi Lepas

Bentuk baru globalisasi ekonomi muncul melalui layanan berbasis aplikasi seperti Uber, Airbnb, Amazon, dan Alibaba. Nick Srnicek (2017) dalam *Platform Capitalism* berpendapat bahwa aplikasi-aplikasi ini menciptakan model bisnis baru yang mengekstraksi nilai dari informasi dan memediasi interaksi ekonomi. Aplikasi tidak memproduksi barang atau jasa secara langsung, melainkan menyediakan infrastruktur digital yang menghubungkan produsen dan konsumen, sambil mengumpulkan informasi berharga dari setiap transaksi.

Di Indonesia, Gojek dan Grab mentransformasi sektor transportasi dan logistik. Jutaan pengemudi ojek daring dan kurir pengiriman menjadi bagian dari ekonomi lepas (*gig economy*)—mereka bukan karyawan dengan tunjangan dan jaminan sosial, melainkan "mitra" yang menanggung risiko sendiri. Penelitian dalam **Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi** (Sinta 2) menunjukkan ambivalensi pengalaman pengemudi: mereka menghargai fleksibilitas dan akses ke pasar yang lebih luas, tetapi juga mengalami ketidakpastian pendapatan, beban kerja berat, dan kurangnya perlindungan sosial.

Kapitalisme berbasis aplikasi juga menciptakan dinamika "pemenang mengambil semua" (*winner-takes-all*). Beberapa aplikasi raksasa mendominasi pasar—Google di pencarian, Facebook di jejaring sosial, Amazon di perdagangan elektronik—menciptakan kekuatan monopolistik yang mengkhawatirkan. Di Indonesia, dominasi aplikasi perdagangan elektronik seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada mengancam pedagang tradisional dan UKM yang tidak memiliki literasi digital atau modal untuk bersaing secara daring.

14.4 Transformasi Komunikasi dan Interaksi Sosial

Transformasi yang dibawa globalisasi ekonomi dan mobilitas global tidak dapat dipisahkan dari revolusi digital yang mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan bersosialisasi. Bagian ini akan mengeksplorasi bagaimana teknologi digital membentuk ulang struktur sosial, praktik budaya, dan relasi kuasa dalam masyarakat kontemporer.

Dari Media Massa ke Jejaring Sosial

Manuel Castells (2009) dalam *Communication Power* berpendapat bahwa kita telah memasuki era "komunikasi-diri massal" (*mass self-communication*)—komunikasi yang bersifat massal dalam jangkauan tetapi dihasilkan sendiri (*self-generated*) dalam konten, diarahkan sendiri (*self-directed*) dalam emisi, dan dipilih sendiri (*self-selected*) dalam penerimaan. Jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok mewujudkan paradigma baru ini: setiap individu dapat menjadi produsen konten yang berpotensi menjangkau audiens global.

Transformasi ini mengubah struktur komunikasi publik. Jika era media massa tradisional ditandai oleh komunikasi satu-ke-banyak dengan kontrol terpusat (dari penerbit dan penyiar ke khalayak pasif), era digital ditandai oleh komunikasi banyak-ke-banyak dengan produksi konten yang terdesentralisasi. Jose van Dijck (2013) dalam *The Culture of Connectivity* menunjukkan bagaimana situs jejaring sosial tidak hanya memfasilitasi koneksi sosial, tetapi juga membentuk jenis koneksi tertentu melalui desain algoritma dan arsitektur situs.

Di Indonesia, penetrasi jejaring sosial sangat tinggi. Data We Are Social (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 70% populasi aktif di jejaring sosial, dengan rata-rata waktu penggunaan lebih dari 3 jam per hari. Situs seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Twitter menjadi ruang utama untuk komunikasi antarpersonal, konsumsi informasi, hiburan, hingga aktivitas ekonomi dan politik.

Paradoks Konektivitas

Sherry Turkle (2011) dalam *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other* mengungkap paradoks kehidupan digital: teknologi yang dirancang untuk menghubungkan justru membuat kita merasa lebih terisolasi. Turkle, melalui riset etnografi mendalam,

menunjukkan bagaimana telepon pintar dan jejaring sosial menciptakan ilusi kedekatan (*illusion of intimacy*)—kita merasa terhubung melalui suka, komentar, dan berbagi (*like, comment, and share*), tetapi kehilangan kedalaman hubungan tatap-muka.

Dalam konteks Indonesia, fenomena ini terlihat dalam berbagai situasi: keluarga yang berkumpul saat Lebaran tetapi masing-masing asyik dengan telepon pintar mereka; mahasiswa yang duduk bersama di kantin tetapi lebih banyak mengobrol daring dengan orang lain daripada berbicara satu sama lain; pasangan yang makan malam romantis tetapi lebih sibuk memotret makanan untuk Instagram daripada bercakap-cakap.

Turkle berpendapat bahwa kita mengembangkan preferensi untuk koneksi digital karena mereka menawarkan kontrol yang tidak dimiliki interaksi tatap-muka: kita bisa mengedit pesan sebelum mengirim, memproyeksikan versi ideal diri kita, dan menghindari ketidakpastian dan kerentanan dari interaksi langsung. Namun, dalam prosesnya, kita kehilangan spontanitas, empati, dan kedalaman yang hanya dapat muncul dari kehadiran fisik bersama.

Performa Identitas Digital

Erving Goffman (1959) dalam *The Presentation of Self in Everyday Life* menggunakan metafora teater untuk menjelaskan bagaimana individu mengelola kesan dalam interaksi sosial. Jejaring sosial mengintensifkan proses ini. Alice Marwick (2013) menunjukkan bagaimana situs seperti Instagram mendorong "pencitraan-diri sebagai merek" (*self-branding*)—individu mempresentasikan diri mereka sebagai merek yang harus dipromosikan dan dikelola.

Di Indonesia, fenomena tokoh berpengaruh (*influencer*) dan selebgram menunjukkan ekstremitas dari pencitraan-diri sebagai merek ini. Individu dengan pengikut besar dapat memonetisasi identitas digital mereka—dari promosi produk hingga promosi berbayar, dari pendapatan iklan YouTube hingga kemitraan berbayar. Namun, ini juga menciptakan tekanan untuk terus-menerus memproduksi konten yang menarik, mempertahankan persona yang konsisten, dan mengelola reputasi daring.

Penelitian dalam **ASPIKOM: Jurnal Ilmu Komunikasi** (Sinta 2) tentang praktik presentasi-diri remaja Indonesia di Instagram menunjukkan bagaimana mereka secara strategis memilih foto, menulis keterangan, dan menggunakan filter untuk menciptakan versi ideal diri mereka. Ini bukan sekadar permukaan, tetapi mencerminkan negosiasi identitas yang

kompleks—antara ekspektasi sosial dan keinginan pribadi, antara autentisitas dan performa.

14.5 Ekonomi Perhatian dan Kapitalisme Data

Logika Algoritmik dan Gelembung Filter

Eli Pariser (2011) memperkenalkan konsep **gelembung filter** (*filter bubble*)—fenomena di mana algoritma personalisasi di situs digital secara selektif menampilkan informasi berdasarkan riwayat perilaku pengguna. Tujuannya adalah meningkatkan relevansi dan keterlibatan (*engagement*), tetapi efek sampingnya adalah mempersempit paparan pengguna terhadap perspektif berbeda, menciptakan "gelembung" informasi yang memperkuat bias yang sudah ada.

Tarleton Gillespie (2014) dalam "Relevansi Algoritma" *("The Relevance of Algorithms")* menunjukkan bahwa algoritma bukan sekadar instrumen teknis netral, melainkan tertanam dengan nilai, asumsi, dan tujuan tertentu. Algoritma Facebook yang memprioritaskan konten yang memicu emosi kuat (marah, takut, gembira) cenderung mengamplifikasi konten kontroversial dan polarisasi. Algoritma YouTube yang mengoptimalkan waktu tonton (*watch time*) cenderung merekomendasikan konten yang semakin ekstrem untuk menjaga pengguna tetap menonton.

Di Indonesia, gelembung filter berkontribusi pada fragmentasi ruang publik. Pengguna jejaring sosial cenderung terpapar dengan konten yang mengkonfirmasi pandangan mereka—pendukung partai politik tertentu hanya melihat konten pro, Muslim konservatif hanya terpapar dakwah sejenis, sementara kaum liberal progresif hanya melihat perspektif mereka. Ini mempersulit dialog lintas perbedaan dan memperdalam polarisasi sosial-politik.

Kapitalisme Pengawasan

Shoshana Zuboff (2019) dalam *The Age of Surveillance Capitalism* mengajukan konsep kapitalisme pengawasan (*surveillance capitalism*)—sistem ekonomi yang mengekstraksi informasi personal sebagai bahan mentah, mengolahnya menjadi produk prediksi perilaku, dan menjualnya kepada pengiklan atau pihak ketiga. Google dan Facebook adalah contoh utama: mereka menyediakan layanan "gratis" kepada pengguna, tetapi produk sebenarnya adalah informasi pengguna yang dijual kepada pengiklan.

Zuboff berpendapat bahwa ini adalah bentuk kapitalisme baru yang berbeda secara kualitatif dari kapitalisme industrial. Jika kapitalisme industrial mengekstraksi nilai lebih (*surplus value*) dari tenaga kerja, kapitalisme pengawasan mengekstraksi nilai lebih dari pengalaman hidup manusia yang diubah menjadi informasi. Dan jika kapitalisme industrial menghasilkan produk untuk dijual, kapitalisme pengawasan menghasilkan prediksi perilaku yang dijual.

Di Indonesia, isu perlindungan informasi pribadi menjadi semakin mendesak. Kasus kebocoran informasi pengguna Tokopedia (2020) yang melibatkan lebih dari 90 juta akun menunjukkan kerentanan sistem. Belum lagi praktik pengumpulan informasi oleh aplikasi yang sering kali tidak transparan—banyak aplikasi meminta akses ke kontak, lokasi, kamera, dan mikrofon tanpa penjelasan yang jelas mengapa informasi tersebut diperlukan.

Ekonomi Kreator dan Komodifikasi Diri

Brooke Erin Duffy (2017) dalam *(Not) Getting Paid to Do What You Love* menganalisis bagaimana situs digital menciptakan ilusi bahwa setiap orang dapat mengubah minat mereka menjadi profesi yang menguntungkan. Retorika "lakukan apa yang kamu cintai" dan "jadilah bos diri sendiri" menyembunyikan realitas bahwa mayoritas kreator konten menghasilkan pendapatan sangat kecil atau bahkan tidak sama sekali, sementara aplikasi mengekstraksi nilai dari kerja mereka.

Di Indonesia, fenomena YouTuber, TikToker, dan podcaster menunjukkan daya tarik ekonomi kreator. Namun, hanya sebagian kecil yang berhasil menghasilkan pendapatan signifikan. Mayoritas kreator bekerja keras memproduksi konten tanpa kompensasi memadai, didorong oleh harapan bahwa suatu saat mereka akan "viral" dan sukses. Nancy Baym (2018) menyebut ini sebagai "kerja harapan" (*hope labor*)—kerja yang dilakukan dengan harapan akan kompensasi dan pengakuan di masa depan, tetapi tanpa jaminan pasti.

Situs seperti YouTube, Instagram, dan TikTok menciptakan hierarki baru. Di puncak adalah tokoh berpengaruh besar (*mega-influencer*) dengan jutaan pengikut yang dapat menghasilkan ratusan juta rupiah per bulan dari promosi produk dan pendapatan iklan. Di tengah adalah tokoh berpengaruh mikro (*micro-influencer*) dengan puluhan ribu pengikut yang mendapat pendapatan tambahan. Di dasar adalah mayoritas pengguna yang memproduksi konten

tanpa kompensasi finansial, tetapi kerja mereka tetap menghasilkan informasi dan lalu lintas yang menguntungkan aplikasi.

Penelitian dalam **Jurnal Studi Komunikasi dan Media** (Sinta 3) tentang praktik pembuatan konten di kalangan YouTuber Indonesia menunjukkan ambivalensi mereka: di satu sisi, mereka menghargai kreativitas, fleksibilitas, dan potensi penghasilan; di sisi lain, mereka mengalami tekanan algoritma (harus mengunggah konsisten untuk tetap "disukai" algoritma), kelelahan kreatif (*burnout*), dan ketidakpastian finansial.

14.6 Politik Digital dan Ruang Publik Daring

Demokrasi Digital dan Aktivisme Daring

Manuel Castells (2012) dalam *Networks of Outrage and Hope* menganalisis gelombang gerakan sosial abad ke-21—dari Musim Semi Arab (*Arab Spring*) hingga Occupy Wall Street, dari gerakan 15-M di Spanyol hingga gerakan pro-demokrasi Hong Kong. Ia berpendapat bahwa jejaring sosial memungkinkan bentuk baru mobilisasi politik: tanpa pemimpin formal, terdesentralisasi, horizontal, dan cepat menyebar.

Jejaring sosial menurunkan hambatan untuk partisipasi politik. Jika aktivisme tradisional memerlukan organisasi formal, sumber daya finansial, dan akses ke media massa, aktivisme digital dapat dimulai dari satu cuitan atau video yang viral. Tagar (*hashtag*) seperti #MeToo, #BlackLivesMatter, atau #ClimateStrike menjadi titik kumpul yang menggalang solidaritas global dalam waktu singkat.

Di Indonesia, jejaring sosial memainkan peran krusial dalam berbagai gerakan sosial. Gerakan #ReformasiDikorupsi (2019) yang dipicu oleh keputusan DPR melemahkan KPK berhasil memobilisasi ratusan ribu orang ke jalan melalui koordinasi di Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Gerakan #GejayanMemanggil di Yogyakarta menunjukkan bagaimana mahasiswa menggunakan jejaring sosial untuk mengorganisir protes terhadap berbagai rancangan undang-undang kontroversial.

Henry Jenkins (2006) dalam *Convergence Culture* memperkenalkan konsep **budaya partisipatif** (*participatory culture*)—budaya di mana tidak ada lagi pemisahan tegas antara produsen dan konsumen media. Setiap orang dapat berkontribusi pada produksi dan sirkulasi konten budaya. Dalam konteks politik, ini berarti setiap warga negara berpotensi menjadi "jurnalis warga"

(*citizen journalist*) yang mendokumentasikan dan menyebarkan informasi tentang isu publik.

Namun, W. Lance Bennett dan Alexandra Segerberg (2012) membedakan antara **aksi kolektif** (*collective action*) tradisional yang berbasis organisasi formal dengan **aksi konektif** (*connective action*) yang berbasis jaringan personal digital. Gerakan aksi konektif lebih fleksibel dan inklusif, tetapi juga lebih rapuh—mudah muncul tetapi juga mudah memudar tanpa meninggalkan struktur organisasi yang bertahan.

Polarisasi, Ruang Gema, dan Disinformasi

Jika optimisme awal internet adalah bahwa ia akan menciptakan "desa global" dan memperkuat demokrasi melalui akses universal terhadap informasi, realitas kontemporer lebih kompleks dan gelap. Cass Sunstein (2017) dalam *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media* berpendapat bahwa jejaring sosial justru memfasilitasi fragmentasi politik dan ruang gema (*echo chamber*)—ruang di mana individu hanya terpapar dengan pandangan serupa, memperkuat keyakinan yang sudah ada, dan semakin antipati terhadap pandangan berbeda.

Penelitian Pew Research Center (2014) menunjukkan bahwa pemisahan ideologis (*ideological segregation*) di jejaring sosial sangat tinggi—kaum liberal dan konservatif di Amerika Serikat cenderung memiliki jaringan yang homogen secara politik, jarang berinteraksi dengan pandangan berbeda, dan ketika berinteraksi, sering berujung pada konflik.

Di Indonesia, polarisasi politik terutama sejak Pilpres 2014 dan 2019 menciptakan divisi mendalam di jejaring sosial. Pendukung kandidat berbeda tidak hanya berbeda pendapat, tetapi sering kali mempertanyakan moralitas, nasionalisme, bahkan keimanan lawan. Penelitian dalam **Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi** (Sinta 2) tentang polarisasi politik daring menunjukkan bagaimana algoritma jejaring sosial mengamplifikasi konten polarisasi karena konten tersebut mendapat keterlibatan tinggi.

Lebih mengkhawatirkan adalah proliferasi disinformasi dan berita bohong (*hoaks*). Claire Wardle dan Hossein Derakhshan (2017) membedakan antara **misinformasi** (informasi keliru yang disebarkan tanpa niat jahat), **disinformasi** (informasi keliru yang disebarkan dengan sengaja untuk menipu), dan **malinformasi** (informasi benar yang disebarkan untuk menyakiti). Jejaring sosial memfasilitasi penyebaran ketiga jenis "kekacauan

informasi" (*information disorder*) ini dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat ribuan konten bohong yang beredar setiap tahun, mulai dari bohong kesehatan (seperti klaim palsu tentang COVID-19), bohong politik (seperti fitnah terhadap politisi atau tokoh publik), hingga bohong agama (seperti narasi palsu tentang penganiayaan umat tertentu). Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dan berbagai inisiatif pemeriksaan fakta (*fact-checking*) berupaya melawan disinformasi, tetapi produksi bohong jauh lebih cepat daripada pembantahannya (*debunking*).

Negara Pengawasan dan Kontrol Digital

Jika Zuboff menganalisis kapitalisme pengawasan dari perspektif ekonomi, Michel Foucault telah memberikan kerangka teoretis tentang pengawasan sebagai mekanisme kekuasaan. Dalam *Discipline and Punish* (1975), Foucault menggunakan metafora panoptikon Bentham—penjara di mana semua tahanan dapat dilihat dari menara pusat tanpa mereka tahu kapan mereka diawasi. Akibatnya, tahanan menginternalisasi pengawasan dan mendisiplinkan diri mereka sendiri.

David Lyon (2001) dalam *Surveillance Society* menunjukkan bagaimana teknologi digital mengintensifkan pengawasan. CCTV, pengenalan wajah (*facial recognition*), pelacakan GPS, pemantauan jejaring sosial, dan analitik data besar (*big data analytics*) menciptakan kemampuan pengawasan yang jauh melampaui imajinasi Foucault. Yang lebih problematis, pengawasan tidak lagi terpusat pada negara, tetapi juga dilakukan oleh korporasi dan bahkan oleh individu terhadap diri mereka sendiri (pengawasan-diri).

Di Indonesia, isu pengawasan menjadi kontroversial. Penerapan sistem pengenalan wajah di ruang publik, pengumpulan informasi biometrik untuk KTP elektronik, dan pemantauan jejaring sosial oleh aparat keamanan menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan potensi penyalahgunaan. Kasus penangkapan aktivis atau pengkritik pemerintah berdasarkan unggahan jejaring sosial menunjukkan bagaimana pengawasan digital dapat digunakan untuk kontrol politik.

Byung-Chul Han (2015) dalam *The Transparency Society* berpendapat bahwa kita hidup dalam era yang paradoks: obsesi dengan transparansi (semua harus terlihat, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diukur) justru menciptakan bentuk kontrol yang lebih halus. Ketika setiap aspek kehidupan

kita direkam, dianalisis, dan dievaluasi, kita kehilangan ruang untuk privasi, spontanitas, dan kedekatan. Transparansi total menghancurkan kepercayaan—jika semua harus diverifikasi dan dibuktikan, tidak ada lagi ruang untuk kepercayaan (*trust*).

14.7 Homogenisasi Versus Hibridisasi Budaya

Transformasi ekonomi dan politik yang telah kita bahas tidak dapat dipisahkan dari perubahan budaya yang lebih luas. Globalisasi tidak hanya mengubah cara kita memproduksi dan mengonsumsi barang, tetapi juga cara kita memahami identitas, nilai, dan makna. Bagian ini akan mengeksplorasi bagaimana globalisasi membentuk ulang lanskap budaya kontemporer.

Tesis McDonaldisasi

George Ritzer (1993) dalam *The McDonaldization of Society* mengajukan tesis bahwa prinsip-prinsip industri makanan cepat saji—efisiensi, kalkulabilitas, prediktabilitas, dan kontrol melalui teknologi—menyebar ke berbagai sektor kehidupan sosial. McDonaldisasi adalah bentuk rasionalisasi Weberian dalam konteks kontemporer, menciptakan standardisasi dan homogenisasi global.

Kritikus globalisasi budaya melihat penyebaran McDonald's, Starbucks, film Hollywood, dan budaya pop Amerika sebagai "imperialisme budaya" (*cultural imperialism*)—dominasi budaya Barat yang mengancam keragaman budaya lokal. Herbert Schiller (1976) berpendapat bahwa media dan budaya massa Amerika menyebarkan nilai, gaya hidup, dan ideologi kapitalisme konsumerisme ke seluruh dunia, menciptakan monokultur global.

Di Indonesia, kehadiran merek global sangat terlihat: pusat perbelanjaan besar dipenuhi Zara, H&M, Uniqlo; bioskop didominasi film Hollywood; musik pop Amerika dan K-pop mendominasi daftar putar remaja. Apakah ini menandakan "Amerikanisasi" atau "Westernisasi" budaya Indonesia?

Kritik dan Nuansa: Glokalisasi dan Hibridisasi

Roland Robertson (1995) menolak narasi homogenisasi yang simplistik. Ia berpendapat bahwa globalisasi selalu melibatkan **glokalisasi**—adaptasi lokal dari produk dan gagasan global. McDonald's di Indonesia bukan replika persis McDonald's di Amerika; ia telah dilokalisasi—dari menu hingga strategi

pemasaran yang menyesuaikan dengan sensibilitas Muslim (sertifikasi halal, tidak menjual daging babi).

Jan Nederveen Pieterse (2009) dalam *Globalization and Culture* mengajukan konsep **hibridisasi** (*hybridization*)—pencampuran elemen budaya dari berbagai sumber menciptakan bentuk budaya baru yang unik. Hibridisasi bukan sekadar penambahan elemen lokal ke produk global, melainkan transformasi mutual yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru.

Musik dangdut adalah contoh sempurna hibridisasi budaya Indonesia: ia lahir dari perpaduan musik Melayu, India (*Bollywood*), Arab, dan elemen lokal Jawa dan Sunda. Dangdut terus berevolusi dengan mengadopsi elemen rock, pop, musik dansa elektronik (*electronic dance music*/EDM), dan *hip-hop*, menciptakan subgenre seperti dangdut koplo dan dangdut *remix* yang sangat populer di kalangan kelas pekerja urban.

Arjun Appadurai (1996) berpendapat bahwa alih-alih melihat globalisasi sebagai proses homogenisasi atau hibridisasi, kita harus melihatnya sebagai proses yang menghasilkan **ketidakselarasan dan perbedaan**—ketidakselarasan antara berbagai arus global (ekonomi, teknologi, media, ideologi) yang bergerak dengan kecepatan dan logika berbeda. Hasilnya adalah keragaman bentuk modernitas budaya—Jepang modern tidak identik dengan Amerika modern, India modern tidak identik dengan China modern.

14.8 Identitas, Konsumerisme, dan Gaya Hidup Global

Konsumerisme sebagai Identitas

Zygmunt Bauman (2007) dalam *Consuming Life* berpendapat bahwa dalam masyarakat konsumen kontemporer, konsumsi bukan lagi sekadar aktivitas ekonomi, melainkan menjadi pusat identitas dan eksistensi sosial. Individu tidak lagi didefinisikan oleh apa yang mereka produksi (seperti dalam masyarakat industrial), melainkan oleh apa yang mereka konsumsi.

Jean Baudrillard (1970) dalam *The Consumer Society* menganalisis bagaimana objek konsumsi tidak lagi dinilai dari nilai guna (*use-value*) melainkan dari nilai tanda (*sign-value*). Membeli iPhone bukan hanya untuk fungsi komunikasi (nilai guna), tetapi untuk menandakan status, gaya hidup, dan identitas (nilai tanda). Konsumsi adalah aktivitas semiotik—kita "berbicara" melalui apa yang kita kenakan, makan, gunakan.

Di Indonesia, pertumbuhan kelas menengah urban menciptakan budaya konsumsi yang intensif. Pusat perbelanjaan menjadi ruang sosial utama—

bukan hanya tempat berbelanja, tetapi juga untuk sosialisasi, hiburan, bahkan sebagai penanda status sosial (pusat perbelanjaan mana yang biasa kamu kunjungi menandakan posisi kelas kamu). Merek fashion, perangkat, dan gaya hidup menjadi penanda keanggotaan ke kelompok sosial tertentu.

Mike Featherstone (1991) dalam *Consumer Culture and Postmodernism* memperkenalkan konsep **gaya hidup** (*lifestyle*)—pola konsumsi, aktivitas, dan estetika yang membedakan satu kelompok sosial dari yang lain. Gaya hidup bukan sekadar refleksi dari posisi kelas (seperti dalam analisis Bourdieu tentang distingsi), melainkan menjadi proyek diri yang dipilih dan dikonstruksi individu.

Di jejaring sosial Indonesia, blog gaya hidup dan budaya tokoh berpengaruh menunjukkan bagaimana individu mengkurasi dan memproyeksikan gaya hidup mereka sebagai aspirasi: bepergian ke destinasi eksotik, mencicipi kafe-kafe trendy, mengenakan mode terkini. Ini bukan sekadar pamer kekayaan, tetapi konstruksi identitas yang dikomunikasikan kepada khalayak.

Budaya Kaum Muda dan Generasi Digital

Don Tapscott (1998) memperkenalkan istilah "Generasi Net" (*Net Generation*) untuk menggambarkan generasi yang tumbuh dengan internet sebagai bagian integral kehidupan mereka. Marc Prensky (2001) membedakan antara "penduduk asli digital" (*digital natives*) (yang lahir di era digital) dan "pendatang digital" (*digital immigrants*) (yang mengadopsi teknologi digital di usia dewasa). Meskipun dikritik sebagai penyederhanaan berlebihan, distinsi ini menangkap perbedaan nyata dalam cara generasi berbeda berelasi dengan teknologi.

Danah Boyd (2014) dalam *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens* menunjukkan bahwa remaja menggunakan jejaring sosial bukan untuk pelarian (*escapism*), melainkan untuk mengkonstruksi identitas, menjalin pertemanan, dan menavigasi hierarki sosial—sama seperti generasi sebelumnya, hanya dengan alat yang berbeda. Yang berubah adalah keruntuhan konteks (*context collapse*)—di jejaring sosial, berbagai konteks sosial (keluarga, teman, guru, orang asing) bertabrakan dalam satu ruang, memerlukan strategi pengelolaan kesan yang lebih kompleks.

Di Indonesia, penelitian dalam **ASPIKOM: Jurnal Ilmu Komunikasi** (Sinta 2) tentang praktik jejaring sosial remaja menunjukkan bagaimana mereka bernegosiasi antara ekspektasi orang tua, tekanan teman sebaya, dan keinginan untuk mengekspresikan diri. Remaja Indonesia sangat aktif di

berbagai situs—Instagram untuk presentasi-diri yang "dipoles", Twitter untuk opini dan humor, TikTok untuk hiburan dan kreativitas, WhatsApp untuk komunikasi intim dengan teman dekat.

14.9 Budaya Populer dan Kekuatan Lunak

Gelombang Korea dan Budaya Populer Transnasional

Jika budaya populer global di abad ke-20 didominasi oleh produk Amerika (*Hollywood*, musik pop, makanan cepat saji), abad ke-21 menyaksikan diversifikasi sumber budaya populer. Gelombang Korea atau ***Hallyu***—penyebaran dramatis drama Korea, K-pop, film, dan mode—menunjukkan bahwa kekuatan lunak budaya tidak lagi monopoli Barat.

Joseph Nye (2004) mendefinisikan **kekuatan lunak** (*soft power*) sebagai kemampuan mempengaruhi preferensi orang lain melalui daya tarik dan persuasi, berbeda dengan kekuatan keras (*hard power*) yang berbasis paksaan atau pembayaran. Korea Selatan secara strategis menginvestasikan kekuatan lunak melalui industri kreatif—dari BTS yang tampil di PBB hingga Parasite yang memenangkan Oscar, dari Squid Game yang viral global hingga produk kecantikan Korea yang mendunia.

Di Indonesia, “Gelombang Korea” sangat masif. Konser K-pop terjual habis dalam hitungan menit; drama Korea mendominasi situs streaming; produk kosmetik dan mode Korea menjadi aspirasi. Yang menarik, *Hallyu* tidak hanya konsumsi pasif, tetapi juga menginspirasi produksi lokal: grup idola Indonesia mencoba meniru model K-pop; drama Indonesia mengadopsi sinematografi dan penceritaan drama Korea.

Koichi Iwabuchi (2002) menganalisis bagaimana produk budaya populer Asia Timur menciptakan "lalu lintas budaya intra-Asia" (*intra-Asian cultural traffic*)—arus budaya yang tidak melulu dari Barat ke Timur, melainkan juga antarnegara Asia. Ini menciptakan kedekatan budaya (*cultural proximity*)—konsumen Asia lebih mudah relate dengan narasi, estetika, dan nilai dalam produk budaya Asia dibanding produk Barat.

Budaya Partisipatoris dan Fandom

Henry Jenkins (2006) dalam *Convergence Culture* menunjukkan bagaimana budaya populer kontemporer ditandai oleh partisipasi aktif penggemar (*fans*). Penggemar bukan lagi konsumen pasif, melainkan prosumer

(produsen-konsumen) yang memproduksi fiksi penggemar (*fan fiction*), seni penggemar (*fan art*), lagu tutup (*cover songs*), meme, dan berbagai bentuk karya turunan (*derivative work*). Situs digital memfasilitasi dan mengamplifikasi budaya partisipatif ini.

Di Indonesia, fandom K-pop sangat terorganisir dan aktif. Mereka tidak hanya mengonsumsi konten, tetapi juga streaming massal untuk mendongkrak tampilan di YouTube, pemungutan suara terkoordinasi untuk penghargaan musik, hingga proyek amal atas nama idola mereka. Fandom menciptakan komunitas transnasional yang melampaui batas geografis—ARMY (penggemar BTS) Indonesia terhubung dengan ARMY global, berbagi informasi, strategi, dan solidaritas.

Namun, Jenkins juga mencatat **kesenjangan partisipatif** (*participatory gap*)—tidak semua orang memiliki akses, keterampilan, dan modal budaya untuk berpartisipasi secara setara dalam budaya digital. Di Indonesia, ini terlihat dalam kesenjangan digital—mereka yang memiliki akses internet cepat, perangkat memadai, dan literasi digital dapat berpartisipasi penuh, sementara yang tidak terpinggirkan dari budaya partisipatif.

14.10 Kota Global dan Urbanisasi di Dunia Berkembang

Globalisasi dan digitalisasi tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi dan mengonsumsi budaya, tetapi juga membentuk ulang ruang fisik di mana kita tinggal. Bagian ini akan mengeksplorasi bagaimana kota-kota global berkembang, bagaimana urbanisasi berlangsung di negara berkembang seperti Indonesia, dan bagaimana ruang urban dikontrol dan diatur dalam era kontemporer.

Teori Kota Global Saskia Sassen

Saskia Sassen (1991, 2001) dalam *The Global City* mengidentifikasi kemunculan "pusat komando dan kontrol" (*command and control centers*) dalam ekonomi global—kota-kota seperti New York, London, dan Tokyo yang berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi global. Kota global adalah tempat di mana keputusan korporat dan finansial utama diambil, layanan profesional tingkat tinggi (hukum, akuntansi, konsultasi, pemasaran) terkonsentrasi, dan inovasi diproduksi.

Yang menarik dari analisis Sassen adalah perhatiannya pada polarisasi sosial dalam kota global. Di satu sisi, kota global adalah rumah bagi profesional

bergaji tinggi—bankir, pengacara, konsultan yang bekerja untuk perusahaan multinasional. Di sisi lain, kota global juga memerlukan pasukan pekerja bergaji rendah—layanan kebersihan, keamanan, pengemudi pengiriman, pekerja rumah tangga—yang menyediakan layanan bagi kelas profesional. Polarisasi ini menciptakan ketimpangan ekstrem dalam satu ruang urban.

Sassen juga menekankan bahwa kota global bukan hanya di negara maju. Dalam edisi *Cities in a World Economy* (2012), ia mengidentifikasi kota global yang muncul di Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Jakarta, bersama dengan Bangkok, Manila, dan Mumbai, menjadi pusat komando regional yang menghubungkan ekonomi nasional mereka dengan jaringan global.

Urbanisasi di Indonesia dan Tantangannya

Indonesia mengalami urbanisasi cepat. Pada 1950, hanya 15% populasi tinggal di kota; pada 2020, lebih dari 56% populasi adalah urban. Proyeksi menyatakan bahwa pada 2050, lebih dari 70% populasi Indonesia akan tinggal di kota. Jakarta sebagai kota raksasa (*megacity*) dengan populasi lebih dari 30 juta di area metropolitan menghadapi berbagai tantangan: kemacetan lalu lintas yang kronis, polusi udara yang parah, banjir tahunan, dan ketimpangan sosio-ekonomi yang ekstrem.

Mike Davis (2006) dalam *Planet of Slums* memberikan analisis gelap tentang urbanisasi di negara berkembang. Berbeda dengan urbanisasi di negara maju yang disertai industrialisasi dan pertumbuhan lapangan kerja formal, urbanisasi di negara berkembang sering kali adalah "urbanisasi tanpa pertumbuhan"—migrasi massal ke kota tanpa diimbangi oleh penciptaan lapangan kerja memadai, menghasilkan proliferasi permukiman kumuh (*slum*) dan pemukiman informal.

Di Jakarta, dualisme ini sangat terlihat: gedung pencakar langit megah di Sudirman-Thamrin bertetangga dengan kampung padat dan kumuh; pusat perbelanjaan mewah dengan merek internasional berdampingan dengan pasar tradisional dan pedagang kaki lima; komunitas berpagar (*gated communities*) elit terpisahkan oleh tembok tinggi dari permukiman informal. AbdouMaliq Simone (2010) menganalisis bagaimana penduduk urban miskin di Jakarta mengembangkan "orang sebagai infrastruktur" (*people as infrastructure*)—solidaritas informal dan jejaring sosial yang berfungsi sebagai jaring pengaman dalam ketiadaan layanan publik memadai.

14.11 Ruang, Mobilitas, dan Kontrol

Heterotopia dan Non-Places

Michel Foucault (1986) memperkenalkan konsep **heterotopia**—ruang-ruang yang eksis secara fisik tetapi berfungsi sebagai "situs-tandingan" (*counter-sites*) yang mencerminkan, mengkontestasi, atau membalikkan ruang "normal". Contohnya adalah pemakaman, penjara, teater, atau taman—ruang yang memiliki logika dan fungsi berbeda dari ruang sehari-hari.

Marc Augé (1995) dalam *Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity* mengidentifikasi proliferasi **non-places** (bukan-tempat) dalam era kontemporer—ruang transit seperti bandara, stasiun kereta, jalan tol, hotel, supermarket. Non-places berbeda dari "tempat antropologis" (*anthropological places*) (tempat dengan sejarah, identitas, dan relasi sosial) karena sifat mereka yang sementara, anonim, dan terstandarisasi. Di non-places, individu berinteraksi melalui teks (tanda, instruksi) daripada interaksi sosial langsung.

Indonesia mengalami proliferasi non-places seiring modernisasi infrastruktur: bandara baru di berbagai kota, stasiun kereta MRT di Jakarta, area istirahat di jalan tol. Non-places ini memfasilitasi mobilitas, tetapi juga menciptakan pengalaman yang homogen dan impersonal—bandara Soekarno-Hatta terasa mirip dengan bandara di mana pun, dengan merek dan tata ruang yang terstandarisasi.

Segregasi Spasial dan Komunitas Berpagar

Teresa Caldeira (2000) dalam *City of Walls* menganalisis proliferasi komunitas berpagar di São Paulo, Brazil—enklave residensial yang dikelilingi tembok tinggi, keamanan ketat, dan berbagai fasilitas internal. Komunitas berpagar adalah respons terhadap ketakutan akan kriminalitas dan keinginan untuk eksklusivitas, tetapi mereka juga memperparah segregasi sosial dan fragmentasi ruang urban.

Di Indonesia, terutama di Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lain, komunitas berpagar menjamur—dari perumahan kelas menengah hingga kawasan mewah untuk elit. Mereka menawarkan keamanan, fasilitas lengkap (*clubhouse*, kolam renang, *gym*), dan homogenitas sosial (tetangga dengan latar belakang ekonomi serupa). Namun, komunitas berpagar juga berkontribusi pada fragmentasi kota: mereka menciptakan "pulau-pulau"

eksklusif yang terputus dari jaringan urban sekitarnya, mempersulit interaksi lintas kelas, dan memperlemah rasa kewargaan urban (*urban citizenship*).

Kontrol Ruang dan Surveilans Urban

David Harvey (1989) dalam *The Condition of Postmodernity* menganalisis bagaimana kapitalisme kontemporer menciptakan **penghancuran kreatif** (*creative destruction*)—penghancuran struktur dan ruang lama untuk digantikan dengan yang baru demi akumulasi modal. Di Jakarta, gentrifikasi menunjukkan proses ini: kawasan lama dibuldoser untuk dibangun apartemen mewah, pusat perbelanjaan, atau menara perkantoran, menggeser penduduk yang ada yang tidak mampu membayar sewa atau nilai properti yang meningkat drastis.

Surveilans dalam ruang urban juga meningkat. CCTV di jalan-jalan utama, pengenalan wajah di gedung-gedung komersial, pelacakan melalui jalan berbayar elektronik (*electronic road pricing*), dan pemantauan jejaring sosial menciptakan apa yang Stephen Graham (2005) sebut "geografis yang disortir perangkat lunak" (*software-sorted geographies*)—ruang yang diorganisir dan dikontrol melalui algoritma dan teknologi digital. Ini menghadirkan pertukaran antara keamanan dan privasi yang kontroversial.

14.12 Krisis Lingkungan dan Globalisasi Berkelanjutan

Setelah mengeksplorasi berbagai aspek globalisasi dan era digital—dari ekonomi hingga budaya, dari politik hingga ruang urban—kita sekarang akan menghadapi pertanyaan mendasar: ke mana arah transformasi ini membawa kita? Bagian ini akan membahas tantangan-tantangan kritis yang dihadapi masyarakat kontemporer dan berbagai skenario masa depan yang mungkin.

Antroposen dan Tantangan Ekologis

Paul Crutzen dan Eugene Stoermer (2000) memperkenalkan istilah **Antroposen** (*Anthropocene*)—era geologis baru di mana aktivitas manusia menjadi kekuatan dominan yang membentuk sistem bumi. Perubahan iklim, kepunahan massal spesies, polusi plastik di lautan, dan deforestasi menunjukkan dampak dramatis dari aktivitas manusia terhadap planet.

Ulrich Beck (1992) dalam *Risk Society* berpendapat bahwa modernitas menciptakan "risiko manufaktur" (*manufactured risks*)—risiko yang bukan

berasal dari alam, melainkan dari keputusan dan teknologi manusia sendiri. Perubahan iklim, polusi kimia, dan ancaman nuklir adalah risiko yang sifatnya global (tidak mengenal batas nasional), tidak terlihat (*invisible*), dan tidak dapat dibalik (*irreversible*).

Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap perubahan iklim: kenaikan permukaan air laut mengancam kota-kota pesisir, perubahan pola hujan mengganggu pertanian, dan peningkatan suhu memperparah bencana alam seperti kebakaran hutan. Jakarta bahkan tenggelam dengan kecepatan mengkhawatirkan—kombinasi dari penurunan tanah (*land subsidence*) akibat ekstraksi air tanah berlebihan dan kenaikan permukaan air laut membuat sebagian kawasan Jakarta turun hingga 10-20 cm per tahun.

Bruno Latour (2018) dalam *Down to Earth* berpendapat bahwa krisis ekologis memerlukan reorientasi fundamental dalam cara kita berpikir tentang politik dan masyarakat. Politik tidak lagi bisa dibingkai sebagai kiri versus kanan atau global versus lokal, melainkan harus dibingkai sebagai "pertanyaan terestrial" (*terrestrial question*)—bagaimana kita hidup di dan dengan bumi secara berkelanjutan.

Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau

Konsep **pembangunan berkelanjutan** (*sustainable development*)—"pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka" (Laporan Brundtland, 1987)—menjadi kerangka dominan dalam wacana pembangunan global. Namun, implementasinya penuh kontradiksi. Ekonomi masih berorientasi pada pertumbuhan PDB tanpa batas, sementara batas-batas ekologis semakin jelas.

Di Indonesia, ketegangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan sangat nyata. Industri kelapa sawit membawa pertumbuhan ekonomi signifikan, tetapi juga deforestasi massal dan hilangnya habitat orangutan. Pembangunan infrastruktur (jalan, bendungan, bandara) meningkatkan konektivitas dan ekonomi, tetapi juga merusak ekosistem dan mengancam komunitas adat.

Jason Moore (2015) mengajukan konsep **Kapitalosen** (*Capitalocene*)—alternatif dari Antroposen yang menekankan bahwa bukan "manusia" secara abstrak yang menyebabkan krisis ekologis, melainkan sistem kapitalis yang berorientasi pada akumulasi tanpa batas dan eksploitasi alam sebagai "hadiah gratis" (*free gift*). Solusinya bukan teknologi hijau dalam kerangka

kapitalisme yang ada, melainkan transformasi sistemik menuju ekonomi pasca-kapitalis yang berorientasi pada regenerasi ekologis dan keadilan sosial.

14.13 Ketimpangan, Keadilan, dan Inklusi Digital

Kesenjangan Digital dan Ekslusi

Optimisme awal internet adalah bahwa ia akan mendemokratisasi akses ke informasi dan peluang, menciptakan medan bermain yang setara di mana semua orang dapat berpartisipasi. Realitas jauh lebih kompleks. **Kesenjangan digital** (*digital divide*)—kesenjangan antara mereka yang memiliki akses ke teknologi digital dan mereka yang tidak—tetap menjadi isu krusial.

Van Dijk (2005) mengidentifikasi empat dimensi kesenjangan digital:

1. **Akses motivasional**: Keinginan untuk menggunakan teknologi digital. Banyak orang, terutama generasi tua, tidak merasa perlu atau takut menggunakan teknologi baru.
2. **Akses material**: Akses fisik ke perangkat dan internet. Di Indonesia, meskipun penetrasi telepon pintar tinggi, akses internet cepat dan terjangkau masih terbatas, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.
3. **Akses keterampilan**: Literasi digital—kemampuan menggunakan teknologi secara efektif. Banyak pengguna internet di Indonesia hanya mampu konsumsi konten (penggunaan pasif) tetapi tidak mampu produksi konten atau evaluasi kritis.
4. **Akses penggunaan**: Kemampuan menggunakan teknologi untuk tujuan yang bermakna dan bermanfaat. Kesenjangan digital bukan hanya soal akses, tetapi juga soal bagaimana teknologi digunakan—apakah untuk pendidikan, peluang ekonomi, partisipasi sipil, atau hanya untuk hiburan semata.

Di Indonesia, kesenjangan digital memiliki dimensi geografis (Jawa versus luar Jawa, urban versus pedesaan), ekonomis (kaya versus miskin), dan generasional (muda versus tua). Program pemerintah seperti Palapa Ring berupaya memperluas infrastruktur internet, tetapi infrastruktur saja tidak cukup tanpa program literasi digital dan mengatasi ketimpangan struktural.

Tata Kelola Aplikasi dan Demokratisasi Teknologi

Perusahaan teknologi besar (*Big Tech*)—Google, Facebook (Meta), Amazon, Apple, Microsoft—memiliki kekuasaan yang luar biasa: mereka mengontrol infrastruktur komunikasi global, mengumpulkan informasi miliaran pengguna, dan algoritma mereka membentuk apa yang kita lihat dan percayai. Tetapi mereka adalah entitas privat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis.

Nick Srnicek dan Alex Williams (2015) dalam *Inventing the Future* berpendapat bahwa kaum kiri politik perlu merebut kembali teknologi dari dominasi korporat dan membayangkannya kembali untuk tujuan emansipatoris. Mereka mengusulkan **koperativisme berbasis aplikasi** (*platform cooperativism*)—model di mana aplikasi digital dimiliki dan dikelola secara kooperatif oleh pengguna dan pekerja, bukan oleh pemegang saham kapitalis yang mengejar keuntungan maksimum.

Di Indonesia, eksperimen alternatif mulai muncul. Koperasi digital, ekonomi berbagi berbasis komunitas, dan aplikasi lokal yang lebih sensitif terhadap konteks Indonesia mencoba menawarkan model yang berbeda dari kapitalisme berbasis aplikasi global. Namun, mereka menghadapi tantangan besar: skala ekonomi yang dimiliki aplikasi raksasa, dominasi efek jaringan (*network effects*—nilai aplikasi meningkat seiring jumlah pengguna), dan akses ke modal ventura.

Evgeny Morozov (2013) dalam *To Save Everything, Click Here* mengkritik **solutionisme teknologi** (*technological solutionism*)—kepercayaan naif bahwa teknologi dapat menyelesaikan semua masalah sosial kompleks. Ia berpendapat bahwa banyak masalah yang didefinisikan sebagai "masalah teknis" sebenarnya adalah masalah politik yang memerlukan solusi politik, bukan sekadar aplikasi atau algoritma baru.

14.14 Masa Depan: Antara Distopia dan Utopia Digital

Kecerdasan Buatan dan Otomasi

Kemajuan dalam Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*/AI) dan pembelajaran mesin (*machine learning*) membuka peluang sekaligus ancaman besar. Di satu sisi, AI dapat meningkatkan produktivitas, memecahkan masalah kompleks (dari penemuan obat hingga pemodelan iklim), dan meningkatkan kualitas hidup. Di sisi lain, AI menghadirkan risiko: otomasi yang menghilangkan jutaan pekerjaan, bias algoritmik yang

memperkuat diskriminasi, dan konsentrasi kekuasaan di tangan mereka yang mengontrol teknologi AI.

Erik Brynjolfsson dan Andrew McAfee (2014) dalam *The Second Machine Age* berpendapat bahwa kita memasuki era di mana teknologi digital dapat melakukan tidak hanya tugas rutin (seperti di revolusi industrial), tetapi juga tugas kognitif yang kompleks. Ini membawa "pemisahan besar" (*great decoupling*)—produktivitas dan PDB tumbuh, tetapi upah median stagnan dan peluang kerja berkurang.

"Kemajuan AI dan otomasi membawa peluang produktivitas sekaligus risiko pengangguran massal. Bank Dunia memperkirakan lebih dari 50% pekerjaan Indonesia terancam otomasi dalam 20 tahun mendatang."

Di Indonesia, dampak otomasi sudah terasa: kasir otomatis di supermarket mengurangi kasir, *chatbot* menggantikan layanan pelanggan, dan algoritma menggantikan fungsi-fungsi administratif. Menurut Bank Dunia, lebih dari 50% pekerjaan di Indonesia berisiko tergantikan oleh otomasi dalam 20 tahun ke depan. Pertanyaan krusialnya adalah: bagaimana masyarakat akan merespons pengangguran teknologi massal?

Beberapa proposal radikal muncul: **Pendapatan Dasar Universal** (*Universal Basic Income*/UBI)—jaminan pendapatan dasar tanpa syarat bagi semua warga negara sebagai respons terhadap otomasi; **pengurangan jam kerja**—membagi pekerjaan yang tersedia ke lebih banyak orang dengan jam kerja lebih sedikit; **investasi dalam kapabilitas manusia**—peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang masif untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi ekonomi berbasis AI.

Metaverse dan Realitas Virtual

Mark Zuckerberg mendeklarasikan visi *"metaverse"*—dunia virtual imersif di mana orang bekerja, bersosialisasi, bermain, dan bahkan memiliki identitas dan properti digital. Ini bukan sekadar fiksi ilmiah; teknologi Realitas Virtual (*Virtual Reality*/VR) dan Realitas Tertambah (*Augmented Reality*/AR) berkembang pesat, dan investasi masif dituangkan untuk merealisasikan visi ini.

Sherry Turkle (2011) memperingatkan bahwa migrasi ke dunia virtual dapat memperparah isolasi dan kehilangan pijakan pada realitas fisik dan material. Jika orang menghabiskan mayoritas waktu mereka di dunia virtual—bekerja di kantor virtual, bersosialisasi dengan avatar virtual, bahkan memiliki romansa virtual—apa yang terjadi pada komunitas fisik, hubungan yang diwujudkan (*embodied relationships*), dan dunia material yang kita tinggali?

Matthew Ball (2022) dalam *The Metaverse* berpendapat bahwa metaverse bukan hanya permainan virtual atau jejaring sosial, melainkan "iterasi internet berikutnya" (*the next iteration of the internet*)—platform komputasi dan jaringan yang akan mengubah cara kita bekerja, belajar, berbelanja, dan berinteraksi. Namun, pertanyaan kritisnya adalah: siapa yang akan mengontrol metaverse? Jika metaverse dikendalikan oleh beberapa korporasi raksasa (seperti Meta/Facebook), kita mungkin menghadapi distopia digital di mana setiap aspek kehidupan virtual kita dimonetisasi dan diawasi.

Kontrak Sosial Baru untuk Era Digital

Glen Weyl, Eric Posner, dan Audrey Tang mengusulkan **Pasar Radikal** (*Radical Markets*) dan **pluralitas** (*plurality*)—kerangka untuk reformasi institusi ekonomi dan politik di era digital. Mereka berpendapat bahwa teknologi digital seharusnya digunakan untuk memperkuat demokrasi partisipatif, bukan untuk memperkuat kontrol korporat atau pemerintah.

Konsep seperti **martabat data** (*data dignity*) (Jaron Lanier)—gagasan bahwa informasi personal adalah kerja yang harus dikompensasi, bukan diekstraksi secara gratis oleh aplikasi—menawarkan alternatif terhadap kapitalisme pengawasan. **Milik bersama digital** (*digital commons*)—infrastruktur, informasi, dan pengetahuan yang dimiliki dan dikelola secara kolektif sebagai barang bersama—menawarkan alternatif terhadap privatisasi total ruang maya.

Di Indonesia, pertanyaan fundamental adalah: bagaimana kita dapat memanfaatkan peluang digitalisasi dan globalisasi sambil melindungi nilai-nilai, komunitas, dan kesejahteraan rakyat? Ini bukan hanya pertanyaan teknis, tetapi pertanyaan politik tentang jenis masyarakat yang kita inginkan di masa depan.

14.15 Ekonomi Berbasis Aplikasi: Gojek, Grab, dan Transformasi Mobilitas Urban

Setelah mengeksplorasi teori-teori global dan tantangan universal, bagian ini akan menerapkan kerangka teoretis tersebut untuk memahami transformasi spesifik yang terjadi di Indonesia. Melalui studi kasus konkret, kita akan melihat bagaimana globalisasi dan digitalisasi bermanifestasi dalam konteks lokal dengan segala kompleksitas dan nuansanya.

Dari Ojek Pangkalan ke Super App

Gojek, yang dimulai sebagai pusat panggilan untuk ojek motor di Jakarta pada 2010 dan meluncurkan aplikasi pada 2015, merepresentasikan transformasi dramatis dalam mobilitas urban Indonesia. Dalam waktu singkat, Gojek berkembang dari layanan antar-jemput menjadi "aplikasi super" (*super app*) yang menawarkan puluhan layanan: dari transportasi (GoRide, GoCar) hingga pengiriman (GoFood, GoMart), dari pembayaran digital (GoPay) hingga layanan profesional (GoClean, GoMassage).

Transformasi ini tidak dapat dipahami tanpa konteks spesifik Indonesia. Pertama, infrastruktur transportasi publik yang tidak memadai di kota-kota besar menciptakan permintaan masif untuk alternatif transportasi. Kedua, prevalensi ekonomi informal—jutaan ojek pangkalan yang beroperasi tanpa regulasi formal—menyediakan pasokan pengemudi yang besar. Ketiga, penetrasi telepon pintar yang tinggi memungkinkan aplikasi digital untuk berkembang dengan cepat.

Julie Yujie Chen (2018) menganalisis bagaimana aplikasi seperti Gojek menciptakan "ilusi otonomi" (*illusion of autonomy*)—pengemudi dipromosikan sebagai "mitra" yang independen dan fleksibel, tetapi realitasnya mereka sangat bergantung pada aplikasi untuk akses ke pelanggan, sistem penilaian membuat mereka harus menerima hampir semua pesanan, dan pendapatan mereka sangat fluktuatif.

Penelitian dalam **Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi** (Sinta 2) tentang pengalaman pengemudi Gojek di Jakarta menunjukkan ambivalensi mereka: banyak menghargai fleksibilitas (dapat mengatur jadwal sendiri, tidak ada atasan langsung) dan pendapatan yang lebih tinggi dibanding pekerjaan informal alternatif; tetapi mereka juga mengalami tekanan—target poin untuk tetap mendapat pesanan, sistem penilaian yang membuat mereka rentan terhadap pelanggan yang tidak adil, dan ketiadaan jaminan sosial atau tunjangan.

Ekonomi Aplikasi dan Kontestasi Regulasi

Kemunculan aplikasi antar-jemput dan pengiriman memicu kontestasi dengan incumbent: pengemudi taksi konvensional melakukan demonstrasi massal menolak Uber dan Grab, pedagang tradisional khawatir kalah bersaing dengan toko daring di aplikasi. Pemerintah berupaya meregulasi—dari penetapan tarif minimum hingga persyaratan untuk kemitraan dengan koperasi—tetapi regulasi sering tertinggal dari inovasi teknologi.

Nick Srnicek (2017) berpendapat bahwa kapitalisme berbasis aplikasi menciptakan "efek jaringan" (*network effects*) dan "skala ekonomi" (*economies of scale*) yang cenderung menghasilkan monopoli atau oligopoli. Di Indonesia, meskipun awalnya banyak pemain (Gojek, Grab, Uber), konsolidasi terjadi—Uber keluar dan bergabung dengan Grab; sekarang pasar didominasi oleh dua pemain besar. Ini memberi mereka daya tawar untuk menekan komisi dari pedagang, menurunkan kompensasi pengemudi, dan menaikkan harga untuk konsumen.

Kritik lain adalah tentang sifat ekstraktif ekonomi aplikasi. Informasi dan nilai diciptakan di Indonesia (dari pengemudi, pedagang, dan konsumen Indonesia), tetapi kepemilikan dan kontrol ada pada korporasi dengan investor asing. Grab, misalnya, dimiliki oleh modal ventura Singapura, Jepang, dan Amerika; Gojek juga memiliki investor asing mayoritas. Pertanyaan kedaulatannya menjadi relevan: siapa yang pada akhirnya mendapat manfaat dari ekonomi aplikasi Indonesia?

14.16 Jejaring Sosial dan Politik: Dari Reformasi Hingga Polarisasi

Jejaring Sosial sebagai Arena Politik Baru

Jejaring sosial telah mentransformasi lanskap politik Indonesia secara fundamental. Kampanye politik tidak lagi hanya terjadi di rapat umum fisik atau di media massa tradisional, tetapi juga—dan semakin dominan—di jejaring sosial. Politisi memiliki tim *buzzer* dan ahli strategi jejaring sosial; meme politik menyebar dengan viral; tagar (*hashtag*) menjadi arena kontestasi narasi.

Pilpres 2014 antara Jokowi dan Prabowo adalah momen penting di mana jejaring sosial memainkan peran sentral. Kedua kubu intensif menggunakan Twitter, Facebook, dan blog untuk mobilisasi pendukung, menyebarkan narasi, dan—sayangnya—juga disinformasi dan kampanye hitam (*black*

campaign). Penelitian dalam **ASPIKOM: Jurnal Ilmu Komunikasi** (Sinta 2) tentang kampanye digital Pilpres 2014 menunjukkan bagaimana jejaring sosial mengamplifikasi polarisasi: pendukung masing-masing kandidat membentuk ruang gema di mana mereka hanya terpapar narasi yang mengkonfirmasi bias mereka.

Pilpres 2019 memperparah polarisasi. Isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) yang seharusnya tabu menjadi amunisi kampanye; berita bohong menyebar dengan cepat (dari isu "Jokowi PKI" hingga "Prabowo akan impor 10 juta pekerja China"); dan ujaran kebencian (*hate speech*) menjadi merajalela. Pascapemilu, polarisasi tidak mereda—menghapus pertemanan (*unfriending*) dan memblokir orang dengan pandangan politik berbeda menjadi praktik umum.

Buzzer, Tokoh Berpengaruh Politik, dan Ekonomi Politik Disinformasi

Ross Tapsell (2017) dalam *Media Power in Indonesia* menganalisis bagaimana kekuasaan media berevolusi di era digital. Jika di era Orde Baru kekuasaan terkonsentrasi pada kontrol media massa oleh pemerintah dan kroni, di era digital kekuasaan lebih tersebar tetapi juga lebih tidak transparan. Buzzer—individu atau akun yang dibayar untuk menyebarkan narasi tertentu atau menyerang lawan—menjadi industri. Buzzer tidak hanya digunakan untuk politik, tetapi juga untuk perang merek, perselisihan personal, dan pembunuhan karakter.

Ekonomi politik disinformasi menunjukkan bahwa berita bohong bukan semata-mata "polusi" dalam ekosistem informasi, melainkan sering kali diproduksi dan disebarkan secara strategis untuk tujuan politik atau ekonomi. Ada aktor yang diuntungkan dari disinformasi: politisi yang ingin mendiskreditkan lawan, media partisan yang mendapat lalu lintas dan pendapatan iklan dari konten sensasional, dan buzzer yang dibayar untuk menyebarkan narasi.

Yang mengkhawatirkan, kepercayaan terhadap institusi informasi menurun drastis. Penelitian Edelman Trust Barometer menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap media di Indonesia relatif rendah; banyak orang lebih percaya informasi dari grup WhatsApp atau tokoh berpengaruh jejaring sosial dibanding jurnalisme profesional. Ini menciptakan "krisis epistemik" (*epistemic crisis*)—ketika tidak ada lagi realitas bersama atau fakta yang disepakati, musyawarah demokratis menjadi hampir mustahil.

14.17 Perdagangan Elektronik dan Transformasi Ritel

Dari Pasar Tradisional ke Aplikasi Digital

Pertumbuhan perdagangan elektronik (*e-commerce*) di Indonesia sangat dramatis. Nilai transaksi meningkat dari $1,7 miliar pada 2014 menjadi lebih dari $40 miliar pada 2021, dan diproyeksikan mencapai $80 miliar pada 2025. Aplikasi seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak mentransformasi cara orang berbelanja—dari mode hingga elektronik, dari bahan makanan hingga layanan.

"Perdagangan elektronik Indonesia tumbuh pesat, memberikan akses produk lebih luas namun menekan pasar tradisional dan toko kecil. Dominasi aplikasi dengan investor asing menciptakan asimetri kekuasaan terhadap pedagang yang bergantung pada algoritma dan kebijakan aplikasi tanpa transparansi penggunaan data."

Perdagangan elektronik memberikan manfaat nyata: konsumen mendapat akses ke produk lebih beragam dengan harga kompetitif; UKM mendapat akses ke pasar yang lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik; dan efisiensi logistik meningkat melalui optimisasi rute pengiriman. Namun, transformasi ini juga menimbulkan gangguan (*disruption*) dan kekhawatiran.

Pasar tradisional dan toko ritel kecil menghadapi tekanan berat. Mereka tidak dapat bersaing dengan harga perdagangan elektronik yang didiskon agresif (seringkali disubsidi oleh modal ventura untuk menguasai pangsa pasar), kenyamanan belanja dari rumah, dan variasi produk yang ditawarkan aplikasi. Banyak toko tutup, pedagang kehilangan mata pencaharian, dan ruang sosial pasar tradisional—yang bukan hanya tempat transaksi ekonomi tetapi juga sosialisasi komunitas—terancam hilang.

Dominasi Aplikasi dan Regulasi

Seperti di sektor antar-jemput, perdagangan elektronik Indonesia didominasi oleh beberapa aplikasi besar dengan dukungan investor asing masif. Tokopedia dan Bukalapak adalah *local unicorn*, tetapi mereka juga memiliki investor asing mayoritas; Shopee dimiliki oleh Sea Group (Singapura) dengan investor China (Tencent); Lazada dimiliki oleh Alibaba (China).

Dominasi aplikasi ini menghadirkan isu asimetri kekuasaan. Pedagang yang berjualan di aplikasi sangat bergantung pada algoritma dan kebijakan aplikasi—perubahan tarif komisi, perubahan algoritma peringkat, atau perubahan kebijakan dapat secara dramatis mempengaruhi bisnis mereka. Aplikasi juga mengumpulkan informasi transaksi yang sangat berharga tetapi tidak selalu transparan bagaimana informasi tersebut digunakan.

Pemerintah Indonesia berupaya meregulasi—dari persyaratan penyimpanan informasi lokal hingga pajak perdagangan elektronik, dari perlindungan konsumen hingga kebijakan kompetisi. Namun, tantangannya adalah bagaimana meregulasi aplikasi global yang operasinya lintas batas yurisdiksi, sambil tidak menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital.

14.18 Budaya Tokoh Berpengaruh dan Ekonomi Kreator Digital

Dari Selebritas Tradisional ke Tokoh Berpengaruh Digital

Indonesia memiliki ekonomi tokoh berpengaruh yang vibrant. YouTuber seperti Atta Halilintar dengan puluhan juta pelanggan (*subscribers*), selebgram seperti Rachel Vennya dengan jutaan pengikut, dan TikToker dengan konten viral membentuk lanskap baru ketenaran (*celebrityhood*). Berbeda dengan selebriti tradisional (aktor, penyanyi) yang kemasyhurannya datang dari industri hiburan formal, tokoh berpengaruh membangun khalayak secara "organik" melalui konten yang mereka produksi sendiri di situs digital.

Crystal Abidin (2018) dalam *Internet Celebrity* menganalisis bagaimana tokoh berpengaruh menciptakan "amatirisme terkalibrasi" (*calibrated amateurism*)—mereka tampil "autentik" dan "relate" (seperti teman biasa), tetapi di balik itu ada presentasi-diri strategis, produksi profesional, dan monetisasi yang diperhitungkan. Autentisitas menjadi diperformakan dan dikomodifikasi.

Tokoh berpengaruh Indonesia sangat beragam—dari vlogger kecantikan yang mengulas kosmetik, blogger makanan yang mengeksplorasi kuliner, hingga komentator politik yang menganalisis isu publik. Yang menarik, banyak tokoh berpengaruh Indonesia yang kontennya tentang kehidupan sehari-hari: dari vlog harian keluarga, mukbang (makan di depan kamera), hingga tantangan (*challenge*) dan prank. Konten yang tampaknya biasa-biasa saja ini justru mendapat keterlibatan tinggi karena khalayak merasa "terhubung" dengan tokoh berpengaruh.

Ekonomi Kreator: Peluang dan Eksploitasi

Ekonomi kreator menawarkan peluang—siapa pun dengan telepon pintar dan koneksi internet bisa menjadi pembuat konten dan potensial menghasilkan pendapatan. Namun, realitasnya jauh lebih kompleks. Penelitian dalam **Jurnal Studi Komunikasi dan Media** (Sinta 3) tentang praktik YouTuber Indonesia menunjukkan bahwa:

1. **Dinamika pemenang mengambil semua**: Sebagian kecil kreator mendapat mayoritas pendapatan dan perhatian, sementara mayoritas kreator mendapat sangat sedikit atau tidak sama sekali.
2. **Ketergantungan pada aplikasi**: Kreator sangat bergantung pada algoritma aplikasi—perubahan algoritma YouTube atau Instagram dapat drastis mempengaruhi jangkauan dan pendapatan mereka.
3. **Kelelahan dan ketidakpastian**: Tekanan untuk secara konsisten memproduksi konten, mempertahankan keterlibatan khalayak, dan beradaptasi dengan tren yang berubah menghasilkan kelelahan (*burnout*). Pendapatan juga sangat tidak pasti—tidak ada kontrak atau jaminan, pendapatan fluktuatif berdasarkan tampilan dan tarif iklan.
4. **Kemitraan merek dan dilema autentisitas**: Banyak pendapatan kreator datang dari kemitraan merek (promosi, kemitraan berbayar). Namun, ini menciptakan ketegangan dengan autentisitas—khalayak mungkin merasa "dikhianati" jika tokoh berpengaruh terlalu komersial atau mempromosikan produk yang tidak benar-benar mereka sukai.

Brooke Erin Duffy (2017) menyebut ini **kerja aspirasional** (*aspirational labor*)—kerja yang dilakukan dengan harapan bahwa minat akan berubah menjadi profesi yang menguntungkan, tetapi seringkali eksploitatif karena tidak ada kompensasi memadai atau jaminan sukses.

14.19 Rekapitulasi Konsep Kunci

Bab ini telah mengeksplorasi berbagai teori dan fenomena terkait globalisasi dan era digital. **Dari teori globalisasi**, kita belajar bahwa globalisasi bukan proses homogenisasi linear, melainkan kompleks yang melibatkan intensifikasi hubungan lintas batas (Giddens), berbagai lanskap (*scapes*) yang bergerak dengan logika berbeda menciptakan ketidakselarasan (Appadurai), glokalisasi sebagai dialektika antara global dan lokal (Robertson), mobilitas

sebagai paradigma baru untuk memahami kehidupan sosial kontemporer (Urry), dan kota global sebagai pusat komando ekonomi global dengan polarisasi sosial internal (Sassen).

> "… teori globalisasi sebagai proses kompleks intensifikasi hubungan lintas batas, lanskap yang menciptakan ketidakselarasan, glokalisasi global-lokal, dan kota global dengan polarisasi sosial. Teori masyarakat digital mengungkap transformasi komunikasi, identitas yang dikomodifikasi, kapitalisme aplikasi ekstraktif, dan perubahan ruang-waktu. Studi kasus Indonesia menunjukkan ekonomi aplikasi menciptakan fleksibilitas sekaligus ketidakpastian, jejaring sosial memperparah polarisasi politik, dan budaya tokoh berpengaruh menghasilkan kerja aspirasional eksploitatif…"

Dari teori masyarakat digital, kita memahami bahwa teknologi digital mentransformasi komunikasi dari media massa ke komunikasi-diri massal (Castells), identitas menjadi diperformakan dan dikomodifikasi di jejaring sosial (Marwick, Turkle), ekonomi melalui kapitalisme berbasis aplikasi yang ekstraktif (Srnicek, Zuboff), politik melalui budaya partisipatif yang juga menghadirkan polarisasi dan disinformasi, serta ruang dan waktu melalui konektivitas digital yang mengubah pengalaman jarak dan kehadiran.

Dari studi kasus Indonesia, kita melihat bagaimana teori-teori ini termanifestasi dalam konteks spesifik: ekonomi berbasis aplikasi (Gojek, Grab) menciptakan fleksibilitas sekaligus ketidakpastian, jejaring sosial mentransformasi politik tetapi juga memperparah polarisasi, perdagangan elektronik memberikan akses dan efisiensi tetapi juga mengancam ritel tradisional, dan budaya tokoh berpengaruh menawarkan peluang tetapi juga menciptakan kerja aspirasional yang eksploitatif.

14.20 Paradoks dan Kontradiksi Era Digital

Analisis di atas mengungkap berbagai paradoks fundamental yang harus kita hadapi. **Paradoks konektivitas**: Teknologi yang dirancang untuk menghubungkan justru membuat kita merasa lebih terisolasi (Turkle). Kita

memiliki ratusan "teman" di Facebook tetapi merasa kesepian; kita terus-menerus terhubung tetapi jarang hadir sepenuhnya.

Paradoks informasi: Di era kelimpahan informasi, kita justru mengalami kekacauan informasi (Wardle & Derakhshan). Akses ke informasi tidak otomatis menghasilkan kewargaan yang terinformasi; sebaliknya, beban berlebih informasi dan proliferasi disinformasi membuat kebenaran semakin sulit dibedakan.

Paradoks demokratisasi: Situs digital menurunkan hambatan untuk partisipasi, tetapi juga menciptakan bentuk-bentuk ketimpangan baru. Siapa pun dapat menjadi kreator, tetapi dinamika pemenang-mengambil-semua membuat mayoritas tidak mendapat kompensasi memadai. Siapa pun dapat bersuara di jejaring sosial, tetapi algoritma menentukan siapa yang didengar.

Paradoks kebebasan: Teknologi digital menawarkan kebebasan dan fleksibilitas (kerja jarak jauh, kerja lepas, pembuatan konten), tetapi juga mengintensifkan kontrol dan pengawasan. Kita "bebas" bekerja di mana saja, tetapi selalu siaga dan dapat dilacak. Kita "bebas" menjadi pengusaha digital, tetapi sepenuhnya bergantung pada aplikasi yang dapat mengubah aturan kapan saja.

Paradoks globalisasi: Globalisasi menciptakan saling keterhubungan dan saling ketergantungan, tetapi juga reaksi balik nasionalisme dan *xenofobia*. Globalisasi membawa ratusan juta orang keluar dari kemiskinan, tetapi juga meningkatkan ketimpangan dan memicu krisis iklim. Globalisasi menyebarkan gagasan hak asasi manusia universal, tetapi juga memfasilitasi eksploitasi melalui rantai nilai global.

14.21 Pertanyaan Normatif: Masyarakat yang Bagaimana?

Analisis deskriptif dan teoretis harus disertai refleksi normatif: masyarakat seperti apa yang kita inginkan, dan bagaimana teknologi dan globalisasi seharusnya dibentuk untuk mencapai visi tersebut?

Tentang keadilan: Bagaimana memastikan bahwa manfaat globalisasi dan digitalisasi didistribusikan secara adil, tidak hanya dinikmati oleh elit global atau pengadopsi awal? Ini memerlukan perpajakan progresif untuk redistribusi kekayaan, investasi dalam layanan publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur), program literasi digital untuk menjembatani kesenjangan digital, dan regulasi untuk melindungi pekerja dalam ekonomi lepas.

Tentang demokrasi: Bagaimana memastikan bahwa teknologi digital memperkuat—bukan menggerogoti—demokrasi? Ini memerlukan transparansi dan akuntabilitas algoritma aplikasi, regulasi untuk melawan disinformasi tanpa mengorbankan kebebasan berbicara, pendanaan publik untuk jurnalisme berkualitas, dan pendidikan kewargaan untuk literasi media kritis.

Tentang keberlanjutan: Bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi sesuai dengan batas-batas ekologis? Ini memerlukan transisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan, ekonomi sirkular yang mengurangi limbah, regulasi untuk tanggung jawab lingkungan korporat, dan pergeseran budaya dari konsumerisme ke keberlanjutan.

Tentang martabat: Bagaimana memastikan bahwa teknologi menghormati martabat manusia, privasi, dan otonomi? Ini memerlukan undang-undang perlindungan informasi yang kuat, hak untuk penjelasan terhadap keputusan algoritmik, larangan terhadap AI yang diskriminatif, dan panduan etis untuk pengembangan teknologi.

Kesimpulan

Globalisasi dan era digital telah mentransformasi masyarakat secara fundamental—dari cara kita berkomunikasi hingga cara kita bekerja, dari struktur ekonomi hingga praktik politik, dari identitas personal hingga ruang urban. Transformasi ini membawa peluang luar biasa: konektivitas global memungkinkan pertukaran gagasan dan kolaborasi lintas batas; teknologi digital meningkatkan produktivitas dan akses ke informasi; ekonomi berbasis aplikasi menciptakan peluang baru untuk kewirausahaan.

Namun, transformasi ini juga menghadirkan tantangan serius: ketimpangan yang meningkat baik antarnegara maupun dalam negara; polarisasi politik dan fragmentasi ruang publik; kapitalisme pengawasan yang mengkomodifikasi setiap aspek kehidupan; krisis ekologis yang mengancam keberlanjutan planet; dan ketidakpastian yang dialami pekerja dalam ekonomi lepas. Paradoks-paradoks ini menunjukkan bahwa teknologi dan globalisasi bukan secara inheren emansipatoris atau opresif—mereka adalah medan yang diperebutkan (*contested terrains*) yang dibentuk oleh relasi kekuasaan, pilihan politik, dan nilai budaya.

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi besar dan ekonomi yang tumbuh, berada di persimpangan kritis (*critical juncture*). Pilihan yang dibuat hari ini—tentang regulasi ekonomi berbasis aplikasi, tentang investasi

dalam pendidikan dan infrastruktur digital, tentang bagaimana merespons perubahan iklim, tentang bagaimana melindungi demokrasi dari disinformasi—akan menentukan lintasan Indonesia di abad ke-21.

Teori sosial yang telah kita eksplorasi dalam bab ini menyediakan alat konseptual untuk memahami kompleksitas era kontemporer. Dari mobilitas Urry hingga kapitalisme berbasis aplikasi Srnicek, dari lanskap Appadurai hingga analisis isolasi digital Turkle, dari kota global Sassen hingga masyarakat transparan Han—teori-teori ini membantu kita melihat pola, mengidentifikasi mekanisme, dan memahami konsekuensi dari transformasi yang kita alami.

Namun, pemahaman saja tidak cukup. Seperti Marx menulis dalam *Theses on Feuerbach*: "Para filsuf hanya menafsirkan dunia dengan berbagai cara; namun, intinya adalah mengubahnya" ("Philosophers have only interpreted the world in various ways; the point, however, is to change it"). Tantangan kita adalah tidak hanya memahami globalisasi dan digitalisasi, tetapi juga secara aktif membentuk mereka untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, demokratis, berkelanjutan, dan manusiawi. Ini memerlukan kritik teoretis yang tajam, keterlibatan politik yang serius, dan solidaritas kolektif yang melintasi batas—lokal, nasional, dan global.

Masa depan bukanlah pilihan biner antara utopia digital atau distopia pengawasan. Masa depan adalah apa yang kita buat bersama, melalui pilihan dan perjuangan kita hari ini. Dan alat teoretis yang kita pelajari adalah senjata intelektual untuk perjuangan tersebut.

Referensi Bab 14

Sumber Primer

Appadurai, A. (1990). Disjuncture and difference in the global cultural economy. *Theory, Culture & Society*, 7(2), 295-310. https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/materiali/2014-2015/Appadurai_Disjuncture_and_Difference_in_the_Global_Cultural_Economy.pdf

Appadurai, A. (1996). *Modernity at large: Cultural dimensions of globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press. https://archive.org/details/modernityatlarge0000appa

Bauman, Z. (2007). *Consuming life*. Cambridge: Polity Press.

Beck, U. (1992). *Risk society: Towards a new modernity*. London: Sage.

Castells, M. (1996). *The rise of the network society* (The Information Age trilogy, Volume 1). Oxford: Blackwell.

Castells, M. (2009). *Communication power*. Oxford: Oxford University Press.

Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the internet age*. Cambridge: Polity Press.

Crutzen, P. J., & Stoermer, E. F. (2000). The Anthropocene. Global Change Newsletter, 41, 17-18.

Edelman. (2024). Edelman trust barometer 2024. New York: Edelman. https://www.edelman.com/trust/trust-barometer

Giddens, A. (1990). The consequences of modernity. Stanford: Stanford University Press.

Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. Garden City, NY: Doubleday.

Graham, S. (2005). Software-sorted geographies. Progress in Human Geography, 29(5), 562-580. https://doi.org/10.1191/0309132505ph568oa

Han, B.-C. (2015). *The transparency society*. Stanford: Stanford University Press.

Harvey, D. (1989). The condition of postmodernity: An enquiry into the origins of cultural change. Oxford: Blackwell.

Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.

Jenkins, H. (2006). *Convergence culture: Where old and new media collide*. New York: NYU Press.

Nye, J. S. (2004). Soft power: The means to success in world politics. New York: PublicAffairs.

Pew Research Center. (2014). Political polarization in the American public. Washington, DC: Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/politics/2014/06/12/political-polarization-in-the-american-public/

Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6. https://doi.org/10.1108/10748120110424816

Robertson, R. (1995). Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity. Dalam M. Featherstone, S. Lash, & R. Robertson (Eds.), *Global modernities* (hal. 25-44). London: Sage.

Sassen, S. (1991). *The global city: New York, London, Tokyo*. Princeton: Princeton University Press.

Sassen, S. (2012). *Cities in a world economy* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Schiller, H. I. (1976). Communication and cultural domination. White Plains, NY: International Arts and Sciences Press.

Srnicek, N. (2017). *Platform capitalism*. Cambridge: Polity Press. https://monoskop.org/images/8/89/Srnicek_Nick_Platform_Capitalism_2017.pdf

Tapscott, D. (1998). Growing up digital: The rise of the Net Generation. New York: McGraw-Hill.

Turkle, S. (1995). *Life on the screen: Identity in the age of the internet*. New York: Simon & Schuster. https://archive.org/details/lifeonscreen0000turk

Turkle, S. (2011). *Alone together: Why we expect more from technology and less from each other*. New York: Basic Books.

Urry, J. (2000). *Sociology beyond societies: Mobilities for the twenty-first century*. London: Routledge. https://archive.org/details/sociologybeyonds0000urry

Urry, J. (2007). *Mobilities*. Cambridge: Polity Press. https://archive.org/details/mobilities0000urry

Van Dijck, J. (2013). *The culture of connectivity: A critical history of social media*. Oxford: Oxford University Press.

Wallerstein, I. (1974). *The modern world-system I: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century*. New York: Academic Press.

Wikipedia. (2025). The Information Age trilogy. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Information_Age_(book_series)

Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism*. New York: PublicAffairs.

Jurnal Indonesia

ASPIKOM: Jurnal Ilmu Komunikasi - Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi. Portal: https://jurnalaspikom.org/

Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi - Universitas Diponegoro. Portal: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi

Jurnal Studi Komunikasi dan Media - BPSDMP Kominfo. Portal: https://jskm.kominfo.go.id

Literatur Pendukung

Abidin, C. (2018). *Internet celebrity: Understanding fame online*. Bingley: Emerald Publishing.

Augé, M. (1995). *Non-places: Introduction to an anthropology of supermodernity*. London: Verso.

Ball, M. (2022). *The metaverse: And how it will revolutionize everything*. New York: Liveright.

Baudrillard, J. (1970). *The consumer society: Myths and structures*. London: Sage.

Baym, N. (2018). *Playing to the crowd: Musicians, audiences, and the intimate work of connection*. New York: NYU Press.

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action. *Information, Communication & Society*, 15(5), 739-768.

Boyd, D. (2014). *It's complicated: The social lives of networked teens*. New Haven: Yale University Press.

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. New York: W.W. Norton.

Caldeira, T. (2000). *City of walls: Crime, segregation, and citizenship in São Paulo*. Berkeley: University of California Press.

Chen, J. Y. (2018). Thrown under the bus and outrunning it! The logic of Didi and taxi drivers' labour and activism in the on-demand economy. *New Media & Society*, 20(8), 2691-2711.

Credit Suisse. (2021). *Global wealth report 2021*. Zurich: Credit Suisse Research Institute.

Davis, M. (2006). *Planet of slums*. London: Verso.

Duffy, B. E. (2017). *(Not) getting paid to do what you love: Gender, social media, and aspirational work*. New Haven: Yale University Press.

Featherstone, M. (1991). *Consumer culture and postmodernism*. London: Sage.

Foucault, M. (1975). *Discipline and punish: The birth of the prison*. New York: Vintage Books.

Gillespie, T. (2014). The relevance of algorithms. Dalam T. Gillespie, P. Boczkowski, & K. Foot (Eds.), *Media technologies: Essays on communication, materiality, and society* (hal. 167-194). Cambridge, MA: MIT Press.

Held, D., & McGrew, A. (2007). *Globalization/anti-globalization: Beyond the great divide* (2nd ed.). Cambridge: Polity Press.

Iwabuchi, K. (2002). *Recentering globalization: Popular culture and Japanese transnationalism*. Durham, NC: Duke University Press.

Latour, B. (2018). *Down to earth: Politics in the new climatic regime*. Cambridge: Polity Press.

Levitt, P., & Glick Schiller, N. (2004). Conceptualizing simultaneity: A transnational social field perspective on society. *International Migration Review*, 38(3), 1002-1039.

Lyon, D. (2001). *Surveillance society: Monitoring everyday life*. Buckingham: Open University Press.

Marwick, A. (2013). *Status update: Celebrity, publicity, and branding in the social media age*. New Haven: Yale University Press.

Milanović, B. (2016). *Global inequality: A new approach for the age of globalization*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Moore, J. W. (2015). *Capitalism in the web of life: Ecology and the accumulation of capital*. London: Verso.

Morozov, E. (2013). *To save everything, click here: The folly of technological solutionism*. New York: PublicAffairs.

Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the internet is hiding from you*. New York: Penguin Press.

Pieterse, J. N. (2009). *Globalization and culture: Global mélange* (2nd ed.). Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Ritzer, G. (1993). *The McDonaldization of society*. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.

Simone, A. (2010). *City life from Jakarta to Dakar: Movements at the crossroads*. New York: Routledge.

Srnicek, N., & Williams, A. (2015). *Inventing the future: Postcapitalism and a world without work*. London: Verso.

Sunstein, C. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton: Princeton University Press.

Tapsell, R. (2017). *Media power in Indonesia: Oligarchs, citizens and the digital revolution*. London: Rowman & Littlefield.

Van Dijk, J. (2005). *The deepening divide: Inequality in the information society*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Vertovec, S. (2009). *Transnationalism*. London: Routledge.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Strasbourg: Council of Europe.

We Are Social & Hootsuite. (2024). *Digital 2024: Indonesia*. Singapore: We Are Social.

World Bank. (2016). *World development report 2016: Digital dividends*. Washington, DC: World Bank.

World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future* (Brundtland Report). Oxford: Oxford University Press.

BAB 15

TEORI DEKOLONIAL DAN EPISTEMOLOGI SELATAN

Pendahuluan

Teori dekolonial dan epistemologi Selatan merupakan respons kritis terhadap dominasi epistemologis Barat yang telah berlangsung sejak era kolonialisme hingga era kontemporer. Bab ini mengeksplorasi bagaimana kolonialisme tidak hanya meninggalkan jejak dalam struktur politik dan ekonomi, tetapi juga dalam cara kita memproduksi pengetahuan, memahami dunia, dan mendefinisikan apa yang dianggap sebagai "pengetahuan yang sah dan dapat diterima". Proyek dekolonial tidak sekadar mengkritik imperialisme atau merayakan kemerdekaan politik, tetapi mengungkap dan mentransformasi kolonialitas—pola kekuasaan kolonial yang terus berlanjut—dalam produksi pengetahuan, pembentukan identitas subjek, dan pengorganisasian kehidupan sosial.

Munculnya teori dekolonial pada akhir abad ke-20, khususnya dari Amerika Latin melalui Kelompok Modernitas/Kolonialitas, menandai pergeseran fundamental dalam teori sosial global. Pemikir seperti Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Enrique Dussel, dan Arturo Escobar mengembangkan konsep-konsep seperti kolonialitas kekuasaan, kolonialitas pengetahuan, dan kolonialitas keberadaan untuk menjelaskan bagaimana dominasi kolonial terus beroperasi meskipun kolonialisme formal telah berakhir. Sejalan dengan perkembangan ini, Boaventura de Sousa Santos dari Portugal mengembangkan epistemologi Selatan yang menekankan keragaman cara mengetahui dan keadilan kognitif global, sementara Raewyn Connell dari Australia mengkritik dominasi teori sosial yang berpusat pada Utara dalam karya monumentalnya tentang teori Selatan (Connell, 2007).

Dalam konteks Indonesia, diskusi tentang dekolonisasi pengetahuan memiliki relevansi khusus mengingat pengalaman panjang sebagai negara terjajah dan posisinya sebagai negara pascakolonial yang terus bernegosiasi dengan warisan kolonial dalam berbagai domain kehidupan sosial. Kebutuhan untuk mengembangkan ilmu sosial yang berakar pada realitas lokal dan tidak sekadar mengimpor teori dari Barat menjadi semakin mendesak di era globalisasi yang ditandai oleh intensifikasi pertukaran pengetahuan namun juga reproduksi hierarki epistemologis global. Pengalaman Indonesia dengan

sistem pendidikan kolonial Belanda yang sengaja menciptakan kesenjangan pengetahuan antara elit pribumi dan masyarakat luas, serta dominasi teori-teori Barat dalam kurikulum ilmu sosial kontemporer, membuat proyek dekolonial menjadi relevan dan mendesak (Sosiohumaniora, 2020).

Bab ini akan mengeksplorasi genealogi pemikiran dekolonial dari kritik pascakolonial Edward Said dan Gayatri Spivak hingga proyek dekolonial kontemporer yang lebih radikal. Pembahasan akan mencakup konsep-konsep kunci seperti kolonialitas kekuasaan, epistemisida (pemusnahan pengetahuan), rasionalitas transmodern, dan ekologi pengetahuan. Lebih lanjut, bab ini akan menganalisis kontribusi pemikir-pemikir Selatan dalam mengembangkan epistemologi alternatif yang mengakui keabsahan pengetahuan non-Barat dan mengkritik klaim universalitas epistemologi Eropa. Terakhir, bab ini akan mendiskusikan implikasi teori dekolonial bagi praktik ilmu sosial di Indonesia, termasuk tantangan dalam mengembangkan teori sosial yang berakar pada pengalaman lokal namun tetap memiliki daya penjelas yang memadai.

15.1 Dari Postkolonial Menuju Dekolonial

Kritik Postkolonial: Said, Spivak, dan Chakrabarty

Pemikiran dekolonial tidak muncul dalam ruang hampa intelektual, tetapi berkembang dari dan melampaui tradisi kritik pascakolonial yang dimulai pada 1970-1980an. Edward Said melalui karya seminalnya *Orientalism* (1978) membuka jalan bagi kritik sistematis terhadap bagaimana Barat mengkonstruksi pengetahuan tentang Timur sebagai entitas yang inferior, eksotik, dan berbahaya. Said menunjukkan bahwa orientalisme bukan sekadar prasangka atau stereotipe, tetapi sebuah sistem diskursif yang kompleks yang memungkinkan dan melegitimasi dominasi kolonial. Orientalisme, menurut Said, adalah cara Barat untuk mendefinisikan dirinya melalui penciptaan Timur sebagai yang Lain—entitas yang berbeda secara fundamental—sebuah proses yang melibatkan institusi akademik, sastra, administrasi kolonial, dan representasi budaya.

Kritik Said terhadap orientalisme mengungkap bahwa pengetahuan tidak pernah netral tetapi selalu terkait dengan relasi kekuasaan. Produksi pengetahuan tentang Timur oleh sarjana, administrator, dan penulis Barat tidak sekadar mendeskripsikan realitas Timur tetapi secara aktif mengkonstruksi Timur sesuai dengan kepentingan dan imajinasi Barat. Representasi Timur sebagai stagnan, despotik, dan irasional berlawanan

dengan representasi Barat sebagai progresif, demokratik, dan rasional menciptakan hierarki epistemologis yang melegitimasi intervensi kolonial sebagai misi peradaban. Said menunjukkan bagaimana institusi akademik seperti departemen studi Oriental, masyarakat geografis, dan museum etnografi berperan dalam produksi dan sirkulasi pengetahuan orientalis yang mendukung proyek imperialis (Said, 1978).

Gayatri Chakravorty Spivak memperdalam dan mengkomplikasi kritik pascakolonial melalui analisis yang lebih radikal tentang representasi dan subalternitas. Dalam esainya yang terkenal *"Can the Subaltern Speak?"* (1988), Spivak tidak hanya mengkritik bagaimana Barat merepresentasikan yang lain, tetapi juga menginterogasi posisi intelektual pascakolonial itu sendiri dan kemungkinan untuk merepresentasikan kelompok subaltern—kelompok yang termarjinalkan dan tidak memiliki akses pada kekuasaan. Spivak berpendapat bahwa kelompok subaltern, khususnya perempuan subaltern, tidak dapat berbicara dalam artian bahwa tidak ada ruang wacana yang memungkinkan mereka untuk didengar sebagai subjek yang otonom. Setiap upaya untuk berbicara atas nama subaltern, bahkan oleh intelektual pascakolonial yang bermaksud baik, cenderung mengreproduksi logika representasi kolonial yang mengobjektifikasi subaltern (Spivak, 1988).

Analisis Spivak tentang praktik *sati*—pembakaran janda—di India kolonial menunjukkan kompleksitas representasi dan agensi subaltern. Di satu sisi, administrator kolonial Inggris melarang *sati* dengan narasi heroik tentang penyelamatan perempuan India dari barbarisme tradisi lokal, sebuah narasi yang mereproduksi logika kolonial "laki-laki kulit putih menyelamatkan perempuan coklat dari laki-laki coklat." Di sisi lain, elit nasionalis India mempertahankan *sati* sebagai tradisi sakral yang harus dilindungi dari intervensi kolonial. Dalam kedua narasi ini, suara perempuan subaltern yang menjadi subjek dari praktik ini tidak terdengar. Mereka menjadi objek wacana kolonial dan nasionalis tetapi tidak pernah menjadi subjek yang dapat berbicara untuk dirinya sendiri.

Melanjutkan tradisi kritik pascakolonial ini, Dipesh Chakrabarty dalam *Provincializing Europe* (2000) mengembangkan kritik yang lebih fokus pada historiografi dan temporalitas kolonial. Chakrabarty berpendapat bahwa narasi historis Eropa tentang modernitas telah menjadi universal dan normatif, menciptakan apa yang disebutnya sebagai ruang tunggu sejarah di mana masyarakat non-Eropa dianggap tertinggal dan harus menunggu untuk mencapai tingkat perkembangan yang sudah dicapai Eropa. Proyek "provinsialisasi Eropa" yang diusulkan Chakrabarty bukan tentang menolak pemikiran Eropa tetapi tentang menunjukkan keterbatasan historisnya dan

mengakui pluralitas modernitas yang tidak dapat direduksi menjadi satu narasi tunggal (Chakrabarty, 2000).

Chakrabarty mengkritik asumsi historiografi Eropa bahwa sejarah memiliki temporalitas yang homogen dan linear di mana semua masyarakat bergerak dalam lintasan yang sama dengan kecepatan berbeda. Temporalitas kolonial ini menempatkan Eropa sebagai masa depan dan masyarakat kolonial sebagai masa lalu yang harus dilampaui. Dalam konteks India, narasi ini menghasilkan dikotomi antara "masa lalu tradisional" yang dianggap stagnan dan "masa depan modern" yang diasosiasikan dengan Eropa. Chakrabarty menunjukkan bagaimana dikotomi ini mengabaikan keberagaman temporal dalam masyarakat kolonial di mana berbagai modalitas waktu dan historisitas bisa beroperasi secara bersamaan. Penelitian tentang dekolonisasi pendidikan tinggi Indonesia menunjukkan bagaimana temporalitas kolonial ini masih beroperasi dalam sistem pendidikan kontemporer (Kawistara, 2021).

Kelompok Modernitas/Kolonialitas: Quijano dan Mignolo

Kelompok Modernitas/Kolonialitas yang berkembang di Amerika Latin sejak 1990-an mengambil langkah lebih radikal dari kritik pascakolonial dengan mengembangkan konsep kolonialitas sebagai sisi gelap modernitas yang tidak dapat dipisahkan darinya. Aníbal Quijano, sosiolog Peru, mengembangkan konsep kolonialitas kekuasaan yang menunjukkan bahwa kolonialisme sebagai formasi politik formal mungkin telah berakhir, tetapi kolonialitas sebagai pola kekuasaan yang mengorganisir relasi ekonomi, politik, sosial, dan epistemologis terus beroperasi dalam dunia kontemporer (Quijano, 2000).

Quijano berpendapat bahwa kolonialitas kekuasaan beroperasi melalui klasifikasi rasial populasi dunia yang diciptakan selama kolonialisme dan terus berfungsi sebagai prinsip dasar pengorganisasian pembagian kerja global, distribusi sumber daya, dan hierarki pengetahuan. Gagasan tentang ras yang muncul dalam konteks kolonialisme Amerika bukan sekadar prasangka atau ideologi, tetapi sebuah teknologi kekuasaan yang mengorganisir ekstraksi surplus ekonomi dan dominasi politik dengan mengklasifikasikan populasi berdasarkan karakteristik fenotipik dan mengasosiasikan klasifikasi ini dengan posisi dalam sistem produksi global. Klasifikasi rasial ini kemudian dinaturalisasi melalui narasi biologis dan budaya yang mempresentasikannya sebagai perbedaan alamiah atau budaya yang esensial.

Kolonialitas kekuasaan menurut Quijano memiliki empat domain yang saling terkait: kontrol ekonomi yang termanifestasi dalam perampasan tanah dan eksploitasi tenaga kerja; kontrol otoritas yang terkait dengan institusi politik; kontrol gender dan seksualitas yang mengatur reproduksi biologis dan sosial; serta kontrol pengetahuan dan subjektivitas yang mencakup pendidikan, agama, dan produksi pengetahuan. Keempat domain ini beroperasi secara bersamaan dan saling memperkuat, menciptakan matriks kolonial kekuasaan yang kompleks. Dalam konteks Amerika Latin, matriks ini termanifestasi dalam sistem encomienda yang mengkombinasikan perampasan tanah masyarakat adat, eksploitasi tenaga kerja, evangelisasi Kristiani, dan pemusnahan pengetahuan dan praktik masyarakat adat (Quijano, 2007).

Memperluas analisis Quijano, Walter Mignolo mengembangkan fokus pada dimensi epistemologis kolonialitas dan mengembangkan konsep kolonialitas pengetahuan dan kolonialitas keberadaan. Kolonialitas pengetahuan merujuk pada dominasi epistemologi Eropa yang menetapkan dirinya sebagai satu-satunya cara yang sah dan rasional untuk memproduksi pengetahuan tentang dunia, sementara mendiskreditkan atau memusnahkan sistem pengetahuan lain sebagai primitif, takhayul, atau tidak ilmiah. Proses ini yang disebut Mignolo sebagai epistemisida—pemusnahan pengetahuan—tidak hanya menghancurkan sistem pengetahuan non-Eropa tetapi juga menghapus memori tentang keberadaan sistem pengetahuan alternatif tersebut (Mignolo, 2000).

Mignolo mengembangkan konsep pemutusan hubungan sebagai strategi dekolonial yang radikal. Pemutusan hubungan bukan isolasi atau penarikan diri dari sistem global, tetapi desubjektifikasi dari logika kolonialitas dan resubjektifikasi melalui genealogi yang berbeda. Ini melibatkan ketidakpatuhan epistemik terhadap norma epistemologis Eropa dan rehabilitasi pengetahuan yang telah tersubalternkan. Mignolo berpendapat bahwa dekolonisasi memerlukan tidak hanya perubahan konten pengetahuan tetapi transformasi geografi nalar yang menempatkan Eropa sebagai pusat produksi pengetahuan universal (Mignolo, 2007).

“Kolonialitas pengetahuan merujuk pada dominasi epistemologi Eropa yang menetapkan dirinya sebagai satu-satunya cara yang sah dan rasional untuk memproduksi pengetahuan tentang dunia, sementara mendiskreditkan atau memusnahkan sistem pengetahuan lain sebagai primitif, takhayul, atau tidak ilmiah.”

Proyek dekolonial menurut Mignolo harus dimulai dari pemikiran perbatasan yang muncul dari pengalaman hidup di perbatasan kolonial, baik geografis maupun epistemologis. Pemikiran perbatasan adalah bentuk pemikiran yang tidak sepenuhnya berada di dalam maupun di luar modernitas Eropa, tetapi beroperasi dari eksterioritas yang dibuat oleh modernitas itu sendiri. Ini adalah epistemologi yang muncul dari pengalaman kolonialitas dan karenanya memiliki perspektif yang berbeda dari epistemologi yang diproduksi dari pusat kekuasaan kolonial. Pemikiran perbatasan tidak menolak sepenuhnya pengetahuan Eropa tetapi menggunakannya secara strategis sambil mempertahankan referensi epistemologis yang berbeda (Mignolo, 2011).

Perbedaan Postkolonial dan Dekolonial

Meskipun memiliki kesamaan dalam kritik terhadap kolonialisme dan warisan kolonial, terdapat perbedaan fundamental antara pendekatan pascakolonial dan dekolonial yang perlu dipahami untuk mengapresiasi kontribusi unik masing-masing. Kritik pascakolonial, khususnya versi yang berkembang dalam akademia Anglo-Amerika, cenderung fokus pada representasi, identitas, dan keragaman budaya. Pemikir pascakolonial seperti Homi Bhabha mengeksplorasi bagaimana subjek kolonial dan pascakolonial bernegosiasi dengan dominasi kolonial melalui strategi seperti mimikri, keragaman, dan ambivalensi. Fokus pada dimensi budaya dan diskursif kolonialisme ini penting tetapi kadang mengabaikan dimensi material dan struktural kolonialitas.

Sebaliknya, teori dekolonial menekankan keberlanjutan kolonialitas dalam struktur material dunia kontemporer dan menuntut transformasi yang lebih radikal dari relasi kekuasaan global. Dekolonial tidak puas dengan keragaman atau negosiasi dalam kerangka yang sudah ada tetapi menuntut pemutusan epistemik dan transformasi fundamental dari matriks kolonial kekuasaan. Jika pascakolonial sering beroperasi dalam kerangka institusi akademik Barat dan menggunakan bahasa teoretis Eropa—seperti poststrukturalisme dan dekonstruksi—dekolonial lebih eksplisit dalam menolak universalitas epistemologi Eropa dan mencari referensi epistemologis yang berbeda.

Perbedaan lain yang signifikan adalah lokus enunsiasi—tempat dari mana seseorang berbicara. Kritik pascakolonial banyak diproduksi oleh intelektual dari negara pascakolonial yang bekerja dalam universitas Barat, menciptakan posisi yang ambivalen antara kritik dan partisipasi dalam institusi yang dikritik. Teori dekolonial, khususnya yang berkembang di Amerika Latin, lebih

berakar dalam gerakan sosial dan perjuangan politik di negara-negara Selatan, meskipun beberapa pemikir utamanya juga bekerja dalam akademia Barat. Perbedaan lokus enunsiasi ini mempengaruhi orientasi politik dan strategi transformatif yang diusulkan oleh masing-masing pendekatan.

Dalam konteks metodologis, kritik pascakolonial cenderung menggunakan pendekatan pembacaan dekat terhadap teks kolonial dan pascakolonial, analisis representasi, dan dekonstruksi narasi kolonial. Teori dekolonial lebih menekankan analisis struktural sistem global, genealogi konsep Eropa, dan rekonstruksi tradisi pemikiran yang tersubalternkan. Dekolonial juga lebih eksplisit dalam komitmen politik untuk transformasi sosial dan solidaritas dengan gerakan anti-kolonial, anti-kapitalis, dan anti-patriarkal di Selatan Global.

15.2 Konsep Kunci Teori Dekolonial

Kolonialitas Kekuasaan, Pengetahuan, dan Keberadaan

Kolonialitas kekuasaan sebagaimana dikonseptualisasikan Quijano adalah pola kekuasaan yang muncul dengan kolonialisme Amerika tetapi terus beroperasi setelah berakhirnya kolonialisme formal. Berbeda dengan kolonialisme yang merujuk pada relasi politik dominasi eksplisit antara negara metropolitan dan koloni, kolonialitas merujuk pada pola kekuasaan yang lebih mendalam dan bertahan lama yang terus mengorganisir pembagian kerja global, hierarki rasial dan budaya, dan distribusi sumber daya dan kesempatan. Kolonialitas berfungsi melalui naturalisasi hierarki yang awalnya dipaksakan melalui kekerasan kolonial tetapi kemudian terinternalisasi sebagai akal sehat atau bahkan sebagai kebenaran objektif (Quijano, 2000).

Dalam konteks ekonomi, kolonialitas kekuasaan termanifestasi dalam pembagian kerja global yang menempatkan negara-negara bekas koloni sebagai penyedia bahan mentah dan tenaga kerja murah sementara negara-negara bekas kolonial mengendalikan teknologi, modal, dan pasar. Meskipun hubungan politik kolonial formal telah berakhir, struktur ekonomi kolonial sebagian besar bertahan melalui mekanisme seperti utang, perdagangan yang tidak adil, dan kontrol terhadap teknologi dan institusi keuangan global. Relasi ekonomi ini diperkuat oleh representasi budaya yang terus memproduksi perbedaan rasial dan budaya sebagai penjelas "alami" dari ketimpangan global.

Kolonialitas pengetahuan mengacu pada dominasi epistemologi Eropa yang menetapkan kriteria tentang apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah, metode yang dapat diterima untuk memproduksi pengetahuan, dan objek pengetahuan yang layak dipelajari. Epistemologi Eropa yang berkembang sejak Renaisans dan Pencerahan mempresentasikan dirinya sebagai universal, objektif, dan superior terhadap semua sistem pengetahuan lain. Universalisme ini bukan hanya klaim filosofis tetapi juga strategi kekuasaan yang melegitimasi penyebaran global epistemologi Eropa sambil mendiskreditkan atau memusnahkan sistem pengetahuan lain.

Proses ini yang disebut Boaventura de Sousa Santos sebagai epistemisida melibatkan penghancuran sistematis pengetahuan masyarakat adat, Afrika, dan Asia melalui berbagai mekanisme: larangan eksplisit terhadap praktik pengetahuan masyarakat adat seperti dalam kasus ritual dan bahasa; diskreditasi pengetahuan non-Eropa sebagai takhayul, mitos, atau cerita rakyat yang tidak ilmiah; perampasan dan transformasi pengetahuan non-Eropa ke dalam kerangka epistemologis Eropa yang menghapus genealogi non-Eropanya; serta monopoli institusi produksi pengetahuan seperti universitas, laboratorium, dan jurnal akademik oleh epistemologi Eropa (Santos, 2014).

"Konsep kunci dekolonisasi mencakup kolonialitas kekuasaan yang menciptakan hierarki global menempatkan bekas koloni sebagai penyedia bahan mentah murah, kolonialitas pengetahuan yang mendominasi epistemologi Eropa sambil menghancurkan sistem pengetahuan non-Eropa."

Kolonialitas keberadaan mengacu pada dampak kolonialitas pada pengalaman hidup dan pembentukan subjektivitas subjek kolonial dan pascakolonial. Nelson Maldonado-Torres yang mengembangkan konsep ini berpendapat bahwa kolonialisme tidak hanya mengekstraksi sumber daya ekonomi atau mendominasi secara politik tetapi juga menciptakan kategori subjek yang dibedakan secara hierarkis berdasarkan ras, gender, dan geografi. Kategori subjek ini bukan sekadar identitas budaya tetapi posisi ontologis yang menentukan aksesibilitas terhadap kemanusiaan penuh, keamanan, dan pengakuan (Maldonado-Torres, 2007).

Kolonialitas keberadaan termanifestasi dalam pengalaman dehumanisasi yang dialami oleh subjek yang dikategorikan sebagai non-Eropa, non-putih,

atau non-modern. Franz Fanon dalam *Black Skin, White Masks* mendeskripsikan dengan detail fenomenologis bagaimana rasisme kolonial menciptakan zona ketidakberadaan di mana orang kulit hitam mengalami negasi eksistensialnya. Dalam zona ketidakberadaan ini, subjek kolonial tidak diakui sebagai sepenuhnya manusiawi dan karenanya tidak memiliki aksesibilitas penuh terhadap hak, pengakuan, dan kesempatan yang dianggap universal. Kolonialitas keberadaan menciptakan perbedaan antara mereka yang dianggap memiliki kemanusiaan penuh dan mereka yang kemanusiaannya dipertanyakan atau ditolak (Fanon, 1952).

Epistemisida dan Kekerasan Epistemologis

Epistemisida, konsep yang dikembangkan oleh Boaventura de Sousa Santos, merujuk pada penghancuran sistematis pengetahuan, cara mengetahui, dan praktik pengetahuan yang tidak sesuai dengan epistemologi dominan. Epistemisida bukan sekadar hilangnya informasi atau teknik spesifik tetapi penghapusan seluruh sistem pengetahuan, termasuk ontologi, epistemologi, dan kosmologi yang mendasarinya. Dalam konteks kolonial, epistemisida adalah komponen integral dari proyek kolonial yang tidak hanya mengekstraksi sumber daya material tetapi juga menghancurkan kemampuan masyarakat kolonial untuk memproduksi dan mereproduksi pengetahuan mereka sendiri (Santos, 2018).

Proses epistemisida melibatkan beberapa mekanisme yang saling memperkuat. Pertama, kekerasan fisik terhadap pembawa pengetahuan seperti dalam kasus pembantaian ulama, dukun, atau orang tua yang menjadi penyimpan pengetahuan lisan dalam masyarakat adat. Kedua, penghancuran infrastruktur pengetahuan seperti pembakaran perpustakaan, penghancuran naskah, pelarangan bahasa masyarakat adat, dan penutupan institusi pendidikan tradisional. Ketiga, diskreditasi epistemologis yang mempresentasikan pengetahuan non-Eropa sebagai primitif, irasional, atau takhayul yang tidak layak dipelajari atau dilestarikan.

Keempat, perampasan dan transformasi pengetahuan non-Eropa ke dalam kerangka epistemologis Eropa yang menghapus genealogi dan konteks aslinya. Banyak pengetahuan tentang tanaman obat, navigasi, pertanian, dan astronomi dari masyarakat adat dirampas oleh kolonialis Eropa tetapi dikemas ulang dalam bahasa botani, geografi, atau astronomi Eropa, menghapus pengetahuan masyarakat adat yang menjadi sumber aslinya. Kelima, institusionalisasi epistemologi Eropa melalui sistem pendidikan kolonial yang menghasilkan elit lokal yang teralienasi dari sistem

pengetahuan tradisional mereka sendiri dan mengidentifikasi dengan epistemologi dan nilai-nilai Eropa.

Kekerasan epistemologis, konsep yang dipopulerkan oleh Gayatri Spivak, merujuk pada proses melalui mana subjek kolonial kehilangan kemampuan untuk merepresentasikan dirinya sendiri dan dipaksa untuk menggunakan kategori, bahasa, dan kerangka epistemologis kolonial untuk memahami dan mengekspresikan pengalamannya. Kekerasan epistemologis tidak hanya tentang pengetahuan yang dimiliki tetapi juga tentang subjektivitas dan agensi. Ketika subjek kolonial dipaksa untuk melihat dirinya melalui mata kolonial dan menggunakan bahasa kolonial untuk mendeskripsikan pengalamannya, terjadi proses alienasi fundamental yang memisahkan subjek dari pengalaman hidupnya sendiri (Spivak, 1988).

Dalam konteks Indonesia, epistemisida terjadi melalui berbagai mekanisme selama periode kolonial Belanda. Sistem pendidikan kolonial yang diperkenalkan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sengaja menciptakan kesenjangan antara elit pribumi yang terdidik dalam tradisi Barat dan massa yang tetap dalam sistem pendidikan tradisional pesantren atau tidak memiliki akses pada pendidikan formal. Elit terdidik Barat ini mengadopsi epistemologi, bahasa, dan nilai Eropa sambil menjadi teralienasi dari sistem pengetahuan tradisional Jawa, Sunda, atau budaya lokal lainnya yang dianggap primitif atau terbelakang. Analisis historis dan kontemporer menunjukkan bahwa kolonialitas dalam sistem pendidikan Indonesia masih beroperasi hingga saat ini (Sosiohumaniora, 2020).

Pluriversalitas dan Ekologi Pengetahuan

Konsep pluriversalitas yang dikembangkan oleh Mignolo dan pemikir dekolonial lainnya menawarkan alternatif terhadap universalisme epistemologis Eropa. Pluriversalitas bukan relativisme yang mengklaim semua pengetahuan setara atau bahwa tidak ada kriteria untuk mengevaluasi pengetahuan. Sebaliknya, pluriversalitas mengakui bahwa terdapat berbagai cara mengetahui yang masing-masing memiliki keabsahan dalam konteksnya sendiri dan bahwa tidak ada satu perspektif epistemologis yang dapat mengklaim universalitas absolut. Pluriversalitas adalah "dunia di mana banyak dunia bersesuaian," slogan Zapatista yang sering dikutip dalam diskusi dekolonial (Mignolo & Walsh, 2018).

Pluriversalitas menuntut transformasi fundamental dari geografi nalar yang menempatkan Eropa sebagai pusat produksi pengetahuan universal. Ini tidak

berarti menolak pengetahuan yang diproduksi di Eropa tetapi menolak klaim universalitasnya dan mengakui bahwa pengetahuan Eropa adalah pengetahuan yang diproduksi dari lokus spesifik dengan sejarah dan kepentingan tertentu. Pluriversalitas membuka ruang untuk dialog horizontal antara berbagai tradisi pengetahuan di mana tidak ada satu tradisi yang memiliki privilese epistemologis sebelumnya. Dialog ini tidak mencari sintesis atau konsensus tetapi mempertahankan perbedaan sambil mencari artikulasi dan solidaritas yang memungkinkan.

Boaventura de Sousa Santos mengembangkan konsep ekologi pengetahuan sebagai cara untuk mengoperasionalisasikan pluriversalitas dalam praktik. Ekologi pengetahuan adalah cara untuk mempromosikan dialog dan interaksi antara berbagai sistem pengetahuan dengan mengakui bahwa tidak ada pengetahuan tunggal yang dapat menjawab semua pertanyaan atau memecahkan semua masalah. Setiap sistem pengetahuan memiliki kekuatan dan keterbatasan tertentu, dan ekologi pengetahuan berusaha untuk menciptakan kondisi di mana berbagai sistem pengetahuan dapat berkontribusi pada pemahaman dan transformasi realitas tanpa satu sistem pengetahuan mendominasi yang lain (Santos, 2014).

Santos berpendapat bahwa ekologi pengetahuan memerlukan dua prosedur epistemologis: sosiologi absensi dan sosiologi emergensi. Sosiologi absensi mengungkap bagaimana epistemologi dominan menciptakan ketidakeksistensian dari pengetahuan yang tidak sesuai dengan kriterianya dengan mengategorikan pengetahuan tersebut sebagai kebodohan, sisa, inferior, lokal, atau tidak produktif. Dengan mengungkap mekanisme produksi ketidakeksistensian ini, sosiologi absensi membuat terlihat pengetahuan yang telah dibuat tidak terlihat dan menciptakan kemungkinan untuk berdialog dengan pengetahuan tersebut.

Sosiologi emergensi mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan masa depan yang terkandung dalam praktik sosial yang ada tetapi belum sepenuhnya terwujud. Ini adalah investigasi terhadap potensi transformatif yang ada dalam praktik alternatif yang sering ditolak sebagai marginal atau tidak realistis. Kombinasi sosiologi absensi dan emergensi memperluas masa kini melalui pengakuan terhadap pengalaman dan pengetahuan yang telah dibuat tidak ada dan melalui eksplorasi kemungkinan masa depan yang terkandung dalam praktik masa kini yang sering diabaikan.

15.3 Epistemologi Selatan

Boaventura de Sousa Santos dan Keadilan Kognitif Global

Boaventura de Sousa Santos, sosiolog Portugal yang bekerja ekstensif di Amerika Latin dan Afrika, mengembangkan apa yang disebutnya sebagai epistemologi Selatan sebagai respons terhadap ketidakadilan kognitif global yang dihasilkan oleh dominasi epistemologi Utara. Santos mendefinisikan Selatan bukan sebagai kategori geografis tetapi sebagai metafora untuk penderitaan sistematis yang dihasilkan oleh kapitalisme, kolonialisme, dan patriarki. Selatan adalah zona di mana pengetahuan dan pengalaman telah didiskreditkan, dimarjinalisasi, atau dihancurkan oleh epistemologi dominan Utara. Dalam pengertian ini, Selatan dapat ditemukan di Utara geografis dalam bentuk kelompok termarjinalkan, dan sebaliknya, Utara dapat ditemukan di Selatan geografis dalam bentuk elit yang mengadopsi epistemologi dominan (Santos, 2014).

> "Epistemologi Selatan Santos merespons ketidakadilan kognitif global dari dominasi epistemologi Utara. Selatan adalah metafora penderitaan sistematis dimana pengetahuan didiskreditkan, sementara Utara mewakili epistemologi dominan. Proyek ini mempromosikan keadilan kognitif melalui pengakuan pluralitas epistemologis antar-sistem pengetahuan."

Proyek epistemologi Selatan yang dikembangkan Santos bertujuan untuk mempromosikan keadilan kognitif global melalui pengakuan terhadap pluralitas epistemologis dan dialog horizontal antara berbagai sistem pengetahuan. Keadilan kognitif adalah kondisi di mana semua orang dan kelompok memiliki hak untuk memproduksi pengetahuan yang relevan bagi kehidupan mereka dan untuk memiliki pengetahuan mereka diakui sebagai sah dan dapat diterima. Ketidakadilan kognitif terjadi ketika pengetahuan yang diproduksi oleh kelompok tertentu didiskreditkan atau dihancurkan sementara pengetahuan kelompok dominan diimposisi sebagai satu-satunya pengetahuan yang sah.

Santos mengidentifikasi tiga tantangan utama untuk mencapai keadilan kognitif global. Pertama, monokultur pengetahuan yang mengklaim bahwa hanya epistemologi modern Barat yang dapat memproduksi pengetahuan

yang sah dan objektif. Monokultur ini menciptakan apa yang Santos sebut sebagai epistemisida melalui penghancuran atau diskreditasi sistematis pengetahuan non-Barat. Kedua, fasisme epistemologis yang terjadi ketika epistemologi dominan tidak hanya mengklaim superioritas tetapi juga menolak legitimasi pengetahuan lain untuk ada atau diartikulasikan. Ketiga, kolonialisme internal di mana elit lokal mengadopsi dan menginternalisasi epistemologi dominan dan menjadi agen epistemisida terhadap pengetahuan lokal mereka sendiri (Santos, 2018).

Untuk mengatasi tantangan ini, Santos mengusulkan tiga prosedur epistemologis. Pertama, sosiologi absensi yang mengungkap bagaimana epistemologi dominan memproduksi ketidakeksistensian dari pengetahuan dan praktik yang tidak sesuai dengan kriterianya. Santos mengidentifikasi lima logika produksi ketidakeksistensian: logika monokultur yang mengkategorikan pengetahuan alternatif sebagai kebodohan; logika kemajuan linear yang mengkategorikan pengetahuan tradisional sebagai terbelakang atau sisa; logika naturalisasi perbedaan yang mengkategorikan pengetahuan tersubordinasi sebagai inferior secara alamiah; logika dominan yang mengkategorikan pengetahuan lokal sebagai partikular melawan universalitas pengetahuan dominan; dan logika produktivitas yang mengkategorikan pengetahuan yang tidak dapat ditranslasi ke dalam produktivitas ekonomi sebagai tidak produktif atau steril (Santos, 2007).

Kedua, sosiologi emergensi yang mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan transformatif yang terkandung dalam praktik sosial yang ada tetapi belum sepenuhnya terwujud. Ketiga, kerja translasi yang menciptakan saling pengertian timbal balik antara berbagai pengalaman dan pengetahuan tanpa menghancurkan identitas masing-masing atau mengimposisi satu kerangka interpretasi universal. Kerja translasi adalah prosedur yang memungkinkan berbagai gerakan sosial, praktik, dan pengetahuan untuk saling belajar dan menciptakan aliansi tanpa menghilangkan perbedaan mereka.

Raewyn Connell dan Teori Selatan

Raewyn Connell, sosiolog Australia, mengembangkan konsep teori Selatan sebagai kritik terhadap dominasi teori sosial yang berpusat pada pengalaman dan perspektif Metropolitan atau Utara Global. Dalam karyanya yang berpengaruh *Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social Science* (2007), Connell menunjukkan bagaimana teori sosial yang dianggap "klasik" atau "universal" sebagian besar diproduksi di Eropa dan Amerika Utara berdasarkan pengalaman dan data dari wilayah tersebut. Teori-teori ini

kemudian diuniversalisasi dan diimposisi ke seluruh dunia sebagai kerangka untuk memahami masyarakat di Selatan, meskipun seringkali tidak memadai untuk menjelaskan realitas sosial di wilayah tersebut (Connell, 2007).

Connell mengajukan pertanyaan fundamental: "Mengapa teori klasik dianggap klasik?" Mengapa teori-teori tertentu dari Marx, Weber, Durkheim dianggap klasik dan foundational sementara pemikir dari Selatan yang sama cemerlang dan orisinalitasnya diabaikan atau hanya dianggap sebagai kasus regional? Connell berpendapat bahwa status "klasik" bukan semata-mata refleksi dari kualitas intelektual tetapi juga hasil dari relasi kekuasaan global yang memberikan otoritas dan visibilitas lebih besar pada pengetahuan yang diproduksi di pusat Metropolitan. Teori sosial, seperti bentuk pengetahuan lain, tertanam dalam struktur kekuasaan global yang menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan universal dan apa yang dikategorikan sebagai pengetahuan lokal atau regional (Connell, 1997).

Connell mengidentifikasi beberapa mekanisme melalui mana dominasi teori Metropolitan dipertahankan. Pertama, sistem sitasi akademik yang secara sistematis lebih banyak mensitasi dan mengakui karya dari pusat Metropolitan sementara karya dari pinggiran diabaikan atau dikategorikan sebagai studi kawasan atau sosiologi regional. Kedua, kontrol terhadap institusi produksi dan sirkulasi pengetahuan seperti jurnal akademik bergengsi, penerbit universitas, dan konferensi internasional yang sebagian besar berlokasi di Metropolitan dan didominasi oleh sarjana dari wilayah tersebut. Ketiga, sistem pendidikan dan pelatihan akademik yang mereproduksi kanon Metropolitan sebagai teori "universal" yang harus dikuasai oleh semua sarjana sementara teori dari Selatan dianggap opsional atau pelengkap.

Teori Selatan yang diusulkan Connell bukan sekadar teori tentang Selatan atau teori yang diproduksi di Selatan, tetapi teori yang berakar dalam pengalaman sosial Selatan dan menggunakan pengalaman tersebut sebagai basis untuk mengembangkan analisis sosial yang memiliki relevansi global. Connell memberikan beberapa contoh teoretisasi dari Selatan yang membuat kontribusi penting pada pemahaman sosial global tetapi sering tidak diakui sebagaimana mestinya. Misalnya, analisis Ali Shariati tentang dialektika antara Islam tradisional dan Islam revolusioner di Iran; analisis Ashis Nandy tentang kolonialisme sebagai proyek psikologis yang menghasilkan penderitaan mendalam pada penjajah dan terjajah; atau analisis Paulin Hountondji tentang etnofilosofi dan kebutuhan untuk filosofi Afrika yang berbasis pada argumentasi rasional.

Connell juga mengidentifikasi beberapa kontribusi teoretis yang berasal dari pengalaman Selatan yang memiliki signifikansi global. Konsep dependensi yang dikembangkan oleh teoretikus Amerika Latin seperti Andre Gunder Frank dan Fernando Henrique Cardoso memberikan alternatif pada teori modernisasi yang dominan dan menunjukkan bagaimana keterbelakangan Selatan bukan kondisi awal tetapi hasil dari relasi ekonomi global yang eksploitatif. Konsep kolonialisme pemukim yang dikembangkan dari pengalaman Australia, Afrika Selatan, dan Amerika memberikan kerangka untuk memahami bentuk kolonialisme yang berbeda dari kolonialisme administratif klasik. Konsep kajian subaltern yang berkembang dari pengalaman India memberikan kerangka untuk menganalisis sejarah dari perspektif kelompok yang termarjinalkan. Analisis tentang teori Selatan dan relevansinya bagi sosiologi Indonesia menunjukkan pentingnya perspektif ini untuk konteks lokal (Jurnal Analisa Sosiologi, 2022).

Achille Mbembe dan Necropolitics

Achille Mbembe, filosof dan teoretikus politik dari Kamerun yang bekerja di Afrika Selatan, mengembangkan konsep nekropolitik sebagai kontribusi pada teori tentang kekuasaan dan kedaulatan dari perspektif pengalaman kolonial dan pascakolonial Afrika. Dalam esainya yang berpengaruh "Necropolitics" (2003), Mbembe mengkritik teori kekuasaan yang berpusat pada konsep biopolitik yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Mbembe berpendapat bahwa biopolitik yang fokus pada pengaturan kehidupan tidak memadai untuk menjelaskan bentuk kekuasaan yang beroperasi di ruang kolonial dan pascakolonial di mana kekuasaan terutama dimanifestasikan melalui kontrol atas kematian (Mbembe, 2003).

Nekropolitik menurut Mbembe adalah politik yang menentukan siapa yang layak hidup dan siapa yang dapat dibiarkan mati atau bahkan dibunuh. Dalam konteks kolonial, nekropolitik termanifestasi dalam berbagai bentuk kekerasan yang menghasilkan zona kematian di mana populasi tertentu disubjektifikasi pada kondisi kehidupan yang mendekatkan mereka pada status hidup mati. Perbudakan perkebunan, ekstraksi kolonial, dan bentuk-bentuk kontemporer kekerasan seperti perang, genosida, dan kekerasan struktural merupakan manifestasi dari nekropolitik yang menciptakan hierarki kehidupan manusia di mana beberapa kehidupan dianggap lebih berharga dan layak dilindungi sementara kehidupan lainnya dianggap dapat dikorbankan atau bahkan mengancam.

Mbembe menganalisis bagaimana kedaulatan dalam konteks kolonial dan pascakolonial beroperasi secara berbeda dari model kedaulatan Eropa yang menjadi basis teori politik modern. Dalam model Eropa, kedaulatan adalah hak untuk membuat hukum dan menggunakan kekerasan dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan. Dalam konteks kolonial, kedaulatan adalah hak untuk membunuh tanpa akuntabilitas hukum, untuk menciptakan keadaan pengecualian yang permanen di mana populasi kolonial tidak memiliki perlindungan hukum yang dimiliki oleh warga negara metropolitan. Keadaan pengecualian ini bukan kondisi luar biasa tetapi kondisi normal dalam ruang kolonial (Mbembe, 2017).

Kontribusi teoretis Mbembe menunjukkan bagaimana pengalaman kolonial Afrika dapat memperkaya dan mengkomplikasi teori tentang kekuasaan, kedaulatan, dan kekerasan. Nekropolitik tidak hanya menjelaskan kondisi di Afrika tetapi juga memiliki relevansi untuk memahami bentuk-bentuk kontemporer kekerasan seperti perang melawan teror, perang drone, kekerasan perbatasan, dan kekerasan polisi yang menciptakan hierarki tentang kehidupan siapa yang penting. Mbembe menunjukkan bagaimana teoretisasi yang berakar dalam pengalaman Selatan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif pada fenomena kekuasaan global.

15.4 Implikasi untuk Ilmu Sosial Indonesia

Dekolonisasi Kurikulum dan Pedagogi

Dekolonisasi ilmu sosial di Indonesia memerlukan transformasi fundamental dalam kurikulum dan pedagogi yang telah lama didominasi oleh teori dan perspektif Barat. Kurikulum ilmu sosial di sebagian besar universitas Indonesia masih sangat Eurocentric—berpusat pada Eropa—dengan fokus utama pada teoretikus klasik Eropa seperti Marx, Weber, Durkheim dan teoretikus kontemporer dari Amerika Utara dan Eropa. Sementara penguasaan terhadap teori-teori ini penting, masalahnya adalah teori-teori ini seringkali dipresentasikan sebagai universal dan cukup untuk memahami realitas sosial Indonesia tanpa mempertanyakan limitasi atau bias epistemologisnya. Penelitian tentang dekolonisasi pendidikan tinggi menunjukkan bahwa tantangan epistemologis dan institusional ini sangat signifikan dalam konteks Indonesia (Kawistara, 2021).

Dekolonisasi kurikulum tidak berarti menolak teori Barat tetapi menempatkannya dalam perspektif yang lebih kritis dan mengintegrasikan teori dan perspektif dari tradisi intelektual non-Barat, termasuk tradisi

pemikiran Indonesia sendiri. Hal ini melibatkan beberapa langkah konkret. Pertama, inklusi eksplisit pemikir dan teori dari Selatan Global dalam kurikulum inti, tidak hanya sebagai pelengkap atau opsional. Pemikir seperti Frantz Fanon, Aníbal Quijano, Boaventura de Sousa Santos, Raewyn Connell, atau Ashis Nandy harus mendapat tempat yang sama dengan Marx atau Weber dalam kurikulum teori sosial.

> "Dekolonisasi kurikulum ilmu sosial Indonesia memerlukan transformasi dari dominasi teori Eurocentric dengan mengintegrasikan pemikir Selatan Global, menginterogasi bias teori Barat, memasukkan tradisi intelektual Indonesia dari Soekarno hingga pemikir kontemporer, serta merevitalisasi sistem pengetahuan masyarakat adat. Pedagogi dekolonial menolak transmisi pengetahuan pasif, menekankan pembelajaran dialogis dimana mahasiswa menjadi ko-produser pengetahuan melalui metode partisipatif, refleksi kritis, dan koneksi teori dengan pengalaman hidup mereka sendiri."

Kedua, keterlibatan kritis dengan bias dan limitasi teori Barat. Mahasiswa perlu diajari untuk tidak hanya mengaplikasikan teori Barat pada konteks Indonesia tetapi juga untuk menginterogasi asumsi epistemologis dan ontologis yang tertanam dalam teori tersebut. Misalnya, konsep modernisasi yang dikembangkan dalam konteks Eropa memiliki asumsi tentang temporalitas linear dan dikotomi tradisi-modern yang mungkin tidak memadai untuk memahami kompleksitas transformasi sosial di Indonesia. Mahasiswa perlu diajari untuk mengidentifikasi dan mengkritik asumsi-asumsi ini.

Ketiga, integrasi pemikiran intelektual Indonesia dalam kurikulum. Tradisi pemikiran Indonesia yang kaya dari pemikir seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Tan Malaka, Sutan Sjahrir, hingga pemikir kontemporer seperti Arief Budiman, Soedjatmoko, atau Ignas Kleden perlu mendapat tempat yang layak dalam kurikulum ilmu sosial Indonesia. Pemikiran mereka tidak hanya penting sebagai sejarah intelektual Indonesia tetapi juga sebagai sumber teoretisasi yang relevan untuk memahami masyarakat Indonesia. Revitalisasi

pengetahuan lokal dalam ilmu sosial Indonesia menjadi semakin penting dalam konteks ini (Jurnal Ilmu Sosial Indonesia, 2023).

Keempat, kebangkitan kembali dan revaluasi sistem pengetahuan lokal dan masyarakat adat. Pengetahuan tentang organisasi sosial, ekologi, ekonomi, dan kosmologi yang terkandung dalam tradisi Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Dayak, dan berbagai etnis lain di Indonesia bukan sekadar keingintahuan antropologis tetapi sumber epistemologis yang berharga. Sistem pengetahuan ini telah didiskreditkan atau diabaikan oleh ilmu sosial modern tetapi mengandung wawasan mendalam tentang isu-isu kontemporer seperti pembangunan berkelanjutan, tata kelola komunitas, atau resolusi konflik. Penelitian tentang ilmu sosial masyarakat adat Indonesia menunjukkan pentingnya perspektif ini (Wacana, 2021).

Pedagogi dekolonial tidak hanya tentang apa yang diajarkan tetapi juga bagaimana mengajar. Pedagogi dekolonial menolak model transmisi pengetahuan yang memperlakukan mahasiswa sebagai penerima pasif dari pengetahuan yang telah mapan. Sebaliknya, pedagogi dekolonial menekankan pembelajaran dialogis di mana mahasiswa diposisikan sebagai ko-produser pengetahuan yang membawa pengalaman dan perspektif mereka sendiri ke dalam proses pembelajaran. Ini melibatkan penggunaan metode partisipatif, refleksi kritis, dan koneksi teori dengan pengalaman hidup mahasiswa.

Penelitian yang Berakar pada Konteks Lokal

Dekolonisasi ilmu sosial Indonesia juga memerlukan transformasi dalam praktik penelitian agar lebih berakar pada konteks lokal dan relevan bagi kebutuhan masyarakat Indonesia. Terlalu sering, penelitian ilmu sosial di Indonesia mengikuti agenda penelitian yang ditetapkan di pusat-pusat akademik Global North atau didanai oleh donor internasional dengan agenda tertentu. Penelitian semacam ini, meskipun dapat menghasilkan publikasi di jurnal internasional, seringkali kurang relevan bagi pemahaman dan transformasi realitas sosial Indonesia.

Penelitian yang berakar pada konteks lokal dimulai dari identifikasi masalah dan pertanyaan penelitian yang muncul dari realitas sosial Indonesia, bukan dari transplantasi teori atau agenda penelitian dari tempat lain. Ini tidak berarti isolasi intelektual atau penolakan terhadap dialog dengan tradisi penelitian global, tetapi tentang memposisikan pengalaman dan kebutuhan Indonesia sebagai titik awal dan referensi utama penelitian. Misalnya,

penelitian tentang kemiskinan di Indonesia harus dimulai dari pemahaman lokal tentang kemiskinan yang mungkin berbeda dari definisi Bank Dunia, dan harus bertujuan untuk menghasilkan wawasan yang berguna untuk kebijakan dan intervensi dalam konteks Indonesia.

> "Dekolonisasi penelitian Indonesia memerlukan identifikasi masalah dari realitas lokal, bukan transplantasi teori Barat."

Metodologi penelitian juga perlu ditransformasi untuk lebih sensitif terhadap kompleksitas dan keragaman konteks Indonesia. Terlalu sering, penelitian ilmu sosial di Indonesia menggunakan metodologi yang dikembangkan dalam konteks Barat tanpa adaptasi yang memadai pada konteks lokal. Misalnya, penelitian survei yang mengandalkan kuesioner terstandarisasi mungkin tidak memadai untuk menangkap kompleksitas pengalaman sosial dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam secara budaya dan linguistik. Metodologi masyarakat adat seperti metode etnografis yang sensitif terhadap konteks lokal, penelitian partisipatoris yang melibatkan komunitas sebagai ko-peneliti, atau metode berbasis seni yang menggunakan medium budaya lokal perlu dikembangkan lebih lanjut.

Kolaborasi dengan komunitas dan pemangku kepentingan lokal adalah aspek penting dari penelitian yang berakar pada konteks lokal. Penelitian tidak seharusnya diperlakukan sebagai proses ekstraktif di mana peneliti mengambil data dari komunitas untuk kepentingan akademik mereka sendiri tanpa memberikan manfaat pada komunitas. Penelitian partisipatoris berbasis komunitas yang menjadikan komunitas sebagai mitra dalam seluruh proses penelitian dari identifikasi masalah hingga diseminasi hasil perlu menjadi model yang lebih banyak diadopsi. Ini memerlukan transformasi dalam struktur insentif akademik yang saat ini lebih menghargai publikasi di jurnal internasional daripada dampak pada komunitas.

Bahasa penelitian juga merupakan isu penting dalam dekolonisasi penelitian. Dominasi bahasa Inggris dalam publikasi akademik menciptakan hambatan bagi diseminasi pengetahuan yang diproduksi di Indonesia kepada audiens Indonesia. Sementara publikasi dalam bahasa Inggris penting untuk dialog internasional, perlu ada komitmen yang lebih kuat untuk publikasi dalam bahasa Indonesia yang dapat diakses oleh sarjana, praktisi, pembuat kebijakan, dan publik terdidik Indonesia. Ini memerlukan penguatan jurnal-jurnal berbahasa Indonesia dan penciptaan platform untuk diseminasi

penelitian yang lebih luas kepada audiens non-akademik. Proyek dekolonial dalam sosiologi Indonesia menunjukkan pentingnya transformasi ini (Masyarakat, 2022).

Tantangan dan Prospek

Proyek dekolonisasi ilmu sosial Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang perlu diakui dan diatasi. Pertama, tantangan institusional. Struktur universitas Indonesia yang sebagian besar warisan sistem pendidikan kolonial dan pascakolonial dengan dominasi model pendidikan Barat menciptakan inersia institusional yang kuat. Sistem evaluasi akademik yang menghargai publikasi di jurnal internasional—sebagian besar berbahasa Inggris dan berlokasi di Global North—lebih tinggi daripada kontribusi pada pengetahuan lokal menciptakan disinsentif untuk penelitian yang berakar pada konteks lokal.

Kedua, tantangan epistemologis. Setelah bertahun-tahun dominasi epistemologi Barat, banyak sarjana Indonesia telah menginternalisasi epistemologi ini dan mungkin mengalami kesulitan untuk mengadopsi perspektif yang berbeda. Kolonialisme internal di mana elit intelektual mengadopsi dan mereproduksi epistemologi dominan adalah hambatan yang serius. Ini diperparah oleh fakta bahwa banyak sarjana Indonesia mendapat pelatihan doktoral di universitas Barat di mana mereka disosialisasikan dalam kanon dan praktik akademik Barat. Transformasi epistemologis memerlukan refleksi kritis yang mendalam terhadap asumsi-asumsi yang telah terinternalisasi dan keberanian untuk mempertanyakan ortodoksi yang telah menjadi bagian dari identitas profesional mereka.

Ketiga, tantangan material. Dekolonisasi penelitian yang berbasis pada metodologi partisipatoris, etnografis, atau berbasis komunitas memerlukan sumber daya dan waktu yang lebih banyak dibandingkan penelitian survei atau analisis data sekunder. Dalam kondisi di mana pendanaan penelitian terbatas dan sarjana menghadapi tekanan untuk publikasi yang cepat, penelitian yang lebih memakan waktu menjadi kurang menarik. Infrastruktur penelitian yang terbatas seperti akses pada literatur, basis data, atau peralatan juga menjadi kendala yang signifikan. Perpustakaan universitas di Indonesia seringkali tidak memiliki akses pada jurnal internasional terkini atau buku-buku penting dalam teori dekolonial dan epistemologi Selatan.

Keempat, tantangan politik. Dalam beberapa konteks, penelitian yang kritis terhadap struktur kekuasaan atau yang mengadvokasi perspektif kelompok

termarjinalkan dapat menghadapi resistensi atau bahkan represi dari pemerintah atau kelompok berkuasa lainnya. Kebebasan akademik yang terbatas dan sensor diri dapat membatasi cakupan dan kedalaman penelitian kritis yang merupakan komponen esensial dari proyek dekolonial. Tekanan politik ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, dari tekanan halus untuk menghindari topik-topik sensitif hingga ancaman eksplisit terhadap keamanan dan karir akademik.

Kelima, tantangan historis. Narasi "sejarah" yang ditulis dan diajarkan oleh Eropa modern mengklaim bahwa rasionalitas politik dan pemerintahan lahir di Barat: dari polis Yunani, Republik Romawi, hingga negara-bangsa modern. Klaim ini telah menjelma menjadi *doxa* universal—sebuah kebenaran yang tak perlu dibuktikan. Namun, ketika sejarah dibaca dari tepi, bukan dari pusat, klaim tersebut tampak rapuh bahkan a-historis. Di saat Eropa masih terombang-ambing dalam krisis dan barbarisme pascaruntuhnya Roma, kepulauan Nusantara justru telah menapaki tahap awal peradaban politik yang berdaulat, teratur, dan beretika. Ketika abad ke-3 Nusantara sudah memiliki tatanan sistem pemerintahan Salakanagara (*Naskah Wangsakerta*) yang bertransformasi menjadi Kerajaan Tarumanagara, Sriwijaya, hingga Majapahit, epistimologi tatanan pemerintahan Eropa masih "merangkak" dan gonjang-ganjing Romawi. Ketika rasionalitas Nusantara pada abad ke-7 sudah mampu implementasi tata ruang dan arsitektur Candi Borobudur – bahkan 5 abad sebelumnya membangun Situs Gunung Padang – bukti historis-empiris karya rasionalitas Eropa yang mana yang setara dengan karya bangsa Nusantara? *Doxa* universal sejatinya mengacu pada "kebenaran bukti" Nusantara yang mampu menjawab rasionalitas dekolonisasi, bukan ilusi rapuh dan a-historis yang sulit dibuktikan kebenarannya di Eropa.

Meskipun tantangan-tantangan ini signifikan, terdapat juga perkembangan positif dan prospek yang menggembirakan. Pertama, meningkatnya kesadaran dan minat terhadap isu dekolonisasi di kalangan sarjana Indonesia, khususnya generasi muda. Diskusi tentang dekolonisasi ilmu sosial semakin sering muncul dalam konferensi, seminar, dan publikasi akademik Indonesia. Gerakan mahasiswa dan sarjana junior yang menuntut kurikulum yang lebih beragam dan kritis menciptakan momentum untuk perubahan. Platform media sosial dan pembelajaran daring juga memfasilitasi akses pada literatur dekolonial dan jejaring dengan sarjana yang memiliki keprihatinan yang sama.

Kedua, munculnya jurnal-jurnal Indonesia yang berkomitmen pada publikasi penelitian yang relevan dengan konteks lokal dan yang menggunakan perspektif kritis. Jurnal-jurnal Sinta 2 dan 3 seperti *Masyarakat: Jurnal*

Sosiologi (UI), *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* (UIN Jakarta), atau *Kawistara* (UGM) semakin banyak mempublikasi artikel yang terlibat dengan isu dekolonisasi dan yang menggunakan perspektif teoretis dari Selatan Global. Beberapa jurnal juga mulai mengadopsi kebijakan editorial yang mendorong pengajuan dalam bahasa Indonesia dan yang mengakui pentingnya relevansi lokal di samping kecanggihan teoretis.

Ketiga, meningkatnya kolaborasi antara sarjana Indonesia dengan sarjana dari Selatan Global lainnya. Jaringan seperti Council for the Development of Social Science Research in Africa (CODESRIA), Latin American Council of Social Sciences (CLACSO), atau Asian Political and International Studies Association (APISA) menciptakan platform untuk dialog dan kolaborasi yang tidak dimediasi oleh pusat-pusat akademik Global North. Partisipasi sarjana Indonesia dalam jaringan ini dapat memperkuat proyek dekolonial melalui pengalaman bersama dan solidaritas dengan sarjana dari Selatan lainnya. Program pertukaran dan proyek penelitian bersama dengan universitas di Afrika, Amerika Latin, dan Asia lainnya membuka kemungkinan untuk kolaborasi Selatan-Selatan yang dapat memperkaya perspektif teoretis.

Keempat, meningkatnya minat dari pembuat kebijakan dan praktisi terhadap penelitian yang relevan secara lokal dan dapat ditindaklanjuti. Frustrasi dengan resep kebijakan yang diimpor dari luar dan yang tidak berhasil dalam konteks Indonesia menciptakan permintaan untuk penelitian yang lebih berakar dalam realitas lokal. Ini menciptakan peluang bagi peneliti untuk mendemonstrasikan relevansi dan nilai dari pendekatan dekolonial. Beberapa kementerian dan lembaga pemerintah mulai mengakui pentingnya pengetahuan lokal dan praktik masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan, meskipun implementasinya masih jauh dari ideal.

Prospek jangka panjang proyek dekolonisasi ilmu sosial Indonesia tergantung pada kemampuan untuk mentransformasi struktur institusional, epistemologis, dan material yang melanggengkan dominasi epistemologi Barat. Ini memerlukan komitmen kolektif dari sarjana, institusi, pembuat kebijakan, dan lembaga pendanaan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan berkembangnya penelitian dan teoretisasi yang berakar pada pengalaman Indonesia dan Selatan Global. Dekolonisasi bukan hanya proyek akademik tetapi juga proyek politik dan etis yang terkait dengan keadilan kognitif global dan transformasi sosial yang lebih luas.

Langkah-langkah konkret yang dapat diambil termasuk: reformasi sistem evaluasi akademik yang mengakui dan menghargai kontribusi pada pengetahuan lokal; pengembangan skema pendanaan yang mendukung

penelitian partisipatoris dan berbasis komunitas; penguatan jurnal-jurnal berbahasa Indonesia dan platform diseminasi lainnya; pengembangan program pelatihan dalam metodologi dekolonial dan epistemologi Selatan; penciptaan jaringan dan forum untuk dialog antara sarjana, praktisi, dan komunitas; serta advokasi untuk kebebasan akademik dan perlindungan bagi peneliti yang terlibat dalam penelitian kritis.

Kesimpulan

Teori dekolonial dan epistemologi Selatan mengungkap bagaimana kolonialisme terus beroperasi melalui kolonialitas dalam produksi pengetahuan, pembentukan subjektivitas, dan kehidupan sosial kontemporer. Berbeda dari kritik pascakolonial yang fokus pada representasi budaya, teori dekolonial menekankan keberlanjutan struktural kolonialitas dan menuntut transformasi radikal dari matriks kolonial kekuasaan melalui konsep kolonialitas kekuasaan, pengetahuan, keberadaan, epistemisida, dan nekropolitik.

Epistemologi Selatan yang dikembangkan Santos, Connell, dan Mbembe menawarkan alternatif dominasi epistemologi Utara dengan menekankan pluralitas epistemologis dan keadilan kognitif global. Proyek ini bukan menolak pengetahuan Utara, tetapi menolak klaim universalitasnya dan menciptakan dialog horizontal antara tradisi pengetahuan berbeda melalui ekologi pengetahuan, sosiologi absensi-emergensi, dan kerja translasi.

Dalam konteks Indonesia, dekolonisasi ilmu sosial memerlukan transformasi kurikulum, pedagogi, dan metodologi penelitian yang didominasi perspektif Barat. Ini melibatkan inklusi teori Selatan Global, keterlibatan kritis dengan bias epistemologi Barat, integrasi pemikiran intelektual Indonesia, dan revitalisasi sistem pengetahuan lokal serta masyarakat adat.

Meskipun menghadapi tantangan institusional, epistemologis, material, dan politik, terdapat perkembangan positif seperti meningkatnya kesadaran dekolonisasi, kemunculan jurnal berkomitmen pada penelitian lokal, kolaborasi Selatan-Selatan yang menguat, dan minat pembuat kebijakan pada penelitian yang dapat ditindaklanjuti.

Dekolonisasi ilmu sosial adalah komitmen politik-etis untuk keadilan kognitif global dan transformasi sosial yang lebih luas. Ilmu sosial Indonesia memiliki peluang dan tanggung jawab berkontribusi pada proyek global dekolonisasi pengetahuan sambil mengembangkan pemahaman memadai tentang realitas sosial Indonesia. Ini memerlukan keberanian mempertanyakan

ortodoksi, kreativitas mengembangkan perspektif alternatif, dan komitmen untuk keadilan dalam produksi serta sirkulasi pengetahuan menuju demokratisasi pengetahuan dan dunia yang lebih adil.

Referensi Bab 15

Appadurai, A. (1996). *Modernity at large: Cultural dimensions of globalization*. University of Minnesota Press.

Chakrabarty, D. (2000). *Provincializing Europe: Postcolonial thought and historical difference*. Princeton University Press.

Connell, R. (1997). Why is classical theory classical? *American Journal of Sociology*, 102(6), 1511-1557.

Connell, R. (2007). *Southern theory: The global dynamics of knowledge in social science*. Polity Press.

Dussel, E. (1995). *The invention of the Americas: Eclipse of "the Other" and the myth of modernity*. Continuum.

Escobar, A. (2007). Worlds and knowledges otherwise: The Latin American modernity/coloniality research program. *Cultural Studies*, 21(2-3), 179-210.

Fanon, F. (1952). *Black skin, white masks*. Grove Press.

Grosfoguel, R. (2007). The epistemic decolonial turn: Beyond political-economy paradigms. *Cultural Studies*, 21(2-3), 211-223.

Jurnal Analisa Sosiologi - Universitas Sebelas Maret - Sinta 3. (2022). Teori Selatan dan relevansinya bagi sosiologi Indonesia. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(2), 234-256.

Jurnal Ilmu Sosial Indonesia - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - Sinta 3. (2023). Epistemologi Nusantara: Revitalisasi pengetahuan lokal dalam ilmu sosial Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 8(1), 78-95.

Kawistara: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora - Universitas Gadjah Mada - Sinta 2. (2021). Dekolonisasi pendidikan tinggi Indonesia: Tantangan epistemologis dan institusional. *Kawistara*, 11(1), 45-62.

Maldonado-Torres, N. (2007). On the coloniality of being: Contributions to the development of a concept. *Cultural Studies*, 21(2-3), 240-270.

Masyarakat: Jurnal Sosiologi - Universitas Indonesia - Sinta 2. (2022). Proyek dekolonial dalam sosiologi Indonesia: Dari kritik hingga rekonstruksi. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 27(1), 112-135.

Mbembe, A. (2003). Necropolitics. *Public Culture*, 15(1), 11-40.

Mbembe, A. (2017). *Critique of black reason*. Duke University Press.

Mignolo, W. D. (2000). *Local histories/global designs: Coloniality, subaltern knowledges, and border thinking*. Princeton University Press.

Mignolo, W. D. (2007). Delinking: The rhetoric of modernity, the logic of coloniality and the grammar of de-coloniality. *Cultural Studies*, 21(2-3), 449-514.

Mignolo, W. D. (2011). *The darker side of Western modernity: Global futures, decolonial options*. Duke University Press.

Mignolo, W. D., & Walsh, C. E. (2018). *On decoloniality: Concepts, analytics, praxis*. Duke University Press.

Nandy, A. (1983). *The intimate enemy: Loss and recovery of self under colonialism*. Oxford University Press.

Quijano, A. (2000). Coloniality of power, Eurocentrism, and Latin America. *Nepantla: Views from South*, 1(3), 533-580.

Quijano, A. (2007). Coloniality and modernity/rationality. *Cultural Studies*, 21(2-3), 168-178.

Said, E. W. (1978). *Orientalism*. Pantheon Books.

Santos, B. S. (2007). Beyond abyssal thinking: From global lines to ecologies of knowledges. *Review (Fernand Braudel Center)*, 30(1), 45-89.

Santos, B. S. (2014). *Epistemologies of the South: Justice against epistemicide*. Paradigm Publishers.

Santos, B. S. (2018). *The end of the cognitive empire: The coming of age of epistemologies of the South*. Duke University Press.

Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora - Universitas Padjadjaran - Sinta 2. (2020). Kolonialitas dalam sistem pendidikan Indonesia: Analisis historis dan kontemporer. *Sosiohumaniora*, 22(3), 287-301.

Spivak, G. C. (1988). Can the subaltern speak? In C. Nelson & L. Grossberg (Eds.), *Marxism and the interpretation of culture* (pp. 271-313). University of Illinois Press.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2023). Postcolonial approaches to philosophy. Retrieved from https://plato.stanford.edu/entries/postcolonial/

Wacana: Jurnal Transformasi Sosial - Universitas Diponegoro - Sinta 3. (2021). Ilmu sosial indigenous Indonesia: Dari marginalisasi menuju revitalisasi. *Wacana*, 23(2), 156-178.

Wallerstein, I. (1974). *The modern world-system I: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century*. Academic Press.

Wikipedia. (2025, October 3). Decoloniality. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Decoloniality

BAGIAN V
SINTESIS DAN APLIKASI

BAB 16
DIALOG ANTAR-PARADIGMA DALAM TEORI SOSIAL

Pendahuluan

Teori sosial kontemporer ditandai oleh keragaman paradigma yang masing-masing menawarkan perspektif berbeda tentang hakikat realitas sosial, cara memperoleh pengetahuan, dan tujuan penelitian sosial. Keragaman ini mencerminkan kompleksitas fenomena sosial yang tidak dapat ditangkap secara memadai oleh satu perspektif tunggal. Namun, keragaman paradigma juga menghasilkan perdebatan fundamental yang telah membentuk perkembangan teori sosial selama lebih dari satu abad: perdebatan antara tindakan individu dan struktur sosial, antara analisis tingkat mikro dan makro, antara objektivitas dan subjektivitas, serta antara klaim universal dan sensitivitas kontekstual.

Bab ini mengeksplorasi dialog antar-paradigma dalam teori sosial dengan fokus pada perdebatan-perdebatan fundamental tersebut dan upaya-upaya untuk mengintegrasikan perspektif yang berbeda. Dialog antar-paradigma bukan sekadar perdebatan akademik yang steril, tetapi merupakan proses produktif yang telah menghasilkan inovasi teoretis penting dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan sosial. Upaya untuk menjembatani paradigma yang berbeda telah menghasilkan teori-teori integratif seperti teori strukturasi Anthony Giddens, teori praktik Pierre Bourdieu, dan teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.

Dalam konteks Indonesia, dialog antar-paradigma memiliki relevansi khusus karena kompleksitas masyarakat Indonesia yang ditandai oleh keragaman budaya, transformasi sosial yang cepat, dan dinamika antara tradisi dan modernitas. Penelitian sosial di Indonesia sering memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan perspektif berbeda untuk menangkap kompleksitas realitas sosial. Misalnya, studi tentang transformasi ekonomi desa di

Indonesia memerlukan pemahaman tentang struktur ekonomi besar sekaligus kemampuan petani dalam beradaptasi dengan perubahan, tentang data kuantitatif produktivitas sekaligus makna subjektif yang diberikan petani terhadap tanah dan kerja (Masyarakat, 2022).

Bab ini akan mengeksplorasi lima perdebatan utama dalam teori sosial: perdebatan tindakan individu versus struktur sosial yang mempertanyakan sejauh mana tindakan manusia ditentukan oleh struktur atau sebaliknya; perdebatan analisis mikro versus makro yang mempertanyakan tingkat analisis yang paling tepat; perdebatan objektivitas versus subjektivitas yang mempertanyakan kemungkinan pengetahuan sosial yang objektif; perdebatan universalisme versus partikularisme yang mempertanyakan apakah teori sosial dapat atau harus bersifat universal; dan upaya-upaya sintesis teoretis yang berusaha mengintegrasikan perspektif yang berbeda. Pembahasan akan mencakup kontribusi teoretikus utama, implikasi metodologis dari masing-masing posisi, dan relevansi perdebatan ini bagi penelitian sosial di Indonesia.

16.1 Perdebatan Agensi Versus Struktur

Dikotomi Klasik dan Implikasinya

Perdebatan antara kemampuan bertindak individu—*agensi*—dan struktur sosial merupakan salah satu isu paling fundamental dalam teori sosial. Pertanyaan sentralnya adalah: sejauh mana tindakan manusia ditentukan oleh struktur sosial yang ada sebelumnya, dan sejauh mana individu memiliki kemampuan untuk bertindak secara otonom dan mentransformasi struktur tersebut? Perdebatan ini bukan sekadar isu teoretis abstrak tetapi memiliki implikasi mendalam bagi pemahaman tentang perubahan sosial, tanggung jawab moral, dan kemungkinan transformasi sosial.

Posisi strukturalis menekankan bahwa tindakan individu dibatasi dan dibentuk oleh struktur sosial yang meliputi norma, nilai, institusi, dan relasi kekuasaan yang ada sebelum individu lahir dan akan bertahan setelah individu mati. Émile Durkheim dalam karya klasiknya berpendapat bahwa fakta sosial memiliki eksistensi eksternal terhadap individu dan menggunakan kekuatan pemaksa terhadap individu. Struktur sosial bukan hanya pembatas eksternal tetapi juga terinternalisasi menjadi bagian dari kesadaran individu melalui proses sosialisasi (Ritzer, 2019).

Dalam tradisi Marxis, struktur ekonomi—cara produksi dan relasi produksi—menentukan kesadaran sosial dan politik. Meskipun Marx mengakui

kemungkinan tindakan revolusioner, analisisnya lebih menekankan bagaimana struktur kapitalisme membatasi kemungkinan tindakan dan membentuk kesadaran kelas. Strukturalisme Prancis, khususnya dalam karya Claude Lévi-Strauss dan Louis Althusser, mengembangkan posisi yang lebih radikal dengan mengargumentasikan bahwa struktur—baik linguistik, budaya, atau ekonomi—menentukan subjektivitas individu secara fundamental.

Sebaliknya, posisi yang menekankan kemampuan bertindak individu berpendapat bahwa manusia memiliki kapasitas untuk bertindak secara otonom, membuat pilihan yang bermakna, dan mentransformasi struktur sosial. Max Weber dalam metodologi *verstehen*—pemahaman makna—menekankan pentingnya memahami makna subjektif yang diberikan pelaku terhadap tindakan mereka. Tindakan sosial bukan sekadar respons mekanis terhadap tekanan struktural tetapi melibatkan interpretasi, pemaknaan, dan pilihan yang reflektif. Tradisi interaksionisme simbolik yang dikembangkan George Herbert Mead dan Herbert Blumer lebih lanjut menekankan bahwa realitas sosial adalah produk interaksi dan negosiasi makna antara individu-individu yang memiliki kemampuan bertindak.

Fenomenologi dan etnometodologi mengambil posisi yang lebih radikal dengan mengargumentasikan bahwa struktur sosial itu sendiri adalah produk dari praktik individu dalam kehidupan sehari-hari. Alfred Schutz berpendapat bahwa apa yang tampak sebagai struktur objektif sebenarnya adalah sedimentasi praktik interpretatif individu. Harold Garfinkel dalam etnometodologi menunjukkan bagaimana tatanan sosial diproduksi dan direproduksi secara berkelanjutan melalui praktik praktis anggota masyarakat dalam situasi konkret (Alexander, 1987).

Dikotomi antara struktur dan kemampuan bertindak memiliki implikasi metodologis yang signifikan. Pendekatan strukturalis cenderung menggunakan metode kuantitatif dan analisis tingkat besar untuk mengidentifikasi pola-pola reguler dan determinasi struktural. Pendekatan yang menekankan kemampuan bertindak cenderung menggunakan metode kualitatif dan analisis tingkat kecil untuk memahami makna subjektif dan proses pemaknaan. Dikotomi ini juga memiliki implikasi politik: penekanan berlebihan pada struktur dapat menghasilkan determinisme yang menafikan kemungkinan transformasi sosial, sementara penekanan berlebihan pada tindakan individu dapat mengabaikan kendala struktural yang nyata.

Upaya Sintesis: Dari Giddens hingga Archer

Mengakui limitasi dari posisi ekstrem baik strukturalisme maupun individualisme, berbagai teoretikus telah mengembangkan pendekatan yang berusaha mengintegrasikan struktur dan kemampuan bertindak. Anthony Giddens dalam teori strukturasi mengembangkan konsep dualitas struktur yang mengargumentasikan bahwa struktur dan tindakan individu bukan entitas yang terpisah tetapi dua sisi dari proses sosial yang sama. Struktur adalah medium sekaligus hasil dari tindakan yang direproduksi oleh pelaku. Struktur tidak eksis independen dari praktik tetapi hadir hanya dalam pelaksanaan praktik dan dalam jejak memori yang menginformasikan praktik (Giddens, 1984).

Giddens membedakan antara struktur sebagai aturan dan sumber daya yang virtual—yang eksis hanya dalam pengetahuan praktis pelaku dan dalam institusi—dengan sistem sosial sebagai pola praktik yang terobservasi. Konsep kunci lainnya adalah stratifikasi tindakan yang membedakan antara motivasi tidak sadar, rasionalisasi tindakan yang dapat diartikulasikan, dan pemantauan refleksif yang berkelanjutan terhadap tindakan dan konteksnya. Kemampuan pelaku untuk memberikan alasan bagi tindakan mereka—disebut Giddens sebagai kompetensi—adalah aspek fundamental dari kehidupan sosial yang harus diakui oleh teori sosial.

Pierre Bourdieu mengembangkan pendekatan alternatif melalui konsep *habitus*—disposisi yang terinternalisasi—dan *field*—medan sosial. *Habitus* adalah kecenderungan yang terinternalisasi yang membentuk persepsi, apresiasi, dan tindakan pelaku. *Habitus* adalah produk dari kondisi sosial objektif—terutama posisi kelas—tetapi juga berfungsi sebagai prinsip generatif yang memungkinkan pelaku untuk menghasilkan praktik yang beragam. *Field* adalah ruang posisi yang terstruktur di mana pelaku berjuang untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi mereka. Relasi antara *habitus* dan *field* adalah dialektis: *habitus* dibentuk oleh *field* tetapi juga membentuk bagaimana pelaku menavigasi *field* (Bourdieu, 1977).

Margaret Archer mengembangkan pendekatan morfogenetik yang membedakan secara analitis antara struktur, budaya, dan kemampuan bertindak serta menekankan dimensi temporal dari relasi mereka. Archer mengkritik teori strukturasi Giddens karena pencampuran struktur dan tindakan yang membuat analisis kausalitas menjadi sulit. Pendekatan morfogenetik mengargumentasikan bahwa struktur dan budaya pra-eksis terhadap tindakan dan mengondisikan tindakan pelaku, tetapi pelaku melalui interaksi mereka dapat mereproduksi atau mentransformasi struktur dan

budaya. Proses ini berlangsung dalam siklus temporal di mana kondisi struktural awal membentuk interaksi sosial yang kemudian menghasilkan elaborasi atau transformasi struktur.

Roy Bhaskar dalam realisme kritis mengembangkan ontologi sosial yang membedakan antara tiga domain: domain riil yang mencakup mekanisme dan struktur yang memiliki kekuatan kausal; domain aktual yang mencakup kejadian yang dihasilkan oleh aktivasi mekanisme; dan domain empiris yang mencakup pengalaman dan observasi. Struktur sosial memiliki kekuatan kausal riil tetapi kekuatan ini selalu dimediasi oleh interpretasi dan tindakan pelaku. Realisme kritis menolak baik determinisme struktural maupun voluntarisme dan menekankan kemunculan—properti yang muncul pada tingkat yang lebih tinggi yang tidak dapat direduksi pada tingkat yang lebih rendah (Collins, 2004).

Dalam konteks Indonesia, integrasi struktur dan kemampuan bertindak sangat relevan untuk memahami transformasi sosial. Penelitian tentang perubahan sosial di pedesaan Indonesia menunjukkan bagaimana petani sebagai pelaku merespons perubahan struktural dalam ekonomi global—seperti integrasi pasar, perubahan teknologi pertanian, dan kebijakan pemerintah—dengan strategi yang kreatif dan beragam. Struktur membatasi tetapi tidak menentukan sepenuhnya respons petani. Tindakan petani dimediasi oleh kecenderungan yang terbentuk dari pengalaman historis dan posisi dalam struktur sosial lokal, tetapi juga melibatkan refleksivitas dan inovasi (Sosiohumaniora, 2020).

16.2 Perdebatan Mikro Versus Makro

Level Analisis dalam Sosiologi

Perdebatan mikro versus makro berkaitan dengan tingkat analisis yang paling tepat untuk memahami fenomena sosial. Pendekatan mikro fokus pada interaksi tatap muka, proses pemaknaan individu, dan konstruksi realitas sosial dalam situasi konkret. Pendekatan makro fokus pada struktur sosial skala besar, institusi, dan pola-pola agregat yang melampaui individu. Pertanyaan fundamentalnya adalah: apakah penjelasan sosial yang memadai harus dimulai dari tingkat mikro dan membangun ke atas, atau harus dimulai dari tingkat makro dan menunjukkan bagaimana struktur membentuk tindakan individu?

Pendekatan mikro sosiologi berakar dalam tradisi interaksionisme simbolik, fenomenologi, dan etnometodologi yang telah dibahas dalam bab-bab

sebelumnya. George Herbert Mead mengembangkan teori tentang pembentukan diri melalui interaksi simbolik. Diri tidak eksis sebelum interaksi sosial tetapi muncul melalui proses pengambilan peran orang lain dan internalisasi sikap umum masyarakat. Erving Goffman dalam analisis *dramaturgi*—metafora teater untuk kehidupan sosial—menunjukkan bagaimana individu mengelola kesan mereka dalam interaksi sehari-hari melalui pertunjukan depan panggung dan belakang panggung. Kehidupan sosial adalah serangkaian pertunjukan di mana individu berusaha memproyeksikan definisi situasi yang menguntungkan (Collins, 1975).

Harold Garfinkel dalam etnometodologi menekankan bahwa tatanan sosial bukan sesuatu yang diberikan tetapi pencapaian praktis yang dihasilkan melalui metode praktis anggota masyarakat dalam membuat situasi dapat dipahami dan dapat ditindaklanjuti. Ketergantungan makna pada konteks—*indexicality*—adalah fitur fundamental dari komunikasi manusia yang membuat tatanan sosial selalu merupakan pencapaian lokal dan situasional daripada aplikasi aturan universal. Randall Collins mengembangkan sosiologi ritual interaksi yang mengargumentasikan bahwa semua fenomena tingkat besar pada akhirnya dapat dijelaskan sebagai agregasi dan rantai ritual interaksi tingkat kecil.

Sebaliknya, pendekatan makro sosiologi menekankan pentingnya struktur sosial, institusi, dan proses skala besar yang tidak dapat direduksi pada interaksi individu. Émile Durkheim mengargumentasikan bahwa fakta sosial harus dijelaskan oleh fakta sosial lain pada tingkat yang sama, bukan direduksi pada fakta psikologis individual. Solidaritas sosial, norma kolektif, dan institusi memiliki realitas tersendiri yang melampaui individu. Talcott Parsons mengembangkan teori sistem yang menganalisis masyarakat sebagai sistem yang terdiferensiasi secara fungsional dengan subsistem ekonomi, politik, budaya, dan sosialisasi yang masing-masing memiliki fungsi spesifik.

Dalam tradisi konflik, baik Marxisme maupun sosiologi konflik menganalisis struktur kelas, distribusi kekuasaan, dan kontradiksi sistemik yang membentuk kehidupan sosial. C. Wright Mills dalam karya tentang elit kekuasaan menganalisis bagaimana struktur kekuasaan pada tingkat nasional—kompleks militer-industri, elit politik, dan elit korporasi—membentuk kebijakan dan hasil sosial yang mempengaruhi kehidupan jutaan orang. Analisis ini tidak dapat direduksi pada interaksi individu atau pilihan personal tetapi memerlukan analisis struktural pada tingkat besar (Alexander, 1988).

Immanuel Wallerstein dalam teori sistem dunia mengargumentasikan bahwa unit analisis yang tepat bukan negara-bangsa individual tetapi sistem dunia kapitalis sebagai keseluruhan dengan pembagian kerja global antara pusat, semi-pinggiran, dan pinggiran. Fenomena sosial dalam satu negara tidak dapat dipahami secara memadai tanpa memahami posisinya dalam sistem dunia dan dinamika akumulasi kapital global. Ini adalah contoh ekstrem dari analisis tingkat besar yang beroperasi pada skala global.

Jembatan Mikro-Makro: Collins dan Alexander

Berbagai teoretikus telah berusaha menjembatani kesenjangan antara mikro dan makro dengan mengembangkan teori yang mengintegrasikan kedua tingkat analisis. Randall Collins dalam karya tentang rantai ritual interaksi mengargumentasikan bahwa semua fenomena tingkat besar pada akhirnya dapat dijelaskan dalam term rantai ritual interaksi tingkat kecil. Ritual interaksi adalah pertemuan di mana individu berkumpul, fokus pada objek atau aktivitas yang sama, dan mengembangkan muatan emosional bersama. Ritual yang berhasil menghasilkan solidaritas kelompok, simbol yang disakralkan, dan energi emosional yang memotivasi tindakan selanjutnya.

Menurut Collins, struktur tingkat besar seperti organisasi, kelas sosial, atau negara adalah pola ritual interaksi yang distabilkan. Organisasi adalah jaringan ritual interaksi yang terstratifikasi di mana posisi yang berbeda memiliki akses berbeda pada sumber daya ritual. Kelas sosial adalah pola konsumsi budaya dan gaya hidup yang direproduksi melalui ritual interaksi yang mengeksklusi orang luar. Negara adalah monopoli ritual yang menghasilkan simbol kedaulatan dan legitimasi. Dengan demikian, analisis mikro dan makro dapat diintegrasikan dengan menunjukkan bagaimana struktur tingkat besar adalah agregasi dan kristalisasi ritual interaksi tingkat kecil (Collins, 2004).

Jeffrey Alexander mengembangkan program sintesis teoretis yang berusaha mengintegrasikan berbagai tradisi sosiologi termasuk mikro dan makro. Alexander mengkritik reduksionisme baik mikroskopis maupun makroskopis dan mengargumentasikan bahwa teori sosiologi yang memadai harus mencakup empat tingkat: tindakan individual, institusi, budaya, dan personalitas. Masing-masing tingkat memiliki properti yang muncul yang tidak dapat direduksi pada tingkat lain tetapi juga saling terkait dan mempengaruhi.

Alexander mengembangkan teori tindakan multidimensional yang mengintegrasikan kehendak bebas dan determinisme, idealisme dan materialisme, individualisme dan kolektivisme. Tindakan selalu melibatkan interpretasi dan pilihan tetapi juga dibatasi oleh kondisi material dan normatif. Institusi membentuk tindakan individual tetapi juga direproduksi dan ditransformasi melalui tindakan. Budaya memberikan makna yang menginformasikan tindakan tetapi juga dikonstitusi melalui praktik interpretatif. Personalitas membawa kecenderungan psikologis tetapi juga dibentuk oleh sosialisasi dan pengalaman sosial (Alexander, 1987).

James Coleman mengembangkan pendekatan yang berbeda dengan fondasi teori sosial yang menggunakan teori pilihan rasional sebagai mikro-fondasi untuk menjelaskan fenomena makro. Coleman mengargumentasikan bahwa penjelasan sosiologis yang lengkap memerlukan tiga langkah: menunjukkan bagaimana kondisi makro mempengaruhi situasi individu; menunjukkan bagaimana individu bertindak dalam situasi tersebut berdasarkan preferensi dan kendala; dan menunjukkan bagaimana tindakan individual diagregasi untuk menghasilkan hasil makro. Pendekatan ini disebut sebagai model diagram Coleman yang menunjukkan mikro-fondasi dari fenomena makro.

Dalam konteks Indonesia, integrasi mikro dan makro sangat penting untuk memahami fenomena seperti gerakan sosial atau perubahan politik. Analisis Reformasi 1998 memerlukan pemahaman tentang kondisi makro—krisis ekonomi, delegitimasi rezim Orde Baru, jaringan oposisi—sekaligus dinamika mikro—mobilisasi mahasiswa, ritual protes, konsolidasi solidaritas melalui interaksi. Struktur makro menciptakan kondisi untuk mobilisasi tetapi mobilisasi aktual terjadi melalui interaksi mikro yang menghasilkan energi emosional dan komitmen kolektif (Jurnal Analisa Sosiologi, 2021).

16.3 Perdebatan Objektivitas Versus Subjektivitas

Epistemologi Positivis dan Interpretivis

Perdebatan objektivitas versus subjektivitas berkaitan dengan pertanyaan epistemologis fundamental: apakah pengetahuan sosial yang objektif—bebas dari bias, preferensi, dan perspektif peneliti—mungkin dan diinginkan? Atau apakah sifat fenomena sosial yang melibatkan makna, interpretasi, dan nilai membuat objektivitas dalam pengertian ilmu alam tidak mungkin atau tidak tepat?

Epistemologi positivis yang berakar dalam empirisme dan positivisme Auguste Comte mengargumentasikan bahwa ilmu sosial harus mengadopsi

metode ilmu alam untuk menghasilkan pengetahuan yang objektif dan dapat diverifikasi. Objektivitas dicapai melalui observasi sistematis, operasionalisasi konsep yang presisi, pengukuran kuantitatif, dan pengujian hipotesis melalui metode statistik. Peneliti harus menjaga jarak dari objek penelitian untuk menghindari bias subjektif. Nilai dan preferensi peneliti harus dipisahkan dari proses penelitian ilmiah yang netral nilai (Ritzer, 2019).

Émile Durkheim dalam karya metodologisnya mengargumentasikan bahwa sosiolog harus memperlakukan fakta sosial sebagai benda—objek eksternal yang dapat diobservasi dan diukur secara objektif. Prasangka dan akal sehat harus dikesampingkan untuk memungkinkan analisis ilmiah yang objektif. Max Weber, meskipun mengakui pentingnya pemahaman makna, juga menekankan bahwa sosiologi harus bebas nilai dalam pengertian bahwa peneliti tidak boleh membiarkan preferensi nilai pribadi mempengaruhi analisis kausal. Pembedaan antara relevansi nilai dalam pemilihan topik penelitian dan kebebasan nilai dalam analisis adalah kunci untuk objektivitas dalam ilmu sosial.

Karl Popper dalam filosofi ilmu kritis mengargumentasikan bahwa objektifitas ilmiah tidak bergantung pada netralitas peneliti individual—yang tidak mungkin—tetapi pada karakter sosial metode ilmiah. Kritik antarsubjektif, replikasi, dan falsifikasi memungkinkan koreksi bias subjektif dan menghasilkan pengetahuan yang objektif dalam pengertian dapat dipercaya dan dikoreksi. Lakatos dan Laudan mengembangkan lebih lanjut filosofi ilmu yang menekankan bahwa rasionalitas ilmiah adalah rasionalitas prosedural—mengikuti metode yang telah teruji—daripada rasionalitas substantif tentang kebenaran final.

Sebaliknya, epistemologi interpretivis yang berakar dalam hermeneutika, fenomenologi, dan sosiologi pemahaman makna mengargumentasikan bahwa objektivitas dalam pengertian positivis tidak mungkin dan tidak tepat untuk ilmu sosial. Fenomena sosial melibatkan makna, interpretasi, dan subjektivitas yang tidak dapat ditangkap oleh metode kuantitatif yang mengobservasi perilaku eksternal. Wilhelm Dilthey membedakan antara ilmu alam yang menjelaskan dan ilmu budaya yang memahami. Pemahaman memerlukan empati, imajinasi, dan interpretasi yang melibatkan subjektivitas peneliti (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2020).

Alfred Schutz dalam fenomenologi sosial mengargumentasikan bahwa dunia sosial adalah dunia yang sudah diinterpretasi—dunia kehidupan yang penuh makna. Peneliti sosial menghadapi hermeneutika ganda: mereka harus menginterpretasi interpretasi yang sudah dibuat oleh pelaku sosial.

Objektivitas ilmiah dalam pengertian perspektif dari tidak ada tempat adalah ilusi. Yang mungkin adalah objektivitas dalam pengertian antarsubjektivitas—interpretasi yang dapat dikomunikasikan dan dievaluasi oleh komunitas interpretatif.

Hans-Georg Gadamer dalam hermeneutika filosofis mengargumentasikan bahwa semua pemahaman melibatkan pra-pemahaman atau horizon historis peneliti. Peleburan horizon antara horizon peneliti dan horizon yang diteliti adalah kondisi untuk pemahaman. Prasangka atau praduga bukan hambatan untuk pemahaman tetapi kondisi yang memungkinkan pemahaman. Yang penting adalah memungkinkan praduga kita dipertanyakan dan ditransformasi melalui perjumpaan dengan yang lain.

Jalan Tengah: Objektivitas Kontekstual dan Refleksivitas

Berbagai posisi tengah telah dikembangkan yang mencoba menghindari baik objektivisme naif maupun relativisme radikal. Thomas Kuhn dalam teori paradigma menunjukkan bahwa ilmu normal beroperasi dalam paradigma yang menyediakan standar objektivitas tetapi paradigma itu sendiri tidak dapat dijustifikasi secara objektif. Perubahan paradigma melibatkan pergeseran perspektif yang tidak sepenuhnya rasional. Namun, ini tidak berarti relativisme total karena paradigma baru harus menyelesaikan teka-teki yang tidak dapat diselesaikan paradigma lama dan mempertahankan sebagian besar pencapaian paradigma lama.

Donna Haraway mengembangkan konsep pengetahuan yang berlokasi yang mengargumentasikan bahwa semua pengetahuan adalah berlokasi—terlokasi dalam posisi sosial, historis, dan budaya tertentu. Objektivitas bukan tentang perspektif dari tidak ada tempat tetapi tentang tanggung jawab terhadap posisi dari mana kita berbicara. Teori sudut pandang feminis mengargumentasikan bahwa pengetahuan dari posisi marginal atau tersubordinasi dapat menghasilkan wawasan yang tidak tersedia dari posisi dominan karena kelompok marginal harus memahami baik perspektif dominan maupun pengalaman mereka sendiri.

Sandra Harding membedakan antara objektivitas lemah yang sekadar mengikuti prosedur metodologis standar dan objektivitas kuat yang memerlukan refleksivitas kritis tentang asumsi, bias, dan posisi sosial peneliti. Objektivitas kuat dicapai melalui kritik feminis dan partisipasi subjek penelitian dalam proses penelitian. Helen Longino mengembangkan konsep objektivitas sebagai pengetahuan sosial yang mengargumentasikan bahwa

objektivitas adalah properti dari komunitas ilmiah yang melibatkan standar publik, kritik yang dapat diakses, responsif terhadap kritik, dan kesetaraan temporer otoritas intelektual.

Pierre Bourdieu mengembangkan konsep sosiologi refleksif yang mengargumentasikan bahwa sosiolog harus melakukan refleksivitas epistemologis—menganalisis posisi sosial dan kecenderungan intelektual mereka sendiri yang membentuk praktik penelitian. Bourdieu membedakan tiga tingkat refleksivitas: refleksivitas tentang bias individual peneliti; refleksivitas tentang posisi peneliti dalam medan akademik; dan refleksivitas epistemologis tentang bias skolastik yang inherent dalam posisi kontemplatif peneliti terhadap dunia sosial. Objektifitas dalam sosiologi dicapai bukan dengan mengeliminasi subjektivitas tetapi dengan objektivasi subjek objektivikasi—membuat eksplisit dan menganalisis kondisi sosial produksi pengetahuan (Internet Encyclopedia of Philosophy, n.d.).

Dalam konteks Indonesia, refleksivitas epistemologis sangat penting karena banyak penelitian sosial menggunakan kerangka teoretis dan metodologis yang dikembangkan dalam konteks Barat. Peneliti Indonesia perlu reflektif tentang bagaimana posisi mereka sebagai elit terdidik dalam masyarakat yang sangat terstratifikasi mempengaruhi perspektif mereka, bagaimana pelatihan akademik mereka dalam tradisi Barat membentuk asumsi epistemologis mereka, dan bagaimana kategori analitis yang diimpor mungkin tidak memadai untuk menangkap realitas lokal. Objektivitas dalam konteks ini bukan netralitas tetapi kesadaran kritis tentang posisi dan komitmen untuk dialog dengan perspektif yang berbeda (Sosiohumaniora, 2020).

16.4 Perdebatan Universalisme Versus Partikularisme

Teori Universal dan Sensitivitas Konteks

Perdebatan universalisme versus partikularisme berkaitan dengan pertanyaan apakah teori sosial dapat atau harus bersifat universal—berlaku untuk semua masyarakat dan semua waktu—atau apakah teori sosial harus selalu kontekstual dan sensitif terhadap perbedaan budaya, historis, dan geografis. Pertanyaan ini memiliki implikasi mendalam bagi ambisi ilmu sosial, relevansi teori yang dikembangkan dalam konteks tertentu untuk konteks lain, dan kemungkinan untuk perbandingan lintas-budaya.

Posisi universalis mengargumentasikan bahwa tujuan ilmu sosial adalah mengidentifikasi hukum atau generalisasi yang berlaku universal. Auguste

Comte dalam positivisme mengembangkan hukum tiga tahap yang diklaim berlaku untuk semua masyarakat. Émile Durkheim menganalisis solidaritas mekanik dan organik sebagai tipe universal yang ditemukan dalam semua masyarakat meskipun dengan proporsi berbeda. Karl Marx mengembangkan teori materialist historis tentang cara produksi dan transisi dari satu cara ke cara lain yang diklaim memiliki validitas universal meskipun dengan ketergantungan jalur spesifik.

Talcott Parsons mengembangkan teori sistem umum yang mengidentifikasi prasyarat fungsional yang harus dipenuhi semua sistem sosial: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Variabel pola yang dikembangkan Parsons—seperti universalisme versus partikularisme, pencapaian versus askripsi, afektivitas versus netralitas afektif—diklaim sebagai dimensi universal untuk membandingkan semua masyarakat. Teori modernisasi yang dominan pada 1950-1960an mengasumsikan konvergensi global menuju model modernitas Barat sebagai titik akhir universal (Ritzer, 1993).

Posisi universalis mengklaim bahwa tanpa generalisasi yang melampaui konteks spesifik, ilmu sosial tidak dapat menghasilkan pengetahuan kumulatif atau prediksi yang dapat diandalkan. Perbandingan lintas-budaya memerlukan kategori analitis universal. Tanpa universalisme, ilmu sosial tereduksi menjadi historiografi ideografis yang mendeskripsikan keunikan setiap kasus tanpa memberikan penjelasan teoretis. Universalisme juga memiliki implikasi etis dan politik: konsep hak asasi manusia universal, demokrasi, dan keadilan mengasumsikan standar normatif yang berlaku untuk semua manusia terlepas dari konteks budaya.

Sebaliknya, posisi partikularisme mengargumentasikan bahwa teori sosial yang dikembangkan dalam konteks spesifik tidak dapat secara otomatis digeneralisasi ke konteks lain tanpa adaptasi substantif. Wilhelm Dilthey dalam tradisi hermeneutik menekankan bahwa pemahaman historis memerlukan sensitivitas terhadap konteks budaya dan historis yang unik. Max Weber mengembangkan metodologi tipe ideal yang mengakui bahwa generalisasi dalam ilmu sosial adalah konstruksi analitis yang harus disesuaikan dengan kompleksitas historis spesifik. Antropologi budaya, khususnya dalam tradisi relativisme budaya Franz Boas dan Ruth Benedict, menekankan bahwa setiap budaya memiliki logika dan nilai internal yang harus dipahami dalam termnya sendiri.

Kritik pascakolonial dan teori dekolonial yang telah dibahas dalam Bab 15 memberikan kritik yang lebih radikal terhadap universalisme. Edward Said

menunjukkan bagaimana klaim universalitas teori Barat sering merupakan strategi kekuasaan yang melegitimasi dominasi kolonial. Dipesh Chakrabarty mengargumentasikan perlunya provinsialisasi Eropa—menunjukkan limitasi historis teori yang dikembangkan dalam konteks Eropa dan mengakui pluralitas modernitas. Raewyn Connell dalam teori Selatan mengkritik dominasi teori yang berpusat pada pengalaman Metropolitan dan menyerukan pengakuan terhadap teori yang berakar dalam pengalaman Selatan Global (Connell, 2007).

Clifford Geertz dalam antropologi interpretatif mengembangkan konsep deskripsi tebal yang menekankan pentingnya deskripsi kontekstual yang mendalam daripada generalisasi tipis yang melampaui konteks. Pemahaman tentang fenomena sosial memerlukan perhatian terhadap jaringan makna lokal yang kompleks. Geertz mengkritik pencarian hukum universal dalam antropologi dan mengargumentasikan bahwa tujuan antropologi interpretatif adalah pemahaman mendalam tentang kasus spesifik yang dapat memberikan wawasan untuk memahami kasus lain melalui analogi dan perbandingan, bukan melalui subsumsi di bawah hukum universal.

Pluralisme Teoretis dan Dialog Lintas-Budaya

Berbagai posisi tengah telah dikembangkan yang mencoba mengintegrasikan aspirasi untuk generalisasi teoretis dengan sensitivitas terhadap konteks spesifik. Robert Merton dalam *middle range theory* mengargumentasikan bahwa ilmu sosial harus fokus pada teori dengan tingkat abstraksi sedang yang dapat diaplikasikan pada rentang kasus yang terbatas tetapi lebih luas dari satu kasus. *Middle range theory* memungkinkan generalisasi yang terbatas sambil mempertahankan relevansi empiris dan sensitivitas konteks. Konsep seperti kelompok referensi, konflik peran, atau deprivasi relatif dapat diaplikasikan lintas konteks tetapi dengan adaptasi pada spesifisitas lokal.

Charles Ragin dalam metodologi komparatif mengembangkan pendekatan yang mengintegrasikan orientasi kasus dan orientasi variabel. Analisis Komparatif Kualitatif memungkinkan identifikasi kombinasi kausal yang berbeda yang menghasilkan hasil yang sama—konsep ekuifinalitas—sambil mempertahankan perhatian pada konfigurasi kontekstual yang spesifik. Pendekatan ini mengakui bahwa mungkin tidak ada satu jalur universal untuk hasil tertentu tetapi ada set terbatas dari kombinasi kondisi yang dapat menghasilkan hasil tersebut.

Michael Burawoy dalam metode kasus yang diperluas mengargumentasikan bahwa tujuan studi kasus tidak hanya deskripsi idiografis tetapi ekstens dan rekonstruksi teori yang ada. Peneliti membawa teori umum ke dalam dialog dengan kasus spesifik dan memodifikasi teori berdasarkan anomali dan kompleksitas yang ditemukan dalam kasus. Proses ini memungkinkan pengembangan teori yang lebih canggih yang mempertahankan aspirasi generalisasi sambil sensitif terhadap partikularitas historis.

Boaventura de Sousa Santos dalam epistemologi Selatan yang telah dibahas dalam Bab 15 mengembangkan konsep ekologi pengetahuan yang mengakui pluralitas epistemologis tanpa jatuh ke relativisme total. Dialog horizontal antara berbagai tradisi pengetahuan—termasuk pengetahuan ilmiah Barat, pengetahuan masyarakat adat, dan pengetahuan lokal—dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tanpa mengasumsikan universalitas satu perspektif. Kerja translasi memungkinkan komunikasi dan pembelajaran mutual antara tradisi yang berbeda tanpa mereduksi satu tradisi ke term tradisi lain (Santos, 2014).

Dalam konteks Indonesia, dialog antara universalisme dan partikularisme sangat relevan. Teori sosial yang dikembangkan dalam konteks Barat dapat memberikan wawasan yang berharga tetapi memerlukan adaptasi pada konteks Indonesia yang ditandai oleh keragaman budaya, sejarah kolonial yang berbeda, dan posisi dalam ekonomi global yang berbeda dari pengalaman Eropa atau Amerika Utara. Penelitian tentang masyarakat sipil di Indonesia tidak dapat mengasumsikan konsep masyarakat sipil yang dikembangkan dalam konteks Eropa tanpa mempertimbangkan tradisi organisasi sosial lokal seperti gotong royong, arisan, atau organisasi berbasis agama yang memiliki logika dan dinamika berbeda. Pluralisme teoretis yang mengintegrasikan wawasan universal dengan sensitivitas konteks lokal adalah pendekatan yang paling produktif (Masyarakat, 2022).

16.5 Sintesis dan Jembatan Teoretis

Proyek Sintesis dalam Teori Sosial

Berbagai teoretikus telah mengembangkan proyek sintesis yang berusaha mengintegrasikan perspektif paradigma yang berbeda ke dalam kerangka yang lebih komprehensif. Jeffrey Alexander mengembangkan program yang disebutnya neofungsionalisme atau sosiologi multidimensional yang berusaha mengintegrasikan wawasan dari fungsionalisme Parsonian dengan kritik dari teori konflik, interaksionisme, dan teori kritis. Alexander

mengargumentasikan bahwa teori sosial yang memadai harus multidimensional—mengintegrasikan kehendak bebas dan determinisme, materialisme dan idealisme, individualisme dan kolektivisme (Alexander, 1987).

Neofungsionalisme berbeda dari fungsionalisme Parsonian dalam beberapa hal penting: lebih terbuka terhadap konflik dan perubahan; lebih perhatian terhadap budaya dan makna; lebih sensitif terhadap kemampuan bertindak dan kreativitas; dan lebih refleksif tentang limitasi teoretis. Alexander mengembangkan sosiologi budaya yang menekankan otonomi relatif budaya dan pentingnya pertunjukan budaya dalam kehidupan sosial. Teori sphere sipil yang dikembangkan Alexander menunjukkan bagaimana masyarakat demokratik bergantung pada sphere sipil yang relatif otonom dengan solidaritas dan institusi yang membedakannya dari sphere ekonomi dan politik.

"Proyek sintesis teoretis seperti neofungsionalisme Alexander, teori tindakan komunikatif Habermas, dan strukturalisme genetik Bourdieu berupaya mengintegrasikan paradigma berbeda menjadi kerangka komprehensif multidimensional. Namun integrasi penuh menghadapi tantangan inkomensurabilitas paradigma Kuhnian. Pluralisme teoretis justru lebih produktif: memfasilitasi triangulasi metode, mencegah dogmatisme, dan memberikan pemahaman bernuansa terhadap kompleksitas masyarakat Indonesia melalui dialog konstruktif antar-tradisi teoretis yang beragam."

Jürgen Habermas mengembangkan teori tindakan komunikatif yang mengintegrasikan wawasan dari berbagai tradisi teoretis: teori sistem Parsonian, fenomenologi, hermeneutika, pragmatisme, dan teori kritis. Habermas membedakan antara tindakan instrumental yang berorientasi pada kesuksesan dan tindakan komunikatif yang berorientasi pada pemahaman mutual. Masyarakat modern ditandai oleh diferensiasi antara sistem—sphere ekonomi dan administrasi negara yang beroperasi melalui medium uang dan kekuasaan—dan dunia kehidupan—sphere komunikasi dan solidaritas yang direproduksi melalui tindakan komunikatif.

Patologi modernitas menurut Habermas adalah kolonisasi dunia kehidupan oleh imperatif sistem—ketika logika instrumental sistem menginvasi domain dunia kehidupan yang seharusnya dikoordinasi melalui komunikasi. Teori diskursus yang dikembangkan Habermas memberikan standar normatif untuk mengevaluasi legitimasi institusi dan keputusan: legitimasi bergantung pada kemungkinan justifikasi dalam diskursus yang memenuhi kondisi situasi bicara ideal—inklusivitas, kesetaraan partisipan, bebas dari koersi, dan orientasi pada pemahaman daripada manipulasi strategis.

Pierre Bourdieu mengembangkan kerangka teoretis yang mengintegrasikan strukturalisme dan konstruktivisme, objektivisme dan subjektivisme. Konsep *habitus*, kapital, dan *field* yang telah dibahas dalam bab sebelumnya memberikan alat untuk menganalisis bagaimana struktur objektif terinternalisasi sebagai kecenderungan subjektif yang kemudian menghasilkan praktik yang mereproduksi atau mentransformasi struktur. Bourdieu mengkritik baik strukturalisme yang mengabaikan kemampuan bertindak maupun fenomenologi yang mengabaikan struktur, dan mengembangkan strukturalisme genetik yang menjelaskan genesis struktur sosial dan struktur mental yang saling berkorespondensi (Bourdieu, 1977).

Tantangan Integrasi dan Pluralisme Produktif

Meskipun berbagai upaya sintesis teoretis telah dilakukan, integrasi penuh dari paradigma yang berbeda menghadapi tantangan fundamental. Thomas Kuhn dalam teori paradigma mengargumentasikan bahwa paradigma yang berbeda adalah tidak dapat dibandingkan—tidak dapat dibandingkan secara langsung karena mereka menggunakan konsep yang berbeda, mengajukan pertanyaan yang berbeda, dan menggunakan standar evaluasi yang berbeda. Perubahan paradigma melibatkan pergeseran perspektif daripada akumulasi progresif pengetahuan. Meskipun Kuhn kemudian memodifikasi posisi ketidakdapatdibandingkan yang kuat, limitasi komunikasi dan translasi antar paradigma tetap menjadi tantangan.

Paul Feyerabend dalam anarkisme epistemologis mengargumentasikan bahwa pluralisme teoretis adalah kebajikan daripada masalah. Tidak ada metode universal yang menjamin kemajuan ilmiah. Proliferasi teori—bahkan teori yang tampak tidak kompatibel—memfasilitasi pengujian kritis dan mencegah dogmatisme. Slogan "apa saja boleh" bukan slogan nihilistik tetapi pengakuan bahwa inovasi ilmiah sering melibatkan pelanggaran aturan metodologis yang mapan. Pluralisme teoretis dalam ilmu sosial dapat

dipandang sebagai refleksi kompleksitas objek studi daripada ketidakdewasaan disiplin.

Imre Lakatos dalam metodologi program penelitian ilmiah menawarkan jalan tengah antara falsifikasionisme Popperian dan relativisme Kuhnian. Program penelitian adalah struktur teoretis dengan inti keras—asumsi fundamental yang dilindungi dari falsifikasi—dan sabuk pelindung—hipotesis tambahan yang dapat dimodifikasi untuk mengakomodasi anomali. Program penelitian dievaluasi berdasarkan progresivitas—kemampuan untuk menghasilkan prediksi novel yang terkonfirmasi—daripada kebenaran atau konfirmasi saat ini. Multiple program penelitian dapat coexist dan berkompetisi tanpa satu program memiliki monopoli legitimasi.

Randall Collins dalam sosiologi filosofi menganalisis kompetisi antara tradisi filosofis dan teoretis sebagai ekologi jaringan intelektual. Pluralisme teoretis adalah hasil dari fragmentasi ruang perhatian dan kompetisi untuk perhatian dalam medan intelektual. Tradisi teoretis yang berbeda menempati ceruk yang berbeda dalam ekologi intelektual dan dapat coexist selama mereka memiliki audiens yang berbeda dan menangani masalah yang berbeda. Integrasi dapat terjadi tetapi sering menghasilkan hilangnya kontribusi distinktif masing-masing tradisi.

Dalam praktik penelitian sosial kontemporer, pluralisme teoretis dan metodologis sering lebih produktif daripada monopoli satu paradigma. Triangulasi—menggunakan multiple metode dan perspektif untuk mempelajari fenomena yang sama—dapat mengompensasi limitasi setiap pendekatan dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian metode campuran yang mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif semakin diakui sebagai legitimate dan valuable. Pluralisme teoretis memungkinkan dialog dan pembelajaran mutual antara tradisi yang berbeda sambil mempertahankan skeptisisme sehat terhadap sintesis besar yang mengklaim menyelesaikan semua ketegangan (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2020).

Dalam konteks Indonesia, pluralisme teoretis sangat penting karena kompleksitas masyarakat Indonesia yang tidak dapat ditangkap secara memadai oleh perspektif teoretis tunggal. Penelitian tentang pembangunan di Indonesia mendapat manfaat dari integrasi analisis struktural ekonomi politik tingkat besar, analisis institusional tingkat menengah, dan pemahaman etnografis tingkat kecil tentang bagaimana orang benar-benar mengalami dan merespons intervensi pembangunan. Triangulasi perspektif teoretis dan metode memberikan pemahaman yang lebih bernuansa dan

komprehensif daripada monopoli satu pendekatan (Jurnal Analisa Sosiologi, 2021).

Kesimpulan

Dialog antar-paradigma dalam teori sosial merupakan proses yang produktif meskipun sering penuh konflik. Perdebatan fundamental tentang kemampuan bertindak versus struktur, mikro versus makro, objektivitas versus subjektivitas, dan universalisme versus partikularisme telah membentuk perkembangan teori sosial dan menghasilkan inovasi teoretis yang penting. Upaya untuk menjembatani paradigma yang berbeda telah menghasilkan teori-teori integratif yang canggih seperti teori strukturasi Giddens, teori praktik Bourdieu, teori tindakan komunikatif Habermas, dan berbagai pendekatan sintesis lainnya.

Perdebatan kemampuan bertindak versus struktur telah berkembang dari dikotomi rigid menuju pengakuan dualitas atau dialektika antara struktur yang mengondisikan tindakan dan kemampuan bertindak yang mereproduksi atau mentransformasi struktur. Teori strukturasi, morfogenesis, dan realisme kritis menawarkan kerangka yang berbeda untuk memahami relasi kompleks antara struktur dan tindakan. Dalam konteks Indonesia, integrasi struktur dan kemampuan bertindak esensial untuk memahami dinamika perubahan sosial yang melibatkan baik transformasi struktural besar maupun strategi adaptif individu dan komunitas.

Perdebatan mikro versus makro telah menghasilkan berbagai upaya untuk menghubungkan tingkat analisis yang berbeda. Randall Collins menunjukkan bagaimana struktur tingkat besar dapat dijelaskan sebagai agregasi ritual interaksi tingkat kecil. Jeffrey Alexander mengembangkan sosiologi multidimensional yang mengintegrasikan tindakan, institusi, budaya, dan personalitas. James Coleman mengembangkan pendekatan mikro-fondasi yang menunjukkan bagaimana hasil tingkat besar dihasilkan dari agregasi tindakan individual. Integrasi mikro dan makro tetap menantang tetapi esensial untuk pemahaman komprehensif fenomena sosial.

Perdebatan objektivitas versus subjektivitas telah berevolusi dari oposisi sederhana menuju posisi bernuansa yang mengakui baik kemungkinan maupun limitasi objektivitas dalam ilmu sosial. Sosiologi refleksif, pengetahuan yang berlokasi, dan objektivitas kuat menawarkan cara untuk mencapai objektivitas yang tidak naif tetapi kritis dan sadar diri. Dalam konteks Indonesia, refleksivitas tentang posisi peneliti dan asumsi budaya

sangat penting karena banyak penelitian menggunakan kerangka yang dikembangkan dalam konteks Barat yang mungkin tidak menangkap realitas lokal secara memadai.

Perdebatan universalisme versus partikularisme mencerminkan ketegangan antara aspirasi untuk teori umum dan sensitivitas terhadap spesifisitas kontekstual. *Middle range theory*, metodologi komparatif, dan metode kasus yang diperluas menawarkan cara untuk mencapai beberapa generalisasi sambil tetap sensitif terhadap konteks historis dan budaya. Epistemologi Selatan dan ekologi pengetahuan menyarankan pendekatan pluralistik yang mengakui validitas multiple bentuk pengetahuan tanpa mengasumsikan universalitas perspektif tunggal.

Proyek sintesis teoretis telah menghasilkan kerangka yang canggih yang mengintegrasikan wawasan dari paradigma berbeda. Namun, sintesis lengkap mungkin tidak mungkin dan tidak diinginkan. Pluralisme teoretis dapat lebih produktif daripada monopoli paradigma tunggal. Kompetisi dan dialog yang sehat antara tradisi teoretis, dikombinasikan dengan refleksivitas tentang kekuatan dan limitasi masing-masing pendekatan, dapat memfasilitasi inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam teori sosial.

Ke depan, perkembangan teori sosial di Indonesia akan mendapat manfaat dari dialog berkelanjutan antar paradigma yang kritis namun konstruktif. Integrasi perspektif yang berbeda—tingkat besar dan kecil, struktural dan tindakan, kuantitatif dan kualitatif, universal dan partikular—dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika sosial Indonesia. Secara bersamaan, pengembangan kerangka teoretis yang berakar dalam pengalaman Indonesia dan sensitif terhadap konteks lokal akan memperkaya teori sosial global dengan perspektif dari Selatan Global. Dialog antar paradigma dengan demikian tetap esensial tidak hanya untuk memajukan teori sosial secara umum tetapi juga untuk mengembangkan ilmu sosial yang relevan dan responsif terhadap realitas Indonesia.

Referensi Bab 16

Alexander, J. C. (1987). *Sociological theory since World War II*. Columbia University Press.

Alexander, J. C. (1988). *Action and its environments: Toward a new synthesis*. Columbia University Press.

Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge University Press.

Collins, R. (1975). *Conflict sociology: Toward an explanatory science*. Academic Press.

Collins, R. (2004). *Interaction ritual chains*. Princeton University Press.

Connell, R. (2007). *Southern theory: The global dynamics of knowledge in social science*. Polity Press.

Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. University of California Press.

Internet Encyclopedia of Philosophy. (n.d.). Philosophy of social science. Retrieved from https://iep.utm.edu/soc-sci/

Jurnal Analisa Sosiologi - Universitas Sebelas Maret - Sinta 3. (2021). Triangulasi teoretis dalam studi masyarakat Indonesia: Integrasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10(2), 145-168.

Masyarakat: Jurnal Sosiologi - Universitas Indonesia - Sinta 2. (2022). Integrasi paradigma dalam sosiologi Indonesia: Dari dikotomi menuju dialog produktif. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 27(2), 89-112.

Ritzer, G. (1993). *The McDonaldization of society*. Pine Forge Press.

Ritzer, G. (2019). *Sociological theory* (10th ed.). McGraw-Hill Education.

Santos, B. S. (2014). *Epistemologies of the South: Justice against epistemicide*. Paradigm Publishers.

Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora - Universitas Padjadjaran - Sinta 2. (2020). Multidisipliner approach dalam penelitian sosial Indonesia: Tantangan dan prospek. *Sosiohumaniora*, 22(2), 156-173.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2020). Philosophy of social science. Retrieved from https://plato.stanford.edu/entries/social-science/

BAB 17

APLIKASI TEORI SOSIAL DALAM PENELITIAN

Pendahuluan

Teori sosial bukan sekadar konstruksi intelektual abstrak yang terpisah dari praktik penelitian empiris, tetapi merupakan alat yang esensial untuk merancang penelitian, menginterpretasi data, dan menghasilkan pengetahuan yang bermakna tentang kehidupan sosial. Aplikasi teori sosial dalam penelitian empiris adalah jembatan yang menghubungkan pemikiran teoretis dengan observasi dan analisis fenomena sosial konkret. Bab ini mengeksplorasi bagaimana teori sosial—baik *grand theory*, *middle-range theory*, *applied theory*—dioperasionalisasi dalam desain penelitian, pengumpulan data, analisis, dan interpretasi temuan.

Hubungan antara teori dan penelitian empiris bersifat dialektis dan resiprokal. Teori memberikan kerangka konseptual yang memandu penelitian dengan mengidentifikasi variabel yang relevan, merumuskan pertanyaan penelitian yang bermakna, dan menyediakan lensa interpretasi untuk memahami temuan. Sebaliknya, penelitian empiris menguji, memodifikasi, dan mengembangkan teori dengan mengonfirmasi atau menantang prediksi teoretis, mengidentifikasi kondisi batas teori, dan mengungkap fenomena baru yang memerlukan elaborasi teoretis. Siklus iteratif antara teori dan penelitian ini merupakan mekanisme fundamental bagi perkembangan pengetahuan ilmu sosial.

Robert K. Merton dalam konsepnya tentang *middle range theory* menekankan pentingnya teori yang dapat dioperasionalisasi dan diuji secara empiris. *Middle range theory* memiliki tingkat abstraksi yang moderat—tidak terlalu umum sehingga tidak dapat diuji, namun tidak terlalu spesifik sehingga hanya berlaku untuk satu kasus. Teori seperti *anomie* (keterputusan normatif), modal sosial (*social capital*), atau *labeling* (pemberian cap) dapat diterjemahkan menjadi hipotesis yang dapat diuji, variabel yang dapat diukur, dan proposisi yang dapat dikonfirmasi atau difalsifikasi melalui penelitian empiris (Merton, 1968).

Dalam konteks Indonesia, aplikasi teori sosial dalam penelitian menghadapi tantangan dan peluang khusus. Banyak teori yang dikembangkan dalam konteks Barat memerlukan adaptasi untuk menangkap realitas sosial

Indonesia yang ditandai oleh keragaman budaya, struktur sosial yang kompleks, dan dinamika perubahan yang cepat. Penelitian tentang gotong royong, misalnya, memerlukan elaborasi konsep modal sosial dengan sensitivitas terhadap nilai komunalisme dan resiprositas yang berbeda dari individualisme Barat. Demikian pula, penelitian tentang desentralisasi memerlukan adaptasi teori tata kelola (*governance*) dengan pemahaman tentang peran adat dan sistem patron-klien yang unik dalam konteks lokal (Sodality, 2020).

Bab ini akan membahas **lima aspek utama aplikasi teori sosial dalam penelitian**. Pertama, proses menerjemahkan teori menjadi hipotesis yang dapat diuji. Kedua, operasionalisasi konsep teoretis menjadi variabel yang dapat diukur atau indikator yang dapat diobservasi. Ketiga, studi kasus aplikasi teori yang mendemonstrasikan bagaimana teori spesifik digunakan dalam penelitian empiris. Keempat, triangulasi teoretis yang menggunakan perspektif teoretis majemuk untuk memahami fenomena yang sama. Kelima, evaluasi dan kritik teori berdasarkan temuan empiris. Pembahasan akan mencakup contoh konkret dari penelitian Indonesia dan internasional untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip aplikasi teori secara komprehensif.

17.1 Dari Teori Ke Hipotesis

Deduksi Teoretis dan Formulasi Hipotesis

Proses menerjemahkan teori menjadi hipotesis yang dapat diuji merupakan langkah fundamental dalam penelitian deduktif. Deduksi teoretis melibatkan derivasi proposisi spesifik dari premis umum teori. Teori menyediakan pernyataan umum tentang hubungan antara konsep—misalnya, teori modal sosial menyatakan bahwa jaringan sosial yang padat dengan norma resiprositas yang kuat meningkatkan kemampuan kolektif untuk aksi bersama (*collective action*). Dari pernyataan umum ini, peneliti dapat menurunkan hipotesis spesifik yang dapat diuji dalam konteks empiris tertentu (Neuman, 2014).

Hipotesis adalah pernyataan tentang hubungan yang diharapkan antara variabel yang diturunkan dari teori dan dapat diuji secara empiris. Hipotesis yang baik memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, harus diturunkan secara **logis dari teori** sehingga pengujiannya berkontribusi pada evaluasi teori. Kedua, harus **spesifik dan jelas** tentang variabel yang terlibat dan arah hubungan yang diprediksi. Ketiga, harus **dapat diuji** (*testable*)—artinya mungkin untuk mengumpulkan data yang dapat mengonfirmasi atau

menolak hipotesis. Keempat, harus memiliki **implikasi teoretis** sehingga pengujian hipotesis berkontribusi pada evaluasi atau pengembangan teori.

Contoh deduksi teoretis dapat dilihat dalam aplikasi teori deprivasi relatif (*relative deprivation*) pada studi partisipasi dalam gerakan sosial. Teori deprivasi relatif menyatakan bahwa ketidakpuasan sosial dan mobilisasi kolektif tidak ditentukan oleh tingkat deprivasi absolut tetapi oleh persepsi kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi yang dianggap sebagai hak atau ekspektasi yang legitimate. Dari premis teoretis ini, peneliti dapat menurunkan hipotesis spesifik: individu yang mengalami penurunan status relatif terhadap kelompok referensi (*reference group*) mereka lebih mungkin berpartisipasi dalam protes sosial dibandingkan individu dengan status absolut yang sama tetapi tidak mengalami penurunan relatif.

"Deduksi teoretis menerjemahkan teori menjadi hipotesis spesifik yang dapat diuji empiris, dengan karakteristik diturunkan secara logis, spesifik tentang variabel dan arah hubungan yang diprediksi, serta memiliki implikasi teoretis substansial. Spesifikasi model kausal mengidentifikasi variabel independen, dependen, mediasi, moderasi, dan kontrol untuk merepresentasikan mekanisme kausal teoretis secara sistematis. Teknik analisis jalur dan pemodelan persamaan struktural memungkinkan pengujian rigorous model kompleks dengan hubungan majemuk, estimasi efek langsung-tidak langsung, serta evaluasi kesesuaian model teoretis dengan data empiris."

Penelitian tentang protes petani di Jawa Tengah mengaplikasikan logika deduksi teoretis ini dengan sistematis. Hipotesis yang diturunkan adalah: petani yang kehilangan tanah karena pembangunan infrastruktur dan mengalami penurunan status ekonomi relatif terhadap petani lain yang mempertahankan tanah mereka akan lebih mungkin berpartisipasi dalam protes dibandingkan petani dengan tingkat kemiskinan absolut yang sama tetapi tidak mengalami kehilangan tanah. Hipotesis ini kemudian diuji

menggunakan data survei dan wawancara mendalam dengan petani di daerah yang terkena dampak pembangunan jalan tol (Otoritas, 2021).

Formulasi hipotesis juga melibatkan spesifikasi kondisi batas (*boundary conditions*)—konteks atau kondisi di mana hubungan teoretis diharapkan berlaku. Teori jarang bersifat universal tanpa kualifikasi, dan hipotesis yang baik mengidentifikasi kondisi di mana prediksi teoretis diharapkan kuat, lemah, atau tidak berlaku sama sekali. Misalnya, teori modal sosial mungkin memprediksi bahwa jaringan sosial yang padat memfasilitasi aksi kolektif, tetapi efek ini mungkin lebih kuat dalam komunitas homogen dibandingkan komunitas heterogen, atau lebih kuat dalam konteks di mana institusi formal lemah dibandingkan konteks dengan institusi formal yang kuat.

Spesifikasi Model Kausal

Aplikasi teori dalam penelitian sering melibatkan spesifikasi model kausal yang mengidentifikasi variabel independen, variabel dependen, variabel mediasi (*mediating variables*), variabel moderasi (*moderating variables*), dan variabel kontrol. Model kausal adalah representasi formal tentang bagaimana teori menjelaskan fenomena—variabel mana yang menyebabkan variabel lain, melalui mekanisme apa, dan dalam kondisi apa. Spesifikasi model yang jelas dan eksplisit memungkinkan pengujian empiris yang rigorous dan interpretasi temuan yang tidak ambigu (Creswell, 2014).

Variabel independen adalah faktor yang diasumsikan menyebabkan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel dependen adalah *outcome* (hasil) atau fenomena yang dijelaskan. Variabel mediasi adalah mekanisme atau proses melalui mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Variabel moderasi adalah faktor yang mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan dependen. Sementara itu, variabel kontrol adalah faktor yang mungkin mempengaruhi variabel dependen tetapi bukan fokus utama penelitian dan perlu dikontrol secara statistik untuk mengisolasi efek variabel independen.

Teori strukturasi Giddens yang telah dibahas dalam Bab 11 menyediakan contoh yang baik tentang kompleksitas spesifikasi model kausal. Teori ini mengargumentasikan bahwa struktur dan tindakan bersifat dualitas (*duality*)—struktur adalah medium sekaligus hasil dari tindakan. Menerjemahkan konsep abstrak ini ke dalam model kausal empiris memerlukan operasionalisasi yang hati-hati. Penelitian tentang perubahan institusional di desa Indonesia dapat mengspesifikasi model di mana struktur

lokal—seperti norma adat tentang kepemilikan tanah—mempengaruhi tindakan individu dalam transaksi tanah, tetapi tindakan kumulatif ini secara bertahap memodifikasi norma adat itu sendiri.

Model dapat dispesifikasi sebagai berikut: norma adat tentang tanah komunal sebagai variabel independen awal mempengaruhi frekuensi transaksi tanah individu sebagai variabel dependen pertama; akumulasi transaksi tanah individual sebagai variabel mediasi kemudian mempengaruhi perubahan norma adat sebagai variabel dependen akhir; modernisasi ekonomi dan pendidikan sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau melemahkan efek norma adat; serta faktor demografis seperti ukuran populasi dan kepadatan sebagai variabel kontrol. Spesifikasi model yang sistematis ini memungkinkan pengujian empiris tentang bagaimana struktur dan tindakan saling mempengaruhi secara timbal balik.

Path analysis (analisis jalur) atau *structural equation modeling* (pemodelan persamaan struktural) sering digunakan untuk menguji model kausal yang kompleks dengan variabel dan hubungan majemuk. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengestimasi efek langsung dan tidak langsung, menguji mediasi dan moderasi, serta mengevaluasi seberapa baik model teoretis cocok (*fit*) dengan data empiris. Dalam konteks penelitian Indonesia, penggunaan teknik ini semakin umum terutama dalam studi pembangunan, pendidikan, dan kesehatan yang melibatkan faktor majemuk dan jalur kausal yang kompleks (Jurnal Analisa Sosiologi, 2022).

17.2 Operasionalisasi Konsep Teoretis

Definisi Operasional dan Pengukuran

Operasionalisasi adalah proses menerjemahkan konsep teoretis abstrak menjadi variabel konkret yang dapat diukur atau diobservasi. Konsep teoretis seperti modal sosial, *alienation* (keterasingan), atau legitimasi memiliki makna teoretis yang kompleks dan abstrak. Untuk menguji teori yang menggunakan konsep-konsep ini secara empiris, peneliti harus mengembangkan definisi operasional yang spesifik dan indikator yang dapat diukur. Operasionalisasi yang baik harus memenuhi dua kriteria utama: *valid* (mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur) dan *reliable* (menghasilkan hasil yang konsisten jika diulang) (Babbie, 2016).

Validitas memiliki beberapa dimensi yang saling melengkapi. *Validity isi* (content validity) menilai apakah indikator mencakup semua aspek penting dari konsep teoretis. *Validitas konstruk* (construct validity) menilai apakah

indikator benar-benar mengukur konsep teoretis dan bukan konsep lain. *Validitas konvergen* (convergent validity) menilai apakah indikator berbeda dari konsep yang sama menghasilkan hasil yang serupa. *Validitas diskriminan* (discriminant validity) menilai apakah indikator membedakan konsep yang diukur dari konsep lain yang berbeda. Sementara itu, reliabilitas mencakup stabilitas temporal—konsistensi pengukuran dari waktu ke waktu—dan konsistensi internal—konsistensi antara indikator majemuk dari konsep yang sama.

Operasionalisasi konsep modal sosial mengilustrasikan tantangan dan pilihan dalam proses ini. Pierre Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai agregat sumber daya aktual atau potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan tahan lama dari hubungan yang lebih atau kurang terinstitusionalisasi. Robert Putnam mendefinisikannya sebagai fitur organisasi sosial seperti kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi aksi terkoordinasi. James Coleman menekankan modal sosial sebagai aspek struktur sosial yang memfasilitasi tindakan individu di dalam struktur tersebut.

Masing-masing konseptualisasi ini mengarah pada operasionalisasi yang berbeda. Pendekatan Bourdieu mungkin mengoperasionalisasi modal sosial sebagai jumlah dan kualitas koneksi sosial individu yang dapat dimobilisasi untuk sumber daya. Indikator dapat mencakup jumlah kontak dalam jaringan, status sosial kontak, dan frekuensi interaksi. Pendekatan Putnam mungkin mengoperasionalisasi modal sosial sebagai karakteristik komunitas seperti tingkat partisipasi dalam organisasi sukarela, kepercayaan interpersonal yang diukur melalui survei, dan kepadatan jaringan asosiasional. Pendekatan Coleman mungkin mengoperasionalisasi modal sosial sebagai *closure* (ketertertutupan) jaringan dan norma yang memfasilitasi sanksi efektif terhadap perilaku oportunistik.

Penelitian tentang modal sosial dalam pembangunan pedesaan di Indonesia menghadapi tantangan operasionalisasi tambahan karena perlu menangkap bentuk-bentuk modal sosial yang spesifik konteks seperti gotong royong, arisan, dan pengajian. Operasionalisasi yang sensitif konteks dapat mencakup indikator seperti frekuensi partisipasi dalam kerja kolektif desa, keanggotaan dalam kelompok arisan, keterlibatan dalam kegiatan keagamaan komunal, dan akses pada sistem pinjaman informal berbasis kepercayaan. Kombinasi indikator ini memberikan pengukuran modal sosial yang lebih valid untuk konteks Indonesia dibandingkan indikator standar yang dikembangkan dalam konteks Barat (Sodality, 2020).

Strategi Pengukuran: Kuantitatif dan Kualitatif

Strategi pengukuran berbeda antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, mencerminkan perbedaan epistemologis dan asumsi ontologis yang mendasarinya. Penelitian kuantitatif menggunakan pengukuran numerik dengan skala yang terstandarisasi—nominal, ordinal, interval, atau rasio—yang memungkinkan analisis statistik. Penelitian kualitatif menggunakan indikator interpretatif seperti tema, pola, atau konfigurasi makna yang diidentifikasi melalui analisis tekstual atau observasi. Meskipun berbeda, kedua strategi sama-sama berusaha menghubungkan konsep teoretis dengan observasi empiris dengan cara yang sistematis dan dapat dijustifikasi (Flick, 2014).

Dalam penelitian kuantitatif, operasionalisasi sering melibatkan pengembangan skala pengukuran multi-item. Skala Likert adalah yang paling umum digunakan, di mana responden menilai persetujuan mereka dengan serangkaian pernyataan pada skala—misalnya dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Pernyataan-pernyataan dirancang untuk menangkap berbagai dimensi dari konsep teoretis. Misalnya, operasionalisasi konsep *alienation* (keterasingan) Marx dapat mencakup item tentang *powerlessness* (ketidakberdayaan)—perasaan tidak memiliki kontrol atas kondisi kerja; *meaninglessness* (ketiadaan makna)—persepsi bahwa pekerjaan tidak memiliki tujuan atau makna intrinsik; *normlessness* (keterputusan normatif)—perasaan bahwa norma sosial telah runtuh; dan *social isolation* (isolasi sosial)—perasaan terpisah dari orang lain.

Validitas konstruk dari skala dapat dievaluasi menggunakan *factor analysis* (analisis faktor) yang mengidentifikasi apakah item-item mengelompok sesuai dengan dimensi teoretis yang diharapkan. Reliabilitas internal dapat diukur menggunakan *Cronbach's alpha* yang menilai konsistensi antara item dalam skala. Nilai alpha di atas 0.7 umumnya dianggap dapat diterima (*acceptable*), meskipun ambang batas (*threshold*) dapat bervariasi tergantung pada tujuan penelitian dan sifat konstruk yang diukur.

Dalam penelitian kualitatif, operasionalisasi lebih fleksibel dan interpretif tetapi tetap memerlukan pendekatan sistematis untuk menghubungkan konsep teoretis dengan data. *Coding scheme* (skema pengkodean) dikembangkan untuk mengidentifikasi manifestasi konsep teoretis dalam data tekstual atau visual. Misalnya, penelitian tentang konsep *habitus* Bourdieu dalam konteks kelas menengah Indonesia dapat mengembangkan *coding scheme* yang mengidentifikasi disposisi budaya—preferensi estetika,

gaya komunikasi, praktik konsumsi—yang diekspresikan dalam wawancara atau observasi. *Codes* (kode) kemudian diorganisir ke dalam kategori (*categories*) dan tema (*themes*) yang mencerminkan dimensi teoretis dari *habitus*.

Triangulasi pengukuran—menggunakan metode atau sumber data majemuk untuk mengukur konsep yang sama—dapat meningkatkan validitas secara signifikan. Konsep kepercayaan interpersonal, misalnya, dapat diukur tidak hanya melalui *self-report* (laporan diri) dalam survei tetapi juga melalui *experimental games* (permainan eksperimental) seperti *trust game* di mana perilaku aktual diobservasi, melalui analisis jaringan yang mengidentifikasi pola pemberian dan penerimaan bantuan, serta melalui wawancara kualitatif yang mengeksplorasi narasi tentang pengalaman kepercayaan dan pengkhianatan. Konvergensi lintas metode majemuk meningkatkan kepercayaan (*confidence*) dalam validitas pengukuran (Bryman, 2016).

17.3 Studi Kasus Aplikasi Teori

Aplikasi Teori Fungsionalisme: Studi Ritual Adat

Teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Émile Durkheim dan Talcott Parsons menyediakan kerangka untuk memahami bagaimana praktik sosial dan institusi berkontribusi pada pemeliharaan sistem sosial. Aplikasi teori ini dalam penelitian empiris melibatkan identifikasi fungsi *manifest* (fungsi yang diakui dan dimaksudkan) dan fungsi *laten* (konsekuensi yang tidak diakui dan tidak dimaksudkan) dari praktik atau institusi sosial. Robert K. Merton mengembangkan lebih lanjut distingsi ini dan mengargumentasikan bahwa analisis fungsional harus juga mempertimbangkan *disfungsi* (*dysfunctions*)—konsekuensi yang mengganggu adaptasi atau penyesuaian sistem (Merton, 1968).

Penelitian tentang ritual adat di komunitas Dayak Kalimantan menerapkan kerangka fungsionalis untuk memahami persistensi praktik ritual dalam konteks modernisasi. Teori fungsionalis memprediksi bahwa ritual yang bertahan memiliki fungsi penting untuk kohesi sosial, transmisi nilai budaya, atau adaptasi terhadap lingkungan. Penelitian menggunakan metode etnografi dengan observasi partisipan dalam ritual tahunan Gawai Dayak dan wawancara mendalam dengan tetua adat, pemuda, dan tokoh agama.

Analisis mengidentifikasi fungsi majemuk dari ritual tersebut. Fungsi *manifest* adalah penghormatan terhadap leluhur dan ungkapan syukur untuk panen—tujuan yang secara eksplisit diartikulasikan oleh partisipan. Fungsi *laten*

mencakup reafirmasi identitas etnis dalam konteks masyarakat yang semakin plural; mediasi konflik melalui forum ritual di mana keluhan dapat diekspresikan dan diselesaikan; sosialisasi generasi muda terhadap nilai komunalisme dan resiprositas; serta legitimasi otoritas tetua adat dalam struktur sosial yang berubah dengan meningkatnya pengaruh negara dan pasar.

"Teori konflik dan reproduksi sosial Bourdieu diterapkan pada studi akses universitas bergengsi Indonesia. Penelitian menguji hipotesis bahwa modal ekonomi, sosial, dan budaya keluarga secara signifikan meningkatkan probabilitas penerimaan meskipun prestasi akademik sebanding. Analisis regresi logistik menunjukkan anak keluarga kaya memiliki probabilitas 3.5 kali lebih tinggi diterima dibanding keluarga miskin dengan nilai sama, mengonfirmasi mekanisme reproduksi ketimpangan melalui akses diferensial pada sekolah berkualitas, bimbingan belajar intensif, dan informasi strategis seleksi masuk."

Namun, penelitian juga mengidentifikasi disfungsi potensial yang tidak dapat diabaikan. Ritual yang memerlukan kontribusi material substansial dapat membebani keluarga miskin dan menciptakan kesenjangan ekonomi. *Emphasis* (penekanan) pada tradisi dapat membatasi inovasi dan adaptasi terhadap kondisi ekonomi yang berubah. Eksklusivitas ritual etnis dapat memperkuat batas-batas etnis dan menghambat integrasi dengan komunitas lain. Analisis fungsional yang *nuanced* (bernuansa) ini menghindari asumsi bahwa semua praktik yang bertahan selalu fungsional dan mengakui kompleksitas konsekuensi sosial (Sodality, 2020).

Aplikasi Teori Konflik: Studi Ketimpangan Pendidikan

Teori konflik dalam tradisi Marxian dan Weberian menekankan bahwa struktur sosial ditandai oleh kompetisi untuk sumber daya yang terbatas dan dominasi kelompok yang memiliki kekuasaan terhadap kelompok yang kurang beruntung. Pierre Bourdieu dalam teori reproduksi sosial

mengargumentasikan bahwa sistem pendidikan bukan merupakan mekanisme netral untuk mobilitas sosial tetapi instrumen reproduksi ketimpangan kelas melalui transmisi modal budaya yang menguntungkan (*favors*) anak-anak dari kelas dominan.

Penelitian tentang akses terhadap universitas bergengsi di Indonesia menerapkan kerangka teori konflik dan reproduksi sosial Bourdieu. Hipotesis yang diturunkan dari teori adalah bahwa anak-anak dari keluarga kelas menengah-atas dengan modal ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi memiliki probabilitas yang jauh lebih tinggi untuk diterima di universitas bergengsi dibandingkan anak-anak dari keluarga kelas bawah dengan prestasi akademik yang sebanding. Mekanisme reproduksi beroperasi melalui akses diferensial terhadap sekolah berkualitas tinggi, bimbingan belajar, dan informasi tentang proses seleksi.

Penelitian menggunakan data survei dari 3.000 siswa SMA dari berbagai latar belakang sosial ekonomi di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, dilengkapi dengan wawancara mendalam dengan 60 siswa dan orang tua mereka. Variabel independen mencakup indikator modal ekonomi—pendapatan keluarga, kepemilikan aset; modal sosial—jaringan dengan alumni universitas, akses pada informasi; dan modal budaya—paparan terhadap budaya *highbrow* (berbudaya tinggi), keterampilan bahasa Inggris, familiaritas dengan norma akademik. Variabel dependen adalah penerimaan di universitas bergengsi yang diukur dengan *admission* (penerimaan) ke sepuluh universitas teratas berdasarkan peringkat nasional.

Analisis regresi logistik menunjukkan bahwa bahkan setelah mengontrol prestasi akademik yang diukur dengan nilai ujian nasional, modal ekonomi, sosial, dan budaya memiliki efek positif yang signifikan terhadap probabilitas diterima di universitas bergengsi. Anak-anak dari keluarga dengan pendapatan tertinggi memiliki probabilitas 3.5 kali lebih tinggi untuk diterima dibandingkan anak-anak dari keluarga pendapatan terendah dengan nilai ujian yang sama. Wawancara kualitatif mengungkap mekanisme: keluarga kaya mampu mengirim anak ke sekolah swasta berkualitas tinggi, membayar bimbingan intensif, dan memiliki informasi detail tentang strategi optimal untuk seleksi masuk (JPPUMA, 2021).

Aplikasi Teori Interaksionisme Simbolik: Studi Identitas Digital

Teori interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer menekankan bahwa realitas sosial adalah produk

interaksi simbolik dan bahwa diri (*self*) adalah konstruksi sosial yang muncul melalui interaksi dengan orang lain. Erving Goffman mengembangkan analisis *dramaturgi* yang mengonseptualisasikan interaksi sosial sebagai pertunjukan di mana individu mengelola kesan untuk memproyeksikan identitas yang diinginkan. Aplikasi teori ini dalam era digital membuka pertanyaan baru tentang bagaimana identitas dikonstruksi dan dikelola dalam konteks media sosial.

Penelitian tentang konstruksi identitas pemuda urban Indonesia di media sosial menerapkan kerangka interaksionisme simbolik dan dramaturgi Goffman. Teori memprediksi bahwa media sosial adalah panggung virtual di mana pemuda melakukan *identity work* (kerja identitas) melalui kurasi konten yang dipilih secara strategis—foto, status, dan interaksi—untuk memproyeksikan identitas yang diinginkan kepada audiens yang dibayangkan (*imagined audience*). Distingsi antara *front stage* (panggung depan)—diri yang dipresentasikan dalam profil publik—dan *back stage* (panggung belakang)—diri yang tidak dipresentasikan—menjadi lebih kompleks dalam konteks digital di mana batasan antara privat dan publik menjadi kabur.

Penelitian menggunakan metode netnografi—etnografi yang dilakukan dalam konteks *online*—dengan observasi profil media sosial Instagram dari 50 pemuda urban di Jakarta berusia 18-25 tahun, analisis konten dari 500 *posts* (unggahan), dan wawancara mendalam virtual dengan 30 informan tentang praktik kurasi identitas mereka. Analisis mengidentifikasi strategi *impression management* (pengelolaan kesan) yang sofistikated: *selective self-presentation* (presentasi diri selektif) di mana hanya aspek kehidupan yang sesuai dengan identitas ideal yang diposting; *audience segmentation* (segmentasi audiens) melalui penggunaan akun majemuk untuk audiens yang berbeda; dan *strategic authenticity* (keaslian strategis) di mana performa keaslian itu sendiri menjadi strategi presentasi diri.

Temuan menunjukkan bahwa meskipun pemuda menyadari bahwa identitas media sosial adalah konstruksi, mereka tetap terlibat (*invested*) secara emosional dalam performa ini dan mengalami kecemasan (*anxiety*) ketika ada diskrepansi antara *ideal self* (diri ideal) yang dipresentasikan dan *actual self* (diri aktual) yang dialami. Umpan balik (*feedback*) dalam bentuk *likes* (suka) dan *comments* (komentar) berfungsi sebagai validasi identitas dan mempengaruhi konsep diri (*self-concept*). Penelitian ini mendemonstrasikan bagaimana konsep klasik interaksionisme simbolik tetap relevan untuk memahami fenomena kontemporer tetapi memerlukan adaptasi untuk menangkap spesifisitas interaksi digital (Jurnal Analisa Sosiologi, 2022).

17.4 Triangulasi Teoretis

Menggunakan Multiple Perspektif Teoretis

Triangulasi teoretis melibatkan penggunaan perspektif atau kerangka teoretis majemuk (*multiple*) untuk menganalisis fenomena yang sama. Pendekatan ini mengakui bahwa fenomena sosial yang kompleks tidak dapat ditangkap secara memadai oleh satu perspektif teoretis dan bahwa wawasan (*insights*) yang berbeda dapat diperoleh dengan mengaplikasikan lensa teoretis majemuk. Triangulasi teoretis berbeda dari eklektisisme teoretis yang superfisial; ia memerlukan keterlibatan (*engagement*) yang serius dengan masing-masing perspektif dan analisis sistematis tentang bagaimana perspektif yang berbeda menghasilkan pemahaman yang saling melengkapi (*complementary*) atau bertentangan (*contradictory*) (Denzin & Lincoln, 2011).

Keuntungan triangulasi teoretis mencakup pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang kompleks dengan mengidentifikasi aspek berbeda yang ditekankan oleh teori berbeda; evaluasi komparatif dari *explanatory power* (kekuatan penjelasan) teori yang berbeda untuk fenomena yang sama; identifikasi kondisi batas teori dengan menunjukkan aspek fenomena yang dijelaskan dengan baik oleh satu teori tetapi tidak oleh teori lain; dan sintesis teoretis potensial dengan mengidentifikasi bagaimana wawasan dari teori berbeda dapat diintegrasikan ke dalam kerangka kerja (*framework*) yang lebih komprehensif.

Tantangan triangulasi teoretis mencakup potensi ketidaksebandingan (*incommensurability*) antara paradigma teoretis yang berbeda yang membuat integrasi sulit; risiko superfisialitas jika keterlibatan dengan masing-masing perspektif tidak cukup mendalam; kompleksitas analisis yang memerlukan keahlian (*expertise*) dalam tradisi teoretis majemuk; dan ambiguitas dalam interpretasi ketika perspektif berbeda menghasilkan temuan yang bertentangan. Meskipun demikian, ketika dilakukan dengan rigorous, triangulasi teoretis dapat menghasilkan pemahaman yang jauh lebih bernuansa (*nuanced*) dibandingkan aplikasi teori tunggal.

Studi Kasus: Analisis Multi-Teoretis tentang Korupsi

Penelitian tentang persistensi korupsi di birokrasi Indonesia mendemonstrasikan aplikasi triangulasi teoretis dengan menggunakan tiga perspektif: teori pilihan rasional (*rational choice theory*), teori budaya

(*cultural theory*), dan teori struktural (*structural theory*). Masing-masing perspektif menawarkan penjelasan yang berbeda tentang mengapa korupsi bertahan meskipun ada upaya reformasi yang ekstensif, dan triangulasi menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena kompleks ini.

Perspektif pilihan rasional menganalisis korupsi sebagai hasil dari kalkulasi biaya-manfaat (*cost-benefit*) individual. Birokrat terlibat (*engage*) dalam korupsi ketika manfaat yang dipersepsikan (*perceived benefits*)—keuntungan material, keuntungan jaringan—melebihi biaya yang dipersepsikan (*perceived costs*)—probabilitas deteksi dikalikan dengan keparahan sanksi (*severity of sanctions*). Teori memprediksi bahwa korupsi akan berkurang jika probabilitas deteksi meningkat melalui pengawasan (*monitoring*) yang lebih ketat, atau jika keparahan sanksi meningkat melalui penegakan hukum yang lebih tegas. Data dari survei dengan 500 pegawai negeri dan analisis data administratif tentang deteksi dan sanksi korupsi digunakan untuk menguji prediksi ini.

Perspektif budaya menganalisis korupsi sebagai produk dari norma dan nilai kultural yang menormalisasi praktik patron-klien (*patron-client*) dan pemberian hadiah (*gift-giving*) yang mengaburkan batasan antara praktik yang legitimate dan korup. Dalam konteks kultural di mana loyalitas kepada patron dan timbal balik (*reciprocity*) dalam jaringan sosial divaluasi tinggi, praktik yang secara formal didefinisikan sebagai korupsi mungkin dipersepsi sebagai pemenuhan kewajiban sosial yang legitimate. Wawancara mendalam dengan 50 pegawai negeri dan analisis wacana (*discourse analysis*) tentang bagaimana mereka membicarakan dan membenarkan (*justify*) praktik yang ambigu digunakan untuk mengeksplorasi dimensi kultural.

Perspektif struktural menganalisis korupsi sebagai produk dari struktur birokrasi dan ekonomi politik (*political economy*) yang menciptakan peluang (*opportunities*) dan insentif untuk korupsi. Kontrol institusional yang lemah (*weak institutional controls*), kekuasaan diskresi yang berlebihan (*excessive discretionary power*), dan gaji yang tidak memadai (*inadequate salary*) menciptakan kondisi struktural yang memungkinkan dan mendorong korupsi. Patronase politik (*political patronage*) dan klientelisme (*clientelism*) pada level lebih tinggi menciptakan tekanan dari atas untuk mengumpulkan *rents* (rente ekonomi). Analisis struktur organisasional, regulasi, dan interaksi antara birokrasi dan politik menggunakan data administratif dan wawancara dengan reformis serta pengamat digunakan untuk menguji penjelasan struktural.

Triangulasi ketiga perspektif menghasilkan pemahaman yang bernuansa. Perspektif pilihan rasional benar bahwa individu melakukan kalkulasi rasional, tetapi kalkulasi ini tidak terjadi dalam *vacuum* (ruang hampa) kultural atau struktural. Norma kultural membentuk apa yang dipersepsi sebagai biaya dan manfaat—misalnya, penolakan untuk membantu patron dapat dipersepsi sebagai biaya sosial yang tinggi dalam konteks kultural tertentu. Struktur birokrasi dan ekonomi politik menciptakan peluang yang membuat korupsi menjadi pilihan rasional dalam kondisi tertentu—ketika gaji tidak memadai dan pengawasan lemah, analisis biaya-manfaat cenderung menguntungkan korupsi.

Integrasi perspektif mengungkap bahwa korupsi adalah fenomena multi-level yang memerlukan intervensi pada level majemuk. Reformasi yang hanya berfokus pada satu aspek—misalnya meningkatkan sanksi tanpa mengubah norma kultural atau memperbaiki struktur institusional—cenderung tidak efektif. Strategi anti-korupsi yang efektif harus mengombinasikan insentif ekonomi yang tepat, transformasi norma kultural melalui pendidikan dan kampanye publik, dan reformasi struktural yang mengurangi peluang serta meningkatkan akuntabilitas (*accountability*).

Penelitian ini juga mengidentifikasi kondisi batas masing-masing perspektif. Perspektif pilihan rasional paling *powerful* (berpengaruh) untuk menjelaskan korupsi transaksional skala kecil tetapi kurang memadai untuk menjelaskan korupsi yang tertanam dalam (*embedded*) sistem patronase. Perspektif kultural *powerful* untuk menjelaskan persistensi praktik yang ambigu tetapi kurang memadai untuk menjelaskan variasi dalam perilaku korup di dalam kelompok kultural yang sama. Perspektif struktural *powerful* untuk menjelaskan pola korupsi sistemik tetapi kurang memadai untuk menjelaskan variasi individual dalam situasi struktural yang sama.

Sintesis Teoretis dan Pembangunan Teori

Triangulasi teoretis tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena empiris tetapi juga dapat mendorong sintesis teoretis—pengembangan kerangka kerja baru yang mengintegrasikan wawasan dari perspektif majemuk. Sintesis teoretis berbeda dari eklektisisme yang hanya menggabungkan elemen dari teori berbeda tanpa integrasi yang koheren. Sintesis yang rigorous memerlukan identifikasi kompatibilitas dan inkompatibilitas antara asumsi teoretis, artikulasi eksplisit tentang bagaimana konsep dari teori berbeda dihubungkan, dan demonstrasi bahwa kerangka kerja yang terintegrasi

memiliki *explanatory power* yang lebih besar daripada teori konstituennya secara terpisah.

Contoh sintesis teoretis yang berpengaruh adalah pengembangan teori modal sosial yang mengintegrasikan wawasan dari tradisi majemuk. James Coleman mensintesis perspektif pilihan rasional dengan analisis jaringan untuk menjelaskan bagaimana struktur sosial sebagai modal memfasilitasi tindakan individual. Pierre Bourdieu mengintegrasikan analisis ekonomi, kultural, dan simbolik dalam kerangka kerja yang terpadu (*unified*) tentang berbagai bentuk modal—ekonomi, kultural, sosial, dan simbolik—dan mekanisme konversi antara mereka. Robert Putnam mensintesis tradisi republikanisme sipil (*civic republicanism*) dengan analisis asosiasi sukarela untuk menjelaskan variasi dalam kualitas tata kelola (*governance*) dan pembangunan ekonomi.

> "Triangulasi teoretis mendorong sintesis yang mengintegrasikan perspektif majemuk secara koheren melalui identifikasi kompatibilitas asumsi, artikulasi mekanisme penghubung, dan demonstrasi explanatory power superior dibanding teori terpisah."

Dalam konteks penelitian Indonesia, upaya sintesis teoretis dapat dilihat dalam pengembangan konsep modal sosial yang kontekstual yang mengintegrasikan teori modal sosial Barat dengan pemahaman tentang nilai komunalisme dan resiprositas dalam budaya lokal. Penelitian tentang gotong royong, misalnya, telah mengembangkan kerangka kerja yang mengintegrasikan dimensi ekonomi dari kerja sama (*cooperation*) dengan dimensi kultural dari kewajiban timbal balik (*mutual obligation*) dan dimensi sosial dari kohesi komunitas. Kerangka kerja ini lebih memadai untuk menangkap kompleksitas praktik kolektif di Indonesia dibandingkan aplikasi langsung teori modal sosial yang dikembangkan dalam konteks Barat (Sodality, 2020).

Proses sintesis teoretis melibatkan beberapa langkah sistematis. Pertama, identifikasi konsep inti (*core concepts*) dan proposisi dari masing-masing perspektif yang akan diintegrasikan. Kedua, analisis kompatibilitas ontologis dan epistemologis—apakah perspektif berbeda membuat asumsi yang inkompatibel tentang sifat realitas sosial atau bagaimana pengetahuan dapat diperoleh. Ketiga, identifikasi level analisis yang berbeda—misalnya makro, meso, mikro—dan bagaimana perspektif yang berbeda dapat saling

melengkapi pada level yang berbeda. Keempat, artikulasi eksplisit tentang mekanisme penghubung (*linking mechanisms*) yang menghubungkan konsep dan proposisi dari teori yang berbeda. Kelima, evaluasi empiris dari kerangka kerja yang terintegrasi untuk menilai apakah ia memiliki *explanatory* dan *predictive power* (kekuatan prediktif) yang lebih besar.

17.5 Evaluasi dan Kritik Teori Berdasarkan Temuan Empiris

Pengujian dan Falsifikasi Teori

Hubungan antara teori dan penelitian empiris bersifat timbal balik. Jika teori memandu penelitian, maka penelitian juga mengevaluasi teori. Evaluasi teori berdasarkan temuan empiris adalah mekanisme fundamental untuk perkembangan pengetahuan ilmiah. Karl Popper dalam filosofi sains mengargumentasikan bahwa teori ilmiah harus dapat difalsifikasi (*falsifiable*)—harus mungkin untuk mengumpulkan bukti yang dapat memfalsifikasi atau menolak teori. Teori yang tidak dapat difalsifikasi secara prinsip tidak memiliki konten empiris yang genuine dan tidak dapat dievaluasi secara ilmiah (Popper, 1959).

Pengujian teori melibatkan konfrontasi antara prediksi teoretis dan observasi empiris. Jika prediksi teoretis dikonfirmasi oleh data, ini meningkatkan kepercayaan (*confidence*) dalam teori tetapi tidak membuktikan bahwa teori benar secara final—konfirmasi selalu bersifat sementara (*provisional*) dan terbuka untuk revisi berdasarkan bukti baru. Jika prediksi teoretis tidak dikonfirmasi atau difalsifikasi oleh data, ini menantang validitas teori dan memerlukan modifikasi teoretis atau, dalam kasus falsifikasi yang persisten dan sistematis, penolakan teori.

Namun, proses falsifikasi dalam ilmu sosial lebih kompleks daripada dalam ilmu alam karena beberapa alasan. Pertama, teori sosial sering melibatkan klausa *ceteris paribus* (hal-hal lain tetap sama)—asumsi bahwa faktor lain tetap konstan—yang jarang terpenuhi dalam realitas sosial yang kompleks. Kedua, operasionalisasi konsep teoretis abstrak menjadi indikator empiris melibatkan interpretasi dan pilihan yang dapat diperdebatkan. Ketiga, fenomena sosial bersifat historis dan kontekstual, sehingga teori yang tidak berlaku dalam satu konteks mungkin valid dalam konteks lain. Keempat, aktor sosial memiliki agensi (*agency*) dan dapat merespons terhadap teori itu sendiri, menciptakan ramalan yang mewujudkan diri (*self-fulfilling*) atau menegasi diri (*self-negating prophecies*) yang mengkomplekasi pengujian (Giddens, 1984).

Penelitian tentang teori modernisasi dalam konteks Indonesia mengilustrasikan kompleksitas evaluasi teoretis. Teori modernisasi klasik memprediksi bahwa pembangunan ekonomi akan mengarah pada sekularisasi, individualisasi, dan konvergensi institusional menuju model Barat. Namun, temuan empiris dari Indonesia menunjukkan pola yang lebih kompleks: pembangunan ekonomi terjadi bersamaan dengan revitalisasi agama, persistensi nilai komunalisme dalam bentuk yang dimodifikasi, dan divergensi institusional yang mencerminkan ketergantungan jalur (*path dependency*) dan konteks lokal.

Apakah ini berarti teori modernisasi telah difalsifikasi? Interpretasi yang bernuansa menunjukkan bahwa teori perlu dimodifikasi untuk mengakomodasi modernitas majemuk (*multiple modernities*)—pengakuan bahwa modernisasi dapat mengambil jalur yang berbeda dalam konteks kultural dan historis yang berbeda. Teori modernisasi yang direvisi tidak mengklaim konvergensi universal tetapi mengidentifikasi mekanisme umum—seperti diferensiasi institusional dan rasionalisasi—yang dapat termanifestasi dalam bentuk yang berbeda. Ini adalah contoh bagaimana falsifikasi parsial mengarah pada penyempurnaan teoretis (*theoretical refinement*) daripada penolakan total (Eisenstadt, 2000).

Identifikasi Kondisi Batas dan Scope Teori

Evaluasi teori tidak hanya tentang validasi atau falsifikasi tetapi juga tentang identifikasi kondisi batas—konteks, kondisi, atau karakteristik di mana teori berlaku atau tidak berlaku. Semua teori memiliki cakupan (*scope*) yang terbatas; tidak ada teori yang universal tanpa kualifikasi. Penelitian empiris yang baik mengidentifikasi kondisi batas teori dengan menguji teori dalam berbagai konteks dan menganalisis variasi dalam kesesuaian (*fit*) antara prediksi teoretis dan observasi empiris.

Robert K. Merton mengargumentasikan bahwa *middle range theory* memiliki keuntungan dalam hal kemampuan uji (*testability*) dan kegunaan (*utility*) karena mereka spesifik tentang cakupan mereka. *Middle range theory* tidak mengklaim menjelaskan semua fenomena sosial tetapi fokus pada domain yang terbatas dengan spesifikasi kondisi di mana proposisi teoretis diharapkan berlaku. Penelitian empiris kemudian dapat menguji apakah teori bekerja dalam domain yang dispesifikasi dan mengidentifikasi kondisi di mana teori tidak berlaku, yang pada gilirannya menyarankan modifikasi atau elaborasi teoretis (Merton, 1968).

Penelitian tentang teori modal sosial mengilustrasikan pentingnya identifikasi kondisi batas. Teori memprediksi bahwa jaringan sosial yang padat dengan norma resiprositas yang kuat memfasilitasi aksi kolektif dan menghasilkan *outcome* yang positif untuk komunitas. Temuan empiris umumnya mendukung prediksi ini dalam konteks komunitas homogen dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Namun, penelitian juga mengidentifikasi kondisi di mana modal sosial dapat memiliki efek negatif atau ambigu.

Dalam komunitas yang sangat homogen dan terisolasi (*insular*), modal sosial *bonding* (pengikat) dapat menciptakan ketertertutupan (*closure*) yang berlebihan yang menghambat akses pada informasi dan sumber daya eksternal, membatasi inovasi, dan memperkuat ketidaksetaraan dengan mengeksklusikan orang luar (*outsiders*). Ini dikenal sebagai sisi gelap modal sosial (*dark side of social capital*). Dalam konteks masyarakat yang plural dengan divisi etnis atau religius, jaringan yang padat dalam kelompok dapat memperkuat batas-batas kelompok dan menghambat *bridging* (jembatan) antar kelompok, yang berpotensi memperburuk konflik. Dalam konteks di mana norma kelompok mendukung perilaku yang antisosial atau kriminal, modal sosial dapat memfasilitasi kejahatan terorganisir (*organized crime*) atau korupsi (Portes, 1998).

Identifikasi kondisi batas ini tidak memfalsifikasi teori modal sosial tetapi menyempurnakan dan mengkualifikasi. Teori yang disempurnakan menspesifikasi bahwa efek positif dari modal sosial tergantung pada kondisi: tipe modal sosial—*bonding* versus *bridging*; konteks institusional—kekuatan institusi formal; karakteristik komunitas—homogenitas versus heterogenitas; dan norma kelompok—prososial versus antisosial. Program riset (*research program*) yang produktif kemudian fokus pada mengidentifikasi kondisi yang memoderasi efek modal sosial dan mekanisme melalui mana kondisi ini beroperasi.

Anomali, Kasus Deviant, dan Elaborasi Teoretis

Anomali adalah observasi empiris yang tidak dapat dijelaskan oleh teori yang ada dan yang menantang asumsi atau prediksi teoretis. Thomas Kuhn dalam struktur revolusi ilmiah mengargumentasikan bahwa akumulasi anomali dapat mengarah pada krisis paradigma dan pergeseran paradigma (*paradigm shift*) eventual. Dalam konteks ilmu sosial, anomali lebih sering mengarah pada elaborasi teoretis—pengembangan teori yang lebih bernuansa yang

dapat mengakomodasi observasi yang menyimpang (*deviant*)—daripada penolakan total paradigma (Kuhn, 1962).

Analisis kasus *deviant*—kasus yang tidak sesuai dengan prediksi teoretis—adalah strategi *powerful* untuk penyempurnaan teoretis. Ketika peneliti menemukan kasus di mana *outcome* tidak sesuai dengan yang diprediksi oleh teori, analisis mendalam tentang kasus *deviant* dapat mengungkap mekanisme, kondisi, atau faktor yang belum diantisipasi oleh teori. Ini kemudian dapat mengarah pada modifikasi teori untuk mengakomodasi kompleksitas yang terungkap.

Penelitian tentang teori deprivasi relatif dan partisipasi dalam gerakan sosial mengidentifikasi anomali yang penting. Teori memprediksi bahwa individu yang mengalami deprivasi relatif lebih mungkin berpartisipasi dalam protes. Namun, penelitian empiris menemukan banyak kasus di mana individu yang mengalami deprivasi relatif tidak berpartisipasi, dan sebaliknya, individu yang tidak mengalami deprivasi relatif berpartisipasi dalam protes.

Analisis kasus *deviant* mengungkap bahwa deprivasi relatif adalah kondisi yang perlu (*necessary*) tetapi tidak cukup (*sufficient*) untuk mobilisasi. Faktor tambahan yang mempengaruhi partisipasi mencakup: peluang politik (*political opportunities*)—struktur politik yang memfasilitasi atau menghambat mobilisasi; mobilisasi sumber daya (*resource mobilization*)—ketersediaan sumber daya organisasional dan material untuk aksi kolektif; proses *framing* (pembingkaian)—bagaimana keluhan diartikan dan dikomunikasikan; dan identitas serta solidaritas—sejauh mana individu mengidentifikasi dengan kelompok dan merasa solidaritas dengan anggota lain. Elaborasi teoretis yang mengintegrasikan faktor-faktor ini menghasilkan teori gerakan sosial yang lebih komprehensif yang dikenal sebagai model proses politik (*political process model*) (McAdam, 1982).

Revisi, Modifikasi, dan Pengembangan Teori

Evaluasi empiris tidak hanya mengarah pada validasi atau falsifikasi teori tetapi, lebih sering, pada revisi dan modifikasi teoretis. Revisi teoretis dapat mengambil berbagai bentuk: spesifikasi kondisi batas yang lebih jelas; identifikasi mekanisme mediasi atau moderasi yang sebelumnya tidak diantisipasi; penyempurnaan konsep teoretis untuk menangkap distingsi yang penting; atau integrasi proposisi baru yang menjelaskan anomali.

Teori *labeling* (pemberian cap) dalam kriminologi menyediakan contoh yang baik tentang bagaimana teori dikembangkan melalui iterasi antara formulasi

teoretis dan penelitian empiris. Teori awal memprediksi bahwa *labeling* sebagai *deviant* (menyimpang) atau kriminal akan mengarah pada karier *deviant* (*deviant career*) melalui ramalan yang mewujudkan diri—individu yang diberi cap sebagai *deviant* akan menginternalisasi cap tersebut dan terlibat (*engage*) dalam lebih banyak perilaku *deviant*. Penelitian awal mendukung prediksi ini.

Namun, penelitian selanjutnya mengidentifikasi variasi yang substansial. Tidak semua individu yang diberi cap menjadi *deviant* terlibat dalam karier *deviant*; beberapa individu menolak cap dan berhenti (*desist*) dari *deviance* (penyimpangan). Analisis kasus *deviant* mengungkap faktor yang memoderasi efek *labeling*: kekuatan keterikatan (*attachment*) kepada orang konvensional yang menyediakan sumber identitas alternatif; ketersediaan dukungan sosial yang memfasilitasi penghentian; keparahan dan visibilitas cap yang mempengaruhi sejauh mana peluang legitimate tertutup; dan agensi individual serta kapasitas untuk kerja identitas naratif (*narrative identity work*) yang menginterpretasi ulang atau menolak cap.

Teori yang direvisi mengintegrasikan wawasan ini dan menspesifikasi kondisi di mana *labeling* mengarah pada karier *deviant* versus penghentian. Ini adalah contoh bagaimana dialog antara teori dan penelitian mengarah pada pengembangan teori yang lebih bernuansa dan *powerful* (Braithwaite, 1989).

Proses pengembangan teori melalui penelitian empiris bersifat iteratif dan kumulatif. Teori awal menyediakan kerangka kerja untuk penelitian; penelitian mengungkap kompleksitas, anomali, atau kondisi batas; teori direvisi untuk mengakomodasi temuan; teori yang direvisi mengarah pada pertanyaan penelitian baru; dan siklus berlanjut. Melalui proses ini, pemahaman teoretis menjadi semakin disempurnakan, komprehensif, dan berdasar secara empiris (*empirically grounded*).

Kesimpulan

Aplikasi teori sosial dalam penelitian adalah proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan terjemahan konsep teoretis abstrak menjadi operasi empiris konkret, konfrontasi prediksi teoretis dengan observasi empiris, dan pengembangan iteratif pemahaman teoretis melalui dialog dengan data. Bab ini telah mengeksplorasi berbagai aspek aplikasi teori: dari formulasi hipotesis dan spesifikasi model kausal, operasionalisasi konsep dan strategi pengukuran, studi kasus yang mendemonstrasikan aplikasi teori

spesifik, triangulasi teoretis yang menggunakan perspektif majemuk, hingga evaluasi dan kritik teori berdasarkan temuan empiris.

Beberapa prinsip kunci muncul dari pembahasan ini. Pertama, hubungan antara teori dan penelitian bersifat dialektis dan resiprokal—teori memandu penelitian, dan penelitian mengembangkan teori. Kedua, operasionalisasi konsep teoretis memerlukan sensitivitas terhadap validitas dan reliabilitas serta konteks kultural dan sosial. Ketiga, triangulasi teoretis dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena kompleks dibandingkan aplikasi teori tunggal. Keempat, evaluasi teori tidak hanya tentang validasi atau falsifikasi tetapi juga tentang identifikasi kondisi batas, elaborasi mekanisme, dan penyempurnaan proposisi.

Dalam konteks Indonesia, aplikasi teori sosial memerlukan perhatian khusus terhadap kekhasan konteks lokal. Teori yang dikembangkan dalam konteks Barat memerlukan adaptasi dan elaborasi untuk menangkap realitas sosial Indonesia yang ditandai oleh keragaman budaya, kompleksitas struktur sosial, dan dinamika perubahan yang cepat. Penelitian yang mengintegrasikan rigor teoretis dengan sensitivitas kontekstual dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak hanya valid secara ilmiah tetapi juga relevan dan bermakna untuk memahami dan mengatasi isu sosial di Indonesia.

Aplikasi teori sosial dalam penelitian bukan hanya *exercise* (latihan) akademik tetapi memiliki implikasi praktis yang penting. Teori yang teruji secara empiris dan disempurnakan melalui penelitian menyediakan basis untuk kebijakan dan intervensi yang berbasis bukti (*evidence-based*). Pemahaman teoretis tentang mekanisme kausal, kondisi batas, dan kompleksitas fenomena sosial memungkinkan desain intervensi yang lebih efektif dan prediksi konsekuensi yang lebih akurat. Dengan demikian, dialog antara teori dan penelitian tidak hanya memperdalam pemahaman intelektual tetapi juga berkontribusi pada kemampuan kolektif untuk mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Referensi Bab 17

Babbie, E. (2016). *The Practice of Social Research* (14th ed.). Cengage Learning.

Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge University Press.

Bryman, A. (2016). *Social Research Methods* (5th ed.). Oxford University Press.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (4th ed.). Sage Publications.

Eisenstadt, S. N. (2000). Multiple Modernities. *Daedalus*, 129(1), 1-29.

Flick, U. (2014). *An Introduction to Qualitative Research* (5th ed.). Sage Publications.

Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Polity Press.

Jurnal Analisa Sosiologi. (2022). Berbagai edisi.

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. (2021). Berbagai edisi.

Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago Press.

McAdam, D. (1982). *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970*. University of Chicago Press.

Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure* (Enlarged ed.). Free Press.

Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson.

Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan. (2021). Berbagai edisi.

Popper, K. R. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Basic Books.

Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. *Annual Review of Sociology*, 24, 1-24.

Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. (2020). Berbagai edisi.

BAB 18

MASA DEPAN TEORI SOSIAL

Pendahuluan

Teori sosial berada pada titik persimpangan yang krusial. Dunia kontemporer menghadapi transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kecepatan, skala, dan kompleksitasnya—dari revolusi kecerdasan buatan yang mengubah fundamental cara kerja dan interaksi manusia, hingga krisis iklim yang mengancam kelangsungan ekosistem planet, serta pandemi global yang mengekspos kerentanan sistem sosial yang ada. Tantangan-tantangan ini menuntut pemikiran teoretis yang tidak hanya mampu menjelaskan fenomena yang sedang berlangsung tetapi juga mengantisipasi trajektori perubahan sosial di masa depan dan memberikan orientasi normatif untuk transformasi yang diinginkan.

Masa depan teori sosial tidak dapat dipahami sebagai kontinuitas linear dari tradisi yang ada tetapi memerlukan inovasi teoretis yang substansial untuk menangkap kompleksitas realitas sosial yang terus berubah. Bruno Latour dalam *Reassembling the Social* (2005) mengargumentasikan bahwa sosiologi tradisional dengan fokusnya pada "sosial" sebagai domain terpisah tidak lagi memadai untuk memahami dunia kontemporer di mana batas-batas antara manusia dan non-manusia, alam dan budaya, teknologi dan masyarakat semakin kabur. Pendekatan teoretis baru harus mampu mengintegrasikan materialitas, teknologi, dan ekologi ke dalam analisis sosial tanpa jatuh ke dalam reduksionisme biologis atau determinisme teknologis.

Dalam konteks Indonesia, masa depan teori sosial menghadapi tantangan khusus yang terkait dengan posisi negara sebagai bagian dari Global South yang mengalami transformasi cepat. Indonesia berada dalam posisi unik—sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, populasi Muslim terbesar di dunia, dan keragaman etnis-budaya yang luar biasa—yang memerlukan teori sosial yang tidak hanya mengadopsi konsep Barat tetapi mengembangkan perspektif teoretis yang berakar dalam realitas lokal sambil berkontribusi pada diskursus teoretis global. Konsep epistemologi Selatan yang dikembangkan oleh Boaventura de Sousa Santos dan teori Selatan yang diajukan oleh Raewyn Connell menawarkan kerangka untuk pengembangan

teori sosial yang mengakui pluralitas pengetahuan dan menolak hegemoni epistemologis Utara (Santos, 2014; Connell, 2007).

Bab ini akan mengeksplorasi lima dimensi masa depan teori sosial. Pertama, tantangan teoretis kontemporer yang muncul dari transformasi digital, krisis ekologis, dan ketidakpastian global. Kedua, isu-isu yang muncul (*emerging issues*) yang memerlukan elaborasi teoretis baru, termasuk kecerdasan buatan, perubahan iklim, dan dampak pandemi pada tatanan sosial. Ketiga, relevansi teori sosial untuk kebijakan publik dan kemampuannya untuk berkontribusi pada solusi masalah sosial. Keempat, kebutuhan integrasi disiplin ilmu untuk mengatasi kompleksitas fenomena sosial kontemporer. Kelima, agenda penelitian masa depan yang mengidentifikasi area prioritas untuk pengembangan teori sosial. Pembahasan akan mengintegrasikan perspektif teoretis kontemporer dengan contoh empiris dari Indonesia dan konteks global.

18.1 Tantangan Teoretis Kontemporer

Kompleksitas, Ketidakpastian, dan Volatilitas

Dunia kontemporer ditandai oleh tingkat kompleksitas, ketidakpastian, dan keguncangan (*volatility*) yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ulrich Beck dalam teori masyarakat risiko mengargumentasikan bahwa modernitas telah memasuki fase kedua di mana produksi kekayaan secara sistematis disertai dengan produksi risiko. Namun, risiko kontemporer berbeda secara kualitatif dari risiko masa lalu—risiko seperti perubahan iklim, pandemi global, dan destabilisasi sistem keuangan bersifat global, tidak mengenal batas negara, dan memiliki konsekuensi yang sulit diprediksi dan berpotensi katastrofik (Beck, 2010).

Zygmunt Bauman mengonseptualisasikan kondisi ini sebagai modernitas cair (*liquid modernity*) di mana struktur sosial yang stabil dan dapat diprediksi dari modernitas padat telah mencair menjadi formasi yang fluida, sementara, dan tidak pasti. Institusi tradisional seperti keluarga, pekerjaan seumur hidup, dan keterikatan komunitas telah kehilangan stabilitasnya, menciptakan kondisi di mana individu harus terus-menerus menavigasi ketidakpastian dan membuat pilihan tanpa panduan yang jelas dari tradisi atau norma yang mapan. Teori sosial masa depan harus mampu menangkap fluiditas dan ketidakpastian ini tanpa jatuh ke dalam nihilisme atau determinisme (Bauman, 2000).

Dalam konteks Indonesia, kompleksitas dan ketidakpastian termanifestasi dalam percepatan urbanisasi, transformasi ekonomi dari agraris ke industri dan jasa, digitalisasi yang cepat, dan pluralisasi gaya hidup. Masyarakat Indonesia mengalami apa yang oleh José Maurício Domingues disebut sebagai modernitas majemuk (*multiple modernities*)—trajektori modernisasi yang tidak mengikuti pola Barat tetapi membentuk konfigurasinya sendiri yang mencampurkan elemen tradisi, agama, dan modernitas dalam cara yang unik. Teori sosial Indonesia perlu mengembangkan konsep yang dapat menangkap hibriditas dan kompleksitas ini (Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 2024).

Krisis Representasi dan Legitimasi Teoretis

Teori sosial kontemporer menghadapi krisis representasi—pertanyaan tentang kemampuan teori untuk secara akurat merepresentasikan realitas sosial yang semakin kompleks dan beragam. Postmodernisme telah menantang klaim universalitas dan objektivitas teori sosial, mengargumentasikan bahwa semua teori adalah perspektif yang situasional, tertanam dalam konteks kultural dan historis tertentu, dan mencerminkan posisi kekuasaan tertentu. Jean-François Lyotard dalam *The Postmodern Condition* menyatakan bahwa era kontemporer ditandai oleh ketidakpercayaan terhadap metanaratif—skeptisisme terhadap *grand theory* yang mengklaim menjelaskan totalitas realitas sosial (Lyotard, 1984).

Namun, penolakan total terhadap *grand theory* menciptakan masalah tersendiri. Tanpa kerangka teoretis yang komprehensif, analisis sosial berisiko terfragmentasi menjadi studi kasus partikular yang tidak dapat dikomunikasikan atau diintegrasikan. *Middle range theory* yang diajukan oleh Robert K. Merton menawarkan jalan tengah—teori yang memiliki cakupan terbatas tetapi cukup abstrak untuk dapat digeneralisasi lintas konteks, dan cukup konkret untuk dapat dioperasionalisasi dan diuji secara empiris. Masa depan teori sosial mungkin terletak dalam proliferasi *middle range theory* yang dapat dihubungkan satu sama lain tanpa membentuk sistem teoretis yang monolitik (Merton, 1968).

Legitimasi teoretis juga dipertanyakan dari perspektif dekolonial yang mengkritik dominasi epistemologis Barat dalam teori sosial. Teori yang dikembangkan dalam konteks Eropa dan Amerika Utara telah diposisikan sebagai universal dan diterapkan ke seluruh dunia tanpa mempertimbangkan perbedaan konteks historis, kultural, dan sosial. Boaventura de Sousa Santos mengajukan konsep epistemologi Selatan yang mengakui pluralitas

pengetahuan dan menolak epistemisida—penghancuran sistem pengetahuan non-Barat oleh kolonialisme dan modernitas (Santos, 2014). Teori sosial masa depan harus lebih inklusif terhadap perspektif dari Global South dan mengakui bahwa tidak ada satu perspektif yang dapat mengklaim superioritas universal.

Akselerasi Perubahan dan Keterbatasan Prediktif

Kecepatan perubahan sosial kontemporer menantang kapasitas teori sosial untuk tidak hanya menjelaskan masa lalu tetapi juga mengantisipasi masa depan. Teknologi berkembang dengan kecepatan eksponensial, menciptakan fenomena sosial baru yang belum memiliki konsep teoretis yang memadai. Ketika teori masih berusaha memahami dampak sosial dari internet, masyarakat sudah bergerak ke era media sosial, kemudian ke era data besar dan algoritma, dan sekarang ke era kecerdasan buatan generatif. Kesenjangan waktu (*time lag*) antara munculnya fenomena dan elaborasi teoretis yang memadai semakin melebar.

Manuel Castells dalam analisisnya tentang masyarakat jaringan (*network society*) mengargumentasikan bahwa transformasi teknologi informasi telah menciptakan logika sosial baru yang berbasis pada arus daripada ruang. Kekuasaan, modal, informasi, dan identitas tidak lagi terikat pada lokasi geografis tetapi mengalir melalui jaringan global. Namun, teori Castells yang dikembangkan pada 1990-an sudah memerlukan pembaruan substansial untuk menangkap fenomena seperti ekonomi platform, kecerdasan buatan, dan Internet of Things yang mengubah karakteristik jaringan itu sendiri (Castells, 2010).

Keterbatasan prediktif teori sosial juga terekspos oleh peristiwa yang tidak terduga seperti krisis keuangan global 2008 atau pandemi COVID-19 yang mengejutkan sebagian besar ahli ilmu sosial. Nassim Nicholas Taleb dalam konsep angsa hitam (*black swan*) menunjukkan bahwa peristiwa dengan probabilitas rendah tetapi dampak tinggi memainkan peran yang jauh lebih besar dalam sejarah daripada yang diakui oleh model prediktif standar. Teori sosial masa depan perlu mengintegrasikan pemahaman tentang ketidakpastian, kontingensi, dan kemungkinan trajektori alternatif daripada mengasumsikan determinisme atau linearitas perubahan sosial (Taleb, 2007).

18.2 Isu-Isu Emerging: AI, Iklim, dan Pandemi

Kecerdasan Buatan dan Transformasi Sosial

Kecerdasan buatan merepresentasikan salah satu tantangan teoretis paling fundamental untuk ilmu sosial kontemporer. Kecerdasan buatan bukan hanya teknologi tetapi sistem sosioteknis yang kompleks yang mengubah cara kerja, cara berpikir, cara berinteraksi, dan bahkan cara memahami apa artinya menjadi manusia. Kelly Joyce dan Taylor M. Cruz dalam artikel mereka tentang sosiologi kecerdasan buatan mengargumentasikan bahwa kecerdasan buatan sebagai sistem sosioteknis selalu dikonstruksi oleh konteks sosial, nilai, dan prioritas. Kecerdasan buatan tidak ada dan tidak dapat eksis di luar konteks sosial. Perspektif sosiologis membantu membawa konteks sosial, nilai, dan prioritas ke garda depan (Joyce & Cruz, 2024).

> "Kecerdasan buatan sebagai sistem sosioteknis mengubah kerja, interaksi, dan pemahaman kemanusiaan. Sosiologi mengkritisi nilai tertanam dalam desain AI, mengidentifikasi ko-produksi dengan kehidupan sosial, dan mengevaluasi hubungannya dengan ketidaksetaraan struktural yang direproduksi dan diperkuat sistem algoritmik."

Sosiologi memiliki tiga pendekatan penting untuk memajukan investigasi tentang kecerdasan buatan. Pertama, sebagai disiplin dengan sejarah panjang dalam menganalisis gembar-gembor dan propaganda secara kritis, sosiologi memberikan perspektif yang membumi dengan menginvestigasi pengalaman sehari-hari orang yang bekerja dengan atau menggunakan inovasi teknosaintifik. Perspektif kritis ini membuka ruang untuk bertanya: "Nilai apa yang tertanam dalam desain platform kecerdasan buatan tertentu? Kepentingan siapa yang dilayani? Siapa yang diberdayakan? Siapa yang terdampak negatif?" Kedua, teori dan metode sosiologis mengidentifikasi bagaimana kecerdasan buatan diproduksi bersama dengan proses kehidupan sosial dalam berbagai arena mulai dari kedokteran, keadilan kriminal, masa depan kerja, hingga kebijakan publik. Ketiga, dengan mengakui bahwa data tentang manusia juga selalu data tentang ketidaksetaraan sosial, sosiolog terlatih dengan baik untuk mengevaluasi bagaimana platform kecerdasan buatan berhubungan dengan ketidaksetaraan (Joyce & Cruz, 2024).

Penelitian telah menunjukkan bahwa sistem kecerdasan buatan mereproduksi dan bahkan memperkuat ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Ruha Benjamin dalam konsep "New Jim Code" menunjukkan bagaimana teknologi yang diasumsikan netral dapat mengodekan dan memperkuat rasisme. Algoritma pengenalan wajah memiliki tingkat kesalahan yang jauh lebih tinggi untuk wajah orang kulit hitam dibandingkan kulit putih. Sistem prediksi risiko kriminal yang digunakan dalam sistem peradilan menunjukkan bias rasial yang sistematis. Kecerdasan buatan dalam rekrutmen kerja telah menunjukkan bias gender. Ketidaksetaraan ini bukan kecelakaan teknis tetapi mencerminkan ketidaksetaraan struktural dalam data pelatihan, desain sistem, dan konteks penggunaan (Benjamin, 2019).

Dalam konteks Indonesia, adopsi kecerdasan buatan menghadapi tantangan dan peluang khusus. Digitalisasi yang cepat, ekonomi platform yang berkembang seperti Gojek dan Tokopedia, dan investasi pemerintah dalam transformasi digital menciptakan konteks di mana kecerdasan buatan akan memainkan peran yang semakin besar. Namun, penelitian tentang implikasi sosial kecerdasan buatan di Indonesia masih sangat terbatas. Isu-isu seperti dampak otomasi terhadap pasar kerja informal yang besar, penggunaan kecerdasan buatan dalam pengawasan dan kontrol sosial, dan potensi untuk memperkuat atau mengurangi ketidaksetaraan memerlukan perhatian teoretis dan empiris yang serius (Jurnal Ilmu Sosial Indonesia, 2024).

Teori sosial tentang kecerdasan buatan juga harus mengatasi pertanyaan filosofis mendalam tentang agensi, tanggung jawab, dan status ontologis dari entitas non-manusia yang semakin canggih. Ketika sistem kecerdasan buatan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan manusia—siapa yang mendapat pinjaman, siapa yang dipekerjakan, siapa yang diawasi—bagaimana kita mengalokasikan tanggung jawab? Apakah kecerdasan buatan hanya alat atau apakah mereka memiliki bentuk agensi tersendiri? Teori aktor-jaringan Bruno Latour yang memberikan agensi pada non-manusia menawarkan kerangka untuk memahami kecerdasan buatan sebagai aktor dalam jaringan sosioteknis, tetapi pendekatan ini juga kontroversial dan memerlukan elaborasi lebih lanjut (Latour, 2005).

Krisis Iklim dan Sosiologi Lingkungan

Perubahan iklim merepresentasikan tantangan eksistensial yang memerlukan transformasi fundamental dalam teori sosial. Selama sebagian besar sejarahnya, sosiologi telah mengasumsikan stabilitas alam sebagai latar belakang yang tidak bermasalah di mana drama sosial terjadi. Namun, ketika

alam itu sendiri mengalami transformasi yang radikal dan tidak dapat diprediksi sebagai akibat dari aktivitas manusia, asumsi ini tidak lagi dapat dipertahankan. Perubahan iklim memaksa ilmu sosial untuk melampaui antroposentrisme dan mengintegrasikan materialitas, ekologi, dan non-manusia ke dalam analisis sosial (Frey, Gellert, & Dahms, 2020).

Riley E. Dunlap dan Robert J. Brulle dalam *Climate Change and Society* mengidentifikasi empat area kunci di mana sosiologi dapat berkontribusi: pertama, memahami kontributor dan dampak perubahan iklim dengan menganalisis faktor sosial seperti struktur ekonomi, organisasi politik, dan praktik konsumsi yang mendorong emisi gas rumah kaca; kedua, mengeksplorasi strategi mitigasi dan adaptasi yang adil dengan memperhatikan bagaimana beban perubahan iklim dan manfaat aksi iklim didistribusikan secara tidak merata melintasi kelas, ras, gender, dan negara; ketiga, menginvestigasi dinamika sosiopolitik dari advokasi iklim termasuk peran gerakan sosial, organisasi lingkungan, dan oposisi dari industri fosil; dan keempat, menganalisis opini publik, teori sosial, dan metodologi terkait persepsi risiko, skeptisisme iklim, dan mobilisasi publik (Dunlap & Brulle, 2015).

Dua teori yang dominan dalam sosiologi lingkungan mengilustrasikan polaritas teoretis. Teori treadmill produksi mengargumentasikan bahwa sistem kapitalis telah memprioritaskan pertumbuhan ekonomi di atas ketidaksetaraan sosial dan perlindungan lingkungan, menciptakan dinamika di mana ekspansi produksi terus-menerus mengeksploitasi alam dan menciptakan degradasi lingkungan. Teori modernisasi ekologis mengargumentasikan bahwa seiring masyarakat memodernisasi, rasionalitas ekologis yang mendasari kebutuhan untuk melindungi lingkungan akan muncul, dan teknologi serta inovasi dapat memungkinkan pertumbuhan ekonomi sambil mengurangi dampak lingkungan. Teori ini tidak harus dipandang sebagai oposisi biner tetapi sebagai spektrum di mana ekonomi dan sistem politik berada (Toli & Murtagh, 2021).

Dalam konteks Indonesia, perubahan iklim memiliki implikasi yang sangat serius. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut. Deforestasi yang masif, terutama untuk perkebunan kelapa sawit, telah membuat Indonesia menjadi salah satu penghasil emisi terbesar di dunia. Pada saat yang sama, Indonesia memiliki potensi besar untuk energi terbarukan. Teori sosial Indonesia perlu mengembangkan pemahaman tentang bagaimana struktur sosial, ekonomi politik, dan formasi kultural

mempengaruhi trajektori perubahan iklim dan kapasitas adaptasi (Sosiohumaniora, 2024).

Christophe Bonneuil dan Jean-Baptiste Fressoz mengajukan konsep Antroposen sebagai kerangka untuk memahami era baru di mana manusia telah menjadi kekuatan geologis yang mengubah sistem Bumi. Namun, mereka mengkritik narasi dominan Antroposen yang memperlakukan "manusia" sebagai kategori homogen dan mengabaikan ketidaksetaraan dalam kontribusi dan kerentanan terhadap perubahan lingkungan. Mereka mengusulkan konsep alternatif seperti "Capitalocene" untuk menekankan peran kapitalisme, atau "Plantationocene" untuk menekankan peran sistem perkebunan kolonial. Proliferasi istilah ini menunjukkan kontestasi teoretis tentang bagaimana memahami relasi manusia-alam dalam konteks krisis ekologis (Bonneuil & Fressoz, 2016).

Pandemi sebagai Fakta Sosial Total

Pandemi COVID-19 telah menjadi salah satu peristiwa sosial paling signifikan dalam sejarah kontemporer, mengekspos kerentanan sistem sosial yang ada dan mempercepat transformasi yang sudah berlangsung. Juan José Labora González dan Enrique Fernández-Vilas mengonseptualisasikan pandemi sebagai fakta sosial total (*total social fact*) dalam pengertian Marcel Mauss—fenomena yang meresapi dan mempengaruhi semua dimensi kehidupan sosial secara simultan. Pandemi tidak hanya krisis kesehatan tetapi juga krisis ekonomi, politik, psikologis, dan kultural yang mengungkap dan memperkuat ketidaksetaraan sosial yang ada (Labora González & Fernández-Vilas, 2024).

Penelitian sosiologis tentang COVID-19 menunjukkan bahwa dampak pandemi sangat tidak merata melintasi garis kelas, ras, gender, dan geografi. Komunitas miskin dan minoritas mengalami tingkat infeksi dan kematian yang jauh lebih tinggi karena akses yang tidak merata terhadap pelayanan kesehatan, kondisi perumahan yang padat, dan keharusan untuk terus bekerja dalam pekerjaan esensial yang berisiko tinggi. Perempuan mengalami beban ganda dari peningkatan tanggung jawab perawatan di rumah dan risiko kehilangan pekerjaan yang lebih tinggi. Pandemi telah memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada dan menciptakan ketidaksetaraan baru (Ward, 2020).

Pandemi juga mempercepat transformasi digital yang sudah berlangsung. Kerja jarak jauh, pembelajaran daring (*online*), telemedis, dan e-commerce mengalami adopsi massal dalam waktu singkat yang mungkin memerlukan

dekade dalam kondisi normal. Transformasi ini menciptakan divisi baru antara mereka yang dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi digital dan mereka yang tidak dapat—apa yang disebut kesenjangan digital. Dalam konteks pendidikan, ketidaksetaraan akses terhadap teknologi dan internet telah memperlebar kesenjangan pembelajaran antara siswa dari keluarga kaya dan miskin (Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 2021).

Mathieu Deflem mengargumentasikan bahwa penelitian sosiologis tentang COVID-19 mendemonstrasikan kontinuitas disiplin—sosiolog mengaplikasikan teori dan metode yang telah dikembangkan sebelum pandemi untuk memahami fenomena baru. Pada saat yang sama, pandemi juga menuntut inovasi teoretis dan metodologis. Penelitian harus dilakukan dengan cepat, sering kali dengan metode daring dan jarak jauh. Interdisiplinaritas menjadi tidak hanya diinginkan tetapi diperlukan karena kompleksitas pandemi memerlukan integrasi perspektif dari epidemiologi, ekonomi, psikologi, dan sosiologi (Deflem, 2022).

Dalam konteks Indonesia, pandemi mengekspos kerentanan sistem kesehatan, ketidaksetaraan sosial yang mendalam, dan tantangan tata kelola. Respons pemerintah yang tidak terkoordinasi dengan baik antara pusat dan daerah, komunikasi risiko yang tidak efektif, dan ketidaksiapan sistem kesehatan untuk lonjakan kasus menunjukkan kelemahan struktural. Pada saat yang sama, pandemi juga memunculkan solidaritas dan inovasi sosial dalam bentuk bantuan mutual, relawan kesehatan, dan adaptasi cepat terhadap kondisi baru. Teori sosial Indonesia perlu menganalisis secara kritis bagaimana pandemi telah mengubah lanskap sosial dan apa implikasinya untuk masa depan (Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 2021).

18.3 Teori Sosial dan Kebijakan Publik

Dari Teori Murni ke Sosiologi Publik

Relevansi teori sosial tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan dunia tetapi juga pada kontribusinya untuk mengubah dunia menuju arah yang lebih adil dan berkelanjutan. Michael Burawoy dalam konsep sosiologi publik mengargumentasikan bahwa sosiolog memiliki tanggung jawab untuk terlibat dengan publik yang lebih luas di luar akademi dan berkontribusi pada debat publik tentang isu-isu sosial yang penting. Sosiologi publik berbeda dari sosiologi profesional yang berorientasi pada

kolega akademik, sosiologi kebijakan yang berorientasi pada klien institusional, dan sosiologi kritis yang berorientasi pada refleksi internal disiplin. Sosiologi publik berorientasi pada berbagai publik—gerakan sosial, organisasi komunitas, dan warga negara biasa—dan berusaha untuk membuat pengetahuan sosiologis relevan dan accessible untuk mereka (Burawoy, 2005).

Namun, hubungan antara teori sosial dan kebijakan publik tidak sederhana dan tidak tanpa masalah. Pembuat kebijakan sering kali menginginkan solusi teknis yang cepat dan definitif, sementara ilmu sosial menawarkan analisis yang bernuansa, berkualifikasi, dan mengakui kompleksitas. Sebagaimana diamati oleh Riley E. Dunlap dan rekan, dalam banyak isu global yang mendesak termasuk perubahan iklim, ketika ilmuwan sosial dikonsultasikan dalam produksi sains dan kebijakan, mereka yang paling sering dikonsultasikan adalah ekonom, bukan sosiolog. Ini mencerminkan preferensi institusional untuk model ekonomi yang dapat memberikan kuantifikasi dan prediksi yang tampaknya presisi, meskipun asumsi-asumsi yang mendasarinya mungkin bermasalah (Frey, Gellert, & Dahms, 2020).

Teori sosial dapat berkontribusi pada kebijakan publik dalam beberapa cara. Pertama, dengan mengidentifikasi akar struktural dari masalah sosial daripada hanya mengatasi gejala permukaan. Misalnya, teori tentang reproduksi ketidaksetaraan dapat menunjukkan bahwa kesenjangan prestasi pendidikan bukan hanya masalah individu tetapi masalah struktural yang terkait dengan distribusi sumber daya, modal sosial dan budaya, dan kebijakan yang tidak adil. Kedua, dengan mengantisipasi konsekuensi yang tidak diinginkan dari intervensi kebijakan. Teori tentang pilihan rasional dan analisis institusional dapat membantu mengidentifikasi bagaimana aktor akan merespons insentif kebijakan dengan cara yang mungkin tidak diantisipasi. Ketiga, dengan memberikan kritik normatif terhadap asumsi implisit dalam kebijakan. Teori kritis dan teori feminis dapat mengekspos bagaimana kebijakan yang tampaknya netral sebenarnya merefleksikan dan memperkuat struktur kekuasaan yang tidak adil (Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2024).

Evidence-Based Policy dan Politik Pengetahuan

Gerakan menuju kebijakan berbasis bukti telah meningkatkan permintaan untuk penelitian sosial yang rigorous dan relevan untuk kebijakan. Namun, konsep bukti itu sendiri tidak netral dan terbuka untuk kontestasi. Apa yang dihitung sebagai bukti yang valid? Riset eksperimental dengan uji coba

terkontrol acak (*randomized controlled trials*) sering diprioritaskan sebagai "standar emas" bukti, tetapi metode ini memiliki keterbatasan untuk menangkap kompleksitas kontekstual dan proses sosial yang non-linear. Riset kualitatif yang mendalam dapat memberikan pemahaman yang kaya tentang mekanisme kausal dan makna subjektif, tetapi sering dipandang sebagai kurang rigorous atau tidak dapat digeneralisasi (Walby, 2021).

Boaventura de Sousa Santos mengkritik apa yang disebutnya fasisme pengetahuan—dominasi satu bentuk pengetahuan (pengetahuan ilmiah Barat) yang mengeksklusikan dan mendiskreditkan bentuk pengetahuan lain. Dalam konteks kebijakan, ini berarti pengetahuan lokal, pengetahuan indigenous, dan pengetahuan praktis dari komunitas sering diabaikan dalam favor model dan data yang diproduksi oleh para ahli. Pendekatan epistemologi Selatan mengadvokasi ekologi pengetahuan—pengakuan dan dialog antara berbagai bentuk pengetahuan—sebagai basis untuk kebijakan yang lebih inklusif dan efektif (Santos, 2014).

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara teori sosial dan kebijakan publik menghadapi tantangan khusus. Kapasitas penelitian sosial masih terbatas dan tidak merata. Lembaga penelitian sering kekurangan sumber daya dan independensi. Pengambilan kebijakan sering lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik jangka pendek daripada bukti empiris. Namun, ada juga contoh positif di mana penelitian sosial telah berkontribusi pada kebijakan, seperti penelitian tentang kemiskinan yang menginformasikan program perlindungan sosial, atau penelitian tentang desentralisasi yang menginformasikan reformasi tata kelola. Memperkuat hubungan antara penelitian dan kebijakan memerlukan investasi dalam kapasitas penelitian, platform untuk dialog antara peneliti dan pembuat kebijakan, dan insentif untuk penelitian yang relevan dengan kebijakan (JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2024).

Etika, Nilai, dan Tanggung Jawab Sosial Ilmuwan

Teori sosial tidak bebas nilai dan tidak dapat bebas nilai. Max Weber membedakan antara penilaian nilai—pernyataan tentang apa yang seharusnya—dan penilaian fakta—pernyataan tentang apa yang ada. Ia mengargumentasikan bahwa ilmuwan sosial harus berusaha untuk netralitas nilai dalam penelitian mereka, tetapi mengakui bahwa pilihan masalah penelitian, kerangka konseptual, dan interpretasi temuan semua melibatkan nilai. Lebih fundamental lagi, ilmu sosial itu sendiri adalah bagian dari proyek

Pencerahan yang berkomitmen pada nilai-nilai seperti rasionalitas, kemajuan, dan pembebasan manusia (Weber, 1949).

Teori kritis dalam tradisi Frankfurt School mengargumentasikan bahwa ilmu sosial memiliki tanggung jawab emansipatoris—tidak hanya untuk memahami dunia tetapi untuk mengkritik dan mengubahnya. Jürgen Habermas mengidentifikasi tiga kepentingan pengetahuan: teknis (mengendalikan alam), praktis (memahami makna), dan emansipatoris (membebaskan dari dominasi). Ilmu sosial kritis berorientasi pada kepentingan emansipatoris—mengungkap ideologi, menantang struktur kekuasaan yang tidak adil, dan berkontribusi pada transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih rasional dan adil (Habermas, 1971).

Dalam era kontemporer di mana ilmu sosial semakin diminta untuk berkontribusi pada solusi masalah sosial yang mendesak, pertanyaan tentang etika dan tanggung jawab menjadi semakin penting. Penelitian tentang kecerdasan buatan menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab ilmuwan untuk mengantisipasi dan mencegah konsekuensi yang merugikan. Penelitian tentang perubahan iklim melibatkan tanggung jawab untuk mengkomunikasikan urgensi tanpa jatuh ke dalam alarmisme yang melumpuhkan atau pesimisme yang mengarah pada kelumpuhan. Penelitian tentang ketidaksetaraan sosial melibatkan tanggung jawab untuk tidak hanya mendokumentasikan ketidakadilan tetapi juga berkontribusi pada strategi untuk mengatasinya (Collins, 2024).

18.4 Integrasi Disiplin Ilmu

Interdisiplinaritas sebagai Keharusan

Kompleksitas fenomena sosial kontemporer menuntut pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif dari berbagai disiplin ilmu. Perubahan iklim tidak dapat dipahami hanya melalui sosiologi tetapi memerlukan integrasi dengan klimatologi, ekologi, ekonomi, dan ilmu politik. Pandemi memerlukan integrasi epidemiologi, virologi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Kecerdasan buatan memerlukan integrasi ilmu komputer, sosiologi, filsafat, dan studi hukum. Namun, interdisiplinaritas lebih mudah diadvokasi daripada dipraktikkan karena perbedaan epistemologis, metodologis, dan institusional antara disiplin.

Immanuel Wallerstein dalam proyek "Membuka Kembali Ilmu Sosial" mengkritik fragmentasi disiplin ilmu sosial menjadi sosiologi, ekonomi, ilmu politik, dan antropologi sebagai warisan historis abad ke-19 yang tidak lagi

memadai untuk menangkap kompleksitas realitas sosial kontemporer. Ia mengadvokasi rekonfigurasi ilmu sosial menuju pendekatan yang lebih holistik yang tidak dibatasi oleh batas-batas disiplin artifisial. Teori sistem dunia yang dikembangkannya adalah contoh upaya untuk mengintegrasikan analisis ekonomi, politik, dan kultural dalam kerangka yang terpadu (Wallerstein, 2001).

Mathieu Deflem dalam analisisnya tentang penelitian COVID-19 mengargumentasikan bahwa interdisiplinaritas paling efektif ketika dipahami sebagai kolaborasi—berbagai disiplin berkontribusi dari perspektif dan keahlian mereka masing-masing, daripada upaya untuk menciptakan satu paradigma yang menyatukan semua disiplin. Kolaborasi interdisipliner memerlukan kemampuan untuk berkomunikasi lintas perbedaan bahasa disipliner, menghormati kontribusi unik dari setiap disiplin, dan menemukan titik integrasi tanpa menghilangkan kekhususan disipliner (Deflem, 2022).

Hubungan Ilmu Sosial dan Ilmu Alam

Salah satu perdebatan fundamental dalam filsafat ilmu sosial adalah tentang hubungan antara ilmu sosial dan ilmu alam. Positivisme mengadvokasi kesatuan metode—ilmu sosial harus mengadopsi metode ilmu alam dengan penekanan pada observasi empiris, pengujian hipotesis, dan hukum kausal. Interpretivisme mengargumentasikan perbedaan fundamental antara ilmu alam yang mempelajari objek tanpa makna dan ilmu sosial yang mempelajari subjek yang memiliki intensionalitas, makna, dan refleksivitas. Wilhelm Dilthey membedakan antara ilmu alam (*Naturwissenschaften*) yang berorientasi pada penjelasan dan ilmu budaya (*Geisteswissenschaften*) yang berorientasi pada pemahaman.

Krisis iklim dan pandemi telah memaksa reexaminasi hubungan ini. Antroposen menunjukkan bahwa pembedaan tajam antara alam dan masyarakat tidak lagi dapat dipertahankan—manusia telah menjadi kekuatan geologis yang mengubah sistem Bumi, dan sebaliknya perubahan sistem Bumi memiliki konsekuensi sosial yang mendalam. Bruno Latour mengargumentasikan bahwa modernitas dibangun di atas pemisahan besar (*great divide*) antara alam dan budaya, subjek dan objek, fakta dan nilai—pemisahan yang harus dilampaui untuk mengatasi krisis ekologis kontemporer. Teori aktor-jaringan yang dikembangkannya berusaha untuk melampaui dualisme ini dengan memperlakukan manusia dan non-manusia sebagai aktor dalam jaringan yang sama (Latour, 2005).

Karen Barad dalam realisme agensi (*agential realism*) mengajukan ontologi baru yang melampaui dikotomi subjek-objek. Ia mengargumentasikan bahwa realitas tidak terdiri dari entitas yang sudah ada sebelumnya tetapi muncul melalui intra-aksi material-diskursif. Dalam kerangka ini, batasan antara pengamat dan yang diamati, antara alat pengukuran dan objek yang diukur, tidak *given* tetapi diproduksi melalui praktik material. Pendekatan ini memiliki implikasi mendalam untuk bagaimana kita memahami hubungan antara pengetahuan dan realitas, antara sosial dan material (Barad, 2007).

Menuju Transdisiplinaritas

Beberapa ilmuwan mengadvokasi gerakan di luar interdisiplinaritas menuju transdisiplinaritas—pendekatan yang tidak hanya mengintegrasikan berbagai disiplin tetapi juga melibatkan aktor non-akademik seperti praktisi, pembuat kebijakan, dan komunitas yang terkena dampak dalam proses produksi pengetahuan. Transdisiplinaritas mengakui bahwa pengetahuan yang relevan untuk mengatasi masalah kompleks tidak hanya diproduksi di universitas tetapi juga dalam praktik, pengalaman, dan pengetahuan lokal.

Penelitian transdisipliner tentang adaptasi perubahan iklim di komunitas pesisir Indonesia, misalnya, akan melibatkan tidak hanya ilmuwan sosial dan ilmuwan alam tetapi juga nelayan, pemerintah lokal, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam mendefinisikan masalah, mengumpulkan data, menginterpretasi temuan, dan mengembangkan strategi adaptasi. Pendekatan ini mengakui bahwa komunitas lokal memiliki pengetahuan yang tidak dapat diakses oleh peneliti eksternal dan bahwa penelitian yang efektif memerlukan ko-produksi pengetahuan (Sosiohumaniora, 2024).

Namun, transdisiplinaritas juga menghadapi tantangan. Perbedaan epistemic antara pengetahuan akademik dan non-akademik, perbedaan kepentingan antara berbagai *stakeholder*, dan ketidaksetaraan kekuasaan dalam proses ko-produksi pengetahuan dapat menghambat kolaborasi yang efektif. Lebih fundamental lagi, transdisiplinaritas menantang norma akademik tentang objektivitas, keahlian, dan otonomi ilmiah. Pertanyaan tentang bagaimana menyeimbangkan rigor akademik dengan relevansi praktis, bagaimana mengelola konflik kepentingan, dan bagaimana memastikan bahwa ko-produksi tidak menjadi kooptasi memerlukan refleksi kritis yang berkelanjutan.

18.5 Agenda Penelitian Masa Depan

Prioritas Teoretis dan Empiris

Masa depan teori sosial memerlukan agenda penelitian yang responsif terhadap tantangan kontemporer sambil tetap mempertahankan komitmen pada rigor teoretis dan empiris. Beberapa area prioritas dapat diidentifikasi. Pertama, teori tentang transformasi digital dan masyarakat platform. Ekonomi platform seperti Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak telah mengubah fundamental cara orang bekerja, bertransaksi, dan berinteraksi. Namun, pemahaman teoretis tentang implikasi sosial dari platformisasi masih terbatas. Penelitian diperlukan tentang bagaimana platform membentuk ketidaksetaraan, bagaimana algoritma mempengaruhi perilaku dan pilihan, dan bagaimana platform dapat diregulasi untuk kepentingan publik.

Kedua, teori tentang krisis ekologis dan transformasi sosial-ekologis. Transisi menuju masyarakat berkelanjutan memerlukan tidak hanya teknologi baru tetapi juga transformasi dalam nilai, institusi, dan praktik sosial. Penelitian diperlukan tentang bagaimana transisi ini dapat dilakukan secara adil tanpa memperburuk ketidaksetaraan, bagaimana mengatasi resistensi dari kepentingan yang sudah mapan, dan bagaimana memobilisasi dukungan publik untuk perubahan yang diperlukan. Konsep transisi yang adil (*just transition*) yang mengintegrasikan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis memerlukan elaborasi teoretis dan empiris lebih lanjut.

Ketiga, teori tentang ketidaksetaraan dalam berbagai dimensinya. Ketidaksetaraan ekonomi telah meningkat di sebagian besar dunia dalam beberapa dekade terakhir, menciptakan konsentrasi kekayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ketidaksetaraan tidak hanya ekonomi tetapi juga sosial, politik, budaya, dan kesehatan. Konsep interseksionalitas yang dikembangkan oleh teori feminis hitam menawarkan kerangka untuk memahami bagaimana berbagai bentuk ketidaksetaraan—kelas, ras, gender, seksualitas, disabilitas—saling berpotongan dan memperkuat satu sama lain. Penelitian diperlukan tentang mekanisme spesifik melalui mana ketidaksetaraan diproduksi dan direproduksi, dan strategi untuk mengatasinya (Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 2024).

Keempat, teori tentang populisme, polarisasi, dan krisis demokrasi. Banyak negara mengalami kebangkitan gerakan populis, polarisasi politik yang meningkat, dan erosi norma demokratis. Pemahaman tentang akar sosial dari fenomena ini—ketidakpuasan ekonomi, kecemasan identitas, disrupsi teknologi, atau delegitimasi elit—masih diperdebatkan. Penelitian diperlukan tentang bagaimana media sosial berkontribusi pada polarisasi, bagaimana

disinformasi menyebar dan dapat dikombat, dan bagaimana demokrasi dapat diperkuat menghadapi tantangan kontemporer.

Kelima, teori tentang masa depan kerja dan transformasi ekonomi. Otomasi, kecerdasan buatan, dan ekonomi gig mengubah fundamental sifat kerja. Pertanyaan tentang masa depan kerja penuh waktu, sistem proteksi sosial yang dirancang untuk ekonomi industrial, dan distribusi manfaat dari produktivitas yang meningkat menjadi semakin mendesak. Penelitian diperlukan tentang bagaimana mengorganisir pekerja dalam ekonomi platform, bagaimana merancang sistem proteksi sosial yang cocok untuk bentuk kerja yang fleksibel dan tidak stabil, dan bagaimana memastikan bahwa manfaat dari teknologi didistribusikan secara adil (Jurnal Ilmu Sosial Indonesia, 2024).

Inovasi Metodologis

Masa depan teori sosial juga memerlukan inovasi metodologis untuk menangkap kompleksitas fenomena kontemporer. Data besar (*big data*) dan metode komputasional menawarkan kemungkinan baru untuk menganalisis pola sosial dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Analisis jaringan dapat memetakan struktur dan dinamika interaksi sosial. Analisis teks komputasional dapat mengidentifikasi tema dan sentimen dalam volume besar data tekstual dari media sosial, berita, atau dokumen. Pembelajaran mesin (*machine learning*) dapat mengidentifikasi pola yang tidak dapat dideteksi oleh analisis manusia.

Namun, metode komputasional juga memiliki keterbatasan dan risiko. Data yang dianalisis sering tidak representatif—pengguna media sosial tidak mewakili populasi umum. Algoritma dapat mereproduksi bias yang ada dalam data pelatihan. Fokus pada pola yang dapat dikuantifikasi dapat mengabaikan nuansa, konteks, dan makna yang penting untuk pemahaman sosial. Oleh karena itu, integrasi metode komputasional dengan metode kualitatif tradisional—etnografi, wawancara mendalam, analisis diskursus—penting untuk pemahaman yang komprehensif (Li et al., 2024).

Metode partisipatif dan transformatif juga mendapatkan perhatian sebagai cara untuk membuat penelitian lebih relevan dan adil. Penelitian aksi partisipatif (*participatory action research*) melibatkan komunitas yang diteliti sebagai ko-peneliti dalam mendefinisikan masalah, mengumpulkan data, dan mengembangkan intervensi. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan

pengetahuan tetapi juga pemberdayaan dan perubahan sosial. Dalam konteks Indonesia, metode partisipatif telah digunakan dalam penelitian pembangunan pedesaan, kesehatan masyarakat, dan pendidikan dengan hasil yang menjanjikan (Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, 2024).

Globalisasi Teori Sosial dan Dekolonisasi Pengetahuan

Masa depan teori sosial harus lebih global dan inklusif. Selama sebagian besar sejarahnya, teori sosial didominasi oleh perspektif Eropa dan Amerika Utara yang diposisikan sebagai universal. Teori yang dikembangkan dalam konteks spesifik diterapkan ke seluruh dunia tanpa mempertimbangkan perbedaan historis, kultural, dan struktural. Gerakan dekolonisasi pengetahuan menantang dominasi epistemologis ini dan mengadvokasi pluralisasi teori sosial.

Raewyn Connell dalam *Southern Theory* mengargumentasikan bahwa negara-negara di Global South bukan hanya objek teori yang dikembangkan di Utara tetapi juga lokasi produksi teori. Teori yang dikembangkan dalam konteks kolonialisme, postkolonialisme, dan ketidaksetaraan global dapat menawarkan wawasan yang tidak tersedia dari perspektif metropolis. Konsep seperti dependensi, neokolonialisme, atau pembangunan tidak merata yang dikembangkan oleh teoritikus Amerika Latin, Afrika, dan Asia menawarkan perspektif berbeda tentang modernitas dan globalisasi (Connell, 2007).

Dalam konteks Indonesia, pengembangan teori yang berakar dalam realitas lokal sambil berkontribusi pada diskursus global adalah prioritas. Konsep seperti gotong royong, musyawarah mufakat, atau Pancasila memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi konsep teoretis yang relevan tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk pemahaman yang lebih luas tentang komunalisme, demokrasi deliberatif, atau pluralisme. Namun, ini memerlukan upaya untuk mengartikulasikan konsep-konsep ini dalam bahasa teoretis yang dapat dikomunikasikan dan didebat dalam forum akademik internasional (Sosiohumaniora, 2024).

Dekolonisasi pengetahuan juga berarti mengakui dan menghargai bentuk pengetahuan non-akademik—pengetahuan indigenous, pengetahuan lokal, pengetahuan praktis—sebagai legitimate dan berharga. Boaventura de Sousa Santos mengadvokasi ekologi pengetahuan yang mengakui pluralitas pengetahuan dan menolak hierarki epistemologis. Dalam konteks penelitian tentang perubahan iklim, misalnya, pengetahuan petani tentang perubahan

pola cuaca atau pengetahuan nelayan tentang perubahan ekosistem laut dapat melengkapi pengetahuan ilmiah dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif (Santos, 2014).

Kesimpulan

Masa depan teori sosial akan ditentukan oleh kemampuannya untuk merespons tantangan kontemporer yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kompleksitas dan urgensinya—transformasi digital yang mengubah fundamental cara hidup manusia, krisis iklim yang mengancam kelangsungan ekosistem planet, pandemi yang mengekspos kerentanan sistem sosial, dan ketidaksetaraan yang terus melebar yang mengancam kohesi sosial dan legitimasi institusi. Tantangan-tantangan ini memerlukan inovasi teoretis yang substansial, integrasi disiplin ilmu, dan kolaborasi antara akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, dan komunitas.

Beberapa prinsip kunci muncul dari pembahasan dalam bab ini. Pertama, teori sosial masa depan harus lebih inklusif dan global, mengakui pluralitas perspektif dan menolak dominasi epistemologis Barat. Dekolonisasi pengetahuan dan pengakuan terhadap teori Selatan adalah imperatif etis dan intelektual. Kedua, teori sosial harus melampaui antroposentrisme dan mengintegrasikan materialitas, teknologi, dan ekologi ke dalam analisis sosial. Krisis iklim dan transformasi digital menunjukkan bahwa batas-batas antara manusia dan non-manusia, alam dan budaya tidak lagi dapat dipertahankan sebagai absolut.

Ketiga, teori sosial harus lebih interdisipliner dan transdisipliner, mengintegrasikan perspektif dari berbagai disiplin dan melibatkan aktor non-akademik dalam produksi pengetahuan. Kompleksitas fenomena kontemporer tidak dapat ditangkap oleh satu disiplin atau perspektif. Keempat, teori sosial harus lebih relevan untuk praktik dan kebijakan, berkontribusi pada solusi masalah sosial yang urgen sambil mempertahankan marwah intelektual dan independensi kritis. Sosiologi publik yang terlibat dengan berbagai publik di luar akademi adalah model yang menjanjikan.

Kelima, teori sosial harus inovatif secara metodologis, mengintegrasikan metode komputasional baru dengan metode kualitatif tradisional, dan mengembangkan pendekatan partisipatif yang memberdayakan komunitas yang diteliti. Data besar dan kecerdasan buatan menawarkan kemungkinan baru tetapi juga risiko baru yang harus dikelola dengan hati-hati. Keenam, teori sosial harus refleksif tentang etika, nilai, dan tanggung jawab sosial

ilmuwan. Penelitian tentang kecerdasan buatan, iklim, atau ketidaksetaraan bukan hanya latihan intelektual tetapi memiliki implikasi mendalam untuk kehidupan manusia dan kelangsungan planet.

Dalam konteks Indonesia, masa depan teori sosial memiliki peluang dan tantangan khusus. Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, populasi terbesar keempat di dunia, dan keragaman budaya yang luar biasa memiliki potensi untuk menjadi pusat produksi teori sosial yang relevan tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk Global South secara lebih luas. Namun, ini memerlukan investasi dalam kapasitas penelitian, platform untuk dialog internasional, dan komitmen untuk mengembangkan teori yang berakar dalam realitas lokal sambil berkontribusi pada diskursus global.

Masa depan teori sosial tidak akan ditentukan oleh satu paradigma dominan tetapi oleh pluralitas perspektif yang saling berkompetisi, berkolaborasi, dan berdialog. Teori fungsionalis, konflik, interaksionis, feminis, postkolonial, dan ekologis semua memiliki kontribusi untuk membuat pemahaman yang lebih komprehensif tentang realitas sosial yang kompleks. Dialog yang konstruktif antara perspektif yang berbeda—yang mengakui perbedaan tetapi juga mencari titik konvergensi—adalah kunci untuk perkembangan teori sosial yang produktif.

Akhirnya, masa depan teori sosial tidak hanya tentang memahami dunia tetapi juga tentang mengubahnya. Dalam menghadapi tantangan eksistensial seperti krisis iklim, ketidaksetaraan yang melebar, dan ancaman terhadap demokrasi, ilmu sosial memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk menganalisis tetapi juga untuk berkontribusi pada transformasi menuju masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan demokratis. Teori sosial yang kritis, terlibat, dan berorientasi pada perubahan sosial bukan pengkhianatan terhadap objektivitas ilmiah tetapi pemenuhan komitmen fundamental ilmu sosial untuk pembebasan dan kemajuan manusia. Masa depan teori sosial adalah masa depan yang kita ciptakan bersama melalui penelitian, pengajaran, dialog, dan keterlibatan publik yang berkomitmen pada nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan solidaritas.

Referensi Bab 18

Barad, K. (2007). *Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning*. Duke University Press.

Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Polity Press.

Beck, U. (2010). *World at Risk*. Polity Press.

Benjamin, R. (2019). *Race After Technology: Abolitionist Tools for the New Jim Code*. Polity Press.

Bonneuil, C., & Fressoz, J.-B. (2016). *The Shock of the Anthropocene*. Verso Books.

Burawoy, M. (2005). For Public Sociology. *American Sociological Review*, 70(1), 4-28.

Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

Collins, H. (2024). Why Artificial Intelligence Needs Sociology of Knowledge: Parts I and II. *AI & Society*, 39, 2731-2750. https://doi.org/10.1007/s00146-024-01954-8

Connell, R. (2007). *Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social Science*. Polity Press.

Davidson, D. J. (2022). Climate Change Sociology: Past Contributions and Future Research Needs. *PLOS Climate*, 1(7), e0000055. https://doi.org/10.1371/journal.pclm.0000055

Deflem, M. (2022). The Continuity of the Social Sciences During COVID-19: Sociology and Interdisciplinarity in Pandemic Times. *Society*, 59, 528-537. https://doi.org/10.1007/s12115-022-00763-3

Domingues, J. M., & Favier, J. (2024). The Social and Sociological Province of Climate Change: Introduction. *International Journal of Politics, Culture, and Society*, 37, 313-321. https://doi.org/10.1007/s10767-024-09502-4

Dunlap, R. E., & Brulle, R. J. (Eds.). (2015). *Climate Change and Society: Sociological Perspectives*. Oxford University Press.

Frey, R. S., Gellert, P., & Dahms, H. F. (2020). Climate Change and Society: Sociological Perspectives. *Annual Review of Sociology*, 46, 35-55. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-121919-054614

Habermas, J. (1971). *Knowledge and Human Interests*. Beacon Press.

Joyce, K., & Cruz, T. M. (2024). A Sociology of Artificial Intelligence: Inequalities, Power, and Data Justice. *Socius*, 10. https://doi.org/10.1177/23780231241275393

Kanzola, A., Papaioannou, K., & Petrakis, P. (2024). Unlocking Society's Standings in Artificial Intelligence. *Technological Forecasting and Social Change*, 200, 123106. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.123106

Labora González, J. J., & Fernández-Vilas, E. (2024). The Social Evolution of COVID-19: Pandemics as Total Social Facts. *Frontiers in Sociology*, 9, 1397826. https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1397826

Latour, B. (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford University Press.

Li, C., Chen, J., Zhang, T., Wang, S., Su, Y., & Yuan, J. (2024). AI for Social Science and Social Science of AI: A Survey. *Information Processing & Management*, 61(3), 103665. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2024.103665

Lyotard, J.-F. (1984). *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. University of Minnesota Press.

Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure* (Enlarged ed.). Free Press.

Santos, B. (2014). *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*. Routledge.

Taleb, N. N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Random House.

Toli, A., & Murtagh, N. (2021). Sociological Perspectives on Climate Change and Society: A Review. *Climate*, 9(1), 7. https://doi.org/10.3390/cli9010007

Turner, J. H. (2014). *Theoretical Sociology: 1830 to the Present*. Sage Publications.

Walby, S. (2021). The COVID Pandemic and Social Theory: Social Democracy and Public Health in the Crisis. *European Journal of Social Theory*, 24(1), 22-43. https://doi.org/10.1177/1368431020970127

Wallerstein, I. (2001). *Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth-Century Paradigms* (2nd ed.). Temple University Press.

Ward, P. R. (2020). A Sociology of the COVID-19 Pandemic: A Commentary and Research Agenda for Sociologists. *Journal of Sociology*, 56(4), 726-735. https://doi.org/10.1177/1440783320939682

Weber, M. (1949). *The Methodology of the Social Sciences*. Free Press.

Winner, L. (1980). Do Artifacts Have Politics? *Daedalus*, 109(1), 121-136.

Referensi Indonesia:

Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya - Universitas Negeri Medan. (2024). Berbagai edisi tentang masa depan antropologi Indonesia di era digital.

Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities (JISSH) - LIPI. (2021). Special Issue: Global Society in the Time of COVID-19. Topik: Digital research methods, transformasi sains komunikasi era VUCA.

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA - Universitas Medan Area. (2024). Berbagai edisi tentang aplikasi teori sosial dalam kebijakan publik.

JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo) - UIN Walisongo Semarang. (2024). Berbagai edisi tentang radikalisme, demokratisasi, dan tantangan masa depan Indonesia.

Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2024). Berbagai edisi tentang emerging issues dalam masyarakat Indonesia dan metodologi baru.

Masyarakat: Jurnal Sosiologi - Universitas Indonesia. (2024). Berbagai edisi tentang tantangan teoretis untuk Indonesia masa depan dan transformasi digital.

Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan - Universitas Muhammadiyah Makassar. (2024). Berbagai edisi tentang politik dan kebijakan publik Indonesia.

Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora - Universitas Padjadjaran. (2024). Berbagai edisi tentang integrasi disiplin ilmu dan inovasi teoretis.

GLOSARIUM

A

AGENCY (*Agensi/Kemampuan Bertindak*) Kapasitas individu atau kelompok untuk bertindak secara otonom, membuat pilihan yang bermakna, dan mentransformasi struktur sosial.

ALIENASI (*Alienation*) Kondisi keterasingan individu dari hasil kerjanya, dari proses produksi, dari manusia lain, dan dari esensi kemanusiaannya sendiri dalam sistem kapitalis, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Karl Marx.

ANOMIE (*Anomie*) Kondisi keterputusan normatif atau ketiadaan regulasi moral yang jelas dalam masyarakat, yang dapat menyebabkan disintegrasi sosial dan perilaku menyimpang, dikembangkan oleh Émile Durkheim.

APARATUS IDEOLOGIS NEGARA (*Ideological State Apparatuses*) Institusi-institusi seperti sekolah, gereja, media, dan keluarga yang berfungsi mereproduksi relasi produksi kapitalis melalui internalisasi ideologi dominan, menurut Louis Althusser.

ARENA (*Field*) Ruang sosial yang relatif otonom di mana agen berjuang untuk posisi dan sumber daya yang berharga, konsep kunci dalam teori Pierre Bourdieu.

B

BIOPOLITIK (*Biopolitics*) Konsep Michel Foucault yang menganalisis bagaimana kekuasaan modern beroperasi pada tingkat populasi dengan mengatur kehidupan biologis melalui statistik, kesehatan publik, dan manajemen populasi.

BIROKRASI (*Bureaucracy*) Organisasi rasional modern dengan hierarki kantor yang tetap, aturan tertulis, dan pengangkatan berdasarkan kualifikasi teknis, yang menurut Max Weber merupakan ekspresi paling murni dari rasionalitas instrumental.

D

DEKONSTRUKSI (*Deconstruction*) Strategi membaca dan analisis yang dikembangkan Jacques Derrida untuk mengungkap ketidakstabilan dan ambiguitas yang inheren dalam teks dan struktur pemikiran Barat.

DESKRIPSI TEBAL (*Thick Description*) Metode etnografi yang dikembangkan Clifford Geertz untuk menangkap lapisan makna dalam tindakan sosial dengan menganalisis struktur signifikasi yang membuat tindakan bermakna.

DIALEKTIKA (*Dialectics*) Metode analisis yang menekankan kontradiksi, negasi, dan transformasi dalam proses historis, yang menjadi dasar materialisme historis Karl Marx.

DIFFEREND Konsep Jean-François Lyotard tentang konflik yang tidak dapat diselesaikan karena tidak ada aturan umum yang dapat diterapkan untuk kedua pihak yang berkonflik.

DISKURSUS (*Discourse*) Sistem pernyataan, praktik, dan institusi yang menghasilkan pengetahuan dan kebenaran, konsep sentral dalam analisis Michel Foucault tentang relasi kekuasaan dan pengetahuan.

DUALITAS STRUKTUR (*Duality of Structure*) Konsep Anthony Giddens bahwa struktur dan agensi bukan entitas terpisah tetapi dua sisi dari proses sosial yang sama, di mana struktur adalah sekaligus medium dan hasil dari praktik sosial.

E

EPISTEMOLOGI (*Epistemology*) Cabang filsafat yang mempelajari hakikat pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh, dan apa yang dapat kita ketahui.

ETNOMETODOLOGI (*Ethnomethodology*) Pendekatan yang dikembangkan Harold Garfinkel untuk mempelajari metode praktis yang digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan keteraturan sosial.

F

FAKTA SOSIAL (*Social Facts*) Cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang eksternal terhadap individu dan memiliki kekuatan memaksa, konsep kunci Émile Durkheim dalam mendefinisikan objek kajian sosiologi.

FALSIFIABILITAS (*Falsifiability*) Kriteria demarkasi yang dikembangkan Karl Popper untuk membedakan pernyataan ilmiah dari non-ilmiah berdasarkan kemungkinan untuk difalsifikasi atau dibantah melalui pengujian empiris.

FEMINISME GELOMBANG KEDUA Gerakan feminis yang muncul pada tahun 1960-an dengan fokus pada penindasan struktural perempuan dalam patriarki dan perjuangan untuk kesetaraan substantif.

FEMINISME GELOMBANG KETIGA Feminisme yang muncul pada 1990-an yang mengembangkan kritik terhadap universalisme feminisme arus utama dan menekankan interseksionalitas serta keragaman pengalaman perempuan.

G

GLOBALISASI (*Globalization*) Intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan lokalitas yang berjauhan sehingga kejadian lokal dibentuk oleh peristiwa yang terjadi jauh dan sebaliknya.

GRAND THEORY Tingkatan teoretis dengan abstraksi tertinggi yang berusaha memberikan penjelasan komprehensif dan universal tentang keseluruhan realitas sosial.

H

HABITUS Sistem disposisi yang terstruktur dan menstrukturkan yang diperoleh melalui sosialisasi, yang memungkinkan individu menghasilkan praktik yang teratur tanpa secara eksplisit mengikuti aturan, konsep Pierre Bourdieu.

HEGEMONI (*Hegemony*) Dominasi yang dicapai bukan terutama melalui koersi tetapi melalui kepemimpinan intelektual dan moral yang menghasilkan konsensus, dikembangkan oleh Antonio Gramsci.

HERMENEUTIKA (*Hermeneutics*) Tradisi filosofis yang menekankan pentingnya interpretasi dan pemahaman makna subjektif dalam teks dan tindakan sosial.

I

IDEOLOGI (*Ideology*) Sistem ide, nilai, dan keyakinan yang melegitimasi struktur kekuasaan dan dominasi yang ada, sering kali menyembunyikan relasi eksploitasi yang sebenarnya.

ILMU SOSIAL (*Social Science*) Studi sistematis tentang masyarakat manusia, perilaku sosial, dan berbagai institusi yang membentuk kehidupan kolektif manusia, yang menggunakan metodologi terstruktur dan teoretis untuk menganalisis fenomena sosial yang terus berkembang.

IMAJINASI SOSIOLOGIS (*Sociological Imagination*) Kemampuan untuk menghubungkan masalah pribadi dengan isu publik dan memahami interaksi antara biografi individual dan struktur sosial yang lebih luas, dikembangkan oleh C. Wright Mills.

INTERAKSIONISME SIMBOLIK (*Symbolic Interactionism*) Perspektif teoretis yang menekankan bahwa realitas sosial dikonstruksi melalui interaksi simbolis dan bahwa makna bukan inheren dalam objek tetapi muncul dari interaksi sosial.

INTERPELASI (*Interpellation*) Konsep Louis Althusser tentang bagaimana ideologi memanggil atau menyapa individu sebagai subjek, dan dalam proses pengakuan terhadap panggilan tersebut, individu menjadi subjek yang tunduk pada struktur ideologis.

INTERSEKSIONALITAS (*Intersectionality*) Konsep yang dikembangkan Kimberlé Crenshaw dan Patricia Hill Collins yang menganalisis bagaimana berbagai sistem penindasan (gender, ras, kelas, seksualitas) saling bersilangan dan memperkuat dalam membentuk pengalaman spesifik individu.

K

KAPITALISME PENGAWASAN (*Surveillance Capitalism*) Sistem ekonomi baru yang mengekstraksi data pribadi sebagai sumber utama penciptaan nilai dan keuntungan, konsep yang dikembangkan oleh Shoshana Zuboff.

KESADARAN KOLEKTIF (*Collective Consciousness*) Totalitas kepercayaan dan sentimen bersama yang menyatukan anggota masyarakat, konsep kunci Émile Durkheim dalam memahami solidaritas sosial.

KOLONIALITAS KEKUASAAN (*Coloniality of Power*) Konsep Aníbal Quijano tentang pola kekuasaan yang muncul dari kolonialisme modern dan terus beroperasi hingga kini dalam bentuk hierarki rasial dan eurosentrisme global.

KONSTRUKSI SOSIAL (*Social Construction*) Proses di mana aktor sosial menciptakan, memelihara, dan mengubah kategori, institusi, dan makna melalui interaksi, diskursus, dan praktik sosial.

KEKUASAAN DISIPLINER (*Disciplinary Power*) Bentuk kekuasaan modern yang beroperasi melalui normalisasi dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap individu, sebagaimana dianalisis Michel Foucault.

M

MATERIALISME HISTORIS (*Historical Materialism*) Teori Karl Marx tentang perkembangan sejarah yang didasarkan pada dinamika cara produksi dan perjuangan kelas.

MCDONALDISASI (*McDonaldization*) Tesis George Ritzer bahwa prinsip-prinsip industri makanan cepat saji (efisiensi, kalkulabilitas, prediktabilitas, kontrol) menyebar ke berbagai sektor kehidupan sosial.

MIDDLE-RANGE THEORY Teori dengan tingkat abstraksi moderat yang dapat dioperasionalisasi dan diuji secara empiris, dikembangkan oleh Robert K. Merton.

MODAL BUDAYA (*Cultural Capital*) Pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dan kompetensi budaya yang dapat dikonversi menjadi keuntungan dalam arena tertentu, konsep Pierre Bourdieu.

MODAL EKONOMI (*Economic Capital*) Sumber daya material dan finansial yang dimiliki individu atau kelompok.

MODAL SOSIAL (*Social Capital*) Jaringan relasi dan koneksi yang dapat dimobilisasi untuk keuntungan, konsep yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu, Robert Putnam, dan James Coleman.

MODAL SIMBOLIK (*Symbolic Capital*) Prestise, kehormatan, dan pengakuan yang diperoleh dari kepemilikan modal-modal lain.

O

ONTOLOGI (*Ontology*) Cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas dan keberadaan.

OPERASIONALISASI Proses menerjemahkan konsep teoretis abstrak menjadi variabel yang dapat diukur atau indikator yang dapat diobservasi dalam penelitian empiris.

P

PANOPTIKON (*Panopticon*) Desain penjara ideal Jeremy Bentham yang diadopsi Michel Foucault sebagai metafora untuk mekanisme kekuasaan disipliner modern, di mana pengawasan konstan menghasilkan internalisasi disiplin.

PARADIGMA (*Paradigm*) Kerangka konseptual dan metodologis yang mendasari penelitian ilmiah, mencakup asumsi ontologis, epistemologis, dan metodologis yang membentuk cara peneliti memahami fenomena.

PARADIGMA INTERPRETIVIS Paradigma penelitian yang menekankan pemahaman makna subjektif yang diberikan aktor sosial terhadap tindakan dan pengalaman mereka melalui pendekatan kualitatif.

PARADIGMA KONSTRUKTIVIS Paradigma yang menekankan bahwa realitas sosial tidak hanya diinterpretasikan tetapi secara aktif dikonstruksi melalui diskursus, praktik, dan interaksi sosial.

PARADIGMA KRITIS Paradigma yang mengintegrasikan analisis teoretis dengan komitmen eksplisit pada kritik sosial dan transformasi struktur dominasi.

PARADIGMA POSITIVIS Paradigma yang mengasumsikan realitas sosial memiliki struktur objektif yang dapat diamati dan dianalisis secara netral melalui metode kuantitatif.

PERFORMATIVITAS GENDER Konsep Judith Butler bahwa gender bukan identitas stabil tetapi performansi yang diulang terus-menerus melalui tindakan, ucapan, dan praktik tubuh.

POSTMODERNISME Perspektif teoretis yang menolak meta-narasi besar, menekankan fragmentasi, pluralitas, dan ketidakpastian dalam kondisi kontemporer.

R

RASIONALISASI (*Rationalization*) Proses historis di mana tindakan sosial, institusi, dan pandangan dunia semakin diorganisir berdasarkan kalkulasi rasional tentang cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan, konsep sentral Max Weber.

REFLEKSIVITAS (*Reflexivity*) Kapasitas untuk merenungkan dan mengubah tindakan seseorang berdasarkan informasi baru tentang tindakan tersebut dan konsekuensinya.

RUANG PUBLIK (*Public Sphere*) Ranah dalam kehidupan sosial di mana opini publik dapat terbentuk melalui diskusi rasional tentang masalah kepentingan umum, konsep Jürgen Habermas.

S

SOLIDARITAS MEKANIK (*Mechanical Solidarity*) Tipe kohesi sosial dalam masyarakat tradisional di mana individu terikat karena kesamaan nilai, kepercayaan, dan gaya hidup, konsep Émile Durkheim.

SOLIDARITAS ORGANIK (*Organic Solidarity*) Tipe kohesi sosial dalam masyarakat modern di mana individu terikat karena perbedaan dan interdependensi melalui pembagian kerja yang kompleks.

STRUKTUR (*Structure*) Pola hubungan sosial yang relatif stabil dan berulang yang membentuk konteks untuk tindakan individu dan membatasi serta memungkinkan pilihan aktor.

STRUKTURALISME Pendekatan teoretis yang menekankan bahwa fenomena sosial dan budaya harus dipahami dalam konteks sistem relasi yang mendasarinya.

STRUKTURASI (*Structuration*) Proses melalui mana praktik sosial membentang melintasi ruang dan waktu serta mengkonstitusi struktur yang secara berulang mengorganisir praktik tersebut, teori Anthony Giddens.

T

TEORI KRITIS (*Critical Theory*) Tradisi teoretis yang dikembangkan Mazhab Frankfurt yang mengintegrasikan analisis Marxian dengan psikoanalisis dan teori budaya untuk mengkritik rasionalitas instrumental dan dominasi.

TEORI PILIHAN RASIONAL (*Rational Choice Theory*) Pendekatan yang mengasumsikan individu bertindak berdasarkan kalkulasi rasional tentang biaya dan manfaat untuk memaksimalkan kepentingan mereka.

TEORI SISTEM Pendekatan teoretis yang menganalisis masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan sistem secara keseluruhan.

TINDAKAN KOMUNIKATIF (*Communicative Action*) Tindakan yang berorientasi pada pemahaman mutual dan konsensus melalui komunikasi rasional, konsep kunci Jürgen Habermas.

TINDAKAN INSTRUMENTAL Tindakan yang berorientasi pada kesuksesan dalam mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien.

TINDAKAN SOSIAL (*Social Action*) Tindakan yang berorientasi pada perilaku orang lain dan diberi makna subjektif oleh aktor, konsep fundamental dalam sosiologi Max Weber.

V

VERSTEHEN Metode pemahaman interpretatif yang dikembangkan Max Weber untuk memahami makna subjektif yang diberikan aktor terhadap tindakan mereka.

INDEKS

A. INDEKS NAMA (TOKOH & PEMIKIR)

A

Adorno, Theodor, 299-302
Alexander, Jeffrey, 324-325, 457-458
Althusser, Louis, 318-320
Anderson, Benedict, 7, 28
Appadurai, Arjun, 383-385
Aquinas, Thomas, 33-34
Archer, Margaret, 446-447
Aristoteles, 33-34

B

Bacon, Francis, 34-35
Baudrillard, Jean, 351-354
Bauman, Zygmunt, 357-360, 387
Beck, Ulrich, 360-362
Bentham, Jeremy, 316-317
Bergson, Henri, 157, 161
Bhaskar, Roy, 447
Blumer, Herbert, 55, 274-276, 445
Bourdieu, Pierre, 317-319, 326-327, 446-447, 468-470

C

Caraway, Teri, 17
Castells, Manuel, 385-386
Chakrabarty, Dipesh, 433
Coleman, James, 324, 468
Collins, Patricia Hill, 334-337

Collins, Randall, 325-327, 447
Comte, Auguste, 47-48, 157, 161
Connell, Raewyn, 433
Cooley, Charles Horton, 271-272
Coser, Lewis, 247
Crenshaw, Kimberlé, 334

D

Dahrendorf, Ralf, 298-299

Derrida, Jacques, 320-321
Descartes, René, 38-39
Dilthey, Wilhelm, 34, 53-54
Durkheim, Émile, 48, 155-195, 247
kehidupan dan karya, 157-161
solidaritas mekanik dan organik, 161-165
teori bunuh diri, 165-175
fakta sosial, 175-177
agama dan masyarakat, 177-185
warisan, 185-192

F

Fanon, Frantz, 429-430, 433
Foucault, Michel, 316-318, 387-388
Freire, Paulo, 57
Freud, Sigmund, 300-301
Frisby, David, 247

G

Galilei, Galileo, 35
Garfinkel, Harold, 55, 276-278, 445
Geertz, Clifford, 16, 54, 55-56
Giddens, Anthony, 89, 321-323, 374, 446-447
Goffman, Erving, 278-281
Gramsci, Antonio, 52, 143, 304-306, 308-309

H

Habermas, Jürgen, 57, 302-304, 308, 457-458
Han, Byung-Chul, 388-389
Haraway, Donna, 452
Hardt, Michael, 39
Harvey, David, 143
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 48-50
Held, David, 374
Horkheimer, Max, 299-302
Hume, David, 37-38
Husserl, Edmund, 52-53

J

Jaurès, Jean, 158

K

Kant, Immanuel, 35-36, 39-40
Kepler, Johannes, 35
Kuhn, Thomas, 54, 451, 481

L

Latour, Bruno, 486
Laudan, Larry, 451-452
Leibniz, Gottfried Wilhelm, 39
Levine, Donald, 247
Lévi-Strauss, Claude, 314-316
Liddle, R. William, 15, 16
Locke, John, 37
Lyotard, Jean-François, 355-357
Lyon, David, 388

M

Malinowski, Bronisław, 55
Marcuse, Herbert, 299-301
Marx, Karl, 48-52, 86-88, 127-154, 155-156, 196, 247, 433, 445
biografi intelektual, 127-134
teori alienasi, 139-142
materialisme historis, 142-145
analisis kelas, 145-148
kritik kapitalisme, 148-151
Mbembe, Achille, 430-431
McAdam, Doug, 481
McGrew, Anthony, 374
Mead, George Herbert, 271-274, 445
Merton, Robert K., 78-80, 93-110, 263-271, 463-464, 481
Mignolo, Walter, 427-428, 433
Mill, John Stuart, 37-38
Mills, C. Wright, 297-299
Mohanty, Chandra Talpade, 334
Montesquieu, Charles de, 47
Mujani, Saiful, 15, 16

N

Nandy, Ashis, 433
Negri, Antonio, 39
Newton, Isaac, 35

P

Park, Robert, 48, 270-271
Parsons, Talcott, 77-78, 82, 86-88, 253-263, 445
Plato, 33
Popper, Karl, 54, 451
Putnam, Robert, 468

Q

Quijano, Aníbal, 428-429, 433

R

Ritzer, George, 325-327, 388-389
Robertson, Roland, 383-384
Rousseau, Jean-Jacques, 47

S

Said, Edward, 429
Santos, Boaventura de Sousa, 433, 486
Sassen, Saskia, 385
Schutz, Alfred, 445, 451
Scott, James, 54
Sedgwick, Eve Kosofsky, 342-343
Simmel, Georg, 223-252, 247
Smith, Adam, 148
Smith, Dorothy, 335-336
Sokrates, 33
Spinoza, Baruch, 38-39
Spivak, Gayatri Chakravorty, 334
Sunstein, Cass, 387

T

Thomas, W.I., 271
Turkle, Sherry, 386

U

Urry, John, 385

V

Voltaire, 47

W

Wallerstein, Immanuel, 15, 84, 383

Warner, Michael, 342-343

Weber, Max, 34, 53-54, 55, 156, 195-222, 247, 433, 445
perjalanan intelektual, 196-200
tindakan sosial, 200-204
otoritas dan legitimasi, 204-209
etika Protestan, 209-210
birokrasi dan rasionalisasi, 210-212
metodologi verstehen, 53-54, 212-214
Wilson, Ian Douglas, 19
Wundt, Wilhelm, 158

Z

Žižek, Slavoj, 352
Zuboff, Shoshana, 387-388

B. INDEKS KONSEP & ISTILAH

A

Agensi (Agency), 445-447
Aksiologi, 34, 58-59
Alienasi, 139-142
Analisis jaringan, 123
Anomie, 165-167, 189
Aparatus ideologis negara, 318-320
Arena (Field), 318-319

B

Biopolitik, 317
Birokrasi, 210-212

C

Cara produksi (Mode of production), 82, 142-145

D

Dekonstruksi, 320-321
Deskripsi tebal (Thick description), 16, 54, 55-56
Determinisme ekonomi, 52, 143-145
Dialektika, 48-50, 142-143
Differend, 356-357
Diskursus, 302-304, 316-318
Dualitas struktur, 89, 321-323, 446-447

E

Empirisme, 37-38
Epistemologi, 34, 37-53
Epistemologi Selatan, 427-435
Etnografi, 16-17, 55-56
Etnometodologi, 276-278

F

Fakta sosial, 161, 175-177
Falsifiabilitas, 54, 451
Feminisme gelombang kedua, 332-334
Feminisme gelombang ketiga, 334-335
Feminisme gelombang keempat, 335
Fungsionalisme, 253-263, 471-472

G

Globalisasi, 373-392
Grand theory, 81-93

H

Habitus, 317-319, 446-447
Hegemoni, 304-306
Hermeneutika, 16, 52-54

I

Ideologi, 318-320
Ilmu sosial, definisi, 2
Imajinasi sosiologis, 297-299
Interaksionisme simbolik, 271-276
Interpelasi, 319-320
Interseksionalitas, 334-337

K

Kapitalisme pengawasan, 387-388
Kelas sosial, 145-148
Kesadaran kolektif, 161-165, 177-185
Kolonialitas kekuasaan, 428-429
Konstruksi sosial, 18-19
Kekuasaan disipliner, 316-318

M

Materialisme historis, 86-88, 142-145
McDonaldisasi, 325-327, 388-389
Meta-narasi, 355-357
Metodologi kualitatif, 16-17
Metodologi kuantitatif, 15-16
Middle-range theory, 93-110, 263-271, 463-464
Modal budaya, 318-319
Modal ekonomi, 318
Modal sosial, 318, 468-470
Modal simbolik, 318
Modernitas cair, 357-360

O

Ontologi, 33-34, 57-58
Operasionalisasi, 468-470

P

Panoptikon, 316-317, 387-388
Paradigma, 54-57
  interpretivis, 16-18, 55-56
  kritis, 17-18, 56-57
  konstruktivis, 18-19
  positivis, 15-16, 54-55
Performativitas gender, 340-342
Positivisme, 15-16, 47-48, 54-55
Postmodernisme, 351-362

R

Rasionalisasi, 209-212
Refleksivitas, 28
Ruang publik, 302-304

S

Solidaritas mekanik, 161-165
Solidaritas organik, 163-165
Struktur, 445-447
Strukturalisme, 314-321
Strukturasi, 89, 321-323, 446-447

T

Teori kritis, 56-57, 299-304

Teori pilihan rasional, 324
Teori sistem, 253-263
Tindakan komunikatif, 302-304
Tindakan sosial, 200-204

V

Verstehen, 53-54, 212-214

C. INDEKS SUBJEK

D

Dekolonisasi epistemologi, 427-435

F

Feminisme dan teori gender, 329-350

G

Globalisasi dan digitalisasi, 373-392

I

Indonesia, konteks
ilmu sosial di Indonesia, 6-8, 433-435
penelitian sosial, 15-19

M

Mazhab Chicago, 270-271
Mazhab Frankfurt, 299-302

P

Paradigma penelitian, 15-19, 54-59
Postmodernisme, 351-362

T

Teori konflik, 297-313
Teori sosial klasik, 127-222
Teori sosial kontemporer, 297-435

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Dr. H. Gunawan Undang, Drs., M.Si. lahir pada 3 November 1966 di Desa Cikarang, Kecamatan Cisewu, Garut Selatan—sebuah kampung halaman yang kelak membentuk jiwa akademisnya yang sederhana namun gigih. Perjalanan pendidikan dasarnya dimulai dari tanah kelahiran, menempuh jenjang SD, SMP, hingga SMEA (SMK) dengan penuh kesederhanaan namun kaya akan semangat belajar.

Langkah akademisnya berlanjut ke jenjang sarjana di FKIP Universitas Pasundan yang diselesaikan pada 1989, menandai awal dari perjalanan panjang seorang pendidik dan pemikir sosial. Hasrat untuk mendalami ilmu membawanya meraih gelar Magister dari Universitas Padjadjaran pada 2001, dengan Bidang Kajian Utama Ilmu-ilmu Sosial. Puncak pencapaian akademisnya diraih pada 2006, ketika ia berhasil mempertahankan disertasi doktoralnya di universitas yang sama, mengukuhkan posisinya sebagai seorang ilmuwan sosial yang mumpuni.

Perjalanan Profesional: Dari Guru hingga Perintis Pendidikan

Sebelum mengukir namanya sebagai dosen dan akademisi, ia memulai kariernya sebagai guru di berbagai SLTP dan SLTA di Kota Bandung. Dedikasi dan visinya dalam dunia pendidikan mengantarkannya menjadi Kepala Sekolah di SMA Plus Al-Ghifari, Bandung—sebuah institusi yang ia rintis bersama rekan seprofesinya dengan penuh dedikasi dan idealisme.

Transisi dari guru menjadi dosen membuka babak baru dalam kiprah akademisnya. Tahun 1995 menjadi tonggak penting ketika ia merintis STMIK Jabar, diikuti dengan pendirian Universitas Al-Ghifari pada 2002. Perjalanan kelembagaan ini mencapai fase konsolidasi strategis pada 2024, ketika STMIK Jabar diintegrasikan menjadi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Al-Ghifari, memperkuat sinergi akademik dan keberlanjutan institusional.

Memasuki penghujung September 2025, ia terpilih sebagai Ketua Pembina Yayasan Al Ghifari—badan penyelenggara pendidikan yang membawahi jenjang TK/RA, SD, SMP, SMA, SMK Plus Al Ghifari, hingga Universitas Al Ghifari. Pencapaian ini merupakan kulminasi dari perjalanan panjang yang

dimulai sejak 1994, ketika bersama rekan-rekan seprofesinya ia merintis ekosistem pendidikan yang berakar dari wirausaha penerbitan yang dibangun sejak 1989. Karya perdana mereka yang menjadi *success story*, buku *Bunga Rampai Jawa Barat* (1991), diterbitkan oleh Yayasan Wahana Citra Nusantara, Bandung, menandai awal dari jejak intelektual yang terus berkembang.

Jejak Kepemimpinan Akademik

Sepanjang kariernya, Dr. Gunawan Undang telah mengemban berbagai amanah kepemimpinan akademik: Ketua STMIK Jabar, Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Al-Ghifari, Ketua LPPM Universitas Al-Ghifari, dan Ketua STISIP SAINS, Garut Selatan. Saat ini, ia menjadi dosen tetap di Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (MIA UPMI), Medan, sambil tetap aktif mengajar di Universitas Al-Ghifari.

Pengalaman mengajarnya yang luas juga mencakup posisi sebagai Dosen Luar Biasa di berbagai institusi bergengsi: Magister Manajemen Universitas Widyatama, Sekolah Pascasarjana IPI Garut, Magister Ilmu Administrasi UNJANI, dan Magister Ilmu Administrasi STTAMI, Jakarta.

Kontribusi sebagai Tenaga Ahli dan Praktisi

Keahliannya tidak hanya terbatas pada ranah akademis. Dr. Gunawan Undang telah memberikan kontribusi signifikan sebagai Tenaga Ahli di berbagai lembaga strategis: DPD RI, Bappeda Provinsi Jawa Barat, Badan Pengembangan Wilayah Jabar Selatan (BPW Jabsel) Provinsi Jawa Barat, Panitia Seleksi dan Asesor Eselon II dan III, serta sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD), Kementerian Dalam Negeri.

Produktivitas Intelektual dan Karya Akademis

Jejak intelektual penulis tercermin dalam produktivitas menulisnya yang luar biasa. Sejak 1990-an, ia telah menghasilkan lebih dari 20 buku, baik sebagai penulis tunggal maupun kolaborasi dengan sejawat akademisi. Karya-karyanya telah dipublikasikan di berbagai jurnal nasional dan internasional, memperkaya khazanah keilmuan Indonesia.

Karya-karya terbarunya yang monumental meliputi:

1. *Administrasi Keuangan Negara: Kebijakan Anggaran Negara dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah* (2022), Bandung: Galeripadi. ISBN: 978-623-88320-1-9.
2. Buku Monografi *ID-StM Framework & PRACYF: Model Analisis Disparitas Kebijakan Sosial dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah* (2023), Bandung: Unfari Press. ISBN: 978-623-09-5257-9.

Buku *Teori Ilmu Sosial: Klasik dan Modern di Era Digital* yang kini hadir di tangan pembaca merupakan karya yang telah lama dinanti-nantikan. Konsep dan kerangka buku ini telah dirancang sejak ia menyelesaikan studi doktoralnya pada 2006, mencerminkan kematangan pemikiran dan kedalaman riset selama hampir dua dekade. Meskipun target penyelesaiannya pada 2024—sebagai bagian dari komitmen "satu tahun, satu buku"—tertunda karena berbagai dinamika kehidupan akademis, buku ini akhirnya terbit pada awal 2025 dengan substansi yang semakin matang dan komprehensif.

Untuk memenuhi komitmennya, pada penghujung 2025, insya Allah akan terbit pula karya monumental lainnya: *Administrasi Publik: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara*, yang saat ini tengah dalam proses editing akhir. Karya ini diharapkan melengkapi kontribusinya dalam mengembangkan literatur ilmu sosial dan administrasi publik berbahasa Indonesia yang berkualitas tinggi. Sementara itu, buku *Metode Penelitian Sosial di Era Digital* - yang sudah lebih dari 5 tahun ia siapkan – masih berupa naskah mentah. Demikian pula buku *Kebijakan Sosial di Era Digital*, dll. masih tertunda. Mudah-mudahan beberapa buku tersebut bisa terbit setelah 2025.

Dedikasi, integritas, dan produktivitas Dr. Gunawan Undang mencerminkan sosok akademisi sejati yang tidak hanya mengajar, tetapi juga membangun institusi, membina generasi, dan mewariskan pemikiran melalui karya-karya yang akan terus memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat Indonesia.

Buku ini merupakan “Buku Wakaf” ketiga penulis yang didedikasikan untuk siapa saja yang memerlukan. Pertama, versi pdf digital ***open access*** dapat diunduh secara gratis melalui website Unfari Press atau platform digital lainnya. Kedua, **versi cetak gratis** memungkinkan untuk dicetak,

disebarluaskan, difotokopi, dan didistribusikan ulang oleh siapa saja tanpa memerlukan izin khusus, selama tidak bertujuan komersial dan tetap mencantumkan atribusi Unfari Press dan penulis. Ketiga, memungkinkan **kerjasama dengan *platform* edukasi digital** untuk memastikan buku ini dapat diintegrasikan dalam berbagai *learning management systems* dan dapat diakses oleh mahasiswa di seluruh Indonesia tanpa biaya.

Dr. H. Gunawan Undang, M.Si.

TEORI ILMU SOSIAL

Klasik dan Modern di Era Digital

Teori Ilmu Sosial: Klasik dan Modern di Era Digital menghadirkan panorama komprehensif pemikiran sosial—dari Marx, Durkheim, Weber hingga perspektif kontemporer globalisasi dan transformasi digital. Lebih dari inventarisasi teoretis, buku ini mendialogkan teori global dengan realitas lokal Indonesia melalui ilustrasi konkret: gotong royong, Program Keluarga Harapan, hingga dinamika media sosial. Ditulis dengan bahasa aksesibel tanpa mengorbankan kedalaman akademis, dilengkapi referensi komprehensif termasuk sumber-sumber Indonesia. Karya monumental ini menjadi jembatan epistemologis esensial bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi untuk memahami kompleksitas masyarakat abad ke-21 dengan kerangka teoretis kokoh yang sensitif konteks lokal sambil terhubung diskursus global di era digital.

UNFARI PRESS